PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 18 TAHUN 2026

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG

2027









TULANG BAWANG

SAI BUMI NENGAH NYAPPUR

PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendataan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah.
12. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 berpedoman pada visi, misi dan program Bupati yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
    b. Prioritas pembangunan daerah;
    c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
    d. Program Strategis Nasional; dan
    e. Kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan nasional Tahun 2026.
(3) RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Lampung.
(4) Penyusunan RKPD Tahun 2027 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, digunakan sebagai bahan pedoman penyusunan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan bahan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2027.

Pasal 4

(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja dan program yang dituangkan dalam RKPD.

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

(1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI TULANG BAWANG,

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH,

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2026 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
TULANG BAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG

TAHUN 2027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4 Maksud Dan Tujuan I-12

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-12

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-20

2.1.1.4 Kondisi Demografi II-23

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-34

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-34

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-58

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-85

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-88

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar II-101

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar II-196

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-282

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-316

2.1.4.1 Fokus Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi II-317

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-341

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-354

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-360

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-366

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-424

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-425

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-428

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-16

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-17

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-21

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah III-27

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Nasional IV-2

4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung IV-73

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang IV-90

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 ..... IV-128

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-139

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. VI-1

6.1 Indikator Kinerja Utama VI-2

6.2 Indikator Kinerja Daerah VI-5

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi, Luas Wilayah dan Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang II-3

Tabel 2. 2 Panjang Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang II-8

Tabel 2. 3 Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-9

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-35

Tabel 2. 5 PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (Dalam Milyar Rupiah) II-39

Tabel 2. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulang Bawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2025 ..... II-42

Tabel 2. 7 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-45

Tabel 2. 8 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-72

Tabel 2. 9 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama Untuk Minum di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-74

Tabel 2. 10 Perkembangan Timbulan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021–2025 ..... II-78

Tabel 2. 11 Data Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-86

Tabel 2. 12 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ... II-87

Tabel 2. 13 Nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025 ..... II-99

Tabel 2. 14 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, dan 2024/2025 .... II-112

Tabel 2. 15 Angka Melanjutkan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-113

Tabel 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-117

Tabel 2. 17 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-121

Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-126

Tabel 2. 19 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-128

Tabel 2. 20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-129

Tabel 2. 21 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-131

Tabel 2. 22 Perkembangan Prevalensi Stunting di Tingkat Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-133

Tabel 2. 23 Rasio Posyandu Per 1.000 Balita di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-135

Tabel 2. 24 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-136

Tabel 2. 25 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-138

Tabel 2. 26 Kelas Rumah Sakit di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ..... II-140

Tabel 2. 27 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-141

Tabel 2. 28 Jumlah Dokter dan Tenaga Medis per 1.000 penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-143

Tabel 2. 29 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-147

Tabel 2. 30 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021-2025 ..... II-153

Tabel 2. 31 Persentase Jalan Kondisi Mantap di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-157

Tabel 2. 32 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-159

Tabel 2. 33 Kriteria Jaringan Irigasi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-160

Tabel 2. 34 Persentase Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-162

Tabel 2. 35 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-163

Tabel 2. 36 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025..... II-164

Tabel 2. 37 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-166

Tabel 2. 38 Rumah Tidak Layak Huni (unit) Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025 ..... II-167

Tabel 2. 39 Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-170

Tabel 2. 40 Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-174

Tabel 2. 41 Target dan Capaian Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Aman Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ..... II-176

Tabel 2. 42 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-177

Tabel 2. 43 Distribusi Akses Layanan SPAM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-178

Tabel 2. 44 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025 ..... II-181

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025 ..... II-183

Tabel 2. 46 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-185

Tabel 2. 47 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-186

Tabel 2. 48 Target dan Capaian Indikator SPM Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025 ..... II-188

Tabel 2. 49 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-191

Tabel 2. 50 Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-195

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2025 ..... II-196

Tabel 2. 52 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-198

Tabel 2. 53 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-200

Tabel 2. 54 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025.... II-202

Tabel 2. 55 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-204

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2025 ..... II-206

Tabel 2. 57 Pemenuhan Energi dan Protein per Kapita per Hari Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-211

Tabel 2. 58 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-217

Tabel 2. 59 Kampung Rawan Pangan per Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-218

Tabel 2. 60 Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2024 ..... II-220

Tabel 2. 61 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-223

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-230

Tabel 2. 63 Rekapitulasi Layanan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-231

Tabel 2. 64 Perkembangan Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-236

Tabel 2. 65 Jumlah BUMDes per Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-238

Tabel 2. 66 Kondisi BUMDesa Tahun 2021-2025 ..... II-239

Tabel 2. 67 Persentase BUMDesa yang telah Bersertifikasi Badan Hukum Tahun 2021-2025 ..... II-241

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025. II-242

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025 ..... II-244

Tabel 2. 70 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-246

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-248

Tabel 2. 72 Sarana Transportasi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-249

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2025..... II-251

Tabel 2. 74 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-254

Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2021-2025 ..... II-259

Tabel 2. 76 Perolehan Medali Kontingen Tulang Bawang Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi..... II-263

Tabel 2. 77 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-265

Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-268

Tabel 2. 79 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-271

Tabel 2. 80 Daftar Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Tulang Bawang II-272

Tabel 2. 81 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-275

Tabel 2. 82 Jumlah Buku Perpustakaan Daerah Berdasarkan Judul/Kelompok Buku Tahun 2021-2025 ..... II-277

Tabel 2. 83 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-278

Tabel 2. 84 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-280

Tabel 2. 85 SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-282

Tabel 2. 86 Produksi Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-283

Tabel 2. 87 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-289

Tabel 2. 88 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-291

Tabel 2. 89 Luas Lahan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-294

Tabel 2. 90 Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-295

Tabel 2. 91 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-296

Tabel 2. 92 Produksi Hortikultura Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-298

Tabel 2. 93 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-300

Tabel 2. 94 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-301

Tabel 2. 95 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-302

Tabel 2. 96 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-303

Tabel 2. 97 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-306

Tabel 2. 98 Data Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang II-307

Tabel 2. 99 Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-311

Tabel 2. 100 Jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Besar-Menengah (IBM) per Kecamatan Tahun 2021-2025..... II-313

Tabel 2. 101 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-321

Tabel 2. 102 Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-323

Tabel 2. 103 Jumlah Wirausaha, Angkatan Kerja dan Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-325

Tabel 2. 104 Skor Komponen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022-2025..... II-334

Tabel 2. 105 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2024 ..... II-337

Tabel 2. 106 PDRB Kabupaten Tulang Bawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (miliar rupiah) II-339

Tabel 2. 107 Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-344

Tabel 2. 108 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-348

Tabel 2. 109 Persentase Kampung Mandiri di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-353

Tabel 2. 110 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-363

Tabel 2. 111 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-365

Tabel 2.112 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Tulang Bawang II-368

Tabel 2.113 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang Telah Dilaksanakan II-423

Tabel 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang (Milyar Rupiah) Tahun 2025 . III-11

Tabel 3. 2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang (Persen) Tahun 2025 ..... III-12

Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang (Persen) III-13

Tabel 3. 4 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang (juta rupiah) Tahun 2021-2025 ..... III-14

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024-2028 ..... III-20

Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024-2028 ..... III-25

Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024–2028 ..... III-29

Tabel 4. 1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 ..... IV-4

Tabel 4. 2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) dan Program Prioritas Nasional IV-7

Tabel 4. 3 Dukungan Daerah terhadap Outcome Prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota Tahun 2027 ..... IV-23

Tabel 4. 4 Dukungan Daerah terhadap Proyek Strategis Nasional IV-41

Tabel 4. 5 Dukungan Daerah terhadap Tematik Pembangunan Nasional IV-52

Tabel 4. 6 Dukungan Program pada Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025-2029 ..... IV-57

Tabel 4. 7 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029 ..... IV-62

Tabel 4. 8 Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang yang Mendukung Ketercapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung..... IV-79

Tabel 4. 9 Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang yang Mendukung Ketercapaian Program Unggulan Daerah Provinsi Lampung IV-83

Tabel 4. 10 Sasaran Indikator Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 ..... IV-89

Tabel 4. 11 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... IV-93

Tabel 4. 12 Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan IV-95

Tabel 4. 13 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tulang Bawang IV-108

Tabel 4. 14 Rencana Dukungan Sub Kegiatan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tulang Bawang IV-113

Tabel 4. 15 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan IV-117

Tabel 4. 16 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan..... IV-118

Tabel 4. 17 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-123

Tabel 4. 18 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... IV-124

Tabel 4. 19 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... IV-125

Tabel 4. 20 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial..... IV-126

Tabel 4. 21 Dukungan Program dan Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Kinerja Sanitasi di Kabupaten Tulang Bawang..... IV-127

Tabel 4. 22 Skenario Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 ..... IV-128

Tabel 4. 23 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2027..... IV-135

Tabel 6. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah..... VI-2

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 ..... VI-4

Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 ..... VI-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Skema Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah. I-11

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang II-2

Gambar 2. 2 Rasio Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Total Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang II-4

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang II-6

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tulang Bawang II-7

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang II-11

Gambar 2. 6 Peta Risiko Bencana Banjir II-21

Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana Kabupaten Tulang Bawang..... II-22

Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (jiwa) II-24

Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang menurut Struktur Usia/Kelompok Umur Tahun 2025 .. II-25

Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kelompok Umur Tahun 2025..... II-27

Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-29

Gambar 2. 12 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 (Jiwa/km²)..... II-30

Gambar 2. 13 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025..... II-32

Gambar 2. 14 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 (Persen)..... II-38

Gambar 2. 15 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam juta rupiah) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-40

Gambar 2. 16 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) Kabupaten Tulang

Bawang, Provinsi Lampung, dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-41

Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2021-2025..... II-46

Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-47

Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-49

Gambar 2. 20 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-50

Gambar 2. 21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-52

Gambar 2. 22 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-54

Gambar 2. 23 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-56

Gambar 2. 24 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-59

Gambar 2. 25 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025 di Kabupaten Tulang Bawang..... II-61

Gambar 2. 26 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025..... II-64

Gambar 2. 27 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Pravelence of Uncerourihment)* (%) Tahun 2021-2025 .... II-67

Gambar 2. 28 Konsumsi Listrik per Kapita (KWh) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-69

Gambar 2. 29 Jumlah Tenaga Listrik yang Terjual di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-70

Gambar 2. 30 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-76

Gambar 2. 31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-80

Gambar 2. 32 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-82

Gambar 2. 33 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-84

Gambar 2. 34 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-91

Gambar 2. 35 Nilai SAKIP Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-93

Gambar 2. 36 Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025 ..... II-95

Gambar 2. 37 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-97

Gambar 2. 38 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)... II-104

Gambar 2. 39 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)..... II-106

Gambar 2. 40 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)..... II-108

Gambar 2. 41 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)..... II-110

Gambar 2. 42 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-115

Gambar 2. 43 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025..... II-119

Gambar 2. 44 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-124

Gambar 2. 45 Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Jenis Penyakit di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-144

Gambar 2. 46 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-146

Gambar 2. 47 Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022–2025..... II-150

Gambar 2. 48 Cakupan Keaktifan JKN Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025 ..... II-152

Gambar 2. 49 Ketersediaan Pangan Utama (ton/tahun) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-209

Gambar 2. 50 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-213

Gambar 2. 51 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-216

Gambar 2. 52 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-224

Gambar 2. 53 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-226

Gambar 2. 54 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-228

Gambar 2. 55 Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-235

Gambar 2. 56 Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-256

Gambar 2. 57 Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro di Kabupaten Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-257

Gambar 2. 58 Tingkat Gemar Membaca Masyarakat kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025..... II-274

Gambar 2. 59 Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-287

Gambar 2. 60 Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-319

Gambar 2. 61 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-328

Gambar 2. 62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025..... II-330

Gambar 2. 63 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-332

Gambar 2. 64 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung ahun 2022-2025 ..... II-335

Gambar 2. 65 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 (Km) II-346

Gambar 2. 66 Perkembangan Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025..... II-351

Gambar 2. 67 Angka Kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 ..... II-356

Gambar 2. 68 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-359

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2025..... III-4

Gambar 3. 2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional..... III-7

Gambar 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2025..... III-9

BAB I
PENDAHULUAN





BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam kerangka tersebut, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berjenjang, terpadu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Keterpaduan perencanaan ini diperlukan untuk menjamin konsistensi arah kebijakan, sinkronisasi program, serta efektivitas pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

Penyelenggaraan pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang disusun secara sistematis, terukur, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta perubahan lingkungan strategis. Perencanaan pembangunan berfungsi sebagai instrumen pengendali dan pengarah dalam pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal, sekaligus sebagai dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di seluruh bidang kehidupan. Perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, penguatan struktur ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan data, informasi, hasil evaluasi pembangunan, serta dukungan riset dan inovasi menjadi

landasan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan perangkat daerah. RKPD berfungsi sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi acuan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung, RKPD Provinsi Lampung, serta RPJMD Kabupaten Tulang Bawang.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 serta bagian dari tahapan implementasi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. RKPD ini disusun untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, konsistensi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, serta sebagai instrumen evaluasi kinerja pembangunan daerah secara tahunan.

Substansi RKPD mencakup kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang disertai dengan target kinerja. Keseluruhan substansi tersebut disusun untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah, serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola pembangunan daerah yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan rancangan awal, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta perpaduan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Proses tersebut memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan partisipatif, serta sinergi kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 diarahkan pada tema: **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang yang Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah, Investasi Inklusif, dan Industri Berbasis Potensi Lokal".** Tema tersebut menjadi dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2);

28. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Sawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 Nomor 02).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah disusun untuk menjabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029. Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen operasional tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD tersebut.

RKPD tidak disusun secara terpisah, melainkan selaras, terpadu, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Di tingkat nasional, RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, untuk menjaga konsistensi arah pembangunan antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan. Di sisi lain, dokumen teknokratik, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sumber penting dalam proses perumusan RKPD, agar rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas fiskal daerah.

Dengan keterpaduan tersebut, RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi pedoman yang responsif, adaptif, dan akuntabel dalam mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

1. Hubungan RKPD dengan RPJMD

   RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari RPJMD. RKPD memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, serta target indikator kinerja tahunan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD.

   RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029, yang memuat visi pembangunan daerah jangka menengah, yaitu "Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, penyusunan RKPD juga mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan jangka panjang daerah.

   Dengan demikian, RKPD berperan penting sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.

2. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

   RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). RKPD menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja PD, agar program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

   Dalam proses penyusunannya, RKPD mengakomodasi:

   - Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya,
   - Usulan masyarakat melalui Musrenbang,
   - Pokok-pokok pikiran DPRD, serta

- Rancangan awal Renja dari masing-masing perangkat daerah.

Seluruh masukan tersebut dikompilasi, dianalisis, dan diselaraskan untuk membentuk prioritas pembangunan tahunan daerah. Selanjutnya, perangkat daerah menggunakan RKPD sebagai rujukan dalam menyempurnakan Renja PD masing-masing, baik dari sisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, maupun kebutuhan anggaran.

Melalui proses yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*, RKPD berfungsi sebagai dokumen pemersatu arah pembangunan lintas sektor dan lintas perangkat daerah, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

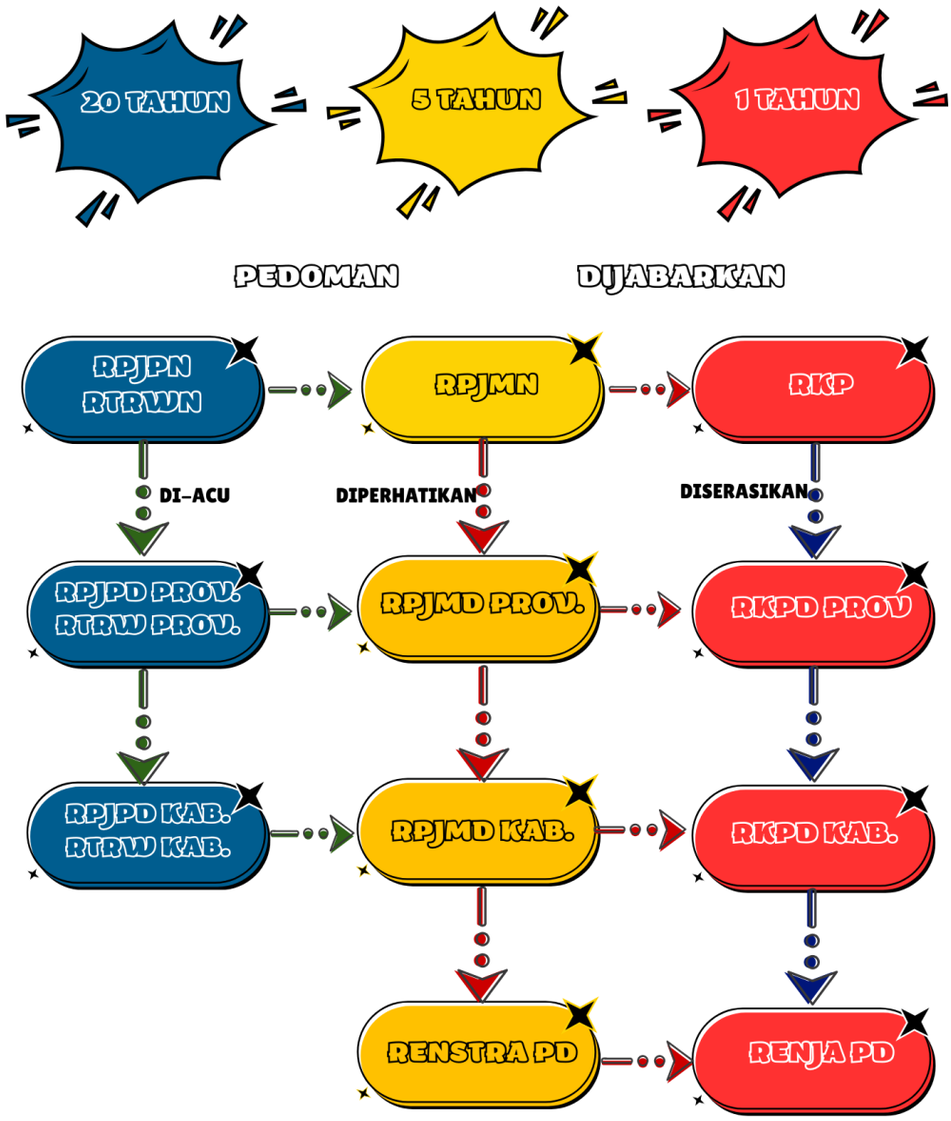
3. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Lampung dan RKP (Nasional)

Penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 juga memperhatikan keterkaitan dengan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027, guna memastikan keterpaduan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027. Hal ini penting untuk menjamin sinergi antara program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan agenda pembangunan provinsi, khususnya dalam hal pengembangan wilayah, peningkatan konektivitas infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.

Selain itu, RKPD Kabupaten Tulang Bawang juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN 2025-2029. RKP menjadi acuan nasional dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang di daerah perlu selaras dengan prioritas pembangunan nasional, baik dari sisi tema pembangunan, arah kebijakan, maupun sasaran strategis.

Gambar 1. 1 Skema Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah



Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 juga memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral, salah satunya Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). SSK merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, target, program, kegiatan, serta indikasi pendanaan pembangunan sanitasi daerah yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Keterpaduan antara RKPD dan SSK diperlukan untuk memastikan bahwa prioritas dan target pembangunan sanitasi dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah terkait. Dengan demikian, pembangunan sektor sanitasi dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman, derajat kesehatan masyarakat, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKPD berfungsi menjabarkan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2029, dengan mengacu pada visi “Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”
Secara khusus, penyusunan RKPD ini dimaksudkan untuk:

a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup masyarakat;

b. Mewujudkan sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, serta antar sektor pembangunan di wilayah Tulang Bawang;
c. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
d. Menjadi instrumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Adapun penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 bertujuan untuk menyediakan arah, pedoman, dan kerangka kerja pembangunan tahunan dalam rangka mendukung pencapaian visi RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tujuan tersebut meliputi:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027;
3. Memberikan panduan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan; dan
5. Menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, berkualitas, dan akuntabel.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Secara umum, dokumen RKPD Kabupaten Tulang Bawang disusun secara sistematis dalam tujuh bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami secara utuh.
Isi dari Bab I meliputi:

1.1. Latar Belakang

Menguraikan pengertian ringkas tentang RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2027 dalam kerangka RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan keterhubungannya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lain, seperti RPJMD/RPD, RKP, program strategis nasional, serta RKPD Provinsi Lampung dan RPJMD kabupaten/kota sekitar.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud serta tujuan penyusunan RKPD bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

1.5. Sistematika RKPD

Menjelaskan struktur dan sistematika penulisan dokumen RKPD yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen ini.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan capaian pembangunan daerah. Ruang lingkup pembahasan mencakup:

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Sub-bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun sebelumnya berdasarkan capaian kinerja RKPD dan realisasi RPJMD. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh urusan pemerintahan daerah, meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja, baik keluaran maupun hasil.

Hasil evaluasi disajikan dalam Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD sebagai dasar perumusan prioritas pembangunan tahun rencana.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat rumusan umum permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan prioritas daerah, layanan dasar, serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

Meliputi: Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan, harapan, dan komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan pusat pemerintahan berlokasi di Kota Menggala. Penetapan Kabupaten Tulang Bawang sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam lingkup Provinsi Lampung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus pada tanggal 20 Maret 1997.

Selanjutnya, struktur wilayah Kabupaten Tulang Bawang mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Melalui kedua undang-undang tersebut, terbentuklah dua daerah otonomi baru sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang selaku kabupaten induk.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan landasan penting dalam memahami karakteristik suatu wilayah. Keduanya saling berkaitan, karena kondisi geografis akan memengaruhi pola persebaran penduduk, aktivitas ekonomi, serta dinamika sosial yang terjadi di dalamnya.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan aspek mendasar dalam kajian perencanaan dan analisis ruang. Pemahaman terhadap karakteristik ini membantu menilai potensi, keterbatasan, serta arah pengembangan suatu daerah.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

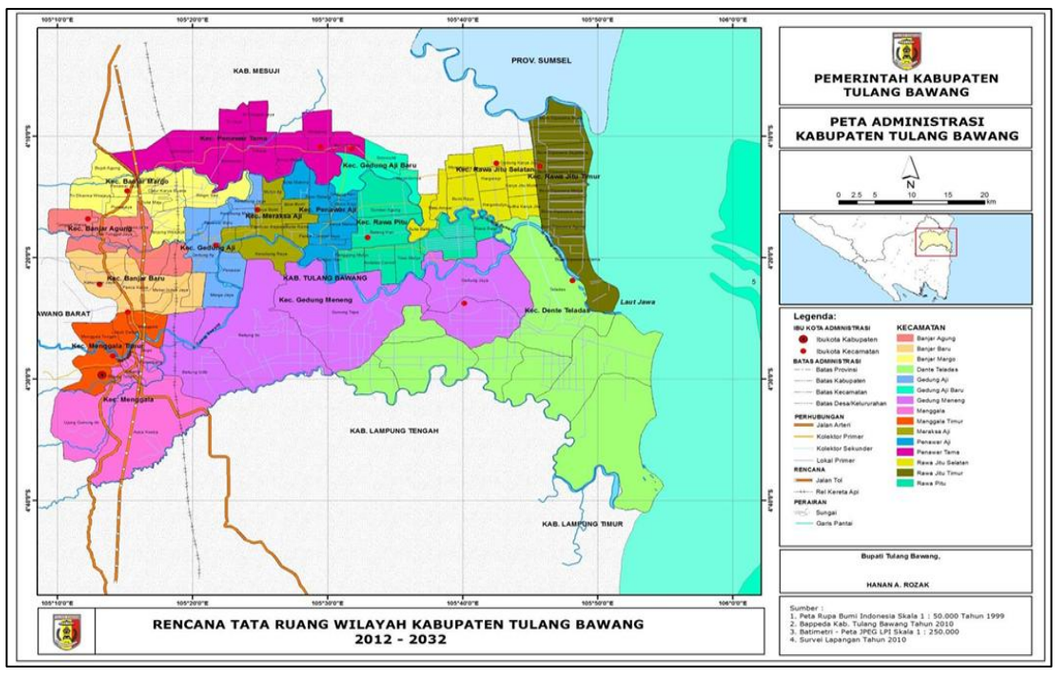
Luas dan batas wilayah administrasi merupakan aspek mendasar dalam memahami karakter suatu daerah. Informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai data teknis, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta penentuan kebijakan wilayah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang, yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji;
b. Sebelah Timur dengan Laut Jawa;
c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, dan;
d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar Agung, Banjar Margo, Gedung Aji, Penawar Aji, Meraksa Aji, Menggala, Penawartama, Rawajitu Selatan, Gedung Meneng, Rawajitu Timur, Rawa Pitu, Gedung Aji Baru, Dente Teladas, Banjar Baru, dan Menggala Timur.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

Berdasarkan Surat Kapus PPBW Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor B3.11/PBW BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022

tentang Penghitungan Luas Wilayah Definitif Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 3.116,062 km2 atau ± 9,28 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung.

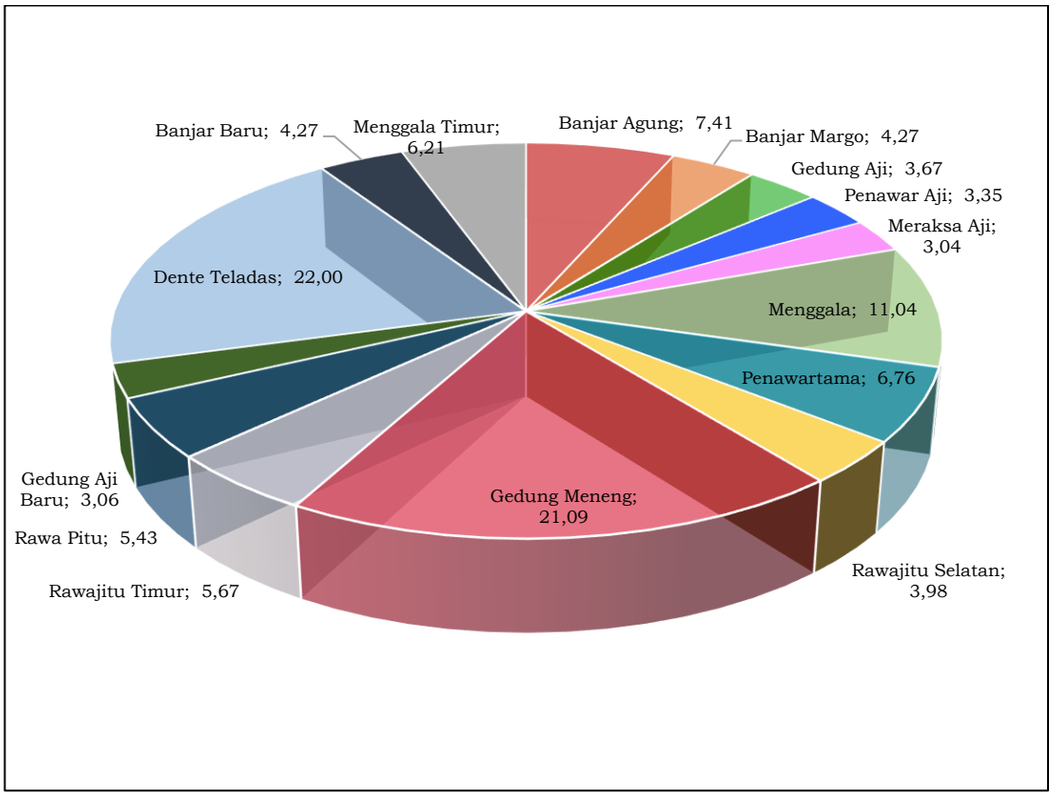
Kabupaten Tulang Bawang secara administratif terbagi menjadi 15 Kecamatan, 147 kampung dan 4 kelurahan. Kecamatan Dente Teladas merupakan kecamatan terluas dengan luas 685,65 km^2 atau 22,00 persen dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Meraksa Aji dengan luas 94,71 km2 atau 3,04 persen dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi, Luas Wilayah dan Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang

NO	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (Km^2)	RASIO TERHADAP LUAS KABUPATEN	JUMLAH KAMPUNG/ KELURAHAN	IBUKOTA
1	Banjar Agung	230,88	7,41	11	Banjar Agung
2	Banjar Margo	132,92	4,27	12	Agung Dalem
3	Gedung Aji	114,47	3,67	10	Gedung Aji
4	Penawar Aji	104,45	3,35	9	Gedung Rejo Sakti
5	Meraksa Aji	94,71	3,04	8	Panduan Rajawali
6	Menggala	344,00	11,04	9	Ujung Gunung
7	Penawartama	210,53	6,76	14	Bogatama
8	Rawajitu Selatan	123,94	3,98	9	Medasari
9	Gedung Meneng	657,07	21,09	11	Gedung Meneng
10	Rawajitu Timur	176,65	5,67	8	Bumi Dipasena Mulya
11	Rawa Pitu	169,18	5,43	9	Batanghari
12	Gedung Aji Baru	95,36	3,06	9	Sidomukti
13	Dente Teladas	685,65	22,00	12	Teladas
14	Banjar Baru	132,95	4,27	10	Kahuripan Jaya
15	Menggala Timur	193,53	6,21	10	Lebuh Dalem

Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2025

Gambar 2. 2 Rasio Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Total Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2025 (diolah)

Distribusi luas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mencerminkan karakter geografis dan potensi ruang yang berbeda-beda di setiap kawasan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2025, dua kecamatan menonjol sebagai wilayah dengan cakupan geografis terbesar, yaitu Dente Teladas (22,00%) dan Gedung Meneng (21,09%). Kedua kecamatan ini secara kumulatif mencakup lebih dari 43% total luas kabupaten, menandakan dominasi spasial yang penting dalam konteks pengelolaan sumber daya dan perencanaan wilayah.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang terletak antara 04°08' hingga 04°41' Lintang Selatan dan 105°09' hingga 105°55' Bujur Timur, yang terletak di bagian hilir dari dua sungai besar yaitu Way Mesuji dan Way Tulang Bawang dan bermuara di Laut Jawa yang berada di bagian timur wilayah Tulang Bawang. Mengingat letaknya yang berada di antara 0 - 10° Lintang Selatan maka Kabupaten Tulang

Bawang seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia juga merupakan daerah beriklim tropis.

c. Topografi

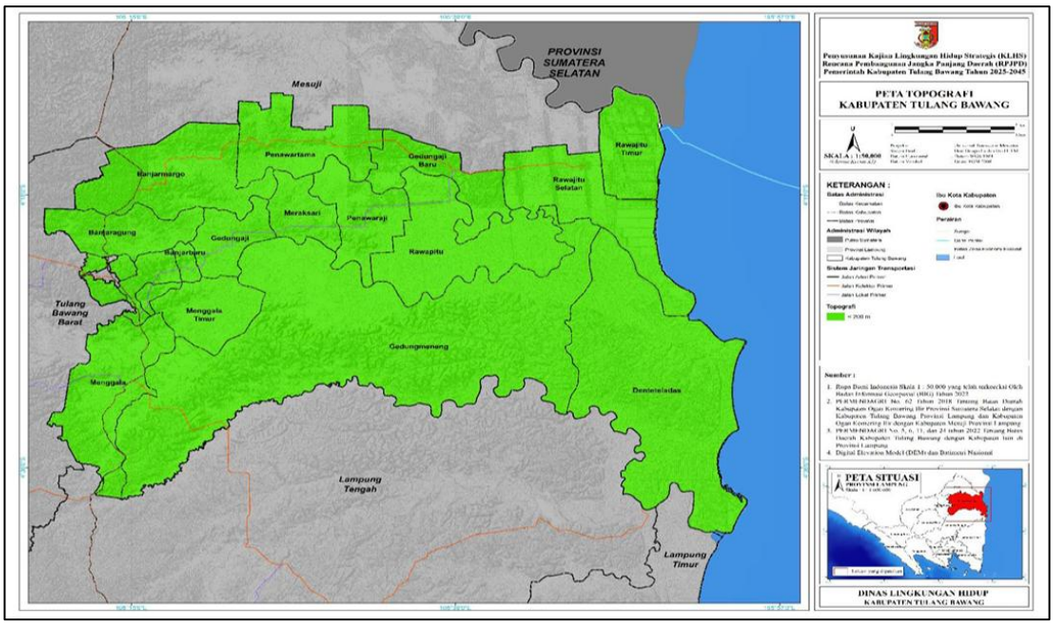
Topografi merupakan gambaran mengenai bentuk permukaan bumi di suatu wilayah, yang mencakup kondisi ketinggian, kemiringan lahan, serta variasi bentang alam seperti dataran, perbukitan, pegunungan, dan daerah pesisir. Aspek ini menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan karena berpengaruh langsung terhadap pola pemanfaatan ruang, aktivitas ekonomi, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana.

Secara topografi, Kabupaten Tulang Bawang dapat dibagi menjadi 4 (empat) daerah yaitu:

1) Daerah dataran (landai), yang merupakan daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang, berada pada kemiringan antar 15%-30% yang dimanfaatkan area pertanian, perkebunan dan cadangan pengembangan transmigrasi.
2) Daerah rawa, terdapat di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0-1 m yang merupakan muara dari Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Rawa-rawa tersebut terdapat di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan dan Kecamatan Dente Teladas. Daerah-daerah tersebut merupakan areal yang cukup produktif untuk pengembangan budidaya tambak dan perikanan laut.
3) Daerah *River Basin*, Terdapat 2 *River Basin* yang utama yaitu *River Basin* Tulang Bawang dan *River Basin* sungai-sungai kecil lainnya. Daerah ini berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Pada areal *River Basin* Way Tulang Bawang dengan anak-anak sungainya membentuk pola aliran *dendritic*. Daerah ini memiliki luas 10.150 Km^2 dengan panjang 753 Km yang digunakan untuk pengembangan tambak udang.
4) Daerah *alluvial*, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down steem*) dari sungai-sungai besar yaitu Way

Tulang Bawang dan Way Mesuji yang dimanfaatkan untuk pelabuhan dan areal persawahan pasang surut.

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045

d. Geologi

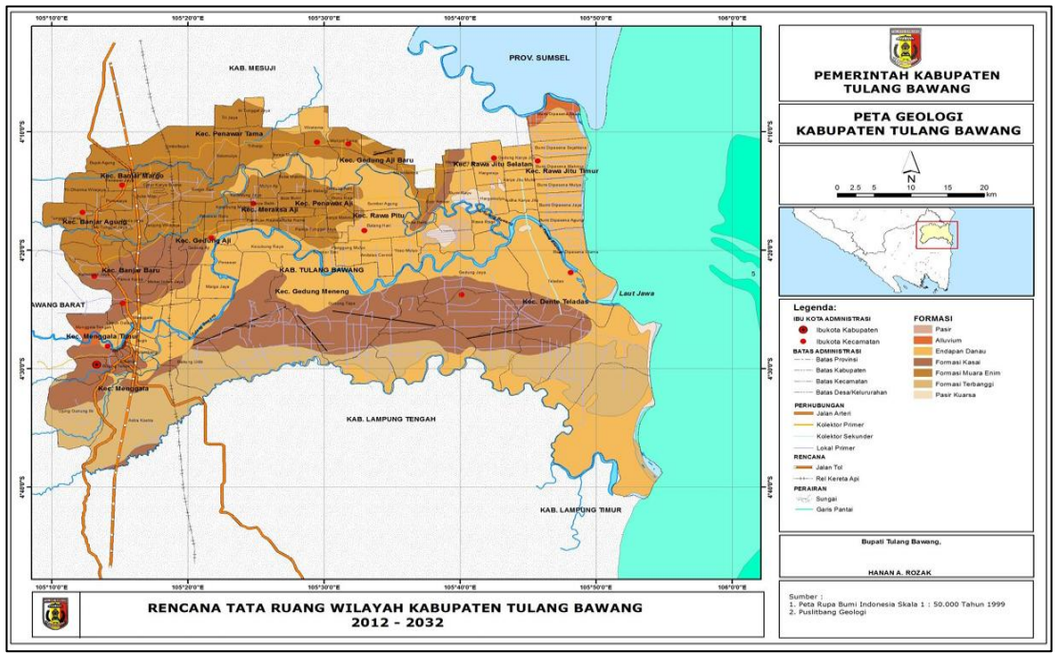
Berdasarkan peta Geologi Lembar Menggala, 1985 (Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, P3G, Bandung), diketahui wilayah Tulang Bawang secara geologis tersusun oleh batu-batuan dari berbagai unsur, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, diantaranya adalah:

1. Endapan Rawa (Qs) : terutama terdiri material lumpur, lanau, dan pasir. Endapan rawa ini dijumpai di sepanjang pantai timur, kiri kanan daerah aliran Way Tulang Bawang. Secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan, Gedung Meneng dan sekitar Penawar Tama;
2. Endapan Aluvial (Qa) : terdiri dari material kerakal, kerikil, pasir, lempung dan gambut. Penyebaran endapan aluvial ini terutama terdapat di daerah dataran dan di sekitar aliran sungai;
3. Pasir Kwarsa (Qak) : Pasir kasar kerikilan sampai sedang, lepas, penyusun dominan mineral kwarsa. Penyebarannya setempat-setempat yaitu sekitar Gedung Jaya, Rawa Ragil, Hargo Mulyo,

Bumiratu wilayah Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas sekitar aliran Way Palembang anak sungai Way Seputih;

4. Formasi Terbanggi (Qpt): terdiri dari batu pasir dengan sisipan batu lempung. Formasi batuan ini diantaranya ditemui di sebagian wilayah Gedung Meneng dan Rawajitu Selatan;
5. Formasi Kasai (Qtk) : terdiri dari tuf, batu lempung tufaan, batu lempung, batu pasir dan konglomerat. Formasi ini ditemui setempat-setempat dengan penyebaran yang luas, disekitar wilayah Gedung Aji, Menggala, Penawar Tama, dan Banjar Agung;
6. Formasi Muara Enim (Tmpm) : terdiri dari perselingan batu lempung pasiran dan batu lanau, tufaan dengan sisipan batu pasir tufaan, dan batu lempung hitam. Terutama dijumpai dibagian utara wilayah Kabupaten Tulang Bawang sekitar Penawar Tama, Banjar Margo dan Banjar Agung.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

Secara garis besar tanah di wilayah Tulang Bawang dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis tanah (*Masterplan* Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang, 2008), yaitu : *Dystropepts, haplodux, hydraquents,*

kanha pludults, sulfaquents, sulfihemists, tropaquents, tropaqueps dan *tropop samment.*

e. Hidrologi

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi yang tinggi untuk perkembangan sektor pertanian sebab sebagian besar sungai-sungai yang mengalir dari barat ke timur berpotensi untuk pengembangan irigasi, sungai-sungai yang dimaksud adalah Way Tulang Bawang. Way Tulang Bawang merupakan sungai yang membelah dari barat ke timur di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dengan panjang 136 Km dan daerah alir 1.285 km^2.

Secara umum, kondisi sistem hidrologi di suatu daerah dapat ditinjau dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi pegunungan/perbukitan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara kesungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal.

Tabel 2. 2 Panjang Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang

NO.	NAMA DAS	PANJANG (KM)	LUAS (HA)
I	**Way Tulang Bawang**	**46,00**	**934.400,00**
1	Way Kiri	20,00	125.400,00
2	Way Rarem	28,00	9.700,00
3	Way Abung	22,00	17.800,00
4	Way Sabuk	4,00	17.100,00
5	Way Kanan	59,00	167.600,00
6	Way Besai	89,00	27.200,00
7	Way Umpu	46,00	5.300,00
8	Way Pisang	5,00	20.500,00
9	Way Giham	18,00	50.400,00
10	Way Neki	10,00	21.200,00
11	Way Tahmi	24,00	22.700,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

f. Klimatologi

Kabupaten Tulang Bawang beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun, temperatur rata-rata 31°C. Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah amat basah, dengan perbandingan devisit air 0-1,5 bulan. Kenyataan ini menunjukan bahwa budidaya sawah dengan harapan produksi sedang atau kurang optimal, atau apabila diusahakan secara luas memerlukan usaha dan pertimbangan ketat dalam menentukan jadwal tanamannya. Guna mendapatkan keandalan dalam budidaya sawah perlu dikembangkan jenis padi lokal dengan suplai air berasal dari tadah hujan.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah yang mengalami siklus musiman dengan dominasi kondisi basah dimana bulan Desember merupakan bulan terbasah di Kabupaten Tulang Bawang. Daerah basah terdapat di bagian Barat atau hulu sungai, sedangkan daerah yang kering terdapat di bagian Timur mendekati pantai. Kondisi topografi Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya hamparan rawa di daerah sepanjang aliran sungai sebelah hulu yang mengindikasikan adanya sistem drainase alam yang kurang baik secara permanen.

Tabel 2. 3 Curah Hujan dan Hari Hujan per Bulan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Bulan	Rata-rata Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	282,9	312,7	357,9	301,0	310	22	20	21	20	22
Februari	280,5	256,4	211,7	264,0	210,5	19	18	19	19	14
Maret	439,3	346,5	240,6	314,0	203	22	21	21	20	11
April	230,2	178,8	147,9	192,0	409	7	9	11	11	20
Mei	138,8	211,2	219,4	200,0	192,4	13	12	12	13	14
Juni	65,1	74,1	76,1	85,0	106	9	10	9	10	8
Juli	14,3	99,2	102,5	98,0	135,5	6	7	7	9	13

Bulan	Rata-rata Curah Hujan (mm3)					Hari Hujan				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Agustus	50,8	39,3	7,8	64,0	222,5	7	5	2	6	17
September	156,8	87,3	2,0	95,0	125	14	4	1	8	11
Oktober	59,6	30,5	4,0	83,0	223,5	13	8	2	10	18
November	236,6	183,4	73,8	183,0	446	18	12	11	14	22
Desember	351,9	128,9	118,9	254,0	293	20	14	12	17	20

Sumber: Prakiraan Curah Hujan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Lampung, 2026 (diolah)

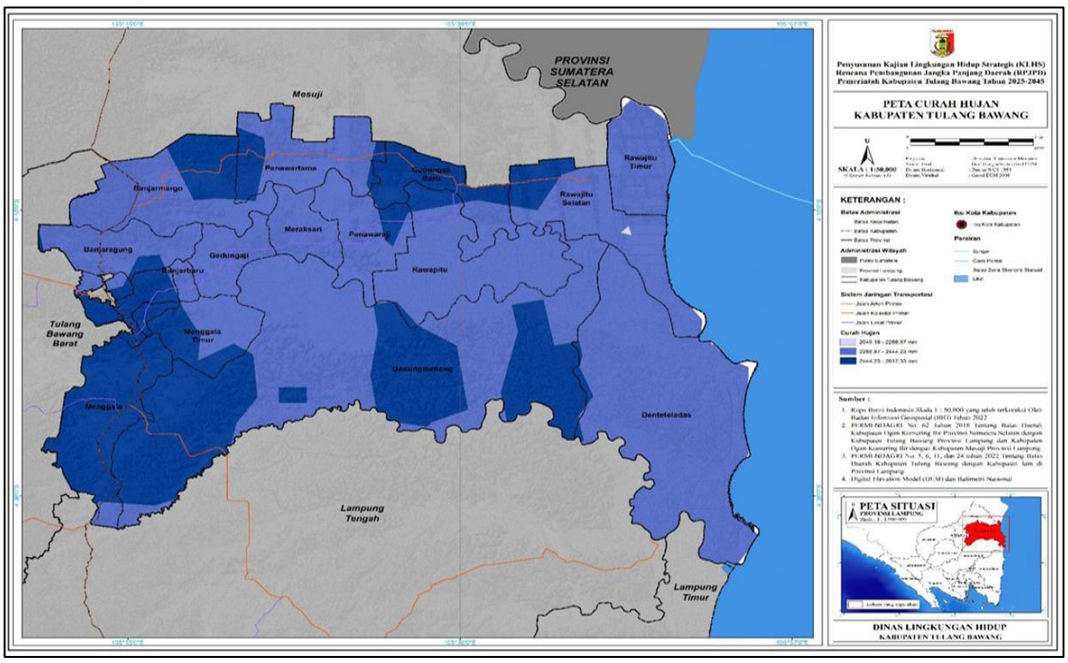
Berdasarkan data curah hujan dan hari hujan Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025, terlihat pola musiman yang konsisten setiap tahun. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Maret, dengan rata-rata mencapai 203-439,3 mm, diikuti bulan Januari dan Februari yang juga menunjukkan intensitas hujan cukup tinggi. Jumlah hari hujan pada periode ini berkisar 20-22 hari, sehingga Triwulan I (Januari-Maret) dapat dikategorikan sebagai puncak musim hujan.

Memasuki bulan April dan Mei, intensitas hujan mulai menurun meskipun masih berada pada kategori menengah. Selanjutnya pada bulan Juni hingga Agustus terlihat penurunan signifikan, baik pada curah hujan maupun hari hujan. Curah hujan pada periode ini sebagian besar berada di bawah 100 mm, bahkan mencapai nilai sangat rendah seperti 2,0-7,8 mm pada tahun 2023, dengan jumlah hari hujan hanya 2-9 hari. Kondisi ini menegaskan bahwa pertengahan tahun merupakan periode musim kemarau. Mulai September hingga November, curah hujan kembali meningkat dan menjadi indikasi awal masuknya musim penghujan kembali, kemudian mencapai puncaknya pada Desember.

Namun demikian, kondisi iklim di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan variasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun akibat pengaruh fenomena cuaca global. Pada periode-periode tertentu dapat terjadi peningkatan curah hujan yang sangat tinggi yang mencerminkan adanya anomali iklim. Kondisi ekstrem ini erat

kaitannya dengan dampak perubahan iklim global, khususnya pemanasan global yang meningkatkan frekuensi serta intensitas kejadian cuaca yang tidak menentu. Variabilitas tersebut kerap memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan angin puting beliung, terutama pada awal dan akhir musim hujan ketika akumulasi curah hujan berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika, KLHS RPJPD Kab. Tulang Bawang 2025-2045

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032, penggunaan lahan di Kabupaten Tulang Bawang meliputi Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung.

1) Kawasan Budidaya

   Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang memilki luas ± 289.585 Ha yang diklasifikasikan menjadi kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pesisir dan kawasan peruntukan lainnya.

2) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas ± 57.047 Ha meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang dapat diketahui dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032. Penataan ruang Kabupaten Tulang Bawang yaitu mewujudkan tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang aman, sejahtera, mandiri dan berkeadilan berbasis pengembangan sumber daya alam, ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemerataan pembangunan secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Potensi pengembangan wilayah berada pada kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan manusia. Fungsi budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan

peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan pesisir; dan kawasan peruntukan lainnya.

a) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas ± 4.000 Ha meliputi Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Menggala Timur.

b) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

1) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas ± 41.800 Ha meliputi:

- Tanaman pangan pada lahan basah dengan luas ± 32.889 Ha dengan kawasan sentra meliputi Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Penawar Aji.
- Tanaman pangan pada lahan kering dengan luas ± 8.914 Ha dengan kawasan sentra meliputi: Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Meneng.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura

Kawasan pertanian hortikultura seluas ± 63.520 Ha dengan kawasan sentra di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Gedung Aji Baru.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan dengan luas ± 100.978 Ha meliputi:

- Komoditas kelapa sawit di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawa Pitu Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Baru dan Kecamatan Gedung Meneng;
- Komoditas tebu di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas;
- Komoditas karet di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru; dan
- Komoditas singkong di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji; Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru, dan Kecamatan Menggala Timur.

4) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- Pengembangan sentra ternak besar berada pada Kecamatan Menggala, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru,

Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Penawar Tama;

- pengembangan sentra ternak kecil berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama dan Kecamatan Gedung Aji Baru; dan
- pengembangan sentra peternakan unggas berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, dan Kecamatan Rawa Pitu.

c) Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

1) Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap meliputi:

- Perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai Way Tulang Bawang terdapat di seluruh wilayah kabupaten dengan jenis komoditas berupa ikan tawar, udang tawar dan kepiting; dan
- Perikanan tangkap di perairan laut terdapat di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas dengan jenis komoditas berupa ikan udang, kerang, dan kepiting.

2) Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya berupa budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas ± 29.910 Ha berada pada seluruh kecamatan di sepanjang aliran sungai Way Tulang Bawang.

3) Kawasan Pengolahan Perikanan

Kawasan pengolahan perikanan dikembangkan di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.

4) Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan berada di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kawasan Dente Teladas dengan komoditas unggulan udang windu dan vanname.

5) Prasarana Perikanan

Prasarana perikanan meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas dan Pangkalan Pendaratan Perikanan (PPI) di Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Timur;

d) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi berada di wilayah timur Kabupaten Tulang Bawang

2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara
   - Pertambangan Pasir di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan dengan luas ± 25.278 Ha; dan termasuk pengelolaan wilayah laut Kabupaten Tulang Bawang 0-4 mil, dan
   - Pertambangan batubara meliputi Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Rawa Jitu Selatan.

e) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kawasan Peruntukan Industri Besar

Kawasan peruntukan industri besar berada di Kecamatan Dente Teladas, Gedung Meneng, dan Menggala Timur.

2) Kawasan Peruntukan Industri Sedang

Pengembangan kawasan peruntukan industri sedang meliputi sentra-sentra penghasil gula, tapioca, CPO, latex, tambak udang berada di Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Penawar Tama.

3) Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga

Pengembangan kawasan peruntukan industri kecil dan industri rumah tangga berupa zona industri rumah tangga non polusi tersebar di wilayah kabupaten.

f) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan Peruntukan Pariwisata adalah bagian dari wilayah dalam suatu rencana tata ruang yang secara khusus ditetapkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya.

1) Kawasan Wisata Alam

- Kawasan ekosistem essensial perlindungan satwa Rawa Pacing dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Aji; Rawa Rantau Kandis dan Rawa Lambu Purus di Kecamatan Menggala;
- Pantai Rawajitu Timur di Kecamatan Rawajitu Timur;
- Pantai Kuala Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
- Rawa Bujung Tenuk di Kecamatan Menggala;

- Bawang Latak di Kecamatan Menggala;
- Rawa Cakat di Kecamatan Menggala;
- Pulau Daging di Kecamatan Menggala; dan
- Tangga Raja di Kecamatan Menggala dan Gedung Aji.

2) Kawasan Wisata Budaya

- Permukiman adat asli (rumah adat) di Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Menggala Timur;
- Makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan
- Kawasan sejarah (Tangga Raja) di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.

3) Kawasan Wisata Buatan

Kawasan wisata buatan berupa wisata terpadu Cakat Nyenyek dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur.

g) Kawasan Peruntukan Pemukiman

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan. Kawasan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas ± 13.731 Ha meliputi Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan.

1) Kawasan permukiman perkotaan meliputi Kawasan permukiman perkotaan Menggala di Kecamatan Menggala; Kawasan permukiman Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kecamatan Banjar Agung; Kawasan permukiman Perkotaan Teladas di Kecamatan Dente Teladas; Kawasan permukiman Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu; Kawasan permukiman Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu Selatan; Kawasan permukiman Perkotaan Bumi Dipasena Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur; Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Aji di Kecamatan Gedung Aji; Kawasan

permukiman Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa Aji; Kawasan permukiman Perkotaan Bogatama di Kecamatan Penawar Tama; Kawasan permukiman Perkotaan Sidomukti di Kecamatan Gedung Aji Baru; Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng; Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan Penawar Aji; Kawasan permukiman Perkotaan Agung Dalem di Kecamatan Banjar Margo; Kawasan permukiman Perkotaan Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru; dan Kawasan permukiman Perkotaan Lebuh Dalem di Kecamatan Menggala Timur.

2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten Tulang Bawang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

h) Kawasan Peruntukan Pesisir

Kawasan Peruntukan Pesisir adalah bagian dari wilayah pesisir yang secara spasial dan fungsional ditetapkan untuk peruntukan tertentu dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan, terencana, dan terkendali. Pengembangan kawasan peruntukan pesisir meliputi Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas.

i) Kawasan Peruntukan Lainnya

Pengembangan kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan petahanan dan keamanan memiliki luas ± 6.527 Ha meliputi:

1) Komando Distrik Militer (Kodim) 0426/Tulang Bawang;
2) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Banjar Agung;
3) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Rawajitu Selatan;
4) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Gedung Aji;
5) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Menggala;

6) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Simpang Penawar;
7) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Penawar Aji;
8) Komando Rayon Militer (Koramil) di Kecamatan Gedung Aji;
9) Pangkalan Udara TNI AU Astra Ksetra;
10) Keplosian Resort (POLRES) Tulang Bawang;
11) Kepolisian Sektor (POLSEK) di setia Kecamatan; dan
12) Brigade Mobil (BRIMOB) di Kecamatan Menggala.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

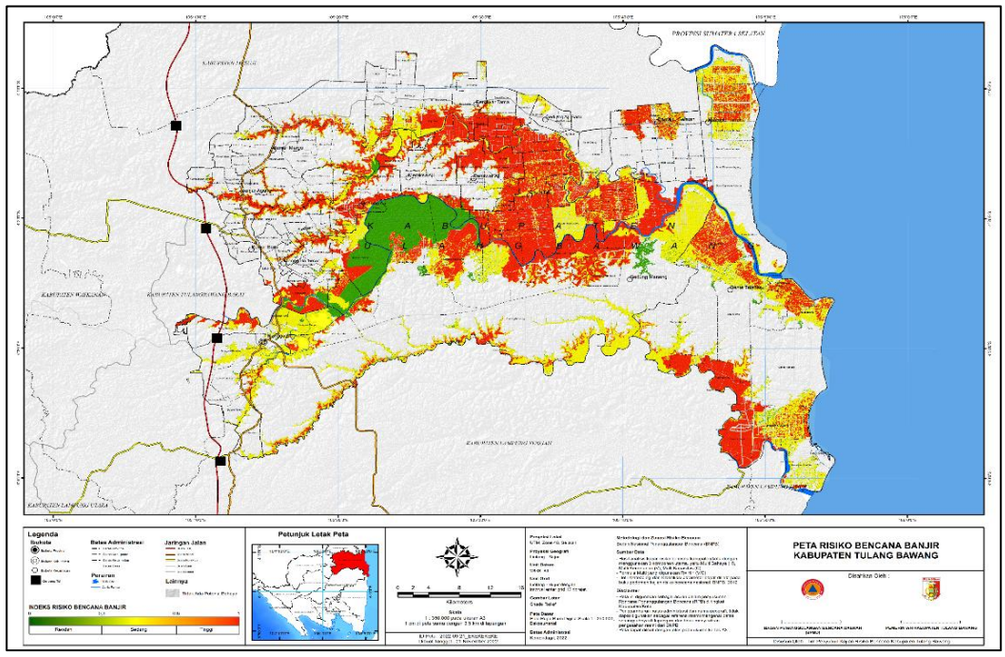
Berdasarkan kajian risiko bencana, terdapat lima jenis bencana utama yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang beserta persebaran wilayah rawannya.

1) Kawasan Rawan Banjir

Banjir berpotensi terjadi pada kecamatan-kecamatan yang memiliki topografi dataran rendah, berada di sekitar aliran sungai, atau memiliki jaringan irigasi yang luas. Kecamatan rawan banjir meliputi: Kecamatan Banjar Agung, Banjar Baru, Banjar Margo, Dente Teladas, Gedung Aji, Gedung Aji Baru, Meraksa Aji, Penawar Aji, Penawartama, Rawajitu Selatan, dan Rawa Pitu.

Persebaran pada 11 kecamatan menunjukkan bahwa banjir merupakan ancaman hidrometeorologi dengan cakupan wilayah sangat luas.

Gambar 2. 6 Peta Risiko Bencana Banjir
Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang 2023-2027

2) Kawasan Rawan Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem seperti angin puting beliung, hujan lebat disertai angin, serta badai lokal juga berpotensi terjadi di 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Banjar Agung, Banjar Baru, Banjar Margo, Gedung Aji, Gedung Aji Baru, Gedung Meneng, Menggala, Menggala Timur, Meraksa Aji, Penawar Aji, dan Penawar Tama.

Meskipun persebarannya juga mencakup 11 kecamatan, wilayahnya tidak sama persis dengan sebaran banjir. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik cuaca ekstrem tidak selalu berkaitan langsung dengan kawasan rawan banjir, dan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer lokal.

3) Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Ancaman ini terutama terjadi di wilayah pesisir atau daerah yang berbatasan langsung dengan badan air besar. Dua kecamatan yang berpotensi terdampak adalah Dente Teladas dan Rawajitu Timur. Hal ini mencerminkan kerentanan wilayah pesisir terhadap gelombang tinggi dan pengikisan garis pantai.

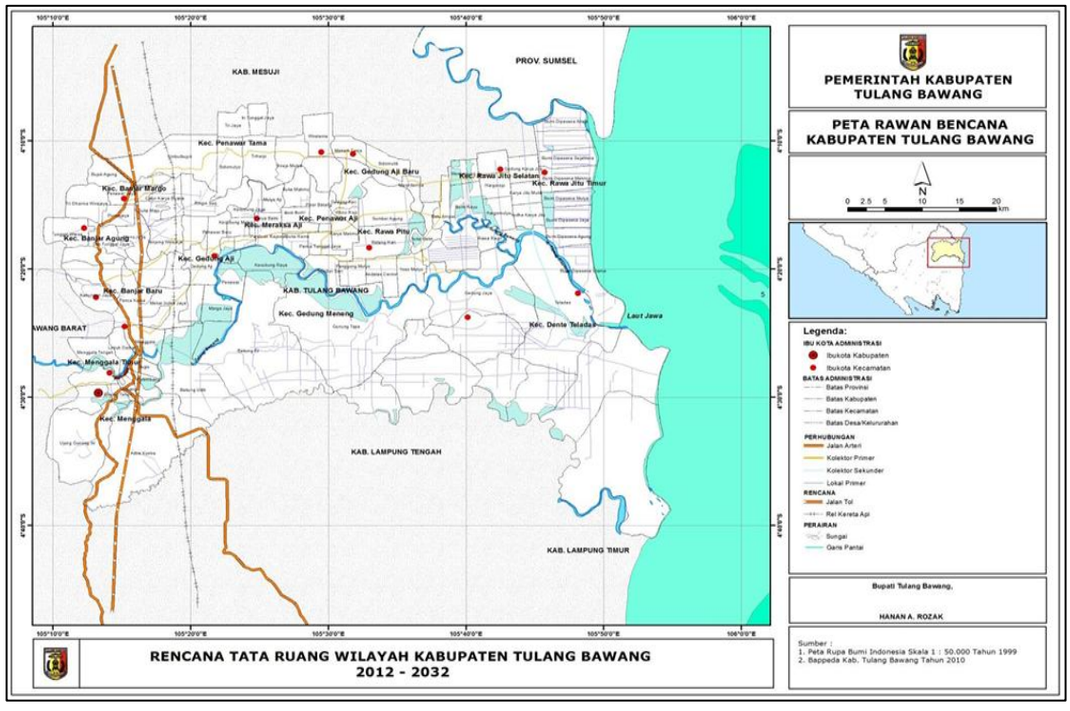
4) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kabupaten Tulang Bawang berada pada kelas risiko sedang terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan potensi tersebar di seluruh kecamatan. Karhutla sering terjadi terutama pada musim kemarau berkepanjangan ketika vegetasi menjadi kering dan mudah terbakar. Selain faktor cuaca, sebagian besar kejadian kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran lahan tebu untuk mempermudah panen dan meningkatkan kualitas hasil, serta pembakaran rumput untuk menumbuhkan pakan ternak baru.

5) Kawasan Rawan Kekeringan.

Kekeringan berpotensi terjadi di wilayah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap penurunan ketersediaan air, yaitu: Kecamatan Gedung Aji, Rawajitu Selatan, dan Rawa Pitu.

Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

Secara strategis, peta ini memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi risiko yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebaran risiko bencana di berbagai kecamatan

memiliki implikasi langsung terhadap penentuan prioritas pembangunan, baik pada aspek infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian, informasi yang disajikan dalam peta ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan risiko bencana serta penguatan ketahanan wilayah secara berkelanjutan.

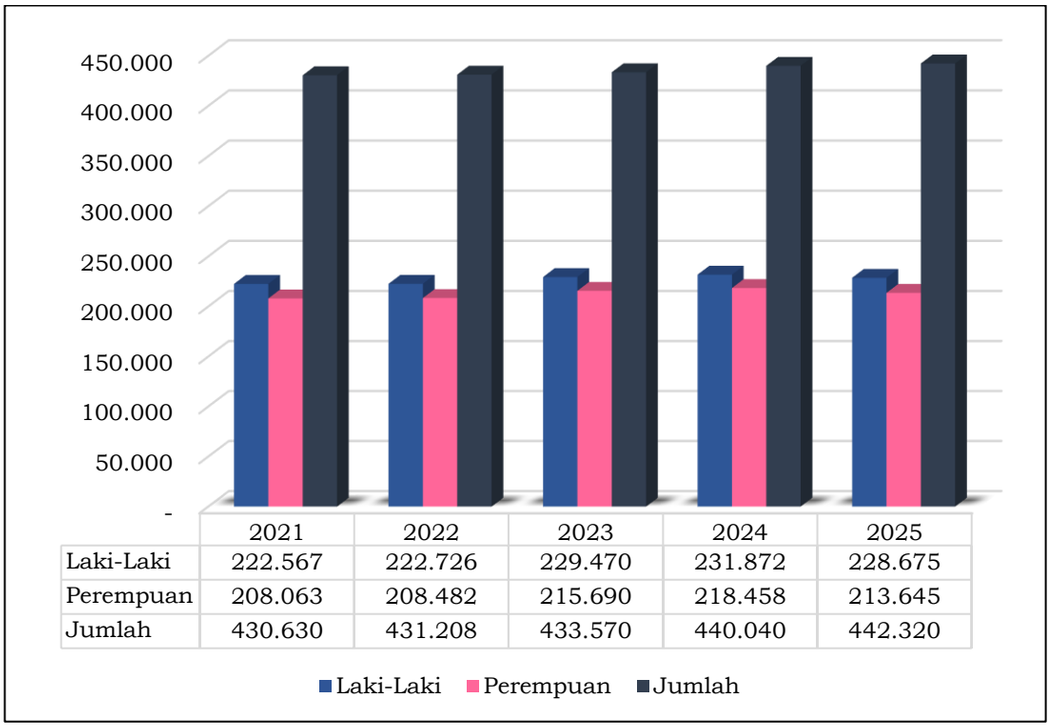
2.1.1.4 Kondisi Demografi

Kondisi demografi daerah memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik dan dinamika penduduk yang berpengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan. Informasi demografis ini menjadi dasar penting dalam memahami kebutuhan masyarakat serta potensi yang dapat dikembangkan, terutama terkait penyediaan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemahaman terhadap kondisi demografi yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan perubahan penduduk di masa mendatang.

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin memberikan gambaran mengenai keseimbangan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Komposisi ini penting untuk melihat struktur penduduk serta implikasinya terhadap perencanaan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan layanan dasar, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Gambar 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (jiwa)



	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-Laki	222.567	222.726	229.470	231.872	228.675
Perempuan	208.063	208.482	215.690	218.458	213.645
Jumlah	430.630	431.208	433.570	440.040	442.320

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

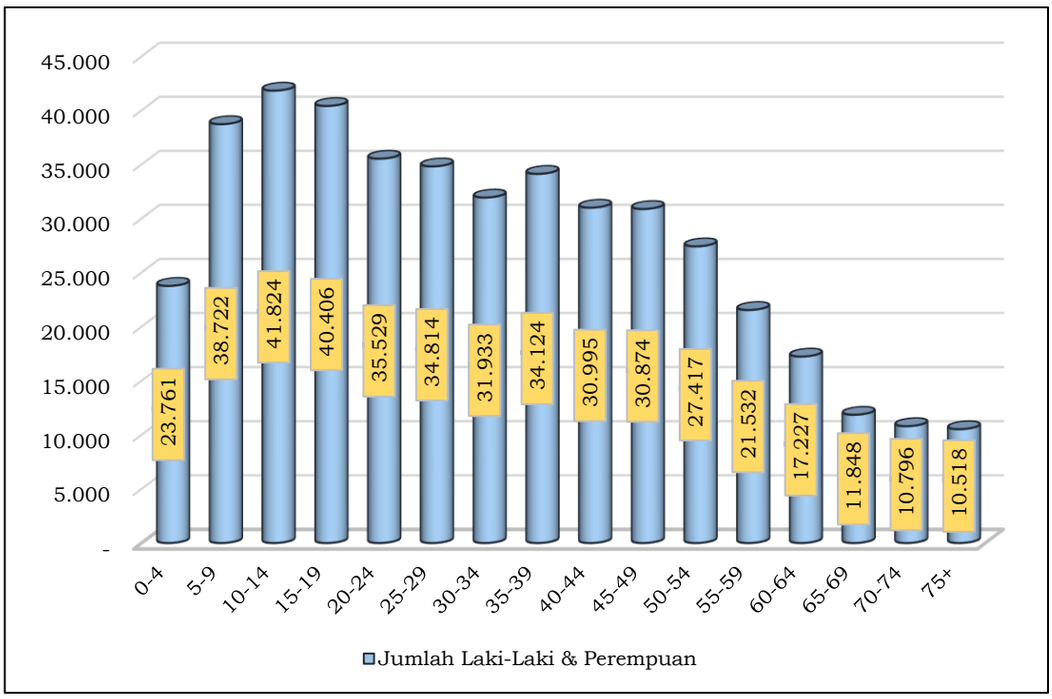
Pada tahun 2021, penduduk laki-laki tercatat sebanyak 222.567 jiwa dan perempuan 208.063 jiwa, sehingga total penduduk mencapai 430.630 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki mencapai 229.470 jiwa dan perempuan 215.690 jiwa, dengan total penduduk 433.570 jiwa. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2024, di mana penduduk laki-laki tercatat 231.872 jiwa dan perempuan 218.458 jiwa, sehingga total penduduk menjadi 440.040 jiwa. Namun, pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan, dengan jumlah penduduk laki-laki 228.675 jiwa dan perempuan 213.645 jiwa, sehingga total penduduk berjumlah 442.320 jiwa.

Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang relatif stabil, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun terakhir. Kenaikan jumlah penduduk hingga 2024 mencerminkan adanya perkembangan demografis yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja di masa mendatang. Keseimbangan

komposisi jenis kelamin yang relatif stabil juga memberikan gambaran bahwa dinamika penduduk berlangsung normal tanpa menunjukkan ketimpangan signifikan antara jumlah laki-laki dan perempuan.

Selaras dengan perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut, struktur usia penduduk juga menjadi aspek penting untuk dianalisis guna memahami komposisi penduduk secara lebih mendalam. Struktur usia memberikan indikasi mengenai proporsi penduduk usia muda, produktif, dan lanjut usia yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap kebutuhan pembangunan. Grafik berikut menyajikan gambaran mengenai distribusi penduduk menurut kelompok usia, yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi potensi sumber daya manusia serta berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang menurut Struktur Usia/Kelompok Umur Tahun 2025



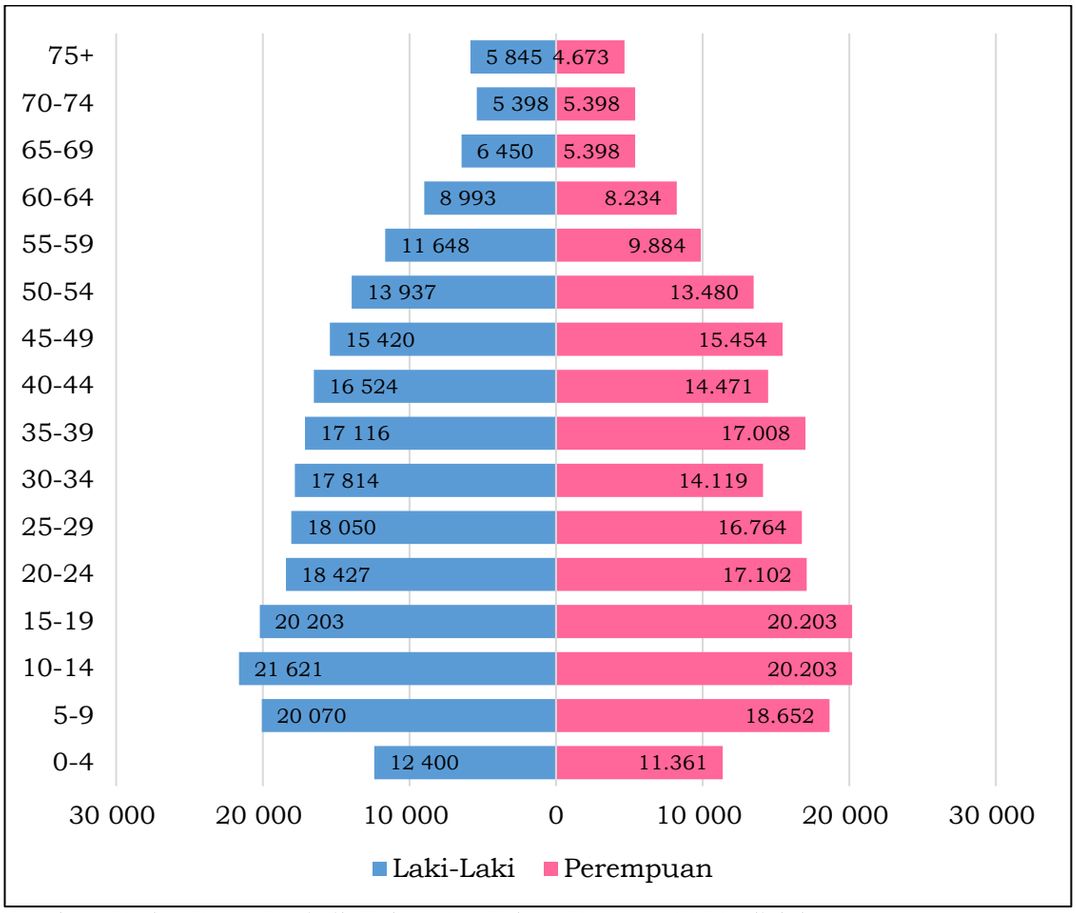
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun merupakan yang terbesar dengan jumlah 41.824 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 40.406 jiwa serta kelompok usia 5-9 tahun sebanyak 38.722 jiwa. Secara

umum, struktur penduduk masih didominasi oleh kelompok usia anak dan remaja, yang menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia muda di Kabupaten Tulang Bawang. Pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), jumlah penduduk tetap mendominasi struktur kependudukan secara keseluruhan, dengan sebaran yang cukup besar pada kelompok usia dewasa muda hingga dewasa menengah, yang mengindikasikan ketersediaan tenaga kerja yang relatif kuat dalam mendukung aktivitas pembangunan daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya peluang pemanfaatan bonus demografi apabila didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia lainnya, yakni sekitar 33.162 jiwa yang terdiri dari kelompok usia 65-69 tahun, 70-74 tahun, dan 75 tahun ke atas. Meskipun proporsinya masih rendah, keberadaan penduduk lanjut usia tetap perlu menjadi perhatian, terutama dalam konteks penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Ke depan, kecenderungan peningkatan jumlah penduduk lansia perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap perubahan struktur demografi.

Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kelompok Umur Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Bentuk piramida penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 menunjukkan bahwa struktur penduduk masih didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif. Kelompok umur 10-14 tahun dan 15-19 tahun memiliki jumlah penduduk terbesar, disusul kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur demografi daerah masih ditopang oleh generasi muda yang akan menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada setiap kelompok umur relatif seimbang, meskipun pada sebagian besar kelompok umur jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Perbedaan tersebut terlihat, antara lain, pada kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 16.524 jiwa dan perempuan 14.471 jiwa, serta kelompok umur 30-34 tahun dengan jumlah laki-laki 17.814 jiwa dan perempuan 14.119 jiwa. Namun

demikian, secara umum tidak terdapat kesenjangan yang mencolok antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Struktur penduduk yang didominasi usia produktif memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk mengoptimalkan bonus demografi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Di sisi lain, meskipun proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) masih relatif kecil, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan penyediaan layanan yang ramah lansia tetap perlu dipersiapkan secara berkelanjutan guna mengantisipasi perubahan struktur penduduk pada masa yang akan datang.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukkan tingkat perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk mencerminkan dinamika perkembangan wilayah serta menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

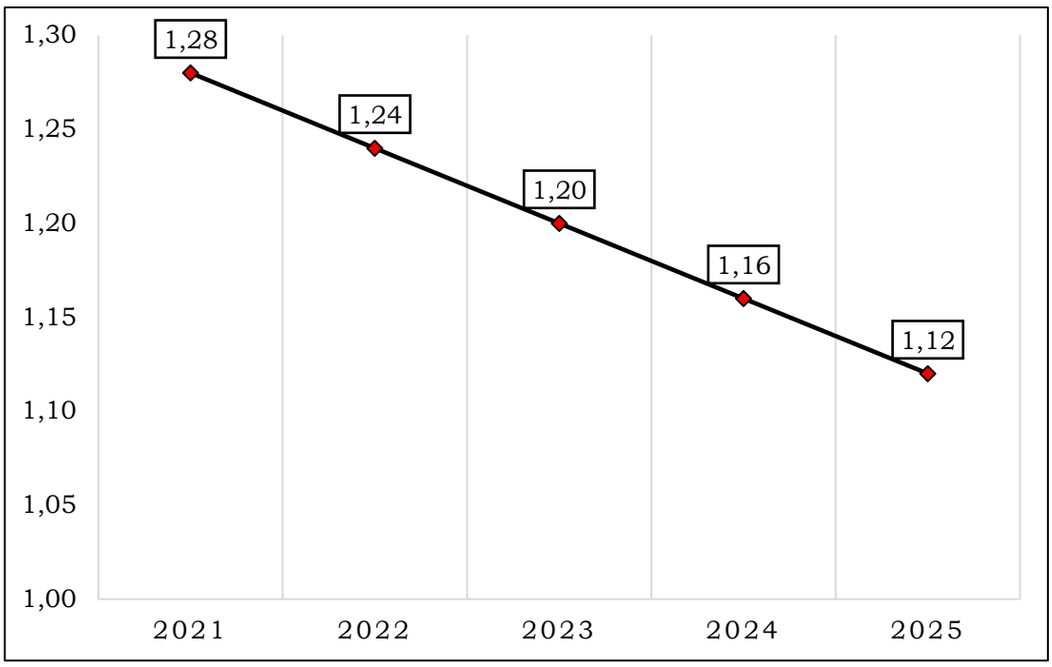
Informasi mengenai laju pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, serta berbagai layanan dasar lainnya. Selain itu, indikator ini juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung wilayah.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah tenaga kerja dan perluasan pasar konsumsi masyarakat. Namun demikian, apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan penduduk juga berpotensi menimbulkan berbagai tantangan pembangunan, seperti meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, tekanan terhadap sumber daya alam, serta meningkatnya beban pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan laju pertumbuhan penduduk menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dilaksanakan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Gambaran perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2. 11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

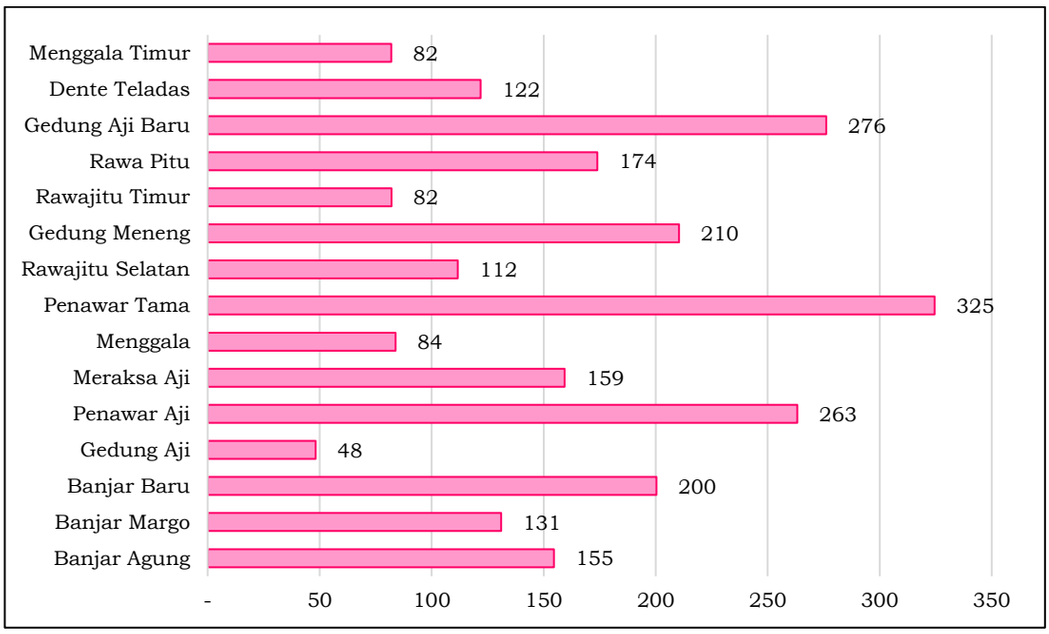
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren penurunan secara bertahap selama periode lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pertumbuhan penduduk menurun dari 1,28% pada tahun 2021 menjadi 1,12% pada tahun 2025. Penurunan ini cukup signifikan dan mencerminkan adanya perubahan dalam dinamika kependudukan.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tren ini antara lain penurunan angka kelahiran, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program keluarga berencana, serta mobilitas penduduk keluar daerah. Kondisi ini perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan, karena penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat berdampak pada struktur usia, ketersediaan tenaga kerja, dan arah kebijakan sosial-ekonomi di masa mendatang.

3) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan indikator yang menggambarkan sebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayah tersebut. Indikator ini penting digunakan untuk memahami tekanan penduduk terhadap ruang, kapasitas layanan dasar, serta kebutuhan pengembangan infrastruktur di tingkat daerah.

Gambar 2. 12 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 (Jiwa/km²)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Kepadatan penduduk merupakan indikator penting dalam memahami distribusi spasial penduduk serta tekanan terhadap lahan dan layanan publik di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2025, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan variasi kepadatan

penduduk yang cukup signifikan antar kecamatan, mencerminkan perbedaan karakteristik geografis, aksesibilitas, dan fungsi wilayah.

Kecamatan Penawar Tama tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 325 jiwa/km², diikuti oleh Gedung Aji Baru (276 jiwa/km²) dan Penawar Aji (263 jiwa/km²). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menunjukkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan pemukiman, serta potensi tekanan terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Wilayah dengan kepadatan tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang, pengendalian pembangunan, dan penyediaan fasilitas publik.

Sebaliknya, kecamatan seperti Gedung Aji (48 jiwa/km²), Menggala Timur (82 jiwa/km²), dan Rawajitu Timur (82 jiwa/km²) menunjukkan tingkat kepadatan yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan kondisi geografis dan keterjangkauan wilayah yang berbeda dibandingkan pusat-pusat aktivitas.

Secara keseluruhan, pola kepadatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan adanya konsentrasi penduduk di beberapa wilayah dengan fungsi ekonomi dan pemukiman yang dominan, sementara wilayah lain masih relatif jarang penduduk. Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan disparitas spasial ini, guna mendorong pemerataan pembangunan, efisiensi pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan.

4) Rasio Ketergantungan

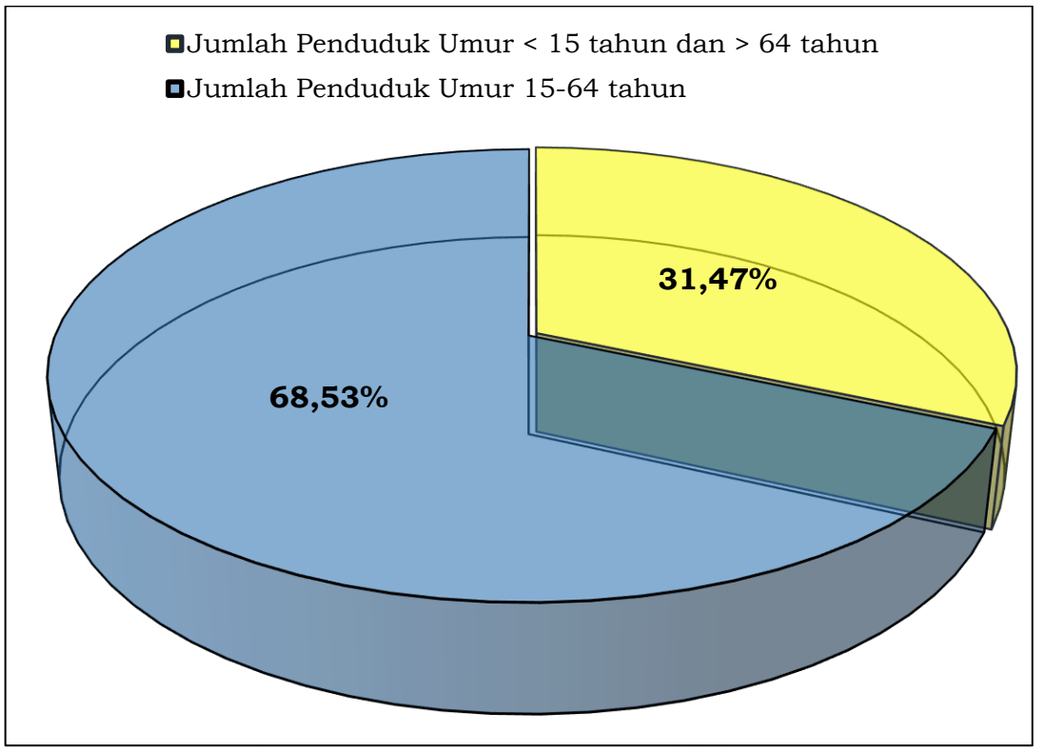
Rasio ketergantungan merupakan indikator yang menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia nonproduktif, yaitu kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana penduduk produktif harus menopang kebutuhan kelompok usia yang belum atau tidak lagi bekerja.

Dalam konteks pembangunan daerah, rasio ketergantungan memegang peranan penting karena berhubungan langsung dengan

kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat. Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi penduduk nonproduktif lebih besar, sehingga penduduk usia produktif harus menanggung beban ekonomi yang lebih besar. Hal ini dapat berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial.

Sebaliknya, rasio ketergantungan yang menurun atau berada pada tingkat ideal mencerminkan tersedianya tenaga kerja potensial yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas, memperluas aktivitas ekonomi, serta mendorong percepatan pembangunan apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gambar 2. 13 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan data tahun 2025, Kabupaten Tulang Bawang memiliki rasio ketergantungan *(dependency ratio)* sebesar 45,93 persen. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan ≥65 tahun) dengan penduduk usia

produktif (15-64 tahun). Penduduk usia nonproduktif tercatat sebanyak 143.330 jiwa atau 31,47 persen dari total populasi, sedangkan penduduk usia produktif berjumlah 312.070 jiwa atau 68,53 persen dari total penduduk.

Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 penduduk usia nonproduktif. Secara umum, semakin tinggi rasio ketergantungan suatu wilayah maka semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang lebih rendah menunjukkan struktur penduduk yang relatif lebih menguntungkan bagi pembangunan ekonomi.

Rasio ketergantungan Kabupaten Tulang Bawang yang berada pada kisaran moderat mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia kerja. Kondisi ini berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur penduduk tersebut juga mencerminkan peluang untuk memanfaatkan bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan agar potensi bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, keberadaan kelompok usia nonproduktif tetap memerlukan perhatian melalui penyediaan layanan sosial yang memadai, terutama dalam bidang pendidikan bagi anak-anak serta perlindungan dan jaminan kesehatan bagi penduduk lanjut usia.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada kondisi saat penduduk suatu daerah atau wilayah hidup dalam keadaan yang baik secara fisik, sosial, maupun mental. Secara lebih luas, kesejahteraan ini juga dapat dipahami sebagai hasil dari implementasi pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini meliputi berbagai dimensi, seperti kesejahteraan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar, serta kesejahteraan sosial budaya yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat dalam aspek sosial dan budaya.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan wilayah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, sekaligus menjamin bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

a) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai dinamika ekonomi suatu daerah. PDRB mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi dalam kurun waktu tertentu, sehingga menjadi tolok ukur penting bagi keberhasilan pembangunan wilayah.

Pertumbuhan PDRB menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang bersumber dari sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi), maupun sektor tersier (perdagangan, transportasi, jasa).

Angka pertumbuhan yang positif menandakan adanya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, karena produksi barang dan jasa bertambah serta peluang kerja semakin terbuka. Sebaliknya, perlambatan atau penurunan pertumbuhan menjadi sinyal perlunya

kebijakan penyeimbang, baik melalui stimulus fiskal, penguatan sektor unggulan, maupun diversifikasi ekonomi.

Data PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian daerah, sehingga pemerintah dapat menyusun strategi diversifikasi dan mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB juga berhubungan erat dengan pemerataan, karena peningkatan produksi harus diikuti dengan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	0,44	1,81	0,17	5,42
2	Pertambangan dan Penggalian	0,13	2,26	3,45	2,24	1,77
3	Industri Pengolahan	6,82	4,76	1,77	6,62	5,42
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,20	3,12	2,38	0,53	6,52
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,41	2,90	0,16	-0,15	1,98
6	Konstruksi	2,51	5,42	5,76	8,39	3,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,68	9,24	11,46	8,04	5,00
8	Transportasi dan Pergudangan	4,54	10,89	17,13	9,16	8,85
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,94	7,28	9,13	4,59	8,13
10	Informasi dan Komunikasi	4,10	6,04	7,91	9,79	3,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,66	-0,72	1,32	5,12	6,18
12	Real Estat	1,87	5,19	0,08	4,04	4,76
13	Jasa Perusahaan	1,02	9,29	2,26	8,55	3,62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,94	-0,78	1,96	5,73	1,85
15	Jasa Pendidikan	2,55	3,69	2,68	1,21	2,09

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,03	0,78	2,67	10,57	1,45
17	Jasa Lainnya	-2,38	31,08	12,96	9,66	7,54
Produk Domestik Regional Bruto		**2,88**	**3,87**	**4,28**	**4,75**	**5,10**

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026
*Keterangan : *) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai PDRB yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar tertentu (dalam hal ini tahun 2010) sehingga pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan. Dengan demikian, angka pertumbuhan yang dihasilkan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil, yaitu peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha di suatu daerah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu dari 2,88 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 3,87 persen pada tahun 2022, 4,28 persen pada tahun 2023, 4,75 persen pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai 5,10 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang secara umum mengalami perkembangan yang semakin baik.

Dilihat dari sisi lapangan usaha, sebagian besar sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa sektor. Sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik pada beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas perdagangan, mobilitas barang dan jasa, serta perkembangan sektor jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, sektor konstruksi, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi juga turut memberikan kontribusi terhadap

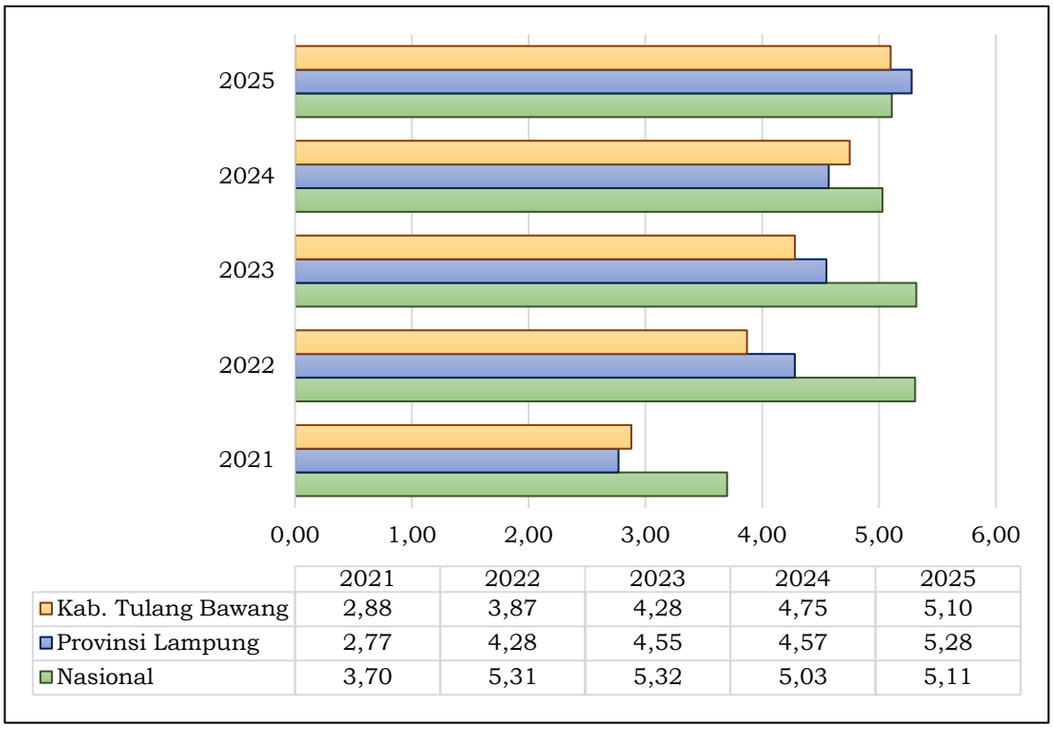
pertumbuhan ekonomi daerah, terutama seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor kegiatan.

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha seperti pengadaan air dan pengelolaan sampah, administrasi pemerintahan, serta beberapa sektor jasa lainnya menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi pada periode tertentu. Namun secara umum sektor-sektor tersebut tetap menunjukkan kecenderungan pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 mengalami tren pertumbuhan yang positif. Penggunaan harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Peningkatan laju pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai lapangan usaha terus berkembang dan secara bertahap mendorong penguatan perekonomian daerah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja perekonomian daerah, perlu dilakukan perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih luas. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan nasional pada periode 2021-2025 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2. 14 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025 (Persen)



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Tulang Bawang	2,88	3,87	4,28	4,75	5,10
Provinsi Lampung	2,77	4,28	4,55	4,57	5,28
Nasional	3,70	5,31	5,32	5,03	5,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah)
: Provinsi Lampung Dala Angka, BPS, 2026 (diolah)
: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang sebesar 2,88 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung sebesar 2,77 persen, namun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode tersebut kinerja ekonomi daerah masih dalam tahap pemulihan dan belum sepenuhnya menyamai pertumbuhan ekonomi nasional.

Memasuki tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah mengalami peningkatan. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan Provinsi Lampung maupun nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perekonomian daerah mengalami perkembangan, kecepatannya masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang meningkat menjadi 4,75 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan

Provinsi Lampung sebesar 4,57 persen, namun masih sedikit berada di bawah tingkat nasional sebesar 5,03 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi daerah yang mulai mampu melampaui pertumbuhan di tingkat provinsi.

Selanjutnya pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang diperkirakan mencapai 5,10 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mendekati tingkat pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen, meskipun masih sedikit lebih rendah dari Provinsi Lampung yang mencapai 5,28 persen.

Secara keseluruhan, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang cenderung meningkat secara bertahap selama periode 2021-2025. Meskipun pada beberapa tahun masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, tren yang meningkat menunjukkan adanya perbaikan kinerja perekonomian daerah seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya tercermin pada besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahunnya. Nilai PDRB menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh lapangan usaha di suatu wilayah dalam periode tertentu, sehingga dapat menunjukkan skala dan kapasitas perekonomian daerah.

Tabel 2. 5 PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025
(Dalam Milyar Rupiah)

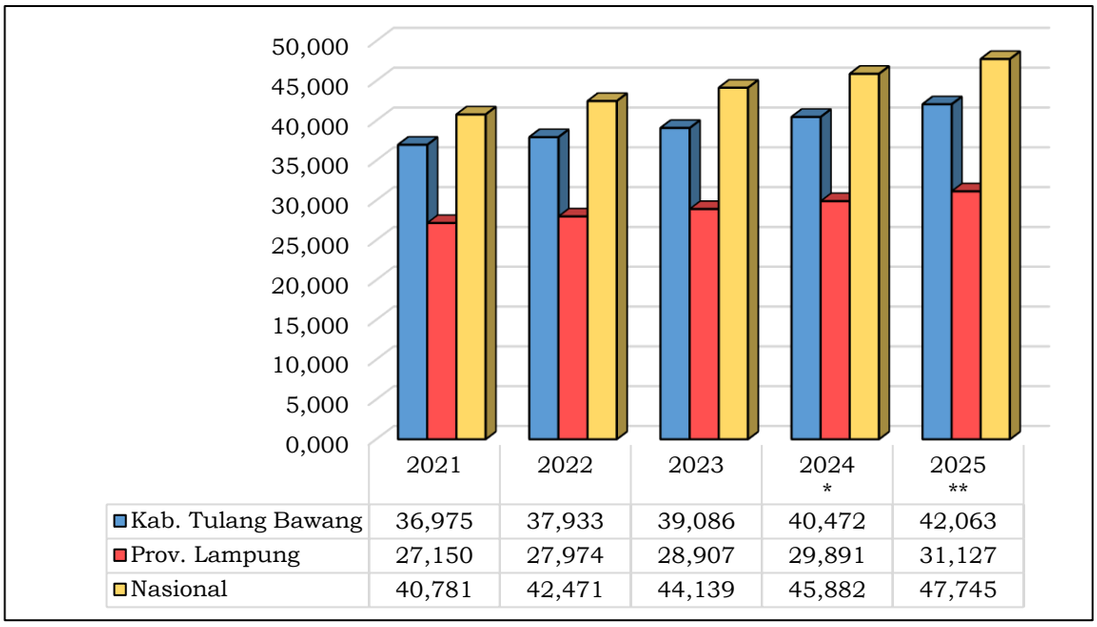
No	Tahun	Uraian	
		PDRB ADHB	**PDRB ADHK**
1	2021	24.166,26	16.064,50
2	2022	25.986,24	16.685,48
3	2023	28.219,02	17.399,65
4	2024*	30.499,54	18.226,00
5	2025**	33.239,21	19.155,48

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-2025 mengalami tren peningkatan setiap tahun, baik berdasarkan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp24.166,26 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp33.239,21 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, PDRB ADHK juga meningkat dari Rp16.064,50 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp19.155,48 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah cenderung berkembang dari tahun ke tahun.

Secara umum, nilai PDRB Kabupaten Tulang Bawang periode 2021-2025 menunjukkan tren meningkat baik berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai perekonomian berdasarkan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil karena telah menghilangkan pengaruh perubahan harga. Seiring dengan peningkatan nilai PDRB tersebut, perkembangan tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar berikut.

Gambar 2. 15 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam juta rupiah) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2021-2025



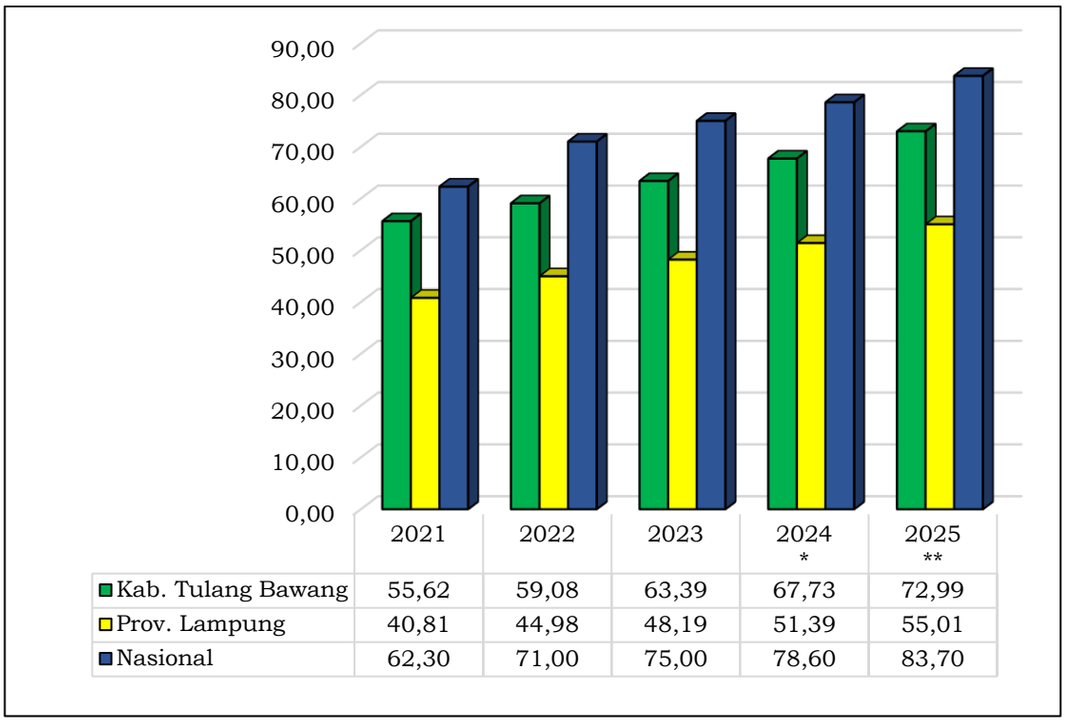
	2021	2022	2023	2024 *	2025 **
Kab. Tulang Bawang	36,975	37,933	39,086	40,472	42,063
Prov. Lampung	27,150	27,974	28,907	29,891	31,127
Nasional	40,781	42,471	44,139	45,882	47,745

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah) & Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2026 (diolah)
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Tulang Bawang meningkat dari 36,975 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 42,063 juta rupiah pada tahun 2025. Nilai tersebut juga berada lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung, namun masih di bawah tingkat nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tulang Bawang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, tingkat pendapatan masyarakat berdasarkan harga tahun berjalan dapat dilihat melalui PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB). Perbandingan dengan rata-rata Provinsi Lampung dan PDB per kapita nasional digunakan untuk mengetahui posisi relatif tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Perkembangannya selama tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Gambar 2. 16 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan PDB Per Kapita Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024 *	2025 **
Kab. Tulang Bawang	55,62	59,08	63,39	67,73	72,99
Prov. Lampung	40,81	44,98	48,19	51,39	55,01
Nasional	62,30	71,00	75,00	78,60	83,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah) & Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2026 (diolah)
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan Gambar 2.16, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 55,62 juta rupiah dan meningkat menjadi 72,99 juta rupiah pada tahun 2025. Selama periode tersebut, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Lampung yang meningkat dari 40,81 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 55,01 juta rupiah pada tahun 2025. Namun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah PDB per kapita nasional yang meningkat dari 62,30 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 83,70 juta rupiah pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nominal masyarakat Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung, meskipun masih terdapat kesenjangan dengan tingkat pendapatan rata-rata nasional.

Selanjutnya, untuk melihat struktur pembentuk perekonomian daerah, dapat ditinjau pada Tabel 2.6 yang menyajikan distribusi persentase PDRB Kabupaten Tulang Bawang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2021-2025. Tabel tersebut menggambarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB daerah.

Tabel 2. 6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulang Bawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,19	35,63	35,19	34,02	34,37
2	Pertambangan dan Penggalian	1,08	1,08	1,07	1,01	0,96
3	Industri Pengolahan	25,13	25,23	24,43	25,05	25,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,10	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	8,71	8,97	8,84	8,96	8,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,23	10,83	11,76	12,07	12,00

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
8	Transportasi dan Pergudangan	3,87	4,36	5,12	5,29	5,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,33	1,38	1,40	1,38	1,40
10	Informasi dan Komunikasi	3,47	3,54	3,57	3,61	3,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,25	1,23	1,17	1,15	1,14
12	Real Estate	1,98	1,98	1,86	1,83	1,81
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,83	2,70	2,57	2,58	2,48
15	Jasa Pendidikan	1,91	1,96	1,91	1,91	1,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,45	0,44	0,42	0,44	0,42
17	Jasa Lainnya	0,36	0,47	0,51	0,53	0,53
	PDRB ADHB	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026 (diolah)
*Keterangan : *) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun kontribusinya menunjukkan kecenderungan sedikit menurun dari 37,19 persen pada tahun 2021 menjadi sekitar 34,37 persen pada tahun 2025, sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB daerah.

Selain itu, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang cukup besar dan relatif stabil, yaitu sekitar 24-25 persen selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang.

Beberapa sektor lainnya seperti perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dan cenderung meningkat. Peningkatan ini mengindikasikan berkembangnya aktivitas perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta mobilitas barang dan jasa di daerah.

Sementara itu, sektor-sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pendidikan, dan kesehatan memberikan kontribusi yang relatif lebih kecil namun tetap berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh sektor primer, namun mulai diikuti oleh perkembangan sektor sekunder dan tersier yang menunjukkan adanya proses diversifikasi kegiatan ekonomi daerah.

b) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks sekaligus krusial dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, perkembangan perekonomian harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin. Orientasi pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan serta perbaikan distribusi pendapatan.

Kemiskinan tidak semata-mata diukur dari jumlah jiwa atau proporsi penduduk miskin (P0), melainkan juga mencakup kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan sejauh mana rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh jarak pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin besar ketimpangan yang terjadi dalam kelompok masyarakat miskin tersebut.

Tabel 2. 7 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskkinan (Rp/Kap/Bln)
2021	9,67	44,53	1,15	0,20	456.567,00
2022	8,42	39,19	1,17	0,26	486.739,00
2023	8,04	37,83	1,09	0,23	522.396,00
2024	7,88	37,46	0,82	0,17	560.324,00
2025	7,54	36,14	0,79	0,16	588.734,00

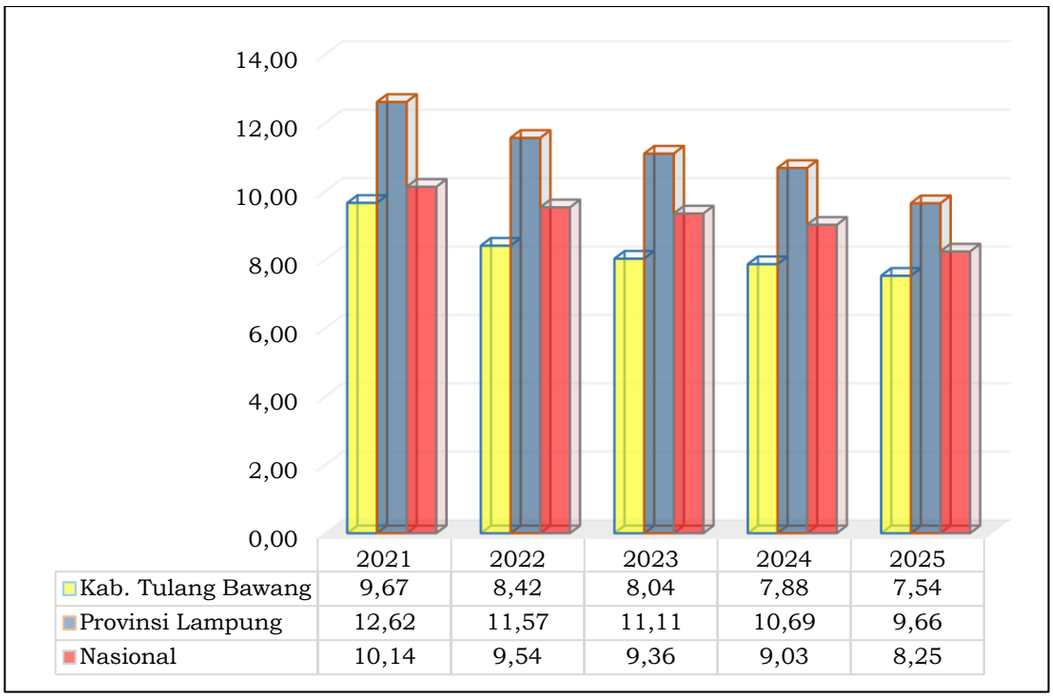
Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,67 persen dengan jumlah 44,53 ribu jiwa. Angka ini terus menurun hingga mencapai 7,54 persen atau sekitar 36,14 ribu jiwa pada tahun 2025. Penurunan ini tidak hanya terlihat dari sisi jumlah, tetapi juga dari kualitas kehidupan penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang semula berada di angka 1,15 pada tahun 2021, turun menjadi 0,79 di tahun 2025. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menurun dari 0,20 menjadi 0,16, menandakan bahwa kesenjangan di antara kelompok miskin semakin mengecil dan kondisi mereka relatif membaik.

Di sisi lain, garis kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp456.567 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp588.734 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya inflasi serta peningkatan standar kebutuhan minimum masyarakat dari waktu ke waktu. Namun demikian, meskipun garis kemiskinan menunjukkan tren peningkatan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar relatif semakin baik, yang turut mencerminkan peningkatan daya beli serta efektivitas berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menggambarkan adanya perbaikan dalam aspek sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi tingkat kemiskinan daerah, perlu dilakukan perbandingan dengan kondisi kemiskinan pada tingkat provinsi dan nasional. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan nasional selama periode 2021-2025 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Tulang Bawang	9,67	8,42	8,04	7,88	7,54
Provinsi Lampung	12,62	11,57	11,11	10,69	9,66
Nasional	10,14	9,54	9,36	9,03	8,25

Sumber: BPS RI, 2026 (diolah) & Tulang Bawang Dalam Angka, BPS Kab. Tuba, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,67 persen, kemudian menurun menjadi 8,42 persen pada tahun 2022, 8,04 persen pada tahun 2023, 7,88 persen pada tahun 2024, dan 7,54 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang dari tahun ke tahun.

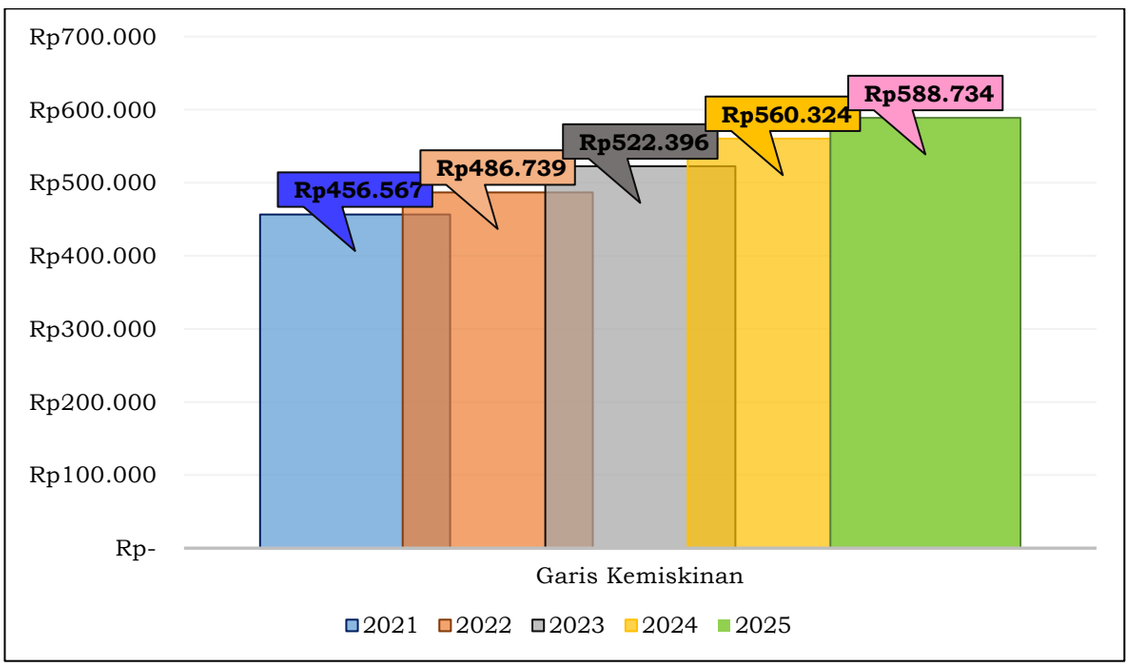
Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang berada pada tingkat yang lebih rendah sepanjang periode tersebut. Sementara itu, dibandingkan dengan

tingkat nasional, persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang juga relatif lebih rendah.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan perkembangan yang positif, yang ditandai dengan tren penurunan persentase penduduk miskin selama periode 2021-2025.

Penurunan persentase penduduk miskin tidak dapat dilepaskan dari dinamika garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan nilai minimum rupiah yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non-makanan. Perubahan garis kemiskinan dari tahun ke tahun akan mempengaruhi jumlah penduduk yang dikategorikan miskin. Ketika garis kemiskinan naik seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok, maka tekanan terhadap penduduk berpendapatan rendah juga meningkat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif kondisi kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang, penting untuk melihat tidak hanya persentase penduduk miskin, tetapi juga perkembangan garis kemiskinan dalam periode yang sama.

Gambar 2. 18 Garis Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



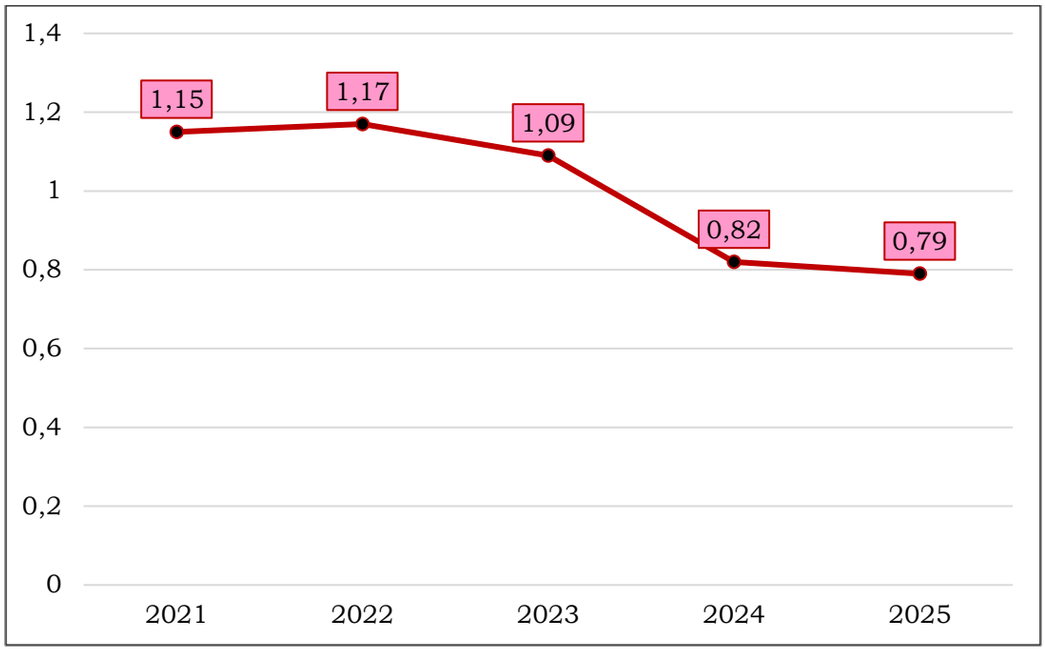
Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp456.567 per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp486.739 pada 2022, Rp522.396 pada 2023, Rp560.324 pada 2024, dan akhirnya mencapai Rp588.734 pada 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap standar kebutuhan minimum hidup masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan dinamika inflasi, perubahan harga barang dan jasa, serta pola konsumsi dasar.

Secara definisi, penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, garis kemiskinan menjadi ambang batas penting dalam mengidentifikasi kelompok rentan dan menetapkan sasaran program perlindungan sosial. Peningkatan garis kemiskinan tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi, melainkan menandakan adanya penyesuaian terhadap biaya hidup yang semakin tinggi. Namun, hal ini menuntut kebijakan yang adaptif agar penduduk miskin tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan tidak semakin tertinggal secara ekonomi.

Dengan demikian, kenaikan garis kemiskinan perlu dibaca secara bersamaan dengan indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Hal ini penting untuk memahami bukan hanya jumlah penduduk miskin, tetapi juga kualitas kehidupan mereka, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan dapat mendukung perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Gambar 2. 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



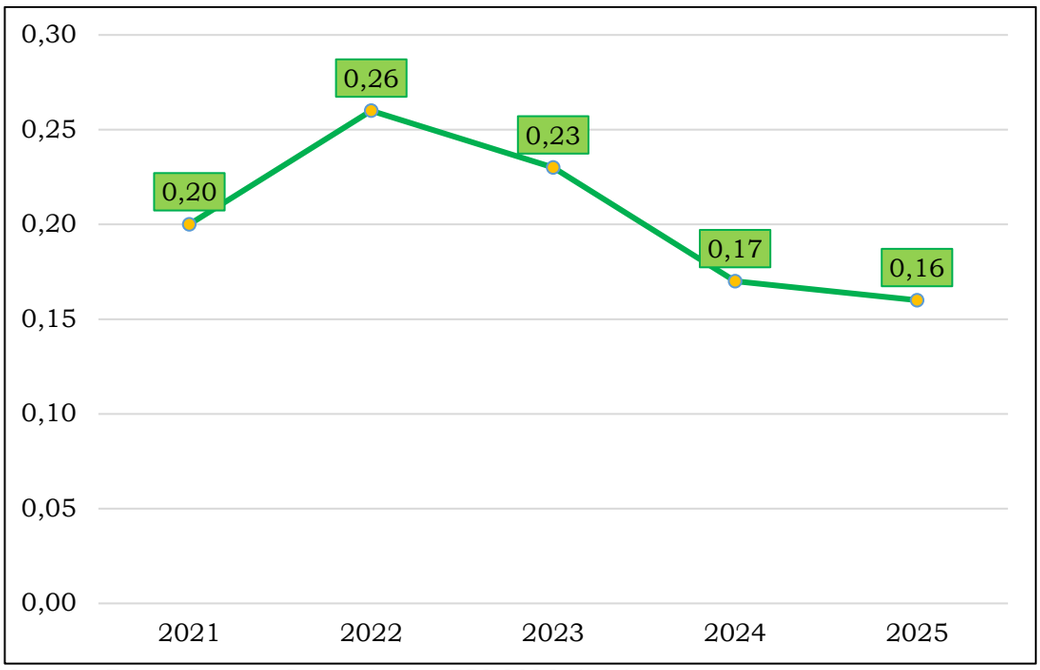
Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)

Gambar 2.19 memperlihatkan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025. Secara umum, tren yang ditunjukkan adalah perbaikan kondisi dengan penurunan nilai P1, meskipun sempat terjadi sedikit kenaikan pada awal periode. Pada tahun 2021, nilai P1 tercatat sebesar 1,15 dan meningkat tipis menjadi 1,17 pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sempat melebar, sehingga kelompok miskin relatif lebih jauh dari ambang batas kebutuhan minimum.

Namun, sejak tahun 2023 tren perbaikan mulai terlihat dengan turunnya P1 menjadi 1,09. Penurunan ini menandakan bahwa kemampuan penduduk miskin untuk mendekati garis kemiskinan mulai membaik. Perbaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika P1 turun menjadi 0,82, dan berlanjut hingga 2025 dengan nilai 0,79. Penurunan yang konsisten ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga kondisi kesejahteraan mereka relatif membaik.

Perkembangan positif pada P1 ini juga sejalan dengan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang memperlihatkan berkurangnya ketimpangan di antara kelompok miskin.

Gambar 2. 20 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Tulang Bawang Dalam Angka, BPS 2026 (diolah)

Gambar 2.20 memperlihatkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025. Secara umum, tren P2 menunjukkan pola yang sempat meningkat pada awal periode, namun kemudian menurun secara konsisten hingga akhir periode. Pada tahun 2021, nilai P2 tercatat sebesar 0,20 dan meningkat menjadi 0,26 pada tahun 2022. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pelebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, di mana sebagian kelompok berada dalam kondisi yang lebih jauh dari garis kemiskinan.

Memasuki tahun 2023, nilai P2 menurun menjadi 0,23, menandakan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran kelompok miskin. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan penurunan signifikan ke angka 0,17, dan semakin membaik pada tahun 2025 dengan nilai 0,16. Penurunan yang konsisten ini mencerminkan

bahwa kesenjangan di dalam kelompok masyarakat miskin semakin mengecil, sehingga kondisi mereka relatif lebih merata.

Secara keseluruhan, perkembangan P2 selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya berhasil mengurangi kedalaman kemiskinan, tetapi juga menekan ketimpangan di antara penduduk miskin. Hal ini menandakan bahwa program pembangunan, bantuan sosial, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar telah memberikan manfaat yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan.

c) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan serta dinamika perekonomian di suatu daerah. Indikator ini mengukur proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran digunakan untuk menilai kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja serta mencerminkan efektivitas pembangunan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja.

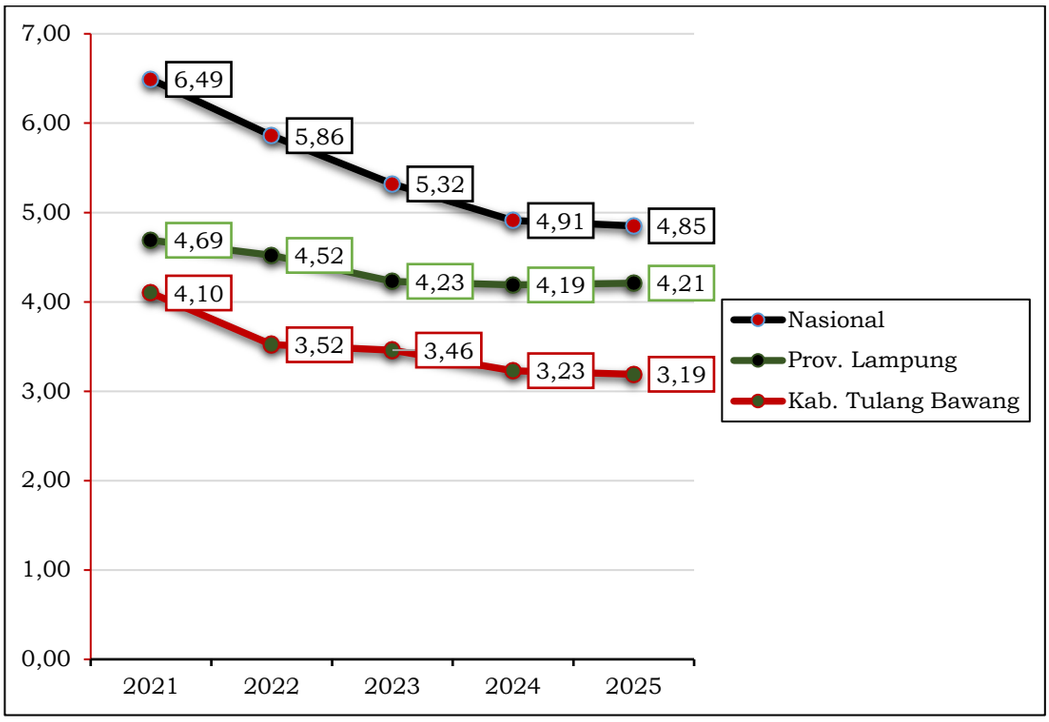
Perubahan tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, struktur dan perkembangan sektor usaha, kualitas serta relevansi pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pada periode tertentu, fluktuasi tingkat pengangguran juga dapat terjadi akibat perubahan siklus ekonomi, meningkatnya jumlah angkatan kerja baru, maupun adanya penyesuaian dalam sektor-sektor utama yang mendominasi perekonomian daerah.

Tingkat pengangguran yang menurun umumnya menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi serta membaiknya kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, peningkatan tingkat pengangguran dapat mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah

pencari kerja. Oleh karena itu, analisis tingkat pengangguran menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi produktif.

Secara umum, kondisi pengangguran dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau telah memperoleh pekerjaan namun belum mulai bekerja. Sementara itu, setengah pengangguran adalah penduduk yang sudah bekerja tetapi jumlah jam kerjanya belum mencapai jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari pekerjaan tambahan atau bersedia menerima pekerjaan lain untuk menambah jam kerja.

Gambar 2. 21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren penurunan

yang konsisten. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 4,10 persen, kemudian turun menjadi 3,52 persen pada 2022, 3,46 persen pada 2023, 3,23 persen pada 2024, dan akhirnya mencapai 3,19 persen pada 2025. Angka ini secara konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung yang turun dari 4,69 persen pada 2021 menjadi 4,21 persen pada 2025, serta tingkat nasional yang menurun dari 6,49 persen menjadi 4,85 persen pada periode yang sama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang berhasil mempertahankan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Hal tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan kualitas tenaga kerja.

Meski demikian, penting untuk terus mengembangkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja agar tren positif ini dapat dipertahankan. Upaya yang telah dilakukan antara lain program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga memfasilitasi pencari kerja melalui pelatihan keterampilan, pemagangan, bimbingan softskill, hingga penyelenggaraan bursa kerja. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka lebih jauh sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

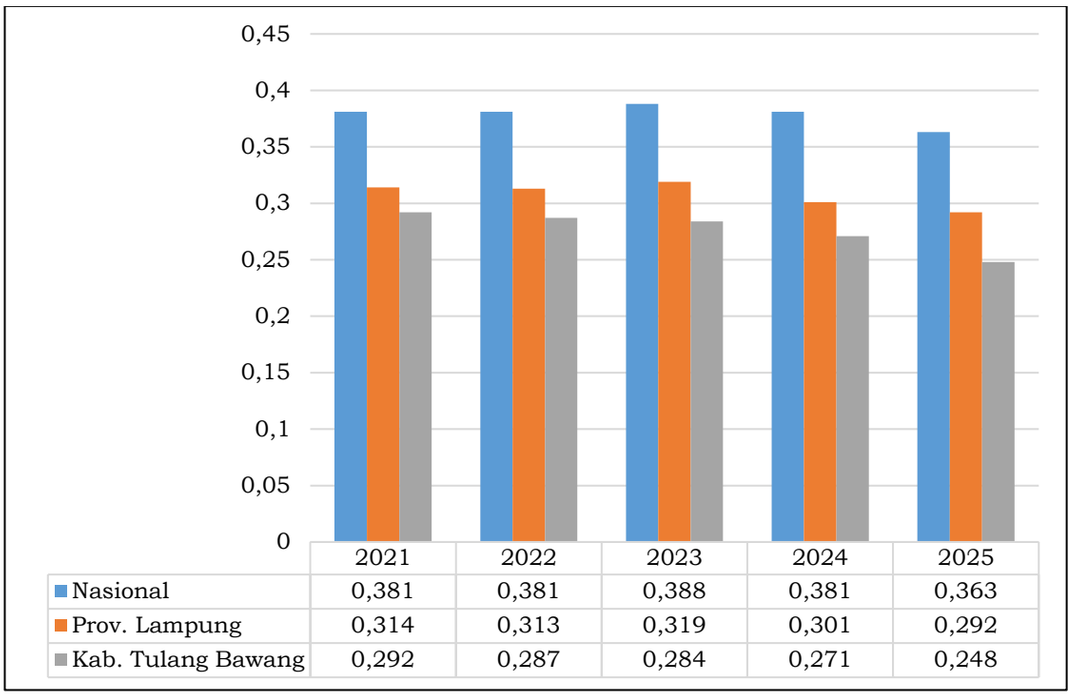
d) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Dengan demikian, Indeks Gini menjadi alat penting dalam menilai sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan nilai Indeks Gini umumnya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, kesempatan kerja, struktur pendapatan rumah tangga, serta efektivitas program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Penurunan Indeks Gini mengindikasikan membaiknya pemerataan pendapatan dan meningkatnya inklusivitas pembangunan, sementara peningkatan Indeks Gini menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang perlu direspons melalui kebijakan yang lebih terarah.

Pemantauan Indeks Gini secara berkala menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Melalui indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih intensif dan merumuskan strategi pembangunan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 2. 22 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,363
Prov. Lampung	0,314	0,313	0,319	0,301	0,292
Kab. Tulang Bawang	0,292	0,287	0,284	0,271	0,248

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah) & Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren penurunan ketimpangan pendapatan yang konsisten. Gini Rasio di Kabupaten Tulang Bawang turun dari 0,292 pada tahun 2021 menjadi 0,248 pada tahun 2025. Angka ini secara konsisten lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung yang berada pada 0,292, maupun tingkat nasional yang tercatat sebesar 0,363 pada tahun 2025. Hal ini menegaskan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Tulang Bawang relatif lebih merata dibandingkan dengan kondisi di tingkat provinsi maupun nasional.

Penurunan Gini Rasio tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan hasil pembangunan, yang dapat diartikan sebagai dampak dari kebijakan pemerataan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta penguatan sektor ekonomi lokal. Ketimpangan yang lebih rendah ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial di Kabupaten Tulang Bawang.

Meski demikian, perkembangan koefisien Gini tetap perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang harus terus diikuti dengan perbaikan aspek pemerataan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara inklusif. Aspek penting yang perlu diperhatikan mencakup ketepatan kelompok sasaran, lokasi kegiatan, serta bentuk intervensi yang sesuai dengan potensi nyata masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang tepat, tren penurunan ketimpangan dapat dipertahankan sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan jangka panjang.

e) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk menilai kemajuan pembangunan manusia dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pembangunan manusia, semakin besar pula kemampuan penduduk dalam memanfaatkan dan

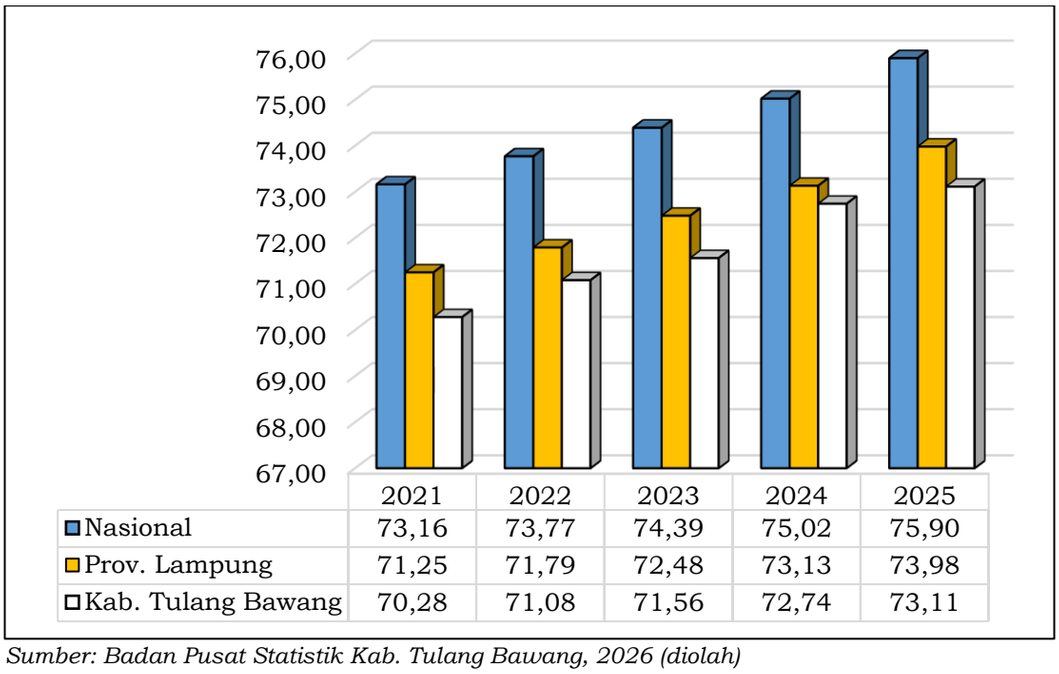
mengelola berbagai sumber daya serta peluang pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang secara lebih berkelanjutan.

Pencapaian pembangunan manusia diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut masing-masing direpresentasikan oleh beberapa indikator, antara lain umur harap hidup saat lahir, indikator pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), tingkat pembangunan manusia dibagi ke dalam empat kategori, yaitu sangat tinggi (IPM ≥ 80), tinggi (70 ≤ IPM < 80), sedang (60 ≤ IPM < 70), dan rendah (IPM < 60).

Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode terbaru yang mengacu pada standar yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu dengan menggunakan indikator Umur Harap Hidup saat lahir yang bersumber dari hasil *Long Form* Sensus Penduduk.

Gambar 2. 23 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90
Prov. Lampung	71,25	71,79	72,48	73,13	73,98
Kab. Tulang Bawang	70,28	71,08	71,56	72,74	73,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 70,28, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 71,25 serta rata-rata nasional sebesar 73,16. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Tulang Bawang masih tertinggal dibandingkan capaian di tingkat provinsi maupun nasional.

Memasuki tahun 2022, IPM Kabupaten Tulang Bawang meningkat menjadi 71,08, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia. Meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung (71,79) dan nasional (73,77), peningkatan tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan manusia di daerah.

Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dan 2024. IPM Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 71,56 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 72,74 pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam pembangunan manusia, sekaligus memperlihatkan bahwa kesenjangan dengan capaian provinsi secara bertahap semakin mengecil. Pada periode yang sama, IPM Provinsi Lampung meningkat dari 72,48 pada tahun 2023 menjadi 73,13 pada tahun 2024, sementara IPM nasional juga terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Tulang Bawang mencapai 73,11, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Meskipun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung (73,98) dan nasional (75,90), tren peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, perkembangan IPM Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam berbagai dimensi pembangunan manusia, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk terus

meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempercepat pencapaian pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

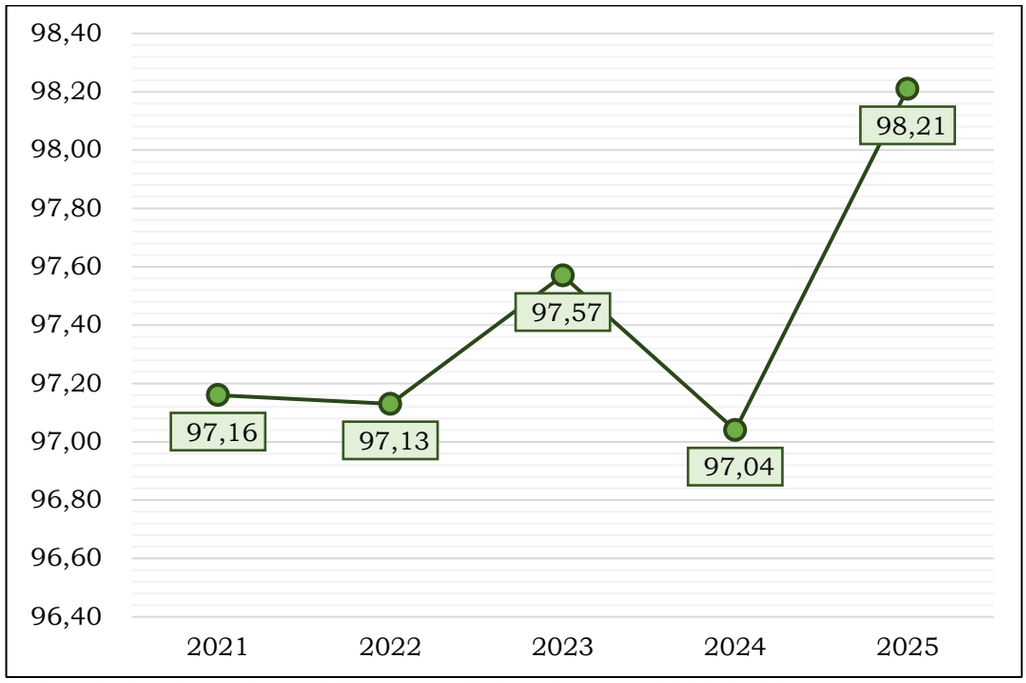
1) Dimensi Pendidikan

a) Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga tercipta masyarakat yang bermartabat dan hidup yang lebih sejahtera. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca-tulis. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan baca tulis penduduk adalah angka melek huruf. Indikator ini merepresentasikan kemampuan dasar penduduk dalam memahami sebuah kalimat sederhana.

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Gambar 2. 24 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Grafik 2.24 menggambarkan perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025. Secara umum, tingkat literasi penduduk menunjukkan kondisi yang relatif tinggi, dengan persentase AMH berada di atas 97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas telah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis sebagaimana definisi indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2021, Angka Melek Huruf Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 97,16 persen, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah memiliki kemampuan literasi dasar. Pada tahun 2022, AMH mengalami sedikit penurunan menjadi 97,13 persen. Penurunan tersebut relatif sangat kecil sehingga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kondisi literasi masyarakat secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, AMH meningkat menjadi 97,57 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam tingkat literasi penduduk. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 97,04 persen. Fluktuasi ini masih tergolong kecil dan secara umum

tidak mengubah gambaran bahwa tingkat literasi masyarakat tetap berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya pada tahun 2025, Angka Melek Huruf meningkat cukup signifikan menjadi 98,21 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Upaya peningkatan angka melek huruf penduduk dilakukan melalui berbagai kebijakan pendidikan, antara lain peningkatan partisipasi pendidikan pada usia sekolah, pencegahan anak putus sekolah, serta penyediaan layanan pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Selain itu, implementasi program wajib belajar 12 tahun juga menjadi salah satu strategi penting dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat secara berkelanjutan.

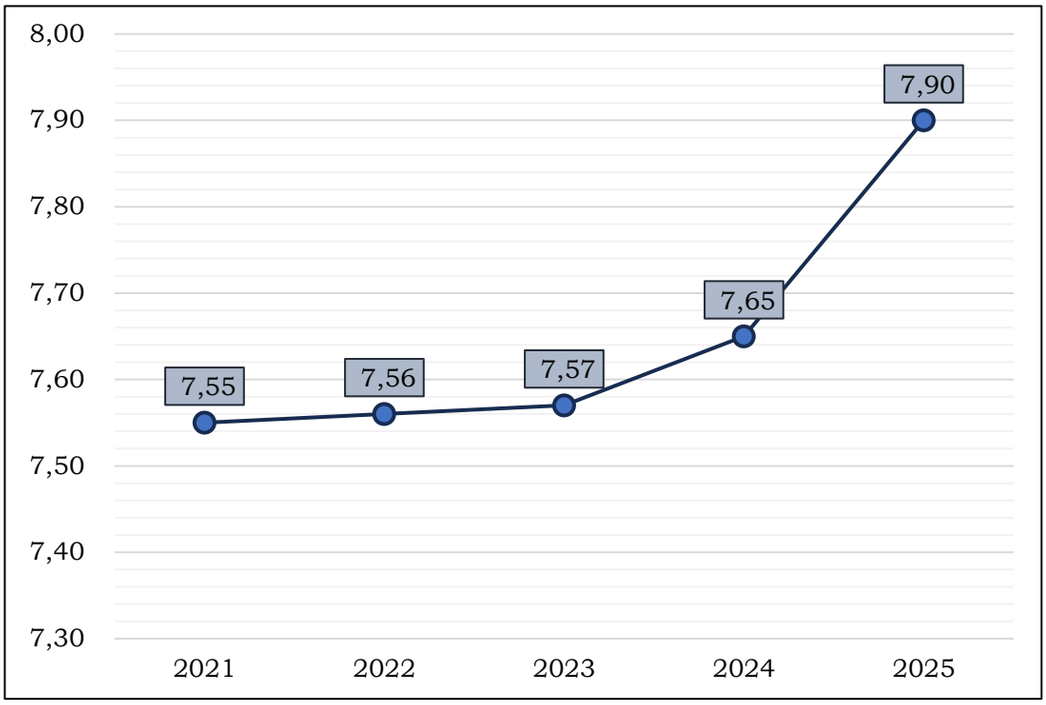
b) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun belajar yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal, tidak termasuk tahun pengulangan kelas. Indikator ini menjadi salah satu komponen penting dalam dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga perubahan RLS sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Untuk menghitung RLS, diperlukan informasi mengenai partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah atau sedang diikuti, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat atau kelas tertinggi yang pernah atau sedang ditempuh oleh seseorang. Semakin tinggi nilai RLS, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh penduduk. Dengan demikian, RLS menjadi gambaran penting dalam menilai kualitas penduduk dalam hal kemampuan mengakses dan menyelesaikan pendidikan formal.

Analisis terhadap angka Rata-Rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan, sekaligus menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan.

Gambar 2. 25 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2021-2025 di Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif positif. Pada tahun 2021 RLS tercatat sebesar 7,55 tahun. Nilai tersebut kemudian meningkat secara bertahap menjadi 7,56 tahun pada 2022 dan 7,57 tahun pada 2023, meskipun kenaikannya masih relatif kecil.

Peningkatan yang lebih terlihat terjadi pada tahun 2024 ketika RLS mencapai 7,65 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 7,90 tahun, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan.

Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tulang Bawang menempuh pendidikan hingga mendekati jenjang kelas VIII SMP. Meskipun mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun, rata-rata lama sekolah ini masih menunjukkan bahwa sebagian penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama secara penuh.

Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan, antara lain melalui penguatan program wajib belajar, pencegahan anak putus sekolah, serta penyediaan layanan pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulang Bawang.

2) Dimensi Ketahanan dan Konsumsi Pangan

a) Indeks Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, guna mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tingkat ketahanan pangan suatu daerah diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP merupakan indikator komposit yang disusun berdasarkan tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP menggambarkan kondisi ketahanan pangan secara menyeluruh di suatu wilayah; semakin tinggi nilai IKP, semakin baik tingkat ketahanan pangan daerah tersebut.

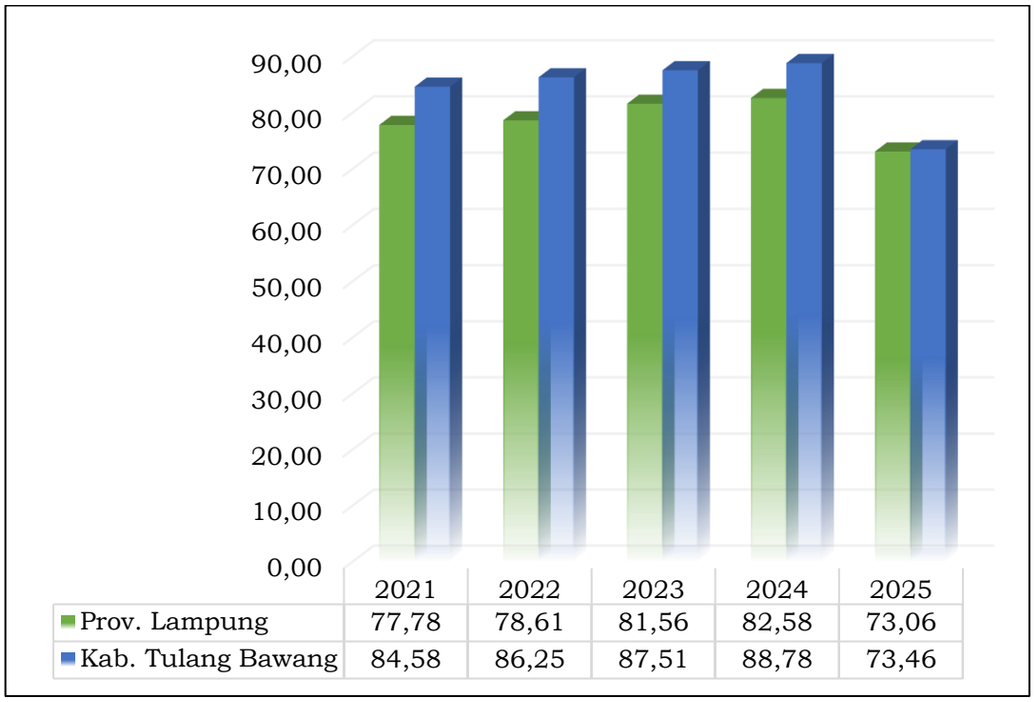
Hingga periode 2024, penentuan nilai IKP didasarkan pada sembilan indikator utama, yaitu:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi pangan bersih.
2. Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65 persen.
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.
6. Persentase rumah tangga tanpa akses air bersih.
7. Rasio jumlah penduduk terhadap tenaga kesehatan.
8. Persentase balita stunting.
9. Angka harapan hidup saat lahir.

Namun, mulai tahun 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pembaruan metodologi dengan menambah indikator menjadi 12 indikator. Penambahan ini mencakup aspek yang lebih luas seperti stabilitas harga pangan, akses fisik ke fasilitas pangan, dan cadangan pangan daerah.

Adanya perubahan standar pengukuran yang lebih ketat dan komprehensif ini menyebabkan nilai IKP pada tahun 2025 secara teknis tampak lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, angka IKP 2025 ditetapkan sebagai *baseline* (titik awal) baru dan tidak dapat dibandingkan secara langsung *(not apple-to-apple)* dengan tren data 2021-2024. Pembaruan ini bertujuan agar pemerintah dapat memotret kerawanan pangan dengan lebih akurat hingga tingkat desa untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.

Gambar 2. 26 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Prov. Lampung	77,78	78,61	81,56	82,58	73,06
Kab. Tulang Bawang	84,58	86,25	87,51	88,78	73,46

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2026 (diolah)

Berdasarkan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-2024 menunjukkan tren yang positif dan relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung. Pada tahun 2021, nilai IKP Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 84,58, lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Lampung sebesar 77,78. Selisih nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang pada awal periode pengamatan berada pada tingkat yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

Tren peningkatan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, nilai IKP Kabupaten Tulang Bawang meningkat menjadi 86,25, kemudian kembali meningkat menjadi 87,51 pada tahun 2023, dan mencapai 88,78 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, nilai IKP Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten berada di atas capaian Provinsi Lampung yang juga mengalami peningkatan dari 77,78 pada tahun 2021 menjadi 82,58 pada tahun 2024. Selisih nilai yang cukup signifikan ini mengindikasikan bahwa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tulang Bawang relatif lebih kuat dibandingkan rata-rata kondisi ketahanan pangan di tingkat provinsi.

Peningkatan nilai IKP pada periode tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang memengaruhi ketahanan pangan daerah, khususnya pada tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pangan, membaiknya akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, serta peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi perubahan yang cukup signifikan pada nilai IKP, di mana Provinsi Lampung tercatat sebesar 73,06 dan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 73,46. Penurunan nilai ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kondisi ketahanan pangan daerah, melainkan dipengaruhi oleh perubahan metodologi penghitungan IKP yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Sejak tahun 2025, pengukuran IKP menggunakan metodologi baru dengan penambahan jumlah indikator dari sembilan menjadi dua belas indikator yang mencakup aspek yang lebih luas, seperti stabilitas harga pangan, akses fisik terhadap fasilitas pangan, dan cadangan pangan daerah.

Dengan adanya perubahan metodologi tersebut, nilai IKP tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2021-2024. Oleh karena itu, nilai IKP tahun 2025 lebih tepat diposisikan sebagai *baseline* baru dalam pengukuran ketahanan pangan daerah. Meskipun demikian, jika dilihat dari posisi relatifnya, nilai IKP Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung.

Secara umum, perkembangan IKP Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan daerah berada pada tingkat yang relatif baik dan terus mengalami perbaikan pada periode 2021-2024. Ke depan, penerapan metodologi baru diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ketahanan pangan hingga tingkat wilayah yang lebih rinci, sehingga perumusan kebijakan dan intervensi pemerintah dalam memperkuat

ketahanan pangan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

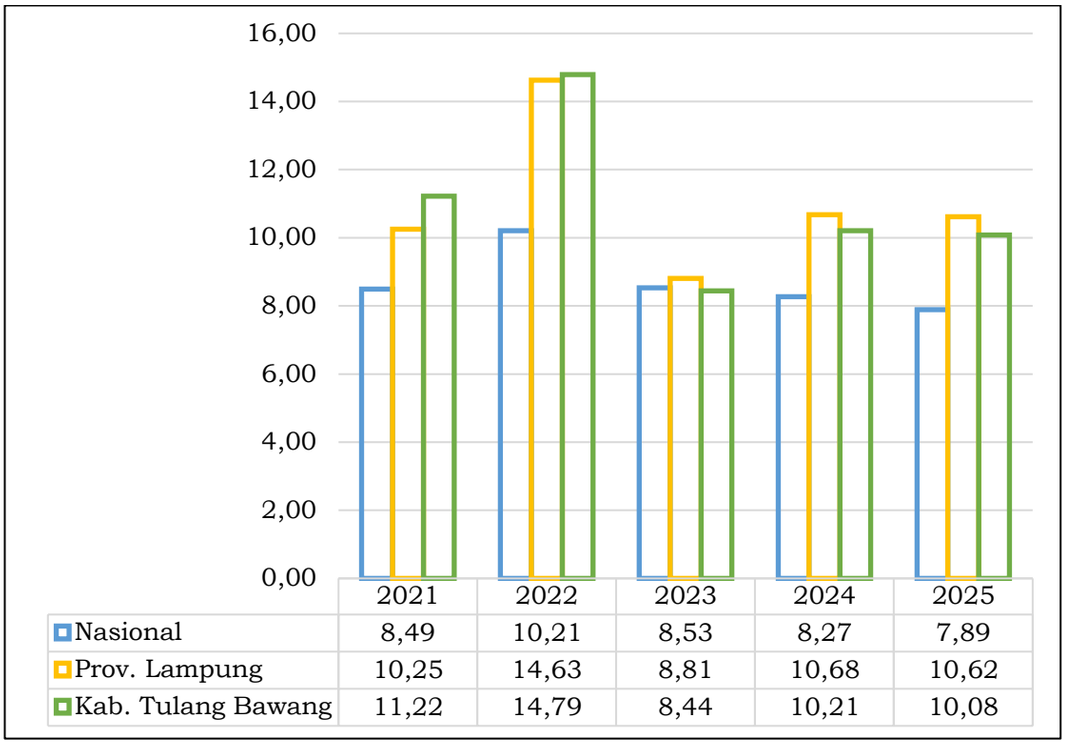
Program dan kegiatan pada urusan pangan dilaksanakan dalam rangka memperkuat cadangan pangan daerah, meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pangan, menyediakan informasi pangan, serta mendorong perbaikan mutu dan pola konsumsi pangan masyarakat. Dalam konteks tersebut, salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan masyarakat adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment).*

Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif. Dengan demikian, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sekaligus mencerminkan kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan penduduk.

Selain itu, indikator ini juga menjadi salah satu alat pemantauan penting dalam evaluasi kebijakan dan program pembangunan di bidang pangan dan gizi. Nilai prevalensi yang lebih rendah menunjukkan kondisi pemenuhan konsumsi pangan yang lebih baik, sedangkan nilai yang lebih tinggi mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi minimum.

Perkembangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di tingkat nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang selama beberapa tahun terakhir disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2. 27 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Pravelence of Uncerourihment)* (%) Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	8,49	10,21	8,53	8,27	7,89
Prov. Lampung	10,25	14,63	8,81	10,68	10,62
Kab. Tulang Bawang	11,22	14,79	8,44	10,21	10,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesial, 2026 (diolah)

Berdasarkan grafik, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, prevalensi tercatat sebesar 11,22 persen, yang berarti sekitar sebelas persen penduduk masih belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimum yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Nilai tersebut kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 14,79 persen, yang merupakan tingkat tertinggi selama periode pengamatan.

Memasuki tahun 2023, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan signifikan menjadi 8,44 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 angka tersebut kembali meningkat menjadi 10,21 persen, dan pada tahun 2025 sedikit menurun menjadi 10,08 persen.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan Provinsi Lampung, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Tulang Bawang pada sebagian besar tahun pengamatan cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2023 misalnya, prevalensi di

Kabupaten Tulang Bawang sebesar 8,44 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional (8,53 persen) namun masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung (8,81 persen). Sementara itu pada tahun 2024 dan 2025, angka prevalensi Kabupaten Tulang Bawang juga masih berada di atas tingkat nasional, tetapi relatif mendekati capaian Provinsi Lampung.

Secara umum, fluktuasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada beberapa tahun, tantangan dalam pemenuhan konsumsi energi minimum masyarakat masih tetap ada. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan dan program di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam meningkatkan ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi, serta menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan.

3) Dimensi Akses Layanan Dasar

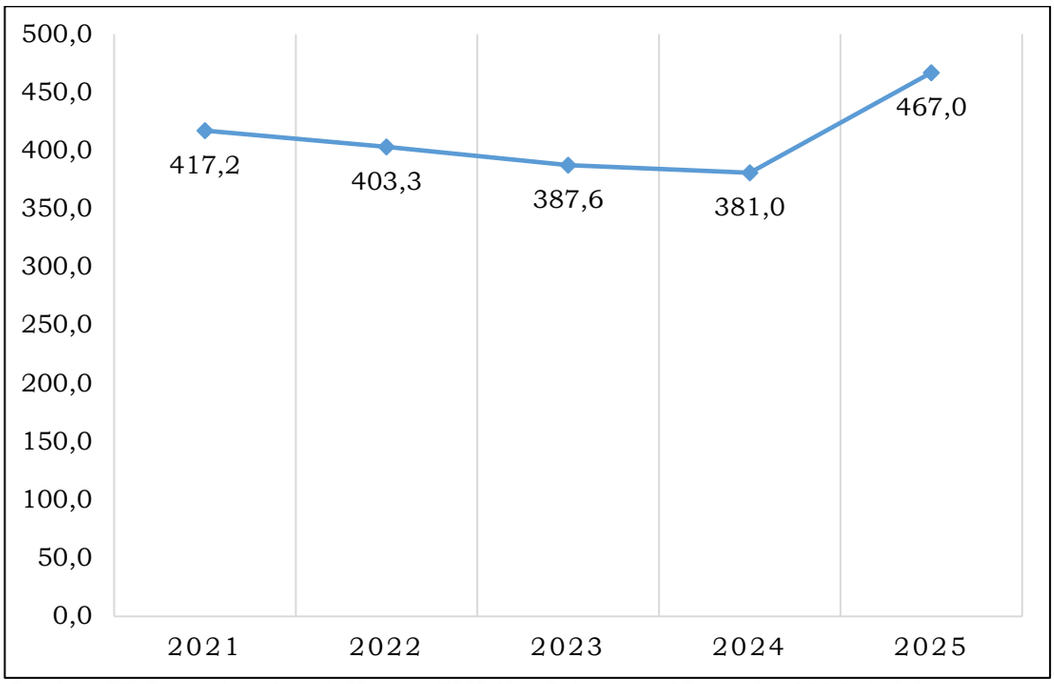
a) Konsumsi Listrik Per Kapita

Pemakaian tenaga listrik merupakan jumlah energi listrik dalam satuan kilowatt-jam (kWh) yang digunakan oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi dan sosial. Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pemanfaatan energi listrik serta perkembangan aktivitas masyarakat di suatu wilayah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PT PLN (Persero) tetap menjadi penyedia utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan data PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Menggala, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada awal periode, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun terakhir. Konsumsi listrik per kapita tercatat sebesar 417,2 kWh pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 403,3 kWh pada tahun 2022, kembali turun menjadi 387,6 kWh pada tahun 2023, dan mencapai 381,0 kWh pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 konsumsi listrik per kapita meningkat cukup tinggi menjadi 467,0 kWh. Perkembangan konsumsi

listrik per kapita di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 28 Konsumsi Listrik per Kapita (KWh) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



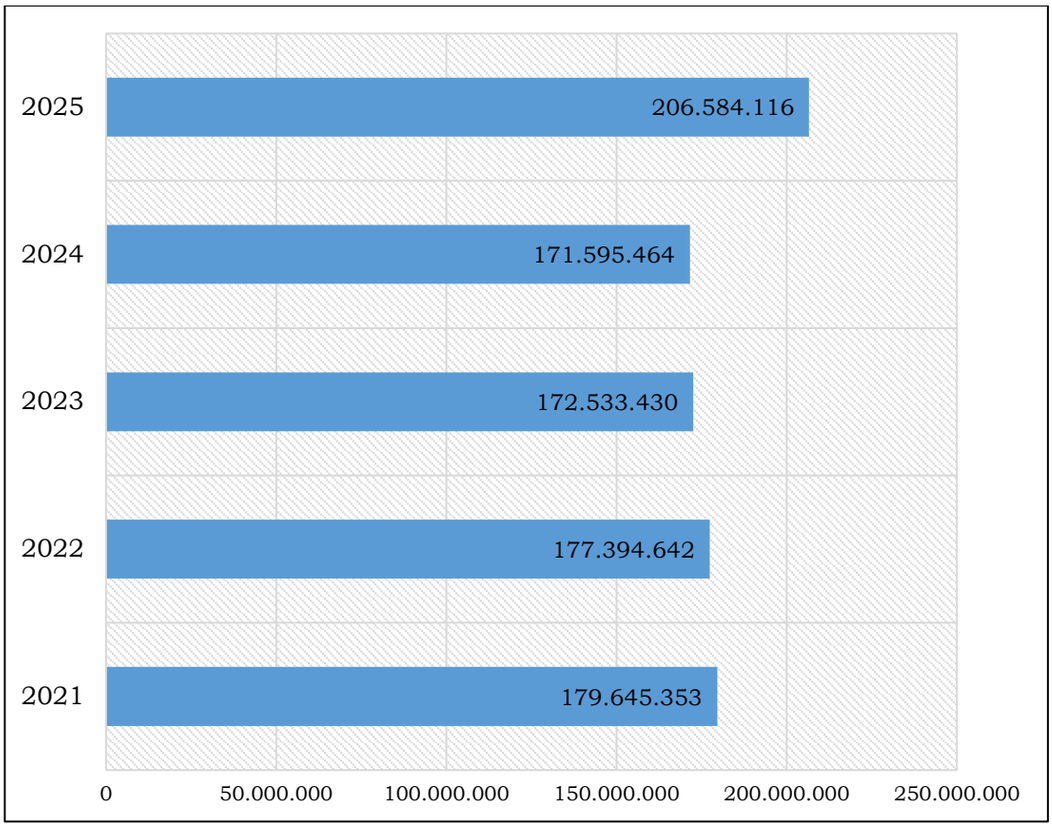
Sumber: PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Menggala, 2026 (diolah)

Sejalan dengan perkembangan konsumsi listrik per kapita, jumlah tenaga listrik yang terjual di Kabupaten Tulang Bawang juga menunjukkan dinamika selama periode 2021-2025. Indikator tenaga listrik terjual menggambarkan total energi listrik yang didistribusikan dan digunakan oleh pelanggan pada berbagai sektor, sehingga dapat mencerminkan tingkat kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah secara umum.

Berdasarkan data PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Menggala, jumlah tenaga listrik yang terjual di Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami penurunan pada periode 2021-2024, dari sebesar 179.645.353 kWh pada tahun 2021 menjadi 177.394.642 kWh pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 172.533.430 kWh pada tahun 2023 dan 171.595.464 kWh pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah tenaga listrik yang terjual meningkat cukup signifikan menjadi 206.584.116 kWh. Peningkatan pada tahun 2025 tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi listrik per kapita

yang mengindikasikan adanya kenaikan kebutuhan energi masyarakat serta aktivitas ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang. Perkembangan jumlah tenaga listrik yang terjual di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 29 Jumlah Tenaga Listrik yang Terjual di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) Unit Pelayanan Menggala, 2026 (diolah)

b) Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air merupakan sumber daya fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan. Tanpa pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan peradaban tidak dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam

mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan ketahanan sosial.

Salah satu aspek paling krusial dalam pemanfaatan air adalah pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga. Akses terhadap air minum yang layak memiliki keterkaitan langsung dengan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Air minum yang tidak memenuhi standar berpotensi menjadi media penularan berbagai penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, tifus, dan penyakit infeksi lainnya, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya beban kesehatan dan menurunnya produktivitas masyarakat.

Kelayakan air minum ditentukan oleh terpenuhinya standar kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara nasional, standar kualitas air minum telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang menegaskan bahwa air minum harus aman bagi kesehatan dan tidak mengandung mikroorganisme, zat kimia, maupun parameter fisik yang membahayakan. Ketentuan ini sejalan dengan pedoman internasional yang ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)*, yang menempatkan akses terhadap air minum aman sebagai salah satu determinan utama kesehatan masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)*, khususnya Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.

Dalam konteks pembangunan daerah, akses rumah tangga terhadap air minum layak menjadi indikator penting dalam menilai tingkat pelayanan dasar dan kualitas hidup masyarakat. Ketimpangan akses, baik dari sisi wilayah maupun kelompok sosial ekonomi, menunjukkan perlunya penguatan peran pemerintah daerah dalam memperluas cakupan pelayanan air minum perpipaan dan nonperpipaan yang aman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah perdesaan. Upaya ini perlu didukung melalui peningkatan infrastruktur air minum, penguatan kelembagaan

penyedia layanan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi air minum yang aman dan sehat.

Dengan demikian, peningkatan akses air minum layak tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target sektor kesehatan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2. 8 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Sumber Air Minum	Tahun				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bersih*)	75,60	75,46	77,94	78,32	-
Layak)**	80,65	81,47	84,62	85,24	88,90

Sumber: BPS Kab. Tulang Bawang & Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026
**) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur/mata air terlindung,*
***) Terdiri dari air sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, air hujan, sumur/mata air tidak terlindung*

Perkembangan akses rumah tangga terhadap sumber air minum di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih relatif stabil dengan tren meningkat, dari 75,60 persen pada tahun 2021 menjadi 75,46 persen pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 77,94 persen pada tahun 2023 dan 78,32 persen pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, data mengenai penggunaan sumber air minum bersih belum tersedia, sehingga perkembangan indikator ini hanya dapat dianalisis hingga tahun 2024.

Sementara itu, akses terhadap sumber air minum layak menunjukkan peningkatan yang lebih konsisten selama periode pengamatan. Persentasenya meningkat dari 80,65 persen pada tahun 2021 menjadi 81,47 persen pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 84,62 persen pada tahun 2023 dan 85,24 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, capaian akses terhadap sumber air minum layak kembali meningkat menjadi 88,90 persen. Tren ini menunjukkan adanya

perbaikan dalam ketersediaan sarana air minum yang memenuhi standar kelayakan bagi rumah tangga.

Meskipun demikian, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya menghilangkan berbagai tantangan dalam penyediaan air minum. Permasalahan air minum di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya berkaitan dengan aspek kuantitas atau kecukupan pasokan, tetapi juga mencakup kualitas dan kontinuitas ketersediaan air, terutama pada wilayah yang masih bergantung pada sumber air permukaan atau sumur yang belum terlindungi dengan baik. Selain itu, fluktuasi ketersediaan air pada musim kemarau di beberapa wilayah juga masih menjadi kendala dalam menjamin akses air minum yang aman dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan akses air minum perlu terus diikuti dengan penguatan sistem penyediaan air minum, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengawasan mutu air. Upaya tersebut penting agar peningkatan akses yang terjadi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mampu menjamin kelayakan, keamanan, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber air minum bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman mengenai jenis dan karakteristik sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan air minum. Rincian sumber air utama yang dimanfaatkan oleh rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang untuk kebutuhan air minum disajikan pada tabel berikut, sebagai gambaran kondisi aktual yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pelayanan air minum yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. 9 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama Untuk Minum di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Sumber Air Utama	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng meteran	36,45	29,12	28,59	30,02	35,05
2	Ledeng meteran, ledeng eceran	0,23	-	-	0,15	-
3	Sumur bor/pompa	11,84	16,31	20,08	21,35	16,80
4	Sumur terlindungi	41,66	40,54	48,60	47,81	46,63
5	Sumur tak terlindungi	8,06	9,89	-	6,41	-
6	Mata air terlindung, tak terlindung	0,18	3,38	1,01	0,92	-
7	Air permukaan	-	0,30	1,73	1,98	-
8	Air Hujan	1,58	0,46	-	0,61	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2025 & Provinsi Lampung Dalam Angka 2026

Beberapa rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang masih menggunakan sumber air minum yang kurang terlindungi, seperti mata air tidak terlindungi, air permukaan, dan air hujan, meskipun persentasenya relatif kecil.

Penggunaan mata air terlindungi maupun tidak terlindungi menunjukkan variasi kecil antar tahun, dengan proporsi yang cenderung rendah dan relatif stabil. Sementara itu, air permukaan masih dimanfaatkan oleh sebagian kecil rumah tangga dan sempat mengalami peningkatan pada beberapa tahun, yang menunjukkan bahwa di wilayah tertentu masyarakat masih bergantung pada sumber air alami seperti sungai atau rawa. Di sisi lain, penggunaan air hujan sebagai sumber air minum juga masih ditemukan meskipun dengan persentase yang sangat kecil dan cenderung menurun.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap sumber air minum yang lebih layak terus meningkat, sebagian kecil rumah tangga masih memanfaatkan sumber air yang kurang aman. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan penyediaan sarana air minum yang lebih terlindungi serta perbaikan

infrastruktur air bersih agar seluruh masyarakat dapat mengakses sumber air minum yang aman dan berkelanjutan.

c) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Sanitasi merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman. Ketersediaan akses sanitasi yang layak menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Akses sanitasi layak merujuk pada ketersediaan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, seperti penggunaan jamban dengan kloset leher angsa yang dilengkapi dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah. Fasilitas sanitasi tersebut dapat digunakan oleh rumah tangga sendiri maupun secara bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

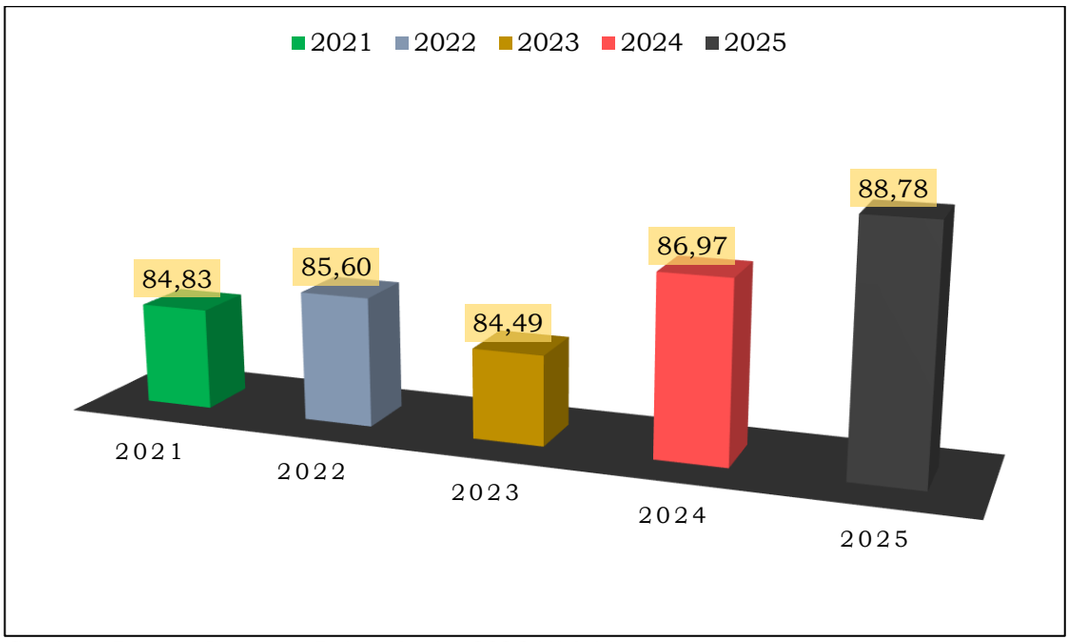
Peningkatan cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi layak merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas lingkungan permukiman serta mendukung perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Ketersediaan sarana sanitasi yang memadai diharapkan dapat mengurangi risiko penularan penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs)*, khususnya Tujuan 6 yang menekankan pentingnya ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan cakupan layanan sanitasi melalui pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi permukiman serta penguatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dengan meningkatnya akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat dapat semakin

membaik serta mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Gambar 2. 30 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan dalam akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak tercatat sebesar 84,83% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 88,78% pada tahun 2025.

Tren peningkatan yang terjadi secara bertahap tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sanitasi rumah tangga di Kabupaten Tulang Bawang. Meningkatnya cakupan akses sanitasi layak mengindikasikan semakin banyak rumah tangga yang telah memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dasar. Kondisi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat serta berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan akses sanitasi layak di Kabupaten Tulang Bawang juga didukung oleh arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi

daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen tersebut mengarahkan pengembangan sektor sanitasi secara terpadu melalui penguatan aspek infrastruktur, kelembagaan, kebijakan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta pendanaan.

Pada subsektor air limbah domestik, strategi pembangunan difokuskan pada peningkatan akses sanitasi layak dan aman melalui penyediaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi. Sementara itu, pada subsektor persampahan, strategi diarahkan pada peningkatan penanganan dan pengurangan timbulan sampah melalui penguatan sistem pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan cakupan layanan sanitasi, memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

4) Dimensi Kualitas Lingkungan Permukiman

a) Perkembangan Timbulan dan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi, timbulan sampah cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang efektif dan terintegrasi.

Perkembangan timbulan sampah tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, indikator seperti timbulan sampah harian, jumlah penduduk, serta timbulan sampah per kapita menjadi penting untuk menggambarkan tingkat produksi sampah di suatu daerah. Selain itu, jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga mencerminkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah, khususnya dalam aspek pengumpulan dan pengangkutan.

Tabel 2. 10 Perkembangan Timbulan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021–2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Timbulan Sampah Harian	ton	173,637	173,564	173,427	173,428	176,016
2	Jumlah Penduduk	jiwa	430.630	431.208	433.570	440.040	442.320
3	Timbulan Sampah Per Kapita	kg/jiwa/hari	0,4032	0,4025	0,4000	0,3941	0,3979
4	Sampah terangkut ke TPA	ton/hari	18,65	18,85	19,11	19,19	18,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel Perkembangan Timbulan dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, timbulan sampah harian relatif stabil pada periode 2021-2024, yaitu berkisar antara 173.427 hingga 173.637 ton, kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 176.016 ton. Jumlah penduduk juga mengalami peningkatan dari 430.630 jiwa pada tahun 2021 menjadi 442.320 jiwa pada tahun 2025.

Meskipun demikian, timbulan sampah per kapita menunjukkan tren menurun dari 0,4032 kg/jiwa/hari menjadi 0,3979 kg/jiwa/hari. Penurunan ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam produksi sampah per individu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi atau meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Sementara itu, sampah yang terangkut ke TPA berfluktuasi dari 18,65 ton/hari pada tahun 2021, meningkat hingga 19,19 ton/hari pada tahun 2024, lalu menurun menjadi 18,69 ton/hari pada tahun 2025. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor operasional seperti kapasitas armada, cakupan pelayanan, serta kondisi sarana dan prasarana pengangkutan.

Secara keseluruhan, peningkatan timbulan sampah sejalan dengan pertumbuhan penduduk, namun penurunan timbulan per kapita menunjukkan indikasi perbaikan dalam pengelolaan sampah. Meski demikian, konsistensi layanan pengangkutan masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.

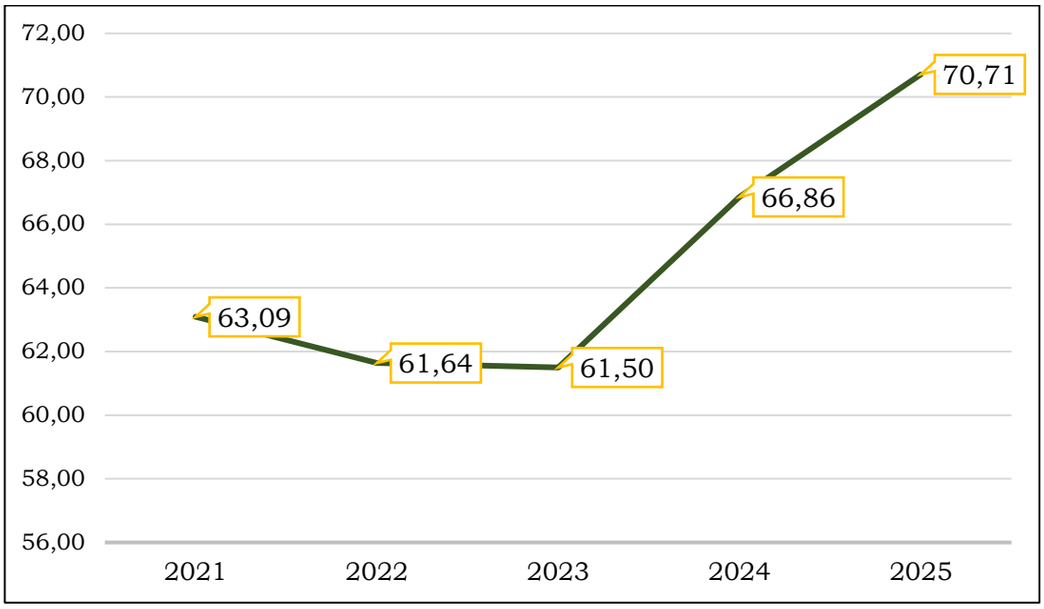
b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup secara menyeluruh, yang mencakup kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan. IKLH berperan sebagai instrumen penting dalam menilai kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap dampak aktivitas pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penurunan kualitas lingkungan hidup dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terencana, dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, IKLH menjadi indikator strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nilai IKLH yang baik mencerminkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sedangkan penurunan nilai IKLH menunjukkan adanya tekanan dan degradasi lingkungan yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan.

Oleh karena itu, peningkatan dan pemeliharaan nilai IKLH perlu didukung melalui penguatan kebijakan perlindungan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut menjadi bagian integral dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan nasional.

Gambar 2. 31 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi pada awal periode dan mengalami peningkatan signifikan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai IKLH tercatat sebesar 63,09. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 61,64 dan kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 61,50. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup pada periode tersebut sehingga nilai indeks mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada tahun 2024 nilai IKLH mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 66,86. Tren perbaikan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian 70,71, yang menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang cukup kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, perkembangan nilai IKLH hingga tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang setelah sempat mengalami penurunan pada periode 2022-2023. Peningkatan pada dua tahun terakhir tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup mulai memberikan dampak positif terhadap kondisi lingkungan di daerah.

Meskipun demikian, upaya pengelolaan lingkungan hidup tetap perlu diperkuat secara berkelanjutan agar peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, terutama melalui pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan sumber daya alam, serta pengelolaan pemanfaatan ruang yang lebih berkelanjutan.

5) Dimensi Kerentanan dan Ketahanan Sosial

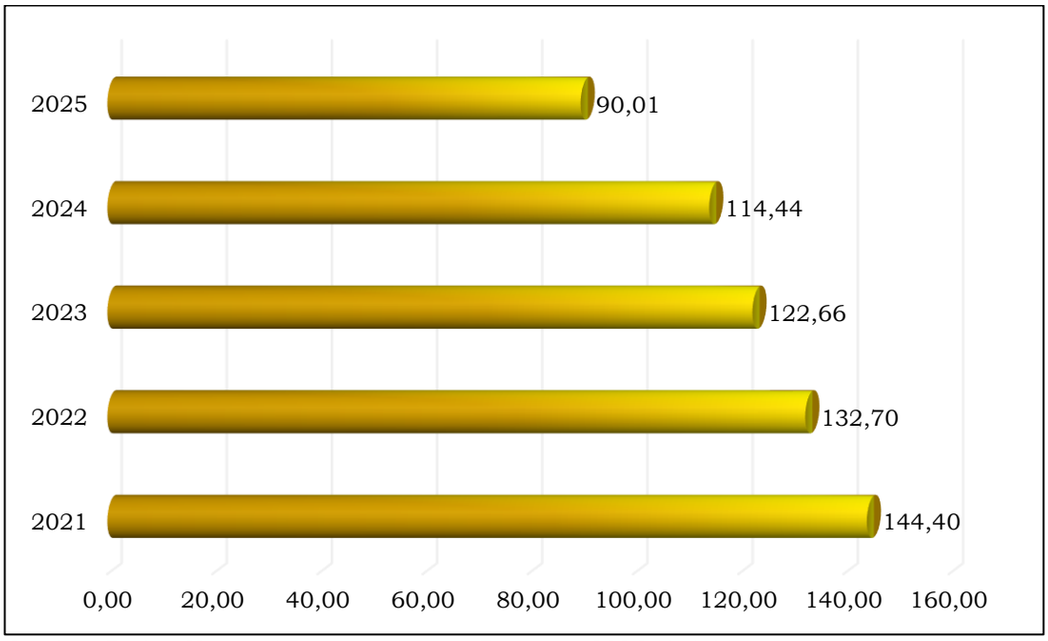
a) Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap kejadian bencana, yang disusun berdasarkan kombinasi tingkat ancaman bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. IRB menjadi instrumen penting dalam penilaian kinerja penanggulangan bencana serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

IRB memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dampak bencana terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda, dan gangguan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Semakin rendah nilai IRB menunjukkan semakin kecil tingkat risiko bencana yang dihadapi suatu daerah, yang mencerminkan meningkatnya ketangguhan dan kapasitas wilayah dalam mengelola risiko kebencanaan secara efektif.

Capaian IRB dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas upaya mitigasi bencana, baik melalui pendekatan struktural maupun nonstruktural. Oleh karena itu, IRB digunakan sebagai acuan dalam penguatan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan bencana guna mewujudkan daerah yang aman, tangguh, dan berketahanan terhadap bencana.

Gambar 2. 32 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026 (diolah)

Nilai Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan capaian paling rendah pada tahun 2025.

Pada tahun 2021, nilai IRB tercatat sebesar 144,40. Angka tersebut kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 132,70, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 122,66. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 114,44, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi risiko bencana di daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2025 nilai IRB kembali menurun signifikan menjadi 90,01. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Tulang Bawang semakin terkendali dan kapasitas daerah dalam pengelolaan kebencanaan mengalami peningkatan yang nyata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, perkembangan nilai IRB selama periode 2021–2025 memperlihatkan adanya penurunan tingkat risiko bencana yang cukup konsisten. Kondisi ini mengindikasikan semakin membaiknya kapasitas daerah dalam aspek mitigasi, kesiapsiagaan, serta upaya

pengurangan risiko bencana. Meskipun demikian, penguatan ketahanan daerah terhadap bencana tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tren penurunan ini dapat dipertahankan dan stabilitas kondisi yang telah dicapai dapat terus dijaga pada tahun-tahun mendatang.

b) Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

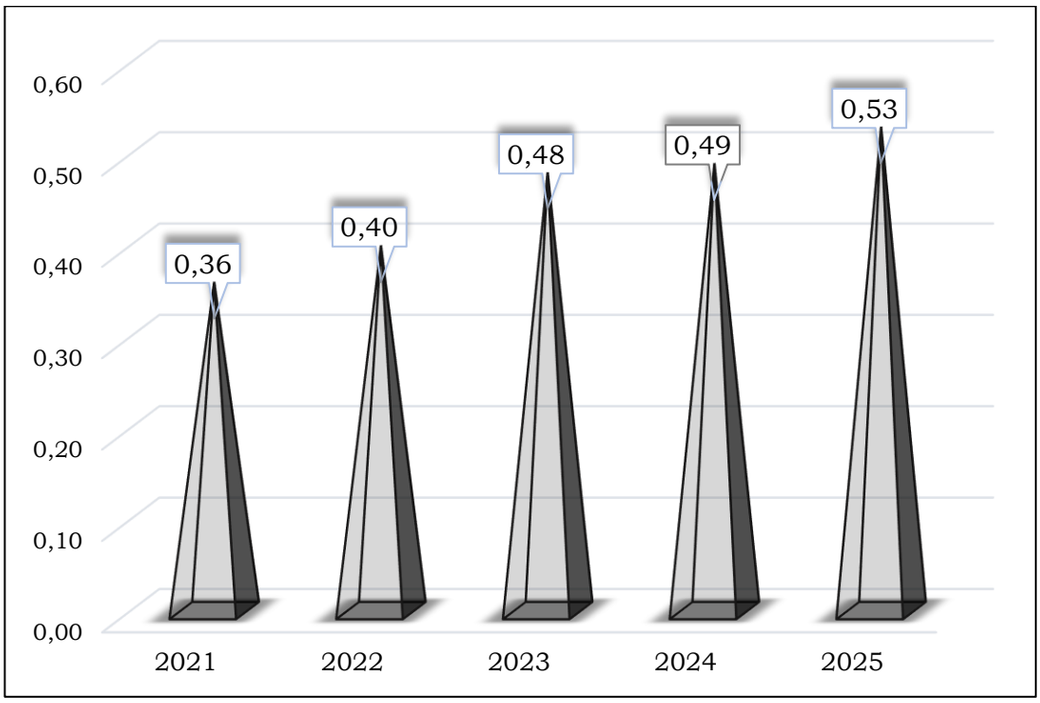
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kapasitas dan ketangguhan daerah dalam menghadapi serta menangani risiko bencana secara komprehensif. IKD disusun sebagai instrumen evaluasi yang menilai sejauh mana suatu daerah memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana, sehingga mampu meminimalkan kerugian jiwa, harta benda, serta gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Penghitungan IKD dilakukan melalui pendekatan *City Resilience Index (CRI)* dan *Urban Community Resilience Assessment (UCRA)*, yang menitikberatkan pada ketahanan sistem perkotaan dan ketangguhan komunitas masyarakat. Melalui pendekatan ini, IKD tidak hanya mengukur aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam penanggulangan bencana. Fokus prioritas dalam penilaian IKD meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pelaksanaan pengkajian risiko bencana secara berkelanjutan, penyusunan dan penerapan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana, serta pengembangan sistem informasi kebencanaan yang andal. Selain itu, IKD juga menilai aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan, serta kesiapan logistik kebencanaan dalam mendukung respons darurat dan pemulihan pascabencana.

Dengan menggunakan IKD sebagai alat ukur, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tingkat ketahanan wilayah sekaligus

menentukan area prioritas yang perlu diperkuat dalam rangka mewujudkan daerah yang tangguh dan berketahanan terhadap bencana. IKD juga berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan dan program penanggulangan bencana yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Gambar 2. 33 Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, nilai IKD tercatat sebesar 0,36 dan meningkat menjadi 0,40 pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai mencapai 0,48, kemudian kembali naik menjadi 0,49 pada tahun 2024. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 0,53.

Kenaikan nilai IKD dari tahun ke tahun mencerminkan adanya penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam aspek kesiapsiagaan, tata kelola risiko, serta kemampuan adaptif pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Peningkatan yang cukup signifikan pada

periode 2022-2023 dan kembali menguat pada 2024-2025 mengindikasikan bahwa berbagai upaya penanggulangan bencana yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan capaian nilai IKD yang terus meningkat hingga melampaui 0,50 pada tahun 2025, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan perkembangan menuju tingkat ketahanan daerah yang semakin baik. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun sistem ketahanan daerah yang berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan tangguh terhadap berbagai potensi bencana.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan di bidang seni budaya dan olahraga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat karakter dan jati diri masyarakat. Seni dan budaya memiliki peran strategis dalam melestarikan nilai-nilai lokal, memperkuat identitas daerah, serta mendorong pengembangan kreativitas masyarakat. Di sisi lain, olahraga berfungsi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran jasmani, kedisiplinan, dan semangat sportivitas masyarakat sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Tulang Bawang, pengembangan seni budaya diarahkan pada upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan seni tradisional serta kearifan lokal agar tetap lestari dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan pelaku seni dan budaya, penyelenggaraan berbagai kegiatan seni budaya, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung. Penguatan ekosistem seni budaya ini diharapkan tidak hanya menjaga keberlanjutan budaya lokal, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis budaya serta meningkatkan daya tarik daerah.

Seiring dengan upaya tersebut, perkembangan jumlah kelompok kesenian yang aktif dari tahun ke tahun mencerminkan meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem seni di Kabupaten Tulang Bawang semakin berkembang dan memperoleh dukungan yang lebih kuat, baik dari komunitas maupun pemerintah daerah. Gambaran mengenai perkembangan tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 11 Data Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Tari Tradisional	kelompok	2	3	5	5	5
2	Seni Musik Tradisional	kelompok	1	2	2	2	2
3	Teater dan Sastra Lisan	kelompok	1	1	1	1	1
4	Pertunjukan Rakyat	kelompok	1	1	1	1	1
5	Hadrah dan Marawis	kelompok	5	5	7	7	7
6	Kerajinan dan Seni Rupa	kelompok	2	2	2	2	2
7	Bahasa dan Adat	kelompok	1	1	1	1	1
	Total	**kelompok**	**13**	**15**	**19**	**19**	**19**

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

Data pada Tabel 2.11 menunjukkan bahwa jumlah kelompok kesenian yang aktif di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, kemudian stabil pada tahun 2024-2025. Jumlah kelompok aktif naik dari 13 kelompok pada 2021 menjadi 15 kelompok pada 2022, dan mencapai 19 kelompok pada 2023. Pada tahun 2024-2025, jumlah tersebut tetap 19 kelompok, menandakan fase stabil setelah pertumbuhan yang cukup signifikan.

Peningkatan terutama terlihat pada kelompok Tari Tradisional dan Hadrah/Marawis, sementara kelompok seperti Teater dan Sastra Lisan, Pertunjukan Rakyat, dan Bahasa dan Adat cenderung stabil sepanjang periode tersebut. Secara umum, perkembangan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenian serta penguatan ekosistem budaya di Kabupaten Tulang Bawang.

Selaras dengan penguatan sektor seni budaya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga secara berkelanjutan mendorong dinamika kegiatan kepemudaan dan olahraga. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan selama periode 2021-2025, baik melalui partisipasi dalam kegiatan berskala regional dan nasional, seperti Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, maupun melalui penyelenggaraan pelatihan, pembinaan, serta lomba kewirausahaan pemuda di tingkat daerah.

Di bidang keolahragaan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan olahraga di tingkat kabupaten serta melakukan pembinaan prestasi melalui pengiriman atlet untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi di tingkat provinsi, regional, hingga nasional. Upaya tersebut berdampak positif terhadap perkembangan organisasi dan klub olahraga di daerah.

Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah organisasi olahraga, yang bertambah dari 18 organisasi pada tahun 2021 menjadi 35 organisasi pada tahun 2025. Selain itu, selama periode 2021-2025 tercatat sebanyak 64 klub olahraga yang aktif.

Tabel 2. 12 Jumlah Organisasi, Klub dan Kegiatan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Organisasi pemuda	organisasi	42	42	42	42	42
2	Organisasi olahraga	organisasi	18	23	28	35	35
3	Klub Olahraga	klub	64	64	64	64	64
4	Kegiatan Pemuda	kegiatan	0	0	1	1	1
5	Kegiatan Olahraga	kegiatan	0	0	1	2	2

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tulang Bawang, 2025

Secara keseluruhan terlihat peningkatan aktivitas kepemudaan dan olahraga, ditandai dengan tumbuhnya organisasi serta meningkatnya kegiatan yang melibatkan pemuda.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan. Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata kelola yang baik di Kabupaten Tulang Bawang. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah. Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

1. **Indeks Reformasi Hukum**

   Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kapabel dan akuntabel, diperlukan pelaksanaan reformasi hukum yang berkualitas. Tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi hukum tersebut diukur melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH). Indeks ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan penataan regulasi, penguatan sistem hukum, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, nilai IRH Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 tercatat sebesar 96,38 dengan kategori AA (Istimewa). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Tulang Bawang telah berada pada kategori sangat baik.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Lampung pada tahun yang sama yang mencapai 96,54, nilai IRH Kabupaten Tulang Bawang masih sedikit lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja reformasi hukum daerah telah berada pada kategori sangat baik, masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penataan regulasi daerah, harmonisasi peraturan, serta penguatan sistem hukum daerah. Dengan demikian, diharapkan capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Tulang Bawang dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

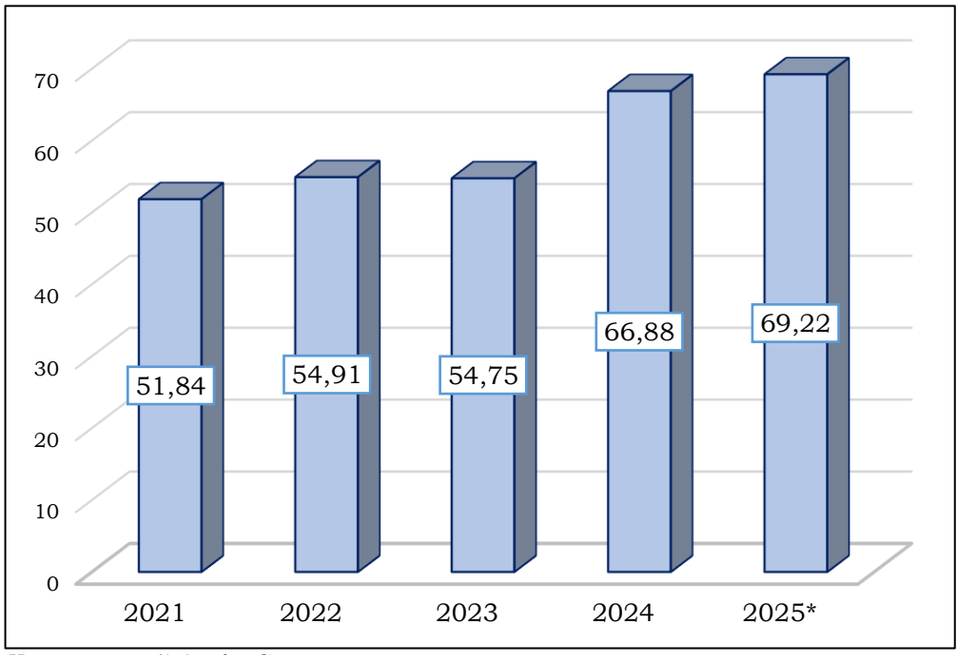
2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu institusi mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik. Dengan menitikberatkan pada efisiensi tata laksana, optimalisasi struktur organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan, indeks ini menjadi tolok ukur dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif.

Dalam implementasinya, reformasi birokrasi tidak hanya bertumpu pada perbaikan prosedur administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi penggerak utama perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan turut menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih modern dan adaptif. Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui indeks ini, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan sekaligus mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah upaya berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia (aparatur), maka dilakukan penilaian melalui indeks reformasi birokrasi (RB). Nilai indeks reformasi birokrasi menjadi dasar pengelompokan kondisi reformasi daerah ke dalam kategori Istimewa (90 100), Memuaskan (80-90), Sangat Baik (70-80), Baik (60-70), Cukup (50 60), Kurang (30-50), dan sangat kurang (0-30).

Gambar 2. 34 Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



*Keterangan : *) Angka Sementara*
Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021 hingga 2023, Kabupaten Tulang Bawang memperoleh predikat CC dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi masing-masing sebesar 51,84 pada tahun 2021, meningkat menjadi 54,91 pada tahun 2022, dan 54,75 pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum periode ini menunjukkan adanya tren perbaikan bertahap dalam tata kelola pemerintahan.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika nilai Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 66,88 dan berhasil meraih predikat B. Capaian tersebut terus berlanjut pada tahun 2025 (angka sementara) dengan nilai 69,22 dan tetap berada pada predikat B. Kenaikan yang cukup substansial sejak tahun 2024 menunjukkan adanya akselerasi dalam implementasi agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, seperti penguatan pengawasan

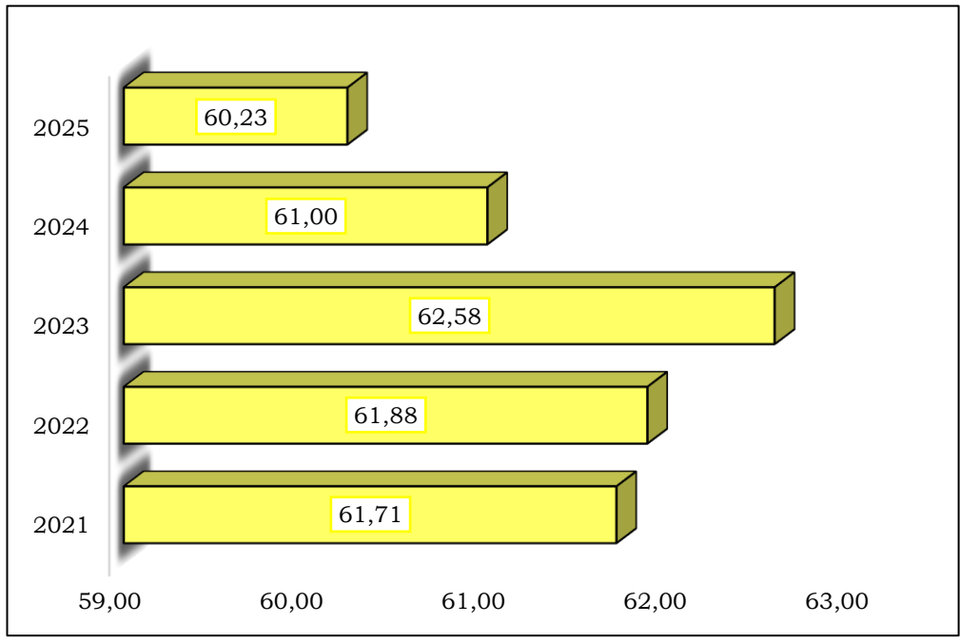
internal, peningkatan kualitas manajemen kinerja, digitalisasi layanan publik, penyederhanaan proses administrasi, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, mulai memberikan dampak yang terukur. Secara keseluruhan, periode 2021-2025 menegaskan adanya komitmen yang semakin kuat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang diselaraskan dengan sistem akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui penyusunan laporan akuntabilitas.

Penilaian SAKIP pada pemerintah daerah dibagi ke dalam tujuh kategori, yaitu: nilai 0-30 (kategori D), 30-50 (kategori CC), 50-60 (kategori C), 60-70 (kategori B), 70-80 (kategori BB), 80-90 (kategori A), dan 90-100 (kategori AA). Dasar penilaian tersebut mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, yang mencakup empat komponen utama, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Gambar 2. 35 Nilai SAKIP Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun relatif stabil dalam rentang nilai yang sama. Pada tahun 2021, nilai SAKIP tercatat sebesar 61,71. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 61,88 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 hingga mencapai 62,58, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tersebut. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, serta keterkaitan antara program dan penganggaran.

Namun demikian, pada tahun 2024 nilai SAKIP mengalami penurunan menjadi 61,00. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas implementasi manajemen kinerja, khususnya pada aspek monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2025, nilai SAKIP kembali mengalami penurunan menjadi 60,23. Meskipun penurunannya tidak terlalu tajam, tren dua tahun terakhir ini perlu menjadi

perhatian dalam rangka menjaga keberlanjutan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Secara umum, selama periode 2021-2025 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menunjukkan upaya dalam penerapan SAKIP dengan capaian yang relatif berada pada kisaran nilai 60-62. Namun, fluktuasi yang terjadi terutama pada tahun 2024 dan 2025 mengindikasikan perlunya penguatan kembali pada aspek perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pengukuran indikator, kualitas pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi, agar tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan..

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan menyeluruh diperlukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang mendukung penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Tulang Bawang berupaya mendorong terwujudnya penerapan SPBE guna mendukung transformasi digital pemerintahan.

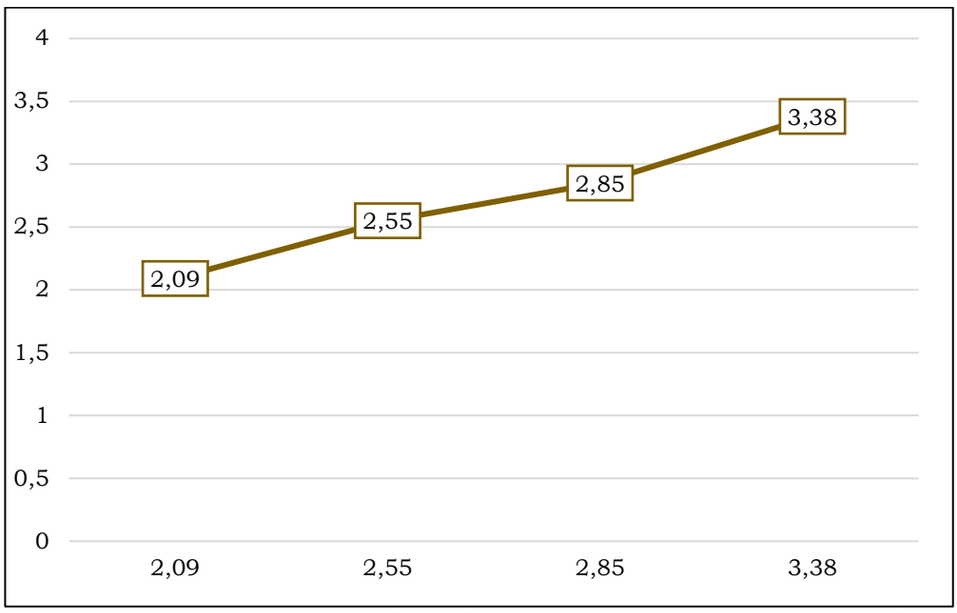
Penerapan SPBE diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Permasalahan dalam pembangunan SPBE yang perlu segera diselesaikan terutama terdapat pada domain Tata Kelola SPBE. Pada aspek perencanaan strategis SPBE, diperlukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat seluruh komponen sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional.

Selain itu, masih terdapat tantangan pada aspek Manajemen SPBE, yaitu belum optimalnya penerapan manajemen SPBE yang meliputi manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan SPBE, manajemen perubahan, manajemen sumber daya manusia SPBE, serta manajemen pengetahuan SPBE.

Pada aspek Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga perlu mendapatkan perhatian melalui pelaksanaan audit yang mencakup audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan SPBE guna memastikan penyelenggaraan SPBE berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Gambar 2. 36 Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan dalam periode evaluasi Tahun 2022-2025. Pada Tahun 2020, Kabupaten Tulang Bawang belum mengikuti Evaluasi SPBE karena pelaksanaan evaluasi hanya dilakukan

terhadap beberapa pemerintah daerah yang menjadi sampel, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, pada Tahun 2021 Kabupaten Tulang Bawang juga belum mengikuti Evaluasi SPBE.

Mulai Tahun 2022, Kabupaten Tulang Bawang mengikuti Evaluasi SPBE dengan memperoleh nilai indeks sebesar 2,09 dan berada pada kategori Cukup. Pada Tahun 2023, nilai Indeks SPBE mengalami peningkatan menjadi 2,55 dan masih berada pada kategori Cukup.

Pada Tahun 2024, capaian Indeks SPBE Kabupaten Tulang Bawang meningkat menjadi 2,85 dan masuk dalam kategori Baik. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan SPBE, baik dari sisi tata kelola, manajemen SPBE, maupun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya pada Tahun 2025, Indeks SPBE kembali mengalami peningkatan menjadi 3,38 dengan kategori Baik. Capaian tersebut menggambarkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami perkembangan dan semakin mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

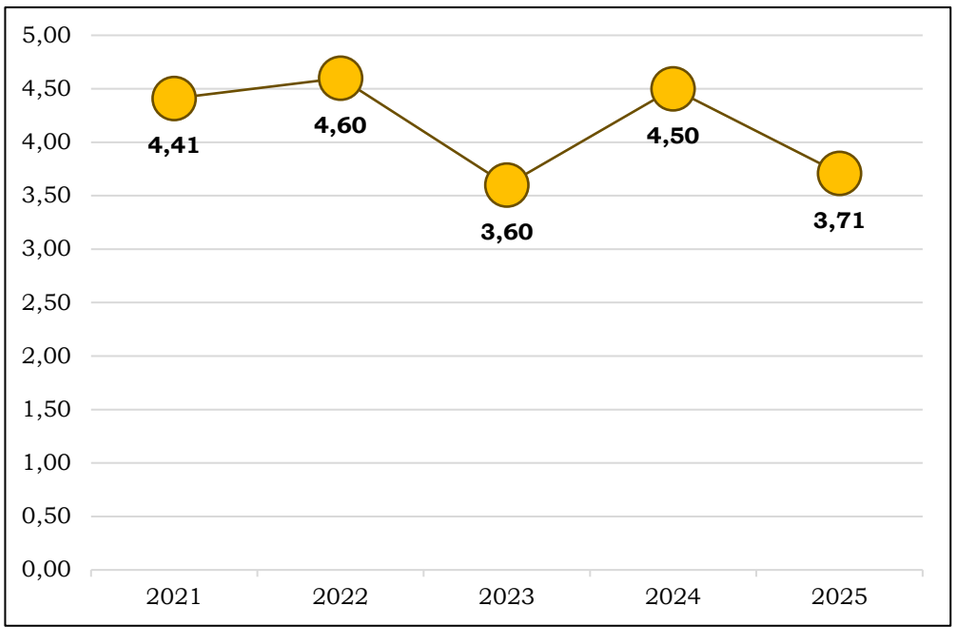
Secara keseluruhan, sejak mengikuti evaluasi SPBE pada Tahun 2022 hingga Tahun 2025, Indeks SPBE Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 1,29 poin, dari 2,09 menjadi 3,38. Meskipun telah mencapai kategori Baik, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih perlu melakukan penguatan penyelenggaraan SPBE, khususnya pada aspek tata kelola, manajemen SPBE, integrasi layanan digital, audit teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan keamanan informasi agar dapat mencapai kategori yang lebih tinggi.

5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Gambar 2. 37 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, Kabupaten Tulang Bawang memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,41 dengan kategori Sangat Baik (A-). Capaian ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,60 yang menempatkan Kabupaten Tulang Bawang pada kategori Pelayanan Prima (A). Namun, pada tahun 2023 nilai IPP mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 3,60, yang menunjukkan adanya penurunan pada beberapa aspek standar pelayanan publik yang dinilai.

Pada tahun 2024, nilai IPP kembali meningkat menjadi 4,50 sehingga Kabupaten Tulang Bawang kembali berada pada kategori Sangat Baik (A-). Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan setelah penurunan pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2025 nilai IPP kembali mengalami penurunan menjadi 3,71. Meskipun masih berada dalam kategori baik, penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konsistensi implementasi standar pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.

Secara umum, perkembangan IPP Kabupaten Tulang Bawang periode 2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022, sementara pada tahun 2023 dan 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen pelayanan publik secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas standar layanan, konsistensi penerapan SOP, penguatan inovasi pelayanan, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja layanan. Dengan langkah perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat kembali meningkat dan mencapai kategori Pelayanan Prima secara stabil.

6. Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi

publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan lain lain.

Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut. Terdapat tiga kategori nilai SPI, antara lain:

1. Rentan untuk nilai SPI yang berada di rentang 0 – 72,9;
2. Waspada untuk nilai SPI yang berada di rentang 73 – 77,9;
3. Terjaga untuk nilai SPI yang berada di rentang 78 – 100.

Tabel 2. 13 Nilai Survei Penilaian Integritas Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025

Wilayah	Nilai/Kategori	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Tulang Bawang	Nilai	70,91	72,41	69,21	72,62	65,40
	Kategori	Rentan	Rentan	Rentan	Rentan	Rentan
Prov. Lampung	Nilai	68,28	62,22	68,44	65,83	69,39
	Kategori	Rentan	Rentan	Rentan	Rentan	Rentan

Sumber : Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK, 2026

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dan secara konsisten berada pada kategori rentan. Pada tahun 2021, nilai SPI tercatat sebesar 70,91 dan meningkat menjadi 72,41 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 69,21, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 72,62, sebelum akhirnya turun cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 65,40.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung, nilai SPI Kabupaten Tulang Bawang cenderung lebih tinggi pada beberapa tahun, seperti tahun 2021, 2022, dan 2024. Sementara itu, pada tahun 2023 nilai SPI Kabupaten Tulang Bawang (69,21) masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung (68,44). Namun, pada tahun 2025, nilai SPI Kabupaten Tulang Bawang (65,40) berada di bawah Provinsi Lampung yang mencapai 69,39. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja integritas yang relatif lebih besar di tingkat kabupaten pada tahun terakhir pengamatan.

Secara keseluruhan, meskipun nilai SPI Kabupaten Tulang Bawang mengalami kenaikan pada beberapa periode, tren yang terbentuk masih bersifat tidak stabil dan belum mampu keluar dari kategori rentan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan masih perlu diperkuat dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Penurunan pada tahun 2025 menjadi perhatian penting, karena dapat mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, seperti sosialisasi anti korupsi, penguatan pendidikan karakter anti korupsi sejak dini, serta pembinaan dan pendampingan aparatur, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu terus meningkatkan efektivitas program-program tersebut agar mampu mendorong perbaikan nilai SPI secara lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat fondasi pembangunan daerah. Pendidikan tidak hanya menjadi instrumen utama dalam peningkatan kompetensi masyarakat, tetapi juga merupakan prasyarat untuk mendorong daya saing daerah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan pendidikan perlu difokuskan pada perluasan akses, peningkatan mutu, serta penguatan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Melalui upaya tersebut, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkesinambungan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan berbagai jenjang dan layanan pendidikan, mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), hingga Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta mendukung pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pembangunan sektor pendidikan merupakan salah satu aspek strategis dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berdaya saing, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Analisis terhadap capaian pembangunan pendidikan diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan pendidikan pada periode perencanaan berikutnya.

Secara umum, capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, semakin tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berbagai program yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dari aspek pemerataan layanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang setara. Namun demikian, masih terdapat perbedaan kondisi antarwilayah, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta tingkat aksesibilitas menuju satuan pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik pada beberapa wilayah tertentu.

Pada aspek mutu pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru, penguatan manajemen sekolah, penyediaan sarana pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, kualitas hasil belajar peserta didik masih perlu terus ditingkatkan, mengingat masih terdapat kesenjangan capaian pembelajaran antar satuan pendidikan yang dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas pendukung, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik juga menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya memenuhi kebutuhan guru melalui optimalisasi distribusi tenaga pendidik serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Namun demikian, tantangan berupa belum meratanya persebaran guru dan kebutuhan

peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam menghadapi transformasi pendidikan masih perlu menjadi perhatian.

Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan secara umum telah mengalami peningkatan melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, penyediaan fasilitas penunjang pendidikan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Meskipun demikian, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan masih diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif, aman, dan nyaman.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren yang positif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses dan layanan pendidikan, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan berkelanjutan.

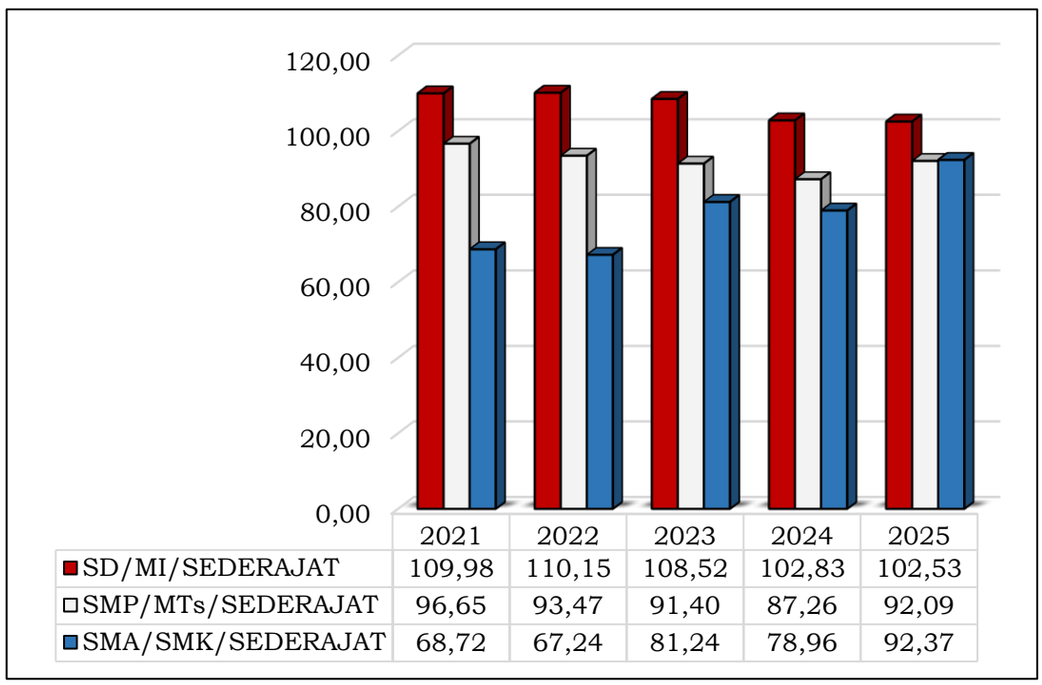
Ke depan, arah kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Tulang Bawang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan tata kelola pendidikan, pemerataan akses pendidikan yang inklusif, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan target pembangunan pendidikan daerah dapat tercapai secara optimal dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul sebagai modal utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio antara jumlah peserta didik yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan batasan usia, terhadap jumlah penduduk yang berada pada kelompok usia yang secara resmi sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut pada tahun yang sama. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam sistem pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan.

APK mencerminkan kemampuan sistem pendidikan dalam menyerap penduduk usia sekolah pada suatu jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai APK, semakin besar proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan pada jenjang tersebut. Namun demikian, karena perhitungannya tidak membatasi usia peserta didik, nilai APK dapat melebihi 100 persen apabila terdapat peserta didik yang bersekolah di luar rentang usia ideal, baik yang lebih muda maupun lebih tua dari kelompok usia yang seharusnya.

Gambar 2. 38 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI/SEDERAJAT	109,98	110,15	108,52	102,83	102,53
SMP/MTs/SEDERAJAT	96,65	93,47	91,40	87,26	92,09
SMA/SMK/SEDERAJAT	68,72	67,24	81,24	78,96	92,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan.

Pada jenjang SD/MI/sederajat, APK selalu berada di atas 100 persen, yaitu 109,98 persen (2021), 110,15 persen (2022), 108,52 persen (2023), 102,83 persen (2024), dan 102,53 persen (2025). Meskipun cenderung menurun, capaian ini menunjukkan partisipasi pendidikan dasar masih sangat tinggi.

Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APK mengalami penurunan dari 96,65 persen (2021) menjadi 87,26 persen (2024), kemudian meningkat kembali menjadi 92,09 persen pada 2025.

Sementara itu, jenjang SMA/SMK/sederajat menunjukkan tren meningkat, dari 68,72 persen (2021) menjadi 92,37 persen (2025), meskipun sempat mengalami fluktuasi pada 2022–2024.

Secara keseluruhan, partisipasi pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang pada jenjang dasar sudah sangat tinggi, sementara pada jenjang menengah pertama sempat menurun namun mulai pulih pada 2025. Di sisi lain, jenjang menengah atas menunjukkan tren peningkatan yang cukup kuat, yang mengindikasikan semakin membaiknya akses masyarakat terhadap pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

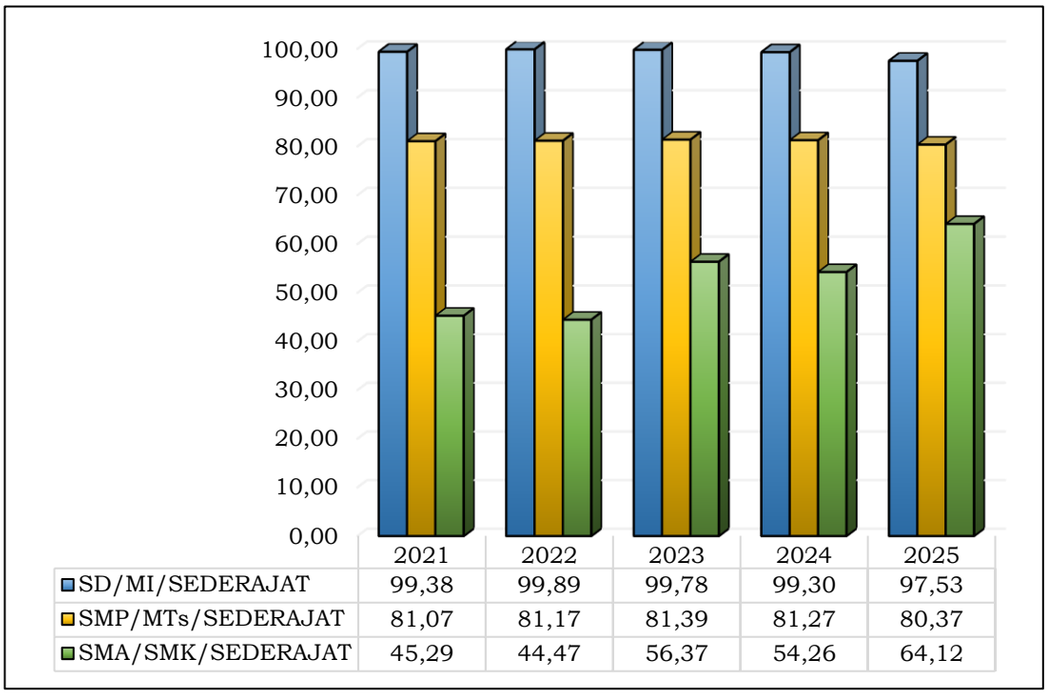
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator penting dalam sektor pendidikan yang menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usia tersebut dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok usia yang sama. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi pendidikan yang sesuai dengan usia resmi pada masing-masing jenjang pendidikan.

Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menghitung seluruh peserta didik tanpa memperhatikan kesesuaian usia, APM

hanya menghitung siswa yang berada pada rentang usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu. Oleh karena itu, APM dinilai lebih mampu menggambarkan keterjangkauan layanan pendidikan formal secara tepat sasaran bagi penduduk usia sekolah. Nilai APM yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan usia yang seharusnya.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, APM merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk menilai pemerataan akses pendidikan serta keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar. Perkembangan nilai APM juga dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kualitas layanan pendidikan, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Gambar 2. 39 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI/SEDERAJAT	99,38	99,89	99,78	99,30	97,53
SMP/MTs/SEDERAJAT	81,07	81,17	81,39	81,27	80,37
SMA/SMK/SEDERAJAT	45,29	44,47	56,37	54,26	64,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tertinggi berada pada jenjang pendidikan dasar.

Pada jenjang SD/MI/sederajat, APM berada pada tingkat yang sangat tinggi dan relatif stabil, yaitu 99,38 persen (2021), 99,89 persen (2022), 99,78 persen (2023), 99,30 persen (2024), dan sedikit menurun menjadi 97,53 persen pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia sekolah dasar telah bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya.

Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APM juga tergolong stabil dengan nilai 81,07 persen pada 2021, meningkat sedikit menjadi 81,17 persen (2022) dan 81,39 persen (2023), kemudian 81,27 persen (2024), serta menurun tipis menjadi 80,37 persen pada 2025.

Sementara itu, jenjang SMA/SMK/sederajat menunjukkan tren peningkatan secara umum, dari 45,29 persen (2021) dan 44,47 persen (2022), kemudian meningkat menjadi 56,37 persen (2023), sedikit turun menjadi 54,26 persen (2024), dan kembali meningkat cukup signifikan menjadi 64,12 persen pada 2025.

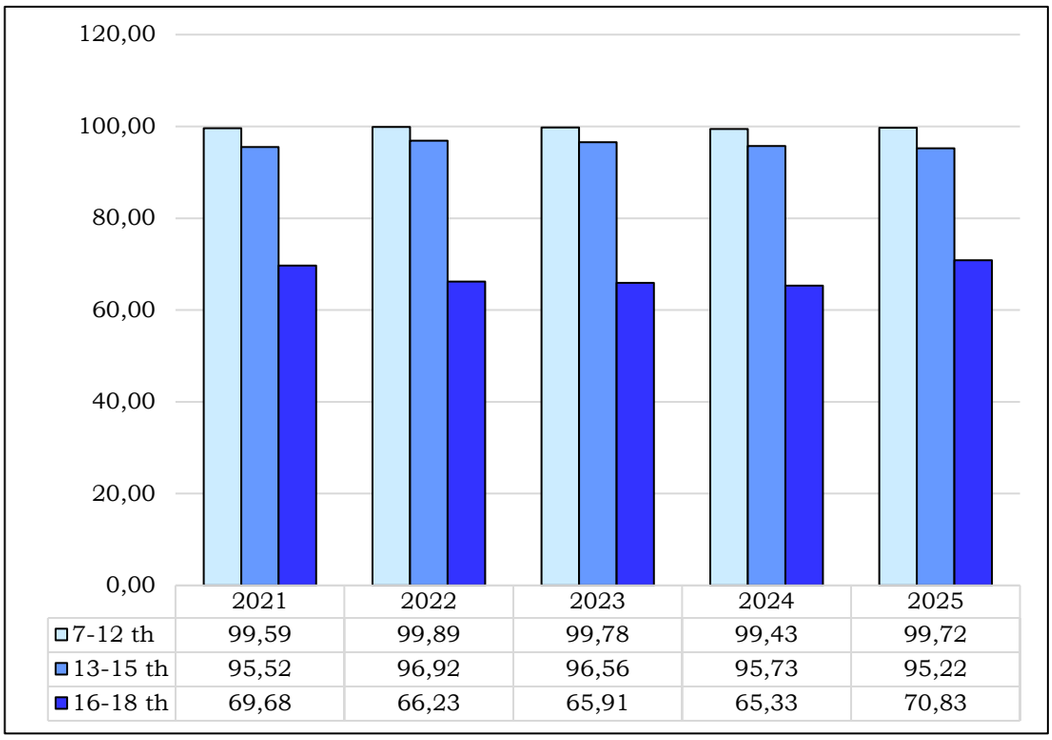
Secara keseluruhan, perkembangan APM di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada usia sekolah dasar telah mencapai tingkat yang hampir merata. Pada jenjang menengah pertama, tingkat partisipasi relatif stabil, sedangkan pada jenjang menengah atas masih lebih rendah meskipun menunjukkan kecenderungan peningkatan pada akhir periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan terbesar dalam peningkatan partisipasi pendidikan masih berada pada jenjang pendidikan menengah atas.

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang apa pun, tanpa memperhatikan kesesuaian antara usia dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah dengan total penduduk pada kelompok usia yang sama.

Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi penduduk usia sekolah dalam sistem pendidikan serta mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di suatu wilayah. Nilai APS yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pada kelompok usia tersebut masih terlibat dalam kegiatan pendidikan.

Gambar 2. 40 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
7-12 th	99,59	99,89	99,78	99,43	99,72
13-15 th	95,52	96,92	96,56	95,73	95,22
16-18 th	69,68	66,23	65,91	65,33	70,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi pada kelompok usia pendidikan dasar dan cukup tinggi pada jenjang menengah pertama, sementara pada kelompok usia menengah atas cenderung lebih rendah meskipun mengalami fluktuasi.

Pada kelompok usia 7-12 tahun, APS berada pada tingkat yang sangat tinggi dan relatif stabil. Pada tahun 2021 APS tercatat sebesar 99,59%, kemudian meningkat menjadi 99,89% pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 tercatat 99,78%, menurun sedikit menjadi 99,43% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 99,72% pada tahun

2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah berpartisipasi dalam pendidikan.

Untuk kelompok usia 13-15 tahun, tingkat partisipasi juga tergolong tinggi meskipun mengalami sedikit fluktuasi. APS tercatat sebesar 95,52% pada tahun 2021, meningkat menjadi 96,92% pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 96,56% pada tahun 2023, kembali menurun menjadi 95,73% pada tahun 2024, dan menjadi 95,22% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia tersebut masih melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah pertama.

Sementara itu, pada kelompok usia 16-18 tahun, APS menunjukkan pola yang lebih berfluktuasi dan berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya. APS tercatat sebesar 69,68% pada tahun 2021, menurun menjadi 66,23% pada tahun 2022 dan 65,91% pada tahun 2023, kemudian kembali menurun menjadi 65,33% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, APS meningkat cukup signifikan menjadi 70,83%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada usia sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Tulang Bawang telah berada pada tingkat yang sangat baik, sementara partisipasi pada kelompok usia menengah atas masih relatif lebih rendah meskipun menunjukkan peningkatan pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan masih perlunya upaya untuk mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

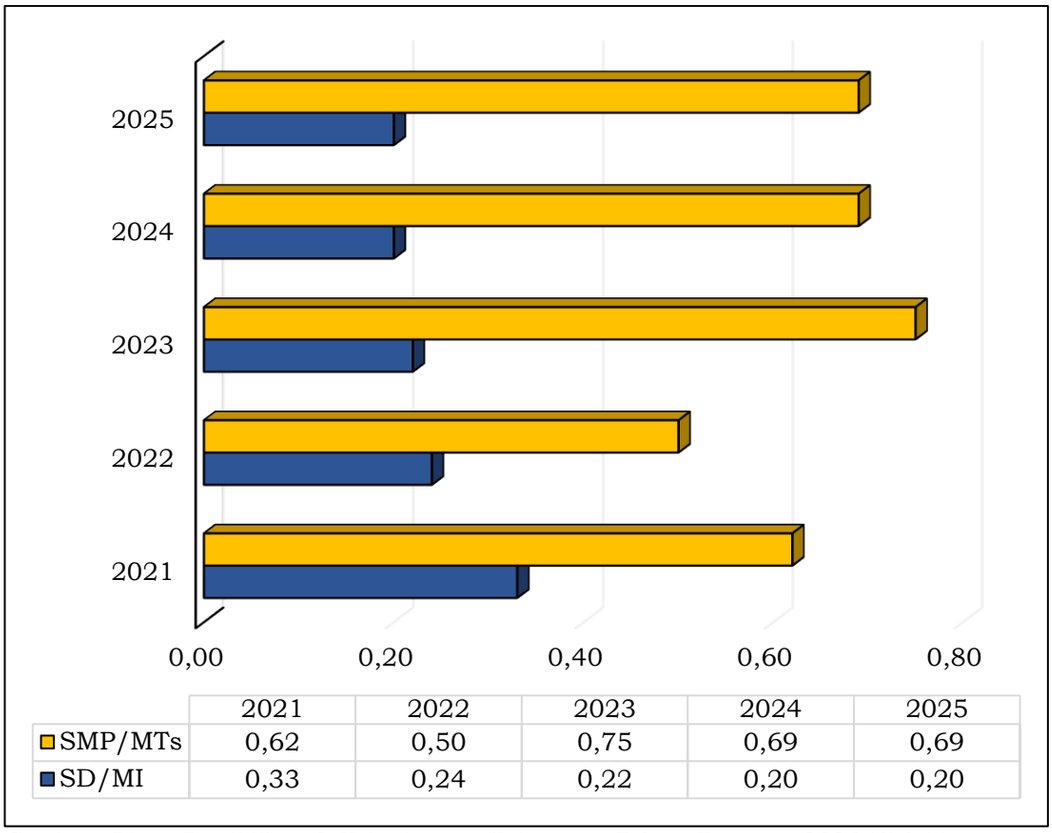
4) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan proporsi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya hingga menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah siswa yang keluar atau berhenti sekolah pada suatu tahun dengan total jumlah siswa pada jenjang pendidikan yang sama. Melalui Angka Putus Sekolah, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tingkat kerentanan peserta

didik untuk tidak melanjutkan pendidikan, sekaligus mengevaluasi efektivitas layanan pendidikan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan sekolah.

Berikut disajikan data Angka Putus Sekolah Kabupaten Tulang Bawang untuk periode tahun 2021-2025.

Gambar 2. 41 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025
SMP/MTs	0,62	0,50	0,75	0,69	0,69
SD/MI	0,33	0,24	0,22	0,20	0,20

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Angka putus sekolah di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang relatif rendah dan terkendali. Pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI), tingkat putus sekolah menurun konsisten dari 0,33% pada tahun 2021 menjadi 0,20% pada tahun 2024, dan tetap stabil di 0,20% pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam mempertahankan anak-anak di jenjang pendidikan dasar serta efektivitas intervensi yang dilakukan untuk mencegah putus sekolah.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), angka putus sekolah mengalami fluktuasi. Setelah menurun dari 0,62% pada tahun 2021 menjadi 0,50% pada tahun 2022, angka tersebut meningkat hingga 0,75% pada tahun 2023, kemudian kembali menurun dan stabil di 0,69% pada tahun 2024-2025. Meskipun masih tergolong rendah, dinamika ini menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan di tingkat menengah pertama.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Tulang Bawang relatif terkendali, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Namun, perhatian khusus tetap diperlukan untuk menekan angka putus sekolah di jenjang SMP/MTs, dengan fokus pada faktor sosial ekonomi, aksesibilitas sekolah, serta motivasi belajar siswa. Upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan pendidikan sangat penting agar tren penurunan angka putus sekolah dapat terus dipertahankan, sehingga seluruh anak usia sekolah mampu menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang menengah pertama.

5) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan merupakan indikator yang menunjukkan proporsi peserta didik yang berhasil menyelesaikan suatu jenjang pendidikan melalui kelulusan pada ujian akhir atau mekanisme evaluasi kelulusan yang ditetapkan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah siswa yang dinyatakan lulus dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti proses evaluasi kelulusan pada jenjang pendidikan tersebut. Angka Kelulusan digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan proses pembelajaran, efektivitas satuan pendidikan dalam mencapai standar kompetensi, serta kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

Berikut disajikan data Angka Kelulusan Kabupaten Tulang Bawang untuk periode tahun 2021–2025.

Tabel 2. 14 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Tahun 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, dan 2024/2025

No	Tingkatan Sekolah	satuan	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1	SD/MI	persen	100	100	100	100
2	SMP/MTs	persen	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) maupun menengah pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021/2022 hingga 2024/2025 tercatat mencapai 100 persen secara konsisten. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh peserta didik yang menempuh pendidikan pada kedua jenjang tersebut berhasil menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus sesuai standar yang ditetapkan.

Kondisi ini mencerminkan efektivitas kebijakan pendidikan daerah, dukungan tenaga pendidik, serta peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memastikan keberlangsungan pendidikan anak. Stabilitas angka kelulusan yang sempurna juga menjadi indikator keberhasilan program pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan capaian 100 persen kelulusan selama empat tahun berturut-turut, pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi kualitas pendidikan sekaligus memperkuat program pendukung agar keberhasilan ini tidak hanya berhenti pada kelulusan, tetapi juga berlanjut pada peningkatan kompetensi lulusan dan kesiapan mereka menghadapi jenjang pendidikan berikutnya maupun dunia kerja.

6) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi lulusan pada suatu jenjang pendidikan yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun ajaran berikutnya. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu yang terdata melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya dengan total jumlah lulusan pada jenjang

pendidikan sebelumnya pada tahun yang sama. AM digunakan untuk menilai minat, kemampuan, dan peluang peserta didik dalam melanjutkan pendidikan, serta mencerminkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan pendidikan lanjutan di suatu daerah.

Dalam praktiknya, Angka Melanjutkan umumnya dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu AM dari SD/sederajat ke SMP/sederajat dan AM dari SMP/sederajat ke SMA/sederajat. Kedua indikator tersebut penting untuk memahami kesinambungan proses pendidikan, sekaligus mengidentifikasi potensi hambatan yang memengaruhi transisi peserta didik antarjenjang pendidikan.

Tabel 2. 15 Angka Melanjutkan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	SD/MI ke SMP/MTs	satuan	99,94	99,95	77,26	81,69	83,38
2	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	satuan	98,97	99,00	71,03	78,58	80,26

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021 dan 2022, capaian AM berada pada tingkat sangat tinggi, yakni 99,94% dan 99,95%, mencerminkan hampir seluruh lulusan pendidikan dasar melanjutkan ke jenjang menengah pertama. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam hingga 77,26%, yang kemudian berangsur membaik menjadi 81,69% pada 2024 dan 83,38% pada 2025. Meskipun tren menunjukkan pemulihan, capaian tersebut masih belum kembali ke tingkat optimal seperti awal periode. Pola serupa juga terlihat pada transisi ke jenjang menengah atas. Tahun 2021 dan 2022 mencatat AM yang sangat tinggi, masing-masing 98,97% dan 99,00%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis hingga 71,03%, sebelum kembali meningkat menjadi 78,58% pada 2024 dan 80,26% pada 2025.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang sempat berada pada posisi hampir sempurna, terdapat tantangan serius pada tahun 2023 yang berdampak pada penurunan angka melanjutkan di kedua jenjang. Pemulihan yang terjadi pada 2024-

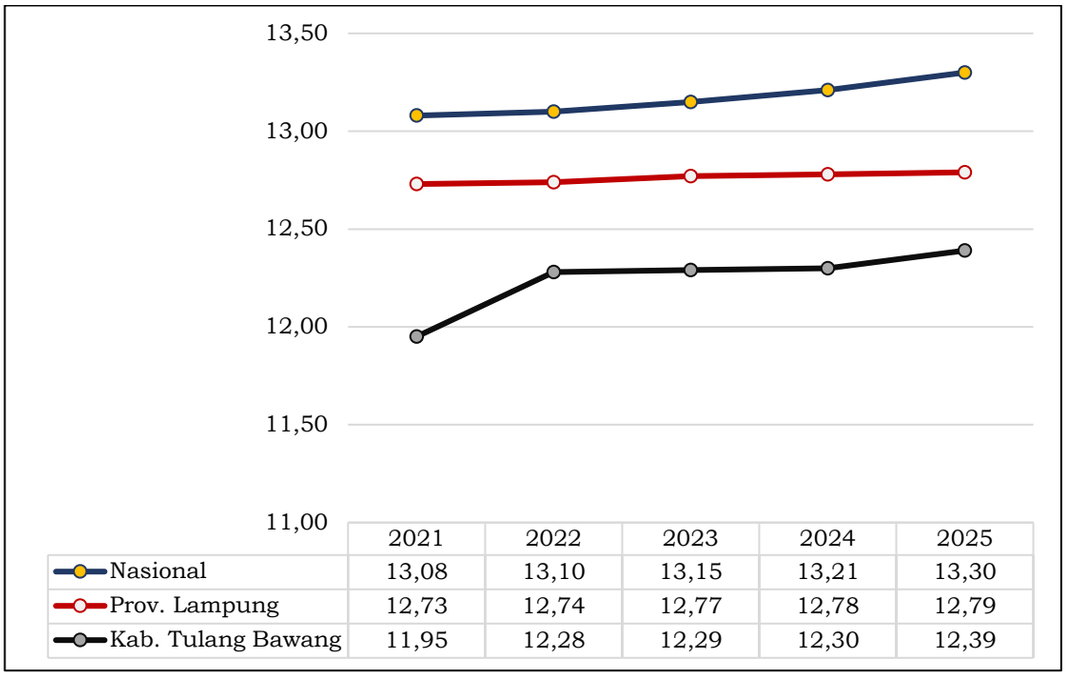
2025 menandakan adanya perbaikan, namun tetap diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk memastikan kesinambungan pendidikan, khususnya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat seperti kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas sekolah, serta motivasi belajar peserta didik.

7) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lamanya pendidikan formal (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa peluang seorang anak untuk tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang sedang bersekolah pada kelompok umur yang sama pada tahun berjalan. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas dan mencerminkan ekspektasi rata-rata lama pendidikan yang dapat dicapai oleh setiap anak apabila pola partisipasi sekolah saat ini tidak berubah.

Sebagai salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), HLS memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan sistem pendidikan di suatu daerah, termasuk keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan pada berbagai jenjang. Peningkatan HLS menunjukkan semakin terbukanya akses pendidikan, meningkatnya partisipasi sekolah, serta membaiknya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, nilai HLS yang rendah mengindikasikan masih adanya hambatan struktural maupun sosial ekonomi yang membatasi kesempatan belajar bagi penduduk.

Gambar 2. 42 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30
Prov. Lampung	12,73	12,74	12,77	12,78	12,79
Kab. Tulang Bawang	11,95	12,28	12,29	12,30	12,39

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2025 (diolah)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan tren positif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten selama periode 2021 hingga 2025. Secara nasional, HLS meningkat dari 13,08 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,30 tahun pada tahun 2025. Provinsi Lampung mencatat kenaikan dari 12,73 tahun pada 2021 menjadi 12,79 pada 2025. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, dari 11,95 tahun pada tahun 2021 menjadi 12,39 tahun pada tahun 2025.

Kenaikan HLS di Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat, meskipun capaian masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Selisih HLS antara Kabupaten Tulang Bawang dan nasional sebesar 0,91 tahun pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan masih perlu diatasi melalui kebijakan afirmatif dan peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam aksesibilitas, minat melanjutkan sekolah, dan kebijakan pendidikan lokal, sekaligus menjadi indikator positif terhadap pembangunan kualitas sumber

daya manusia di wilayah tersebut. Namun demikian, tantangan terkait mutu pendidikan dan penyebaran fasilitas pendidikan yang merata tetap perlu diperhatikan untuk memastikan peningkatan HLS diikuti oleh kualitas yang sepadan.

8) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui ketersediaan, pemerataan, serta pemanfaatan layanan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Indeks ini disusun oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai alat ukur untuk menggambarkan kondisi pengembangan budaya literasi di suatu wilayah.

Pengukuran IPLM didasarkan pada Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang mencerminkan kapasitas dan kinerja pembangunan perpustakaan dalam mendukung peningkatan budaya baca masyarakat. Unsur tersebut terdiri atas beberapa komponen, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi, serta jumlah anggota perpustakaan.

Selain itu, penghitungan IPLM juga mempertimbangkan karakteristik masyarakat sebagai faktor penimbang, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, serta jumlah civitas sekolah dan akademika. Melalui pengukuran berbagai komponen tersebut, IPLM dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dukungan infrastruktur literasi serta tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat dalam mendukung pengembangan budaya literasi secara berkelanjutan.

Tabel 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	-	70,32	59,58	80,25	7,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2026

Berdasarkan data pada tabel, perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai IPLM belum tersedia dalam statistik resmi sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian pada tahun tersebut.

Pada tahun 2022, nilai IPLM Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 70,32, yang menunjukkan kondisi pembangunan literasi masyarakat berada pada tingkat yang cukup baik. Nilai ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 59,58, yang mengindikasikan adanya penurunan pada beberapa komponen pembangun literasi masyarakat, seperti tingkat kunjungan perpustakaan, ketersediaan koleksi, maupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Pada tahun 2024, nilai IPLM kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 80,25. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada berbagai komponen pembangunan literasi masyarakat, seperti peningkatan layanan perpustakaan, penguatan koleksi bahan bacaan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas literasi.

Sementara itu, pada tahun 2025 nilai IPLM tercatat sebesar 7,61, yang jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Nilai yang sangat kecil tersebut pada umumnya tidak mencerminkan penurunan kondisi literasi masyarakat secara langsung, melainkan dapat dipengaruhi oleh perbedaan metode pengumpulan data atau keterbatasan kelengkapan pelaporan indikator literasi pada sistem pendataan nasional yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional

Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Dalam penghitungan IPLM, kelengkapan data pada setiap komponen unsur pembangun literasi masyarakat sangat menentukan nilai indeks yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, perkembangan IPLM Kabupaten Tulang Bawang selama periode tersebut menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam memperkuat infrastruktur perpustakaan, meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat, serta memastikan konsistensi pelaporan data literasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pengelola perpustakaan, dan masyarakat dalam meningkatkan budaya literasi secara berkelanjutan.

9) Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI merupakan pengukuran kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Berdasarkan pengembangan dari *"G20 Toolkit for measuring digital skills and digital literacy"*, kerangka kerja IMDI terdiri atas empat pilar, meliputi:

1. Infrastruktur dan Ekosistem.

   Merupakan pilar landasan pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Pilar ini menekankan kesetaraan akses untuk ekosistem yang inklusif dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan tuntutan dunia digital. Pilar infrastruktur dan ekosistem dapat dilihat dari tiga aspek yaitu akses dan adopsi teknologi digital, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah.
2. Keterampilan Digital

   Berperan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan unuk mengakses, mengelola, memahami dan menciptakan informasi secara aman. Pilar ini dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu komplementaritas, pengenalan dan keamanan TIK.

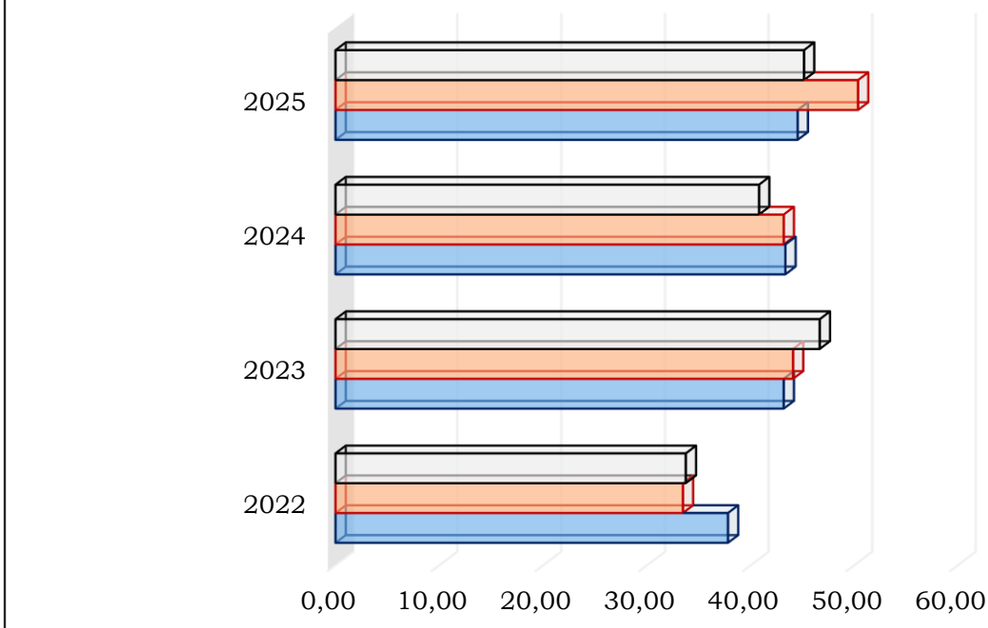
3. Pemberdayaan Pilar

   pemberdayaaan mempresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan keterampilan digital. Pilar ini melibatkan tiga pengukuran yaitu pengguna, penyedia dan platform.

4. Pekerjaan

   Pilar pekerjaan berfokus kepada keahlian digital yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dimana digitalisasi menciptakan jenis dan tugas pekerjaan baru. Pilar ini terdiri atas dua aspek yaitu permintaan dan penawaran.

Gambar 2. 43 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025



	2022	2023	2024	2025
Kab. Tulang Bawang	33,73	46,66	40,80	45,14
Prov. Lampung	33,45	44,08	43,18	50,36
Nasional	37,80	43,18	43,34	44,53

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia, 2025 (diolah)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IMDI Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 33,73, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung (33,45), namun masih berada di bawah rata-rata nasional (37,80).

Tahun 2023 mencatat lonjakan nilai IMDI Kabupaten Tulang Bawang menjadi 46,66, melampaui baik Provinsi Lampung (44,08) maupun nasional (43,18). Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 40,80, sehingga posisinya kembali berada di bawah rata-rata nasional (43,34) dan Provinsi Lampung (43,18). Pada tahun 2025, nilai IMDI Kabupaten Tulang Bawang kembali meningkat menjadi 45,14. Meski belum melampaui Provinsi Lampung (50,36), capaian ini menunjukkan pemulihan dan tren positif dalam pengembangan masyarakat digital di daerah.

Secara keseluruhan, fluktuasi nilai IMDI Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan perlunya konsistensi dalam kebijakan dan program literasi digital, infrastruktur teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam ekosistem digital. Perbandingan dengan provinsi dan nasional juga menjadi indikator penting untuk evaluasi dan perbaikan strategi pembangunan digital daerah.

10) Capaian SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan sekaligus evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.

SPM bidang pendidikan mencakup tiga layanan utama, yaitu:

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan penerima layanan peserta didik berusia 5-6 tahun.
- Pendidikan Dasar, dengan penerima layanan peserta didik berusia 7-15 tahun.
- Pendidikan Kesetaraan, dengan penerima layanan peserta didik berusia 7-18 tahun.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan untuk periode 2021-2025 dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	satuan	Target	Capaian				
				2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	persen	100,00	80,00	45,05	48,60	88,12	77,82
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	persen	100,00	80,19	92,41	85,77	89,78	87,68
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	persen	100,00	0,00	86,39	56,77	85,23	7,29

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Pada indikator partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD, capaian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 dan mencapai tingkat yang relatif tinggi pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 capaian kembali mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini masih belum stabil dan memerlukan penguatan upaya perluasan layanan PAUD serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini.

Pada indikator partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs), capaian secara umum berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode tersebut. Meskipun sempat mengalami fluktuasi, capaian indikator ini tetap menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah dasar telah terlayani dalam sistem pendidikan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan dasar di Kabupaten Tulang Bawang sudah cukup baik, meskipun masih perlu terus ditingkatkan untuk mendekati target pelayanan minimal secara penuh.

Sementara itu, pada indikator partisipasi pendidikan kesetaraan bagi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah, capaian menunjukkan pola yang sangat berfluktuasi. Setelah mengalami peningkatan pada tahun-tahun awal, capaian kembali menurun cukup tajam pada tahun terakhir periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa layanan pendidikan kesetaraan belum berjalan optimal dan masih memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Secara keseluruhan, capaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar relatif telah berjalan baik, namun masih terdapat tantangan dalam peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini serta optimalisasi layanan pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kebijakan dan program yang berfokus pada perluasan akses PAUD, pencegahan putus sekolah, serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan agar pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya

saing sumber daya manusia. Pemerintah daerah menempatkan kesehatan sebagai prioritas strategis, sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang terus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui penyediaan layanan kesehatan yang merata, mudah diakses, dan terjangkau, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem kesehatan mulai dari pelayanan dasar hingga pelayanan rujukan.

1) Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

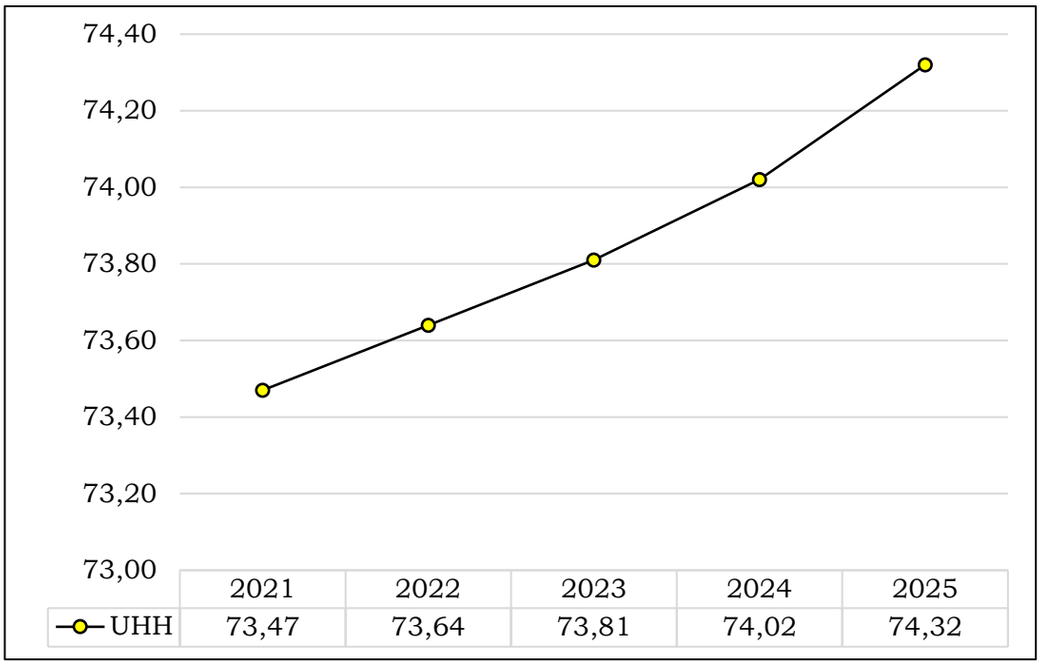
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) merupakan indikator yang menunjukkan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku pada saat penghitungan tetap berlaku sepanjang hidupnya. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat serta mencerminkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah.

Dalam statistik pembangunan, UHH menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UHH juga merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Nilai UHH yang semakin tinggi menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, serta perbaikan kondisi sosial ekonomi penduduk.

Penghitungan UHH dilakukan berdasarkan data kelahiran dan kematian penduduk yang kemudian diolah menggunakan metode tabel mortalitas *(life table).* Selain melalui estimasi rutin statistik kependudukan, nilai UHH juga diperkuat dengan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan berbagai indikator demografi dan sosial ekonomi

secara lebih rinci. Berikut disajikan data Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025.

Gambar 2. 44 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2026 (diolah)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, nilai UHH tercatat sebesar 73,47 tahun. Angka ini kemudian meningkat menjadi 73,64 tahun pada tahun 2022, atau bertambah sekitar 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, perbaikan gizi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai UHH mencapai 73,81 tahun, kemudian kembali meningkat menjadi 74,02 tahun pada tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini

mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya peluang hidup penduduk.

Pada tahun 2025, nilai UHH kembali mengalami peningkatan menjadi 74,32 tahun, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir UHH di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 0,85 tahun, dari 73,47 tahun pada tahun 2021 menjadi 74,32 tahun pada tahun 2025.

Peningkatan nilai UHH ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang cenderung semakin membaik. Hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, perbaikan kondisi lingkungan, serta meningkatnya taraf hidup masyarakat yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup penduduk.

2) Angka Kematian Ibu

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan parameter utama untuk menilai keselamatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI dihitung sebagai jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan maternal, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan terlatih, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta efektivitas sistem rujukan obstetri. Tingkat AKI dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti status gizi, kondisi sosial ekonomi, kesehatan ibu sebelum hamil, serta munculnya komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Indikator ini penting sebagai dasar evaluasi dan perencanaan peningkatan kesehatan ibu secara menyeluruh.

Tabel 2. 18 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	kasus	4	3	1	3	2
2	Jumlah kelahiran hidup	jiwa	8.802	8.290	8.598	7.656	7.326
3	**Angka Kematian Ibu**	**per 100.000 KH**	**45,44**	**36,19**	**11,63**	**39,18**	**27,30**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi namun secara umum berada dalam kategori terkendali. Pada tahun 2021 tercatat 4 kasus kematian ibu dari 8.802 kelahiran hidup dengan AKI sebesar 45,44 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3 kasus dengan AKI 36,19 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana hanya terdapat 1 kasus kematian ibu dari 8.598 kelahiran hidup sehingga AKI turun menjadi 11,63 per 100.000 kelahiran hidup, yang merupakan capaian terendah dalam periode pengamatan.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali menjadi 3 kasus dengan 7.656 kelahiran hidup sehingga AKI naik menjadi 39,18 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, pada tahun 2025 angka tersebut kembali menunjukkan perbaikan dengan 2 kasus dari 7.326 kelahiran hidup dan AKI sebesar 27,30 per 100.000 kelahiran hidup.

Secara keseluruhan, apabila dibandingkan antara awal dan akhir periode, terlihat adanya perbaikan dari 45,44 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 27,30 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu di daerah. Meskipun demikian, tren yang masih naik–turun mengindikasikan bahwa penurunan AKI belum sepenuhnya stabil dari tahun ke tahun.

Jumlah kematian ibu setiap tahun berada pada kisaran yang relatif sedikit, sehingga fluktuasi satu kasus dapat memengaruhi nilai rasio secara cukup signifikan. Dengan demikian, capaian penurunan pada tahun tertentu tetap perlu diikuti dengan upaya menjaga konsistensi agar tren perbaikan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Upaya penguatan perlu terus dilakukan melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan antenatal sesuai standar, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan kompeten, optimalisasi sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta pelaksanaan audit maternal perinatal secara berkala. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam percepatan penurunan kematian ibu serta target global yang ditetapkan oleh *World Health Organization* untuk menurunkan rasio kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.
Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tulang Bawang dapat ditekan secara lebih konsisten sehingga keselamatan ibu semakin terjamin dan derajat kesehatan masyarakat terus meningkat.

3) Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan ukuran penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya terkait keselamatan dan kualitas hidup bayi pada masa awal kehidupannya. AKB menggambarkan jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Tingkat AKB menjadi cerminan langsung dari kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, kondisi gizi, lingkungan, serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Berikut data Angka Kematian Bayi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 19 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kematian bayi (≤ 1 tahun)	kasus	19	1	22	4	38
2	Jumlah kelahiran hidup	bayi	8.783	8.289	8.681	7.642	7.288
3	**Angka Kematian Bayi**	**per. 1.000 KH**	**2,16**	**0,12**	**2,53**	**0,52**	**5,21**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021 tercatat 19 kasus kematian bayi dari 8.783 kelahiran hidup, sehingga AKB sebesar 2,16 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan hanya 1 kasus kematian bayi dari 8.289 kelahiran hidup dan AKB turun menjadi 0,12.

Namun, pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan menjadi 22 kasus dari 8.681 kelahiran hidup, sehingga AKB naik menjadi 2,53. Tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan 4 kasus dari 7.642 kelahiran hidup dan AKB turun menjadi 0,52. Akan tetapi, pada tahun 2025 terjadi lonjakan yang cukup tinggi, yaitu 38 kasus kematian bayi dari 7.288 kelahiran hidup, sehingga AKB meningkat tajam menjadi 5,21 per 1.000 kelahiran hidup.

Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa AKB belum stabil dan masih mengalami fluktuasi yang cukup ekstrem, terutama dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2025. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya intervensi, khususnya dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi, optimalisasi pemantauan kehamilan dan neonatal, ketersediaan tenaga kesehatan, perbaikan status gizi ibu dan bayi, serta deteksi dan penanganan dini komplikasi pada bayi baru lahir.

Selain itu, jumlah kelahiran hidup selama periode 2021-2025 cenderung menurun (dari 8.783 pada 2021 menjadi 7.288 pada 2025). Penurunan ini mencerminkan perubahan demografi yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pelayanan kesehatan ke

depan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan serta koordinasi lintas sektor agar setiap bayi yang lahir dapat tumbuh sehat dan selamat melewati masa neonatal dan bayi.

4) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan ibu dan anak. Tingginya AKHB mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, mulai dari masa kehamilan, proses persalinan, hingga perawatan bayi pada tahun pertama kehidupannya.

Indikator ini menunjukkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Perhitungan pada indikator ini menggunakan jumlah kematian bayi di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut data angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025.

Tabel 2. 20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	2,16	0,12	2,53	0,52	5,21
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000 - AKB)	bayi	997,84	999,88	997,47	999,48	994,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah bayi yang mampu bertahan hidup hingga usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKHB dihitung dengan rumus 1.000 dikurangi Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin tinggi nilai AKHB, semakin baik kondisi kesehatan ibu dan anak serta kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Di Kabupaten Tulang Bawang, perkembangan AKHB selama periode 2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif yang sejalan dengan perubahan AKB. Pada tahun 2021, AKHB tercatat sebesar 997,84 bayi per 1.000 kelahiran hidup, dengan AKB sebesar 2,16 per 1.000 kelahiran hidup.

Pada tahun 2022, AKHB meningkat signifikan menjadi 999,88 seiring dengan menurunnya AKB menjadi 0,12. Namun, pada tahun 2023 AKHB kembali menurun menjadi 997,47, sejalan dengan meningkatnya AKB menjadi 2,53.

Pada tahun 2024, kondisi kembali membaik dengan meningkatnya AKHB menjadi 999,48, didukung oleh penurunan AKB menjadi 0,52. Selanjutnya, pada tahun 2025 AKHB kembali mengalami penurunan menjadi 994,79 akibat meningkatnya AKB menjadi 5,21 per 1.000 kelahiran hidup.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa AKHB sangat dipengaruhi oleh dinamika AKB. Fluktuasi yang terjadi mengindikasikan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk peningkatan kualitas layanan antenatal, persalinan yang aman, serta perawatan neonatal. Upaya penurunan AKB secara konsisten akan berdampak langsung pada peningkatan AKHB dan mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang.

5) Balita Gizi Buruk

Indikator Balita Gizi Buruk menggambarkan proporsi anak usia di bawah lima tahun yang mengalami kondisi kekurangan gizi tingkat berat berdasarkan hasil penilaian status gizi. Indikator ini digunakan untuk memantau derajat kesehatan balita, sekaligus mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi di daerah. Semakin rendah angka balita gizi buruk, semakin baik kapasitas layanan kesehatan dasar, cakupan pemenuhan gizi, serta kualitas pengasuhan anak.

Tabel 2. 21 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita yang ditimbang (0-59 bulan)	balita	18.496	21.441	23.181	23.675	21.545
2	Jumlah balita gizi buruk	balita	0	0	6	2	1
3	**Persentase Balita Gizi Buruk**	**persen**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0259**	**0,0084**	**0,0046**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, jumlah balita usia 0-59 bulan yang ditimbang di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2025. Pada tahun 2021, jumlah balita yang ditimbang tercatat sebanyak 18.496 balita, meningkat menjadi 21.441 balita pada 2022 dan 23.181 balita pada 2023. Pada tahun 2024 jumlahnya kembali meningkat menjadi 23.675 balita. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 21.545 balita.

Sejalan dengan cakupan penimbangan tersebut, kasus balita gizi buruk mulai teridentifikasi sejak tahun 2023. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak ditemukan kasus gizi buruk. Pada tahun 2023 tercatat 6 kasus, kemudian menurun menjadi 2 kasus pada 2024 dan kembali menurun menjadi 1 kasus pada 2025. Meskipun jumlah kasus tergolong sangat kecil, kondisi ini tetap memerlukan perhatian karena menunjukkan adanya balita yang mengalami kerentanan gizi.

Persentase balita gizi buruk terhadap jumlah balita yang ditimbang juga menunjukkan angka yang sangat rendah. Pada tahun 2021 dan 2022 persentasenya sebesar 0,0000 persen. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,0259 persen, kemudian menurun menjadi 0,0084 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 0,0046 persen pada 2025. Penurunan persentase ini mengindikasikan perbaikan kondisi, meskipun tetap diperlukan kewaspadaan dan upaya deteksi dini secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan program pemantauan status gizi balita, peningkatan cakupan dan kualitas penimbangan, serta pelaksanaan intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, edukasi pola makan sehat, dan pemantauan tumbuh kembang secara berkala. Upaya ini perlu diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan ibu, mengingat status gizi anak sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi ibu sejak masa kehamilan hingga menyusui.

6) Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi kesehatan dan status gizi anak balita di Kabupaten Tulang Bawang. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, infeksi berulang, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya, seperti kualitas sanitasi, pola asuh, kondisi lingkungan, dan akses terhadap pangan bergizi. Kondisi tersebut ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar pertumbuhan anak seusianya.

Berbeda dengan gizi buruk yang umumnya menggambarkan kondisi kekurangan gizi akut dalam periode relatif singkat, stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang. Dampak stunting tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, produktivitas, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada masa dewasa. Oleh karena itu, penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang dibandingkan dengan tingkat Provinsi Lampung dan Nasional selama periode tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 22 Perkembangan Prevalensi Stunting di Tingkat Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

STUNTING	2021 (SSGI)	2022 (SKI)	2023 (SKI)	2024 (SKI)	2025 (SIGIZIKESGA)
NASIONAL	24,4	21,6	21,5	19,8	18,8
PROV. LAMPUNG	18,5	15,2	14,9	15,9	13,2
KAB. TULANG BAWANG	9,5	10,0	9,8	18,3	5,4

Sumber: SKI Tahun 2023, SSGI Tahun 2021, 2022 dan 2024

Keterangan:
Tahun 2025 Tidak ada survey dari kementerian

Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Lampung. Pada tingkat nasional, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan secara bertahap, yaitu dari 24,40 persen pada tahun 2021 menjadi 18,80 persen pada tahun 2025. Hal yang sama juga terlihat pada tingkat Provinsi Lampung yang mengalami penurunan dari 18,50 persen pada tahun 2021 menjadi 13,20 persen pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Sementara itu, prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan angka 9,50 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 10,00 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting menurun menjadi 9,80 persen. Namun, pada tahun 2024 berdasarkan SKI kembali mengalami peningkatan menjadi 18,30 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025 berdasarkan data SIGIZIKESGA, prevalensi stunting tercatat sebesar 5,40 persen.

Perbedaan angka prevalensi antarperiode tersebut perlu dilihat dengan mempertimbangkan perbedaan sumber dan metode pengumpulan data. Data SSGI dan SKI merupakan hasil survei berbasis sampel yang menggambarkan estimasi kondisi stunting pada wilayah tertentu, sedangkan data SIGIZIKESGA/EPPGBM berasal dari pencatatan rutin layanan gizi yang mencakup sasaran yang mendapatkan pemantauan di fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu. Dengan demikian, perubahan angka antar tahun dapat

dipengaruhi oleh variasi metode pengukuran, cakupan sasaran, kualitas pencatatan, serta karakteristik data yang digunakan.

Secara umum, prevalensi stunting Kabupaten Tulang Bawang berada di bawah capaian nasional dan Provinsi Lampung pada sebagian besar tahun pengamatan. Meskipun demikian, fluktuasi prevalensi menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tetap perlu diperkuat melalui intervensi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pemantauan pertumbuhan balita, serta penguatan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

Kegiatan intervensi spesifik yang telah dilakukan dalam mendukung penurunan stunting meliputi pelaksanaan *Community Feeding Center (CFC), Therapeutic Feeding Centre (TFC)*, sosialisasi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita wasting, pendampingan balita gizi buruk, kunjungan rumah bagi ibu hamil dan balita risiko tinggi, konseling laktasi, pelaksanaan *Antenatal Care (ANC)* terpadu, kelas ibu hamil, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), pendampingan balita diare dengan pemberian zinc, pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemeriksaan kualitas air bersih, konseling calon pengantin, peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan balita, serta penguatan kerja sama lintas program dan lintas sektor.

7) Jumlah Posyandu per 1.000 Balita

Indikator Jumlah Posyandu per 1.000 Balita menggambarkan ketersediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat dalam mendukung pemantauan tumbuh kembang anak serta pelayanan kesehatan dasar ibu dan balita di tingkat desa. Posyandu berperan sebagai ujung tombak deteksi dini masalah kesehatan, terutama terkait gizi, perkembangan anak, dan pemenuhan imunisasi. Melalui kegiatan rutin seperti penimbangan, pemantauan status gizi, pemberian makanan tambahan, serta edukasi kesehatan, Posyandu

menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan balita dan memperkuat upaya pencegahan masalah gizi.

Sebagai standar operasional, satu Posyandu idealnya melayani sekitar 50 balita, sehingga kecukupan jumlah Posyandu terhadap jumlah balita menjadi aspek penting dalam memastikan jangkauan layanan kesehatan dasar yang merata dan efektif.

Tabel 2. 23 Rasio Posyandu Per 1.000 Balita di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Jumlah Posyandu	Unit	293	162	314	308	308
2	Jumlah Balita	Anak	26.112	26.992	28.195	28.300	26.710
3	Rasio Posyandu	Per 1.000 balita	11,22	6,00	11,14	10,88	11,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, jumlah Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 terdapat 293 unit Posyandu, kemudian menurun tajam menjadi 162 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 314 unit dan sedikit menurun menjadi 308 unit pada tahun 2024, serta tetap berada pada angka 308 unit pada tahun 2025.

Sementara itu, jumlah balita juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 26.112 anak, meningkat menjadi 26.992 anak pada 2022 dan kembali meningkat menjadi 28.195 anak pada 2023. Pada tahun 2024 jumlah balita mencapai 28.300 anak, kemudian menurun menjadi 26.710 anak pada tahun 2025.

Perubahan jumlah Posyandu dan jumlah balita tersebut berpengaruh langsung terhadap rasio Posyandu per 1.000 balita. Pada tahun 2021, rasio tercatat sebesar 11,22 Posyandu per 1.000 balita. Rasio ini menurun drastis menjadi 6,00 pada tahun 2022 seiring dengan berkurangnya jumlah Posyandu. Pada tahun 2023 rasio kembali

meningkat menjadi 11,14, kemudian sedikit menurun menjadi 10,88 pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 11,53 pada 2025.

Fluktuasi rasio ini mencerminkan dinamika antara kapasitas layanan Posyandu dan jumlah balita yang dilayani. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketersediaan layanan yang relatif lebih baik dibandingkan jumlah sasaran, sedangkan rasio yang menurun dapat mengindikasikan meningkatnya beban layanan pada setiap Posyandu. Oleh karena itu, penguatan Posyandu tidak hanya perlu difokuskan pada penambahan jumlah unit, tetapi juga pada pemerataan distribusi, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan kapasitas kader agar seluruh balita dapat terlayani secara optimal.

Secara umum, data tahun 2021-2025 menunjukkan adanya upaya penyesuaian kapasitas layanan kesehatan dasar anak melalui pengelolaan jumlah Posyandu yang diselaraskan dengan dinamika jumlah balita di Kabupaten Tulang Bawang.

8) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Fasilitas Pelayanan Kesehatan menggambarkan ketersediaan sarana kesehatan di suatu wilayah yang berfungsi sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Ketersediaan fasilitas seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan unit layanan kesehatan lainnya menjadi ukuran penting dalam menilai kemampuan daerah memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin memadai jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan, semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau.

Tabel 2. 24 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Rumah Sakit Umum Daerah	unit	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Umum Swasta	unit	3	3	3	3	3
Puskesmas	unit	66	66	66	66	66

Fasilitas Pelayanan Kesehatan	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-Puskesmas Rawat Inap	unit	7	7	7	7	7
-Puskesmas Non Rawat Inap	unit	13	13	13	13	13
-Puskesmas Pembantu	unit	46	46	46	46	46
Klinik/Poliklinik	unit	10	10	18	18	18
Apotek	unit	21	21	52	52	52
Posyandu	unit	293	162	314	308	308
Praktek Dokter	unit	32	32	34	34	34
Praktek Bidan	unit	416	443	550	542	542

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, setiap 240.000 penduduk harus tersedia minimal satu unit rumah sakit. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 sebanyak 455.400 jiwa, maka kebutuhan minimal rumah sakit adalah sekitar 2 unit (455.400/240.000 ≈ 1,9). Hingga tahun 2025, Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki 4 unit rumah sakit yang terdiri atas 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 3 Rumah Sakit Umum Swasta. Dengan demikian, secara kuantitatif ketersediaan rumah sakit telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan.

Berdasarkan data tahun 2021-2025, jumlah RSUD tercatat tetap sebanyak 1 unit dan rumah sakit umum swasta sebanyak 3 unit setiap tahun. Jumlah Puskesmas juga stabil sebanyak 66 unit per tahun, yang terdiri atas 7 Puskesmas Rawat Inap, 13 Puskesmas Non Rawat Inap, dan 46 Puskesmas Pembantu.

Beberapa fasilitas lainnya menunjukkan peningkatan dalam periode tersebut. Klinik/Poliklinik meningkat dari 10 unit pada tahun 2021-2022 menjadi 18 unit pada tahun 2023 dan tetap hingga tahun 2025. Apotek bertambah signifikan dari 21 unit pada tahun 2021-2022 menjadi 52 unit sejak tahun 2023 dan stabil sampai tahun 2025. Posyandu mengalami fluktuasi, dari 293 unit pada tahun 2021, menurun menjadi 162 unit pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 314 unit pada tahun 2023 dan relatif stabil pada 308 unit pada tahun 2024-2025. Praktik Dokter meningkat dari 32 unit pada

tahun 2021-2022 menjadi 34 unit pada tahun 2023-2025. Praktik Bidan juga menunjukkan peningkatan dari 416 unit pada tahun 2021 menjadi 443 unit pada tahun 2022, lalu naik menjadi 550 unit pada tahun 2023 dan sedikit menurun menjadi 542 unit pada tahun 2024–2025.

Secara umum, meskipun jumlah rumah sakit dan puskesmas cenderung stagnan, terdapat peningkatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan mandiri hingga tahun 2025. Ke depan, selain mempertahankan kecukupan jumlah fasilitas, perhatian juga perlu diarahkan pada aspek pemerataan distribusi, peningkatan kualitas layanan, serta kapasitas sarana dan tenaga kesehatan agar akses pelayanan kesehatan dapat semakin optimal di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar hingga tahun 2025, penguatan mutu layanan Puskesmas juga dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi menjadi instrumen penting untuk menjamin standar pelayanan, tata kelola, keselamatan pasien, serta peningkatan mutu berkelanjutan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Gambaran perkembangan status akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 25 Jumlah Puskesmas Menurut Status Akreditasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Puskesmas	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Paripurna	0	0	8	8	8
2	Utama	2	2	12	12	12
3	Madya	13	13	0	0	0
4	Dasar	3	3	0	0	0
5	Belum Akreditasi	0	0	0	0	0
	Jumlah	**18**	**18**	**20**	**20**	**20**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan status akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025

yang mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun level akreditasi.

Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah Puskesmas terakreditasi tercatat sebanyak 18 unit, dengan komposisi 2 Puskesmas berstatus Utama, 13 berstatus Madya, dan 3 berstatus Dasar. Pada periode ini belum terdapat Puskesmas dengan status Paripurna, namun seluruh Puskesmas sudah terakreditasi karena tidak ada yang berstatus Belum Akreditasi.

Sejak tahun 2023 jumlah Puskesmas terakreditasi meningkat menjadi 20 unit dan bertahan hingga tahun 2025. Perubahan yang menonjol terlihat pada pergeseran status akreditasi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu 8 Puskesmas berstatus Paripurna dan 12 berstatus Utama, serta tidak adanya lagi Puskesmas dengan status Madya maupun Dasar.

Peningkatan status akreditasi ini mencerminkan penguatan sistem pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Tulang Bawang, terutama dalam aspek manajemen, mutu layanan, serta pemenuhan standar nasional. Status akreditasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Puskesmas telah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara lebih terstandar dan terukur.

Selain penguatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga perlu dilihat dari kapasitas fasilitas rujukan, khususnya rumah sakit. Dalam konteks tersebut, klasifikasi atau kelas rumah sakit menjadi indikator penting untuk menggambarkan kemampuan pelayanan, ketersediaan tenaga medis spesialistik, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Gambaran mengenai Kelas Rumah Sakit di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 26 Kelas Rumah Sakit di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

No	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Menggala	B	Paripurna
2	RS Penawar Medika	C	Paripurna
3	RS. Mutiara Bunda	C	Paripurna
4	RS. Griya Medika Dompet Dhuafa	C	Paripurna

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Tercatat ada empat rumah sakit yang beroperasi, dengan satu rumah sakit berkelas B yaitu RSUD Menggala, serta tiga rumah sakit berkelas C yaitu RS Penawar Medika, RS Mutiara Bunda, dan RS Griya Medika Dompet Dhuafa. Meskipun mayoritas rumah sakit masih berada pada kelas C, seluruh rumah sakit telah berhasil memperoleh akreditasi Paripurna, yang merupakan tingkat akreditasi tertinggi dalam sistem penilaian mutu rumah sakit di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan pihak pengelola rumah sakit dalam menjaga standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. RSUD Menggala sebagai rumah sakit kelas B berperan penting sebagai pusat rujukan utama, sementara rumah sakit kelas C tetap menjadi penyedia layanan dasar yang terakreditasi penuh. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi standar nasional, meskipun kapasitas layanan spesialistik masih perlu diperkuat melalui pengembangan rumah sakit kelas B dan dukungan rujukan ke fasilitas kesehatan di luar kabupaten.

9) Jumlah Tenaga Kesehatan serta Rasio Dokter dan Tenaga Medis per 1.000 Penduduk

Jumlah tenaga kesehatan merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas layanan sistem kesehatan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun rujukan. Tenaga kesehatan mencakup berbagai kategori profesi, antara lain dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan tenaga kefarmasian. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun sebaran, sangat menentukan aksesibilitas,

kualitas, serta kontinuitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

Pemenuhan jumlah tenaga kesehatan juga berkaitan erat dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. Daerah dengan jumlah tenaga kesehatan yang mencukupi umumnya mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara optimal. Sebaliknya, kekurangan tenaga kesehatan dapat menimbulkan beban kerja yang tinggi, menurunkan mutu layanan, serta menghambat pencapaian indikator kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan cakupan imunisasi, dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.

Oleh karena itu, penguatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan perlu dilakukan melalui strategi rekrutmen yang tepat, peningkatan kapasitas kompetensi, serta pemerataan distribusi antarwilayah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Tabel 2. 27 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tenaga Kesehatan	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Dokter Umum	orang	64	108	74	74	74
Dokter Gigi	orang	5	11	11	13	13
Dokter Spesialis	orang	32	31	63	44	44
Perawat	orang	332	496	492	445	445
Perawat Gigi	orang	18	18	18	18	18
Penata Anastesi	orang	5	5	5	5	5
Penata Radiologi	orang	8	8	8	8	8
Bidan	orang	484	543	550	542	542
D-III dan S-2 Fisioterapi	orang	0	0	0	0	0
Okupasi Terapis	orang	5	5	5	5	5
Analis Kesehatan (Lab)	orang	28	38	38	36	36
Apoteker dan Asisten Apoteker	orang	44	62	76	59	35

Tenaga Kesehatan	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
- Apoteker	orang	16	14	14	25	25
- Farmasi	orang	28	48	62	34	10
S-1 Gizi	orang	1	2	2	2	2
D-3 Gizi	orang	28	30	24	24	32
Medical Record	orang	6	6	6	6	6
Elekto Medis	orang	2	2	2	2	2
Fisikawan Medis	orang	1	1	1	1	1
Analis Transfusi Darah	orang	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang sepanjang 2021-2025 menunjukkan bahwa tenaga inti seperti perawat dan bidan tetap mendominasi, meskipun jumlah perawat menurun setelah 2022 dan bidan relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Dokter umum sempat mengalami lonjakan pada 2022, tetapi kemudian kembali ke angka yang lebih rendah dan konstan. Sementara itu, dokter spesialis meningkat tajam pada 2023 dan bertahan di level tersebut, mencerminkan adanya penguatan layanan kesehatan lanjutan.

Namun, sejumlah profesi penunjang seperti fisioterapis, okupasi terapis, rekam medis, dan analis transfusi darah belum tersedia, sehingga pelayanan kesehatan belum sepenuhnya komprehensif. Kehadiran fisikawan medis sebagai langkah awal diversifikasi tenaga kesehatan, meski jumlahnya masih sangat terbatas. Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan daerah yang lebih terarah untuk memperluas rekrutmen dan pengembangan tenaga kesehatan di bidang yang belum terisi, agar pelayanan kesehatan dapat lebih menyeluruh, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan rasio dokter per jumlah penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Menurut standar sistem

pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2. 28 Jumlah Dokter dan Tenaga Medis per 1.000 penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Uraian	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Jumlah Dokter Umum	orang	64	108	74	74	74
2	Jumlah Dokter Spesialis	orang	32	31	63	44	44
3	Jumlah Tenaga Medis	orang	96	139	137	118	118
4	Jumlah Penduduk	jiwa	430.630	431.208	433.570	440.040	442.320
5	Rasio Dokter Umum	per 1.000 penduduk	0,149	0,250	0,171	0,168	0,167
6	Rasio Dokter Spesialis	per 1.000 penduduk	0,074	0,072	0,145	0,100	0,099
7	Rasio Tenaga Medis	per 1.000 penduduk	0,223	0,322	0,316	0,268	0,267

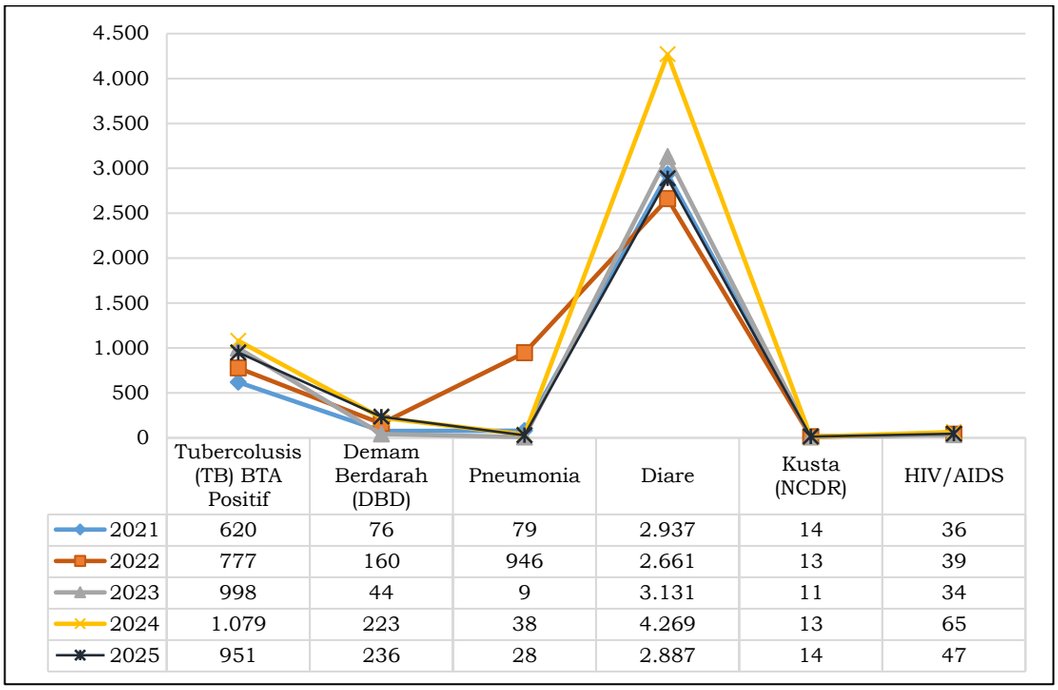
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Ketersediaan tenaga kesehatan mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Jumlah tenaga medis sempat meningkat tajam pada tahun 2022, namun kemudian menurun dan stabil pada tahun 2023-2025. Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk juga sempat mencapai puncaknya di tahun 2022, tetapi kembali menurun dan bertahan pada level yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya kebijakan strategis dalam perencanaan dan distribusi tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang dapat lebih optimal, merata, dan berkesinambungan. Upaya penguatan jumlah tenaga medis melalui rekrutmen, peningkatan kapasitas, serta pemerataan distribusi perlu dilakukan secara terarah, diiringi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, sehingga rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat ditingkatkan dan pelayanan kesehatan mampu memenuhi standar pelayanan minimal.

10) Jumlah Kasus Penyakit Menular

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan salah satu kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Program ini terdiri dari pencegahan terhadap penyakit menular, pencegahan tidak menular, imunisasi dan surveilans kesehatan. Data penyakit menular di Kabupaten Tulang Bawang disajikan sebagai berikut.

Gambar 2. 45 Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Jenis Penyakit di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



	Tubercolusis (TB) BTA Positif	Demam Berdarah (DBD)	Pneumonia	Diare	Kusta (NCDR)	HIV/AIDS
2021	620	76	79	2.937	14	36
2022	777	160	946	2.661	13	39
2023	998	44	9	3.131	11	34
2024	1.079	223	38	4.269	13	65
2025	951	236	28	2.887	14	47

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Grafik jumlah kasus penyakit menular di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan pola perkembangan yang bervariasi antar jenis penyakit. Diare merupakan penyakit dengan jumlah kasus tertinggi setiap tahun dibandingkan jenis penyakit lainnya. Jumlah kasus diare mengalami fluktuasi, dari 2.937 kasus pada 2021 menurun menjadi 2.661 kasus pada 2022, kemudian meningkat menjadi 3.131 kasus pada 2023 dan mencapai puncaknya sebesar 4.269 kasus pada 2024, sebelum kembali menurun menjadi 2.887 kasus pada 2025.

Tuberkulosis (TB) BTA positif menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten selama periode 2021-2024, dari 620 kasus pada 2021

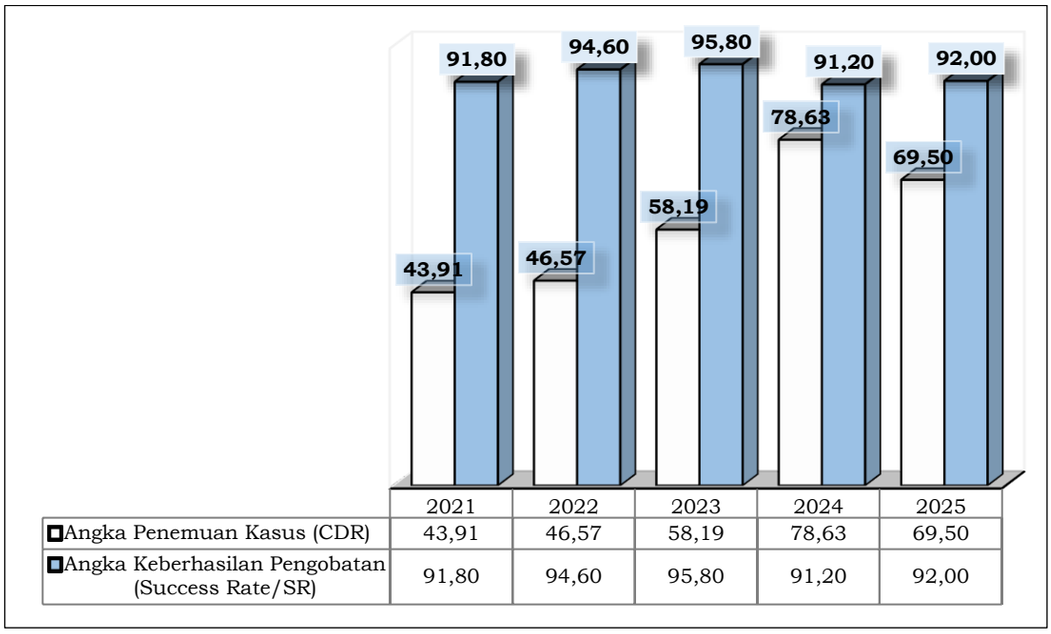
menjadi 1.079 kasus pada 2024, kemudian menurun menjadi 951 kasus pada 2025. Demam Berdarah Dengue (DBD) memperlihatkan pola fluktuatif, dengan penurunan pada 2023 menjadi 44 kasus setelah sebelumnya 160 kasus pada 2022, lalu meningkat cukup signifikan pada 2024 dan 2025 menjadi masing-masing 223 kasus dan 236 kasus.

Pneumonia mengalami lonjakan yang sangat tinggi pada 2022 dengan 946 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 79 kasus, namun setelah itu turun drastis menjadi 9 kasus pada 2023 dan relatif rendah pada 2024-2025, yaitu 38 kasus dan 28 kasus. Sementara itu, HIV/AIDS menunjukkan pola fluktuatif dengan jumlah kasus tertinggi pada 2024 sebanyak 65 kasus sebelum menurun menjadi 47 kasus pada 2025.

Adapun kusta (NCDR) relatif stabil dengan jumlah kasus yang rendah, berkisar antara 11-14 kasus selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa diare dan TB BTA positif merupakan penyakit menular dengan beban kasus paling dominan di Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan DBD, pneumonia, dan HIV/AIDS memperlihatkan dinamika kasus yang fluktuatif sehingga tetap memerlukan penguatan upaya pencegahan dan pengendalian.

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh dimana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya. Permasalahan penanggulangan TBC di Kabupaten Tulang Bawang masih terkait dengan penemuan kasus yang belum mencapai target dan rendahnya angka kesembuhan. Angka penemuan kasus TBC (*Case Detection Rate*/CDR) yang diobati per 100.000 penduduk dan angka keberhasilan (*Success Rate*/SR) dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 46 Angka Penemuan Kasus dan Kesembuhan TBC di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Penemuan Kasus (CDR)	43,91	46,57	58,19	78,63	69,50
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR)	91,80	94,60	95,80	91,20	92,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan data pada grafik tahun 2021-2025, perkembangan penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kecenderungan yang membaik, baik dari sisi angka penemuan kasus *(Case Detection Rate/CDR)* maupun angka keberhasilan pengobatan *(Success Rate/SR)*, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa periode.

Angka penemuan kasus (CDR) menunjukkan tren peningkatan selama periode pengamatan. Pada tahun 2021, capaian CDR tercatat sebesar 43,91%, meningkat menjadi 46,57% pada 2022 dan 58,19% pada 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2024 dengan capaian 78,63%, sebelum sedikit menurun menjadi 69,50% pada 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan dalam upaya deteksi dan penemuan kasus TBC, terutama sejak tahun 2023.

Sementara itu, angka keberhasilan pengobatan *(Success Rate/SR)* berada pada tingkat yang relatif tinggi selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan tercatat sebesar 91,80%, kemudian meningkat menjadi 94,60% pada 2022 dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 95,80%. Pada 2024, capaian ini menurun menjadi 91,20%, namun kembali sedikit meningkat

menjadi 92,00% pada 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengobatan TBC di Kabupaten Tulang Bawang tetap terjaga dengan tingkat keberhasilan di atas 90 persen pada seluruh periode pengamatan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa upaya pengendalian TBC di Kabupaten Tulang Bawang mengalami perkembangan positif, ditandai dengan meningkatnya angka penemuan kasus dan tetap tingginya keberhasilan pengobatan. Peningkatan CDR mencerminkan semakin optimalnya proses skrining dan deteksi kasus, sementara capaian SR yang konsisten tinggi menunjukkan efektivitas layanan pengobatan TBC dalam mendukung kesembuhan pasien.

Selain tuberkulosis, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi salah satu penyakit menular yang memerlukan perhatian serius dalam upaya pengendalian penyakit di Kabupaten Tulang Bawang. Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk *Aedes Aegypti.* Penyakit ini sebagian besar menyerang anak berumur <15 tahun, namun dapat juga menyerang orang dewasa. Indikator yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan penyakit DBD adalah *incident rate* atau angka kesakitan dan *case fatality rate* atau proporsi kematian pada kasus DBD.

Tabel 2. 29 Jumlah Kasus DBD di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Kasus	IR (%)	Jumlah Meninggal	CFR (%)
2021	76	16,46	1	1,30
2022	160	37,11	0	0,00
2023	44	9,88	0	0,00
2024	223	46,81	0	0,00
2025	236	52,99	0	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam

dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Jumlah kasus tercatat sebanyak 76 kasus pada 2021, meningkat menjadi 160 kasus pada 2022, kemudian menurun signifikan menjadi 44 kasus pada 2023. Pada 2024 terjadi lonjakan menjadi 223 kasus dan kembali meningkat menjadi 236 kasus pada 2025.

Sejalan dengan peningkatan jumlah kasus, angka insidens (IR) juga menunjukkan tren yang sama, dari 16,46% (2021) menjadi 37,11% (2022), turun menjadi 9,88% (2023), kemudian naik menjadi 46,81% (2024) dan 52,99% (2025). Sementara itu, jumlah kematian tercatat 1 kasus pada 2021 (CFR 1,30%) dan tidak terdapat kematian pada periode 2022-2025 (CFR 0,00%).

Pola ini mencerminkan pengaruh faktor musim, lingkungan, mobilitas penduduk, serta dinamika efektivitas pengendalian vektor. Berbagai upaya yang dilaksanakan dalam menangani peningkatan kasus DBD antara lain peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD; pemberdayaan kader kecamatan, remaja, dan siswa SD dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN); koordinasi dan komunikasi di tingkat kecamatan; pelaksanaan fogging sesuai standar operasional prosedur; pelayanan deteksi dini di puskesmas pada kasus demam ≥2 hari melalui pemeriksaan antigen dengue; promosi kesehatan melalui media elektronik; pembagian larvasida di wilayah endemis saat penyelidikan epidemiologi; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta kerja sama lintas program dan lintas sektor; serta penguatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan fogging fokus untuk memutus rantai penularan.

Pneumonia atau yang biasa disebut radang paru-paru adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru, dan merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia. Pneumonia disebabkan oleh virus, bakteri dan jamur. Bakteri *Pneumococcus* merupakan penyebab paling umum dari Pneumonia bakterial pada anak-anak. Gejala pneumonia cukup bervariasi. Namun, umumnya pneumonia ditandai dengan batuk berdahak, demam, menggigil, sesak napas, nyeri dada ketika bernapas atau batuk, mual dan muntah, nafsu makan menghilang, serta tubuh yang mudah lelah. Pneumonia menunjukkan pola

ekstrem: dari 79 kasus di 2021 melonjak ke 946 di 2022, lalu anjlok ke 9 kasus di 2023 dan sedikit naik ke 38 kasus di 2024 yang kemudian menurun kembali pada tahun 2025 yaitu sebanyak 28 kasus.

Penyebaran HIV-AIDS memang sulit terdeteksi. Data yang tersedia saat ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV-AIDS. Banyak individu tidak melakukan pemeriksaan sehingga angka pasti jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) tidak dapat diketahui. Kondisi ini dikenal sebagai fenomena gunung es, di mana kasus yang terlapor hanyalah puncak dari jumlah sebenarnya. Masih banyak ODHA yang belum terdeteksi hingga hari ini, bahkan sebagian tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi.

Data terbaru menunjukkan adanya fluktuasi kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan catatan, jumlah kasus HIV/AIDS tercatat sebanyak 36 kasus pada 2021, 39 kasus pada 2022, 34 kasus pada 2023, 65 kasus pada 2024, dan 47 kasus pada 2025. Pola ini menunjukkan adanya dinamika yang tidak selalu linear, yang bisa mencerminkan variasi dalam deteksi, pelaporan, maupun penyebaran di masyarakat.

Fenomena tersebut menegaskan pentingnya penguatan edukasi, skrining, serta layanan dukungan bagi ODHA. Upaya ini tidak hanya membantu menekan laju penularan, tetapi juga memastikan bahwa ODHA mendapatkan akses perawatan dan pendampingan yang layak.

11) Cakupan Kepesertaan dan Keaktifan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

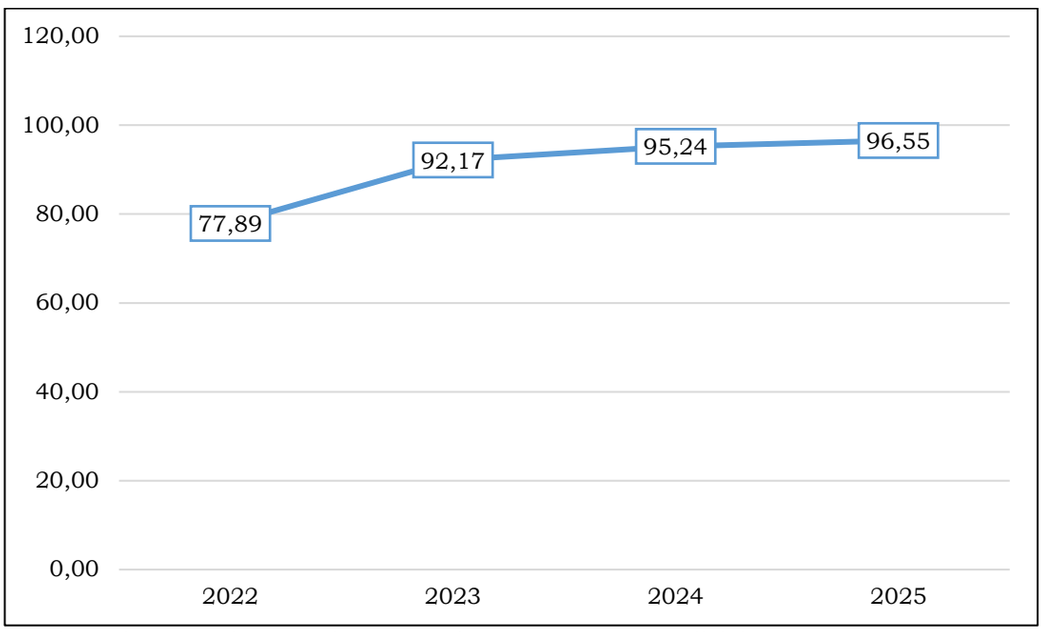
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Melalui program ini, masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan sehingga dapat mengakses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan JKN menjadi indikator penting dalam mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) serta menggambarkan tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Cakupan kepesertaan JKN menunjukkan proporsi penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN, sedangkan tingkat keaktifan peserta mencerminkan proporsi peserta yang memiliki status aktif sehingga dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Peningkatan cakupan kepesertaan dan keaktifan JKN menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, perkembangan kedua indikator tersebut perlu dianalisis sebagai bagian dari evaluasi kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Perkembangan cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2. 47 Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022–2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

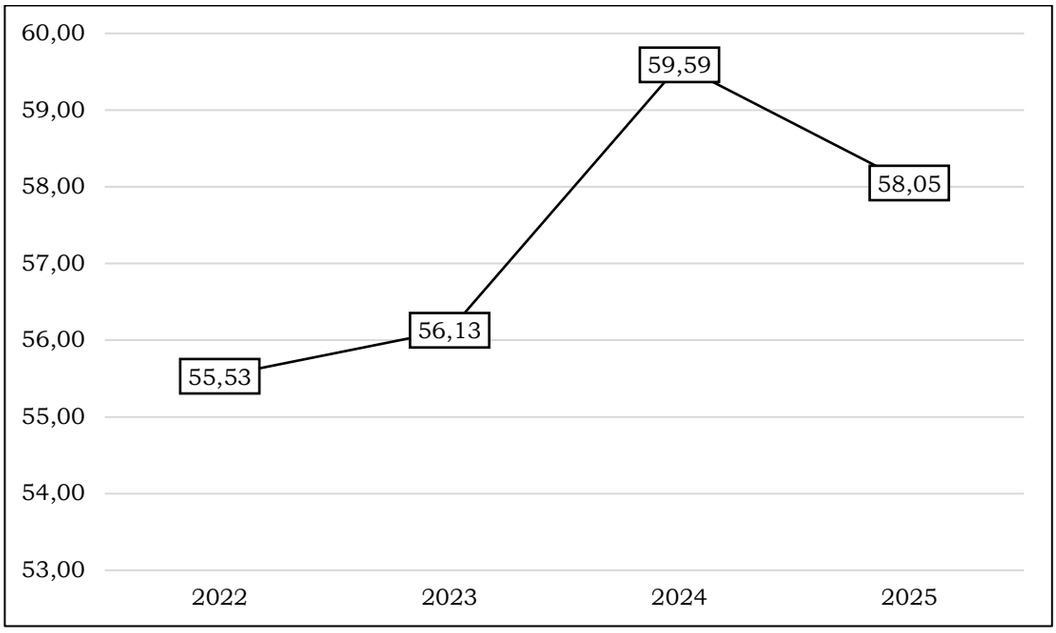
Berdasarkan data cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tulang Bawang, menunjukkan adanya

peningkatan selama periode 2022-2025. Pada tahun 2022, cakupan kepesertaan JKN tercatat sebesar 77,89 persen, kemudian meningkat menjadi 92,17 persen pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan menjadi 95,24 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 cakupan kepesertaan JKN kembali meningkat menjadi 96,55 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perluasan cakupan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang semakin mendekati kondisi *Universal Health Coverage (UHC).*

Peningkatan cakupan kepesertaan JKN tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan. Cakupan kepesertaan yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk yang telah terlindungi dalam program JKN, sehingga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif. Meskipun demikian, upaya peningkatan cakupan masih perlu terus dilanjutkan, terutama untuk menjangkau penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, guna mencapai cakupan semesta *(Universal Health Coverage)* secara optimal di Kabupaten Tulang Bawang.

Selain cakupan kepesertaan, aspek yang tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan UHC adalah tingkat keaktifan peserta JKN. Tingkat keaktifan peserta mencerminkan proporsi peserta yang memiliki status aktif sehingga dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang dijamin oleh program JKN. Dengan demikian, keberhasilan UHC tidak hanya ditentukan oleh besarnya cakupan kepesertaan, tetapi juga oleh tingkat keaktifan peserta dalam sistem jaminan kesehatan. Perkembangan tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2. 48 Cakupan Keaktifan JKN Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2022-2025. Pada tahun 2022, persentase peserta JKN aktif tercatat sebesar 55,53 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 56,13 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 tingkat keaktifan peserta meningkat cukup signifikan hingga mencapai 59,59 persen. Namun demikian, pada tahun 2025 tingkat keaktifan peserta sedikit menurun menjadi 58,05 persen.

Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2025, tingkat keaktifan peserta JKN masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat keberlanjutan kepesertaan JKN di Kabupaten Tulang Bawang relatif membaik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara jumlah peserta terdaftar dan peserta aktif yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program JKN.

Ke depan, peningkatan cakupan kepesertaan yang diikuti dengan penguatan keaktifan peserta menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* di Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara

pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong perluasan kepesertaan dan menjaga keberlanjutan status aktif peserta JKN, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang optimal.

12) Capaian SPM Bidang Kesehatan

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Tabel 2. 30 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021-2025

No	Indikator	Uraian	satuan	target	Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	persen	100,00	94,75	93,31	97,94	95,66	94,24
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100,00	99,66	96,37	94,87	95,61	91,35
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	persen	100,00	87,73	97,20	95,41	97,52	91,96
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100,00	86,74	91,07	87,70	96,64	84,30

No	Indikator	Uraian	satuan	target	Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan Kesehatan	persen	100,00	82,62	83,18	87,14	86,91	89,60
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100,00	75,43	35,30	84,53	80,20	78,02
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	persen	100,00	51,58	82,69	86,31	96,44	91,86
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	100,00	23,28	32,99	90,18	88,34	78,56
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	persen	100,00	79,92	94,85	100,00	100,00	100,00
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	persen	100,00	67,23	74,59	75,99	79,51	85,56
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan Kesehatan	persen	100,00	58,84	98,05	93,23	100,00	100,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh *(Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	persen	100,00	88,64	98,00	94,20	96,89	100,00

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan variasi capaian antar jenis pelayanan dan kelompok sasaran. Pada layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan usia pendidikan dasar, capaian secara umum berada pada tingkat yang relatif tinggi meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100 persen. Pelayanan kesehatan ibu hamil berfluktuasi dari 94,75% pada 2021, menurun menjadi 93,31% pada 2022, meningkat menjadi 97,94% pada 2023, kemudian turun menjadi 95,66% pada 2024 dan 94,24% pada 2025. Sementara itu, pelayanan kesehatan ibu bersalin menunjukkan tren penurunan pada akhir periode, dari 99,66% pada 2021 menjadi 91,35% pada 2025.

Pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan balita, capaian juga menunjukkan pola fluktuatif. Pelayanan bayi baru lahir meningkat dari 87,73% pada 2021 menjadi 97,52% pada 2024, namun menurun menjadi 91,96% pada 2025. Adapun pelayanan kesehatan balita mencapai puncak pada 2024 sebesar 96,64%, sebelum kembali menurun menjadi 84,30% pada 2025. Sementara itu, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar memperlihatkan tren peningkatan bertahap, dari 82,62% pada 2021 menjadi 89,60% pada 2025, meskipun masih di bawah target.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif dan usia lanjut menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Capaian pelayanan usia produktif mengalami penurunan tajam pada 2022 menjadi 35,30% dari 75,43% pada 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 84,53% pada 2023, meskipun kembali berfluktuasi hingga mencapai 78,02% pada 2025. Sebaliknya, pelayanan kesehatan usia lanjut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 51,58% pada 2021 menjadi 96,44% pada 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 91,86% pada 2025.

Pada kelompok pelayanan penyakit prioritas, capaian pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi mengalami peningkatan signifikan dari 23,28% pada 2021 menjadi 90,18% pada 2023, namun menurun kembali menjadi 78,56% pada 2025. Sementara itu,

pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus menunjukkan capaian yang sangat baik dengan peningkatan dari 79,92% pada 2021 dan berhasil mencapai 100% secara konsisten pada periode 2023-2025.

Pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, orang terduga tuberkulosis, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV juga menunjukkan kecenderungan peningkatan capaian. Layanan kesehatan ODGJ berat meningkat bertahap dari 67,23% pada 2021 menjadi 85,56% pada 2025. Pelayanan bagi orang terduga tuberkulosis mengalami peningkatan signifikan dari 58,84% pada 2021 hingga mencapai 100% pada 2024 dan 2025. Sementara itu, pelayanan kesehatan bagi orang berisiko terinfeksi HIV relatif tinggi sepanjang periode pengamatan dan mencapai 100% pada 2025.

Secara keseluruhan, capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan kecenderungan peningkatan pada sebagian besar indikator, meskipun beberapa jenis pelayanan masih mengalami fluktuasi dan belum mencapai target 100 persen secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pelayanan kesehatan, terutama pada kelompok usia produktif, balita, dan penderita hipertensi, guna memastikan pemerataan akses layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, memperkuat konektivitas wilayah, serta memastikan pemanfaatan ruang yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

1) Infrastruktur Jalan

Pengelolaan dan pengembangan jaringan jalan memegang peran strategis dalam mendukung mobilitas penduduk, kelancaran arus barang dan jasa, serta integrasi antarwilayah. Infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai prasarana transportasi, tetapi juga menjadi cerminan kemajuan pembangunan dan daya saing wilayah. Oleh karena itu, proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap terhadap total panjang jalan digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kualitas infrastruktur jalan dan efektivitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum.

Kondisi jalan kabupaten mencerminkan tingkat kelayakan fungsional jaringan jalan yang tersedia. Jalan dalam kondisi mantap mencakup kategori baik dan sedang, yang mampu mendukung aktivitas sosial ekonomi secara optimal. Sebaliknya, jalan tidak mantap yang terdiri dari kondisi rusak ringan hingga rusak berat, menunjukkan keterbatasan fungsi dan potensi hambatan terhadap konektivitas wilayah. Pemantauan indikator ini menjadi dasar penting dalam perencanaan peningkatan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap dan berkelanjutan. Berikut disajikan data kondisi jalan kabupaten selama periode 2021–2025.

Tabel 2. 31 Persentase Jalan Kondisi Mantap di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Km	30,50	46,15	64,21	78,77	70,59
2	Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	Km	487,01	170,41	170,41	117,92	107,12
3	Panjang Jalan Kondisi Baik + Sedang (Mantap)	Km	517,51	216,56	234,62	196,69	177,70
4	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1041,46	786,08	786,08	798,58	798,582
	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	**%**	**49,69**	**27,55**	**29,85**	**24,63**	**22,25**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Tulang Bawang mencapai 1.041,46 km, dengan 517,51 km di antaranya berada dalam kondisi mantap (baik dan sedang). Capaian tersebut menghasilkan persentase jalan mantap sebesar 49,69%. Pada tahun 2022 terjadi perubahan signifikan, di mana total panjang jalan tercatat sebesar 786,08 km dan panjang jalan kondisi mantap menurun menjadi 216,56 km, sehingga persentase jalan mantap turun menjadi 27,55%.

Pada tahun 2023, panjang jalan kondisi mantap meningkat menjadi 234,62 km dengan total panjang jalan tetap sebesar 786,08 km, sehingga persentase jalan mantap naik menjadi 29,85%. Namun, pada tahun 2024 meskipun total panjang jalan meningkat menjadi 798,58 km, panjang jalan kondisi mantap justru menurun menjadi 196,69 km dan persentasenya kembali turun menjadi 24,63%. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2025, di mana panjang jalan kondisi mantap tercatat sebesar 177,70 km dari total panjang jalan 798,582 km, sehingga persentase jalan mantap menurun menjadi 22,25%.

Jika dilihat dari komposisinya, panjang jalan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan dari 30,50 km pada tahun 2021 menjadi 78,77 km pada tahun 2024, namun menurun kembali menjadi 70,59 km pada tahun 2025. Sementara itu, panjang jalan kondisi sedang mengalami penurunan signifikan dari 487,01 km pada tahun 2021 menjadi 170,41 km pada tahun 2022 dan 2023, kemudian kembali menurun menjadi 117,92 km pada tahun 2024 dan 107,12 km pada tahun 2025. Perubahan komposisi ini berdampak langsung terhadap menurunnya persentase jalan mantap secara keseluruhan.

Secara umum, periode 2021-2025 menunjukkan tren penurunan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jalan secara lebih terencana dan berkelanjutan agar konektivitas wilayah serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dapat tetap terjaga secara optimal.

Lebih jauh lagi, dinamika kualitas jaringan jalan ini perlu dilihat dalam kaitannya dengan kebutuhan penduduk. Ketersediaan jalan tidak hanya diukur dari total panjangnya, tetapi juga dari rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Dengan kata lain, rasio panjang jalan per 1.000 jiwa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat aksesibilitas masyarakat serta keadilan distribusi infrastruktur antarwilayah. Melalui indikator ini, dapat dinilai apakah peningkatan atau penurunan kualitas dan panjang jalan benar-benar sejalan dengan kebutuhan mobilitas penduduk di Kabupaten Tulang Bawang, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemerataan layanan infrastruktur.

Tabel 2. 32 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Panjang Jalan Kabupaten	km	1.041,46	786,08	786,08	798,58	798,58
Jumlah Penduduk	jiwa	430.630	431.208	433.570	440.040	442.320
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	km/1.000 jiwa	2,42	1,82	1,813	1,815	1,805

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, rasio panjang jalan kabupaten terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 2,42 km per 1.000 jiwa, dengan total panjang jalan 1.041,46 km dan jumlah penduduk sebanyak 430.630 jiwa. Pada tahun 2022 rasio tersebut menurun cukup tajam menjadi 1,82 km per 1.000 jiwa, seiring dengan berkurangnya total panjang jalan menjadi 786,08 km dan meningkatnya jumlah penduduk menjadi 431.208 jiwa.

Penurunan rasio berlanjut pada tahun 2023 menjadi 1,813 km per 1.000 jiwa, dengan total panjang jalan tetap sebesar 786,08 km dan jumlah penduduk meningkat menjadi 445.170 jiwa. Pada tahun 2024, meskipun panjang jalan meningkat menjadi 798,58 km dan jumlah penduduk bertambah menjadi 440.040 jiwa, rasio relatif stabil pada

angka 1,815 km per 1.000 jiwa. Pada tahun 2025, dengan total panjang jalan yang relatif tetap sebesar 798,58 km dan jumlah penduduk meningkat menjadi 442.320 jiwa, rasio mengalami sedikit penurunan menjadi 1,805 km per 1.000 jiwa.

Secara umum, periode 2021-2025 menunjukkan tren penurunan rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi antara berkurangnya panjang jalan pada awal periode serta pertumbuhan penduduk yang konsisten setiap tahun. Meskipun terdapat sedikit peningkatan panjang jalan pada tahun 2024 dan 2025, kenaikan tersebut belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, sehingga rasio aksesibilitas jalan relatif menurun. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang tidak hanya berfokus pada kualitas dan pemeliharaan, tetapi juga pada penambahan panjang jalan secara proporsional terhadap pertumbuhan penduduk guna menjaga tingkat aksesibilitas dan konektivitas wilayah secara berkelanjutan.

2) Pengairan/Irigasi

Ketersediaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian. Adapun data prasarana irigasi/pengairan sebagai berikut :

Tabel 2. 33 Kriteria Jaringan Irigasi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saluran Primer	m	131.004	131.004	132.535	132.535	132.535
2	Saluran Sekunder	m	402.314	402.314	414.628	414.628	414.628
3	Saluran Kolektor	m	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474
	Total	**m**	**550.792**	**550.792**	**564.637**	**564.637**	**564.637**

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Secara keseluruhan, total panjang jaringan irigasi Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan dari 550.792 meter pada tahun 2021 menjadi 564.637 meter pada tahun 2023 dan nilai tersebut tetap bertahan hingga tahun 2024 dan 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh bertambahnya panjang saluran primer dari 131.004 meter pada tahun 2021 menjadi 132.535 meter pada tahun 2023, serta saluran sekunder dari 402.314 meter menjadi 414.628 meter pada periode yang sama. Sementara itu, panjang saluran kolektor relatif tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 17.474 meter selama tahun 2021-2025.

Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan infrastruktur irigasi pada komponen utama distribusi air, khususnya saluran primer dan sekunder yang berfungsi menyalurkan air dari sumber ke jaringan yang lebih kecil. Namun, stagnasi pada saluran kolektor mengindikasikan bahwa pengembangan pada tingkat distribusi akhir menuju petak-petak lahan pertanian belum mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Padahal, efektivitas sistem irigasi sangat ditentukan oleh keterpaduan dan keseimbangan pengembangan seluruh komponen jaringan.

Dengan demikian, meskipun kapasitas jaringan utama telah mengalami peningkatan dan stabil hingga tahun 2025, ke depan diperlukan strategi pembangunan irigasi yang lebih komprehensif dan berimbang, termasuk optimalisasi dan perluasan saluran kolektor, agar distribusi air dapat berlangsung lebih efisien, merata, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan.

Namun lebih dari sekadar panjang saluran, kualitas jaringan juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan irigasi. Kualitas jaringan irigasi tidak hanya ditentukan oleh panjang saluran, tetapi juga oleh kondisi fisik, keterhubungan antar komponen, dan kemampuan sistem dalam menjamin pasokan air yang merata dan tepat waktu ke lahan pertanian.

Tabel 2. 34 Persentase Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Prasarana Irigasi	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Panjang Saluran Irigasi	m	550.792	550.792	564.637	564.637	564.637
Irigasi Kondisi Baik	m	363.877	373.877	405.809	418.494	425.840
Persentase Irigasi Kondisi Baik	**%**	**66,06**	**67,88**	**71,87**	**74,12**	**75,42**

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021, panjang saluran irigasi yang berada dalam kondisi baik tercatat sebesar 363.877 meter atau 66,06% dari total panjang jaringan irigasi sebesar 550.792 meter. Pada tahun 2022, panjang irigasi kondisi baik meningkat menjadi 373.877 meter dengan persentase 67,88%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana panjang irigasi kondisi baik mencapai 405.809 meter atau 71,87% dari total jaringan yang saat itu meningkat menjadi 564.637 meter.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan panjang irigasi kondisi baik sebesar 418.494 meter dan persentase 74,12%. Pada tahun 2025, capaian kembali meningkat menjadi 425.840 meter atau 75,42% dari total panjang jaringan irigasi yang tetap sebesar 564.637 meter. Peningkatan yang konsisten selama periode 2021-2025 ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas jaringan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan fungsi jaringan.

Secara keseluruhan, kenaikan persentase irigasi dalam kondisi baik mencerminkan semakin meningkatnya keandalan sistem irigasi dalam mendukung distribusi air ke lahan pertanian. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian, efisiensi pemanfaatan sumber daya air, serta ketahanan pangan daerah. Ke depan, tantangan yang perlu dijaga adalah mempertahankan kualitas jaringan yang telah baik sekaligus memastikan pemeliharaan rutin dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Aspek penataan ruang juga tercermin dari legalitas pembangunan bangunan, salah satunya melalui rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB merupakan instrumen hukum yang menjamin tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan rencana tata ruang.

Tabel 2. 35 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Bangunan ber-IMB	unit	5.682	6.143	6.530	9.421	9.480
Jumlah Bangunan	unit	34.179	34.640	35.027	49.464	49.464
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan		0,166	0,177	0,186	0,190	0,1917

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Pada tahun 2021, dari total 34.179 bangunan di Kabupaten Tulang Bawang, sebanyak 5.682 unit telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga menghasilkan rasio sebesar 0,166. Pada tahun 2022, jumlah bangunan ber-IMB meningkat menjadi 6.143 unit dari total 34.640 bangunan dengan rasio 0,177. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana bangunan ber-IMB tercatat sebanyak 6.530 unit dari 35.027 bangunan, dengan rasio sebesar 0,186.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika jumlah bangunan ber-IMB melonjak menjadi 9.421 unit, seiring dengan kenaikan total bangunan menjadi 49.464 unit. Kondisi ini mendorong rasio meningkat menjadi 0,190. Pada tahun 2025, jumlah bangunan ber-IMB kembali bertambah menjadi 9.480 unit dari total bangunan yang relatif tetap sebesar 49.464 unit, sehingga rasio meningkat menjadi 0,1917.

Secara umum, periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan rasio bangunan ber-IMB terhadap total bangunan. Hal ini

mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kepatuhan perizinan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Meskipun demikian, rasio yang masih berada di bawah 0,2 menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan belum memiliki IMB. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan penertiban dan pengawasan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penyederhanaan proses perizinan agar pertumbuhan pembangunan dapat berjalan selaras dengan ketentuan tata ruang dan prinsip pembangunan yang tertib serta berkelanjutan.

4) Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum

Dalam konteks penyediaan layanan dasar bidang pekerjaan umum, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen utama untuk memastikan hak masyarakat atas layanan dasar terpenuhi. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dua indikator utama yang diukur adalah: (1) pengolahan air limbah domestik dan (2) pemenuhan kebutuhan air minum.

Tabel 2. 36 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021-2025

No	Indikator	Uraian	satuan	Target	Capaian				
					2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	persen	100,00	81,64	83,07	82,98	100,00	100,00
2	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	persen	100,00	76,28	73,82	72,55	100,00	100,00

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun pada tahun 2021-2023 capaian kedua indikator masih berada di bawah target dan cenderung berfluktuasi, pada tahun 2024-2025 seluruh indikator telah mencapai

target 100 persen. Hal ini menandakan bahwa pelayanan pengolahan air limbah domestik dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat telah terpenuhi secara optimal sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulang Bawang terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak, serta menciptakan lingkungan permukiman yang tertata dan sehat. Upaya ini menjadi semakin penting seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang bermukim yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Fokus utama pembangunan perumahan mencakup penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi, serta pengembangan kawasan permukiman yang dilengkapi infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan. Selain itu, penataan kawasan permukiman kumuh menjadi prioritas untuk memastikan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

1) Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Perkembangan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. RTLH didefinisikan sebagai rumah tinggal yang tidak memenuhi standar kelayakan dasar, antara lain apabila lebih dari 60 persen luas lantainya masih menggunakan material tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah, serta lebih dari 60 persen luas dindingnya terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah. Kondisi tersebut menggambarkan keterbatasan struktur

bangunan dan potensi risiko terhadap kesehatan, keselamatan, serta kenyamanan penghuni.

Sebagai bagian dari prioritas pembangunan bidang perumahan dan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas rumah masyarakat. Melalui intervensi seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dukungan pendanaan lainnya.

Tabel 2. 37 Perkembangan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Uraian	2021		2022		2023		2024		2025	
	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	13.037	13,10	12.971	13,03	12.921	12,98	12.763	12,82	12.702	12,76
Rumah Layak Huni	86.485	86,90	86.551	86,97	86.601	87,02	86.759	87,18	86.820	87,24
Jumlah Seluruh Rumah	99.522	100,00	99.522	100,00	99.522	100,00	99.522	100,00	99.522	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rumah Layak Huni di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren perbaikan yang konsisten selama periode 2021-2025. Jumlah RTLH terus mengalami penurunan dari 13.037 unit (13,10%) pada tahun 2021 menjadi 12.763 unit (12,82%) pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 12.702 unit (12,76%) pada tahun 2025. Penurunan bertahap ini menunjukkan adanya keberlanjutan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui berbagai program rehabilitasi dan peningkatan rumah tidak layak huni.

Sebaliknya, jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan secara konsisten. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 86.485 unit (86,90%), meningkat menjadi 86.759 unit (87,18%) pada tahun 2024, dan kembali bertambah menjadi 86.820 unit (87,24%) pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan semakin dominannya proporsi rumah

yang telah memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek struktur bangunan, sanitasi, maupun kenyamanan dan keamanan hunian.

Secara keseluruhan, dengan jumlah total rumah yang relatif tetap sebanyak 99.522 unit setiap tahunnya, pergeseran proporsi dari RTLH ke rumah layak huni menjadi indikator positif efektivitas kebijakan dan program perumahan daerah. Tren ini menunjukkan arah pembangunan permukiman di Kabupaten Tulang Bawang yang semakin baik, serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat hingga tahun 2025.

Apabila ditinjau lebih lanjut secara spasial, distribusi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tulang Bawang tidak tersebar secara merata antar kecamatan. Meskipun secara agregat kabupaten menunjukkan tren penurunan RTLH selama periode 2021-2025, dinamika pada masing-masing kecamatan dapat berbeda, baik dari sisi jumlah maupun laju penurunannya.

Analisis berdasarkan kecamatan menjadi penting untuk mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi RTLH yang relatif lebih tinggi, sekaligus mengevaluasi efektivitas intervensi program perumahan pada tingkat lokal. Dengan demikian, data per kecamatan dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas penanganan dan pengalokasian sumber daya secara lebih tepat sasaran.

Berikut disajikan tabel Rumah Tidak Layak Huni (unit) menurut kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025.

Tabel 2. 38 Rumah Tidak Layak Huni (unit) Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Banjar Agung	305	305	295	295	295
2	Banjar Margo	639	639	639	626	626
3	Gedung Aji	401	401	401	381	381
4	Penawar Aji	294	266	266	266	266
5	Meraksa Aji	192	192	192	192	192

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
6	Menggala	493	484	478	469	449
7	Penawartama	419	419	411	406	406
8	Rawajitu Selatan	1.483	1.483	1.475	1.467	1.467
9	Gedung Meneng	797	788	788	764	764
10	Rawajitu Timur	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
11	Rawa Pitu	1.834	1.834	1.834	1.769	1.769
12	Gedung Aji Baru	428	428	420	417	417
13	Dente Teladas	3.657	3.647	3.637	3.637	3.637
14	Banjar Baru	282	282	282	277	257
15	Menggala Timur	699	689	689	683	662
JUMLAH		**13.037**	**12.971**	**12.921**	**12.763**	**12.702**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Distribusi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan pola sebaran yang relatif konsisten, meskipun terdapat penurunan bertahap pada beberapa wilayah. Kecamatan Dente Teladas, Rawa Pitu, Rawajitu Selatan, dan Rawajitu Timur masih menjadi wilayah dengan jumlah RTLH terbesar, masing-masing mencatat lebih dari seribu unit setiap tahunnya. Dente Teladas tetap menjadi kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi, yakni 3.657 unit pada tahun 2021 dan menurun secara bertahap menjadi 3.637 unit hingga tahun 2025.

Rawa Pitu juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 1.834 unit pada tahun 2021 menjadi 1.769 unit pada tahun 2024 dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2025. Rawajitu Selatan mengalami penurunan dari 1.483 unit pada tahun 2021 menjadi 1.467 unit pada tahun 2024 dan stabil pada tahun 2025, sedangkan Rawajitu Timur relatif stagnan pada angka 1.114 unit selama periode 2021-2025.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Banjar Baru, Penawar Aji, dan Meraksa Aji memiliki jumlah RTLH yang relatif lebih rendah, berada di bawah 300 unit. Banjar Baru bahkan menunjukkan penurunan yang cukup nyata dari 282 unit pada tahun 2021 menjadi

257 unit pada tahun 2025. Kecamatan Menggala dan Menggala Timur juga mencatat tren penurunan yang konsisten hingga tahun 2025.

Secara total, jumlah RTLH di seluruh Kabupaten Tulang Bawang menurun secara bertahap dari 13.037 unit pada tahun 2021 menjadi 12.763 unit pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 12.702 unit pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui berbagai skema pendanaan, termasuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dukungan pembiayaan lainnya.

Pemetaan sebaran RTLH per kecamatan menjadi dasar yang sangat penting dalam penentuan prioritas intervensi dan pengalokasian anggaran. Dengan pendekatan berbasis wilayah, penanganan RTLH dapat dilakukan secara lebih terarah, proporsional, dan berkeadilan, sehingga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas permukiman di seluruh Kabupaten Tulang Bawang hingga tahun 2025.

2) Pengurangan Kawasan Kumuh

Selain tantangan dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat, munculnya kawasan kumuh khususnya di wilayah perkotaan masih menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius di bidang perumahan dan permukiman. Kekumuhan umumnya ditandai oleh keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, serta kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya risiko kesehatan, serta menurunnya daya dukung lingkungan.

Berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor B/299/IV.4/HK/TB/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Tahun 2024, masih terdapat 104,48 hektare kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan. Luasan

tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan kawasan kumuh harus dilakukan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencegah perluasan kekumuhan serta mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 2. 39 Lokasi Pengurangan Kawasan Kumuh Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung	RT/RW	Luas Permukiman Kumuh (Ha)				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Menggala	Menggala Kota	RT 001-RW 002	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 002-RW 002	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 003-RW 002	5,04	5,04	5,04	4,33	4,33
			RT 001-RW 003	4,56	4,56	4,56	2,56	2,56
			RT 002-RW 003	4,25	4,25	4,25	4,22	4,22
			RT 003-RW 003	4,78	4,78	4,78	4,10	4,10
			TOTAL	**22,40**	**18,63**	**18,63**	**15,21**	**15,21**
2	Banjar Agung	Dwi Warga Tunggal Jaya	RT 004-RW 002	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 008-RW 002	0,44	0,64	0,64	0,33	0,33
			RT 009-RW 002	1,33	1,33	1,33	1,77	1,77
			RT 010-RW 002	0,72	0,72	0,72	0,85	0,85
			RT 011-RW 002	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 003-RW 003	12,10	8,35	8,35	9,63	9,63
			RT 001-RW 004	2,22	4,22	4,22	4,24	4,24
			RT 002-RW 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 003-RW 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 005-RW 004	3,43	3,97	3,97	3,97	3,97
			RT 006-RW 004	7,43	4,40	4,40	3,30	3,30
			RT 007-RW 004	0,00	9,83	9,83	8,27	8,27
			TOTAL	**30,55**	**33,46**	**33,46**	**32,36**	**32,36**
		Tri Tunggal Jaya	RT 001-RW 001	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 002-RW 001	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung	RT/RW	Luas Permukiman Kumuh (Ha)				
				2021	2022	2023	2024	2025
			RT 003-RW 001	2,04	1,33	1,33	2,21	2,21
			RT 004-RW 001	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 005-RW 001	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 007-RW 001	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 008-RW 001	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 001-RW 002	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 002-RW 002	0,91	1,51	1,51	1,67	1,67
			RT 004-RW 002	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**11,98**	**2,84**	**2,84**	**3,88**	**3,88**
		Tunggal Warga	RT 001-RW 001	5,08	4,78	4,78	4,76	4,76
			RT 002-RW 001	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 003-RW 001	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 004-RW 001	1,43	1,71	1,71	1,73	1,73
			RT 001-RW 002	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 002-RW 002	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 003-RW 002	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			RT 004-RW 002	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**19,17**	**6,49**	**6,49**	**6,49**	**6,49**
3	Rawa Jitu Selatan	Medasari	RT 003-RW 005	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
			RT 004-RW 005	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
			RT 005-RW 005	3,43	3,81	3,81	3,81	3,81
			TOTAL	**9,66**	**10,04**	**10,04**	**10,04**	**10,04**
		Gedung Karya Jitu	RT 003-RW 004	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
			RT 001-RW 005	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
			RT 002-RW 005	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	**16,12**	**11,29**	**11,29**	**11,29**	**11,29**
4	Dente Teladas	Sungai Nibung	RT 005-RW 002	4,09	4,09	4,09	3,59	3,59
			RT 006-RW 002	4,47	4,47	4,47	4,41	4,41

No	Kecamatan	Kelurahan/ Kampung	RT/RW	Luas Permukiman Kumuh (Ha)				
				2021	2022	2023	2024	2025
			RT 007-RW 002	3,21	3,21	3,21	2,52	2,52
			RT 010-RW 002	6,41	6,41	6,41	4,93	4,93
			RT 011-RW 002	5,76	5,76	5,76	5,29	5,29
			TOTAL	**23,94**	**23,94**	**23,94**	**20,74**	**20,74**
		Kekatung	RT 001-RW 003	1,13	1,13	1,13	0,98	0,98
			RT 002-RW 003	2,05	2,05	2,05	1,80	1,80
			RT 003-RW 003	1,97	1,97	1,97	1,69	1,69
			TOTAL	**5,15**	**5,15**	**5,15**	**4,47**	**4,47**
TOTAL LUAS PERMUKIMAN KUMUH				**151,39**	**139,43**	**111,68**	**104,48**	**104,48**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Tulang Bawang, tercatat bahwa pada tahun 2021 luas kawasan kumuh sebesar 151,39 hektar, kemudian menurun menjadi 139,43 hektar pada tahun 2022, 111,68 hektar pada tahun 2023, dan 104,48 hektar pada tahun 2024. Tren penurunan tersebut menunjukkan adanya capaian penanganan kawasan kumuh secara bertahap melalui berbagai intervensi program pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan sesuai skala luasan. Pemerintah Pusat berwenang pada kawasan kumuh skala strategis, termasuk melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pemerintah Provinsi menangani kawasan dengan luasan 10–<15 hektar, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menangani kawasan dengan luasan <10 hektar serta pengendalian kualitas lingkungan permukiman di wilayahnya.

Di Kabupaten Tulang Bawang, sebagian besar kawasan kumuh eksisting masih berada pada kategori kewenangan Pemerintah Pusat (≥15 hektar), antara lain Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya (32,36 ha), Kampung Sungai Nibung (20,74 ha), serta Kampung Menggala

Kota (15,21 ha). Adapun kawasan kewenangan Pemerintah Provinsi (10–<15 ha) meliputi Kampung Gedung Karya Jitu (11,29 ha) dan Kampung Medasari (10,04 ha). Sementara itu, kawasan kewenangan kabupaten (<10 ha) antara lain Kampung Tri Tunggal Jaya (3,88 ha), Kampung Tunggal Warga (6,49 ha), serta sebagian zona Kampung Kekatung (4,47 ha).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa luas kawasan kumuh pada tahun 2024 hingga 2025 berada pada kondisi relatif stagnan, yaitu sebesar 104,48 hektar. Kondisi ini tidak sepenuhnya merefleksikan tidak adanya intervensi, melainkan dipengaruhi oleh proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data kawasan kumuh yang dilakukan secara periodik, sehingga masih mengacu pada penetapan kawasan eksisting yang berlaku.

Ke depan, percepatan penanganan kawasan kumuh diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman melalui pemenuhan layanan air minum dan sanitasi layak, peningkatan sistem drainase lingkungan, perbaikan jalan lingkungan, serta penataan kawasan permukiman. Pendekatan kolaboratif *(government–private–community partnership)* terus diperkuat melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

3) Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak

Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian rumah layak huni. Rumah dikategorikan memiliki sanitasi layak apabila memenuhi akses terhadap layanan sanitasi dasar, yang meliputi: (1) fasilitas air bersih, (2) sarana pembuangan air besar/tinja, (3) sistem pembuangan air limbah rumah tangga, dan (4) fasilitas pengelolaan sampah. Ketersediaan layanan sanitasi tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi salah satu indikator penting dalam upaya mewujudkan permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Akses sanitasi yang memadai berperan dalam menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kenyamanan hidup, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kesehatan.

Tabel 2. 40 Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Uraian	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	RT	93.123	93.767	94.279	95.587	117.989
Jumlah Rumah Tangga	RT	107.658	107.802	111.293	112.585	144.240
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	**persen**	**86,50**	**86,98**	**84,71**	**84,90**	**81,80**

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menunjukkan peningkatan secara absolut dalam kurun waktu 2021-2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 93.123 rumah tangga yang telah berakses sanitasi layak, meningkat menjadi 95.587 rumah tangga pada tahun 2024, dan kembali meningkat signifikan menjadi 117.989 rumah tangga pada tahun 2025.

Namun demikian, apabila dilihat dari sisi persentase terhadap total rumah tangga, capaian tersebut justru menunjukkan tren penurunan. Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak sebesar 86,50 persen pada tahun 2021 meningkat tipis menjadi 86,98 persen pada tahun 2022, tetapi kemudian menurun menjadi 84,71 persen pada tahun 2023, 84,90 persen pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 81,80 persen pada tahun 2025. Penurunan persentase ini terjadi seiring dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga secara keseluruhan yang meningkat lebih cepat, dari 107.658 rumah tangga pada tahun 2021 menjadi 144.240 rumah tangga pada tahun 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah rumah tangga yang telah memperoleh akses sanitasi layak, laju penyediaan layanan sanitasi belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan jumlah rumah tangga baru. Dengan demikian, masih terdapat sebagian pembangunan rumah tinggal di Kabupaten Tulang Bawang yang belum dilengkapi dengan prasarana sanitasi dasar yang memenuhi standar.

Keterbatasan akses terhadap layanan sanitasi layak, khususnya pada wilayah dengan infrastruktur permukiman yang belum memadai, menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Apabila tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan permukiman serta risiko kesehatan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu terus mengupayakan peningkatan cakupan layanan sanitasi melalui program-program strategis, antara lain pembangunan sarana MCK komunal, penyediaan dan optimalisasi septic tank komunal, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat maupun terpusat, serta rehabilitasi sarana sanitasi pada kawasan permukiman padat dan berpotensi kumuh. Selain itu, penguatan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan layanan.

Kondisi hingga tahun 2025 ini menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, khususnya dalam upaya percepatan peningkatan cakupan layanan sanitasi dasar yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Selain peningkatan akses sanitasi layak, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan sanitasi menuju sanitasi aman. Sanitasi aman merupakan kondisi ketika fasilitas sanitasi yang digunakan tidak hanya memenuhi standar kelayakan, tetapi juga didukung oleh pengelolaan air limbah

domestik yang aman sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Capaian akses sanitasi aman menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Selain peningkatan akses sanitasi layak, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan sanitasi menuju sanitasi aman. Sanitasi aman merupakan kondisi ketika fasilitas sanitasi yang digunakan tidak hanya memenuhi standar kelayakan, tetapi juga didukung oleh pengelolaan air limbah domestik yang aman sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Capaian akses sanitasi aman menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Tabel 2. 41 Target dan Capaian Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Aman Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025

Uraian	Satuan	2025	
		Target	Capaian
Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Aman	Persen	3,00	0,77

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data tersebut, capaian persentase rumah tangga berakses sanitasi aman di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 sebesar 0,77 persen, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,00 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan sanitasi yang memenuhi prinsip sanitasi aman masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman, peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak dan Distribusi Akses Layanan SPAM

Akses terhadap air minum layak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan permukiman. Rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak apabila memperoleh sumber air yang aman, memenuhi standar kesehatan, tersedia secara berkelanjutan, serta dapat dijangkau secara fisik maupun ekonomi. Ketersediaan air minum yang aman sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah penyakit berbasis air dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Selain itu, distribusi layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi faktor kunci dalam memastikan pemerataan akses air minum layak. SPAM berperan menyediakan layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang lebih terjamin kualitasnya, sehingga mampu mendukung peningkatan cakupan layanan air minum secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerataan distribusi SPAM juga menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana masyarakat dapat menikmati layanan air minum yang aman dan terstandar.

Tabel 2. 42 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Uraian	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum layak	RT	86.826	87.826	94.176	95.967	128.233
Jumlah Rumah Tangga	RT	107.658	107.802	111.293	112.585	144.240
Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	**persen**	**80,65**	**81,47**	**84,62**	**85,24**	**88,90**

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, jumlah

rumah tangga yang memperoleh akses air minum layak tercatat sebanyak 86.826 RT atau sebesar 80,65 persen. Capaian ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2025 mencapai 128.233 RT atau sebesar 88,90 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan akses air minum layak bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus mengembangkan berbagai program serta infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik melalui jaringan perpipaan maupun nonperpipaan. Pengembangan tersebut didukung oleh berbagai sumber pendanaan, antara lain APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, serta program berbasis masyarakat seperti Pamsimas dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Bersih.

Seiring dengan upaya tersebut, cakupan layanan air minum layak menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, tantangan terkait pemerataan layanan dan keberlanjutan pengelolaan masih menjadi perhatian utama. Hal ini terutama terlihat pada akses air minum melalui jaringan perpipaan yang hingga saat ini masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang secara merata.

Tabel 2. 43 Distribusi Akses Layanan SPAM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Uraian	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah rumah tangga pengguna SPAM jaringan perpipaan	RT	79.273	80.142	82.813	83.853	84.966
Jumlah rumah tangga pengguna SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	RT	15.843	16.026	16.423	16.725	16.725
Jumlah rumah tangga belum terlayani	RT	12.542	11.634	12.057	12.007	12.007

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, distribusi akses layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-

2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga yang terlayani, baik melalui jaringan perpipaan maupun nonjaringan perpipaan. Jumlah rumah tangga pengguna SPAM jaringan perpipaan meningkat dari 79.273 RT pada tahun 2021 menjadi 84.966 RT pada tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada pengguna SPAM nonjaringan perpipaan, dari 15.843 RT pada tahun 2021 menjadi 16.725 RT pada tahun 2025.

Di sisi lain, jumlah rumah tangga yang belum terlayani SPAM cenderung menurun meskipun masih mengalami fluktuasi, dari 12.542 RT pada tahun 2021 menjadi 12.007 RT pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam cakupan layanan air minum. Namun demikian, proporsi rumah tangga yang belum terlayani serta keterbatasan jangkauan jaringan perpipaan menegaskan masih adanya kesenjangan distribusi infrastruktur air minum antarwilayah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu terus mendorong pembangunan SPAM yang lebih merata dan berkelanjutan melalui berbagai strategi, antara lain perluasan jaringan PDAM, pengembangan SPAM regional berbasis kecamatan, serta penguatan kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Strategi tersebut diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses atau belum memiliki sumber air baku yang memadai, sekaligus meningkatkan pemerataan dan keberlanjutan layanan air minum bagi seluruh masyarakat.

Selain peningkatan akses air minum layak, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga diarahkan untuk mewujudkan akses air minum aman sesuai dengan target nasional. Air minum aman merupakan air yang berasal dari sumber yang terlindungi, memenuhi standar kualitas kesehatan, tersedia secara berkelanjutan, serta dikelola dengan sistem yang mampu menjamin keamanan air hingga titik konsumsi.

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting, hingga tahun 2025 capaian akses air minum aman di Kabupaten Tulang Bawang masih sebesar 0 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan air

minum yang tersedia saat ini pada umumnya baru memenuhi kategori air minum layak dan belum sepenuhnya memenuhi kriteria air minum aman sesuai standar yang ditetapkan. Capaian tersebut juga menggambarkan bahwa peningkatan kualitas layanan air minum masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan daerah.

Sejalan dengan target pembangunan nasional menuju akses air minum aman sebesar 100 persen pada tahun 2045, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu terus mendorong pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), peningkatan kualitas pengolahan dan distribusi air minum, penguatan pengawasan kualitas air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara layanan air minum. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya akses air minum yang aman, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

5) Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan. SPM menjadi acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas hunian yang memenuhi standar minimum kelayakan. Pelaksanaan SPM ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Indikator SPM bidang perumahan rakyat mencakup pemenuhan akses terhadap rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman. Target indikator ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh warga, khususnya kelompok rentan, memiliki akses

terhadap hunian yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

Tabel 2. 44 Target dan Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021-2025

No	Indikator	Uraian	satuan	target	Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyediaan dan Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	persen	100,00	20,00	20,00	100,00	76,92	100,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100,00	0,00	0,00	45,33	76,92	53,57

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang mencakup dua indikator utama, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah.

Pada indikator pertama, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, target pelayanan ditetapkan sebesar 100 persen setiap tahun. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 masih berada di angka 20,00 persen, menunjukkan keterbatasan dalam penanganan awal. Namun, capaian meningkat signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 100,00 persen, menandakan keberhasilan penuh dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi korban bencana. Meski demikian, capaian kembali menurun menjadi 76,92 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan masih adanya rumah korban

bencana yang belum sepenuhnya tertangani sesuai target SPM. Pada tahun 2025, capaian kembali mencapai 100,00 persen, menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program.

Sementara itu, indikator kedua terkait fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah juga menetapkan target pelayanan sebesar 100 persen. Capaian pada tahun 2021 dan 2022 masih nihil (0,00 persen), menandakan belum adanya realisasi program pada periode tersebut. Perbaikan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 45,33 persen, kemudian meningkat menjadi 76,92 persen pada tahun 2024. Namun, capaian kembali menurun menjadi 53,57 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program relokasi.

Secara keseluruhan, capaian SPM bidang perumahan rakyat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama pada periode 2023-2024. Namun belum tercapainya target 100 persen secara konsisten pada kedua indikator tersebut menegaskan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program perumahan. Upaya berkelanjutan sangat diperlukan agar pemenuhan pelayanan dasar sesuai SPM dapat tercapai secara optimal dan merata bagi seluruh masyarakat terdampak.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat menjalani kehidupan secara aman, damai, dan produktif. Keberadaan lingkungan yang tertib dan tenteram menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilakukan melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,

penguatan sistem perlindungan masyarakat, serta peningkatan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik warga. Pemerintah daerah berperan aktif dalam membina ketahanan sosial melalui fasilitasi kegiatan kemasyarakatan, penguatan kelembagaan linmas, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan potensi gangguan ketertiban umum.

Selain itu, pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat, bencana, dan konflik sosial juga menjadi bagian dari strategi perlindungan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang tangguh, berdaya, dan mampu menjaga stabilitas sosial secara mandiri maupun kolektif.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kondisi sosial yang kondusif, mendukung kelancaran pembangunan daerah, serta memperkuat rasa aman dan solidaritas di tengah masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Persentase Penegakan Perda	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	orang	1.255	1.255	1.640	1.640	1.537
4	Tingkat penanganan kejadian kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Kecepatan Respon (Response Time) Kebakaran	Menit	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Sumber : Satpol PP Kab. Tulang Bawang, Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tulang Bawang, 2026

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantiblinmas) selama periode 2021-2025.

Hal ini tercermin dari capaian sejumlah indikator kinerja yang secara umum menunjukkan konsistensi dan stabilitas pelayanan.

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) tercatat sebesar 100 persen secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025. Demikian pula tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan (K3) yang juga mencapai 100 persen setiap tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi penegakan regulasi dan penyelesaian pelanggaran berjalan optimal sesuai target yang ditetapkan.

Pada aspek perlindungan masyarakat, jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengalami dinamika. Pada tahun 2021 dan 2022 tercatat sebanyak 1.255 orang, kemudian meningkat menjadi 1.640 orang pada tahun 2023 dan 2024, serta sedikit menurun menjadi 1.537 orang pada tahun 2025. Meskipun terdapat penyesuaian jumlah personel pada tahun terakhir, kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum tetap terjaga pada tingkat yang memadai.

Sementara itu, tingkat penanganan kejadian kebakaran juga menunjukkan capaian 100 persen secara konsisten selama periode 2021-2025. Kecepatan respons *(response time)* penanganan kebakaran tercatat stabil pada rata-rata 15 menit setiap tahun, yang mencerminkan kesiapsiagaan dan efektivitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam merespons keadaan darurat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang hingga tahun 2025 menunjukkan kinerja yang stabil, konsisten, dan sesuai target. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas wilayah, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, apabila ditinjau secara lebih rinci pada Tabel Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 mengenai Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, terlihat bahwa jumlah pelanggaran Perda yang

tercatat setiap tahun seluruhnya dapat diselesaikan, sehingga persentase penegakan Perda konsisten mencapai 100 persen.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 68 kasus pelanggaran Perda dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran menurun signifikan menjadi 19 kasus dan seluruhnya juga terselesaikan. Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 32 kasus, kemudian kembali meningkat menjadi 44 kasus pada tahun 2024, dan menurun kembali menjadi 18 kasus pada tahun 2025. Meskipun jumlah pelanggaran bersifat fluktuatif, jumlah penyelesaian penegakan Perda setiap tahunnya selalu sama dengan jumlah pelanggaran yang tercatat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aparat penegak Perda di Kabupaten Tulang Bawang memiliki kapasitas dan konsistensi dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Fluktuasi jumlah kasus lebih mencerminkan dinamika kondisi lapangan dan intensitas pengawasan, bukan penurunan kinerja penegakan. Dengan capaian penyelesaian 100 persen selama lima tahun berturut-turut, dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan regulasi daerah berjalan efektif dan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban umum serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

Tabel 2. 46 Persentase Penegakan PERDA di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Jumlah Pelanggaran PERDA	kasus	68	19	32	44	18
Jumlah Penyelesaian Penegakkan PERDA	kasus	68	19	32	44	18
Persentase Penegakan PERDA	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP Kab. Tulang Bawang, 2026

Selanjutnya, berdasarkan Tabel Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, terlihat bahwa kinerja penanganan

pelanggaran K3 juga menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten.

Jumlah pelanggaran K3 yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 144 kasus dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022 jumlah kasus meningkat menjadi 175 kasus dan kembali seluruhnya terselesaikan. Tahun 2023 jumlah pelanggaran menurun menjadi 121 kasus, kemudian meningkat menjadi 157 kasus pada tahun 2024, dan melonjak cukup signifikan menjadi 336 kasus pada tahun 2025. Meskipun jumlah pelanggaran mengalami fluktuasi yang cukup tajam, terutama pada tahun 2025, jumlah penyelesaian pelanggaran setiap tahunnya selalu sama dengan jumlah kasus yang tercatat.

Dengan demikian, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 selama periode 2021-2025 konsisten mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, penindakan, serta koordinasi dalam penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan berjalan efektif. Peningkatan jumlah kasus pada tahun 2025 dapat mencerminkan intensifikasi pengawasan dan penegakan di lapangan, yang justru menunjukkan peran aktif aparat dalam menjaga ketertiban umum.

Secara keseluruhan, konsistensi capaian 100 persen dalam penyelesaian pelanggaran Perda maupun pelanggaran K3 semakin memperkuat gambaran bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tulang Bawang telah dikelola secara optimal, dengan dukungan sistem penegakan yang responsif dan akuntabel.

Tabel 2. 47 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	kasus	144	175	121	157	336
Jumlah Pelanggaran K3	kasus	144	175	121	157	336

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian kinerja yang konsisten tersebut, baik dalam penyelesaian pelanggaran Perda maupun pelanggaran K3 yang mencapai 100 persen selama periode 2021-2025, menunjukkan bahwa sistem penegakan dan pengendalian ketertiban umum di Kabupaten Tulang Bawang telah berjalan secara efektif dan terukur. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan optimalnya fungsi pengawasan dan penindakan, tetapi juga adanya tata kelola kelembagaan yang mendukung pencapaian target pelayanan dasar secara berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga mengacu pada ketentuan normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan SPM tersebut meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta beberapa regulasi teknis pendukung lainnya, yaitu Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Seluruh regulasi tersebut menjadi acuan penting dalam penetapan indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi capaian layanan trantiblinmas di daerah. Dengan berpedoman pada

standar yang telah ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat memastikan bahwa pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan secara efektif, berkualitas, akuntabel, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Tabel 2. 48 Target dan Capaian Indikator SPM Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025

No	Indikator	Uraian	satuan	Target	Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025
Kategori Pencapaian Trantibum									
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	persen	100,00	0,00	91,45	92,45	99,35	96,14
Kategori Pencapaian Kebencanaan									
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100,00	0,00	0,00	82,00	81,38	91,19
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100,00	0,00	0,00	73,05	73,80	87,62
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100,00	0,00	0,00	96,00	96,00	92,29
Kategori Pencapaian DAMKAR									
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100,00	100,00	100,00	97,02	66,99	96,67

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian yang bervariasi selama periode 2021-2025, mencerminkan dinamika dalam penyediaan layanan dasar bagi warga.

Pada kategori Ketertiban Umum, indikator penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengalami peningkatan dari 91,45% pada tahun 2022 menjadi 99,35% pada tahun 2024, sebelum sedikit menurun ke 96,14% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan ketertiban, meskipun masih diperlukan penguatan konsistensi mutu layanan.

Di sisi Pelayanan Kebencanaan, capaian layanan menunjukkan pola peningkatan yang cukup jelas setelah awalnya tidak tercatat pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2023, layanan informasi rawan bencana mencapai 82% dan sedikit menurun menjadi 81,38% di tahun 2024 sebelum akhirnya mencapai angka 91,19% pada 2025. Pola serupa terlihat pada layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yang mulai tercatat 73,05% di tahun 2023, naik tipis menjadi 73,80% di tahun 2024, dan kemudian mencapai 87,62% pada 2025. Sementara itu, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukkan capaian yang lebih tinggi sejak awal, yaitu 96% pada 2023 dan 2024, lalu sedikit menurun menjadi 92,29% di tahun 2025.

Untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, capaian kinerja menunjukkan tren penurunan dari tahun 2022-2024 yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 96,67% yang mencerminkan kesiapan dalam memberikan layanan penyelamatan.

Secara keseluruhan, peningkatan capaian indikator SPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan layanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara capaian dan target yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, serta optimalisasi koordinasi

lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan juga perlu dilakukan guna memastikan setiap indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara konsisten pada periode perencanaan berikutnya.

F. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui dua kelompok program utama, yaitu program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial. Program perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sementara itu, program pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat, memperkuat kemandirian kelompok rentan, serta mendorong partisipasi sosial yang lebih luas.

Hingga saat ini, pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang belum berjalan secara optimal. Sejumlah kendala masih dihadapi, antara lain kapasitas kelembagaan sosial yang belum memadai, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM kesejahteraan sosial, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan sosial belum sepenuhnya optimal, sehingga berbagai program belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif.

Di sisi lain, kompleksitas permasalahan sosial di daerah terus meningkat. Penyandang disabilitas mental, orang terlantar, gelandangan, lanjut usia terlantar, serta korban bencana membutuhkan penanganan yang lebih serius, cepat, dan berkelanjutan. Kondisi ini menuntut hadirnya layanan sosial yang responsif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Penanganan permasalahan sosial menjadi sangat penting agar seluruh masyarakat dapat berdaya secara sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan sosial, peningkatan

kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta perluasan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 49 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Anak dengan bantuan hukum	17	3	9	15	9
2	Anak balita terlantar	135	73	5	3	15
3	Anak terlantar	166	143	63	57	24
4	Anak jalanan	15	11	0	0	16
5	Anak dengan kedisabilitasan	179	139	426	422	372
6	Lanjut usia terlantar	1.421	2.394	1.954	1.841	2.053
7	Penyandang disabilitas	717	822	600	497	895
8	Tuna Susila	0	54	0	0	135
9	Gelandangan	71	32	27	21	23
10	Pengemis	7	9	1	0	15
11	Pemulung	103	87	54	45	138
12	Kelompok minoritas	68	65	7	5	7
13	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	71	56	17	12	69
14	Korban penyalahgunaan NAPZA/KPN	10	62	5	2	78
15	Korban tindak kekerasan	0	14	9	9	40
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	4	0	0	6
17	Korban bencana alam	0	34	33	884	64
18	Fakir miskin	14.416	9.499	11.295	10.810	11.320
19	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	425	636	365	352	391
Total		**17.821**	**14.137**	**14.870**	**14.975**	**15.670**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, jumlah PPKS

menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah PPKS tercatat sebanyak 17.821 jiwa, kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 14.137 jiwa. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah tersebut kembali meningkat secara bertahap, yaitu 14.870 jiwa pada 2023, 14.975 jiwa pada 2024, dan 15.670 jiwa pada 2025.

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, fakir miskin merupakan kelompok dengan jumlah terbesar setiap tahun. Jumlahnya mencapai 14.416 jiwa pada 2021, menurun pada 2022 menjadi 9.499 jiwa, kemudian kembali meningkat hingga 11.320 jiwa pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial utama yang memerlukan perhatian dalam kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang.

Kelompok lanjut usia terlantar juga menunjukkan jumlah yang relatif besar dan berfluktuasi, dari 1.421 jiwa pada 2021, meningkat menjadi 2.394 jiwa pada 2022, kemudian menurun pada 2023-2024 sebelum kembali meningkat menjadi 2.053 jiwa pada 2025. Selain itu, penyandang disabilitas juga menjadi kelompok yang cukup signifikan dengan jumlah yang berkisar antara 497 hingga 895 jiwa, sementara anak dengan kedisabilitasan mengalami peningkatan cukup tajam pada tahun 2023-2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa kategori lain seperti gelandangan, pengemis, pemulung, dan kelompok minoritas menunjukkan jumlah yang relatif kecil dan cenderung stabil. Sementara itu, kategori tertentu seperti korban bencana alam mengalami lonjakan pada tahun 2024 sebesar 884 jiwa, yang mengindikasikan adanya kejadian bencana yang berdampak terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kelompok korban penyalahgunaan NAPZA/KPN juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh kemiskinan, kerentanan kelompok lanjut usia, serta kelompok penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan dan perlindungan sosial masih cukup tinggi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang mengalami hambatan

dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di masa mendatang.

Dalam rangka mengurangi jumlah PPKS sekaligus menekan tingkat kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan berbagai intervensi melalui program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan secara terarah untuk meningkatkan jangkauan pelayanan sosial, pemberian bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat rentan. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
2. Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini didukung oleh Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/147.A/V.1/HK/TB/2023 yang menjadi dasar hukum bagi TKPK untuk berperan aktif dalam membantu Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Tulang Bawang juga telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan program penanganan kemiskinan serta menyusun Rencana Aksi Tahunan Tahun 2024;
3. Meningkatkan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi;
4. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
5. Membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)/*Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (TJSP) dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan.

Berbagai intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tersebut secara bertahap menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Tahun 2025 tercatat sebesar 7,54 persen, menurun 0,34 poin dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai 7,88 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan PPKS yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan upaya tersebut, penyelenggaraan pelayanan sosial di daerah juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan regulasi tersebut, jenis pelayanan dasar pada urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Secara rinci indikator SPM Urusan Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator SPM	satuan	target	Capaian				
				2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	persen	100,00	82,67	98,67	95,38	91,75	100,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	persen	100,00	0,00	100,00	96,67	100,00	100,00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	persen	100,00	48,28	98,67	96,92	98,97	100,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	persen	100,00	0,00	100,00	96,67	98,10	92,33
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	persen	100,00	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id, 2026

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan konsisten selama periode 2021-2025. SPM ini mencakup lima layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk kelompok rentan di luar panti, serta perlindungan sosial bagi korban bencana.

Capaian tertinggi secara konsisten terlihat pada indikator Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana, yang mencapai 100% sejak tahun 2022 hingga 2025, menunjukkan kesiapsiagaan dan respons tanggap darurat yang optimal. Namun, beberapa indikator mengalami fluktuasi, seperti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, yang sempat menurun dari 98,67% pada 2022 menjadi 91,75% pada 2024 sebelum kembali mencapai target 100% di tahun 2025. Demikian pula, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) menunjukkan

capaian yang belum sepenuhnya stabil, dengan penurunan dari 98,10% pada 2024 menjadi 92,33% di tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian SPM urusan sosial di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi hak dasar kelompok rentan, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek konsistensi layanan dan pemenuhan target secara menyeluruh di semua indikator.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan ditandai oleh masih rendahnya produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan kesempatan kerja. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya memicu meningkatnya pengangguran.

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Angkatan Kerja	jiwa	230.773	225.601	235.345	239.345	234.820
2	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja	jiwa	221.307	217.660	227.197	231.619	227.318
3	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	persen	3,15	5,16	13,43	13,53	27,50
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	persen	68,00	69,00	70,00	75,00	74,87
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulang Bawang, 2026

Jumlah angkatan kerja mengalami penurunan pada 2022 (225.601 jiwa) dibandingkan 2021 (230.773 jiwa), kemudian meningkat pada 2023 (235.345 jiwa) dan kembali naik pada 2024 hingga mencapai 239.345 jiwa, sebelum turun menjadi 234.820 jiwa pada 2025.

Sementara itu, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja mengalami penurunan pada 2022 (217.660 jiwa) dibandingkan 2021 (221.307 jiwa), kemudian meningkat pada 2023 (227.197 jiwa) dan 2024 (231.619 jiwa), namun kembali menurun menjadi 227.318 jiwa pada 2025. Secara umum, terjadi fluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga 2024.

Dari sisi hubungan industrial, angka sengketa pengusaha–pekerja tercatat 0,00 persen sepanjang 2021-2024 dan meningkat menjadi 1,00 persen pada 2025. Meskipun terjadi kenaikan, angkanya masih tergolong rendah.

Indikator pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukkan peningkatan signifikan dari 3,15 persen pada 2021 menjadi 5,16 persen pada 2022, meningkat tajam pada 2023 (13,43 persen) dan 2024 (13,53 persen), hingga mencapai 27,50 persen pada 2025. Hal ini mengindikasikan semakin efektifnya pelayanan penempatan tenaga kerja.

Capaian kepesertaan pekerja dalam program Jamsostek meningkat secara bertahap dari 68,00 persen pada 2021 menjadi 69,00 persen pada 2022, 70,00 persen pada 2023, dan 75,00 persen pada 2024, meskipun sedikit menurun menjadi 74,87 persen pada 2025. Secara umum, perlindungan tenaga kerja menunjukkan tren positif.

Adapun tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami fluktuasi tajam, dari 50,00 persen pada 2021, turun menjadi 0,00 persen pada 2022, kemudian meningkat drastis menjadi 100,00 persen pada 2023 dan tetap pada 100,00 persen hingga 2025. Hal ini menunjukkan optimalisasi pelaksanaan program pelatihan dalam tiga tahun terakhir.

Secara keseluruhan, kinerja urusan tenaga kerja selama periode 2021-2025 menunjukkan perbaikan terutama dalam aspek penempatan tenaga kerja, perlindungan sosial, dan pelatihan berbasis kompetensi, meskipun masih terdapat fluktuasi pada jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi ketenagakerjaan daerah, khususnya terkait struktur dan aktivitas penduduk usia kerja, berikut disajikan Tabel Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu.

Tabel 2. 52 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Kegiatan Utama	Tahun				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Angkatan Kerja	**230.773**	**225.601**	**235.345**	**239.345**	**234.820**
-Bekerja	221.307	217.660	227.197	231.619	227.318
-Pengangguran Terbuka	9.466	7.941	8.148	7.726	7.502
Bukan Angkatan Kerja	**107.030**	**117.027**	**93.939**	**95.247**	**105.082**
-Sekolah	15.281	24.198	18.763	17.475	22.907
-Mengurus Rumah Tangga	79.263	87.479	64.272	72.802	73.542
-Lainnya	12.486	5.350	10.904	4.970	8.633

Sumber : BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Tulang Bawang menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif.

Dari sisi angkatan kerja, jumlahnya menurun pada 2022 (225.601 jiwa) dibandingkan 2021 (230.773 jiwa), kemudian meningkat pada 2023 (235.345 jiwa) dan mencapai puncaknya pada 2024 (239.345 jiwa), sebelum kembali turun pada 2025 (234.820 jiwa). Komponen terbesar dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja, yang bergerak dari 221.307 jiwa pada 2021, turun pada 2022 (217.660

jiwa), meningkat pada 2023 dan 2024 (masing-masing 227.197 jiwa dan 231.619 jiwa), lalu sedikit menurun pada 2025 (227.318 jiwa). Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka cenderung menurun dari 9.466 jiwa pada 2021 menjadi 7.941 jiwa pada 2022, sempat meningkat pada 2023 (8.148 jiwa), kemudian kembali menurun hingga 7.502 jiwa pada 2025. Secara umum, kondisi ini menunjukkan tren perbaikan tingkat pengangguran dalam lima tahun terakhir.

Pada kelompok bukan angkatan kerja, jumlahnya meningkat cukup tajam pada 2022 (117.027 jiwa) dibandingkan 2021 (107.030 jiwa), lalu menurun signifikan pada 2023 (93.939 jiwa), meningkat sedikit pada 2024 (95.247 jiwa), dan kembali naik pada 2025 (105.082 jiwa).

Dilihat dari komponennya, penduduk yang bersekolah mengalami kenaikan pada 2022 (24.198 jiwa), menurun pada 2023 dan 2024, kemudian kembali meningkat pada 2025 (22.907 jiwa). Penduduk yang mengurus rumah tangga merupakan bagian terbesar dari bukan angkatan kerja, dengan jumlah tertinggi pada 2022 (87.479 jiwa), menurun pada 2023, dan kembali meningkat hingga 73.542 jiwa pada 2025. Adapun kategori lainnya berfluktuasi, dengan penurunan tajam pada 2022 dan 2024, serta kenaikan kembali pada 2023 dan 2025.

Secara keseluruhan, struktur penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan fluktuasi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dengan kecenderungan membaiknya kondisi pengangguran terbuka serta dominannya kegiatan bekerja dalam struktur angkatan kerja.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai karakteristik tenaga kerja yang terserap di pasar kerja, khususnya dari aspek kedudukan atau posisi dalam pekerjaan, berikut disajikan Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama.

Tabel 2. 53 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Status Pekerjaan Utama	Tahun				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Berusaha Sendiri	42.600	57.434	46.949	56.458	51.778
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	40.166	39.722	49.813	43.139	38.639
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4.817	7.927	6.654	4.303	5.922
Buruh/Karyawan/Pegawai	70.516	58.220	62.900	58.567	73.076
Pekerja bebas	21.936	19.941	11.188	21.637	23.473
Pekerja Keluarga/tak dibayar	41.272	34.416	49.693	47.515	34.430

Sumber : BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, struktur status pekerjaan utama penduduk usia kerja di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Secara umum, kategori Buruh/Karyawan/Pegawai menjadi salah satu kelompok terbesar, dengan jumlah 70.516 orang pada 2021, menurun pada 2022 (58.220 orang), meningkat pada 2023 (62.900 orang), kembali turun pada 2024 (58.567 orang), dan melonjak cukup tinggi pada 2025 menjadi 73.076 orang. Pada 2025, kategori ini tercatat sebagai yang terbesar.

Kelompok Berusaha Sendiri juga menunjukkan fluktuasi, dari 42.600 orang pada 2021 meningkat tajam pada 2022 (57.434 orang), menurun pada 2023 (46.949 orang), kembali naik pada 2024 (56.458 orang), dan sedikit turun pada 2025 (51.778 orang).

Sementara itu, kategori Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar meningkat cukup signifikan pada 2023 (49.813 orang) dibandingkan 2022 (39.722 orang), namun kemudian menurun pada 2024 (43.139 orang) dan kembali turun pada 2025 (38.639 orang).

Kategori Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar relatif menjadi kelompok dengan jumlah lebih kecil dibanding kategori lainnya, dengan angka 4.817 orang pada 2021, meningkat pada 2022 (7.927 orang), menurun pada 2023 (6.654 orang) dan 2024 (4.303 orang), lalu

kembali naik pada 2025 (5.922 orang). Hal ini menunjukkan bahwa usaha dengan tenaga kerja tetap masih terbatas jumlahnya.

Pekerja bebas mengalami penurunan tajam pada 2023 (11.188 orang) dibandingkan 2022 (19.941 orang), kemudian meningkat kembali pada 2024 (21.637 orang) dan 2025 (23.473 orang).

Adapun Pekerja Keluarga/tak dibayar menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dari 41.272 orang pada 2021 turun menjadi 34.416 orang pada 2022, meningkat signifikan pada 2023 (49.693 orang), sedikit menurun pada 2024 (47.515 orang), dan kembali turun pada 2025 (34.430 orang).

Secara keseluruhan, perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika struktur ketenagakerjaan daerah, dengan dominasi pekerja buruh/karyawan/pegawai serta masih besarnya proporsi pekerja informal seperti berusaha sendiri dan pekerja keluarga. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran antara sektor formal dan informal yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar kerja daerah.

Struktur ketenagakerjaan suatu daerah mencerminkan arah pembangunan dan karakter ekonomi lokal. Di Kabupaten Tulang Bawang, penduduk usia kerja yang aktif bekerja tersebar pada tiga kelompok lapangan pekerjaan utama, yaitu sektor primer (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), sektor sekunder (industri pengolahan), dan sektor tersier (lainnya, termasuk jasa dan kegiatan non-produksi lainnya).

Dominasi sektor pertanian menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih bertumpu pada aktivitas berbasis sumber daya alam. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor lainnya mencerminkan kontribusi dari kegiatan ekonomi yang lebih modern dan beragam. Perubahan jumlah tenaga kerja antar sektor dari tahun ke tahun memberikan gambaran tentang dinamika ekonomi, pergeseran preferensi kerja, serta dampak dari kebijakan pembangunan dan investasi daerah.

Tabel 2. 54 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	114.457	110.330	120.948	113.686	106.027
2	Industri Pengolahan	26.148	23.088	20.168	27.432	32.950
3	Lainnya	80.702	84.242	86.081	90.501	88.341
Jumlah		**221.307**	**217.660**	**227.197**	**231.619**	**227.318**

Sumber : BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Secara umum terlihat bahwa sektor pertanian, Kehutanan, perburuan, dan Perikanan masih mendominasi penyerapan tenaga kerja, meskipun jumlahnya cenderung menurun pada akhir periode.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk bekerja tercatat 221.307 orang, dengan mayoritas bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 114.457 orang. Sementara itu, sektor industri pengolahan menyerap 26.148 orang, dan kategori lainnya sebanyak 80.702 orang.

Pada tahun 2022, total penduduk bekerja sedikit menurun menjadi 217.660 orang. Penurunan terutama terjadi pada sektor pertanian yang turun menjadi 110.330 orang, serta industri pengolahan menjadi 23.088 orang. Sebaliknya, sektor lainnya meningkat menjadi 84.242 orang.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 227.197 orang. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi 120.948 orang serta sektor lainnya menjadi 86.081 orang, meskipun sektor industri pengolahan kembali menurun menjadi 20.168 orang.

Pada tahun 2024, total penduduk bekerja kembali meningkat menjadi 231.619 orang. Sektor industri pengolahan mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 27.432 orang, sementara sektor pertanian

sedikit menurun menjadi 113.686 orang dan sektor lainnya meningkat menjadi 90.501 orang.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk bekerja sedikit menurun menjadi 227.318 orang. Penurunan terutama terjadi pada sektor pertanian yang menjadi 106.027 orang, meskipun sektor industri pengolahan terus meningkat hingga 32.950 orang, sedangkan sektor lainnya sedikit menurun menjadi 88.341 orang.

Secara keseluruhan, struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi sektor pertanian, Kehutanan, perburuan, dan Perikanan namun terlihat adanya kecenderungan peningkatan peran sektor industri pengolahan dalam menyerap tenaga kerja pada akhir periode. Selain itu, sektor lainnya juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar dan cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Tingkat pendidikan pencari kerja merupakan indikator penting dalam menilai kesiapan angkatan kerja dan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Di Kabupaten Tulang Bawang, data pencari kerja yang terdaftar menunjukkan variasi latar belakang pendidikan yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam penempatan tenaga kerja.

Selama periode 2021 hingga 2025, pencari kerja berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jumlah terbanyak berasal dari lulusan SLTA/sederajat, diikuti oleh lulusan pendidikan tinggi dan SLTP. Fluktuasi jumlah pencari kerja tiap tahun dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dinamika pasar kerja, serta efektivitas program pelatihan dan penempatan kerja.

Tabel 2. 55 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	SD/Sederajat	Orang	26	15	270	4	-
2	SMP/Sederajat	Orang	23	23	289	25	5
3	SMA/Sederajat	Orang	372	376	-	34	103
4	Diploma/Akademi/Universitas	Orang	43	159	27	10	12
Jumlah			**464**	**573**	**586**	**73**	**120**

Sumber: BPS, Tulang Bawang Dalam Angka 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2021-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 464 orang, didominasi oleh lulusan SMA/sederajat sebanyak 372 orang, diikuti Diploma/Akademi/ Universitas 43 orang, SD/sederajat 26 orang, dan SMP/sederajat 23 orang.

Pada tahun 2022 jumlah pencari kerja meningkat menjadi 573 orang, dengan lulusan SMA/sederajat masih menjadi kelompok terbesar sebanyak 376 orang, diikuti Diploma/Akademi/Universitas 159 orang, sementara SMP/sederajat dan SD/sederajat masing-masing 23 orang dan 15 orang.

Pada tahun 2023 jumlah pencari kerja kembali meningkat menjadi 586 orang, dengan pencari kerja SMP/sederajat sebanyak 289 orang dan SD/sederajat 270 orang, sedangkan Diploma/Akademi/ Universitas sebanyak 27 orang, dan data lulusan SMA/sederajat tidak tercatat pada tahun tersebut.

Pada tahun 2024 jumlah pencari kerja mengalami penurunan signifikan menjadi 73 orang, dengan SMA/sederajat sebanyak 34 orang, SMP/sederajat 25 orang, Diploma/Akademi/Universitas 10 orang, dan SD/sederajat 4 orang. Selanjutnya pada tahun 2025 jumlah pencari kerja kembali meningkat menjadi 120 orang, yang didominasi oleh lulusan SMA/sederajat sebanyak 103 orang, diikuti

Diploma/Akademi/Universitas 12 orang dan SMP/sederajat 5 orang, sementara SD/sederajat tidak tercatat.

Secara umum, lulusan SMA/sederajat cenderung mendominasi jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tulang Bawang. Fluktuasi jumlah pencari kerja yang terjadi selama periode tersebut mencerminkan dinamika pasar kerja, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, serta kemungkinan adanya perubahan dalam sistem pendataan atau pelaporan pencari kerja oleh instansi terkait.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender sebagai arus utama. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta kesempatan kerja dan usaha, sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Salah satu penyebab utama adalah aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengubah pola pikir dan budaya yang kurang mendukung peran perempuan.

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	3,25	54,20	54,30	56,80	57,10
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	20,00	20,00	20,00	22,00	22,00
3	Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	persen	36,55	37,33	36,26	36,89	36,89
4	Rasio KDRT	persen	0,014	0,012	0,011	0,094	0,048
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	48,17	42,74	53,86	50,58	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100,000	100,000	100,000	100,000	100,00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan, dari 3,25 persen pada tahun 2021 menjadi 57,10 persen pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin meningkatnya keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan. Representasi perempuan di DPR relatif stabil pada angka 20 persen pada periode 2021-2023 dan meningkat menjadi 22 persen pada tahun 2024-2025, meskipun masih perlu didorong untuk mencapai keterwakilan yang lebih optimal. Sementara itu, partisipasi

perempuan di sektor swasta cenderung stabil pada kisaran 36-37 persen selama periode tersebut.

Pada aspek perlindungan, rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan penurunan pada periode 2021-2023, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebelum kembali menurun pada tahun 2025. Kondisi ini dapat menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan serta semakin terbukanya akses terhadap layanan pengaduan. Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi dan kesempatan kerja.

Di sisi lain, layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan capaian yang sangat baik, dimana seluruh korban yang melapor telah mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih, layanan kesehatan, serta bantuan hukum dengan cakupan mencapai 100 persen setiap tahun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui penyediaan layanan yang terintegrasi dan responsif.

C. Pangan

Upaya penyelenggaraan urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan yang terjangkau oleh masyarakat, serta terwujudnya pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, dan seimbang. Selain itu, kebijakan ketahanan pangan juga diarahkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung keberlanjutan sistem pangan daerah.

Ketersediaan pangan utama diukur melalui perbandingan antara jumlah penduduk dengan rata-rata ketersediaan pangan utama. Indikator ini mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduk secara memadai dan

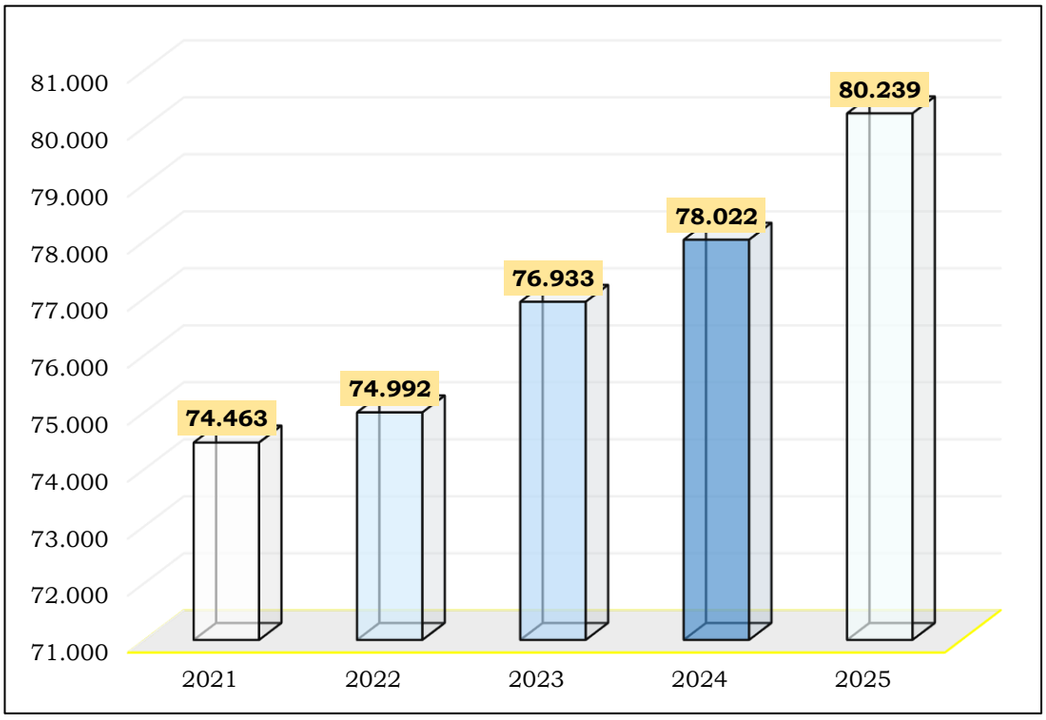
berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat ketersediaan pangan utama, semakin kuat pula kondisi ketahanan pangan suatu wilayah.

Pangan dalam konteks ketahanan pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, maupun air, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, baik yang telah diolah maupun tidak diolah. Pengertian pangan ini mencakup pula bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Definisi tersebut sejalan dengan pengertian pangan yang ditetapkan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, yang menegaskan bahwa pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas konsumsi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, aksesibilitas, keamanan, dan kualitas gizi. Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada kuantitas ketersediaan pangan, tetapi juga pada mutu, keamanan, dan keberlanjutan pangan guna mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu 2021 hingga 2025, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

Gambar 2. 49 Ketersediaan Pangan Utama (ton/tahun)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026 (diolah)

Berdasarkan grafik Ketersediaan Pangan Utama (ton/tahun) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai ketersediaan pangan utama pada tahun 2021 tercatat sebesar 74.463 ton per tahun. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 74.992 ton, atau naik sekitar 529 ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 76.933 ton, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 78.022 ton. Tren kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan ketersediaan pangan utama mencapai 80.239 ton per tahun, yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2021-2025. Secara keseluruhan, selama lima tahun tersebut terjadi peningkatan sekitar 5.776 ton dari tahun 2021 hingga 2025.

Kecenderungan peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor pangan daerah, khususnya dalam menjaga ketersediaan pangan utama untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang. Peningkatan ketersediaan pangan

tersebut dapat mencerminkan keberhasilan berbagai upaya, seperti peningkatan produksi komoditas pangan, penguatan pengelolaan cadangan pangan daerah, serta dukungan sistem distribusi pangan yang relatif stabil.

Selain itu, ketersediaan pangan merupakan komponen utama dalam mendukung ketahanan pangan daerah, karena berfungsi menjamin tersedianya pasokan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk, baik dari aspek kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan pangan utama selama periode 2021-2025 menjadi indikator positif dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor pangan di masa mendatang.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan ketersediaan dan cadangan pangan dioperasionalkan antara lain melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat kecukupan pasokan pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat secara rata-rata. Dengan demikian, indikator tersebut menjadi salah satu alat ukur penting dalam mengevaluasi kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Di Indonesia, Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan secara berkala melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) yang diselenggarakan setiap lima tahun. Salah satu rekomendasi WKNPG VIII Tahun 2004 menetapkan standar tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 kilokalori per kapita per hari dan protein sebesar 57 gram per kapita per hari. Standar tersebut digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan pangan dan gizi, khususnya dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan energi dan protein masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan.

Tabel 2. 57 Pemenuhan Energi dan Protein per Kapita per Hari Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Ketersediaan energi per kapita per hari	kkal	3.176,30	3.258,93	3.271,74	3.314,40	3.363,98
2	Ketersediaan protein per kapita per hari	gram	83,20	90,44	96,20	95,00	96,95
3	Persentase pemenuhan energi per kapita per hari	persen	144,38	148,13	148,72	150,65	152,91
4	Persentase pemenuhan protein per kapita per hari	persen	145,96	158,67	168,77	166,67	170,088

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026 (diolah)

Ketersediaan energi per kapita per hari mengalami peningkatan secara bertahap dari 3.176,30 kkal pada tahun 2021 menjadi 3.258,93 kkal pada tahun 2022, kemudian 3.271,74 kkal pada tahun 2023, meningkat lagi menjadi 3.314,40 kkal pada tahun 2024, dan mencapai 3.363,98 kkal pada tahun 2025. Nilai tersebut secara konsisten berada di atas standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) energi sebesar 2.200 kkal per kapita per hari, sehingga menunjukkan bahwa secara agregat pasokan energi pangan di Kabupaten Tulang Bawang telah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi penduduk.

Sejalan dengan hal tersebut, ketersediaan protein per kapita per hari juga memperlihatkan tren peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 83,20 gram, kemudian meningkat menjadi 90,44 gram pada tahun 2022 dan 96,20 gram pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 95,00 gram, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 96,95 gram. Capaian tersebut masih jauh melampaui standar AKG protein sebesar 57 gram per kapita per hari, yang menunjukkan bahwa secara kuantitas pasokan protein bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang berada pada kondisi sangat memadai.

Tingginya ketersediaan energi dan protein tersebut tercermin pada persentase pemenuhan energi dan protein per kapita per hari. Persentase pemenuhan energi meningkat dari 144,38 persen pada tahun 2021 menjadi 148,13 persen pada tahun 2022, 148,72 persen pada tahun 2023, 150,65 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 152,91 persen pada tahun 2025. Sementara itu, persentase pemenuhan protein juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 145,96 persen pada tahun 2021 menjadi 158,67 persen pada tahun 2022 dan 168,77 persen pada tahun 2023, sempat sedikit menurun menjadi 166,67 persen pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat hingga sekitar 170,09 persen pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Tulang Bawang dari sisi energi dan protein berada pada tingkat yang sangat memadai bahkan melebihi kebutuhan rata-rata penduduk. Meskipun demikian, ke depan tetap diperlukan upaya pengelolaan pangan yang berkelanjutan, antara lain melalui peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan, pemerataan distribusi pangan antarwilayah dan kelompok masyarakat, serta pengendalian potensi kehilangan dan pemborosan pangan. Upaya tersebut penting agar tingginya ketersediaan pangan tidak hanya tercermin pada sisi pasokan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas konsumsi dan perbaikan status gizi masyarakat secara merata.

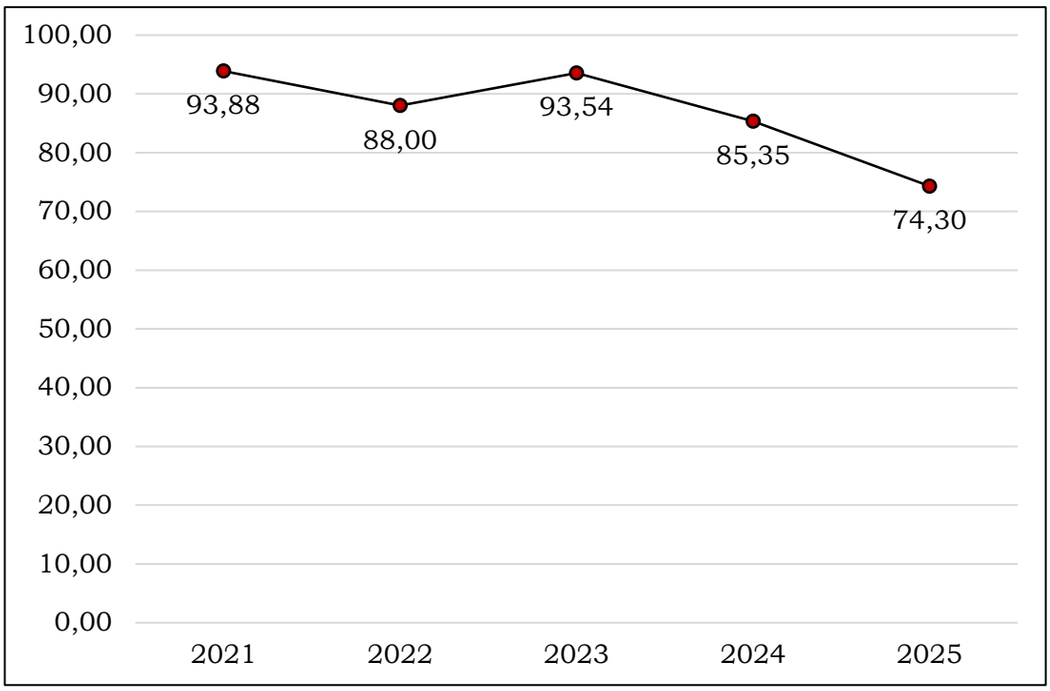
Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan menjadi salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, karena pangan yang tersedia dan cukup secara kuantitas belum tentu aman untuk dikonsumsi apabila tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Dalam rangka menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan secara berkelanjutan, khususnya

terhadap pangan yang diperdagangkan oleh pedagang pengumpul. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengambilan dan pengujian sampel pangan, baik pangan segar maupun olahan, guna memastikan kesesuaiannya dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

Tingkat keamanan pangan diukur melalui perhitungan persentase pangan aman, yaitu perbandingan antara jumlah sampel pangan yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi dengan jumlah total sampel pangan yang diambil dari pedagang pengumpul pada suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu.

Gambar 2. 50 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026 (diolah)

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2024 secara umum berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu di atas 85 persen. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 93,88 persen, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 88,00 persen. Tahun 2023 menunjukkan pemulihan dengan capaian 93,54 persen, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 85,35 persen. Memasuki tahun 2025, tren penurunan berlanjut cukup signifikan dengan

capaian hanya 74,30 persen, sehingga menjadi titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Penurunan capaian pada tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pengambilan sampel dalam kegiatan monitoring keamanan pangan sebagai dampak pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh titik sasaran. Sementara itu, penurunan pada tahun 2024 lebih dipengaruhi oleh menurunnya kualitas sebagian produk pangan yang beredar, yang berkaitan dengan faktor musim dan kondisi cuaca ekstrem, sehingga memengaruhi hasil pengujian keamanan pangan. Adapun penurunan yang lebih tajam pada tahun 2025 mengindikasikan adanya tantangan struktural yang lebih kompleks, seperti keterbatasan sumber daya pengawasan, meningkatnya volume distribusi pangan tanpa diimbangi kapasitas pengendalian mutu, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor.

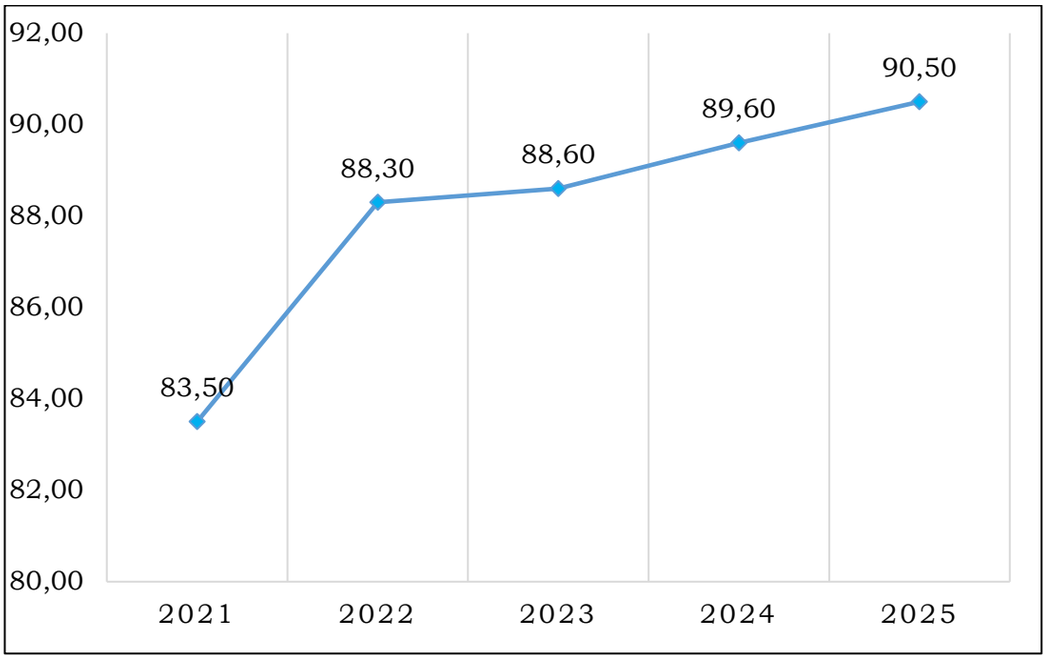
Meskipun terjadi fluktuasi dan penurunan signifikan pada tahun 2025, secara keseluruhan capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tetap mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga mutu dan keamanan pangan. Upaya pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi terus dilaksanakan secara konsisten, menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang pasar, kelompok tani, masyarakat umum, hingga anak sekolah. Namun, tren penurunan di tahun terakhir menekankan pentingnya peningkatan kualitas intervensi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi dalam sistem monitoring agar keberlanjutan keamanan pangan dapat terjaga.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dilakukan secara intensif dan bersinergi dengan perangkat daerah serta instansi terkait, seperti Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Hasil pembinaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan adanya komitmen paguyuban pedagang ikan yang telah dibina untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan dan manajemen lapak. Selain itu, pengawasan mutu dan keamanan PSAT juga

dilaksanakan secara rutin dan intensif di pasar modern maupun pasar tradisional, baik terhadap pelaku usaha dan pedagang, maupun kelompok tani. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang.

Namun demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek keamanan dan ketersediaan, tetapi juga oleh kualitas dan keragaman pola konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan susunan dan tingkat keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat, yang didasarkan pada kontribusi energi dari kelompok pangan utama. PPH juga merupakan salah satu indikator dalam analisis kesejahteraan masyarakat, karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang tidak seimbang, baik dalam bentuk kelebihan maupun kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan, dapat berdampak pada munculnya masalah gizi, seperti malnutrisi, serta meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit. Oleh karena itu, pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari aspek ketersediaan dan keamanan pangan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman sebagaimana tercermin dalam capaian Pola Pangan Harapan (PPH).

Gambar 2. 51 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2026 (diolah)

Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021-2025. Pada tahun 2021, skor PPH tercatat sebesar 83,50, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 88,30. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023 dengan skor 88,60, dan semakin menguat pada tahun 2024 dengan capaian 89,60. Memasuki tahun 2025, skor PPH mencapai 90,50, menandakan perbaikan berkelanjutan dalam pola konsumsi pangan masyarakat.

Peningkatan skor PPH selama periode 2021-2024 mencerminkan keberhasilan sinergi lintas sektor dalam penguatan program ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi, serta efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan capaian tahun 2025 yang semakin tinggi, Kabupaten Tulang Bawang menegaskan arah positif menuju pola konsumsi pangan yang lebih ideal sesuai standar nasional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Sejalan dengan peningkatan skor PPH tersebut, pemerintah daerah juga menguatkan komitmen dalam penanganan wilayah rawan pangan sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan.

Selama lima tahun terakhir, upaya penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program strategis secara bertahap untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada wilayah-wilayah yang tergolong rentan pangan, dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya hak atas pangan yang layak dan bergizi.

Tabel 2. 58 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Banjar Agung	0	0	0	0	0
2	Banjar Margo	0	0	0	0	0
3	Gedung Aji	1	1	0	0	0
4	Penawar Aji	0	0	0	0	0
5	Meraksa Aji	0	0	0	0	0
6	Menggala	0	0	0	0	0
7	Penawartama	0	0	0	0	0
8	Rawajitu Selatan	1	0	0	1	1
9	Gedung Meneng	1	0	1	1	0
10	Rawajitu Timur	4	0	0	0	0
11	Rawa Pitu	1	0	1	1	0
12	Gedung Aji Baru	0	0	0	0	0
13	Dente Teladas	2	3	2	2	1
14	Banjar Baru	0	0	0	0	0
15	Menggala Timur	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Pengurangan jumlah desa rawan pangan merupakan indikator penting dalam penguatan ketahanan pangan wilayah. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah

melakukan pemetaan berkala terhadap kampung-kampung yang tergolong rawan pangan, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menurunkan angka kerentanan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Tabel 2. 59 Kampung Rawan Pangan per Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Tahun	Kecamatan		Kampung	Prioritas
2021	1	Rawa Jitu Selatan	Karya Cipta Abadi	2
	2	Rawa Jitu Timur	Bumi Dipasena Sejahtera	2
			Bumi Dipasena Agung	2
			Bumi Dipasena Sentosa	3
			Bumi Dipasena Abadi	3
	3	Gedung Meneng	Gedung Meneng	3
	4	Gedung Aji	Bandar Aji Jaya	3
	5	Rawa Pitu	Rawa Ragil	3
	6	Dente Teladas	Sungai Burung	3
			Kuala Teladas	3
2022	1	Dente Teladas	Kuala Teladas	2
			Sungai Burung	3
			Bratasena Mandiri	3
	2	Gedung Aji	Bandar Aji Jaya	3
2023	1	Dente Teladas	Bratasena Mandiri	2
			Sungai Nibung	3
	2	Rawa Pitu	Bumi Sari	3
	3	Gedung Meneng	Gedung Meneng	3
2024	1	Rawa Jitu Selatan	Karya Cipta Abadi	3
	2	Dente Teladas	Sungai Nibung	3
			Bratasena Mandiri	3
	3	Menggala Timur	Sungai Luar	3
	4	Gedung Meneng	Gedung Meneng	3
	5	Rawa Pitu	Bumi Sari	3
2025	1	Rawajitu Selatan	Karya Cipta Abadi	1
	2	Menggala Timur	Sungai Luar	3
	3	Dente Teladas	Bratasena Mandiri	3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026
Keterangan:
Prioritas 1 : Sangat Rentan
Prioritas 2 : Rentan
Prioritas 3 : Agak Rentan

Data kampung rawan pangan di Kabupaten Tulang Bawang sepanjang periode 2021-2025 menunjukkan adanya fluktuasi tingkat kerentanan pangan di berbagai kecamatan. Pada tahun 2021, tercatat sejumlah kampung dengan status Prioritas 2 (rentan) dan Prioritas 3 (agak rentan), seperti Karya Cipta Abadi di Rawa Jitu Selatan (Prioritas 2), serta beberapa kampung di Rawa Jitu Timur, Gedung Meneng, Gedung Aji, Rawa Pitu, dan Dente Teladas yang berada pada kategori Prioritas 3. Kondisi ini menandakan adanya konsentrasi kerentanan di wilayah pesisir dan sentra produksi pangan.

Tahun 2022 memperlihatkan perubahan status, di mana Kuala Teladas (Dente Teladas) meningkat menjadi Prioritas 2, sementara kampung lain seperti Sungai Burung dan Bratasena Mandiri masih berada pada kategori Prioritas 3. Tahun 2023 menunjukkan pola serupa, dengan Bratasena Mandiri (Dente Teladas) naik ke Prioritas 2, sementara Sungai Nibung, Bumi Sari, dan Gedung Meneng tetap berada pada kategori Prioritas 3.

Memasuki tahun 2024, sebagian besar kampung masih berada pada kategori Prioritas 3, seperti Karya Cipta Abadi (Rawa Jitu Selatan), Sungai Nibung (Dente Teladas), Bratasena Mandiri (Menggala Timur), Gedung Meneng, dan Bumi Sari (Rawa Pitu). Hal ini menunjukkan kerentanan yang masih berlanjut tanpa adanya peningkatan signifikan. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan penting: Karya Cipta Abadi (Rawa Jitu Selatan) meningkat menjadi Prioritas 1 (sangat rentan), menandakan adanya eskalasi kerentanan pangan yang perlu segera ditangani secara serius. Sementara itu, kampung lain seperti Sungai Luar (Menggala Timur) dan Bratasena Mandiri (Dente Teladas) tetap berada pada kategori Prioritas 3, menunjukkan kerentanan yang persisten.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat upaya penanganan, beberapa kampung mengalami fluktuasi status kerentanan pangan, bahkan ada yang memburuk. Hal ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan status Prioritas 1, agar

ketahanan pangan dapat terjaga dan hak masyarakat atas pangan yang layak serta bergizi dapat terpenuhi.

D. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kepastian hukum, tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Beberapa indikator bagi kinerja urusan pertanahan adalah jumlah sertifikat yang dikeluarkan, kasus pertanahan yang terdaftar dan difasilitas dan penyelesaian izin lokasi. Hasil kinerja urusan pertanahan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2. 60 Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2024

No	Indikator	satuan	Capaian Kinerja			
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
1	Persentase luas lahan bersertifikat	persen	17,03	18,61	19,32	19,56
2	Penyelesaian kasus tanah negara	persen	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penyelesaian izin lokasi	persen	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kantor ATR/BPN Kab. Tulang Bawang, 2025 (diolah)

Kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan capaian yang stabil dan progresif dalam mendukung kepastian hukum atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta kelancaran proses perizinan lokasi. Tiga indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan ini meliputi persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi.

Indikator pertama, yaitu persentase luas lahan bersertifikat, menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun

2021, capaian berada di angka 17,03%, kemudian meningkat menjadi 18,61% di tahun 2022, dan terus naik menjadi 19,32% pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya relatif moderat, tren ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah yang sah dan terdaftar secara legal. Di tahun 2024, capaian mencapai 19,56%, menandakan konsistensi dalam pelaksanaan program sertifikasi tanah, meskipun masih terdapat ruang untuk akselerasi.

Sementara itu, dua indikator lainnya menunjukkan capaian maksimal selama lima tahun berturut-turut. Penyelesaian kasus tanah negara tercatat mencapai 100% setiap tahun, menandakan efektivitas koordinasi antar lembaga dalam menangani dan menyelesaikan persoalan hukum terkait tanah milik negara. Begitu pula dengan penyelesaian izin lokasi, yang juga mencapai 100% setiap tahun, mencerminkan kelancaran proses administrasi dan dukungan terhadap kegiatan pembangunan serta investasi di daerah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang telah berhasil menjaga stabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan urusan pertanahan. Peningkatan sertifikasi lahan dan penyelesaian penuh atas kasus serta izin lokasi menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, memperkuat tata ruang, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ke depan, akselerasi sertifikasi tanah dan digitalisasi layanan pertanahan dapat menjadi strategi lanjutan untuk meningkatkan kinerja dan memperluas dampak positif bagi pembangunan daerah.

E. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang saling memengaruhi dan menentukan keberlangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pelaksanaan berbagai proyek

pembangunan strategis di Kabupaten Tulang Bawang, kebutuhan terhadap pemanfaatan sumber daya alam semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Dampak lanjutan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat berupa penurunan daya dukung, daya tampung, serta produktivitas lingkungan hidup yang pada akhirnya menjadi beban sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menggambarkan kondisi mutu lingkungan secara komprehensif, meliputi kualitas air (Indeks Kualitas Air/IKA), kualitas udara (Indeks Kualitas Udara/IKU), dan kualitas tutupan lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan/IKTL). Secara substantif, IKLH mencerminkan status atau mutu lingkungan hidup serta dapat dimanfaatkan sebagai data dan informasi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Komponen penyusun IKLH terdiri atas tiga indikator utama, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas air dihitung berdasarkan sejumlah parameter, antara lain *Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total fosfat, fecal coli,* dan *total coliform.* Indikator kualitas udara dihitung berdasarkan parameter *sulfur dioksida (SO_2)* dan *nitrogen dioksida (NO_2).* Sementara itu, indikator kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan luas dan kondisi tutupan lahan.

Dalam perkembangannya, metode penghitungan IKLH terus mengalami penyempurnaan. Sejak tahun 2017, penghitungan IKLH menggunakan metodologi yang telah disempurnakan dengan tetap berfokus pada tiga media lingkungan utama, yaitu air, udara, dan

hutan/lahan. Penyempurnaan tersebut meliputi penyesuaian metodologi perhitungan, khususnya pada aspek pembobotan indikator dan parameter yang digunakan.

Pada periode perhitungan IKLH tahun 2014-2016, indikator kualitas air, udara, dan tutupan lahan/hutan memiliki bobot yang sama. Namun, sejak tahun 2017, indikator kualitas air dan udara masing-masing memiliki bobot sebesar 30 persen, sedangkan indikator kualitas tutupan lahan/hutan memiliki bobot lebih besar, yaitu 40 persen. Selain itu, parameter kualitas air yang digunakan juga mengalami penambahan, dari sebelumnya hanya tiga parameter (COD, TSS, dan DO) menjadi tujuh parameter, yaitu TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, E. coli, dan total coliform. Perubahan metodologi juga diterapkan pada perhitungan indeks kualitas tutupan lahan.

Penghitungan IKLH Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019 didasarkan pada: (1) data hasil pemantauan kualitas air pada Sungai Serang dan Sungai Papah; (2) data hasil pemantauan kualitas udara pada kawasan transportasi, permukiman, industri, dan perkantoran; serta (3) data hasil analisis spasial tutupan lahan/hutan dan data tabular ruang terbuka hijau. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang beserta nilai indeks dari masing-masing parameter IKLH disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	56,67	50,00	50,00	62,50	73,32
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	90,15	92,74	92,03	93,54	76,40
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	24,09	24,11	24,79	25,00	55,69

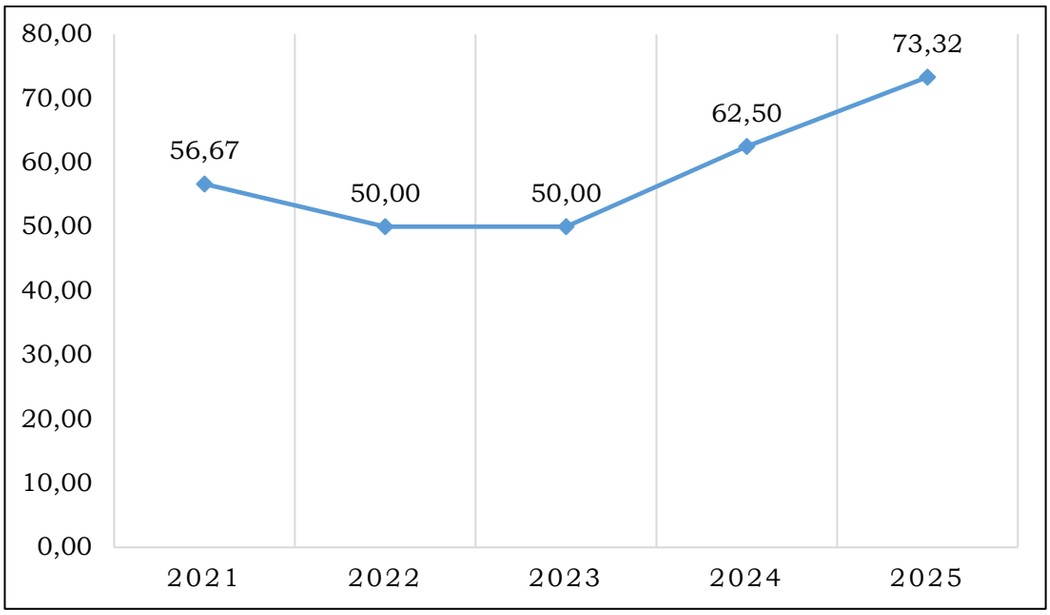
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dengan menggunakan 8 (delapan) parameter, yaitu derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (dissolved oxygen/DO), kebutuhan oksigen biologi (biological oxygen

demand/BOD), kebutuhan oksigen kimia (chemical oxygen demand/COD), nitrat (NO_3-N), padatan tersuspensi total (total suspended solid/TSS), total fosfat, dan total coliform. Penghitungan IKA menggunakan metode indeks pencemar, dengan prinsip bahwa semakin tinggi nilai indeks pencemar, maka semakin buruk kualitas air.

Dalam analisis indeks pencemaran, baku mutu yang digunakan mengacu pada baku mutu air Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gambar 2. 52 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, nilai IKA tercatat sebesar 56,67, yang menempatkan kualitas air pada kategori sedang. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi badan air permukaan seperti sungai, saluran irigasi, dan sumber air lainnya masih berada pada tingkat kualitas yang cukup, meskipun tetap memerlukan pengelolaan dan pengendalian pencemaran secara berkelanjutan.

Pada tahun 2022, nilai IKA mengalami penurunan menjadi 50,00, dan pada tahun 2023 nilai tersebut tetap berada pada angka 50,00.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air pada periode tersebut berada pada batas bawah kategori sedang, yang mengindikasikan masih adanya tekanan terhadap kualitas perairan, baik dari aktivitas domestik, pertanian, maupun faktor lingkungan lainnya.

Perbaikan kualitas air mulai terlihat pada tahun 2024, ketika nilai IKA meningkat cukup signifikan menjadi 62,50. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kualitas air yang dapat dikaitkan dengan semakin meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan perairan di daerah.

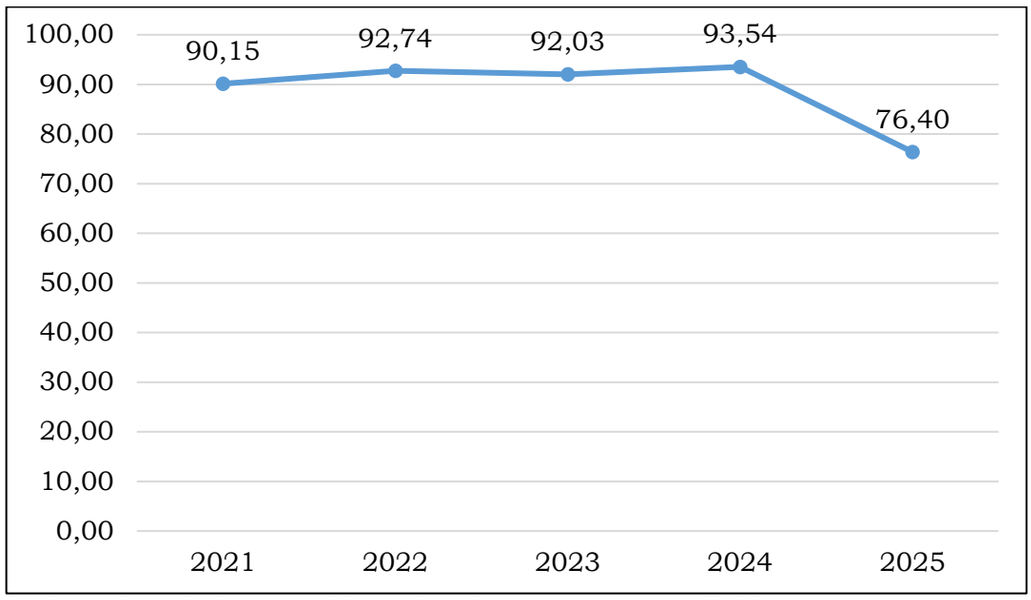
Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025, di mana nilai IKA kembali meningkat menjadi 73,32. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas air yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan memperlihatkan bahwa upaya pengelolaan serta perlindungan sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang mulai memberikan hasil yang lebih nyata.

Secara keseluruhan, perkembangan IKA Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan pada awal periode, kualitas air pada dua tahun terakhir mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi indikasi positif bagi keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, meskipun upaya pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, serta perlindungan badan air tetap perlu terus diperkuat agar kualitas air dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Selain kualitas air, aspek lingkungan hidup lainnya yang juga menjadi perhatian dalam pengukuran kualitas lingkungan adalah kualitas udara. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yaitu ozon di permukaan (oksidan), bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2), dan nitrogen dioksida (NO_2). Namun, hingga saat ini, berdasarkan laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023, perhitungan indeks kualitas udara di Indonesia masih menggunakan dua parameter utama, yaitu NO_2 dan SO_2. Parameter

NO_2 merepresentasikan emisi yang berasal dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin, sedangkan SO_2 mencerminkan emisi yang dihasilkan oleh aktivitas industri serta kendaraan berbahan bakar solar atau bahan bakar lain yang mengandung sulfur. Dengan demikian, kedua parameter ini menjadi indikator penting dalam menggambarkan tingkat pencemaran udara yang dominan di wilayah perkotaan maupun kawasan industri.

Gambar 2. 53 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2024, capaian IKU di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren yang relatif stabil dengan nilai indeks yang berada pada kategori baik. Pada tahun 2021, nilai IKU tercatat sebesar 90,15. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah tersebut berada pada tingkat yang sangat baik dan masih mampu mendukung aktivitas masyarakat secara optimal.

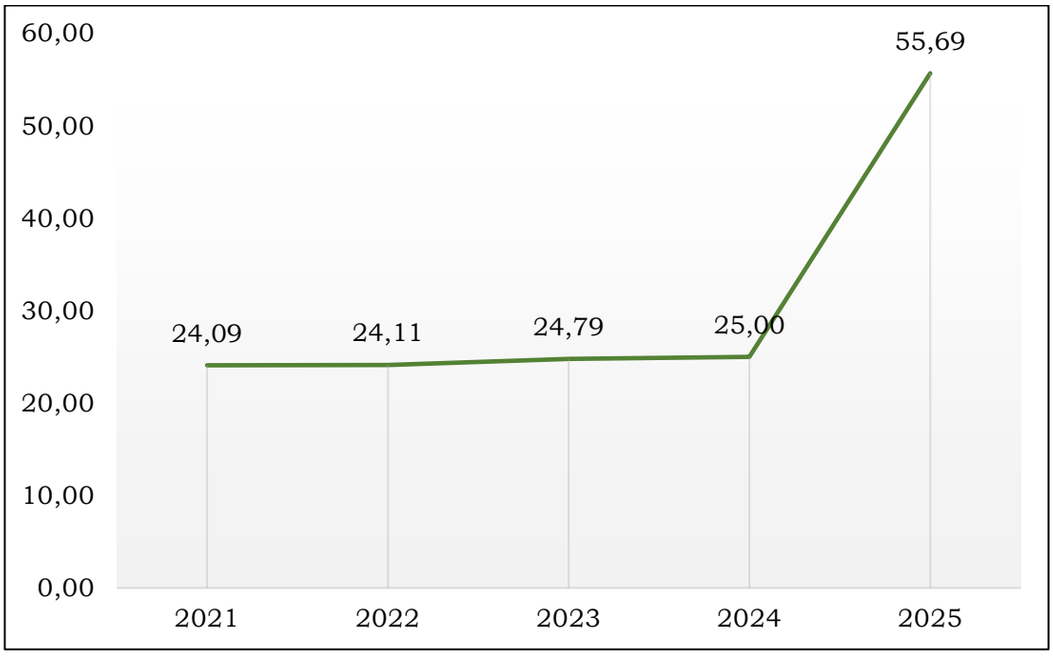
Pada tahun 2022, nilai IKU meningkat menjadi 92,74, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2023, nilai IKU mengalami sedikit penurunan menjadi 92,03, namun penurunan tersebut relatif kecil sehingga kualitas udara tetap berada dalam kategori baik.

Pada tahun 2024, nilai IKU kembali meningkat dan mencapai 93,54, yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2021-2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun tersebut berada pada tingkat yang sangat baik dan mencerminkan pengelolaan lingkungan udara yang cukup efektif. Namun demikian, pada tahun 2025 nilai IKU mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 76,40. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih berada pada kategori baik, sehingga secara umum kualitas udara di Kabupaten Tulang Bawang masih tergolong baik dan belum menunjukkan kondisi pencemaran udara yang serius.

Secara keseluruhan, perkembangan IKU Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah ini relatif terjaga dengan baik. Meskipun terjadi fluktuasi, terutama penurunan pada tahun 2025, kondisi kualitas udara masih berada dalam kategori yang baik. Ke depan, upaya pengendalian emisi dari sektor transportasi, kegiatan industri, serta pengelolaan aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara tetap perlu diperkuat guna menjaga stabilitas kualitas udara dan mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di daerah.

Selain kualitas air dan udara, indikator lain yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), atau yang juga dikenal sebagai Indeks Kualitas Lahan (IKL), merupakan indikator yang menggambarkan kualitas tutupan lahan suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. IKTL/IKL digunakan sebagai representasi isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam konteks keberlanjutan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Gambar 2. 54 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2024, nilai IKTL Kabupaten Tulang Bawang meningkat secara perlahan. Pada tahun 2021, nilai IKTL tercatat sebesar 24,09, kemudian meningkat sedikit menjadi 24,11 pada tahun 2022. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 24,79, dan terus bertambah menjadi 25,00 pada tahun 2024. Peningkatan yang relatif kecil namun konsisten tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas tutupan lahan secara bertahap, meskipun secara umum nilainya masih berada pada tingkat yang relatif rendah.

Perubahan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 2025, ketika nilai IKTL meningkat cukup tajam menjadi 55,69. Peningkatan yang signifikan ini kemungkinan tidak hanya mencerminkan perbaikan kondisi tutupan lahan secara fisik, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pembaruan metode perhitungan dan penyesuaian parameter dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan metodologi, termasuk pembaruan data tutupan lahan berbasis citra satelit dan penyesuaian klasifikasi vegetasi, dapat

memengaruhi hasil perhitungan indeks sehingga menghasilkan nilai yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, perkembangan IKTL Kabupaten Tulang Bawang selama 2021-2025 menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan pada awal periode masih berada pada tingkat yang relatif rendah dan meningkat secara bertahap hingga tahun 2024, kemudian mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan tutupan lahan sekaligus kemungkinan adanya penyesuaian metodologi pengukuran, sehingga ke depan diperlukan konsistensi metode pemantauan serta penguatan upaya rehabilitasi lahan, penghijauan, dan perlindungan kawasan vegetasi guna menjaga keberlanjutan fungsi ekologis lahan di Kabupaten Tulang Bawang.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional maupun daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk:

a) Menjamin kepastian hukum atas identitas setiap penduduk.
b) Menyediakan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan.

c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.
d) Mendukung pelaksanaan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, pembangunan yang berbasis data, serta perlindungan hak-hak sipil masyarakat.

Tabel 2. 62 Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Cakupan Penerbitan KK (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan Penerbitan KTP-el (%)	92,28	91,55	95,00	95,00	96,00
3	Cakupan Penerbitan KIA (%)	-	23,00	35,00	40,00	40,00
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Cakupan penerbitan kutipan akta perkawinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Selama periode 2021-2025, kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan capaian yang stabil dan cenderung meningkat pada sebagian besar indikator.

Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) konsisten mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan dokumen dasar kependudukan bagi seluruh keluarga telah berjalan optimal dan relatif tidak mengalami kendala berarti. Konsistensi yang sama juga terlihat pada penerbitan kutipan akta kematian dan akta perkawinan yang mencapai 100% sepanjang 2021-2025. Untuk akta kelahiran, cakupan meningkat dari 99,50% pada 2021 menjadi 100% sejak 2022 hingga 2025, menandakan penguatan pencatatan peristiwa kelahiran secara menyeluruh.

Pada indikator KTP-el, capaian menunjukkan tren yang semakin baik. Setelah berada pada 92,28% (2021) dan sedikit menurun menjadi 91,55% (2022), cakupan meningkat menjadi 95,00% pada 2023 dan 2024, serta kembali naik menjadi 96,00% pada 2025. Perkembangan ini mencerminkan peningkatan efektivitas pelayanan dalam menjangkau penduduk wajib KTP.

Sementara itu, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan kemajuan bertahap sejak mulai tercatat pada 2022 sebesar 23,00%, meningkat menjadi 35,00% pada 2023, dan mencapai 40,00% pada 2024 serta tetap pada 2025. Meskipun trennya positif, cakupan KIA masih relatif lebih rendah dibandingkan dokumen kependudukan lainnya, sehingga menjadi area yang masih perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, capaian indikator pelayanan kependudukan ini mencerminkan sistem administrasi yang semakin tertib dan andal, dengan tantangan ke depan yang lebih terfokus pada peningkatan kepemilikan KIA serta menjaga konsistensi kualitas layanan agar tetap inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 63 Rekapitulasi Layanan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Jenis Layanan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK					
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	26.808	22.874	28.649	25.785	28.111
Penerbitan KTP-el	36.141	25.699	34.817	40.238	36.249
Penerbitan KIA	94.943	5.258	1.806	9.107	16.050
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang	1.252	806	1.014	889	657
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar	2.195	2.830	2.763	2.173	1.691
DOKUMEN PENCATATAN SIPIL					
Penerbitan Akta Kelahiran	3.095	9.123	11.222	6.443	6.792
Penerbitan Akta Kematian	979	493	525	540	781
Penerbitan Akta Perkawinan	76	3.077	96	11	158

Jenis Layanan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Penerbitan Akta Perceraian	2	2	5	3	10
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN					
Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan hak akses pemanfaatan data	2	3	5	5	2

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Selama periode 2021-2025, layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan dinamika yang fluktuatif, baik pada kelompok dokumen pendaftaran penduduk, dokumen pencatatan sipil, maupun pemanfaatan data kependudukan.

Pada kelompok dokumen pendaftaran penduduk, penerbitan Kartu Keluarga (KK) bergerak dinamis dari 26.808 dokumen (2021), menurun menjadi 22.874 (2022), meningkat menjadi 28.649 (2023), kembali turun menjadi 25.785 (2024), dan naik lagi menjadi 28.111 (2025). Pola ini menunjukkan variasi tahunan yang relatif moderat tanpa perubahan ekstrem.
Penerbitan KTP-el juga berfluktuasi. Setelah mencapai 36.141 dokumen pada 2021, jumlahnya menurun menjadi 25.699 (2022), meningkat kembali menjadi 34.817 (2023), mencapai puncak 40.238 (2024), dan kembali turun menjadi 36.249 pada 2025. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika kebutuhan perekaman baru maupun pencetakan ulang.

Berbeda dengan dua layanan sebelumnya, penerbitan KIA menunjukkan pola yang lebih tajam. Tahun 2021 tercatat 94.943 dokumen, kemudian turun drastis pada 2022 (5.258) dan 2023 (1.806), sebelum kembali meningkat pada 2024 (9.107) dan 2025 (16.050). Perubahan signifikan ini mengindikasikan adanya faktor kebijakan, sistem, atau metode pelaporan yang memengaruhi capaian tahunan.

Layanan surat keterangan pindah datang cenderung menurun dari 1.252 dokumen (2021) menjadi 657 dokumen (2025), meskipun sempat meningkat pada 2023. Sementara itu, pindah keluar mencapai

2.830 dokumen pada 2022, kemudian menurun bertahap hingga 1.691 pada 2025. Pola ini menunjukkan dinamika mobilitas penduduk yang relatif terkendali dalam lima tahun terakhir.

Pada kelompok dokumen pencatatan sipil, penerbitan akta kelahiran meningkat signifikan dari 3.095 dokumen (2021) menjadi 11.222 (2023), lalu menurun pada 2024 (6.443) dan sedikit meningkat pada 2025 (6.792). Akta kematian menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan pada 2022 (493) dibanding 2021 (979), kemudian meningkat kembali hingga 781 pada 2025.

Penerbitan akta perkawinan mengalami lonjakan sangat tinggi pada 2022 (3.077) dibanding 76 dokumen pada 2021, kemudian turun tajam pada 2023 (96) dan 2024 (11), sebelum kembali meningkat menjadi 158 pada 2025. Akta perceraian relatif kecil jumlahnya, namun menunjukkan kecenderungan meningkat hingga 10 dokumen pada 2025.

Pada aspek pemanfaatan data kependudukan, jumlah perangkat daerah yang memperoleh persetujuan hak akses tercatat sebanyak 2 perangkat daerah (2021), meningkat menjadi 3 (2022), kemudian 5 (2023) dan 5 (2024), sebelum kembali menjadi 2 pada 2025. Dinamika ini menunjukkan bahwa integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas perangkat daerah telah berkembang, meskipun belum sepenuhnya stabil.

Secara keseluruhan, capaian layanan administrasi kependudukan Kabupaten Tulang Bawang selama 2021-2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan beberapa lonjakan pada tahun-tahun tertentu. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan, dinamika kebutuhan masyarakat, serta perkembangan sistem layanan. Ke depan, konsistensi kualitas pelayanan dan penguatan integrasi data antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mendampingi desa agar mampu melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara optimal. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama antar desa, pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

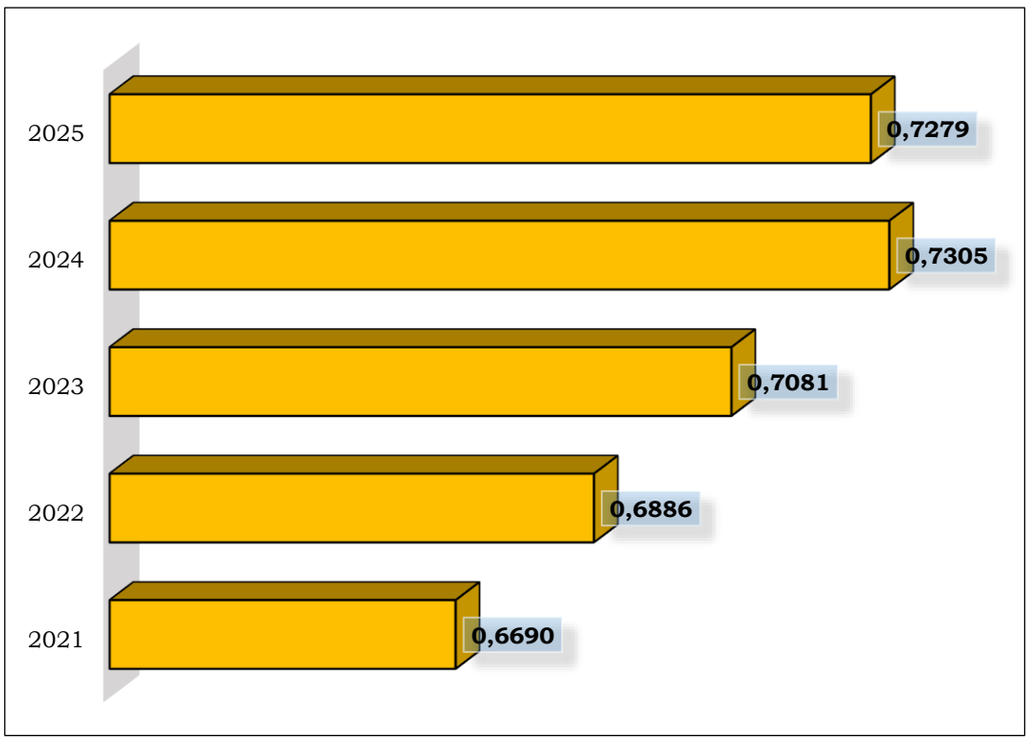
Salah satu indikator utama keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang mengukur dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan (ekologi) desa. Selama periode 2021 hingga 2025, nilai rata-rata IDM Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan progresif. Pada tahun 2021, nilai IDM tercatat sebesar 0,6690, kemudian meningkat menjadi 0,6886 pada tahun 2022, naik kembali menjadi 0,7081 pada tahun 2023, dan mencapai 0,7305 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai rata-rata IDM sebesar 0,7279.

Secara umum, periode 2021-2024 memperlihatkan akselerasi peningkatan kualitas pembangunan desa yang cukup signifikan, ditandai dengan kenaikan nilai IDM setiap tahun. Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit koreksi dibandingkan tahun 2024, nilai IDM tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal periode pengamatan, serta menunjukkan konsistensi capaian pada kategori desa maju secara agregat.

Peningkatan nilai IDM tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan kampung secara menyeluruh, yang didukung oleh intervensi pada infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan sosial, penguatan ekonomi lokal, serta tata kelola dan kapasitas kelembagaan desa. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan arah yang positif dan terukur. Peningkatan nilai IDM menjadi indikator bahwa pembangunan desa semakin inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan konsistensi kinerja desa, mitigasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi fluktuasi nilai indeks, serta optimalisasi inovasi dan digitalisasi tata kelola desa berbasis data guna menjaga tren peningkatan secara berkelanjutan.

Gambar 2. 55 Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Perubahan status desa juga memperkuat gambaran keberhasilan pembangunan desa. Perubahan status desa tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Desa yang naik status umumnya telah mampu menyediakan infrastruktur dasar yang lebih baik, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui usaha kecil, pertanian, maupun kegiatan berbasis komunitas. Selain itu,

penguatan kelembagaan desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan turut menjadi faktor penting yang mendorong transformasi status desa.

Tabel 2. 64 Perkembangan Jumlah Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Kategori IDM	Capaian Kinerja				
	2021	2022	2023	2024	2025
Mandiri	1	4	4	17	33
Maju	24	33	48	65	75
Berkembang	119	107	95	65	39

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan status desa di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten, mencerminkan keberhasilan intervensi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM), terjadi pergeseran struktur status desa yang signifikan dari kategori berkembang menuju kategori maju dan mandiri. Pergeseran ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan di tingkat kampung.

Pada tahun 2021, komposisi desa masih didominasi oleh kategori berkembang sebanyak 119 desa. Desa dengan status maju berjumlah 24 desa, sementara desa mandiri baru 1 desa. Struktur ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih berada pada tahap penguatan dasar ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Memasuki tahun 2022, mulai terlihat perbaikan yang cukup signifikan. Jumlah desa maju meningkat menjadi 33 desa dan desa mandiri bertambah menjadi 4 desa. Sebaliknya, desa berkembang menurun menjadi 107 desa. Tren pergeseran ini berlanjut pada tahun 2023, di mana desa maju kembali meningkat menjadi 48 desa, desa mandiri tetap 4 desa, dan desa berkembang turun menjadi 95 desa.

Perubahan yang lebih progresif terjadi pada tahun 2024. Desa mandiri melonjak signifikan menjadi 17 desa, sedangkan desa maju meningkat

menjadi 65 desa. Pada saat yang sama, jumlah desa berkembang menurun tajam menjadi 65 desa. Komposisi ini menunjukkan akselerasi peningkatan kapasitas dan kemandirian desa dalam berbagai dimensi pembangunan.

Perkembangan tersebut semakin menguat pada tahun 2025. Desa mandiri meningkat hampir dua kali lipat menjadi 33 desa, dan desa maju bertambah menjadi 75 desa. Sementara itu, desa berkembang terus menurun secara drastis menjadi 39 desa. Struktur ini menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kabupaten Tulang Bawang telah berada pada kategori maju dan mandiri, menandakan penguatan daya saing, tata kelola, serta ketahanan sosial-ekonomi desa yang semakin baik.

Secara keseluruhan, periode 2021–2025 memperlihatkan transformasi struktur status desa yang sangat signifikan. Penurunan konsisten jumlah desa berkembang yang diikuti peningkatan tajam desa maju dan mandiri menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan desa yang terarah, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Transformasi ini memperkuat posisi desa sebagai pilar utama pembangunan daerah dalam mewujudkan Tulang Bawang yang maju dan berkelanjutan.

Dalam aspek ekonomi desa, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) semakin menonjol sebagai motor penggerak perekonomian lokal. BUMDesa berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai wadah inovasi dan kolaborasi masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya yang ada. Melalui BUMDesa, desa mampu mengembangkan usaha produktif, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan BUMDesa juga mendorong tumbuhnya kemandirian desa, karena keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan kembali untuk mendukung pembangunan desa, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Peningkatan jumlah desa maju dan mandiri yang diiringi dengan penguatan peran BUMDesa menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi berbasis

komunitas. Dengan demikian, desa-desa semakin mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap pencapaian pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 65 Jumlah BUMDes per Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Banjar Agung	11	11	11	11	11
2	Banjar Margo	12	12	12	12	12
3	Gedung Aji	10	10	10	10	10
4	Penawar Aji	9	9	9	9	9
5	Meraksa Aji	8	8	8	8	8
6	Menggala	5	5	5	5	5
7	Penawartama	14	14	14	14	14
8	Rawajitu Selatan	9	9	9	9	9
9	Gedung Meneng	11	11	11	11	11
10	Rawajitu Timur	8	8	8	8	8
11	Rawa Pitu	9	9	9	9	9
12	Gedung Aji Baru	9	9	9	9	9
13	Dente Teladas	12	12	12	12	12
14	Banjar Baru	10	10	10	10	10
15	Menggala Timur	10	10	10	10	10
	Jumlah	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Di Kabupaten Tulang Bawang, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan konsistensi yang sangat stabil selama periode 2021 hingga 2025. Total BUMDes tercatat sebanyak 147 unit yang tersebar di 15 kecamatan, dan jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir.

Distribusi BUMDes di setiap kecamatan juga relatif tetap. Kecamatan Penawartama memiliki jumlah BUMDes terbanyak, yaitu 14 unit. Selanjutnya, Banjar Margo dan Dente Teladas masing-masing memiliki 12 unit, diikuti Banjar Agung dan Gedung Meneng masing-masing 11 unit. Kecamatan dengan jumlah 10 unit meliputi Gedung Aji, Banjar Baru, dan Menggala Timur. Sementara itu, Penawar Aji,

Rawajitu Selatan, Rawa Pitu, dan Gedung Aji Baru masing-masing memiliki 9 unit, serta Meraksa Aji dan Rawajitu Timur masing-masing 8 unit. Kecamatan Menggala tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah BUMDes paling sedikit, yaitu 5 unit.

Konsistensi jumlah BUMDes selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa secara kelembagaan, struktur ekonomi desa telah terbentuk secara merata di seluruh wilayah. Dengan kata lain, fokus pembangunan tidak lagi pada penambahan kuantitas unit, melainkan pada penguatan kualitas pengelolaan dan kinerja usaha.

Ke depan, tantangan strategis terletak pada peningkatan kapasitas manajerial, profesionalisme pengurus, diversifikasi unit usaha berbasis potensi lokal, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan. BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah terus melakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas pengelola, fasilitasi penyelesaian persoalan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja BUMDes secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, diperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan BUMDes dari aspek tata kelola, keberlanjutan usaha, dan kontribusinya terhadap perekonomian desa. Meskipun laporan keuangan yang digunakan masih bersifat unaudited, data tersebut tetap relevan sebagai dasar analisis kondisi aktual BUMDes selama periode 2021-2025.

Tabel 2. 66 Kondisi BUMDesa Tahun 2021-2025

No	Kondisi	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Sehat	7	7	7	7	7
2	Cukup Sehat	17	17	17	17	140
3	Kurang Sehat	24	24	24	24	0
4	Tidak Sehat	99	99	99	99	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data Tabel, kondisi BUMDesa di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dua fase perkembangan yang berbeda. Pada periode 2021 hingga 2024, komposisi kondisi BUMDesa relatif stagnan. Jumlah BUMDesa kategori Sehat tercatat sebanyak 7 unit setiap tahun, kategori Cukup Sehat sebanyak 17 unit, kategori Kurang Sehat sebanyak 24 unit, dan kategori Tidak Sehat sebanyak 99 unit. Struktur ini menunjukkan bahwa mayoritas BUMDesa pada periode tersebut masih berada dalam kategori Tidak Sehat, dan belum terjadi pergeseran klasifikasi secara kuantitatif.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2025. Jumlah BUMDesa kategori Sehat tetap 7 unit, namun kategori Cukup Sehat meningkat drastis menjadi 140 unit. Pada saat yang sama, kategori Kurang Sehat dan Tidak Sehat masing-masing menjadi 0 unit. Transformasi ini menunjukkan bahwa seluruh BUMDesa yang sebelumnya berada pada kategori Kurang Sehat dan Tidak Sehat telah meningkat minimal ke kategori Cukup Sehat, sehingga secara struktural tidak terdapat lagi BUMDesa dengan status kurang sehat maupun tidak sehat pada tahun 2025.

Perkembangan ini mencerminkan bahwa pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah mulai membuahkan hasil nyata. Pergeseran komposisi menuju dominasi kategori Cukup Sehat dan tetap terjaganya BUMDesa kategori Sehat menjadi indikator perbaikan dalam aspek tata kelola, transparansi keuangan, dan keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, dinamika periode 2021-2025 menegaskan bahwa BUMDesa di Kabupaten Tulang Bawang bergerak menuju kondisi yang lebih stabil dan sehat secara kelembagaan. Meskipun demikian, tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas dari kategori Cukup Sehat menuju Sehat melalui penguatan kapasitas pengurus, profesionalisasi manajemen usaha, serta pengembangan model bisnis yang adaptif dan berbasis potensi lokal, sehingga BUMDesa benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan BUMDesa di Kabupaten Tulang Bawang juga terlihat jelas dari aspek kelembagaan hukum hingga tahun 2025. Legalitas BUMDesa sebagai badan hukum menjadi faktor krusial karena merupakan prasyarat utama dalam menjalin kerja sama, memperluas jejaring usaha, serta memperoleh akses pembiayaan dan kemitraan.

Pada tahun 2021, jumlah BUMDesa yang telah bersertifikasi badan hukum tercatat sebanyak 20 unit atau sekitar 14% dari total 147 BUMDesa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 32 unit (22%) pada tahun 2022 dan 33 unit (22%) pada tahun 2023. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2024 dengan 39 BUMDesa atau 27% yang telah memiliki sertifikasi badan hukum.

Perkembangan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana sebanyak 145 BUMDesa telah bersertifikasi badan hukum atau sekitar 99% dari total 147 BUMDesa yang ada. Capaian ini menunjukkan percepatan luar biasa dalam proses legalisasi kelembagaan BUMDesa, yang mencerminkan efektivitas pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama pemangku kepentingan terkait.

Dengan hampir seluruh BUMDesa telah memiliki legalitas badan hukum pada tahun 2025, maka fondasi kelembagaan BUMDesa di Kabupaten Tulang Bawang semakin kuat, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja usaha, tata kelola yang lebih akuntabel, serta kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian desa.

Tabel 2. 67 Persentase BUMDesa yang telah Bersertifikasi Badan Hukum Tahun 2021-2025

Status BUMDES	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah BUMDesa yang telah Bersertifikasi Badan Hukum	20	32	33	39	145
Jumlah BUMDesa	147	147	147	147	147
Persentase BUMDesa yang telah Bersertifikasi Badan Hukum (%)	**14**	**22**	**22**	**27**	**99**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Selain intervensi pembangunan fisik dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang juga sangat dipengaruhi oleh peran lembaga sosial masyarakat, salah satunya Tim Penggerak PKK. Organisasi ini berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan berbasis komunitas, seperti pendidikan keluarga, kesehatan, ketahanan pangan, dan ekonomi rumah tangga.

Tabel 2. 68 Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	*Indikator*	*satuan*	*Capaian Kinerja*				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik	persen	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	kelompok	100	100	100	100	100
3	Jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	147	147	147	147	147
4	Jumlah PKK aktif	anggota	147	147	147	147	147

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, secara umum seluruh indikator menunjukkan capaian yang stabil dan konsisten selama lima tahun terakhir.

Pada indikator cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan kampung yang baik, capaian tercatat sebesar 100 persen setiap tahun sejak 2021 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara optimal.

Indikator rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga menunjukkan capaian 100 kelompok setiap tahun. Konsistensi ini mencerminkan keberlanjutan pembinaan kelembagaan masyarakat desa yang berjalan stabil, tanpa mengalami penurunan maupun fluktuasi.

Selanjutnya, jumlah kelompok binaan PKK tercatat sebanyak 147 kelompok setiap tahun sepanjang periode 2021-2025. Jumlah ini sejalan dengan jumlah kampung yang ada, sehingga dapat diartikan bahwa setiap kampung memiliki kelompok PKK yang aktif dibina. Kondisi yang sama juga terlihat pada jumlah PKK aktif yang tercatat sebanyak 147 setiap tahun, menunjukkan partisipasi dan keberlangsungan organisasi PKK di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan bahwa kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 berada pada kondisi yang sangat stabil dan merata. Tantangan ke depan bukan lagi pada perluasan cakupan, melainkan pada peningkatan kualitas layanan, efektivitas pembinaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat desa.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali berpotensi menjadi hambatan serius dalam pencapaian tujuan pembangunan, karena sumber daya yang tersedia akan lebih banyak terserap untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Kondisi ini dapat menurunkan efektivitas program pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan dan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk yang terencana dan berkelanjutan, salah satunya melalui penguatan program Keluarga Berencana (KB). Program KB tidak hanya bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi

juga meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengaturan kelahiran, peningkatan kesadaran reproduksi sehat, serta pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi.

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025

No	Indikator	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	*Total Fertility Rate (TFR)*	anak per perempuan	2,26	2,26	2,30	1,98	2,20
2	Rasio Akseptor KB	per 1.000 WUS	80,14	63,69	71,30	86,96	70,36
3	PUS peserta KB Aktif	pasangan	98.433	41.253	48.852	80.960	70.360
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmeet need)*	persen	16,54	14,13	11,29	11,20	11,90
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,28	1,24	1,20	1,16	0,72

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026

Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika pada beberapa indikator utama. *Total Fertility Rate (TFR)* berada pada kisaran 1,98-2,30 anak per perempuan. Nilai TFR tercatat sebesar 2,26 pada tahun 2021 dan 2022, meningkat menjadi 2,30 pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 1,98 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 2,20 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran masih berada pada kisaran yang relatif terkendali.

Rasio akseptor KB per 1.000 wanita usia subur (WUS) menunjukkan fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 80,14, menurun menjadi 63,69 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 71,30 pada tahun 2023 dan mencapai 86,96 pada tahun 2024, sebelum kembali menurun menjadi 70,36 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana masih mengalami dinamika dan perlu

terus diperkuat melalui peningkatan sosialisasi serta kualitas pelayanan KB.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) peserta KB aktif juga mengalami perubahan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 98.433 pasangan, kemudian menurun menjadi 41.253 pasangan pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 48.852 pasangan pada tahun 2023, serta meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 80.960 pasangan dan tercatat sebanyak 70.360 pasangan pada tahun 2025. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam partisipasi pasangan usia subur dalam program keluarga berencana.

Sementara itu, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi kebutuhannya *(unmet need)* menunjukkan tren menurun dari 16,54 persen pada tahun 2021 menjadi 11,20 persen pada tahun 2024, meskipun sedikit meningkat menjadi 11,90 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat.

Pada indikator laju pertumbuhan penduduk, terlihat tren penurunan yang cukup konsisten dari 1,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,24 persen pada tahun 2022, 1,20 persen pada tahun 2023, 1,16 persen pada tahun 2024, dan menurun signifikan menjadi 0,72 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana mulai memberikan dampak terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.

Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama ditunjukkan oleh menurunnya laju pertumbuhan penduduk serta berkurangnya angka unmet need. Namun demikian, fluktuasi pada rasio akseptor KB dan jumlah peserta KB aktif menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana masih perlu terus diperkuat agar pengendalian penduduk dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan ketahanan keluarga di Kabupaten Tulang Bawang juga dilaksanakan melalui penguatan peran kader bina keluarga. Program ini mencakup berbagai kelompok binaan, antara lain Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR), serta Klinik Ketahanan Keluarga. Melalui wadah tersebut, keluarga didorong untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dalam mengelola tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, pendampingan lansia, serta penguatan kesehatan reproduksi dan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Tabel 2. 70 Kelompok Kegiatan KB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Uraian	satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kelompok UPPKA	kelompok	99	99	99	99	119
2	Jumlah Anggota UPPKA	orang	978	978	978	978	1.033
3	Kelompok BKB	kelompok	154	154	154	154	152
4	Kelompok BKR	kelompok	152	152	152	152	149
5	Kelompok BKL	kelompok	156	156	156	156	157
6	PIK KRR	kelompok	28	28	28	28	88

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2026

Jumlah Kelompok UPPKA pada periode 2021–2024 tercatat tetap sebanyak 99 kelompok, kemudian meningkat menjadi 119 kelompok pada tahun 2025. Peningkatan ini juga diikuti oleh bertambahnya jumlah anggota UPPKA dari 978 orang pada tahun 2021-2024 menjadi 1.033 orang pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan kegiatan ekonomi keluarga melalui kelompok usaha yang mendukung kesejahteraan keluarga akseptor.

Sementara itu, jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) relatif stabil pada angka 154 kelompok selama tahun 2021-2024, namun sedikit menurun menjadi 152 kelompok pada tahun 2025. Pola serupa juga terlihat pada kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang bertahan pada angka 152 kelompok pada periode 2021-2024,

kemudian menurun menjadi 149 kelompok pada tahun 2025. Sebaliknya, kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) menunjukkan kondisi yang stabil dengan 156 kelompok pada tahun 2021-2024 dan meningkat tipis menjadi 157 kelompok pada tahun 2025.

Perkembangan yang cukup signifikan terlihat pada kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK KRR). Selama periode 2021-2024 jumlahnya tetap sebanyak 28 kelompok, namun pada tahun 2025 meningkat tajam menjadi 88 kelompok. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya penguatan program pembinaan remaja melalui penyediaan akses informasi dan konseling yang lebih luas dalam rangka mendukung pembentukan generasi berencana (GenRe).

Secara umum, dinamika jumlah kelompok kegiatan KB di Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan kegiatan pembinaan keluarga sekaligus memperluas cakupan program, khususnya pada kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembinaan remaja. Perubahan yang terjadi juga dapat dipengaruhi oleh penyesuaian data dan evaluasi keaktifan kelompok dalam pelaksanaan program di lapangan.

I. Perhubungan

Urusan perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang maupun jasa. Ketersediaan sistem transportasi yang aman, tertib, dan terjangkau menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat pelayanan, kawasan permukiman, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, penyelenggaraan transportasi yang baik juga berperan dalam mengurangi keterisolasian wilayah, memperkuat keterpaduan antarwilayah, serta mendorong pemerataan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan tersebut, pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui berbagai program dan kegiatan, baik yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan keselamatan transportasi, maupun pengawasan terhadap kelayakan sarana transportasi. Kinerja pembangunan urusan perhubungan dapat dilihat melalui beberapa indikator yang menggambarkan tingkat pelayanan transportasi kepada masyarakat, seperti tingkat mobilitas pengguna angkutan umum serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Capaian indikator-indikator tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan pelayanan transportasi sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan sektor perhubungan ke depan.

Adapun perkembangan capaian indikator kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	jiwa	20.025	21.159	22.525	39.192	41.610
2	Jumlah uji KIR angkutan umum	unit	8	11	13	17	19
3	Persentase layanan angkutan darat	persen	3,50	3,70	3,94	6,86	7,28
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	16,66	22,44	20,31	29,31	29,23

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian kinerja urusan perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 secara umum menunjukkan tren peningkatan pada seluruh indikator. Jumlah arus penumpang angkutan umum meningkat signifikan, mencerminkan membaiknya mobilitas masyarakat dan pemanfaatan layanan transportasi.

Jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR juga mengalami peningkatan, yang mengindikasikan meningkatnya kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan kelayakan kendaraan. Selain itu, persentase layanan angkutan darat menunjukkan peningkatan, yang menggambarkan adanya perbaikan cakupan pelayanan transportasi.

Persentase kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan turut mengalami peningkatan meskipun sempat berfluktuasi.
Secara keseluruhan, capaian kinerja urusan perhubungan menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan kegiatan, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pelayanan transportasi guna mendukung peningkatan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan capaian kinerja tersebut, ketersediaan sarana transportasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi.

Tabel 2. 72 Sarana Transportasi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Uraian	satuan	tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	unit	6	4	4	6	8
Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	unit	23	26	41	42	47
Angkutan Perkotaan	unit	19	19	19	10	10
Angkutan Perdesaan	unit	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang, 2026

Jumlah armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) cenderung fluktuatif namun meningkat pada akhir periode, sedangkan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan.

Di sisi lain, jumlah angkutan perkotaan mengalami penurunan pada periode akhir, yang mengindikasikan adanya pergeseran kebutuhan atau pola mobilitas masyarakat. Sementara itu, angkutan perdesaan belum tersedia sepanjang periode tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pada beberapa jenis sarana transportasi, masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan layanan, khususnya pada wilayah perdesaan, sehingga memerlukan perhatian dalam perencanaan pengembangan transportasi ke depan.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan transportasi yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan angkutan publik yang efisien, murah, dan tepat waktu. Inovasi moda transportasi berbasis teknologi, pengembangan angkutan feeder perdesaan, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang angkutan massal harus menjadi prioritas pembangunan transportasi daerah ke depan.

Dengan demikian, penguatan sistem transportasi di Kabupaten Tulang Bawang bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan konektivitas wilayah, mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta mendorong pembangunan inklusif antarwilayah, baik perkotaan maupun perdesaan.

J. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah di era globalisasi dan transformasi digital. Kebutuhan masyarakat terhadap akses komunikasi dan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau semakin meningkat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun partisipasi dalam proses pembangunan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, bidang komunikasi dan informatika memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, memperluas jangkauan layanan publik berbasis elektronik, serta mendorong keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan komunikasi, serta pengembangan sistem informasi pemerintahan menjadi faktor kunci dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Perkembangan kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam merespons tantangan digitalisasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	persen	70,12	73,45	75,08	78,00	80,05
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	65,20	71,03	76,05	82,01	86,00
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	persen	17,03	18,02	20,01	23,04	25,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulang Bawang, 2026

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten pada seluruh indikator, yang mencerminkan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon pada tahun 2021 tercatat sebesar 70,12 persen. Angka ini meningkat menjadi 73,45 persen pada tahun 2022, kemudian menjadi 75,08 persen pada tahun 2023, 78,00 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat

menjadi 80,05 persen pada tahun 2025. Kenaikan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa akses dan penggunaan perangkat komunikasi semakin merata di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, proporsi rumah tangga dengan akses internet juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 capaian indikator ini sebesar 65,20 persen, meningkat menjadi 71,03 persen pada tahun 2022, kemudian menjadi 76,05 persen pada tahun 2023, 82,01 persen pada tahun 2024, dan mencapai 86,00 persen pada tahun 2025. Tren ini menggambarkan semakin luasnya ketersediaan jaringan internet serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.

Sementara itu, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi juga mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 17,03 persen, meningkat menjadi 18,02 persen pada tahun 2022, 20,01 persen pada tahun 2023, 23,04 persen pada tahun 2024, dan mencapai 25,00 persen pada tahun 2025. Meskipun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan akses internet dan penggunaan telepon seluler, tren peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kepemilikan perangkat pendukung teknologi informasi.

Secara keseluruhan, capaian indikator bidang komunikasi dan informatika hingga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Tulang Bawang. Peningkatan akses perangkat komunikasi, internet, dan komputer menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, memperluas akses informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah memastikan pemerataan akses teknologi hingga ke wilayah perdesaan, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan dijalankan oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam penyelenggaraannya, koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang melaksanakan rapat anggota sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun terakhir serta menjalankan kegiatan usaha secara nyata untuk melayani kepentingan anggotanya. Sementara itu, koperasi sehat adalah koperasi yang mampu menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tepat waktu. RAT merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam koperasi yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, sekaligus untuk menetapkan kebijakan dan arah pengembangan koperasi ke depan. Penyelenggaraan RAT minimal satu kali dalam satu tahun juga menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja usaha dan kondisi neraca keuangan koperasi.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Tulang Bawang perlu terus didorong agar tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga meningkat dari sisi kualitas kelembagaan dan tata kelola. Aspek kesehatan koperasi telah diatur dalam ketentuan dan regulasi yang berlaku, sehingga koperasi diharapkan mampu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional. Dengan demikian, keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Sinergi antara koperasi dan UKM menjadi salah satu kunci dalam memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 74 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis Usaha Koperasi	satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi	unit	202	202	204	206	318
2	Koperasi yang melaksanakaan RAT	unit	45	30	22	18	18
3	Koperasi Unit Desa (KUD)	unit	1	1	1	1	1
4	Koperasi Aktif	unit	58	61	77	79	237
5	Koperasi Tidak Aktif	unit	144	141	127	127	81
6	Koperasi Sehat	unit	-	7	-	5	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Secara umum jumlah koperasi di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada periode 2021-2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 202 unit koperasi, jumlah ini tetap sama pada 2022, kemudian naik menjadi 204 unit pada 2023, 206 unit pada 2024, dan melonjak signifikan menjadi 318 unit pada 2025. Pola ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, perkembangan koperasi relatif terjaga, bahkan mengalami peningkatan tajam di tahun terakhir.

Dari sisi tata kelola, jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) justru mengalami penurunan konsisten. Pada 2021 terdapat 45 koperasi yang melaksanakan RAT, turun menjadi 30 unit pada 2022, 22 unit pada 2023, dan hanya 18 unit pada 2024 dan 2025. Kondisi ini mengindikasikan masih terbatasnya kepatuhan koperasi dalam menjalankan kewajiban kelembagaan, yang merupakan indikator utama koperasi sehat.

Untuk Koperasi Unit Desa (KUD), jumlahnya relatif stabil. Sepanjang periode 2021-2025 tercatat 1 unit KUD setiap tahun. Stabilitas ini menunjukkan keberadaan KUD tetap terjaga, meskipun jumlahnya sangat terbatas sehingga peran strategisnya dalam mendukung perekonomian perdesaan masih perlu diperkuat.

Dilihat dari tingkat keaktifan, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan signifikan di akhir periode. Pada 2021 tercatat 58 koperasi aktif, naik menjadi 61 unit pada 2022, 77 unit pada 2023, 79

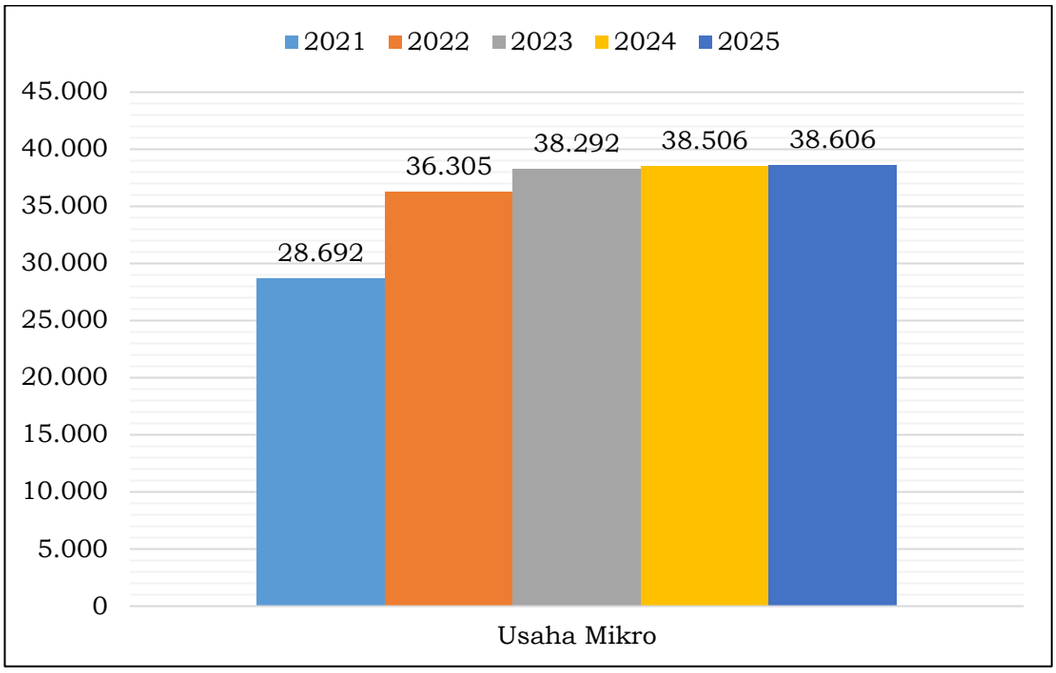
unit pada 2024, dan melonjak drastis menjadi 237 unit pada 2025. Sebaliknya, jumlah koperasi tidak aktif menurun dari 144 unit pada 2021, menjadi 141 unit pada 2022, 127 unit pada 2023 dan 2024, hingga 81 unit pada 2025. Perubahan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam keaktifan koperasi, terutama di tahun terakhir.

Sementara itu, jumlah koperasi sehat masih sangat terbatas dan fluktuatif. Pada 2021 belum tercatat koperasi sehat, kemudian muncul 7 unit pada 2022, kembali tidak ada pada 2023, tercatat 5 unit pada 2024, dan kembali tidak ada pada 2025. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan tata kelola, keberlanjutan koperasi sehat masih belum stabil.

Secara keseluruhan, perkembangan koperasi di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi meningkat tajam pada 2025, tantangan utama tetap terletak pada peningkatan kualitas kelembagaan, kepatuhan terhadap RAT, serta konsistensi dalam menjaga status koperasi sehat. Hal ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan tidak hanya bergantung pada jumlah koperasi sebagai lembaga formal, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan keaktifan usaha yang dijalankan oleh para pelaku koperasi.

Dalam konteks tersebut, keberadaan usaha mikro memiliki peran yang sangat strategis sebagai penggerak utama perekonomian daerah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Usaha mikro juga menjadi basis potensial bagi pengembangan koperasi, baik sebagai anggota maupun sebagai mitra usaha.

Gambar 2. 56 Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, 2026 (diolah)

Perkembangan usaha mikro di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang konsisten meningkat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 28.692 unit usaha mikro, kemudian melonjak menjadi 36.305 unit pada 2022. Pertumbuhan berlanjut dengan 38.292 unit pada 2023, sedikit naik menjadi 38.506 unit pada 2024, dan mencapai 38.606 unit pada 2025. Pola ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta minat berwirausaha yang semakin kuat, terutama pada fase pemulihan pascapandemi Covid-19.

Kenaikan jumlah usaha mikro ini menjadi indikator penting bagi dinamika ekonomi daerah. Pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat Tulang Bawang semakin aktif memanfaatkan peluang usaha kecil sebagai sumber penghidupan dan penguatan ekonomi keluarga. Meski laju pertumbuhan cenderung melambat setelah 2023, konsistensi peningkatan tetap memberikan sinyal positif terhadap daya tahan sektor usaha mikro.

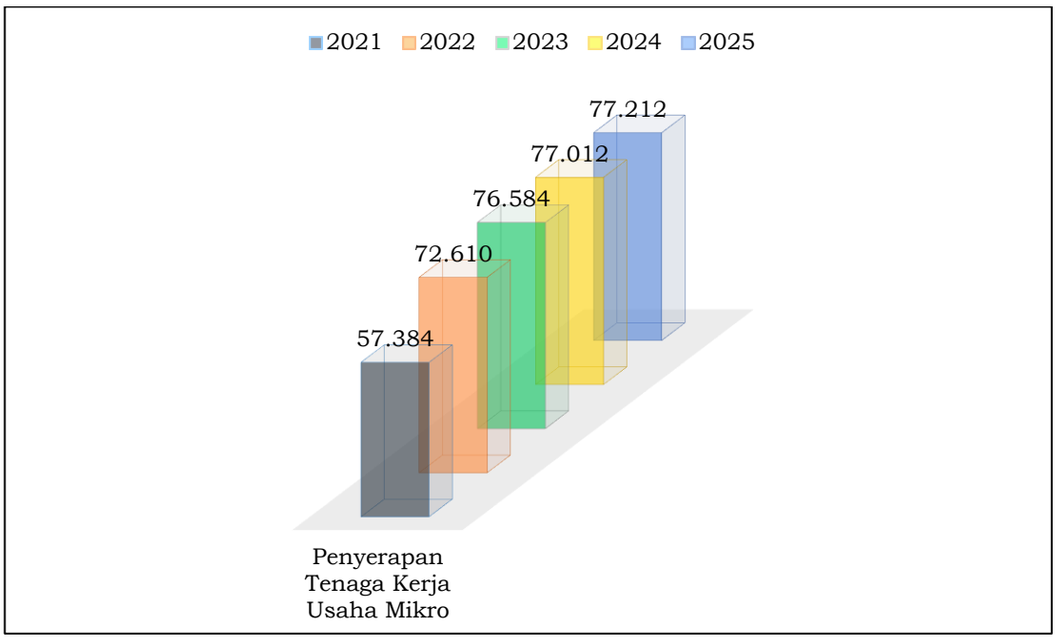
Secara keseluruhan, perkembangan usaha mikro di Kabupaten Tulang Bawang tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Program

pembinaan, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, serta dukungan kelembagaan koperasi dan UKM menjadi faktor pendorong utama. Upaya ini secara bertahap meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.

Pertumbuhan jumlah usaha mikro (UMK) turut berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya pada sektor informal. Seiring dengan bertambahnya jumlah unit usaha dari 28.692 pada 2021 menjadi 38.606 pada 2025, kapasitas UMK dalam menyerap tenaga kerja juga semakin besar. Hal ini mencerminkan bahwa usaha mikro tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.

Untuk memperjelas hubungan antara pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja, data ini dapat disajikan dalam bentuk grafik. Visualisasi akan memperlihatkan tren peningkatan jumlah UMK dari tahun ke tahun, sekaligus menegaskan kontribusinya terhadap dinamika ketenagakerjaan di Kabupaten Tulang Bawang.

Gambar 2. 57 Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro di Kabupaten Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya meningkatkan jumlah unit usaha, tetapi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2021, usaha mikro mampu menyerap 57.384 orang tenaga kerja, kemudian melonjak signifikan menjadi 72.610 orang pada 2022. Tren positif ini berlanjut dengan 76.584 orang pada 2023, sedikit meningkat menjadi 77.012 orang pada 2024, dan mencapai 77.212 orang pada 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja di tingkat lokal. Kenaikan signifikan pada 2022 mencerminkan fase pemulihan ekonomi pascapandemi, di mana masyarakat semakin aktif membuka usaha baru. Setelah itu, laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja cenderung melambat, namun tetap stabil di kisaran 77 ribu orang. Hal ini menandakan konsistensi kontribusi usaha mikro terhadap dinamika ketenagakerjaan daerah.

Secara keseluruhan, usaha mikro menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Tulang Bawang. Selain memperkuat daya tahan ekonomi keluarga, usaha mikro juga berperan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, penguatan kapasitas usaha mikro melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha akan semakin menentukan besarnya kontribusi sektor ini terhadap pembangunan daerah.

L. Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, guna memastikan bahwa kegiatan penanaman modal memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Penanaman modal merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, melalui penciptaan nilai tambah ekonomi, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kapasitas produksi daerah.

Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh tingkat kondusivitas iklim investasi. Iklim investasi yang baik ditentukan oleh kejelasan dan konsistensi kebijakan di bidang penanaman modal, termasuk regulasi dan peraturan pelaksanaannya, yang secara langsung berdampak pada efektivitas sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain aspek kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kualitas sumber daya aparatur pelayanan, serta adanya kesamaan persepsi dan koordinasi antarinstansi dalam memandang keberadaan investor juga menjadi faktor penting dalam membentuk iklim penanaman modal yang kompetitif.

Kondisi iklim penanaman modal yang kondusif tersebut akan meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dengan meningkatnya minat investor, diharapkan terjadi akselerasi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Sejalan dengan hal tersebut, capaian indikator kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan memperkuat iklim usaha. Perkembangan indikator-indikator tersebut selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	unit	-	3.418	6.681	4.373	3.446
	-Investor PMA	unit	-	-	-	3	2
	-Investor PMDN	unit	-	3.418	6.681	4.370	3.444
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	357,06	408,40	283,33	354,67	821,69
	-Investasi PMA	Miliar Rupiah	3,80	26,56	47,13	15,81	58,21

No	Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025
	-Investasi PMDN	Miliar Rupiah	353,26	381,84	236,20	338,86	763,48
3	Tenaga Kerja yang Terserap	Orang	459	587	270	1.078	1.095
4	Rasio daya serap tenaga kerja		1,29	1,44	0,95	3,04	1,33

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang potensial bagi suatu wilayah. Keberadaan penanaman modal berskala nasional, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), diharapkan mampu mengoptimalkan potensi perekonomian daerah serta menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya. Di Kabupaten Tulang Bawang, arah penanaman modal umumnya terkonsentrasi pada sektor tersier, seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi, yang sejalan dengan karakteristik wilayah yang berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi berbasis jasa dan perdagangan.

Berdasarkan Tabel 2.83, capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Jumlah investor berskala nasional pada tahun 2021 belum tercatat, namun pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.418 unit dan meningkat signifikan menjadi 6.681 unit pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah investor menurun menjadi 4.373 unit pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 3.446 unit pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2024 terdapat 3 investor PMA dan 4.370 investor PMDN, sedangkan pada tahun 2025 terdapat 2 investor PMA dan 3.444 investor PMDN. Data ini menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Tulang Bawang masih sangat didominasi oleh PMDN.

Dari sisi nilai investasi, total realisasi penanaman modal juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021,

nilai investasi tercatat sebesar Rp357,06 miliar, yang terdiri dari PMA sebesar Rp3,80 miliar dan PMDN sebesar Rp353,26 miliar. Nilai investasi meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp408,40 miliar, kemudian menurun menjadi Rp283,33 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp354,67 miliar, dan melonjak cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp821,69 miliar. Peningkatan tajam pada tahun 2025 terutama didorong oleh investasi PMDN yang mencapai Rp763,48 miliar, sementara PMA tercatat sebesar Rp58,21 miliar.

Sejalan dengan perkembangan investasi tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap juga menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 tenaga kerja yang terserap sebanyak 459 orang, meningkat menjadi 587 orang pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 270 orang pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 1.078 orang dan kembali meningkat menjadi 1.095 orang pada tahun 2025. Rasio daya serap tenaga kerja tercatat sebesar 1,29 pada tahun 2021, meningkat menjadi 1,44 pada tahun 2022, menurun menjadi 0,95 pada tahun 2023, melonjak menjadi 3,04 pada tahun 2024, dan kembali berada pada angka 1,33 pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanaman modal Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan peningkatan nilai investasi yang sangat kuat pada tahun 2025 serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat iklim investasi yang kondusif, mendorong diversifikasi sektor usaha, serta memastikan bahwa pertumbuhan investasi memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam upaya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagai agen perubahan, pemuda memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi sosial, ekonomi, dan budaya, serta dalam menyinergikan berbagai langkah pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pengembangan kepemudaan menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan generasi yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan.

Keberadaan organisasi kepemudaan memiliki peran krusial sebagai wadah pembinaan, pengembangan potensi, serta penguatan kepemimpinan generasi muda. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga secara berkelanjutan mendorong dinamika kegiatan kepemudaan melalui berbagai program dan kegiatan. Upaya tersebut diwujudkan antara lain melalui pengiriman pemuda dan pemudi dalam kegiatan berskala regional dan nasional, seperti Pemuda Pelopor dan Jambore Pemuda Indonesia, serta pelaksanaan pelatihan, pembinaan, dan lomba kewirausahaan pemuda guna meningkatkan kemandirian dan kreativitas generasi muda. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 42 organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Tulang Bawang, yang menunjukkan semakin berkembangnya partisipasi dan peran generasi muda dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Sejalan dengan pengembangan kepemudaan, bidang keolahragaan juga menjadi bagian integral dalam pembangunan SDM dan peningkatan prestasi daerah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, baik melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga di tingkat kabupaten maupun melalui pengiriman atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat provinsi, regional, dan nasional. Selain itu, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 35 organisasi olahraga yang aktif, yang berperan sebagai wadah pembinaan atlet dan pengembangan cabang olahraga di daerah.

Capaian pembangunan di bidang keolahragaan tercermin dari prestasi kontingen Kabupaten Tulang Bawang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung yang diselenggarakan setiap empat tahun. Terdapat tren peningkatan perolehan medali dari waktu ke waktu. Pada PORPROV Lampung IX tahun 2022, Kabupaten Tulang Bawang berhasil meraih 103 medali, meningkat dibandingkan perolehan 91 medali pada PORPROV tahun 2018 dan 85 medali pada PORPROV tahun 2014. Peningkatan tersebut menunjukkan hasil dari pembinaan atlet yang semakin terarah dan berkelanjutan.

Tabel 2. 76 Perolehan Medali Kontingen Tulang Bawang Dalam Pekan Olahraga Tingkat Provinsi

No	Porprov	Perolehan Medali			
		Emas	Perak	Perunggu	Total
1	PORPROV LAMPUNG VII Tahun 2014	13	25	47	85
2	PORPROV LAMPUNG VIII Tahun 2018	14	36	41	91
3	PORPROV LAMPUNG IX Tahun 2022	15	32	36	103

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tulang Bawang, 2024

N. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah wajib disusun berdasarkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Selain dimanfaatkan oleh pemerintah, data dan informasi statistik juga dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain untuk pengembangan usaha, kegiatan penelitian, serta kebutuhan analisis lainnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, statistik dikelompokkan ke dalam statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Dalam lingkup pemerintahan daerah, penyelenggaraan statistik mencakup statistik dasar dan statistik sektoral. Statistik dasar merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara statistik sektoral. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan, serta menyerahkan hasil survei yang telah dilaksanakan kepada BPS sebagai bagian dari sistem statistik nasional.

Data dan informasi statistik yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) pembangunan di masa mendatang, menentukan prioritas pembangunan daerah, serta menjadi acuan dalam proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Selain itu, data statistik juga berperan penting dalam memperkirakan dan mengantisipasi potensi bencana, risiko, serta hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Tulang Bawang diwujudkan melalui penyusunan berbagai dokumen analisis dan basis data pembangunan daerah, antara lain dokumen analisis makro ekonomi, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengelolaan database daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengelola Portal Satu Data Kabupaten Tulang Bawang sebagai sarana integrasi dan diseminasi data lintas perangkat daerah, serta melaksanakan koordinasi pengelolaan data secara berkelanjutan bersama Badan Pusat Statistik untuk menjamin kualitas, konsistensi, dan keterpaduan data pembangunan daerah.

Tabel 2. 77 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya buku profil daerah (Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka)	ada	ada	ada	-	-
2	Tersedianya buku PDRB	ada	ada	ada	-	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Statistik merupakan basis fundamental dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Seluruh dokumen perencanaan pada prinsipnya bertolak dari kondisi pembangunan yang direpresentasikan melalui data statistik yang tersaji secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan relevan menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Idealnya, penyajian data statistik dilakukan secara progresif dan berkelanjutan agar informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan mampu mencerminkan kondisi terkini. Namun dalam praktiknya, publikasi statistik tahunan memerlukan proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data secara menyeluruh, sehingga penerbitannya umumnya dilakukan pada tahun berikutnya. Kondisi ini menyebabkan data yang digunakan dalam perencanaan tidak selalu mencerminkan periode waktu paling mutakhir, tetapi tetap menjamin kualitas dan akurasi data sesuai standar statistik resmi.

Berdasarkan Tabel 2.92, indikator Tersedianya Buku Profil Daerah (Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka) dan Tersedianya Buku PDRB tercatat tersedia (ada) pada tahun 2021-2023 dalam bentuk buku cetak. Sementara itu, pada tahun 2024 dan 2025 tidak dilakukan pencetakan dalam bentuk *hardcopy*.

Namun demikian, publikasi tersebut tetap tersedia dalam bentuk *soft file* (digital) dan dapat diakses melalui *website* resmi Badan Pusat

Statistik (BPS). Dengan demikian, meskipun tidak dicetak secara fisik, dokumen Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka maupun publikasi PDRB tetap tersusun dan dipublikasikan secara resmi melalui kanal daring BPS, sehingga tetap dapat dimanfaatkan sebagai sumber data dalam penyusunan perencanaan, evaluasi pembangunan, serta kebutuhan informasi publik. Berdasarkan data yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memiliki publikasi statistik utama berupa buku "Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka" yang diterbitkan secara berkelanjutan untuk periode 2021 hingga 2023. Perlu dipahami bahwa penamaan tahun pada publikasi tersebut mengacu pada tahun penerbitan, sedangkan data statistik yang disajikan di dalamnya merupakan data tahun sebelumnya. Dengan demikian, buku "Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka 2023" memuat data statistik hingga tahun 2022 serta beberapa indikator yang bersifat berkelanjutan, sesuai dengan praktik baku penyusunan statistik oleh Badan Pusat Statistik.

Sejalan dengan itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib nonpelayanan dasar di bidang statistik tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui penyediaan dan pemanfaatan statistik sektoral. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah penyusunan dan penyediaan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai bagian dari statistik ekonomi daerah. Buku PDRB Kabupaten Tulang Bawang telah tersedia untuk periode tahun 2021 hingga 2023 dan digunakan sebagai dasar analisis kinerja perekonomian daerah serta perumusan kebijakan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik tersebut telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dengan demikian, penguatan tata kelola statistik daerah menjadi elemen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang berbasis data, akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

O. Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan strategis yang berperan penting dalam menjamin keamanan data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, persandian didefinisikan sebagai kegiatan pengamanan data dan/atau informasi yang dilaksanakan melalui penerapan konsep, teori, seni, dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan menjunjung tinggi etika profesi sandi.

Pelaksanaan persandian di pemerintah daerah bertujuan untuk: (1) menciptakan harmonisasi penyelenggaraan persandian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan informasi; (2) meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan persandian; serta (3) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan dan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Dengan tujuan tersebut, penyelenggaraan persandian menjadi bagian integral dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang aman dan terpercaya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan perangkat daerah, kewenangan pemerintah daerah dalam urusan persandian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut, urusan persandian diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan utama pemerintah daerah dalam urusan ini adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut diwujudkan melalui tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang mencakup lima aspek utama, yaitu kerahasiaan *(confidentiality)*, keaslian *(authenticity)*,

keutuhan *(integrity)*, ketersediaan *(availability)*, dan/atau nirsangkal *(non-repudiation)* informasi. Penerapan JKI menjadi fondasi dalam menjaga keandalan sistem informasi pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan persandian antara lain diukur dari jumlah informasi dan konten informasi yang wajib diamankan dengan sistem persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan layanan dukungan pengamanan informasi, yang keberhasilannya diukur melalui jumlah aset dan/atau fasilitas strategis yang harus dilindungi dari potensi ancaman terhadap keamanan informasi.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan persandian memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, menjamin keamanan data dan informasi, serta mendukung penyelenggaraan sistem informasi yang andal dan aman. Dengan demikian, persandian menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan dinamika transformasi digital.

Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	persen	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
2	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (*e-sign*/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi perangkat daerah	persen	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2026

Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, khususnya dalam aspek pengamanan sistem informasi dan penerapan sandi elektronik di lingkungan perangkat daerah.

Pada indikator persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik, capaian pada tahun 2021 telah berada pada angka 70,00 persen. Nilai tersebut tetap stabil pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian yang sama, yaitu 70,00 persen. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 80,00 persen dan capaian tersebut dapat dipertahankan hingga tahun 2025 sebesar 80,00 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar sistem informasi perangkat daerah telah memperoleh pengamanan melalui sertifikat elektronik, serta adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aspek keamanan informasi, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai cakupan yang lebih menyeluruh.

Sementara itu, pada indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (*e-sign*/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi perangkat daerah, capaian pada tahun 2021 hingga 2023 masih berada pada angka 0,00 persen, yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut belum terdapat implementasi penggunaan sandi elektronik secara formal di lingkungan perangkat daerah. Implementasi mulai dilakukan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 20,00 persen, dan meningkat dua kali lipat pada tahun 2025 menjadi 40,00 persen. Peningkatan ini mencerminkan dimulainya akselerasi transformasi digital dalam tata kelola komunikasi kedinasan, meskipun tingkat adopsinya masih perlu terus didorong agar dapat menjangkau seluruh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, kinerja urusan persandian Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan arah perkembangan yang positif. Aspek pengamanan sistem informasi melalui sertifikat elektronik telah mencapai tingkat yang relatif tinggi dan stabil, sementara penggunaan sandi elektronik dalam komunikasi kedinasan mulai menunjukkan progres nyata sejak tahun 2024. Ke depan,

diperlukan percepatan implementasi tanda tangan elektronik serta optimalisasi pengamanan seluruh sistem informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan berintegritas.

P. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai warisan masa lalu, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, kebudayaan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia secara utuh dan seimbang, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sejalan dengan paradigma pembangunan tersebut, pemajuan kebudayaan merupakan upaya kolektif untuk memperkuat ketahanan budaya daerah sekaligus meningkatkan kontribusi budaya lokal di tengah arus globalisasi dan dinamika perubahan peradaban. Pemajuan kebudayaan dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Pendekatan ini menempatkan kebudayaan tidak hanya sebagai objek pelestarian, tetapi juga sebagai sumber daya pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk mendorong pemajuan kebudayaan daerah secara terencana dan berkelanjutan melalui berbagai program dan kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan ekspresi budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat identitas dan jati diri daerah.

Perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 mencerminkan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan yang terus diupayakan secara bertahap. Gambaran lebih rinci mengenai capaian kinerja bidang kebudayaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 79 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Penyelenggaraan festifal seni dan budaya	event	0	1	1	1	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	lokasi	38	38	38	38	38
3	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	persen	0	12,28	13,71	15,65	15,65

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025 (diolah)

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mulai dilakukan sejak tahun 2022 dan konsisten dilaksanakan satu kali per tahun hingga 2025. Salah satu bentuk nyata kegiatan ini adalah Festival Budaya Megow Pak, yang menjadi wadah pelestarian nilai-nilai budaya lokal sekaligus sarana promosi kekayaan budaya daerah. Pada tahun 2021 festival Megow Pak dan Seni Budaya Tulang Bawang tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19 dan *refocusing* anggaran.

Sementara itu, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan selama lima tahun terakhir tercatat tetap sebanyak 37 lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian kebudayaan masih berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan aset yang telah ada, tanpa adanya penambahan atau penetapan lokasi cagar budaya baru. Tidak bertambahnya jumlah cagar budaya tersebut diduga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, ketersediaan tenaga ahli, serta proses identifikasi dan penetapan cagar budaya yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Tabel 2. 80 Daftar Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Tulang Bawang

No	Nama Situs Cagar Budaya	Jenis (Benda/Situs/ Kawasan)	Lokasi	Status Penetapan
1	Kantor *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) Menggala	situs	Menggala	Terdaftar
2	Gedung Perwatin	situs	Menggala	Terdaftar
3	Tanggo Rajo	situs	Menggala	Terdaftar
4	Kantor Pos dan Giro Menggala	situs	Menggala	Terdaftar
5	Lembaga Permasyarakatan Menggala	situs	Menggala	Terdaftar
6	Dermaga Menggala	situs	Menggala	Terdaftar
7	Gedung Veteran (Eks)	situs	Menggala	Terdaftar
8	Masjid Agung Baiturrahman	situs	Menggala	Terdaftar
9	Gedung Joeang 45	situs	Menggala	Terdaftar
10	Lapangan Miau	situs	Menggala	Terdaftar
11	Makam Menak Ngegulung Sakti	situs	Menggala	Terdaftar
12	Makam Menak Sengaji	situs	Menggala	Terdaftar
13	Makam Menak Rio Kuaso	situs	Menggala	Terdaftar
14	Makam Menak Tualo	situs	Menggala	Terdaftar
15	Rumah Warga Negara	situs	Menggala Timur	Terdaftar
16	Rumah Pangeran Jaya Singa	situs	Menggala Timur	Terdaftar
17	Makam Hi. Abu Bakar	situs	Menggala Timur	Terdaftar
18	Makam Menak Ratu Bebuyutan	situs	Gedung Meneng	Terdaftar
19	Makam Menak Ratu Penemban	situs	Gedung Meneng	Terdaftar
20	Makam Menak Ratu Geping	situs	Gedung Meneng	Terdaftar
21	Makam Pangeran Ratu	situs	Gedung Meneng	Terdaftar
22	Makam Menak Muli	situs	Gedung Meneng	Terdaftar
23	Makam Menak Temenggung	situs	Gedung Meneng	Terdaftar
24	Makam Menak Mulat	situs	Gedung Meneng	Terdaftar
25	Makam Pangeran Tembuh	situs	Dente Teladas	Terdaftar
26	Makam Menak Rajo Wali	situs	Dente Teladas	Terdaftar
27	Makam Kesuma	situs	Penawar Tama	Terdaftar

No	Nama Situs Cagar Budaya	Jenis (Benda/Situs/ Kawasan)	Lokasi	Status Penetapan
28	Makam Ratu Makmanao	situs	Banjar Agung	Terdaftar
29	Makam R. Bagus Sulaiman	situs	Banjar Agung	Terdaftar
30	Makam Menak Banjar Agung	situs	Banjar Agung	Terdaftar
31	Makam Umbul Hamid	situs	Rawajitu Timur	Terdaftar
32	Makam Menak Negara Sakti Aji	situs	Banjar Baru	Terdaftar
33	Makam Nyecang Bumi	situs	Meraksa Aji	Terdaftar
34	Makam Raden Bagus	situs	Penawar Aji	Terdaftar
35	Makam Sepahit Lidah	situs	Gedung Aji	Terdaftar
36	Makam Menak Negara Sakti Aji	situs	Gedung Aji	Terdaftar
37	Makam Menak Nyeranggem	situs	Gedung Aji	Terdaftar

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025

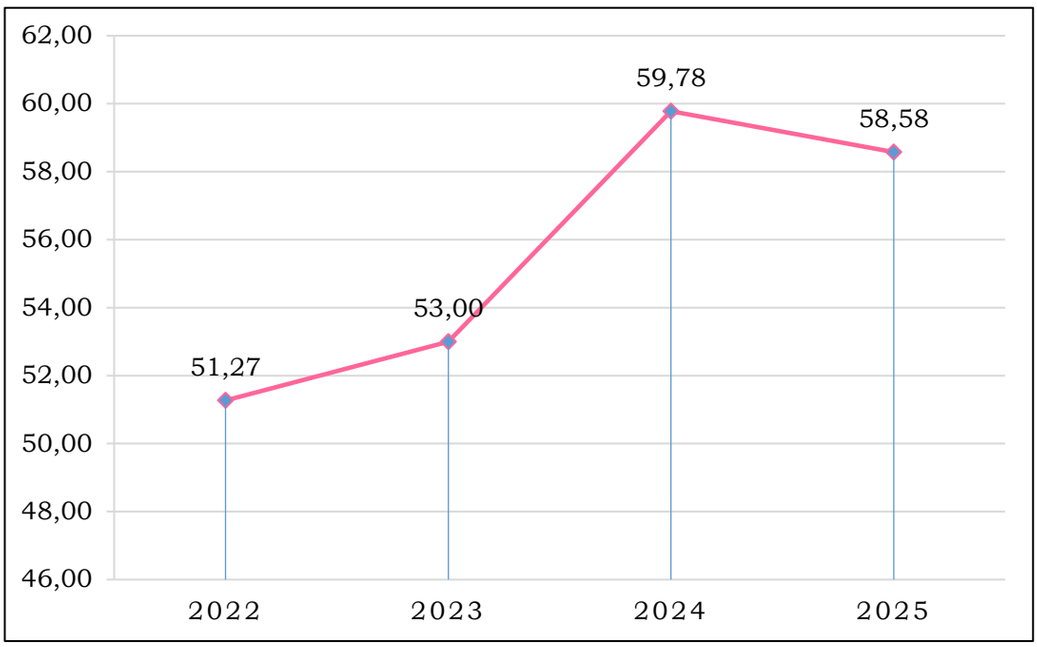
Q. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan informasi guna mewujudkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan inovatif. Selain berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan sumber pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berperan sebagai wahana pelestarian nilai-nilai budaya dan penguatan literasi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan diarahkan pada peningkatan kegemaran membaca masyarakat *(reading habit society)* menuju terbentuknya masyarakat belajar *(learning society)*, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Dalam mendukung peran tersebut, perpustakaan dituntut untuk menyediakan koleksi bahan bacaan yang lengkap, relevan, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan bidang perpustakaan adalah Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), yang mencerminkan kebiasaan dan budaya membaca masyarakat. TGM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan keluarga,

satuan pendidikan, komunitas sosial, serta persepsi masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 2. 58 Tingkat Gemar Membaca Masyarakat kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022-2025



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan hasil Survei Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Indeks Tingkat Gemar Membaca (TGM) masyarakat Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022-2024, meskipun pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan. Nilai indeks TGM tercatat sebesar 51,27 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 53,00 pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 59,78 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, indeks TGM tercatat sebesar 58,58, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan capaian pada awal periode.

Peningkatan indeks tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada aspek-aspek yang membentuk tingkat kegemaran membaca masyarakat, seperti frekuensi membaca, durasi membaca, serta jumlah dan ragam bahan bacaan yang diakses oleh masyarakat. Meskipun terjadi penurunan tipis pada tahun terakhir, capaian

tersebut tetap menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Kabupaten Tulang Bawang secara umum mengalami perkembangan yang positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan semakin membaiknya budaya literasi di masyarakat. Ke depan, upaya penguatan literasi tetap perlu terus dilakukan melalui peningkatan akses bahan bacaan, pengembangan layanan perpustakaan, serta berbagai program literasi yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Untuk mendukung peningkatan budaya literasi tersebut, tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat juga menjadi salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan. Tingginya minat baca masyarakat pada umumnya akan diikuti dengan meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebagai salah satu sumber utama dalam memperoleh bahan bacaan dan informasi.

Oleh karena itu, rasio jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menjadi indikator yang dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas dan layanan perpustakaan yang tersedia. Indikator ini sekaligus mencerminkan efektivitas penyelenggaraan layanan perpustakaan daerah dalam menarik minat masyarakat untuk membaca dan mengakses berbagai sumber informasi.

Tabel 2. 81 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	kunjungan	1.180	1.205	979	1.092	1.103
Jumlah penduduk	jiwa	430.630	431.208	433.570	440.040	442.320
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan	**orang per 1.000 penduduk**	**2,74**	**2,79**	**2,26**	**2,48**	**2,49**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan per 1.000 penduduk di Kabupaten Tulang Bawang selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang berfluktuasi namun cenderung membaik pada periode akhir. Rasio pengunjung perpustakaan tercatat berada pada kisaran 2,26 hingga 2,79 orang per 1.000 penduduk, sementara jumlah kunjungan perpustakaan berada pada kisaran sekitar 979 hingga 1.205 kunjungan, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat hingga mencapai lebih dari 442 ribu jiwa pada akhir periode.

Fluktuasi rasio tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat belum sepenuhnya stabil, karena perubahan jumlah kunjungan tidak selalu sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Meskipun demikian, pada periode terakhir terlihat adanya peningkatan kembali pada jumlah kunjungan dan rasio pengunjung perpustakaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akses dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat mulai menunjukkan perbaikan, namun masih perlu terus didorong melalui peningkatan layanan perpustakaan, penguatan budaya literasi, serta perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat, ketersediaan dan keragaman koleksi bahan bacaan di perpustakaan daerah juga menjadi faktor penting yang dapat mendukung peningkatan minat kunjung dan aktivitas literasi masyarakat. Koleksi buku yang memadai, baik dari segi jumlah judul maupun variasi kelompok buku, akan memberikan lebih banyak pilihan bacaan bagi masyarakat serta menunjang fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran.

Oleh karena itu, perkembangan jumlah buku perpustakaan daerah berdasarkan judul atau kelompok buku perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya penguatan layanan perpustakaan daerah. Adapun gambaran jumlah koleksi buku tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 82 Jumlah Buku Perpustakaan Daerah Berdasarkan Judul/Kelompok Buku Tahun 2021-2025

No	Judul/Kelompok	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Umum	351	351	351	351	355
2	Filsafat	293	293	293	293	307
3	Agama	1.029	1.029	1.029	1.029	1.057
4	Ilmu Politik	2.347	2.347	2.347	2.347	2.387
5	Bahasa	334	334	334	334	342
6	Ilmu Murni	766	766	766	766	784
7	Ilmu Terapan	1.945	1.945	1.945	1.945	2.007
8	Kesenian	598	598	598	598	622
9	Sastra	738	738	738	738	762
10	Sejarah dan Geografi	216	216	216	216	244
	Jumlah	**8.617**	**8.617**	**8.617**	**8.617**	**8.867**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Jumlah koleksi menurut kelompok bidang ilmu pada periode tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stagnan, dengan total keseluruhan tetap sebesar 8.617 setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan belum adanya penambahan atau pembaruan koleksi pada periode tersebut.

Pada tahun 2025, terjadi peningkatan jumlah koleksi pada seluruh kelompok bidang ilmu, dengan total meningkat menjadi 8.867 atau bertambah sebanyak 250 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi secara merata di semua kelompok, dengan dominasi tetap pada kelompok Ilmu Politik dan Ilmu Terapan, serta diikuti kenaikan pada kelompok lainnya seperti Agama, Ilmu Murni, dan Sejarah dan Geografi.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan adanya upaya pengembangan koleksi pada tahun 2025 setelah periode sebelumnya yang cenderung stagnan. Ke depan, pengembangan koleksi perlu dilakukan secara konsisten dan terarah, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta keseimbangan antar bidang ilmu, guna mendukung peningkatan kualitas layanan dan literasi masyarakat.

Sejalan dengan upaya tersebut, ketersediaan sarana pendukung berupa perpustakaan juga menjadi faktor penting dalam menjamin akses masyarakat terhadap koleksi yang tersedia. Oleh karena itu, pada tabel berikut disajikan jumlah perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 sebagai gambaran perkembangan fasilitas layanan perpustakaan di daerah.

Tabel 2. 83 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Judul/Kelompok	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	**Perpustakaan Umum**					
1	Perpustakaan Kampung/Kelurahan	63	63	63	63	63
2	Perpustakaan Umum Kabupaten	1	1	1	1	1
B	**Perpustakaan Khusus**					
1	Milik Pemerintah/Institusi	4	4	4	4	4
2	Swasta/Komunitas	6	6	6	6	6
C	**Perpustakaan Sekolah**					
1	SD	130	130	130	142	157
2	MI	2	3	10	15	21
3	SMP	50	63	73	75	78
4	MTs	3	9	9	12	15
5	Pondok Pesantren	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Berdasarkan data jumlah perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, secara umum terlihat bahwa perkembangan jumlah perpustakaan menunjukkan tren yang relatif stabil pada beberapa kategori, namun mengalami peningkatan pada kategori tertentu, khususnya perpustakaan sekolah.

Pada kelompok Perpustakaan Umum, jumlah Perpustakaan Kampung/Kelurahan tercatat konsisten sebanyak 63 unit setiap tahun selama periode 2021 hingga 2025. Demikian pula, Perpustakaan Umum Kabupaten tetap berjumlah 1 unit tanpa mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa belum terdapat penambahan maupun pengurangan fasilitas perpustakaan umum dalam kurun waktu tersebut.

Untuk Perpustakaan Khusus, baik yang dimiliki oleh pemerintah/institusi maupun swasta/komunitas juga menunjukkan kondisi yang stabil. Jumlah perpustakaan milik pemerintah/institusi tetap sebanyak 4 unit, sedangkan perpustakaan swasta/komunitas berjumlah 6 unit setiap tahun. Kondisi ini mengindikasikan belum adanya ekspansi signifikan pada jenis perpustakaan khusus.

Sementara itu, perkembangan yang lebih dinamis terlihat pada Perpustakaan Sekolah. Jumlah perpustakaan pada jenjang SD meningkat dari 130 unit pada tahun 2021-2023 menjadi 142 unit pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 157 unit pada tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada jenjang MI, dari 2 unit pada tahun 2021 menjadi 21 unit pada tahun 2025. Pada jenjang SMP, jumlah perpustakaan meningkat dari 50 unit pada tahun 2021 menjadi 78 unit pada tahun 2025. Demikian pula pada jenjang MTs, terjadi kenaikan dari 3 unit pada tahun 2021 menjadi 15 unit pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah perpustakaan pada pondok pesantren tetap stabil sebanyak 4 unit sepanjang periode.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa upaya pengembangan perpustakaan di Kabupaten Tulang Bawang dalam lima tahun terakhir lebih difokuskan pada peningkatan akses dan fasilitas perpustakaan di lingkungan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan literasi dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sarana pendidikan.

R. Kearsipan

Kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam menjamin tertib administrasi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian memori kolektif daerah. Pengelolaan kearsipan daerah mencakup kegiatan pengelolaan, pembinaan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen atau arsip yang berada pada perangkat daerah hingga tingkat

kampung. Untuk mewujudkan sistem kearsipan yang andal dan sesuai dengan kaidah kearsipan, diperlukan pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan serta upaya penyelamatan dan pelestarian arsip yang terencana dan sistematis.

Secara umum, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keutuhan bahan pertanggungjawaban nasional dan daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan pemerintahan dan pembangunan. Arsip tersebut menjadi sumber informasi penting bagi kegiatan pemerintahan, pengambilan kebijakan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan arsip secara baku, tertib, dan sesuai dengan pedoman kearsipan sangat penting untuk menjamin keamanan arsip serta memudahkan temu kembali dokumen apabila diperlukan.

Tabel 2. 84 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	unit	8	8	25	50	50
Jumlah perangkat daerah	unit	50	50	50	50	50
Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	**persen**	**16,00**	**16,00**	**50,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Penerapan pengelolaan arsip secara baku merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Di Kabupaten Tulang Bawang, perkembangan penerapan standar pengelolaan arsip oleh perangkat daerah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam periode 2021 hingga 2025.

Pada tahun 2021, jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku tercatat sebanyak 8 unit dari total 50 perangkat daerah, dengan persentase capaian sebesar 16,00 persen. Capaian ini masih relatif rendah, namun menjadi dasar awal dalam upaya pembenahan sistem kearsipan daerah. Kondisi yang sama

masih terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku tetap sebanyak 8 unit atau 16,00 persen.

Perkembangan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023, dengan peningkatan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku menjadi 25 unit atau 50,00 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya percepatan dalam implementasi kebijakan dan pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, capaian meningkat secara drastis hingga mencapai 50 unit atau 100,00 persen, yang berarti seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tulang Bawang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar. Capaian ini dapat dipertahankan pada tahun 2025, dengan jumlah perangkat daerah yang konsisten sebanyak 50 unit atau tetap berada pada tingkat 100,00 persen.

Keberhasilan mencapai dan mempertahankan 100,00 persen penerapan pengelolaan arsip secara baku menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan secara menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini turut didukung oleh pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sejak tahun 2023, yang memperkuat sistem digitalisasi arsip dan meningkatkan efisiensi layanan kearsipan. Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan semakin optimalnya pemanfaatan sistem kearsipan berbasis digital, yang mendukung efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan administrasi pemerintahan.

Pengelolaan kearsipan dilaksanakan oleh arsiparis, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam mengelola arsip statis maupun dinamis, serta menjalankan fungsi pembinaan kearsipan di lingkungan perangkat daerah. Untuk menjaga profesionalisme dan meningkatkan kualitas layanan, arsiparis dituntut untuk terus mengembangkan kemampuan melalui berbagai

kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

Tabel 2. 85 SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah tenaga arsiparis	orang	5	7	6	8	2
Jumlah tenaga teknis pengelola kearsipan	orang	26	26	26	26	44

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021-2024, jumlah tenaga arsiparis menunjukkan fluktuasi, yaitu dari 5 orang pada tahun 2021 meningkat menjadi 7 orang pada 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 6 orang pada 2023 dan kembali meningkat menjadi 8 orang pada 2024. Namun pada tahun 2025 jumlah arsiparis tercatat menurun cukup signifikan menjadi 2 orang. Sementara itu, tenaga teknis pengelola kearsipan relatif stabil pada angka 26 orang sepanjang tahun 2021 hingga 2024, kemudian mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2025 menjadi 44 orang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di Kabupaten Tulang Bawang masih lebih banyak ditopang oleh tenaga teknis dibandingkan arsiparis yang memiliki kompetensi fungsional khusus di bidang kearsipan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan jumlah dan kompetensi arsiparis, baik melalui pengangkatan jabatan fungsional, pengembangan kompetensi, maupun penataan SDM kearsipan agar pengelolaan arsip dapat berjalan lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan standar pengelolaan kearsipan yang berlaku.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Tulang

Bawang. Sektor ini tidak hanya berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan berusaha, serta upaya pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Dengan karakteristik wilayah yang memiliki potensi perairan darat dan aktivitas perikanan yang berkembang, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan pesisir sungai.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, serta penguatan kelembagaan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain penyediaan sarana dan prasarana perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku perikanan, pengembangan teknologi budidaya, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran hasil perikanan.

Realisasi pelaksanaan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan selama periode Tahun 2021-2025 menunjukkan dinamika capaian yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sektor ini di tengah berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi Covid-19 pada awal periode.

Tabel 2. 86 Produksi Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Jumlah (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Produksi Perikanan Tangkap Laut	24.437,48	24.775,93	25.179,86	30.304,79	32.535,00
B	Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	1.123,25	935,63	1.069,76	1.791,13	1.665,53
C	Produksi Perikanan Budidaya					
1	Gurame	44,20	45,50	71,40	80,70	80,90

No	Komoditas	Jumlah (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Nila	1.195,80	1.324,50	1.457,30	1.457,90	1.486,10
3	Lele	503,40	602,80	832,60	884,60	910,00
4	Gabus	83,00	92,70	52,20	55,40	48,40
5	Patin	248,30	270,90	301,80	356,20	360,20
6	Udang Vaname	23.686,50	18.472,72	11.725,50	10.030,00	11.000,00
7	Bandeng	5.442,80	6.070,00	10.200,00	10.450,00	10.400,00
8	Udang Windu	4.143,50	4.279,40	3.195,80	3.180,00	3.050,00
9	Kerang Darah	2.526,10	2.930,00	2.800,00	3.000,00	2.700,00
10	Kerang Hijau	148,30	184,00	347,90	444,50	426,00
11	Toman	239,70	297,20	230,60	251,50	160,50

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, 2026

Produksi Perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025 dapat menggambarkan perkembangan produksi yang bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan dinamika yang beragam antar komoditas. Secara umum, terjadi peningkatan pada beberapa komoditas utama, meskipun sebagian lainnya mengalami fluktuasi.

Pada perikanan tangkap laut, produksi menunjukkan tren meningkat secara konsisten hingga tahun 2025. Produksi tercatat sebesar 24.437,48 ton pada tahun 2021, meningkat menjadi 24.775,93 ton pada tahun 2022 dan 25.179,86 ton pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi kenaikan signifikan hingga mencapai 30.304,79 ton, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 32.535,00 ton. Peningkatan berkelanjutan ini menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan laut di Kabupaten Tulang Bawang.

Sementara itu, perikanan tangkap perairan umum mengalami fluktuasi produksi. Produksi menurun dari 1.123,25 ton pada tahun 2021 menjadi 935,63 ton pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 1.069,76 ton pada tahun 2023 dan melonjak pada tahun 2024 hingga mencapai 1.791,13 ton. Pada tahun 2025 produksi sedikit menurun menjadi 1.665,53 ton, namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021-2023. Kondisi ini menunjukkan

adanya variabilitas produksi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun intensitas penangkapan.

Pada perikanan budidaya, sebagian besar komoditas ikan air tawar menunjukkan kecenderungan peningkatan produksi hingga tahun 2025. Produksi gurame meningkat dari 44,20 ton pada tahun 2021 menjadi 80,70 ton pada tahun 2024 dan sedikit meningkat lagi menjadi 80,90 ton pada tahun 2025. Produksi nila meningkat dari 1.195,80 ton pada tahun 2021 menjadi 1.486,10 ton pada tahun 2025. Lele juga menunjukkan kenaikan dari 503,40 ton pada tahun 2021 menjadi 910,00 ton pada tahun 2025. Patin meningkat dari 248,30 ton pada tahun 2021 menjadi 360,20 ton pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya usaha budidaya ikan air tawar di daerah.

Sebaliknya, beberapa komoditas budidaya mengalami fluktuasi atau penurunan produksi. Udang vaname, meskipun masih menjadi komoditas dengan volume terbesar, mengalami penurunan signifikan dari 23.686,50 ton pada tahun 2021 menjadi 10.030,00 ton pada tahun 2024, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2025 menjadi 11.000,00 ton. Udang windu menunjukkan tren menurun dari 4.143,50 ton pada tahun 2021 menjadi 3.050,00 ton pada tahun 2025. Produksi gabus juga cenderung menurun dari 83,00 ton pada tahun 2021 menjadi 48,40 ton pada tahun 2025. Di sisi lain, bandeng mengalami peningkatan signifikan dari 5.442,80 ton pada tahun 2021 hingga mencapai 10.450,00 ton pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 10.400,00 ton. Produksi kerang darah dan kerang hijau relatif fluktuatif, dengan capaian pada tahun 2025 masing-masing sebesar 2.700,00 ton dan 426,00 ton.

Secara keseluruhan, data produksi perikanan tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi yang besar dengan kontribusi dominan dari perikanan tangkap laut dan komoditas budidaya unggulan. Namun, fluktuasi pada beberapa komoditas tertentu menunjukkan perlunya

penguatan pengelolaan produksi secara berkelanjutan agar stabilitas dan pertumbuhan sektor perikanan dapat terus terjaga.

Kendala utama dalam pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang masih berkaitan dengan rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan dalam mengakses dan menerapkan teknologi budidaya, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas usaha perikanan. Selain itu, kegiatan budidaya ikan umumnya masih berskala kecil, tersebar di berbagai lokasi, bersifat individual, serta belum dikelola dalam suatu sistem manajemen yang terintegrasi dan tersentra.

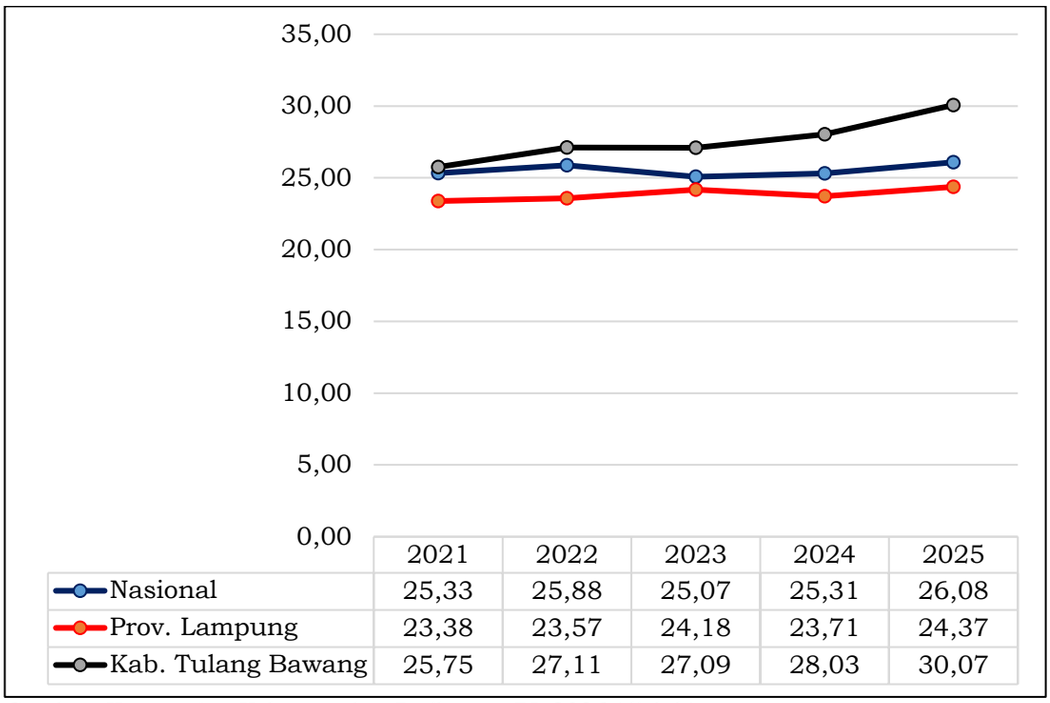
Dari aspek sumber daya alam, ketersediaan air pada musim kemarau menjadi kendala yang cukup signifikan bagi usaha budidaya perikanan. Di sisi lain, pengaturan air irigasi lebih diprioritaskan untuk mendukung pola tanam pertanian, sehingga alokasi air untuk kegiatan budidaya perikanan menjadi terbatas. Kendala lainnya meliputi keterbatasan ketersediaan benih, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas, serta tingginya harga pakan pabrikan yang menyebabkan margin keuntungan pembudidaya ikan relatif kecil.

Permasalahan juga masih dijumpai pada aspek pascapanen dan pengolahan hasil perikanan yang belum berkembang secara optimal. Padahal, pengolahan produk perikanan dapat menjadi alternatif solusi ketika terjadi kendala dalam pemasaran ikan segar. Produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Tulang Bawang masih memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing, sehingga ke depan diharapkan mampu bersaing tidak hanya dengan produk dari daerah lain, tetapi juga dengan produk impor.

Di sisi lain, peningkatan produksi perikanan, khususnya dari sektor budidaya, diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Tingkat konsumsi ikan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan sektor perikanan dalam mendukung ketahanan pangan dan

perbaikan gizi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mencermati perkembangan tren konsumsi ikan dari tahun ke tahun, baik di tingkat Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, maupun secara nasional.

Gambar 2. 59 Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita)
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	25,33	25,88	25,07	25,31	26,08
Prov. Lampung	23,38	23,57	24,18	23,71	24,37
Kab. Tulang Bawang	25,75	27,11	27,09	28,03	30,07

Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, 2026 (diolah)

Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 menunjukkan tren meningkat dengan capaian yang lebih baik dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2021, konsumsi ikan masyarakat tercatat sebesar 25,75 kg/kapita dan terus meningkat hingga mencapai 30,07 kg/kapita pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 27,09 kg/kapita, secara umum tren peningkatan kembali berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung dan nasional, konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten berada pada posisi yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, konsumsi di tingkat nasional tercatat sebesar 26,08 kg/kapita dan

Provinsi Lampung sebesar 24,37 kg/kapita, sementara Kabupaten Tulang Bawang telah mencapai 30,07 kg/kapita. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang relatif lebih baik.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pembangunan daerah dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Upaya tersebut didukung oleh ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan produksi ikan, serta pelaksanaan program edukasi dan kampanye konsumsi ikan seperti Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut melalui penguatan program peningkatan konsumsi ikan masyarakat, peningkatan akses dan distribusi hasil perikanan, serta edukasi gizi yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsumsi ikan masyarakat dapat terus meningkat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi dan ketahanan pangan daerah.

B. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas peluang usaha di berbagai sektor terkait, seperti transportasi, kuliner, akomodasi, dan ekonomi kreatif. Selain memberikan dampak ekonomi, pariwisata juga berperan penting sebagai sarana pelestarian budaya lokal serta media promosi kekayaan alam dan kearifan lokal daerah ke tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekologis yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menekankan

keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya lokal. Upaya tersebut tercermin melalui kebijakan dan program yang mendukung pengembangan dan penataan destinasi wisata, pemberdayaan pelaku usaha pariwisata lokal, serta peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur penunjang pariwisata.

Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat secara langsung melalui perkembangan jumlah kunjungan wisatawan serta lama tinggal wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal wisatawan mencerminkan daya tarik destinasi yang semakin baik, sekaligus berimplikasi positif terhadap perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan menghabiskan waktu di suatu daerah, semakin besar pula perputaran ekonomi yang terjadi, baik melalui konsumsi barang dan jasa, investasi usaha pariwisata, maupun penciptaan nilai tambah pada sektor-sektor pendukung lainnya.

Dengan demikian, pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Ke depan, penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2. 87 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Indikator	satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
A	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.734	7.366	16.706	24.282	33.244
1	Wisatawan Domestik	orang	1.734	7.364	16.701	24.276	33.237
2	Wisatawan Mancanegara	orang	0	2	5	6	7

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2026

Perkembangan kunjungan wisatawan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1.734 orang dan seluruhnya merupakan wisatawan domestik. Jumlah kunjungan ini masih relatif rendah.

Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan meningkat menjadi 7.366 orang. Kunjungan tersebut didominasi oleh wisatawan domestik sebanyak 7.364 orang, sementara wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 2 orang.

Peningkatan kunjungan berlanjut pada tahun 2023 dengan total 16.706 wisatawan, yang terdiri dari 16.701 wisatawan domestik dan 5 wisatawan mancanegara. Tren pertumbuhan ini menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas kunjungan wisata di daerah tersebut.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan kembali mengalami peningkatan menjadi 24.282 orang. Dari jumlah tersebut, 24.276 orang merupakan wisatawan domestik dan 6 orang merupakan wisatawan mancanegara.

Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan tercatat meningkat menjadi 33.244 orang. Dari jumlah tersebut, 33.237 orang merupakan wisatawan domestik dan 7 orang merupakan wisatawan mancanegara.

Secara keseluruhan, data tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan komposisi kunjungan yang didominasi oleh wisatawan domestik.

Perkembangan infrastruktur dan layanan pariwisata turut terlihat pada peningkatan jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 88 Jumlah Daya Tarik Wisata dan Usaha Pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis	Satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A	**Daya Tarik Wisata**						
1	Alam	unit	6	6	6	6	6
2	Buatan	unit	12	16	18	22	22
B	**Usaha Pariwisata**						
1	Hotel Bintang	unit	1	1	1	1	2
2	Hotel Non Bintang	unit	9	11	12	12	12
3	Restoran/Rumah Makan	unit	25	26	47	50	52

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2025 (diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, perkembangan sarana dan prasarana pariwisata selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif, khususnya pada daya tarik wisata buatan dan usaha penunjang pariwisata.

Pada kelompok daya tarik wisata, jumlah daya tarik wisata alam tercatat relatif stabil, yaitu sebanyak 6 unit pada tahun 2021 hingga 2025. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam lebih difokuskan pada aspek peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi yang ada, dibandingkan dengan penambahan lokasi baru. Sementara itu, daya tarik wisata buatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 12 unit pada tahun 2021 menjadi 16 unit pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 18 unit pada tahun 2023, dan mencapai 22 unit pada tahun 2024 & 2025. Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya wisata tematik, taman rekreasi, serta destinasi berbasis inovasi yang relatif lebih mudah dikembangkan dan dikelola, serta memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan domestik.

Dari sisi usaha pariwisata, jumlah hotel berbintang relatif stagnan, yaitu 1 unit selama periode 2021-2025. Sebaliknya, hotel non-bintang menunjukkan peningkatan dari 9 unit pada tahun 2021 menjadi 11 unit pada tahun 2022, dan bertambah menjadi 12 unit pada tahun 2023, yang kemudian bertahan pada angka yang sama pada tahun 2024 & 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur permintaan akomodasi masih didominasi oleh wisatawan dengan

segmen menengah ke bawah yang cenderung memilih penginapan dengan harga terjangkau.

Pertumbuhan paling menonjol terlihat pada restoran dan rumah makan, yang meningkat secara signifikan dari 25 unit pada tahun 2021 menjadi 26 unit pada tahun 2022, kemudian melonjak menjadi 47 unit pada tahun 2023, 50 unit pada tahun 2024 dan mencapai 52 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatnya aktivitas ekonomi pendukung sektor pariwisata, khususnya di bidang kuliner.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah daya tarik wisata dan usaha pariwisata pada periode 2021-2025 didukung oleh berbagai upaya pemerintah daerah, antara lain melalui penguatan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana objek wisata, perbaikan pengelolaan destinasi, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku pariwisata. Ke depan, strategi pengembangan pariwisata tetap diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, penguatan kompetensi pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata, serta pengefektifan pemasaran dan promosi guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

C. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tulang Bawang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu sektor unggulan daerah, pertanian menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Pengembangan sektor ini diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, penguatan kelembagaan petani, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Potensi pertanian Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan yang cukup luas dan kondisi agroklimat yang sesuai untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Upaya pembangunan sektor pertanian dilaksanakan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan, penerapan teknologi pertanian yang tepat guna, pengembangan sarana dan prasarana produksi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petani dan kelompok tani. Selain itu, penguatan nilai tambah produk pertanian terus didorong melalui pengembangan kegiatan pascapanen, pengolahan hasil, dan perluasan akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dan daya saing produk pertanian daerah.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengelolaan sektor pertanian juga diarahkan pada penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaan pertanian sebagai pelaku utama pembangunan di perdesaan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani, memperluas jejaring usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pembangunan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, sehingga pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya hutan dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembangunan sektor pertanian yang terintegrasi dengan sektor perikanan dan kehutanan diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

Sebagai gambaran perkembangan sektor pertanian daerah, berikut disajikan data luas lahan, luas panen, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, serta perkembangan populasi dan produksi subsektor peternakan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025. Penyajian data ini memberikan gambaran mengenai kapasitas produksi, tren perkembangan komoditas unggulan, serta

potensi sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Tabel 2. 89 Luas Lahan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Luas Lahan (Ha)				Luas Tanam (Ha)
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi	118.144	118.144	118.144	118.144	105.350
2	Jagung	71.311	71.311	71.311	71.311	3.724
3	Ubi Kayu	71.311	71.311	71.311	71.311	12.045
4	Kedelai	-	-	-	-	12

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Berdasarkan data tersebut, luas lahan komoditas tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2024 menunjukkan kondisi yang relatif tetap. Komoditas padi menjadi komoditas dengan luas lahan terbesar dibandingkan komoditas lainnya, yaitu sebesar 118.144 hektare, sedangkan jagung dan ubi kayu masing-masing tercatat sebesar 71.311 hektare.

Pada tahun 2025, penyajian data mengalami perubahan dengan menggunakan indikator luas tanam, sehingga angka yang ditampilkan tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan data luas lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan indikator ini perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan komoditas tanaman pangan agar interpretasi terhadap perubahan luasan dapat dilakukan secara tepat.

Komoditas padi pada tahun 2025 tercatat memiliki luas tanam sebesar 105.350 hektare, masih menjadi komoditas tanaman pangan dengan cakupan terluas di Kabupaten Tulang Bawang. Sementara itu, luas tanam jagung tercatat sebesar 3.724 hektare dan ubi kayu sebesar 12.045 hektare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengembangan tanaman pangan daerah masih didominasi oleh komoditas padi, sedangkan komoditas lainnya memiliki luasan yang lebih terbatas.

Untuk komoditas kedelai, selama periode 2021-2024 belum tercatat adanya luas lahan, namun pada tahun 2025 mulai tercatat luas tanam sebesar 12 hektare. Hal ini menunjukkan adanya pengembangan komoditas kedelai meskipun masih dalam skala yang relatif kecil.

Secara umum, perkembangan luas lahan dan luas tanam tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa padi masih menjadi komoditas utama dalam mendukung penyediaan pangan daerah. Adapun perubahan luasan pada beberapa komoditas tahun 2025 perlu dilihat dengan mempertimbangkan perbedaan indikator yang digunakan dalam penyajian data.

Perkembangan luas panen menjadi gambaran lanjutan dalam melihat pemanfaatan lahan tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang. Data luas panen tanaman pangan tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 90 Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	*Komoditas*	*Luas Panen (Ha)*				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Padi	89.962	89.114	87.679	81.206	87.256
2	Jagung	7.097	1.133	1.832	2.539	2.708
3	Ubi Kayu	27.529	28.179	28.600	26.843	14.760
4	Kedelai	-	-	-	-	5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Berdasarkan data luas panen tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, komoditas padi menjadi komoditas dengan luas panen terbesar dibandingkan komoditas tanaman pangan lainnya. Luas panen padi menunjukkan tren yang relatif menurun selama periode 2021 hingga 2024, dari 89.962 hektare pada tahun 2021 menjadi 81.206 hektare pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 luas panen padi kembali meningkat menjadi 87.256 hektare, yang menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan lahan untuk komoditas padi dibandingkan tahun sebelumnya.

Komoditas ubi kayu juga memiliki luas panen yang cukup besar setelah padi. Selama periode 2021-2023, luas panen ubi kayu mengalami peningkatan dari 27.529 hektare menjadi 28.600 hektare, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 26.843 hektare dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 14.760 hektare. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan pada luasan panen ubi kayu dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, komoditas jagung menunjukkan perkembangan yang lebih fluktuatif. Luas panen jagung mengalami penurunan cukup besar dari 7.097 hektare pada tahun 2021 menjadi 1.133 hektare pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 2.708 hektare pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika pengembangan komoditas jagung dalam struktur tanaman pangan daerah.

Untuk komoditas kedelai, selama periode 2021-2024 belum tercatat adanya luas panen, namun pada tahun 2025 mulai tercatat sebesar 5 hektare. Hal ini menunjukkan adanya pengembangan kedelai meskipun masih dalam skala yang terbatas.

Secara umum, luas panen tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh komoditas padi, yang menunjukkan perannya sebagai komoditas utama dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Perkembangan luas panen tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat capaian produksi tanaman pangan, yang selanjutnya akan digambarkan melalui perkembangan produksi komoditas tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025 pada tabel berikut.

Tabel 2. 91 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi	397.047	364.470	365.621	404.296	445.424
2	Jagung	28.388	6.107	11.615	16.097	17.169
3	Ubi Kayu	580.504	658.825	686.400	678.591	373.133
4	Kedelai	-	-	-	-	7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Berdasarkan data produksi komoditas tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, komoditas padi dan ubi kayu menjadi komoditas dengan kontribusi produksi terbesar dibandingkan komoditas tanaman pangan lainnya. Produksi padi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 364.470 ton dari 397.047 ton pada tahun 2021. Setelah itu, produksi padi kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 445.424 ton pada tahun 2025, yang menjadi capaian produksi tertinggi selama periode tersebut.

Produksi ubi kayu juga menunjukkan peran yang besar dalam produksi tanaman pangan daerah. Pada periode 2021-2023, produksi ubi kayu mengalami peningkatan dari 580.504 ton menjadi 686.400 ton. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan produksi, masing-masing menjadi 678.591 ton dan 373.133 ton. Meskipun mengalami penurunan pada akhir periode, ubi kayu masih menjadi salah satu komoditas dengan tingkat produksi tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang.

Sementara itu, produksi jagung mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Produksi jagung mengalami penurunan dari 28.388 ton pada tahun 2021 menjadi 6.107 ton pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali hingga mencapai 17.169 ton pada tahun 2025. Perkembangan tersebut sejalan dengan perubahan luas panen jagung yang mengalami dinamika selama periode yang sama.
Untuk komoditas kedelai, produksi belum tercatat selama periode 2021-2024, namun pada tahun 2025 mulai tercatat sebesar 7 ton. Hal ini menunjukkan adanya pengembangan komoditas kedelai, meskipun kontribusinya terhadap produksi tanaman pangan daerah masih relatif kecil.

Secara umum, struktur produksi tanaman pangan Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh komoditas padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan peran komoditas tersebut dalam mendukung ketahanan pangan daerah, sementara perkembangan komoditas lainnya masih mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, selain

tanaman pangan, potensi sektor pertanian Kabupaten Tulang Bawang juga didukung oleh komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi dan beragam manfaat bagi masyarakat, sebagaimana disajikan pada tabel produksi hortikultura unggulan berikut.

Tabel 2. 92 Produksi Hortikultura Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Cabai	669,4	376,6	176,6	27,0	671,0
2	Petsai/Sawi	137,0	220,0	39,5	892,0	168,0
3	Kacang Panjang	331,9	386,7	57,2	906,0	321,0
4	Terung	307,4	376,4	59,2	60,4	421,0
5	Jahe	8,1	375,0	11,5	13,9	11,6
6	Laos/Lengkuas	1,4	209,0	4,6	6,6	5,3
7	Kencur	12,7	174,0	4,6	10,7	8,8
8	Kunyit	2,4	245,0	5,1	9,3	11,1
9	Buah Naga	6,1	48,0	112,2	389,4	177,0
10	Nanas	30,3	37,3	1.516,0	561,7	709,0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, 2026

Berdasarkan data produksi hortikultura unggulan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, perkembangan produksi antar komoditas menunjukkan pola yang beragam. Sebagian komoditas mengalami perubahan produksi dari tahun ke tahun, baik berupa peningkatan maupun penurunan, yang menunjukkan adanya dinamika dalam pengembangan komoditas hortikultura daerah.

Komoditas cabai menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Produksi cabai mengalami penurunan dari 669,4 ton pada tahun 2021 menjadi 27,0 ton pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 produksi kembali meningkat menjadi 671,0 ton, sehingga menjadi capaian produksi tertinggi selama periode 2021-2025.

Produksi petsai/sawi dan kacang panjang juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Produksi petsai/sawi meningkat dari 137,0 ton pada tahun 2021 menjadi 892,0 ton pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 168,0 ton pada tahun 2025. Pola serupa terjadi

pada kacang panjang yang meningkat hingga mencapai 906,0 ton pada tahun 2024, kemudian turun menjadi 321,0 ton pada tahun 2025. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan produksi yang cukup besar antar tahun pada kedua komoditas tersebut.

Komoditas terung mengalami pola perkembangan yang relatif serupa. Setelah mencapai 376,4 ton pada tahun 2022, produksinya menurun pada tahun 2023 dan 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 421,0 ton pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi produksi tertinggi terung selama periode tersebut.

Pada kelompok tanaman rimpang, yaitu jahe, laos/lengkuas, kencur, dan kunyit, produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022. Produksi jahe mencapai 375,0 ton, laos/lengkuas 209,0 ton, kencur 174,0 ton, dan kunyit 245,0 ton. Setelah mengalami peningkatan pada tahun tersebut, produksi komoditas rimpang cenderung menurun pada tahun-tahun berikutnya dan berada pada tingkat yang lebih rendah hingga tahun 2025.

Sementara itu, komoditas buah menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol, khususnya buah naga dan nanas. Produksi buah naga meningkat dari 6,1 ton pada tahun 2021 menjadi 389,4 ton pada tahun 2024, sebelum menurun menjadi 177,0 ton pada tahun 2025. Adapun nanas mengalami peningkatan produksi yang signifikan pada tahun 2023 sebesar 1.516,0 ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 561,7 ton dan kembali meningkat menjadi 709,0 ton pada tahun 2025. Produksi tersebut menjadikan nanas sebagai salah satu komoditas hortikultura dengan kontribusi produksi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang.

Secara keseluruhan, produksi hortikultura unggulan Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021–2025 menunjukkan potensi yang cukup besar, meskipun masih terdapat variasi produksi antar tahun pada beberapa komoditas. Komoditas cabai, terung, dan nanas menunjukkan perkembangan produksi yang cukup baik pada tahun 2025, sementara komoditas lainnya masih mengalami dinamika

produksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengembangan hortikultura melalui peningkatan produktivitas, pengelolaan budidaya yang berkelanjutan, serta penguatan rantai pemasaran agar potensi komoditas hortikultura dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Selain tanaman pangan dan hortikultura, sektor pertanian Kabupaten Tulang Bawang juga didukung oleh subsektor peternakan yang memiliki peran dalam penyediaan pangan asal hewan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan subsektor peternakan dapat dilihat melalui kondisi populasi ternak dan produksi hasil peternakan selama periode 2021-2025 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 93 Populasi Ternak Besar di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis Ternak	satuan	Populasi (ekor)				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Sapi Potong	ekor	27.219	29.194	32.113	32.459	35.705
2	Kerbau	ekor	4.684	5.106	5.617	2.256	2.755

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data populasi ternak besar di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, sapi potong menjadi komoditas ternak besar dengan jumlah populasi terbesar dan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat selama periode tersebut. Populasi sapi potong meningkat dari 27.219 ekor pada tahun 2021 menjadi 35.705 ekor pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan usaha ternak sapi potong di Kabupaten Tulang Bawang.

Sementara itu, populasi kerbau menunjukkan perkembangan yang berbeda. Pada periode 2021-2023, populasi kerbau mengalami peningkatan dari 4.684 ekor menjadi 5.617 ekor. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 2.256 ekor dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 2.755 ekor. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa populasi kerbau masih mengalami dinamika dari tahun ke tahun.

Secara umum, populasi ternak besar di Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh sapi potong dengan tren pertumbuhan yang lebih stabil dibandingkan kerbau. Kondisi ini menunjukkan bahwa sapi potong menjadi salah satu komoditas peternakan yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan dalam mendukung penyediaan pangan asal hewan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan subsektor peternakan juga dapat dilihat melalui populasi ternak kecil yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 94 Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis Ternak	satuan	Populasi (ekor)				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Kambing	ekor	115.537	125.935	137.269	122.549	134.804
2	Babi	ekor	2.843	2.143	2.730	3.802	4.258

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data populasi ternak kecil di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, komoditas kambing menjadi jenis ternak dengan populasi terbesar dibandingkan ternak kecil lainnya. Populasi kambing menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu meningkat dari 115.537 ekor pada tahun 2021 menjadi 137.269 ekor pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 122.549 ekor, populasi kambing kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 134.804 ekor. Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kambing masih menjadi komoditas ternak kecil yang dominan dan memiliki peran penting dalam usaha peternakan masyarakat.

Sementara itu, populasi babi menunjukkan pola perkembangan yang berbeda. Pada tahun 2021, populasi babi tercatat sebanyak 2.843 ekor, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2.143 ekor. Setelah itu, populasi babi kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 4.258 ekor pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan populasi babi dalam beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, populasi ternak kecil di Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh kambing dengan jumlah populasi yang jauh lebih besar dibandingkan babi. Perkembangan populasi kedua jenis ternak tersebut menunjukkan potensi subsektor peternakan kecil untuk terus dikembangkan dalam mendukung penyediaan pangan asal hewan serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, perkembangan populasi ternak unggas di Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 95 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Ternak	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Ayam Buras	ekor	435.141	456.898	478.655	294.247	323.672
2	Ayam Petelur	ekor	35.100	27.100	66.000	20.700	35.100
3	Ayam Pedaging	ekor	218.969	213.469	213.800	443.600	460.300
4	Itik	ekor	22.908	23.595	20.728	63.475	13.210
5	Entok	ekor	0	43.283	37.210	25.157	27.673

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data populasi ternak unggas Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, perkembangan populasi unggas menunjukkan kondisi yang cukup dinamis antar jenis ternak. Ayam buras menjadi salah satu jenis unggas dengan populasi terbesar selama periode pengamatan. Populasi ayam buras meningkat dari 435.141 ekor pada tahun 2021 menjadi 478.655 ekor pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 294.247 ekor dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 323.672 ekor.

Ayam pedaging menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol dibandingkan jenis unggas lainnya. Pada periode 2021-2023, populasi ayam pedaging relatif stabil pada kisaran 200 ribuan ekor. Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 443.600 ekor dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 460.300 ekor. Perkembangan tersebut

menunjukkan peningkatan populasi ayam pedaging yang cukup besar dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, populasi ayam petelur mengalami pola yang berfluktuasi. Populasi ayam petelur tercatat sebanyak 35.100 ekor pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 27.100 ekor pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 66.000 ekor, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 20.700 ekor dan meningkat kembali menjadi 35.100 ekor pada tahun 2025.

Populasi itik juga mengalami perubahan yang cukup besar selama periode 2021-2025. Setelah berada pada kisaran 20 ribuan ekor pada tahun 2021-2023, populasi itik meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 63.475 ekor, namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 13.210 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan populasi yang cukup tinggi pada komoditas itik dari tahun ke tahun.

Adapun populasi entok mulai tercatat pada tahun 2022 sebanyak 43.283 ekor. Setelah mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 25.157 ekor, populasi entok kembali meningkat menjadi 27.673 ekor pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, populasi ternak unggas di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang beragam antar komoditas. Ayam buras masih menjadi salah satu unggas dengan populasi besar, sementara ayam pedaging menunjukkan peningkatan paling signifikan pada akhir periode. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa subsektor unggas memiliki potensi dalam mendukung penyediaan pangan asal hewan serta pengembangan usaha peternakan masyarakat. Selanjutnya, gambaran subsektor peternakan juga dapat dilihat melalui perkembangan produksi hasil peternakan utama Kabupaten Tulang Bawang yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 96 Produksi Komoditas Hasil Peternakan Utama di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Komoditas	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Daging	ton	2.582,74	1.367,51	1.239,56	1.863,51	623,09
2	Telur	ton	22,69	42,65	9,74	11,95	56,39

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan data produksi hasil peternakan utama Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, produksi komoditas daging dan telur menunjukkan perkembangan yang cukup berfluktuasi selama periode tersebut.

Produksi daging tercatat sebesar 2.582,74 ton pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 1.367,51 ton. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan produksi sebesar 1.239,56 ton. Pada tahun 2024, produksi daging kembali meningkat menjadi 1.863,51 ton, namun mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 623,09 ton. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa produksi daging masih mengalami perubahan yang cukup besar dari tahun ke tahun, dengan capaian tahun 2025 berada di bawah produksi awal periode.

Sementara itu, produksi telur menunjukkan pola perkembangan yang berbeda. Produksi telur pada tahun 2021 tercatat sebesar 22,69 ton dan meningkat menjadi 42,65 ton pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 produksi mengalami penurunan menjadi 9,74 ton, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 56,39 ton pada tahun 2025. Capaian tersebut menjadi produksi telur tertinggi selama periode 2021-2025.

Secara keseluruhan, produksi hasil peternakan utama di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan perkembangan yang dinamis antar komoditas. Produksi daging masih menjadi komponen utama hasil peternakan, namun mengalami fluktuasi yang cukup besar, sedangkan produksi telur menunjukkan peningkatan pada akhir periode. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subsektor peternakan memiliki potensi untuk terus dikembangkan dalam mendukung penyediaan pangan asal hewan serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Perkembangan produksi hasil peternakan tersebut menjadi bagian dari gambaran kinerja sektor pertanian secara keseluruhan. Dengan dukungan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, sektor pertanian Kabupaten Tulang Bawang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang pada prinsipnya telah terlayani jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, masih terdapat sebagian kelompok rumah tangga yang belum terjangkau layanan listrik, terutama yang berada di wilayah terpencil serta kawasan permukiman baru. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang belum terlayani oleh jaringan PLN, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengupayakan pemanfaatan sumber energi alternatif, antara lain melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga surya serta pemanfaatan energi biogas.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pilihan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah pengelolaan energi panas bumi. Namun demikian, Kabupaten Tulang Bawang tidak memiliki potensi sumber daya panas bumi, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat diimplementasikan di wilayah ini.

E. Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Perdagangan berfungsi sebagai penghubung utama dalam kelancaran arus barang dan jasa melalui sistem distribusi dan penyediaan informasi pasar, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong terbentuknya harga yang wajar dan stabil. Dengan demikian, sektor perdagangan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pasar sebagai sarana utama kegiatan perdagangan memegang peranan penting dalam menunjang proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat atau pasar tradisional, tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang

melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus mendorong penguatan sektor perdagangan melalui upaya revitalisasi pasar rakyat, peningkatan kualitas pengelolaan pasar secara profesional, serta pembinaan yang berkelanjutan kepada para pedagang guna meningkatkan daya saing, khususnya dalam menghadapi perkembangan pasar modern.

Peran pasar rakyat atau pasar tradisional sangat signifikan dalam menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, meningkatkan kesempatan kerja, serta menyediakan sarana usaha bagi pelaku UMKM. Selain itu, pasar rakyat juga berfungsi sebagai referensi pembentukan harga kebutuhan pokok yang menjadi dasar dalam perhitungan tingkat inflasi dan indikator stabilitas harga, berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjadi salah satu sarana pelestarian budaya dan interaksi sosial masyarakat setempat.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari dinamika jumlah dan jenis sarana perdagangan yang tersedia. Perkembangan jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 97 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Jenis Sarana Perdagangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pasar Kampung	57	57	57	57	53
2	Pasar Lokal/Kabupaten	2	2	2	2	2
3	Usaha Perdagangan Milik Pemda	64	64	64	64	64
4	Toko Modern					
a	Minimarket cabang/waralaba nasional	3	3	3	3	4
b	Toko modern lokal	60	61	61	61	61
c	Pusat perbelanjaan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan hanya sedikit perubahan. Pasar kampung tetap berjumlah 57 unit hingga tahun 2024, sebelum menurun menjadi 53 unit pada tahun 2025. Pasar lokal/kabupaten konsisten berjumlah 2 unit, sementara usaha perdagangan milik pemerintah daerah juga tetap stabil di angka 64 unit sepanjang periode tersebut.

Pada sektor toko modern, minimarket cabang/waralaba nasional bertahan di angka 3 unit hingga 2024, lalu meningkat menjadi 4 unit pada 2025. Toko modern lokal mengalami sedikit pertumbuhan dari 60 unit pada 2021 menjadi 61 unit sejak 2022 hingga 2025, sedangkan pusat perbelanjaan tetap berjumlah 2 unit setiap tahun. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan belum adanya ekspansi besar dalam pembangunan sarana perdagangan, meskipun terdapat sedikit dinamika pada toko modern lokal dan cabang nasional.

Di tengah pesatnya perkembangan pasar modern dan meningkatnya transaksi berbasis daring, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk memperkuat daya saing pasar rakyat. Berbagai langkah strategis terus dilakukan, antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur pasar, pemberdayaan pedagang melalui pelatihan dan pendampingan, serta penguatan promosi pasar rakyat. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan pasar rakyat yang sehat, aman, nyaman, dan berdaya saing, sehingga tetap menjadi pilihan utama masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perekonomian lokal.

Tabel 2. 98 Data Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang

No	Nama Pasar	Kecamatan	Jumlah			Operasional Pasar	Tipe Pasar
			Toko/ Kios	Los	Pedagang		
1	Rajawali/ Karyabakti	Meraksa Aji	128	136	264	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas II
2	Bina Bumi	Meraksa Aji	33	39	72	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III

No	Nama Pasar	Kecamatan	Jumlah			Operasional Pasar	Tipe Pasar
			Toko/ Kios	Los	Pedagang		
3	Gdg.Rejo Sakti	Penawar Aji	65	40	105	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
4	Panca Tunggal Jaya	Penawar Aji	83	15	98	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
5	Sumber Sari	Penawar Aji	100	23	123	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
6	Wono Rejo	Penawar Aji	70	16	86	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
7	Suka Makmur	Penawar Aji	43	8	51	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
8	Gedung Asri	Penawar Aji	35	10	45	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
9	Penawar Baru	Gedung Aji	98	17	115	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
10	Aji Jaya KNPI	Gedung Aji	85	24	109	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
11	Kecubung Jaya	Gedung Aji	20	6	26	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
12	Karya Murni Jaya	Banjar Baru	10	15	25	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
13	Bawang Tirto Mulyo	Banjar Baru	25	7	63	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
14	Balai Murni	Banjar Baru	5	15	20	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
15	Jaya Makmur	Banjar Baru	10	8	2	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
16	Ringin Sari	Banjar Margo	20	12	32	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
17	Tri Tunggal Jaya	Banjar Margo	41	7	40	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
18	Tri Darma Wira Jaya	Banjar Agung	20	20	40	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
19	Unit II	Banjar Agung	172	692	801	HARIAN	Kelas I
20	Gdg Bandar Rejo	Gedung Meneng	10	70	80	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III

No	Nama Pasar	Kecamatan	Jumlah			Operasional Pasar	Tipe Pasar
			Toko/ Kios	Los	Pedagang		
21	Sido Mulyo	Penawar Tama	h8'yb	10	30	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
22	Sido Harjo	Penawar Tama	25	17	110	HARIAN	Kelas III
23	Boga Tama	Penawar Tama	150	665	150	HARIAN	Kelas III
24	Wira Tama	Penawar Tama	30	5	35	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
25	Pasar Pasiran Jaya	Dente Teladas	100	80	205	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas II
26	Pasar Katung	Dente Teladas	80	48	128	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
27	Pasar Way Dente	Dente Teladas	30	10	40	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
28	Pasar Sari Makmur	Dente Teladas	20	15	35	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
29	Pasar Muara Asri	Dente Teladas	20	150	170	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
30	Pasar Sido Mukti	Dente Teladas	58	40	98	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
31	Pasar Sido Rame	Dente Teladas	35	20	55	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
32	Pasar Mandiri	Dente Teladas	3	15	18	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
33	Pasar Infra	Dente Teladas	2	9	11	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
34	Pasar Nakula	Dente Teladas	30	20	50	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
35	Pasar Putri Agung	Menggala	268	86	86	HARIAN	Kelas III
36	Pasar Kagungan Rahayu	Menggala	110	7	117	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
37	Pasar Rawa Ragil	Rawa Pitu	65	17	82	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
38	Pasar Gedung Jaya	Rawa Pitu	50	25	75	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
39	Pasar Duta Yoso M	Rawa Pitu	35	30	65	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III

No	Nama Pasar	Kecamatan	Jumlah			Operasional Pasar	Tipe Pasar
			Toko/ Kios	Los	Pedagang		
40	Pasar Andalas Cermin	Rawa Pitu	35	15	50	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
41	Pasar Sumber Agung	Rawa Pitu	40	20	60	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
42	Pasar Batang Hari/ KTM	Rawa Pitu	40	44	84	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
43	Pasar Gedung karya Jitu	Rawa Jitu Selatan	400	194	594	HARIAN	Kelas 1
44	Pasar Medasari	Rawa Jitu Selatan	45	55	100	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
45	Pasar Wono Agung	Rawa Jitu Selatan	50	20	70	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
46	Bumi Depasena Utama	Rawa Jitu Timur	30	10	40	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
47	Bumi Depasena Agung	Rawa Jitu Timur	8	40	48	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
48	Bumi Depasena Jaya	Rawa Jitu Timur	24	35	59	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
49	Bumi Depasena Makmur	Rawa Jitu Timur	10	12	22	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
50	Bumi Depasena Sejahtera	Rawa Jitu Timur	15	20	35	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
51	Bumi Depasena Abadi	Rawa Jitu Timur	20	28	48	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
52	Bumi Depasena Mulya	Rawa Jitu Timur	25	10	35	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
53	Makarti Tama	Gd. Aji Baru	50	80	130	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
54	Sido Mukti	Gd. Aji Baru	70	28	78	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III
55	Suka Bakti	Gd. Aji Baru	70	25	95	2 x dalam Seminggu (Mingguan)	Kelas III

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Dari total 5.305 pedagang yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang, sebagian pedagang tercatat memiliki lebih dari satu kios atau los, baik dalam satu pasar maupun di pasar yang

berbeda, serta melakukan aktivitas berdagang secara berpindah mengikuti jadwal hari pasar. Kondisi tersebut mencerminkan dinamika aktivitas perdagangan rakyat di daerah.

Seiring dengan hal tersebut, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas objek retribusi, meningkatkan kenyamanan dan kelayakan pasar, serta mendorong optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor perdagangan.

Tabel 2. 99 Perkembangan Kondisi Fisik Pasar Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Tahun	Kondisi			Jumlah
		Baik	sedang	Kurang	
1	2021	54	5		59
2	2022	55	4		59
3	2023	55	4		59
4	2024	55	4		59
5	2025	51	4		55

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Perkembangan kondisi fisik pasar rakyat di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan sedikit perubahan pada tahun terakhir. Jumlah pasar rakyat tercatat sebanyak 59 unit setiap tahun dari 2021 hingga 2024, kemudian menurun menjadi 55 unit pada tahun 2025.

Pada tahun 2021, sebanyak 54 unit pasar berada dalam kondisi baik dan 5 unit dalam kondisi sedang, tanpa adanya pasar yang berkondisi kurang. Pada tahun 2022, jumlah pasar berkondisi baik meningkat menjadi 55 unit, sementara pasar berkondisi sedang menurun menjadi 4 unit. Komposisi ini tetap sama pada tahun 2023 dan 2024, yakni 55 unit dalam kondisi baik dan 4 unit dalam kondisi sedang, serta tidak terdapat pasar dalam kategori kurang.

Pada tahun 2025, terjadi penurunan jumlah pasar menjadi 55 unit. Dari jumlah tersebut, 51 unit berada dalam kondisi baik dan 4 unit dalam kondisi sedang, dan tetap tidak terdapat pasar dengan kondisi kurang.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa mayoritas pasar rakyat di Kabupaten Tulang Bawang berada dalam kondisi baik sepanjang periode tersebut. Tidak adanya pasar dalam kategori kurang mencerminkan bahwa kualitas fisik pasar relatif terjaga, meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah unit pasar secara keseluruhan.

F. Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah karena berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses industrialisasi. Keberadaan industri juga menjadi penggerak bagi sektor-sektor lain, seperti perdagangan, jasa, dan transportasi, sehingga memberikan efek berganda *(multiplier effect)* bagi perekonomian daerah.

Di Kabupaten Tulang Bawang, pengembangan sektor industri lebih difokuskan pada penguatan industri mikro dan kecil yang berkembang di tengah masyarakat. Industri tersebut umumnya tersebar dalam bentuk sentra-sentra industri di berbagai kecamatan dan berbasis pada pemanfaatan potensi lokal, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun sumber daya lainnya. Pendekatan ini dipilih untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

Arah pengembangan sektor perindustrian tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya Pasal 14 ayat (3) huruf d, yang menegaskan bahwa pengembangan wilayah industri dilakukan antara lain melalui pemberdayaan dan penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Oleh karena itu, kebijakan perindustrian di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan pada peningkatan kapasitas dan daya saing IKM melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi permodalan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar.

Secara keseluruhan, penguatan sektor industri, khususnya industri mikro dan kecil, diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 100 Jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Besar-Menengah (IBM) per Kecamatan Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021		2022		2023		2024		2025	
		IK	**IBM**	**IK**	**IBM**	**IK**	**IBM**	**IK**	**IBM**	**IK**	**IBM**
1	Banjar Agung	108	1	287	1	274	1	301	2	303	-
2	Banjar Baru	64	-	112	-	127	-	120	-	164	1
3	Banjar Margo	61	1	77	1	104	1	136	1	155	1
4	Dente Teladas	63	-	77	1	82	1	97	1	110	-
5	Menggala	342	1	540	2	606	2	701	2	709	-
6	Menggala Timur	34	1	51	2	51	2	68	2	105	-
7	Penawar Aji	56	-	106	-	110	-	135	-	198	-
8	Rawa Jitu Selatan	12	-	20	-	20	1	27	1	40	-
9	Gedung Aji	67	-	89	-	84	-	104	-	170	-
10	Gedung Aji Baru	23	-	44	1	45	1	55	1	117	-
11	Gedung Meneng	29	-	35	-	75	-	92	-	117	-
12	Meraksa Aji	42	-	48	-	57	-	65	-	77	-
13	Penawartama	25	-	55	-	109	-	135	-	183	-
14	Rawa Jitu Timur	7	-	14	-	41	-	49	-	35	-
15	Rawa Pitu	10	-	18	-	25	-	33	-	38	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Jumlah Industri Kecil (IK) dan Industri Besar-Menengah (IBM) di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan di hampir seluruh kecamatan. Pertumbuhan ini secara umum didominasi oleh industri kecil, sementara keberadaan industri besar–menengah relatif terbatas dan hanya muncul di beberapa kecamatan tertentu.

Pada tahun 2021, jumlah IK tertinggi tercatat di Kecamatan Menggala sebanyak 342 unit, disusul Banjar Agung 108 unit dan Banjar Baru 64 unit. IBM pada tahun tersebut hanya terdapat di beberapa

kecamatan seperti Banjar Agung, Banjar Margo, Menggala, dan Menggala Timur dengan jumlah yang sangat terbatas.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan jumlah IK di hampir seluruh kecamatan. Menggala tetap menjadi pusat aktivitas industri kecil dengan 540 unit, diikuti Banjar Agung 287 unit dan Banjar Baru 112 unit. Pada periode ini, IBM mulai bertambah di beberapa kecamatan, terutama Menggala dan Menggala Timur.

Tren pertumbuhan berlanjut pada tahun 2023. Menggala mencatat 606 unit IK, sementara Banjar Agung dan Banjar Margo masing-masing mencapai 274 unit dan 104 unit. IBM relatif stabil, tetap terkonsentrasi di kecamatan tertentu seperti Menggala, Menggala Timur, Banjar Agung, serta muncul di Rawa Jitu Selatan dan Gedung Aji Baru.

Pada tahun 2024, jumlah IK kembali meningkat di hampir seluruh kecamatan. Menggala mencatat 701 unit, Banjar Agung 301 unit, Banjar Margo 136 unit, serta Dente Teladas dan Penawar Aji masing-masing 97 dan 135 unit. IBM pada tahun ini menunjukkan kestabilan dengan sedikit peningkatan di Banjar Agung dan Menggala, sementara sebagian besar kecamatan lainnya belum memiliki industri besar–menengah.

Memasuki tahun 2025, jumlah IK terus bertambah di banyak kecamatan, dengan Menggala mencapai 709 unit, Banjar Agung 303 unit, dan Banjar Baru 164 unit. Namun, jumlah IBM justru menurun, bahkan tidak tercatat di beberapa kecamatan yang sebelumnya memiliki unit IBM.

Secara keseluruhan, perkembangan sektor industri di Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021-2025 didominasi oleh pertumbuhan industri kecil yang tersebar luas di seluruh kecamatan. Kecamatan Menggala berperan sebagai pusat kegiatan industri, sedangkan industri besar-menengah masih terbatas dan cenderung fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan potensi besar sektor industri kecil sebagai penggerak utama perekonomian daerah, yang perlu terus

didukung melalui pembinaan, akses permodalan, dan pengembangan pasar.

G. Transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di sekitarnya, mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk membentuk masyarakat transmigran yang mandiri, produktif, serta mampu berintegrasi secara sosial dan ekonomi dengan lingkungan barunya, sehingga tercipta kawasan permukiman yang berkembang secara berkelanjutan.

Selain itu, transmigrasi juga dipandang sebagai salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya bagi penduduk di daerah asal yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan kerja tetap maupun kepemilikan aset produktif. Dalam pelaksanaannya, transmigrasi terdiri atas tiga jenis, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantu, dan transmigrasi swakarsa mandiri. Transmigrasi swakarsa merupakan bentuk transmigrasi yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat sendiri dengan pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, selama periode 2021-2025, Kabupaten Tulang Bawang tidak mencatat adanya pengiriman penduduk untuk mengikuti program transmigrasi, baik dalam skema transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa, baik yang berbantu maupun mandiri, ke wilayah tujuan transmigrasi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut kebijakan transmigrasi belum menjadi alternatif utama dalam penataan dan pemerataan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam menciptakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap mampu beradaptasi dan bersaing secara sehat dengan daerah lain, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, daya saing menjadi salah satu tujuan utama pembangunan, karena mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mengoptimalkan potensi, kekhasan, serta keunggulan lokal yang dimilikinya.

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kualitas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Daya saing yang kuat akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika dan tantangan global. Oleh karena itu, daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang berhubungan erat dengan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Aspek daya saing daerah mencakup beberapa komponen utama, yaitu kemampuan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, serta peningkatan produktivitas ekonomi, iklim investasi, kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan dan kualitas fasilitas wilayah atau infrastruktur. Kemampuan ekonomi daerah tercermin dari struktur dan kinerja perekonomian yang tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan Iptek dan inovasi pada berbagai sektor unggulan.

Iklim investasi memiliki peran strategis dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, yang pada akhirnya mendorong ekspansi usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia menjadi

faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas, daya saing tenaga kerja, dan kemampuan berinovasi, sehingga mampu mendukung transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, ketersediaan dan kualitas infrastruktur berfungsi sebagai prasyarat utama dalam menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperluas akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan memperkuat keempat komponen tersebut secara terintegrasi dan saling mendukung, daya saing daerah diharapkan dapat terus meningkat dan menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.1 Fokus Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Keberlanjutan produktivitas di berbagai sektor ekonomi serta penguatan struktur ekonomi dalam jangka panjang merupakan faktor penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas produksi suatu daerah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat global maupun domestik. Dengan struktur ekonomi yang kuat, suatu wilayah akan lebih siap merespons dinamika dan perubahan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Selain itu, keberlanjutan produktivitas dan penguatan struktur ekonomi memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing daerah. Daya saing mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk berkembang secara efektif melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan investasi, serta pengembangan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Kemampuan suatu daerah dalam bersaing tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam atau tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang

mendukung, stabilitas dan kualitas infrastruktur, tingkat inovasi, serta kualitas sumber daya manusia.

Daya saing yang tinggi akan memperkuat kemampuan daerah dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semakin kompetitif suatu daerah, semakin besar peluangnya untuk mengembangkan sektor industri dan jasa, memperluas aktivitas ekonomi, serta meningkatkan taraf hidup penduduknya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan sektor-sektor unggulan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penciptaan ekosistem usaha dan investasi yang kondusif.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing ekonomi daerah. Indikator-indikator ini mencerminkan aspek-aspek strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Pengukuran daya saing menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daerah, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi daerah dalam persaingan di tingkat nasional maupun global.

A. Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian pembangunan manusia diukur melalui tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Salah satu dimensi utama yang mencerminkan kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Metode Baru). Indikator ini menggambarkan rata-rata kemampuan ekonomi penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu tahun dan dinyatakan dalam satuan ribu rupiah per orang per tahun.

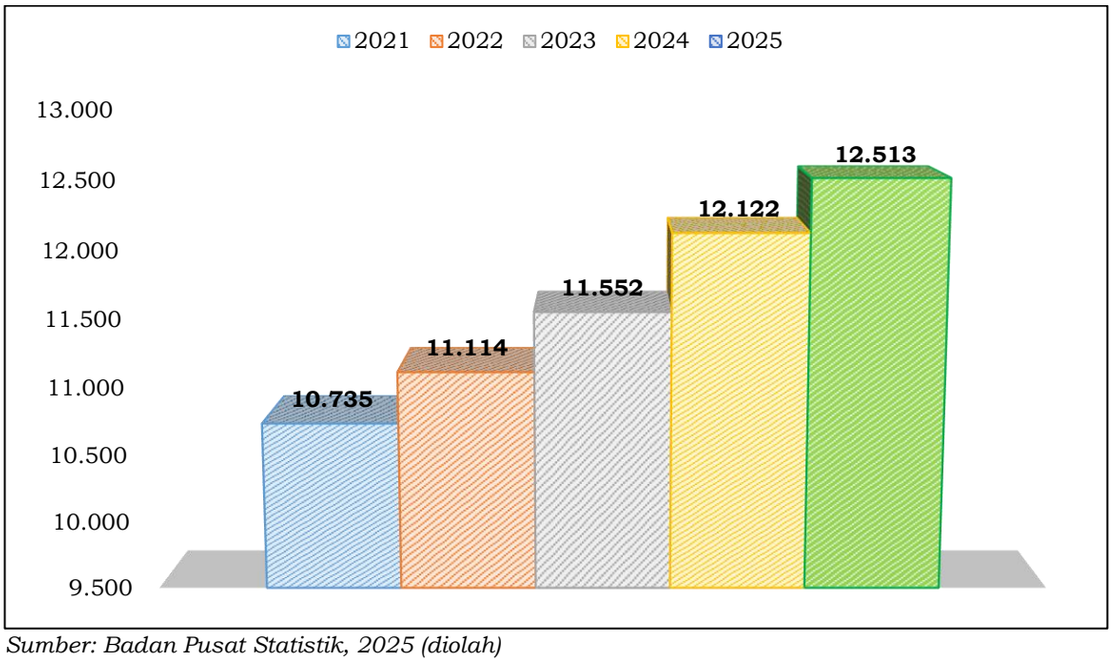
Pengeluaran per kapita disesuaikan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita rumah tangga yang telah dikoreksi menggunakan paritas daya beli *(Purchasing Power Parity/PPP).*

Penyesuaian dengan PPP dilakukan untuk memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarwilayah dan antarwaktu, sehingga indikator ini mampu mencerminkan daya beli masyarakat yang sesungguhnya serta memungkinkan perbandingan yang lebih adil antar daerah maupun antar periode.

Penerapan metode baru ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk dibandingkan dengan pengeluaran nominal semata. Semakin tinggi nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan, semakin baik kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan non-dasar, yang pada akhirnya mencerminkan peningkatan kualitas hidup. Sebaliknya, nilai yang relatif rendah mengindikasikan keterbatasan daya beli dan tantangan dalam pemenuhan standar hidup layak.

Dengan demikian, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan menjadi indikator yang sangat penting dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Gambar 2. 60 Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran masyarakat tercatat sebesar 10.735 ribu rupiah per orang per tahun, atau setara dengan Rp10,7 juta. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 12.513 ribu rupiah (Rp12,5 juta) pada tahun 2025.

Kenaikan ini mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat serta peningkatan akses terhadap barang dan jasa konsumsi. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, di mana pengeluaran meningkat dari Rp11,6 juta menjadi Rp12,1 juta per orang per tahun, menandakan dinamika ekonomi lokal yang semakin aktif.

Secara keseluruhan, tren ini menjadi indikator positif dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan keberhasilan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengeluaran per kapita yang terus tumbuh, Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan arah yang menjanjikan menuju peningkatan kualitas hidup penduduknya.

B. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB industri pengolahan menggambarkan besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan posisi dan peran strategis sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah, sekaligus mencerminkan tingkat industrialisasi dan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah dari aktivitas produksi.

Semakin tinggi rasio PDRB industri pengolahan, semakin besar peran sektor ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut menandakan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor primer, tetapi telah berkembang ke arah pengolahan dan peningkatan nilai tambah, yang umumnya memiliki dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

Sebaliknya, rasio PDRB industri pengolahan yang relatif rendah menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor-sektor dengan nilai tambah yang terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan menjadi penting untuk mendorong transformasi struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan industri pengolahan.

Tabel 2. 101 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	6.071,81	6.555,15	6.893,10	7.641,04	8.457,67
PDRB ADHB Kab. Tulang Bawang	miliar rupiah	24.166,24	25.986,24	28.219,02	30.499,54	33.239,21
Rasio PDRB Industri Pengolahan	**persen**	**25,13**	**25,23**	**24,43**	**25,05**	**25,44**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar Rp6.071,81 miliar, dengan total PDRB ADHB sebesar Rp24.166,24 miliar, sehingga rasio kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 25,13 persen. Pada tahun 2022, nilai PDRB sektor industri pengolahan meningkat menjadi Rp6.555,15 miliar, sementara PDRB ADHB daerah juga naik menjadi Rp25.986,24 miliar, dengan rasio kontribusi sebesar 25,23 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2023, PDRB sektor industri pengolahan kembali meningkat menjadi Rp6.893,10 miliar. Namun demikian, karena pertumbuhan PDRB daerah yang lebih tinggi hingga mencapai Rp28.219,02 miliar, rasio kontribusi sektor industri pengolahan

mengalami penurunan menjadi 24,43 persen. Pada tahun 2024, kinerja sektor industri pengolahan kembali menguat dengan nilai PDRB sebesar Rp7.641,04 miliar dan PDRB ADHB daerah sebesar Rp30.499,54 miliar, sehingga rasio kontribusinya meningkat menjadi 25,05 persen.

Pada tahun 2025, PDRB sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan menjadi Rp8.457,67 miliar, seiring dengan naiknya PDRB ADHB Kabupaten Tulang Bawang menjadi Rp33.239,21 miliar. Kondisi ini mendorong rasio kontribusi sektor industri pengolahan kembali meningkat menjadi 25,44 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode 2021-2025.

Secara keseluruhan, sektor industri pengolahan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan kontribusi yang relatif stabil di kisaran 24-25 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini menegaskan bahwa sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah yang berperan penting dalam menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi Kabupaten Tulang Bawang.

C. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menggambarkan besarnya kontribusi sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan posisi sektor akomodasi dan makan minum sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui aktivitas pariwisata, jasa perhotelan, serta usaha kuliner yang berkembang di masyarakat.

Semakin tinggi rasio PDRB sektor akomodasi dan makan minum, semakin besar peran sektor ini dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Sektor ini juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan

sektor lain, seperti perdagangan, transportasi, pertanian, dan industri pengolahan, sehingga pertumbuhannya dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.

Sebaliknya, rasio kontribusi yang relatif rendah menunjukkan bahwa potensi sektor akomodasi dan makan minum belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan sektor ini perlu didorong melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan destinasi wisata, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. 102 Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PDRB sektor akomodasi dan makan minum	miliar rupiah	322,30	359,12	395,66	421,86	466,57
PDRB ADHB Kab. Tulang Bawang	miliar rupiah	24.166,24	25.986,24	28.219,02	30.499,54	33.239,21
Rasio PDRB akomodasi dan makan minum	**persen**	**1,33**	**1,38**	**1,40**	**1,38**	**1,40**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021-2025, sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari sisi nilai PDRB. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor ini tercatat sebesar Rp322,30 miliar dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi Rp359,12 miliar pada tahun 2022, Rp395,66 miliar pada tahun 2023, Rp421,86 miliar pada tahun 2024, hingga mencapai Rp466,57 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi di bidang perhotelan, restoran, dan jasa konsumsi lainnya yang turut mendukung perekonomian daerah.

Sejalan dengan itu, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Tulang Bawang juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp24.166,24 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp33.239,21 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi daerah secara umum selama periode tersebut.

Meskipun secara nominal sektor akomodasi dan makan minum terus tumbuh, kontribusinya terhadap total PDRB relatif stabil. Rasio PDRB sektor ini berada pada kisaran 1,33 persen hingga 1,40 persen. Pada tahun 2021, kontribusinya sebesar 1,33 persen, kemudian meningkat menjadi 1,38 persen pada tahun 2022 dan mencapai 1,40 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio sempat menurun tipis menjadi 1,38 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 1,40 persen pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan yang positif, peranannya dalam struktur perekonomian daerah masih relatif kecil dan cenderung stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor ini berjalan seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Ke depan, pengembangan sektor akomodasi dan makan minum tetap perlu didorong, mengingat potensinya dalam mendukung sektor pariwisata, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja di Kabupaten Tulang Bawang.

D. Rasio Kewirausahaan

Sektor kewirausahaan menjadi salah satu fokus penting Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Perhatian terhadap pengembangan wirausaha didasarkan pada peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru. Keberadaan wirausaha yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan dapat

berkontribusi signifikan dalam menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Tulang Bawang.

Rasio kewirausahaan merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha mandiri. Rasio ini dihitung sebagai perbandingan antara populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Populasi wirausaha mencakup wirausaha pemula dan wirausaha mapan, yang masing-masing mencerminkan tahapan perkembangan usaha yang berbeda.

Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar proporsi angkatan kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha produktif. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat, penguatan struktur ekonomi lokal, serta terbukanya peluang inovasi dan penciptaan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan perlu terus didorong melalui penguatan akses permodalan, peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha, pendampingan usaha, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif agar kewirausahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. 103 Jumlah Wirausaha, Angkatan Kerja dan Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Wirausaha Pemula	jiwa	1.335	3.522	6.607	4.376	2.627
Jumlah Wirausaha Mapan	jiwa	14	14	100	231	3.522
Angkatan Kerja	jiwa	232.474	230.773	225.601	235.345	234.820
Rasio Kewirausahaan	**persen**	0,580	1,532	2,973	1,958	2,619

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021-2025, perkembangan kewirausahaan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, baik dari sisi jumlah wirausaha maupun rasio kewirausahaan.

Jumlah wirausaha pemula mengalami peningkatan yang signifikan pada awal periode, dari 1.335 jiwa pada tahun 2021 menjadi 3.522 jiwa pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 6.607 jiwa pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 jumlahnya mengalami penurunan masing-masing menjadi 4.376 jiwa dan 2.627 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun minat berwirausaha sempat meningkat pesat, keberlanjutan usaha pemula masih menghadapi tantangan.

Di sisi lain, jumlah wirausaha mapan menunjukkan tren meningkat yang cukup tajam, terutama pada periode akhir. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlahnya masih sangat terbatas, yaitu masing-masing 14 jiwa, kemudian meningkat menjadi 100 jiwa pada tahun 2023, 231 jiwa pada tahun 2024, dan melonjak signifikan menjadi 3.522 jiwa pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan keberhasilan sebagian pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih mapan.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja cenderung berfluktuasi. Dari 232.474 jiwa pada tahun 2021, jumlahnya menurun menjadi 230.773 jiwa pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 225.601 jiwa pada tahun 2023. Pada tahun 2024, angkatan kerja meningkat menjadi 235.345 jiwa, sebelum sedikit menurun kembali menjadi 234.820 jiwa pada tahun 2025.

Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap rasio kewirausahaan. Rasio ini meningkat dari 0,580 persen pada tahun 2021 menjadi 1,532 persen pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 2,973 persen. Namun, pada tahun 2024 rasio tersebut menurun menjadi 1,958 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 2,619 persen pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kewirausahaan di Kabupaten Tulang Bawang, terutama ditandai dengan peningkatan jumlah wirausaha mapan dan rasio kewirausahaan. Namun demikian, fluktuasi jumlah wirausaha pemula mengindikasikan perlunya penguatan ekosistem

kewirausahaan, termasuk melalui pendampingan usaha, akses permodalan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

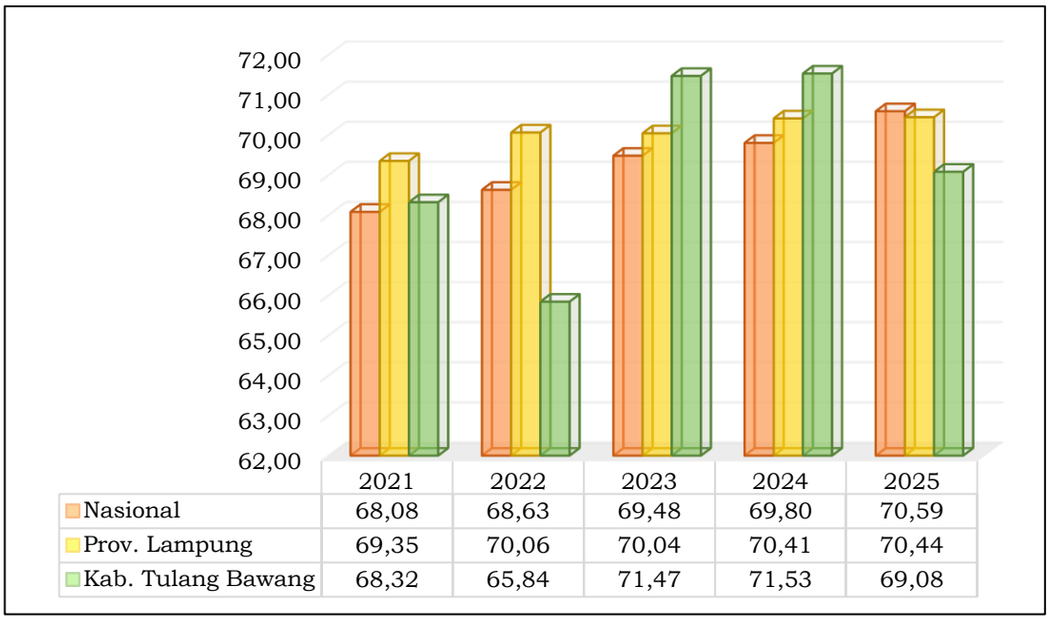
E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai penduduk yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana penduduk usia produktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

TPAK mencerminkan besaran relatif penawaran tenaga kerja (labour supply) yang tersedia dan berpotensi terlibat dalam proses produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar pula potensi sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan pembangunan daerah.

Selain itu, tingkat TPAK juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, struktur demografi, budaya kerja, serta kesempatan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, TPAK menjadi indikator penting dalam perencanaan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, karena dapat memberikan gambaran mengenai dinamika pasar tenaga kerja serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan pengurangan pengangguran secara berkelanjutan.

Gambar 2. 61 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	68,08	68,63	69,48	69,80	70,59
Prov. Lampung	69,35	70,06	70,04	70,41	70,44
Kab. Tulang Bawang	68,32	65,84	71,47	71,53	69,08

Sumber : Badan Pusat Statistik & Badan Pusat Statistik Prov. Lampung, 2025 (diolah)

Pada tahun 2021, TPAK Tulang Bawang berada di angka 68,32%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional (68,08%) namun masih di bawah Provinsi Lampung (69,35%). Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam di Tulang Bawang menjadi 65,84%, sementara Provinsi Lampung dan nasional justru mengalami kenaikan. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural atau transisi pasar kerja lokal yang perlu dicermati lebih lanjut.

Menariknya, pada tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Tulang Bawang mencatat lonjakan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja, masing-masing mencapai 71,47% dan 71,53%. Angka ini menempatkan Tulang Bawang di atas rata-rata provinsi dan nasional, menunjukkan pemulihan yang kuat dan kemungkinan dampak positif dari kebijakan ketenagakerjaan atau pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, pada tahun 2025, TPAK Kabupaten Tulang Bawang kembali menurun ke angka 69,08%, sehingga posisinya berada di bawah rata-rata nasional (70,59%) maupun Provinsi Lampung (70,44%). Penurunan ini menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya pelemahan partisipasi angkatan kerja di tingkat lokal dibandingkan

tren yang lebih kuat di level provinsi dan nasional. Penurunan ini perlu dicermati sebagai sinyal awal perubahan dinamika pasar kerja lokal, baik dari sisi penawaran tenaga kerja maupun permintaan sektor ekonomi.

Secara keseluruhan, fluktuasi TPAK di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal, kebijakan ketenagakerjaan, dan faktor demografis. Konsistensi dalam peningkatan partisipasi kerja menjadi kunci untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

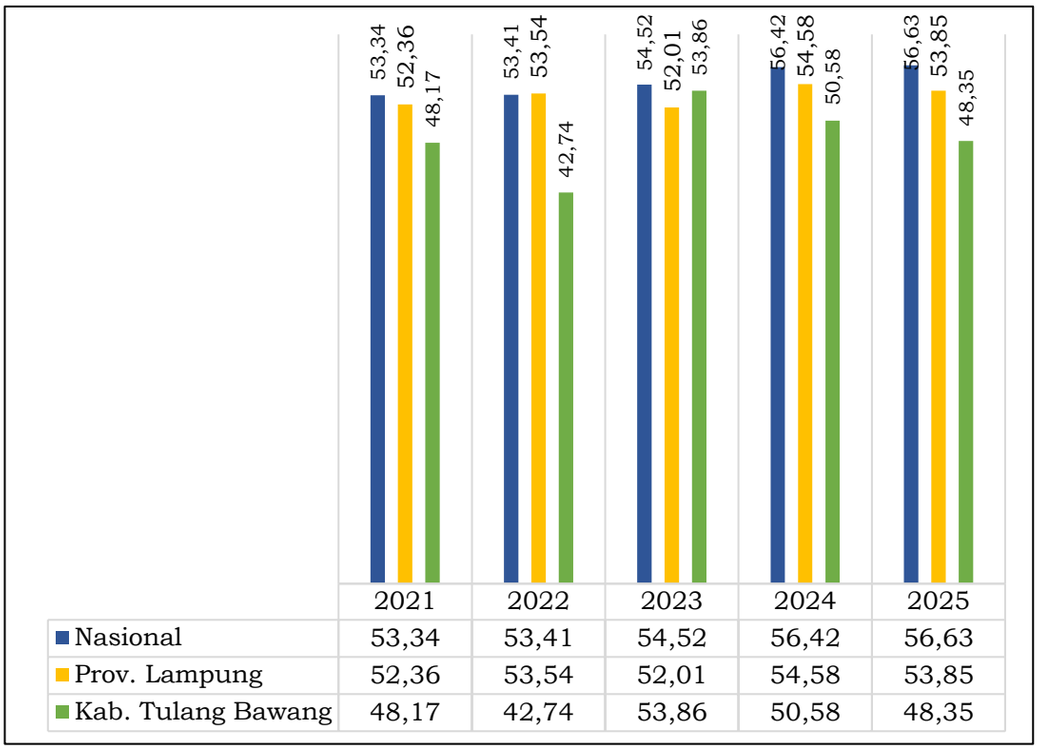
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.

TPAK Perempuan memiliki peran penting dalam menggambarkan sejauh mana potensi sumber daya manusia perempuan dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal. Tingginya TPAK Perempuan mencerminkan meningkatnya akses dan kesempatan kerja bagi perempuan, serta menunjukkan peran aktif perempuan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain kontribusi terhadap perekonomian, peningkatan TPAK Perempuan juga berimplikasi pada penguatan ketahanan sosial-ekonomi keluarga dan masyarakat. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperbaiki kesejahteraan keluarga, serta mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan. Oleh karena itu, TPAK Perempuan menjadi indikator penting dalam perumusan kebijakan

ketenagakerjaan dan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Gambar 2. 62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	53,34	53,41	54,52	56,42	56,63
Prov. Lampung	52,36	53,54	52,01	54,58	53,85
Kab. Tulang Bawang	48,17	42,74	53,86	50,58	48,35

Sumber : BPS RI, BPS Prov. Lampung, & BPS Kab. Tuba, 2026 (diolah)

Pada tahun 2021, TPAK perempuan di Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar 48,17 persen, lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 53,34 persen dan Provinsi Lampung sebesar 52,36 persen. Pada tahun 2022, indikator ini mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 42,74 persen, sementara pada periode yang sama TPAK perempuan di tingkat nasional relatif stabil pada 53,41 persen dan Provinsi Lampung meningkat menjadi 53,54 persen.

Memasuki tahun 2023, TPAK perempuan Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 53,86 persen. Capaian ini bahkan melampaui rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 52,01 persen, meskipun masih sedikit berada di bawah tingkat nasional yang mencapai 54,52 persen. Peningkatan tersebut

menunjukkan adanya perbaikan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi pada periode tersebut.

Namun demikian, pada tahun 2024 indikator ini kembali menurun menjadi 50,58 persen, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Pada tahun yang sama, TPAK perempuan di tingkat nasional dan Provinsi Lampung terus meningkat masing-masing menjadi 56,42 persen dan 54,58 persen. Selanjutnya pada tahun 2025, TPAK perempuan Kabupaten Tulang Bawang kembali mengalami penurunan menjadi 48,35 persen, sedangkan tingkat nasional dan Provinsi Lampung tetap berada pada level yang relatif lebih tinggi yaitu 56,63 persen dan 53,85 persen.

Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja di Kabupaten Tulang Bawang masih berfluktuasi dan cenderung berada di bawah rata-rata nasional maupun provinsi. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga diperlukan upaya penguatan kebijakan pembangunan yang mendukung peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja yang inklusif.

G. Indeks Inovasi Daerah (IID)

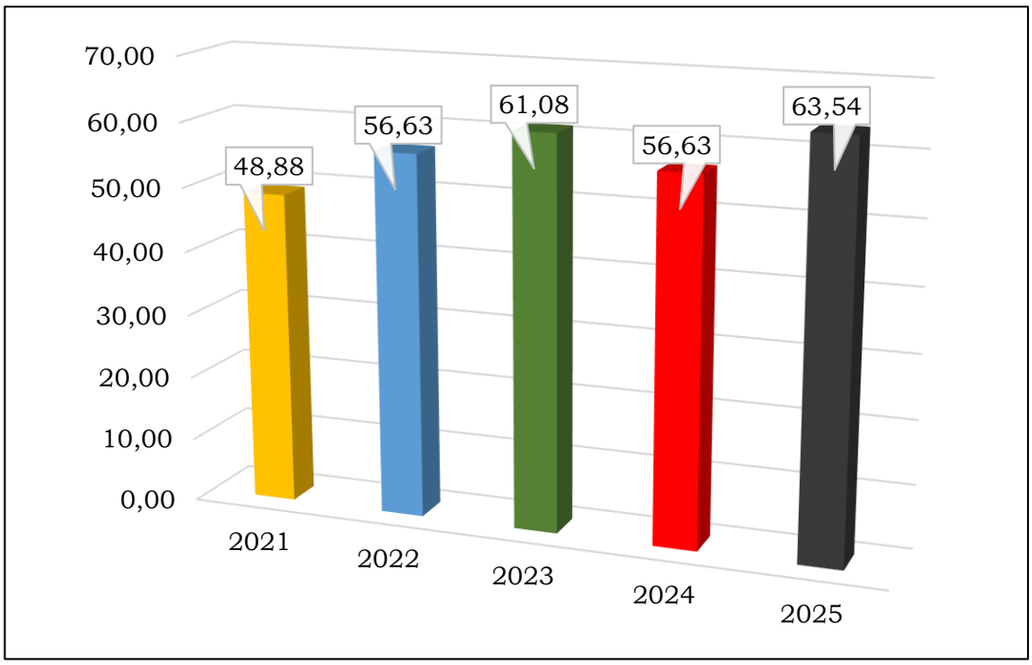
Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan instrumen pengukuran dan penilaian terhadap tingkat penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IID menilai berbagai bentuk pembaruan dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Penyusunan dan capaian Indeks Inovasi Daerah bertujuan untuk mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dan positif antar pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan daerah. Melalui inovasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan mampu

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat penyelesaian permasalahan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan nilai IID mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan dan program yang adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan inovasi daerah menjadi salah satu kunci dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Gambar 2. 63 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode lima tahun terakhir, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 48,88, yang mencerminkan kondisi awal kinerja inovasi daerah pada kategori berkembang. Nilai tersebut kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 56,63, dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai 61,08. Peningkatan ini menunjukkan adanya

penguatan upaya pemerintah daerah dalam mendorong ekosistem inovasi, baik melalui pengembangan kebijakan, tata kelola pemerintahan, maupun pemanfaatan teknologi dan potensi lokal.

Pada tahun 2024, indeks inovasi daerah mengalami penurunan menjadi 56,63. Kondisi ini mengindikasikan adanya fluktuasi dalam implementasi program inovasi daerah sehingga diperlukan evaluasi terhadap keberlanjutan, konsistensi pelaksanaan, serta penguatan dukungan kelembagaan dalam pengembangan inovasi.

Memasuki tahun 2025, Indeks Inovasi Daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 63,54. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Tulang Bawang dalam kategori inovatif, yang menunjukkan bahwa kinerja inovasi daerah semakin membaik dan didukung oleh penguatan praktik inovasi di lingkungan perangkat daerah. Secara umum, tren perkembangan ini mencerminkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi yang cukup kuat dalam pengembangan inovasi daerah, namun tetap memerlukan konsistensi, monitoring, serta penguatan sistem inovasi daerah agar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan.

H. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk memperoleh gambaran daya saing daerah secara komprehensif. Indeks ini dirancang untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah serta kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kerangka pengukuran IDSD disusun berdasarkan empat komponen utama pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen

tersebut saling terkait dan menjadi fondasi dalam menciptakan daya saing daerah yang kuat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, masing-masing komponen daya saing tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing yang menggambarkan berbagai aspek strategis dalam pembangunan daerah. Pilar-pilar ini digunakan sebagai dasar penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daerah, sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan daya saing daerah di masa mendatang.

Tabel 2. 104 Skor Komponen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022-2025

Komponen	Pilar	Skor			
		2022	**2023**	**2024**	**2025**
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,04	4,01	4,19	4,61
	Infrastruktur	1,60	2,14	3,36	3,43
	Adopsi TIK	3,22	4,54	4,66	4,85
	Stabilitas Ekonomi Makro	2,85	3,52	3,89	3,89
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	3,85	3,86	3,79	3,80
	Keterampilan	2,60	3,03	3,57	3,78
Pasar	Pasar Produk	1,85	1,97	2,75	2,75
	Pasar Tenaga Kerja	1,93	2,99	2,37	2,58
	Sistem Keuangan	2,16	0,82	1,44	1,76
	Ukuran Pasar	1,05	4,33	4,35	4,37
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	5,00	3,74	3,77	3,00
	Kapabilitas Inovasi	0,38	1,30	1,68	1,80
Indeks Daya Saing Daerah		**2,54**	**3,02**	**3,32**	**3,38**

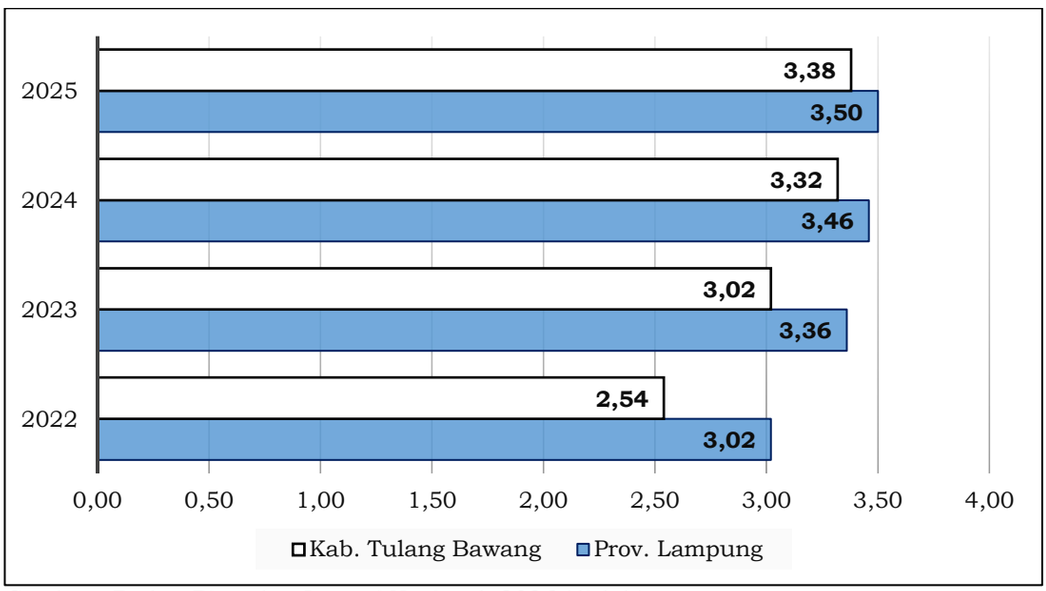
Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022 hingga 2025, dari skor 2,54 pada tahun 2022 menjadi 3,38 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam berbagai aspek pembangunan daerah yang mendukung daya saing, seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, iklim investasi, dan tata kelola pemerintahan.

Meskipun mengalami kemajuan, capaian Kabupaten Tulang Bawang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung. Pada tahun 2022, selisih skor IDSD antara Tulang Bawang dan Provinsi Lampung cukup lebar, yaitu 0,48 poin. Namun, selisih ini mulai menyempit pada tahun 2024 dan 2025, menandakan bahwa upaya penguatan daya saing di tingkat kabupaten mulai menunjukkan hasil yang lebih terarah dan konsisten.

Secara keseluruhan, tren IDSD Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2022-2025 memberikan optimisme terhadap arah pembangunan daerah yang semakin kompetitif. Untuk mempercepat konvergensi dengan capaian provinsi, diperlukan strategi yang lebih fokus pada penguatan ekosistem inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penciptaan iklim usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2. 64 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung ahun 2022-2025



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026 (diolah)

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2022–2025, meskipun nilainya masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya saing daerah terus

mengalami perbaikan dan secara bertahap mulai mendekati rata-rata provinsi.

I. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Indeks ini menggambarkan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengukuran IPKD menjadi salah satu instrumen evaluasi pemerintah pusat dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Penilaian IPKD dilakukan berdasarkan enam dimensi utama, yaitu kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, tingkat penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keenam dimensi tersebut mencerminkan tahapan utama dalam siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggung-jawaban.

Mulai Tahun Anggaran 2024 dengan Tahun Ukur 2025, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan penyesuaian metodologi penilaian IPKD. Metode yang sebelumnya menggunakan pendekatan perbandingan relatif antar daerah (standar deviasi) diubah menjadi pendekatan nilai ambang batas (threshold) absolut dengan kategori predikat A (Baik), B (Cukup Baik), dan C (Kurang Baik). Perubahan metode ini bertujuan untuk memberikan standar penilaian yang lebih objektif dan konsisten dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Perkembangan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tulang Bawang dalam beberapa tahun terakhir

menunjukkan gambaran kinerja tata kelola keuangan daerah yang terus diupayakan peningkatannya. Nilai IPKD mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Melalui indikator ini dapat diketahui sejauh mana pengelolaan APBD telah dilaksanakan secara efektif, transparan, serta akuntabel. Adapun perkembangan nilai IPKD Kabupaten Tulang Bawang selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 105 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2024

Tahun	Skor IPKD	Kategori
2021	59,64	Perlu Perbaikan
2022	56,69	Perlu Perbaikan
2023	67,97	Perlu Perbaikan
2024	54,91	Cukup Baik

Sumber : ipkd-bpp.kemendagri.go.id, 2026
Keterangan: Mulai TA 2024 (Tahun Ukur 2025), kategori penilaian beralih dari metode Standar Deviasi (perbandingan antar daerah) menjadi Nilai Ambang Batas Tetap (Kategori A, B, C) sesuai ketentuan BSKDN Kemendagri untuk standardisasi kinerja mandiri.

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Tulang Bawang selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis dengan skor tertinggi diraih pada tahun 2023 sebesar 67,97. Meskipun pada tahun 2024 skor IPKD mengalami penurunan menjadi 54,91, predikat penilaian justru mengalami peningkatan dari yang sebelumnya "Perlu Perbaikan" menjadi "Cukup Baik". Perubahan predikat ini merupakan dampak langsung dari adanya transisi metodologi penilaian oleh BSKDN Kemendagri, di mana pengkategorian saat ini menggunakan nilai ambang batas *(threshold)* absolut yang lebih objektif dibandingkan metode perbandingan relatif antar daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Status "Cukup Baik" di tahun 2024 ini mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan daerah telah memenuhi standar kategori B, namun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk kembali meningkatkan

skor capaian guna mengejar kriteria penilaian kategori A (Baik) di masa mendatang.

J. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang menggambarkan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu, tanpa membedakan kepemilikan faktor produksinya, baik oleh penduduk (residen) maupun non-penduduk (non-residen) (BPS, 2016). PDRB mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menjadi cerminan tingkat perkembangan dan kinerja perekonomian daerah.

Besaran PDRB sangat dipengaruhi oleh optimalisasi faktor-faktor produksi, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan, serta dukungan teknologi, yang didorong oleh semangat kewirausahaan masyarakat dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, PDRB tidak hanya berfungsi sebagai indikator kuantitatif pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai kualitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Dalam analisisnya, PDRB disajikan melalui dua pendekatan utama. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan kemampuan ekonomi suatu wilayah berdasarkan nilai produksi yang berlaku pada tahun berjalan. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dari waktu ke waktu dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Selain itu, distribusi PDRB menurut lapangan usaha memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian daerah, apakah masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, atau telah mengalami pergeseran ke sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (jasa). Adapun PDRB per kapita digunakan

sebagai indikator tambahan untuk mencerminkan tingkat produktivitas ekonomi dan kesejahteraan rata-rata penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2. 106 PDRB Kabupaten Tulang Bawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (miliar rupiah)

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.986,36	9.259,89	9.929,22	10.375,25	11.422,86
B	Pertambangan dan Penggalian	261,29	279,92	300,73	307,85	319,17
C	Industri Pengolahan	6.071,81	6.555,15	6.893,10	7.641,04	8.457,67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,52	27,86	29,20	27,71	29,53
E	Pengadaan Air, Pengelolan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,73	13,20	13,50	14,30	15,17
F	Konstruksi	2.105,58	2.330,33	2.494,74	2.734,11	2.876,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.472,81	2.814,05	3.317,68	3.679,87	3.989,44
H	Transportasi dan Pergudangan	935,36	1.132,78	1.443,89	1.612,27	1.782,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	322,30	359,12	395,66	421,86	466,57
J	Informasi dan Komunikasi	839,08	921,00	1.007,41	1.099,72	1.134,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	301,47	319,97	329,36	349,29	377,97
L	Real Estate	478,69	513,67	525,35	557,12	601,80
M, N	Jasa Perusahan	10,61	11,60	12,18	13,60	14,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	683,71	702,17	724,41	786,31	824,81
P	Jasa Pendidikan	462,55	509,10	539,83	583,34	611,08

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,82	113,15	119,03	134,84	139,86
R, S, T, U	Jasa lainnya	86,55	123,28	143,73	161,05	175,99
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto		**24.166,24**	**25.986,24**	**28.219,02**	**30.499,54**	**33.239,21**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)
*Keterangan : *) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

Total PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Tulang Bawang terus menunjukkan tren peningkatan. Nilainya naik dari Rp24.166,24 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp25.986,24 miliar pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp28.219,02 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2024, PDRB kembali tumbuh menjadi Rp30.499,54 miliar, dan diproyeksikan mencapai Rp33.239,21 miliar pada tahun 2025.

Dari sisi struktur ekonomi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang. Nilai tambah sektor ini meningkat dari Rp8.986,36 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp10.375,25 miliar pada tahun 2024, dan mencapai Rp11.422,86 miliar pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa perekonomian daerah masih kuat ditopang oleh sektor primer berbasis sumber daya alam, sesuai dengan karakteristik wilayah Tulang Bawang.
Selain sektor pertanian, sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga menunjukkan peran yang semakin signifikan. Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan meningkat dari Rp6.071,81 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp7.641,04 miliar pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai Rp8.457,67 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh dari Rp2.472,81 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp3.679,87 miliar pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai Rp3.989,44 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin menguatnya aktivitas

ekonomi sektor sekunder dan tersier sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor-sektor jasa lainnya, seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, juga menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya diversifikasi struktur ekonomi serta peningkatan kebutuhan dan aktivitas layanan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Tulang Bawang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer, namun mulai diimbangi oleh penguatan sektor industri dan jasa. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang diarahkan pada peningkatan nilai tambah, penguatan hilirisasi, serta diversifikasi sektor ekonomi guna mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus pembangunan fasilitas wilayah dan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan pada penguatan konektivitas, peningkatan kualitas jaringan transportasi darat, serta mendorong kemandirian wilayah perdesaan. Untuk menggambarkan capaian dan arah pembangunan infrastruktur tersebut, analisis difokuskan pada beberapa indikator utama yang mencerminkan kondisi, kualitas, dan dampak infrastruktur terhadap pembangunan wilayah.

Panjang jalan menurut statusnya digunakan untuk menunjukkan struktur dan sebaran kewenangan pengelolaan jaringan jalan, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten. Indikator ini penting untuk melihat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung keterhubungan antarwilayah, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan

pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan sesuai kewenangan masing-masing.

Selanjutnya, panjang jalan menurut jenis permukaan jalan mencerminkan kualitas fisik infrastruktur jalan yang tersedia. Komposisi permukaan jalan, seperti jalan beraspal, beton, maupun jalan dengan kondisi lainnya, memberikan gambaran tingkat kemantapan jaringan jalan yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran transportasi, keselamatan pengguna jalan, serta efisiensi distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Ketersediaan infrastruktur jembatan menjadi indikator penting dalam mendukung kontinuitas jaringan jalan, terutama pada wilayah yang memiliki hambatan geografis berupa sungai atau daerah rawa. Kondisi dan jumlah jembatan yang memadai berperan strategis dalam menjamin aksesibilitas masyarakat, memperlancar mobilitas ekonomi, serta meningkatkan keterpaduan antarwilayah, khususnya antara kawasan perdesaan dan pusat kegiatan.

Rasio konektivitas angkutan jalan digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan jaringan transportasi darat dalam mengintegrasikan berbagai pusat aktivitas wilayah. Rasio ini mencerminkan kemampuan infrastruktur jalan dalam mendukung sistem transportasi yang efisien dan merata, sehingga berkontribusi terhadap penurunan biaya logistik, peningkatan akses pelayanan publik, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

Selain aspek fisik infrastruktur, fokus pembangunan wilayah juga tercermin melalui persentase desa mandiri. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pembangunan infrastruktur mampu mendorong kemandirian desa dalam menyediakan layanan dasar, mengelola potensi ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan persentase desa mandiri menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada konektivitas, tetapi juga berdampak nyata terhadap penguatan kapasitas dan keberlanjutan pembangunan perdesaan.

Secara keseluruhan, fokus fasilitas wilayah dan infrastruktur di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk menciptakan jaringan transportasi yang terintegrasi, infrastruktur yang berkualitas, serta wilayah perdesaan yang mandiri dan berdaya saing, sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Panjang Jalan menurut Statusnya

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kemantapan infrastruktur jalan, khususnya jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang), sebagai langkah strategis dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan wilayah, serta penguatan konektivitas antar kawasan strategis. Infrastruktur jalan yang memadai berperan penting dalam membuka aksesibilitas wilayah, memperlancar mobilitas penduduk, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.

Ketersediaan jaringan jalan yang berkualitas tidak hanya mempermudah keterhubungan antarwilayah, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, serta pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan status kewenangannya, panjang jalan di Kabupaten Tulang Bawang terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Pembagian status jalan ini mencerminkan pembagian peran dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan. Rincian panjang jalan menurut masing-masing status kewenangan tersebut disajikan pada tabel berikut, yang memberikan gambaran mengenai struktur jaringan jalan serta kapasitas pengelolaannya dalam mendukung konektivitas wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 107 Panjang Jalan menurut Statusnya di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Status Jalan	Tahun									
	2021		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**	
	Km	**%**	**Km**	**%**	**Km**	**%**	**Km**	**%**	**Km**	**%**
Nasional	121,32	9,86	121,32	12,43	121,32	12,43	121,32	12,28	121,32	12,28
Provinsi	67,85	5,51	67,85	6,95	67,85	6,95	67,85	6,87	67,85	6,87
Kabupaten	1.041,46	84,63	786,84	80,62	786,84	80,62	798,58	80,85	798,58	80,85
TOTAL	**1.230,63**	**100,00**	**976,01**	**100,00**	**976,01**	**100,00**	**987,75**	**100,00**	**987,75**	**100,00**

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Panjang jalan di Kabupaten Tulang Bawang menurut status kewenangannya selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa jaringan jalan kabupaten tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur jaringan jalan daerah. Pada tahun 2021, total panjang jalan tercatat sebesar 1.230,63 km, yang didominasi oleh jalan kabupaten sepanjang 1.041,46 km atau 84,63 persen. Sementara itu, jalan nasional memiliki panjang 121,32 km (9,86 persen) dan jalan provinsi sepanjang 67,85 km (5,51 persen).

Sejak tahun 2022, total panjang jalan mengalami penyesuaian dan tercatat berada pada kisaran 976,01-987,75 km. Perubahan tersebut bukan disebabkan oleh pengurangan fisik jaringan jalan, melainkan merupakan dampak dari proses reklasifikasi status jalan, pemutakhiran data spasial, serta penyesuaian administratif dalam pencatatan aset jalan antar kewenangan, baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi data infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2022 dan 2023, total panjang jalan masing-masing tercatat sebesar 976,01 km. Jalan kabupaten tetap mendominasi sepanjang 786,84 km atau 80,62 persen. Jalan nasional tercatat sepanjang 121,32 km dengan kontribusi 12,43 persen, sedangkan jalan provinsi sepanjang 67,85 km atau 6,95 persen. Struktur ini menunjukkan bahwa komposisi jaringan jalan relatif stabil pada periode tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2024 total panjang jalan meningkat menjadi 987,75 km, dengan jalan kabupaten sepanjang 798,58 km atau 80,85 persen. Jalan nasional tetap sepanjang 121,32 km (12,28 persen), dan jalan provinsi sepanjang 67,85 km (6,87 persen). Kondisi yang sama berlanjut pada tahun 2025, di mana total panjang jalan tercatat tetap sebesar 987,75 km dengan komposisi yang tidak mengalami perubahan, yakni jalan kabupaten 798,58 km (80,85 persen), jalan nasional 121,32 km (12,28 persen), dan jalan provinsi 67,85 km (6,87 persen).

Secara keseluruhan, dominasi jalan kabupaten dalam struktur jaringan jalan Kabupaten Tulang Bawang hingga tahun 2025 menunjukkan besarnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan, peningkatan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan. Hal ini menegaskan pentingnya perencanaan yang terarah, penganggaran yang memadai, serta pengelolaan jalan kabupaten yang berkelanjutan guna mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan

Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Tulang Bawang. Jenis permukaan jalan, seperti jalan beraspal, beton, maupun jalan dengan permukaan lainnya, mencerminkan tingkat kemantapan dan kelayakan jaringan jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Kualitas permukaan jalan berpengaruh langsung terhadap efisiensi transportasi, keselamatan pengguna jalan, serta daya dukung infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi daerah.

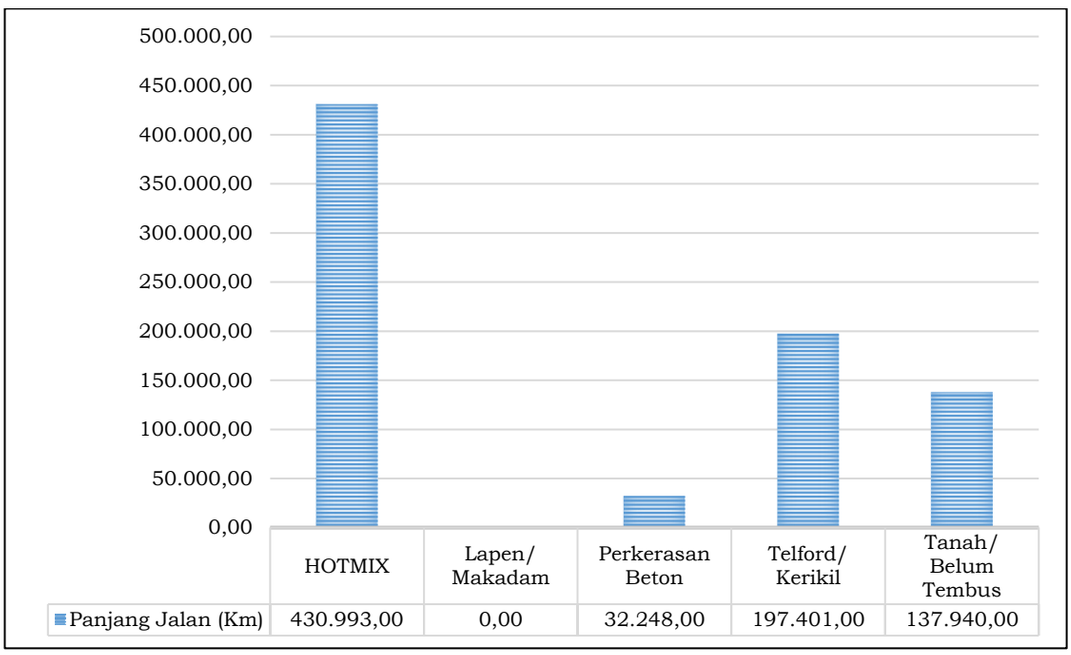
Peningkatan proporsi jalan dengan permukaan mantap, khususnya jalan beraspal dan beton, menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur jalan daerah. Jalan dengan permukaan yang baik mampu mempercepat pergerakan orang dan barang, menurunkan biaya transportasi dan logistik, serta meningkatkan aksesibilitas

wilayah, terutama pada kawasan perdesaan dan sentra-sentra produksi. Sebaliknya, keberadaan jalan dengan permukaan yang belum mantap masih menjadi tantangan karena berpotensi menghambat mobilitas dan menurunkan kualitas pelayanan transportasi.

Analisis panjang jalan menurut jenis permukaan jalan juga memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah. Wilayah dengan dominasi jalan berpermukaan mantap umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi, sementara wilayah dengan keterbatasan kualitas jalan memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur.

Secara keseluruhan, perkembangan panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Tulang Bawang menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Upaya peningkatan kualitas permukaan jalan secara bertahap dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung konektivitas wilayah, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 2. 65 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 (Km)



Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 menunjukkan bahwa jaringan jalan didominasi oleh jalan berpermukaan aspal (hotmix). Panjang jalan hotmix tercatat sebesar 430,993 km. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kemantapan infrastruktur jalan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian daerah.

Selain itu, jalan dengan perkerasan beton memiliki panjang sebesar 32,248 km. Penggunaan perkerasan beton relatif terbatas dan umumnya diterapkan pada ruas-ruas tertentu yang membutuhkan struktur lebih kuat dan daya tahan tinggi terhadap beban kendaraan maupun kondisi lingkungan. Sementara itu, pada tahun 2025 tidak terdapat jalan dengan permukaan lapen/makadam, yang menunjukkan adanya pergeseran menuju jenis permukaan jalan yang lebih mantap dan berstandar lebih baik.

Di sisi lain, jalan dengan permukaan telford/kerikil dan tanah/belum tembus masih cukup signifikan. Panjang jalan telford/kerikil tercatat sebesar 197,401 km, sedangkan jalan tanah/belum tembus mencapai 137,940 km. Keberadaan ruas jalan dengan permukaan belum mantap ini mengindikasikan bahwa sebagian jaringan jalan, terutama di wilayah perdesaan atau kawasan dengan tingkat aksesibilitas terbatas, masih memerlukan peningkatan kualitas guna menunjang konektivitas wilayah secara optimal.

Secara keseluruhan, komposisi jenis permukaan jalan di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 memperlihatkan kemajuan dalam peningkatan jalan berpermukaan mantap, khususnya hotmix. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam upaya peningkatan kualitas ruas jalan yang berpermukaan kerikil dan tanah melalui program peningkatan dan pengaspalan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga pemerataan akses dan pelayanan transportasi dapat terus ditingkatkan.

C. Infrastruktur Jembatan

Infrastruktur jembatan merupakan salah satu komponen strategis dalam sistem transportasi darat yang berperan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah. Keberadaan jembatan yang memadai memungkinkan keterhubungan wilayah yang terpisah oleh sungai, saluran irigasi, maupun hambatan geografis lainnya. Dengan demikian, jembatan berfungsi untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, kondisi infrastruktur jembatan juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan infrastruktur wilayah. Jembatan yang berada dalam kondisi baik akan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi, sedangkan jembatan yang mengalami kerusakan berpotensi menghambat konektivitas serta menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, pemantauan dan pemeliharaan kondisi jembatan secara berkala menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi.

Perkembangan kondisi infrastruktur jembatan di Kabupaten Tulang Bawang pada periode tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Kondisi Jembatan	satuan	Tahun				
			2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Baik	Unit	163	164	166	167	168
2	Sedang	Unit	18	17	16	16	16
3	Rusak Ringan	Unit	8	8	7	7	7
4	Rusak Berat	Unit	3	3	3	2	2
5	Rusak Total	Unit	8	8	8	8	7
JUMLAH			**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan tabel perkembangan kondisi infrastruktur jembatan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2021-2025, secara umum kondisi

jembatan menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dengan perbaikan bertahap. Jumlah jembatan dalam kondisi baik meningkat dari 163 unit pada tahun 2021 menjadi 168 unit pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah jembatan dengan kondisi sedang menurun dari 18 unit menjadi 16 unit. Pada kategori rusak ringan relatif stabil dengan sedikit penurunan dari 8 unit menjadi 7 unit. Sementara itu, jembatan dengan kondisi rusak berat menurun dari 3 unit menjadi 2 unit, dan rusak total berkurang dari 8 unit menjadi 7 unit. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jembatan yang secara bertahap meningkatkan kualitas kondisi jembatan di Kabupaten Tulang Bawang.

Namun demikian, pengelolaan infrastruktur jembatan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain usia teknis sebagian jembatan yang relatif tua sehingga memerlukan rehabilitasi struktural secara berkala. Selain itu, faktor bencana hidrometeorologi seperti luapan air sungai juga berpotensi menyebabkan kerusakan pada pondasi dan struktur jembatan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur jembatan sehingga mempengaruhi mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa, khususnya pada wilayah perdesaan dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya penanganan melalui pembangunan jembatan baru pada wilayah yang belum terlayani, rehabilitasi jembatan yang mengalami kerusakan, serta pelaksanaan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Tulang Bawang.

D. Rasio Konektivitas Angkutan Jalan

Rasio konektivitas angkutan jalan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana jaringan jalan mampu menghubungkan pusat-pusat kegiatan sosial dan ekonomi dalam

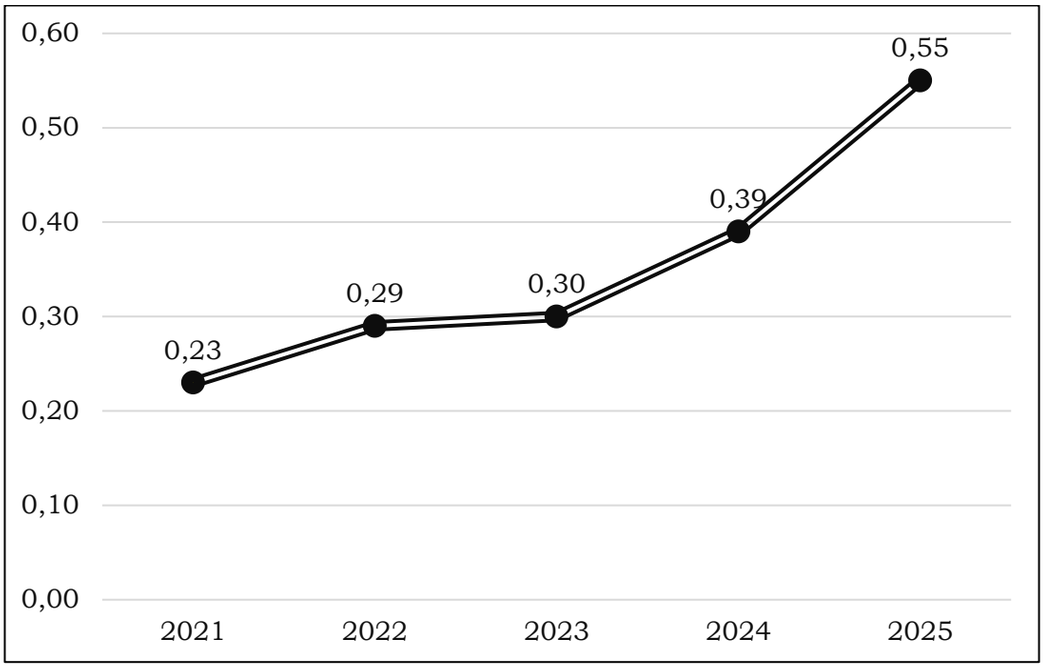
suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah, khususnya antara kawasan produksi, kawasan permukiman, pusat pelayanan, dan pusat distribusi, yang menjadi prasyarat utama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran arus barang dan jasa.

Tingkat konektivitas angkutan jalan yang baik mencerminkan efektivitas jaringan transportasi darat dalam mengintegrasikan berbagai fungsi wilayah. Semakin tinggi rasio konektivitas, semakin efisien sistem transportasi dalam memperpendek waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan peluang ekonomi. Sebaliknya, rendahnya konektivitas dapat menghambat aktivitas ekonomi, memperlebar kesenjangan antarwilayah, dan menurunkan daya saing daerah.

Dalam konteks pembangunan wilayah, rasio konektivitas angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Konektivitas yang memadai memungkinkan distribusi hasil produksi daerah, khususnya dari sektor unggulan seperti pertanian dan industri pengolahan, berjalan lebih lancar serta memperkuat keterpaduan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

Oleh karena itu, peningkatan rasio konektivitas angkutan jalan menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Tulang Bawang. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, serta penguatan keterpaduan antar jaringan transportasi, sehingga mampu mendukung pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 66 Perkembangan Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, rasio konektivitas angkutan jalan di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten. Pada tahun 2021, rasio konektivitas tercatat sebesar 0,23, yang mencerminkan tingkat keterhubungan jaringan jalan yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio tersebut meningkat menjadi 0,29, menunjukkan adanya perbaikan aksesibilitas dan keterkaitan antar ruas jalan.

Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 0,30. Meskipun kenaikannya relatif terbatas, kondisi ini mengindikasikan stabilitas dalam upaya pengembangan jaringan transportasi. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang lebih signifikan menjadi 0,39, yang mencerminkan semakin kuatnya konektivitas antar wilayah.

Tren peningkatan tersebut semakin menguat pada tahun 2025 dengan rasio konektivitas mencapai 0,55. Kenaikan yang cukup tajam ini menunjukkan adanya percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang berdampak pada semakin terhubungnya wilayah-wilayah di Kabupaten Tulang Bawang.

Secara keseluruhan, perkembangan rasio konektivitas angkutan jalan selama periode 2021-2025 menggambarkan hasil positif dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

E. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan desa yang mandiri secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. IDM mengklasifikasikan desa ke dalam lima kategori, yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, dengan desa mandiri sebagai kategori tertinggi.

Desa atau kampung mandiri merupakan wilayah yang memiliki tingkat ketahanan dan keberlanjutan yang tinggi pada tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Desa dalam kategori ini mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut mencerminkan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal secara optimal.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, desa mandiri ditandai dengan terpenuhinya standar tinggi dalam ketersediaan dan kualitas layanan dasar, infrastruktur yang memadai, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa. Desa atau kampung mandiri umumnya telah

memiliki prasarana dasar yang memadai, pelayanan sosial yang baik, serta masyarakat yang aktif, produktif, dan berdaya.

Dengan demikian, persentase desa mandiri tidak hanya mencerminkan capaian pembangunan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan. Peningkatan jumlah dan persentase desa mandiri menjadi indikator keberhasilan pembangunan wilayah perdesaan sekaligus tujuan strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2. 109 Persentase Kampung Mandiri di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Uraian	Capaian Kinerja				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kampung Mandiri	1	4	4	17	33
Jumlah Kampung	147	147	147	147	147
Persentase Kampung Mandiri	**0,68**	**2,72**	**2,72**	**11,56**	**22,45**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Tulang Bawang, 2026

Berdasarkan Tabel tentang Persentase Kampung Mandiri di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah dan persentase kampung berstatus mandiri selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, jumlah Kampung Mandiri baru mencapai 1 kampung atau sekitar 0,68% dari total 147 kampung. Pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 4 kampung (2,72%) dan relatif stagnan pada tahun 2023 dengan jumlah dan persentase yang sama.

Perkembangan yang lebih pesat mulai terlihat pada tahun 2024, di mana jumlah Kampung Mandiri melonjak menjadi 17 kampung atau 11,56%. Peningkatan ini berlanjut secara signifikan pada tahun 2025 dengan jumlah Kampung Mandiri mencapai 33 kampung atau 22,45% dari total kampung yang ada.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya percepatan dalam peningkatan status kemandirian kampung, khususnya dalam dua tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program pembinaan, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan dasar mulai memberikan hasil yang nyata.

Meskipun demikian, dengan capaian 22,45% pada tahun 2025, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mendorong kampung lainnya agar naik status menjadi mandiri. Oleh karena itu, keberlanjutan pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur kampung, serta penguatan potensi ekonomi lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan kemandirian kampung di Kabupaten Tulang Bawang.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi yang kondusif merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan potensi ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan, kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang demokratis, serta tingkat ketentraman dan rasa aman masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, iklim berinvestasi yang kondusif tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan. Stabilitas keamanan dan rendahnya tingkat kriminalitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi. Selain itu, efektivitas penegakan peraturan daerah berperan dalam menjamin kepastian hukum, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menumbuhkan iklim usaha yang tertib dan transparan.

Aspek tata kelola pemerintahan yang demokratis juga menjadi bagian integral dalam membangun iklim investasi yang sehat. Tingkat demokrasi yang baik mencerminkan partisipasi masyarakat, perlindungan hak-hak sipil, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, tingkat rasa aman masyarakat serta kondisi ketentraman dan ketertiban umum menjadi indikator penting dalam menilai kualitas lingkungan sosial yang mendukung aktivitas investasi dan ekonomi.

Dengan demikian, fokus iklim berinvestasi di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan pada penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kepastian dan penegakan hukum, penguatan nilai-nilai demokrasi, serta penciptaan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Sinergi antar aspek tersebut diharapkan mampu membentuk lingkungan investasi yang stabil, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

A. Angka Kriminalitas *(Crime Rate)*

Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Tulang Bawang, pemerintah daerah bersama instansi vertikal terkait, khususnya kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengamanan wilayah, penegakan hukum yang konsisten, serta penanggulangan berbagai bentuk tindak kriminal guna menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi aktivitas ekonomi dan investasi.

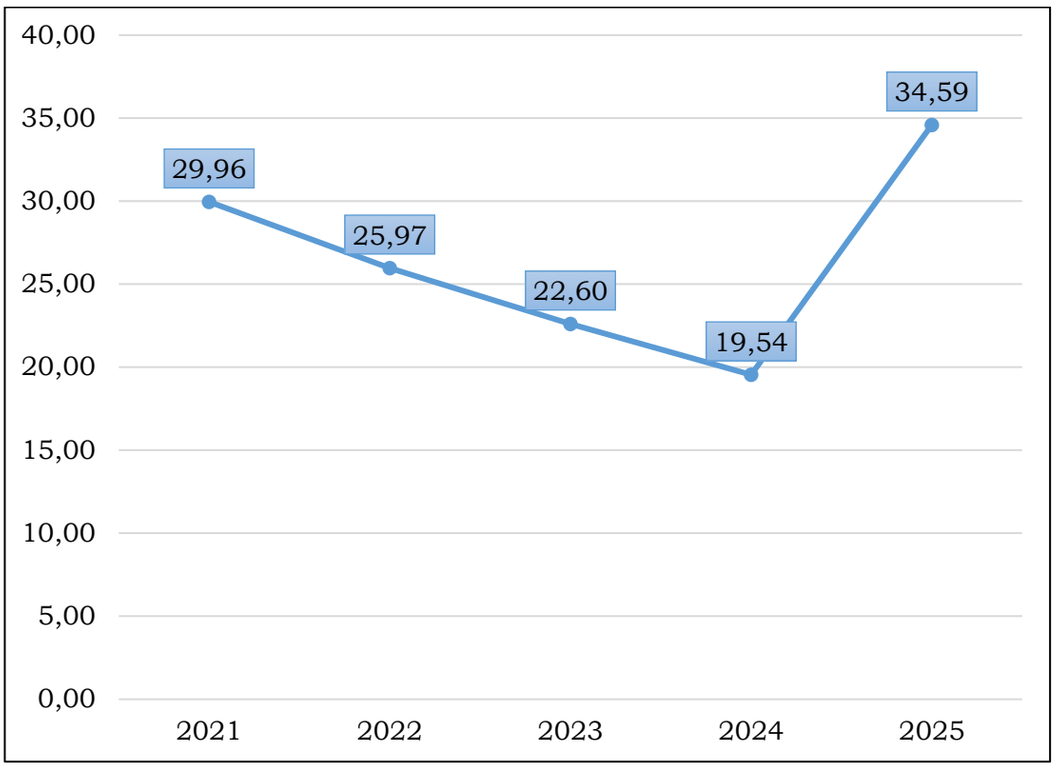
Angka kriminalitas *(crime rate)* merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keamanan suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan jumlah dan intensitas tindak kriminal yang terjadi dalam periode tertentu, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kriminalitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Semakin

rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat rasa aman masyarakat dan semakin besar kepercayaan pelaku usaha terhadap keberlanjutan kegiatan investasi di daerah tersebut.

Pengendalian kriminalitas tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah kasus, tetapi juga pada peningkatan kualitas penanganan perkara, termasuk kecepatan respons, kepastian hukum, serta pencegahan terjadinya tindak kriminal berulang. Lingkungan yang aman dan tertib akan mendukung stabilitas sosial, memperlancar aktivitas ekonomi, serta menciptakan kepastian berusaha yang menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan investasi.

Dengan demikian, pengendalian angka kriminalitas menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam membangun iklim berinvestasi yang aman, stabil, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 2. 67 Angka Kriminalitas di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025



Sumber : Polres Tulang Bawang, diolah 2026 (diolah)

Angka kriminalitas per 100.000 penduduk di Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, angka kriminalitas tercatat sebesar 29,96 dan mengalami penurunan secara konsisten hingga tahun 2024 menjadi 19,54. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang antara lain didukung oleh peningkatan efektivitas penegakan hukum, upaya preventif, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Namun demikian, pada tahun 2025 angka kriminalitas meningkat signifikan menjadi 34,59 per 100.000 penduduk. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, yang berpotensi mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat serta iklim investasi daerah. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum belum sepenuhnya berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan strategi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui integrasi pendekatan preventif dan represif, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan. Selain itu, penguatan peran masyarakat dan pemanfaatan sistem deteksi dini berbasis komunitas menjadi penting dalam rangka menjaga stabilitas keamanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, angka kriminalitas menjadi salah satu indikator kinerja daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya, khususnya dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

B. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen strategis untuk mengukur perkembangan dan kualitas demokrasi di Indonesia. Penyusunan IDI dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tujuan memberikan gambaran kuantitatif dan komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip demokrasi di berbagai wilayah.

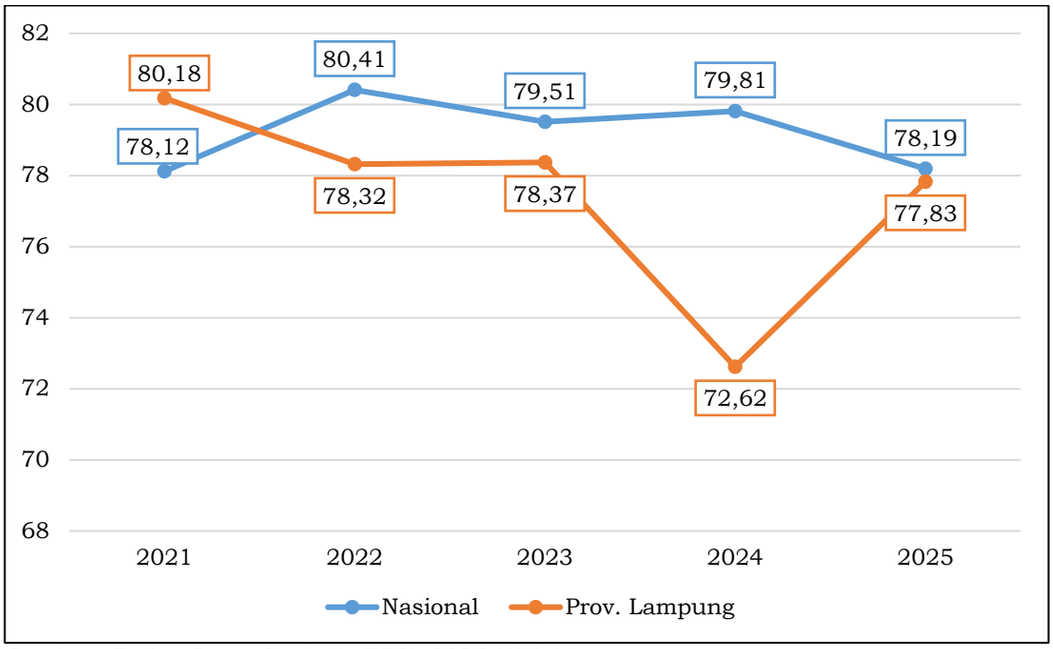
Pengukuran IDI mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi. Setiap aspek terdiri atas sejumlah indikator yang mencerminkan dinamika demokrasi, seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, tingkat partisipasi politik masyarakat, peran partai politik, serta kinerja lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Nilai IDI dinyatakan dalam skala 0–100 dengan klasifikasi sebagai berikut:

- <60,00 : kualitas demokrasi rendah
- 60,00–79,99 : kualitas demokrasi sedang
- ≥80,00 : kualitas demokrasi baik

Hingga saat ini, penghitungan IDI masih dilakukan pada tingkat provinsi, sehingga data spesifik untuk kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Tulang Bawang, belum tersedia. Namun demikian, capaian IDI provinsi dapat dijadikan gambaran umum kondisi demokrasi di wilayah tersebut, termasuk dinamika demokrasi di kabupaten/kota di dalamnya.

Keberadaan IDI menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, serta evaluasi efektivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, IDI berfungsi sebagai alat evaluasi yang mendukung peningkatan kualitas demokrasi secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah.

Gambar 2. 68 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026 (diolah)

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), perkembangan kualitas demokrasi pada tingkat nasional dan Provinsi Lampung menunjukkan dinamika yang fluktuatif sepanjang periode 2021-2025. Pada tingkat nasional, IDI tahun 2021 tercatat sebesar 78,12 (kategori "sedang"), kemudian meningkat signifikan menjadi 80,41 pada 2022 sehingga masuk kategori "baik". Namun, pada 2023 mengalami penurunan menjadi 79,51 dan relatif stabil pada 2024 sebesar 79,81, sebelum kembali menurun pada 2025 menjadi 78,19. Pola ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi nasional cenderung terjaga pada kisaran sedang-baik, namun belum menunjukkan penguatan yang konsisten *(sustainable improvement)*, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga stabilitas kualitas demokrasi, khususnya pada aspek partisipasi politik dan fungsi kelembagaan demokrasi.

Sementara itu, di Provinsi Lampung, IDI tahun 2021 tercatat sebesar 80,18 (kategori "baik"), sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Namun pada 2022 terjadi penurunan menjadi 78,32, kemudian relatif stagnan pada 2023 sebesar 78,37. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada 2024 menjadi 72,62, yang

mengindikasikan adanya pelemahan kualitas demokrasi di daerah. Pada 2025, IDI Lampung kembali meningkat menjadi 77,83, meski belum kembali pada level capaian awal tahun 2021. Pola tersebut menunjukkan bahwa dinamika demokrasi di Lampung lebih volatil dibandingkan tren nasional. Penurunan tajam pada 2024 dan pemulihan sebagian pada 2025 mengindikasikan adanya perbaikan parsial, namun belum bersifat konsolidatif.

Fluktuasi ini secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (i) dinamika kebebasan sipil, termasuk ruang ekspresi dan kebebasan berpendapat; (ii) kualitas proses politik, termasuk partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pengambilan kebijakan publik; (iii) kinerja kelembagaan demokrasi, meliputi peran partai politik, DPRD, serta organisasi masyarakat sipil; dan (iv) tingkat literasi serta kesadaran politik masyarakat yang belum merata. Secara komparatif, IDI nasional menunjukkan pola relatif stabil dengan fluktuasi moderat, sedangkan Lampung mengalami fluktuasi lebih tajam, khususnya pada 2024, yang menandakan tantangan lebih kompleks dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, upaya penguatan kualitas demokrasi di Provinsi Lampung dan kabupaten/kota diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik, penguatan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan, penguatan kelembagaan demokrasi (partai politik, DPRD, dan organisasi masyarakat sipil), serta peningkatan literasi politik masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan daerah menjadi faktor kunci dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kualitas dan struktur SDM tidak

hanya memengaruhi produktivitas ekonomi, tetapi juga menentukan kemampuan daerah dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, fokus pembangunan SDM perlu dilihat secara komprehensif melalui indikator-indikator yang mampu menggambarkan kondisi demografis serta tingkat pendidikan penduduk.

Dalam konteks ini, fokus sumber daya manusia dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu Angka Ketergantungan dan Rasio Lulusan Pendidikan Tinggi (S1/S2/S3). Kedua indikator tersebut memberikan gambaran awal mengenai beban penduduk produktif serta kapasitas intelektual dan kompetensi tenaga kerja di daerah.

A. Angka Ketergantungan

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian suatu daerah dan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah serta keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada kontribusi penduduk usia produktif sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi, sekaligus pada kemampuan daerah dalam mengelola kebutuhan penduduk usia nonproduktif.

Seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur demografi, muncul tantangan berupa meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Penduduk usia kerja tidak hanya berperan sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mendukung kelompok penduduk usia nonproduktif, seperti anak-anak, lanjut usia, serta penduduk yang tidak dapat bekerja karena alasan tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup penduduk usia produktif apabila tidak diimbangi dengan kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat.

Angka Ketergantungan merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk berumur 15-64 tahun yang secara umum dianggap mampu bekerja dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Sementara itu, penduduk usia nonproduktif mencakup penduduk berumur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dinilai belum atau tidak lagi mampu berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

Semakin tinggi nilai Angka Ketergantungan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Secara umum, Angka Ketergantungan dikategorikan rendah apabila nilainya kurang dari 30, sedang apabila berada pada rentang 30-40, dan tinggi apabila melebihi 40. Angka Ketergantungan yang rendah mengindikasikan struktur penduduk yang relatif lebih menguntungkan bagi perekonomian, karena proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif.

Beban tanggungan yang dimaksud dapat berupa penyediaan jaminan sosial, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, program perlindungan sosial, hingga fasilitas pensiun bagi penduduk usia nonproduktif. Oleh karena itu, Angka Ketergantungan menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan penduduk usia produktif dan nonproduktif serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2. 110 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

No	Kelompok Umur	satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	0 - 14 tahun	jiwa	115.799	115.223	116.660	116.580	116.270
2	15 - 64 tahun	jiwa	292.550	292.734	303.980	308.020	312.070
3	65 +	jiwa	22.281	23.251	24.530	25.730	27.060
Angka Ketergantungan		**persen**	**47,20**	**47,30**	**46,45**	**46,20**	**45,93**

Sumber : Tulang Bawang Dalam Angka, BPS, 2026 (diolah)

Selama periode 2021 hingga 2025, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 jumlahnya tercatat 292.550 jiwa, kemudian meningkat menjadi 292.734 jiwa pada 2022, 303.980 jiwa pada 2023, 308.020 jiwa pada 2024, dan mencapai 312.070 jiwa pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa basis tenaga kerja daerah semakin besar dan berpotensi mendukung aktivitas ekonomi serta produktivitas wilayah.

Sementara itu, penduduk usia muda (0-14 tahun) relatif stabil sepanjang periode tersebut. Jumlahnya sebesar 115.799 jiwa pada 2021, sedikit menurun menjadi 115.223 jiwa pada 2022, kemudian meningkat menjadi 116.660 jiwa pada 2023 dan 116.580 jiwa pada 2024, sebelum kembali sedikit menurun menjadi 116.270 jiwa pada 2025. Fluktuasi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia anak tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Di sisi lain, penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Jumlahnya bertambah dari 22.281 jiwa pada 2021 menjadi 23.251 jiwa pada 2022, 24.530 jiwa pada 2023, 25.730 jiwa pada 2024, dan 27.060 jiwa pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan mulai terjadinya proses penuaan penduduk (population ageing) secara bertahap yang perlu diantisipasi dalam perencanaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan lansia.

Perubahan komposisi umur tersebut tercermin pada angka ketergantungan penduduk yang menunjukkan tren menurun dari

47,20 persen pada 2021 menjadi 47,30 persen pada 2022, kemudian turun menjadi 46,45 persen pada 2023, 46,20 persen pada 2024, dan 45,93 persen pada 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif semakin berkurang, sehingga secara demografis kondisi ini relatif menguntungkan bagi pembangunan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, struktur penduduk di Kabupaten Tulang Bawang hingga tahun 2025 menunjukkan kecenderungan menguatnya proporsi penduduk usia produktif disertai dengan penurunan angka ketergantungan, yang membuka peluang bagi daerah untuk memanfaatkan bonus demografi secara lebih optimal. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan pembangunan agar sistem pelayanan sosial dan kesehatan mampu mengakomodasi perubahan struktur umur penduduk di masa mendatang.

B. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, baik pada jenjang sarjana (S1), magister (S2), maupun doktor (S3), terhadap total jumlah penduduk pada tahun tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat capaian pendidikan tinggi di suatu wilayah sekaligus menunjukkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki daerah.

Rasio lulusan pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi rasio lulusan S1/S2/S3, semakin besar pula ketersediaan tenaga kerja terdidik yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sektor-sektor strategis berbasis pengetahuan.

Selain itu, indikator ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, seperti perluasan akses pendidikan tinggi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Dengan demikian, Rasio Lulusan S1/S2/S3 tidak hanya mencerminkan kondisi pendidikan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Tabel 2. 111 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2025

Indikator	satuan	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Jumlah Lulusan S1/S2/S3	jiwa	6.328	6.703	7.134	7.740	6.703
Jumlah Penduduk	jiwa	430.630	431.208	433.570	440.040	442.320
Rasio Lulusan S1/S2/S3		**0,0147**	**0,0155**	**0,0165**	**0,0176**	**0,0152**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tulang Bawang, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, jumlah lulusan perguruan tinggi (S1/S2/S3) di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan dinamika yang relatif positif. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 6.328 lulusan, kemudian meningkat menjadi 6.703 lulusan pada 2022, 7.134 lulusan pada 2023, dan mencapai puncaknya 7.740 lulusan pada 2024. Namun, pada 2025 jumlah lulusan kembali turun menjadi 6.703 jiwa. Pola ini menggambarkan adanya tren peningkatan yang cukup konsisten hingga 2024, meskipun di tahun terakhir terjadi penurunan.

Jumlah penduduk juga mengalami pertumbuhan bertahap. Dari 430.630 jiwa pada 2021, meningkat menjadi 431.208 jiwa pada 2022, 433.570 jiwa pada 2023, 440.040 jiwa pada 2024, dan mencapai 442.320 jiwa pada 2025. Pertumbuhan penduduk yang relatif stabil ini menjadi latar penting dalam menilai rasio lulusan perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk.

Rasio lulusan perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk menunjukkan tren yang positif. Rasio tercatat 0,0147 pada 2021, naik menjadi 0,0155 pada 2022, 0,0165 pada 2023, dan mencapai 0,0176 pada 2024. Namun, pada 2025 rasio kembali turun ke angka 0,0152, seiring dengan penurunan jumlah lulusan. Meskipun terjadi fluktuasi, tren keseluruhan tetap menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah lulusan dan rasio pendidikan tinggi di Kabupaten Tulang Bawang menjadi modal strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing daerah. Ke depan, upaya berkelanjutan dalam memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas perguruan tinggi, serta memperkuat relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja perlu terus didorong agar capaian ini benar-benar berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan tahun berjalan merupakan bagian integral dari tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja pembangunan daerah sebagai hasil dari implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta kesesuaiannya dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan Tahun 2025 menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada tahun bersangkutan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dan tolok ukur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya,

khususnya dalam perumusan program dan kegiatan RKPD agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama/indikator kinerja kunci sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Indikator kinerja yang digunakan meliputi: target kinerja capaian program RKPD, realisasi kinerja capaian program RKPD, persentase tingkat realisasi terhadap target, serta perkiraan capaian target program pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD/RPD). Analisis indikator kinerja tersebut disajikan dalam bentuk persentase dan ditelaah berdasarkan capaian kinerja program dan/atau keluaran (output) pada tahun n-2 dan tahun n-1, sehingga evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dilakukan dengan melihat kinerja dua tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah (OPD), terdapat kondisi di mana realisasi kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, melainkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor penghambat dan kendala yang dihadapi di lapangan, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus untuk meminimalkan kesenjangan antara target dan realisasi kinerja. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah pada periode selanjutnya. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.112 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Tulang Bawang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										353.648.196.439			354.758.273.386									
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYEDIAAN GAJIPENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAN TUNJANGAN ASN									278.919.359.518			280.395.162.532	91,68	256.307.973.716								
1	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100		1.115.677.438.072	100		475.691.124.563	100		278.919.359.518	-		280.395.162.532	91,68	256.307.973.716		91,41	191,68	731.999.098.279	191,68	65,61	
1	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	1.115.677.438.072	14	Bulan	475.691.124.563	14	Bulan	278.919.359.518	14	Bulan	280.395.162.532	14,00	256.307.973.716	100	91,41	28,00	731.999.098.279	50,00	65,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Peningkatan Jumlah Sekolah Kewenangan Kabupaten yang Berakreditasi minimal B Terwujudnya Wajib Belajar 9 Tahun									71.761.233.862			71.106.372.362	92,45	69.949.156.070				286.291.508.611			
1	1	2	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya DAK Bidang SD , Tersalurnya BOS SD ,Terlaksananya UN/US SD,Terlaksananya Pembagian PMTAS,Terlaksananya Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar,Terlaksananya Insentif Guru Honorer Sekolah Dasar,Terlaksananya Pembagian Laptop SD	100		268.726.618.976	100		120.872.429.078	100		41.518.628.612	100		41.367.229.112	98,25	40.642.522.100		98,25	198,25	161.514.951.178	198,25	60,10	
1	1	2	2,01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	120	Unit	74.817.748.000	5	Unit	34.878.216.128	30	Dokumen	185.425.000	6	Unit	109.075.000	150,00	20.860.000	2.500	19,12	155,00	34.899.076.128	129,17	46,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	120	Peserta Didik	2.314.000.000	10	Dokumen	579.068.300	30	Dokumen	578.500.000	1	Paket	577.900.500	-	152.655.300	-	26,42	10,00	731.723.600	8,33	31,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	750	Sekolah	6.216.305.000	10	Dokumen	18.190.600	30	Dokumen	80.900.000	30	Dokumen	80.900.000	194,00	8.544.000	647	10,56	204,00	26.734.600	27,20	0,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	120	Sekolah	176.311.663.028	212	Sekolah	83.576.040.000	30	Dokumen	40.124.218.500	212	Sekolah	40.124.218.500	220,00	40.071.106.000	104	99,87	432,00	123.647.146.000	360,00	70,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	2,01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	120	Dokumen	491.860.000	-	-	-	30	Dokumen	122.965.000	30	Dokumen	119.365.000	230,00	68.751.000	767	57,60	230,00	68.751.000	191,67	13,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi	120	Dokumen	1.446.480.448	15	Kecamatan	686.047.600	30	Dokumen	361.620.112	30	Dokumen	355.770.112	565,00	306.355.800	1.883	86,11	580,00	992.403.400	483,33	68,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	880	Dokumen	260.000.000	-	-	-	220	Dokumen	65.000.000	220	Dokumen	32.000.000	135,00	14.250.000	61	44,53	135,00	14.250.000	15,34	5,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang SMP,,Terlaksananya Beasiswa Siswa Miskin / Berprestasi (SMP),Terlaksananya Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Hijau,	100		127.369.396.400	100		80.918.102.162	100		21.969.022.500	100		21.511.160.500	99,54	21.413.184.970	100	99,54	199,54	102.331.287.132	199,54	80,34	
1	1	2	2,02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8	Unit	41.586.006.400	5	Unit	38.293.364.862	2	Unit	226.120.000	6	Unit	226.120.000	150,00	225.818.470	2.500,00	99,87	155,00	38.519.183.332	1937,50	92,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6	Unit	400.000.000	1	Unit	95.345.938	2	Unit	37.055.000	1	Unit	37.055.000	1,00	37.055.000	100,00	100,00	2,00	132.400.938	33,33	33,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	460	Peserta Didik	946.400.000	115	Peserta Didik	416.919.500	115	Peserta Didik	236.600.000	115	Peserta Didik	230.216.000	288,00	117.332.000	250,43	50,97	403,00	534.251.500	87,61	56,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	850	Peserta Didik	420.000.000	350	Peserta Didik	57.551.862	350	Peserta Didik	105.000.000	350	Peserta Didik	78.522.000	75,00	17.172.000	21,43	21,87	425,00	74.723.862	50,00	17,79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	848	Satuan Pendidikan	83.756.990.000	212	Satuan Pendidikan	41.754.920.000	212	Satuan Pendidikan	20.939.247.500	212	Satuan Pendidikan	20.939.247.500	97,00	21.015.807.500	45,75	100,37	309,00	62.770.727.500	36,44	74,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	2,02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya BOS SMP	20	Dokumen	1.440.000.000	-	-	-	5	Dokumen	360.000.000	5	Dokumen	334.500.000	5,00	318.000.000	100,00	95,07	5,00	318.000.000	25,00	22,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	876	Satuan Pendidikan	260.000.000	-	-	-	180	Satuan Pendidikan	65.000.000	180	Satuan Pendidikan	47.145.000	30,00	1.252.700	16,67	2,66	30,00	1.252.700	3,42	0,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan DAK Bidang Paud,Terlaksananya Sosialisasi SINERGI PAUD,Terlaksananya BOP PAUD TK Negeri dan TK Swasta	100		60.292.732.000	100		9.345.159.951	100		7.142.354.000	100		7.116.254.000	99,88	7.107.496.000	100	99,88	199,88	16.452.655.951	199,88	27,29	
1	1	2	2,03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	492	TK (Negeri dan Swasta)	9.378.176.000	246	TK (Negeri dan Swasta)	2.107.606.961	123	TK (Negeri dan Swasta)	1.048.115.000	246	TK (Negeri dan Swasta)	1.022.015.000	55,00	1.020.015.000	22,36	99,80	301,00	3.127.621.961	61,18	33,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20	Dokumen	24.376.956.000	-	-	-	5	Dokumen	6.094.239.000	246	TK (Negeri dan Swasta)	6.094.239.000	-	6.087.481.000	-	99,89	-	6.087.481.000	-	24,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
	1	2	2,03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya Management BOP PAUD	16	Dokumen	289.452.000	-	-	-	4	Dokumen	72.363.000	9.000	Peserta Didik	59.988.000	7.032,00	44.696.000	78,13	74,51	7.032,00	44.696.000	43.950,00	15,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**2**	**2,04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Terlaksananya BOP Kesetaraan ,dan Ujian Paket A,B, dan C**	**100**		**8.507.315.000**	**100**		**5.206.661.350**	**100**		**1.131.228.750**	**100**		**1.111.728.750**	**70,49**	**785.953.000**	**70**	**70,70**	**170,49**	**5.992.614.350**	**170,49**	**70,44**	
1	1	2	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16	Satuan Pendidikan	400.915.000	4	Satuan Pendidikan	83.776.950	4	Satuan Pendidikan	100.228.750	4	Satuan Pendidikan	80.728.750	18,00	64.253.000	450,00	79,59	22,00	148.029.950	137,50	36,92	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	20	Satuan Pendidikan	8.106.400.000	20	Satuan Pendidikan	5.117.600.000	5	Satuan Pendidikan	1.031.000.000	20	Satuan Pendidikan	1.031.000.000	18,00	721.700.000	90,00	70,00	38,00	5.839.300.000	190,00	72,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase jumlah guru honor murni yang menerima insentif jenjang pendidikan menengah dan khusus** **Tersalurnya Bantuan Pemenuhan Kualifikasi Akademik Pendidikan PAUD Kab.Tulang Bawang**									**2.917.603.059**			**3.221.906.492**	**96,75**	**3.026.587.548**				**11.241.789.678**			
1	**1**	**4**	**2,01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Terwujudnya bantuan Pendidikan S1 bagi Guru Paud**	**100**		**11.670.412.236**	**100**		**8.215.202.130**	**100**		**2.917.603.059**	**100**		**3.221.906.492**	**96,75**	**3.026.587.548**	**97**	**93,94**	**196,75**	**11.241.789.678**	**196,75**	**96,33**	
1	1	4	2,01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4	Dokumen	6.727.218.000	1	Dokumen	3.860.482.750	1	Dokumen	1.681.804.500	1	Dokumen	1.443.757.000	1,00	1.411.559.000	100,00	97,77	2,00	5.272.041.750	50,00	78,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	2,01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		60	Dokumen	4.943.194.236	15	Kecamatan	4.354.719.380	15	Kecamatan	1.235.798.559	15	Kecamatan	1.778.149.492	35,00	1.615.028.548	233,33	90,83	50,00	5.969.747.928	83,33	120,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Peningkatan Jumlah Sekolah yang memiiki Perizinan Pendidikan**									**50.000.000**			**34.832.000**	**25,01**	**12.503.000**			**25,01**	**127.302.800**			
1	**1**	**5**	**2,01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi DAPODIKDASMEN**	**100**		**1.528.500.000**	**100**		**114.799.800**	**100**		**50.000.000**	**100**		**34.832.000**	**25,01**	**12.503.000**	**25**	**35,90**	**125,01**	**127.302.800**	**125,01**	**8,33**	
1	1	5	2,01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3.180	Dokumen	1.400.000.000	1.590	Dokumen	50.549.800	795	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	34.832.000	1,00	12.503.000	100,00	35,90	1.591,00	63.052.800	50,03	4,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Didaftarkan**												**15.250.000**	**76,82**	**12.538.000**			**269**	**6.245.562.672**	**314**	**26.690**	
					Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	**Persentase cagar budaya terdaftar yang mendapatkan intervensi pelestarian (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan)**	**100**		**23400000**	**100**		**3.456.576.461**				**100**		**9.400.000**	**100,00**	**9.400.000**	**100**	**100,00**	**200,00**	**3.465.976.461**	**200,00**	**14.811,87**	
					Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4	Dokumen	1.360.256.500	1	Dokumen	680.128.250				1	Dokumen	9.400.000	1,00	9.400.000	100,00	100,00	2,00	689.528.250	50,00	50,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**	**60**		**23400000**	**15**	**Kecamatan**	**2.776.448.211**				**15**	**Kecamatan**	**5.850.000**	**53,64**	**3.138.000**	**358**	**53,64**	**68,64**	**2.779.586.211**	**114,40**	**11.878,57**	
					Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	32	Dokumen	23400000	8	Dokumen	64.250.000				1	Dokumen	5.850.000	1,00	3.138.000	100,00	53,64	9,00	67.388.000	28,13	287,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)			76,54						
																		Predikat Kinerja			T						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											

DINAS KESEHATAN																											
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**129.803.595.064**			**129.404.210.920**	**84,20**	**109.299.402.039**							
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Adanya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat daerah**									**56.524.128.682**			**51.558.752.620**	**43,33**	**42.934.341.780**				**133.798.147.154**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
1	**2**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**100**		**5.603.460.000**	**100**		**923.971.300**	**100**		**144.988.000**	**100**		**72.494.000**	**37,70**	**38.289.400**	**38**	**52,82**	**137,70**	**962.260.700**	**137,70**	**17,17**	
1	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	Dokumen	1.631.340.000	7	Dokumen	266.315.950	8	Dokumen	144.988.000	2	Dokumen	72.494.000	2	38.289.400	100,17	52,82	9,00	304.605.350	28,14	18,67	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**100**		**162.178.145.504**	**100**		**86.067.999.817**	**100**		**53.755.198.338**	**100**		**50.074.288.620**	**62,30**	**42.108.891.634**	**62**	**84,09**	**162,30**	**128.176.891.451**	**162,30**	**79,03**	
1	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	153.666.625.504	28	Bulan	82.331.327.957	14	Bulan	51.469.312.838	14	Bulan	48.193.688.620	26	40.380.495.134	183,09	83,79	53,63	122.711.823.091	95,77	79,86	Dinas Kesehatan
1	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16	Dokumen	8.511.520.000	8	Dokumen	3.736.671.860	4	Dokumen	2.285.885.500	4	Dokumen	1.880.600.000	21	1.728.396.500	522,30	91,91	28,89	5.465.068.360	180,57	64,21	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**100**		**12.402.449.376**	**100**		**3.871.834.257**	**100**		**2.623.942.344**	**100**		**1.411.970.000**	**30,00**	**787.160.746**	**30**	**55,75**	**130,00**	**4.658.995.003**	**130,00**	**37,57**	
1	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	12.402.449.376	4	Paket	3.871.834.257	2	Paket	2.623.942.344	3	Paket	1.411.970.000	6	787.160.746	204,30	55,75	10,13	4.658.995.003	126,61	37,57	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase terlaksananya program pememnuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**									**67.220.480.282**			**72.387.675.250**	**80,74**	**61.136.987.815**				**185.755.478.695**			
1	**2**	**2**	**2,01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya sarana, prasarana, obat dan vaksin, serta pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan**	**100**		**98.329.176.910**	**100**		**19.589.325.932**	**100**		**16.712.366.265**	**100**		**15.935.769.766**	**55,84**	**9.131.416.759**	**56**	**57,30**	**155,84**	**28.720.742.691**	**155,84**	**29,21**	
1	2	2	2,01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	Paket	13.207.710.530	2		3.019.947.472	44,06653	Paket	6.603.855.265	39	Paket	5.920.258.766	37	5.715.139.459	96,00	96,54	39,15	8.735.086.931	978,67	66,14	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	Paket	1.379.820.000	1	Unit	1.157.020.310	25	Paket	689.910.000	25	Paket	689.910.000	14	374.653.518	55,18	54,30	14,79	1.531.673.828	369,87	111,01	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	4	Paket	18.733.004.000	35	Paket	5.449.100.677	15	Paket	9.140.224.892	5	Paket	9.140.224.892	47	8.828.590.473	942,57	96,59	82,13	14.277.691.150	2.053,21	76,22	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	60	Paket	2.233.060.000	30	Paket	646.276.600	15	Paket	278.376.108	8	Paket	185.376.108	4	110.426.108	48,18	59,57	34,00	756.702.708	56,67	33,89	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya program pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**295.117.639.600**	**100**		**105.427.499.948**	**100**		**50.069.701.017**	**100**		**56.451.905.484**	**95,53**	**51.607.236.056**	**96**	**91,42**	**195,53**	**157.034.736.004**	**195,53**	**53,21**	
1	2	2	2,02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96	Orang	3.704.816.000	48	Orang	767.906.600	24	Orang	879.372.000	23	Orang	840.565.000	15	582.821.000	65,22	69,34	63,00	1.350.727.600	65,63	36,46	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12	Orang	3.266.720.000	9	Orang	897.910.200	3	Orang	103.165.000	2	Orang	51.582.500	-	4.981.000	-	9,66	9,00	902.891.200	75,00	27,64	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Orang	600.000.000	50	Orang	393.230.700	25	Orang	142.770.000	25	Orang	51.385.000	-	2.805.000	-	5,46	50,00	396.035.700	50,00	66,01	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80	Orang	746.276.000	40	Orang	191.830.400	20	Orang	150.339.000	20	Orang	55.169.500	-	3.275.000	-	5,94	40,00	195.105.400	50,00	26,14	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Orang	600.000.000	50	Orang	161.472.700	25	Orang	135.490.000	25	Orang	47.745.000	-	2.530.000	-	5,30	50,00	164.002.700	50,00	27,33	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88	Orang	588.360.000	75	Orang	313.154.000	22	Orang	130.255.000	22	Orang	65.127.500	1	9.576.000	5,40	14,70	76,19	322.730.000	86,58	54,85	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88	Orang	717.584.000	50	Orang	268.559.400	22	Orang	159.396.000	22	Orang	59.698.000	-	1.353.200	-	2,27	50,00	269.912.600	56,82	37,61	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Orang	600.000.000	15	Orang	276.319.900	25	Orang	133.050.000	25	Orang	56.525.000	5	21.902.600	18,04	38,75	19,51	298.222.500	19,51	49,70	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Orang	600.000.000	50	Orang	360.098.600	25	Orang	133.050.000	25	Orang	56.525.000	4	20.833.000	14,40	36,86	53,60	380.931.600	53,60	63,49	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	Orang	400.000.000	60	Orang	224.540.800	25	Orang	83.050.000	25	Orang	41.525.000	2	7.102.000	9,58	17,10	62,40	231.642.800	62,40	57,91	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	52	Orang	560.000.000	30	Orang	355.072.000	13	Orang	73.700.000	13	Orang	36.850.000	2	13.150.000	19,00	35,69	32,47	368.222.000	62,44	65,75	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72	Orang	568.000.000	35	Orang	177.343.400	18	Orang	105.250.000	18	Orang	52.625.000	3	15.025.000	16,35	28,55	37,94	192.368.400	52,70	33,87	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24	Dokumen	3.182.670.000	15	Dokumen	789.668.800	6	Dokumen	177.773.500	6	Dokumen	103.062.750	-	15.650.000	-	15,18	15,00	805.318.800	62,50	25,30	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	Dokumen	1.641.764.000	12	Dokumen	206.229.000	6	Dokumen	100.206.000	6	Dokumen	50.103.000	-	12.498.000	-	24,94	12,00	218.727.000	50,00	13,32	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	8.930.692.000	4	Dokumen	2.539.823.000	1	Dokumen	124.353.000	1	Dokumen	124.353.000	1	124.040.000	100,00	99,75	5,00	2.663.863.000	125,00	29,83	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28	Dokumen	1.463.600.000	15	Dokumen	231.589.900	7	Dokumen	101.100.000	3	Dokumen	50.550.000	2	34.550.000	68,41	68,35	17,05	266.139.900	60,90	18,18	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	80	Dokumen	616.800.000	40	Dokumen	773.392.300	20	Dokumen	599.771.050	39	Dokumen	1.051.712.800	31	828.115.800	80,12	78,74	71,20	1.601.508.100	89,00	259,65	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60	Dokumen	888.036.000	0	Dokumen	500.439.400	15	Dokumen	137.384.000	7	Dokumen	58.692.000	3	22.528.000	42,75	38,38	3,23	522.967.400	5,39	58,89	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
1	2	2	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	128	Dokumen	88.134.867.000	-	Dokumen	53.751.787.813	32	Dokumen	27.786.489.264	30	Dokumen	34.861.992.245	37	32.956.133.791	124,88	94,53	37,46	86.707.921.604	29,27	98,38	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	80	Dokumen	87.854.496.000	15	Dokumen	39.914.889.435	20	Dokumen	17.972.451.000	20	Dokumen	17.972.451.000	19	16.172.302.665	94,52	89,98	33,66	56.087.192.100	42,08	63,84	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28	Pkm	2.003.798.600	18	Pkm	787.306.000	7	Pkm	133.485.203	3	Pkm	55.865.189	2	48.333.000	80,40	86,52	20,11	835.639.000	71,83	41,70	Dinas Kesehatan
1	2	2	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	Dokumen	3.160.692.000	50	Dokumen	1.486.208.600	25	Dokumen	707.801.000	25	Dokumen	707.801.000	25	707.731.000	98,14	99,99	74,54	2.193.939.600	74,54	69,41	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	**2,03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan SIK secara terintegrasi**	**100**		**3.972.120.000**	**100**		**1.954.325.550**	**100**		**438.413.000**	**100**		**438.413.000**	**90,86**	**398.335.000**	**91**	**90,86**	**190,86**	**2.352.660.550**	**190,86**	**59,23**	
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50	Dokumen	3.972.120.000	20	Dokumen	1.954.325.550	11	Dokumen	438.413.000	11	Dokumen	438.413.000	7	398.335.000	61,06	90,86	26,72	2.352.660.550	53,43	59,23	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM**									**4.452.170.000**			**4.364.875.000**	**62,51**	**4.227.110.844**			**325**	**9.414.348.194**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
1	**2**	**3**	**2,02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Adanya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan**	**100**		**9.000.160.000**	**100**		**225.330.400**	**100**		**174.590.000**	**100**		**87.295.000**	**26,76**	**23.914.844**	**27**	**27,40**	**126,76**	**249.245.244**	**126,76**	**2,77**	
1	2	3	2,02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	44	Dokumen	1.527.360.000	20	Dokumen	225.330.400	11	Dokumen	174.590.000	11	Dokumen	87.295.000	2	23.914.844	14,23	27,40	21,57	249.245.244	49,01	16,32	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**	**2,03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya**				**100**		**4.961.906.950**	**100**		**4.277.580.000**	**100**		**4.277.580.000**	**98,26**	**4.203.196.000,00**	**98**	**98,26**	**198,26**	**9.165.102.950**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
1	2	3	2,03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.540	Orang	8.555.160.000	1.500	Orang	4.961.906.950	770	Orang	4.277.580.000	25	Orang	4.277.580.000	14	4.203.196.000	56,00	98,26	1.514,00	9.165.102.950	98,31	107,13	Dinas Kesehatan
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alkes, dan makanan minuman**									**71.467.500**			**35.733.750**	**10,31**	**7.367.500**				**36.456.500**			
1	**2**	**4**	**2,06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Adanya pemeriksaan post market pada produk dan sarana produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan**	**100**		**156.470.000**	**100**		**29.089.000**			**71.467.500,00**	**100**		**35.733.750**	**10,31**	**7.367.500**	**10**	**20,62**	**110,31**	**36.456.500**	**110,31**	**23,30**	
1	2	4	2,06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	25	Unit	156.470.000	5	Unit	29.089.000	40,00	Unit	71.467.500	22	Unit	35.733.750	5,20	7.367.500	23,66	20,62	10,20	36.456.500	40,82	23,30	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kecamatan yang menerapkan germas**									**1.535.348.600**			**1.057.174.300**	**67,62**	**993.594.100**				**4.696.272.250**			
1	**2**	**5**	**2,02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**	**100**		**5.201.208.000**	**100**		**2.761.329.300**	**100**		**994.981.600**	**100**		**597.490.800**	**59,86**	**587.580.800**	**60**	**98,34**	**159,86**	**3.348.910.100**	**159,86**	**64,39**	
1	2	5	2,02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	76	Dokumen	5.201.208.000	25	Dokumen	2.761.329.300	19	Dokumen	994.981.600	11	Dokumen	597.490.800	11,20	587.580.800	101,78	98,34	36,20	3.348.910.100	47,63	64,39	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**	**2,03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Adanya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**100**		**1.760.000.000**	**100**		**558.438.850**	**100**		**540.367.000**	**100**		**459.683.500**	**75,38**	**406.013.300**	**75**	**88,32**	**175,38**	**964.452.150**	**175,38**	**54,80**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
1	2	5	2,03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	124	Dokumen	1.760.000.000	60	Dokumen	558.438.850	31	Dokumen	540.367.000	26	Dokumen	459.683.500	22,00	406.013.300	84,62	88,32	82,00	964.452.150	66,13	54,80	Dinas Kesehatan
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				52,90							
															Predikat Kinerja				R							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
RSUD MENGGALA																											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										110.598.831.748			119.310.161.149									
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pemenuhan sarana yang memenuhi standar RS kelas b dan pemenuhan operasional perkantoran dan aparatur									31.598.831.748			32.702.189.147	86,88	27.700.712.828								
1	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional perkantoran dan aparatur	100		126.395.326.992	100		51.912.371.335	100		31.598.831.748	100		32.702.189.147	86,88	27.700.712.828	87	84,71	186,88	79.613.084.163	186,88	62,99	
1	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	89.131.786.992	28,00	Bulan	34.648.014.198	14	Bulan	22.282.946.748	14	Bulan	22.881.754.147	14,00	18.881.161.684	100,00	82,52	42,00	53.529.175.882	75,00	60,06	RSUD Menggala
1	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	Dokumen	37.263.540.000	4,00	Dokumen	17.264.357.137	2	Dokumen	9.315.885.000	12	Dokumen	9.820.435.000	12,00	8.819.551.144	100,00	89,81	16,00	26.083.908.281	200,00	70,00	RSUD Menggala
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terlaksananya program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat									79.000.000.000			86.607.972.002	90,49				90,49					
1	2	2	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100		40.000.000.000	100		6.449.528.071	100		20.000.000.000	100		20.000.000.000	85,70	17.139.725.697	86	85,70	185,70	23.589.253.768	185,70	58,97	
1	2	2	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		48	Bulan	40.000.000.000	24	Bulan	6.449.528.071	12	Bulan	20.000.000.000	12	Bulan	20.000.000.000	12,00	17.139.725.697	100,00	85,70	36,00	23.589.253.768	75,00	58,97	RSUD Menggala
1	2	2	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan publik yang mencapai target	100		236.000.000.000	100		138.435.490.927	100		59.000.000.000	100		66.607.972.002	95,28	58.387.376.231	95	87,66	195,28	196.822.867.158	195,28	83,40	
1	2	2	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4	Dokumen	236.000.000.000	9	Dokumen	138.435.490.927	1	Dokumen	59.000.000.000	1	Dokumen	66.607.972.002	1,00	58.387.376.231	100,00	87,66	10,00	196.822.867.158	250,00	83,40	RSUD Menggala
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				88,69							
															Predikat Kinerja				T							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										132.769.266.974			109.709.531.640									
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			54.613.631.333			17.112.429.312			9.580.576.297			11.005.986.770	89,74	8.909.176.073				26.021.605.385			
1	3	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		36.934.512.364	100		16.761.530.638	100		9.580.576.297	100		11.005.986.770	89,74	8.909.176.073	90	80,95	189,74	25.670.706.711	189,74	69,50	
1	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	356	Orang	36.503.499.864	14	Bulan	16.755.130.638	89	Orang	9.580.576.297	102	Orang	11.005.986.770	392,00	8.909.176.073	384,31	80,95	406,00	25.664.306.711	114,04	70,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dan infrastruktur SDA lainnya yang terlayani pada wilayah kewenangan kabupaten									20.237.000.000			8.087.183.800	81,97	7.143.737.105			81,97	26.668.152.007			
1	3	2	2,01	75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan																					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
1	3	2	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100		49.307.825.690	100		19.496.652.702	100		20.237.000.000	100		8.087.183.800	81,97	7.143.737.105	82	88,33	181,97	26.640.389.807	181,97	54,03	
1	3	2	2,02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	Km	1.465.442.500	2	Km	107.314.500	2	Km	8.300.000.000	1	Km	8.087.183.800	4,00	7.143.737.105	400,00	88,33	6,00	7.251.051.605	300,00	494,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kesesuaian realisasi dengan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang ada									8.322.706.000			8.322.706.000	88,63	7.376.756.451			88,63	7.814.218.187			
1	3	3	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100		37.074.191.016	100		437.461.736			8.322.706.000	100		8.322.706.000	88,63	7.376.756.451	89	88,63	188,63	7.814.218.187	188,63	21,08	
1	3	3	2,01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	400	SR	6.292.782.500	100	SR	258.160.336	50	SR	8.322.706.000	10	SR	8.322.706.000	20,00	7.376.756.451	200,00	88,63	120,00	7.634.916.787	30,00	121,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase penanganan cakupan rumah tangga bersanitasi layak									1.249.355.000			1.249.355.000	99,93	1.248.540.750			99,93	7.158.856.457			
1	3	5	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100		25.676.993.260	100		5.910.315.707	100		1.249.355.000	100		1.249.355.000	99,93	1.248.540.750	100	99,93	199,93	7.158.856.457	199,93	27,88	
1	3	5	2,01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	400	Rumah Tangga	12.311.216.924			-	100	Rumah Tangga	1.249.355.000	100	Rumah Tangga	1.249.355.000	98,00	1.248.540.750	98,00	99,93	98,00	1.248.540.750	24,50	10,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kualitas bangunan gedung kabupaten dan lingkungannya yang sesuai standar									16.441.718.630			17.466.888.855	77,09	13.112.138.817			77,09	15.500.027.962			
1	3	8	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100		131.487.343.424	100		2.387.889.145	100		16.441.718.630	100		17.466.888.855	77,09	13.112.138.817	77,09	75,07	177,09	15.500.027.962	177,09	11,79	
1	3	8	2,01	4	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8	Dokumen	70.838.242.720	-	-	-	2	Dokumen	16.441.718.630	2	Dokumen	17.466.888.855	7,00	13.112.138.817	350,00	75,07	7,00	13.112.138.817	87,50	18,51	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase penataan bangunan dan lingkungannya									14.633.780.500			6.385.967.600	51,60	4.170.059.858			51,60				
1	3	9	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100		42.670.237.500	100		1.510.033.423	100		14.633.780.500	100		6.385.967.600	51,60	4.170.059.858	51,60	65,30	151,60	5.680.093.281	151,60	13,31	
1	3	9	2,01	8	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	20	Kawasan	58.535.122.000			-	5	Kawasan	14.633.780.500	5	Kawasan	6.385.967.600	5,00	4.170.059.858	100,00	65,30	5,00	4.170.059.858	25,00	7,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	panjang jalan dalam kondisi mantap									62.304.130.547			57.191.443.615	86,01	50.274.593.757			86,01				
1	3	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100		370.814.186.652	100		147.403.640.778	100		62.304.130.547	100		57.191.443.615	86,01	50.274.593.757	86,01	87,91	186,01	197.678.234.535	186,01	53,31	
1	3	10	2,01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	22	Dokumen	2.586.075.000	11	Dokumen	1.044.266.066	5	Dokumen	935.926.056	5	Dokumen	1.923.466.660	25,00	688.308.958	500,00	35,78	36,00	1.732.575.024	163,64	67,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2,01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	4	Km	35.823.603.939	6	Km	40.882.272.724	3,5	Km	6.499.694.991	3,5	Km	6233938987	3,50	6.169.353.296	100,00	98,96	9,50	47.051.626.020	223,53	131,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2,01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	9	Km	43.101.250.000	16	Km	49.328.931.328	4,5	Km	32.856.835.000	4,5	Km	29.444.668.318	8,50	26.433.559.755	188,89	89,77	24,50	75.762.491.083	287,90	175,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2,01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	18	Km	163.138.231.250	20	Km	29.763.186.958	8	Km	18.056.121.100	8	Km	12.173.081.000	4,50	9.965.920.225	56,25	81,87	24,50	39.729.107.183	134,39	24,35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6	Km	23.052.703.563	2	Km	82.266.500	2,5	Km	419.193.400	2,5	Km	3.789.513.650	4,05	3.760.228.563	162,00	99,23	6,05	3.842.495.063	99,51	16,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2,01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	30	M	19.826.575.000	33	M	8.206.439.713	48	M	3.536.360.000	48	M	3.626.775.000	2,00	3.257.222.960	4,17	89,81	35,00	11.463.662.673	116,67	57,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				82,14							
															Predikat Kinerja				T							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										5.561.376.893			-								

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersusunnya Rencana dan Pelaporan Kinerja OPD**									**4.134.317.693**			-	**86,26**	**3.422.210.508**							
1	**4**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**100**		**1.250.000.000**	**100**		**336.368.200**	**100**		**217.993.400**			-	**92,31**	**201.231.000**	**92,31**	**92,31**	**192,31**	**537.599.200**	**192,31**	**43,01**	
1	4	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10	Dokumen	550.000.000	5	Dokumen	191.563.800	2	Dokumen	116.550.000				2,00	104.631.000	100,00	89,77	7,00	296.194.800	70,00	53,85	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Laporan	500.000.000	10	Laporan	144.804.400	5	Dokumen	101.443.400				2,00	96.600.000	40,00	95,23	12,00	241.404.400	48,00	48,28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**13.090.513.320**	**100**		**5.048.674.536**	**100**		**2.834.189.909**			-	**76,88**	**2.178.842.330**	**76,88**	**76,88**	**176,88**	**7.227.516.866**	**176,88**	**55,21**	
1	4	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bulan	12.056.263.320	170	Orang Per Bulan	4.620.574.536	170	Orang Per Bulan	2.593.189.909				510,00	2.006.842.330	300,00	77,39	680,00	6.627.416.866	971,43	54,97	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70	Bulan	1.034.250.000	70	Bulan	428.100.000	14	Bulan	241.000.000				9,00	172.000.000	64,29	71,37	79,00	600.100.000	112,86	58,02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**12.028.794.500**	**100**		**3.719.635.118**	**100**		**908.670.184**			-	**99,07**	**900.219.000**	**99,07**	**99,07**	**199,07**	**4.619.854.118**	**199,07**	**38,41**	
1	4	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	52	Paket	689.550.000	25	Paket	352.485.050	5	Paket	166.647.250				4,00	166.356.900	80,00	99,83	29,00	518.841.950	55,77	75,24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	164	Paket	4.048.425.500	77	Paket	1.195.585.468	35	Paket	200.154.234				21,00	200.100.000	60,00	99,97	98,00	1.395.685.468	59,76	34,47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	56	Paket	4.186.926.000	27	Paket	1.260.599.900	9	Paket	190.569.700				6,00	189.892.100	66,67	99,64	33,00	1.450.492.000	58,93	34,64	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	177.822.000	1	Laporan	27.200.000	1	Laporan	131.250.000				-	131.250.000	-	100,00	1,00	158.450.000	25,00	89,11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	Laporan	2.151.071.000	114	Laporan	792.036.700	60	Laporan	220.049.000				55,15	212.620.000	91,92	96,62	169,15	1.004.656.700	70,48	46,70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**1.192.981.170**	**100**		**295.978.832**	**100**		**105.409.200**			-	**82,91**	**87.392.000**	**82,91**	**82,91**	**182,91**	**383.370.832**	**182,91**	**32,14**	
1	4	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	Laporan	170.936.170	4	Laporan	44.308.532	1	Laporan	23.329.200				1,00	10.762.000	100,00	46,13	5,00	55.070.532	62,50	32,22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	1.022.045.000	35	Laporan	251.670.300	15	Laporan	82.080.000				12,00	76.630.000	80,00	93,36	47,00	328.300.300	65,28	32,12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**100**		**2.185.421.500**	**100**		**136.148.855**	**100**		**68.055.000**			-	**80,12**	**54.526.178**	**80,12**	**80,12**	**180,12**	**190.675.033**	**180,12**	**8,72**	
1	4	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	Unit	840.506.500	4	Unit	89.760.855	5	Unit	48.035.000				3,00	34.676.178	60,00	72,19	7,00	124.437.033	17,50	14,81	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	4	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	1.344.915.000	1	Unit	46.388.000	2	Unit	20.020.000				1,00	19.850.000	50,00	99,15	2,00	66.238.000	12,50	4,93	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase peningkatan rumah layak huni di Kabupaten Tulang Bawang**									**30.000.000**			-	**90,25**	**27.600.000**							
1	**4**	**2**	**2,01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program**	**100**		**160.000.000**			**71.750.000**	**100**		**20.000.000**			-	**95,50**	**19.100.000**	**95,50**	**95,50**	**95,50**	**90.850.000**	**95,50**	**56,78**	
1	4	2	2,01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	4	Dokumen	160.000.000	3	Dokumen	71.750.000	2	Dokumen	20.000.000				1,00	19.100.000	50,00	95,50	4,00	90.850.000	100,00	56,78	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**2**	**2,02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**100**		**160.000.000**			-	**100**		**10.000.000**				**85,00**	**8.500.000**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**8.500.000**	**85,00**	**5,31**	
1	4	2	2,02	5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4	Dokumen	160.000.000	-		-	2	Dokumen	10.000.000			-	1,00	8.500.000	50,00	85,00	1,00	8.500.000	25,00	5,31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pengendalian kawasan permukiman**									**78.788.000**			-	**96,05**	**75.300.000**			**96,05**				
1	**4**	**3**	**2,01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**100**		**200.000.000**	**100**		**345.602.200**	**100**		**58.688.000**			-	**95,08**	**55.800.000**	**95,08**	**95,08**	**195,08**	**401.402.200**	**195,08**	**200,70**	
1	4	3	2,01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	4	Laporan	200.000.000	3	Laporan	345.602.200	2	Laporan	58.688.000				1,00	55.800.000	50,00	95,08	4,00	401.402.200	100,00	200,70	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
1	**4**	**3**	**2,03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**100**		**2.125.000.000**	**100**		**74.211.800**	**100**		**20.100.000**			**-**	**97,01**	**19.500.000**	**97,01**	**97,01**	**197,01**	**93.711.800**	**197,01**	**4,41**	
1	4	3	2,03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	Laporan	750.000.000	3	Laporan	74.211.800	2	Laporan	20.100.000				1,00	19.500.000	50,00	97,01	4,00	93.711.800	100,00	12,49	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase revitalisasi kawasan kumuh**									**1.318.271.200**			**-**	**70,50**	**929.400.000**			**70,50**				
1	**4**	**4**	**2,01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Permukiman Kumuh di Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki**	**100**		**7.356.328.000**	**100**		**1.753.648.250**	**100**		**1.318.271.200**			**-**	**70,50**	**929.400.000**	**70,50**	**70,50**	**170,50**	**2.683.048.250**	**170,50**	**36,47**	
1	4	4	2,01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	376	Unit	5.300.000.000	94	Unit	1.753.648.250	2	Unit	804.189.200				1,00	804.030.000	50,00	99,98	95,00	2.557.678.250	25,27	48,26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		85,76						
																		Predikat Kinerja		T						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																											
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**13.135.059.700**			**11.772.250.631**		**10.384.665.208**							
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerimtahan daerah**									**12.812.126.700**			**11.510.473.631**	**61,91**	**10.288.402.708**			**146,17**	**4.763.573.362**			
1	**5**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**100**		**125.000.000**	**71**		**12.631.000**	**100**		**25.000.000**	**100**		**3.721.000**	**80,38**	**2.991.000**	**80,38**	**80,38**	**151,38**	**15.622.000**	**151,38**	**12,50**	
1	5	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	125.000.000	6	Laporan	12.631.000	100	Laporan	25.000.000	100	Laporan	3.721.000	5,00	2.991.000	5,00	80,38	11,00	15.622.000	55,00	12,50	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya penatausahaan keuangan**	**95**		**47.797.233.060**	**92**		**19.435.548.544**	**100**		**11.881.511.200**	**100**		**10.653.877.831**	**85,84**	**9.847.763.490**	**85,84**	**92,43**	**177,64**	**29.283.312.034**	**186,99**	**61,27**	
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ Bulan	18.191.433.060	35	Orang/ Bulan	6.572.778.544	35	Orang/ Bulan	5.089.396.200	35	Orang/ Bulan	4.053.522.831	35,00	3.529.478.490	100,00	87,07	70,00	10.102.257.034	200,00	55,53	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	Dokumen	29.605.800.000	4	Dokumen	12.862.770.000	2	Dokumen	6.792.115.000	2	Dokumen	6.600.355.000	2,00	6.318.285.000	100,00	95,73	6,00	19.181.055.000	75,00	64,79	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melakukan tugas jabatannya**	**64**		**790.000.000**	**63**		**250.894.600**	**62**		**287.000.000**	**100**		**309.875.000**	**6,78**	**19.640.000**	**6,78**	**6,34**	**69,78**	**270.534.600**	**109,88**	**34,24**	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	150.000.000				1	Orang	26.525.000	1	Orang	24.875.000	2,00	19.640.000	200,00	78,95	2,00	19.640.000	40,00	13,09	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**742.418.750**	**87**		**206.220.419**	**100**		**156.213.900**	**100**		**89.195.200**	**44,73**	**56.178.000**	**44,73**	**62,98**	**131,23**	**262.398.419**	**131,23**	**35,34**	
1	5	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	162.068.750	2	Paket	44.675.700	1	Paket	31.373.900	1	Paket	24.325.200	2,00	8.128.000	200,00	33,41	4,00	52.803.700	100,00	32,58	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	514.350.000	2	Laporan	161.544.719	1	Laporan	124.840.000	1	Laporan	64.870.000	2,00	48.050.000	200,00	74,07	4,00	209.594.719	100,00	40,75	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**159.479.700**	**100**		**61.777.700**			**54.026.500**	**100**		**59.786.500**	**64,33**	**38.459.500**	**64,33**	**64,33**	**164,33**	**100.237.200**	**164,33**	**62,85**	
1	5	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	159.479.700	51	Unit	61.777.700	5	Unit	54.026.500	5	Unit	59.786.500	5,00	38.459.500	100,00	64,33	56,00	100.237.200	280,00	62,85	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**837.755.300**	**98**		**236.568.504**	**100**		**138.435.100**	**100**		**124.078.100**	**62,46**	**83.539.396**	**62,46**	**67,33**	**159,96**	**320.107.900**	**159,96**	**38,21**	
1	5	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	339.900.000	1	Laporan	48.915.000			-			-	-	-			1,00	48.915.000	25,00	14,39	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	304.573.000	4	Laporan	106.779.506	1	Laporan	65.000.000	1	Laporan	65.000.000	1,00	50.150.096	100,00	77,15	5,00	156.929.602	125,00	51,52	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	193.282.300	2	Laporan	80.873.998	1	Laporan	73.435.100	1	Laporan	59.078.100	1,00	33.389.300	100,00	56,52	3,00	114.263.298	75,00	59,12	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah**	**98**		**986.290.000**	**80**		**202.860.977**	**80**		**269.940.000**	**80**		**269.940.000**	**88,85**	**239.831.322**	**111,06**	**88,85**	**168,85**	**442.692.299**	**172,29**	**44,88**	
1	5	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	Unit	986.290.000	12	Unit	202.860.977	9	Unit	269.940.000	9	Unit	269.940.000	21,00	239.831.322	233,33	88,85	33,00	442.692.299	91,67	44,88	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditingkatkan									322.933.000			261.777.000	25,30	96.262.500			75,20	31.950.000			
1	5	2	2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Kenyamanan)	90		3.885.000.000	90		1.381.010.000	90		180.000.000	90	Persen	189.470.000	50,18	95.952.500	55,75	50,64	140,18	1.476.962.500	155,75	38,02	
1	5	2	2,01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen	920.000.000	-		-						63.670.000	1,00	20.652.500		32,44	1,00	20.652.500	25,00	2,24	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2,01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	530	Laporan	1.065.000.000	245	Laporan	685.290.000	130	Laporan	130.000.000	2	Laporan	125.800.000	12,00	75.300.000	600,00	59,86	257,00	760.590.000	48,49	71,42	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	85		1.472.680.000	85		42.241.800	85		120.000.000	85		72.307.000	0,43	310.000	0,50	0,43	85,43	42.551.800	100,50	2,89	
1	5	2	2,02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	8	Laporan	472.680.000	2	Laporan	20.661.800	2	Laporan	50.000.000	2	Laporan	35.717.000	2,00	310.000	100,00	0,87	4,00	20.971.800	50,00	4,44	Satuan Polisi Pamong Praja
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				43,61							
															Predikat Kinerja				SR							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										4.411.907.165			4.630.207.434									
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pencapaian penunjang urusan pemerintah									3.148.317.165			3.499.157.434	91,61	2.963.104.887				8.761.741.793			
1	5	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran keuangan perangkat daerah	100		14.844.743.824	100		5.798.636.906	100		3.148.317.165	100		3.499.157.434	91,61	2.963.104.887	91,61	84,68	191,61	8.761.741.793	191,61	59,02	
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	12.387.463.824	14	Bulan	5.768.686.906	30	Orang	3.148.317.165	32	Orang	3.499.157.434	122,00	2.963.104.887	381,25	84,68	136,00	8.731.791.793	242,86	70,49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase upaya penanggulangan bencana yang terlaksana mencakup prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana									1.263.590.000			1.131.050.000	76,15	925.541.176				3.214.973.590			
1	5	3	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100		1.626.945.600	100		2.289.432.414	100		1.263.590.000	100		1.131.050.000	76,15	925.541.176	76,15	81,83	176,15	3.214.973.590	176,15	197,61	
1	5	3	2,02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	48	Orang	150.627.200	12	Orang	2.289.432.414	150	Orang	1.263.590.000	150	Orang	1.131.050.000	600,00	925.541.176	400,00	81,83	612,00	3.214.973.590	1.275,00	2.134,39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				83,88							
															Predikat Kinerja				T							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										5.444.007.008			5.443.047.818									
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serta Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									2.971.366.008			2.792.642.318	84,39	2.507.585.579							
1	5	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100		9.260.295.236	100		5.042.708.691	100		2.971.366.008	100		2.792.642.318	84,39	2.507.585.579	84,39	89,79	184,39	7.550.294.270	184,39	81,53	
1	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	56	Bulan	9.260.295.236	14	Bulan	2.437.220.461	14	Bulan	2.971.366.008	14	Bulan	2.792.642.318	14,00	2.507.585.579	100,00	89,79	28,00	4.944.806.040	50,00	53,40	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase upaya penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran									2.472.641.000			2.650.405.500	96,41	2.383.772.457							
1	5	4	2,04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100		540.000.000	100		4.336.117.348	100		2.472.641.000	100		2.650.405.500	96,41	2.383.772.457	96,41	89,94	196,41	6.719.889.805	196,41	1.244,42	
1	5	4	2,04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	660	Orang	540.000.000	300	Orang	4.336.117.348	150	Orang	2.472.641.000	150	Orang	2.650.405.500	150,00	2.383.772.457	100,00	89,94	450,00	6.719.889.805	68,18	1.244,42	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				90,40							
															Predikat Kinerja				T							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
DINAS SOSIAL																												
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										9.054.503.416			8.354.658.608										
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									3.598.212.016			3.403.836.408	88,39	3.134.216.053								
1	6	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyedian gaji dan tunjangan ASN	100		13.640.620.448	100		5.790.428.926	100		3.598.212.016	100		3.403.836.408	88,39	3.134.216.053	88,39	92,08	188,39	8.924.644.979	188,39	65,43	
1	6	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	13.579.520.448	14	Bulan	5.775.153.926	25	Orang	3.598.212.016	25	Orang	3.403.836.408	100,00	3.134.216.053	400,00	92,08	114,00	8.909.369.979	203,57	65,61	Dinas Sosial
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya									5.456.291.400			4.950.822.200	71,96	2.541.011.600								
1	6	4	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Lansia/Disabilitas dan anak yatim	100		19.633.651.600	100		6.118.498.988	100		4.680.401.400	100		3.118.319.000	25,12	964.415.400	25,12	30,93	125,12	7.082.914.388	125,12	36,08	
1	6	4	2,01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	400	Orang	4.629.723.600	93	Orang	2.270.468.197	80	Orang	1.084.549.400	90	Orang	846.595.000	80,00	724.401.900	88,89	85,57	173,00	2.994.870.097	43,25	64,69	Dinas Sosial
1	6	4	2,01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.180	Orang	13.266.800.000	483	Orang	3.379.299.400	245	Orang	3.201.570.000	245	Orang	2.008.172.000	165,00	115.297.000	67,35	5,74	648,00	3.494.596.400	10,49	26,34	Dinas Sosial
1	6	4	2,01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		60	Kecamatan	1.737.128.000	15	Kecamatan	468.731.391	15	Kecamatan	394.282.000	15	Kecamatan	263.552.000	60,00	124.716.500	400,00	47,32	75,00	593.447.891	125,00	34,16	
1	6	4	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100		3.393.560.000	100		1.539.218.900	100		775.890.000	100		1.832.503.200	118,81	1.576.596.200	118,81	86,04	218,81	3.115.815.100	218,81	91,82	
1	6	4	2,02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		60	Kecamatan	3.393.560.000	11	Kecamatan	1.539.218.900	15	Kecamatan	775.890.000	15	Kecamatan	1.832.503.200	60,00	1.576.596.200	400,00	86,04	71,00	3.115.815.100	118,33	91,82	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				80,18								
															Predikat Kinerja				T								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										4.735.603.546			4.591.882.030										
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	tersedianya dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi									3.347.786.828			3.386.857.312	94,43	3.170.728.128								
2	7	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	100		13.097.533.324	100		5.725.745.118	100		3.347.786.828	100		3.386.857.312	94,43	3.170.728.128	94,43	93,62	194,43	8.896.473.246	194,43	67,92	
2	7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	56	Bulan	11.687.413.324	14	Bulan	5.712.045.118	14	Bulan	3.347.786.828	14	Bulan	3.386.857.312	14,00	3.170.728.128	100,00	93,62	28,00	8.882.773.246	50,00	76,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kerja dan produktivitas bersertifikat									865.635.918			732.446.518	83,27	669.253.682			83,27					
2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan berdasarkan unit kompetensi	100		3.120.092.600	100		1.113.841.004	100		467.039.354	100		374.842.854	81,84	347.546.182	81,84	92,72	181,84	1.461.387.186	181,84	46,84	
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80	Orang	1.663.292.600	20	Orang	690.574.850	32	Orang	334.870.000	32	Orang	277.881.000	128,00	263.761.000	400,00	94,92	148,00	954.335.850	185,00	57,38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	2,01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		20	Unit	1.056.800.000	5	Unit	423.266.154	15	Unit	132.169.354	15	Unit	96.961.854	11,00	83.785.182	73,33	86,41	16,00	507.051.336	80,00	47,98	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	3	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		100		1.233.717.216			461.946.656			398.596.564	100		357.603.664	84,70	321.707.500	84,70	89,96	84,70	783.654.156	84,70	63,52	
2	7	3	2,02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		20	Lembaga	1.233.717.216	5	Lembaga	461.946.656	5	Lembaga	398.596.564	5		357.603.664	5,00	321.707.500	100,00	89,96	10,00	783.654.156	50,00	63,52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase kenaikan tenaga kerja yang mendapat layanan penempatan									-			-	-				-					
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Hubungan Industrial yang Ditangani	200		- 2.268.480.000	-		-	200		245.000.000			245.000.000	47,49	116.345.200			47,49					

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	7	5	2,01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran yang terkait hubungan industrial**	**100**		**500.000.000**			**-**	**100**		**245.000.000**	**100**		**245.000.000**	**47,49**	**116.345.200**	**47,49**	**47,49**	**47,49**	**116.345.200**	**47,49**	**23,27**	
2	7	5	2,01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengeshan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan	60	Perusahaan	500.000.000				1	Dokumen	245.000.000	1000	Orang	245.000.000	2,00	116.345.200	0,20	47,49	2,00	116.345.200	3,33	23,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																						
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																						
3	**32**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Tulang Bawang**									**277.180.800**			**227.578.200**	**81,62**	**208.511.500**							
3	**32**	**4**	**2,01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Meningkatnya pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian**	**100**		**1.200.000.000**	**100**		**502.637.180**	**100**		**277.180.800**	**100**		**227.578.200**	**81,62**	**208.511.500**	**81,62**	**91,62**	**181,62**	**711.148.680**	**181,62**	**59,26**	
3	32	4	2,01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah kepala keluarga transmigran yang dibina	80	Keluarga	600.000.000	40	Keluarga	502.637.180	20	Kepala Keluarga	277.180.800	20	Kepala Keluarga	227.578.200	80,00	208.511.500	400,00	91,62	120,00	711.148.680	150,00	118,52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**76,70**							
															Predikat Kinerja				**T**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										**4.427.361.206**			**-**								
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah**									**2.788.596.206**			**-**	**67,33**	**1.877.460.560**				**7.228.940.635**			
2	**8**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya penatausahaan keuangan**	**100**		**11.162.984.824**	**100**		**5.351.480.075**	**100**		**2.788.596.206**	**100**		**-**	**67,33**	**1.877.460.560**	**67,33**	**67,33**	**167,33**	**7.228.940.635**	**167,33**	**64,76**	
2	8	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	11.154.384.824	14	Bulan	5.349.330.075	14	Bulan	2.788.596.206				11,00	1.877.460.560	78,57	67,33	25,00	7.226.790.635	44,64	64,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	8.600.000	1	Dokumen	2.150.000							-	-			1,00	2.150.000	25,00	25,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Kecamatan yang Melaksanakan PUG**									**950.514.500**			**-**	**28,66**	**316.790.110**			**28,66**	**1.649.169.610**			
2	**8**	**2**	**2,02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pembinaan terhadap Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**1.353.298.000**	**100**		**356.073.100**	**100**		**338.324.500**	**100**		**-**	**12,47**	**42.200.500**	**12,47**	**12,47**	**112,47**	**398.273.600**	**112,47**	**29,43**	
2	8	2	2,02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Organisasi Wanita	1.353.298.000	10	Organisasi Wanita	356.073.100	5	Organisasi wanita	338.324.500				15,00	42.200.500	300,00	12,47	25,00	398.273.600	125,00	29,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**2**	**2,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan**		**100**		**3.905.225.600**	**100**		**976.306.400**			**612.190.000**	**100**		**-**	**44,85**	**274.589.610**	**44,85**	**44,85**	**144,85**	**1.250.896.010**	**144,85**	**32,03**	
2	8	2	2,03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan		264	Organisasi	379.875.200	66	Orgamisasi	94.968.800	33	OPD	74.000.000				99,00	11.564.000	300,00	15,63	165,00	106.532.800	62,50	28,04	
2	8	2	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan		8	Dokumen	3.525.350.400	2	Dokumen	881.337.600	1	Dokumen	538.190.000				1,00	263.025.610	100,00	48,87	3,00	1.144.363.210	37,50	32,46	
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**									**318.005.750**			**-**	**61,66**	**170.181.150**			**61,66**	**945.909.850**			
2	**8**	**3**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan pengetahuan ASN dan masyarakat terhadap pencegahan kekerasan perempuan**	**100**		**643.043.000**	**100**		**325.017.800**	**100**		**160.760.750**	**100**		**-**	**84,63**	**136.048.150**	**84,63**	**84,63**	**184,63**	**461.065.950**	**184,63**	**71,70**	
2	8	3	2,01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	406.000.000	2	Dokumen	201.312.000	1	Dokumen	101.500.000				1,00	101.500.000	100,00	100,00	3,00	302.812.000	75,00	74,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2,01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	OPD	237.043.000	2	OPD	123.705.800	1	Dokumen	59.260.750				1,00	34.548.150	100,00	58,30	3,00	158.253.950	75,00	66,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	**8**	**3**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan**	**100**		**352.900.000**	**100**		**314.236.500**	**100**		**88.225.000**	**100**		**-**	**38,69**	**34.133.000**	**38,69**	**38,69**	**138,69**	**348.369.500**	**138,69**	**98,72**	
2	8	3	2,02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Layanan	352.900.000	64	Layanan	314.236.500	30	Layanan	88.225.000				30,00	34.133.000	100,00	38,69	94,00	348.369.500	78,33	98,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga**									**29.406.000**			**-**	**36,67**	**10.783.000**			**36,67**	**91.097.900**			
2	**8**	**4**	**2,01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**100**		**117.624.000**	**100**		**80.314.900**	**100**		**29.406.000**	**100**		**-**	**36,67**	**10.783.000**	**36,67**	**36,67**	**136,67**	**91.097.900**	**136,67**	**77,45**	
2	8	4	2,01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak		60	Kecamatan	117.624.000	15	Kecamatan	80.314.900	15	Kecamatan	29.406.000				15,00	10.783.000	100,00	36,67	30,00	91.097.900	50,00	77,45	
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kecamatan yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak**									**132.311.000**			**-**	**79,37**	**105.012.100**			**79,37**	**679.192.290**			
2	**8**	**6**	**2,01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha**	**100**		**529.244.000**	**100**		**574.180.190**	**100**		**132.311.000**	**100**		**-**	**79,37**	**105.012.100**	**79,37**	**79,37**	**179,37**	**679.192.290**	**179,37**	**128,33**	
2	8	6	2,01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	120	OPD	529.244.000	1	OPD	574.180.190	30	OPD	132.311.000				90,00	105.012.100	300,00	79,37	91,00	679.192.290	75,83	128,33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**persentasen penurunan kasus kekerasan terhadap anak**									**208.527.750**			**-**	**44,82**	**94.791.000**			**44,82**	**258.700.200**			
2	**8**	**7**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatkan pengetahuan ASN dan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak**	**100**		**655.636.800**	**100**		**163.909.200**	**100**		**66.612.750**	**100**		**-**	**43,07**	**28.691.000**	**43,07**	**43,07**	**143,07**	**192.600.200**	**143,07**	**29,38**	
2	8	7	2,01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		4	Dokumen	655.636.800	2	Dokumen	163.909.200	5	Dokumen	66.612.750				4,00	28.691.000	80,00	43,07	6,00	192.600.200	150,00	29,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**7**	**2,02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak**	**100**		**567.660.000**	**-**		**-**	**100**		**141.915.000**	**100**		**-**	**46,58**	**66.100.000**	**46,58**	**46,58**	**46,58**	**66.100.000**	**46,58**	**11,64**	
					Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan terhadap anak korban kekerasan	48	Layanan	567.660.000				12	Layanan	141.915.000				11,00	66.100.000	91,67	46,58	11,00	66.100.000	22,92	11,64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**53,08**						
																		Predikat Kinerja		**B**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS KETAHANAN PANGAN																											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										**4.183.840.793**			**-**									
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**									**3.822.214.793**			**-**	**54,89**	**2.592.104.128**							
2	**9**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran**	**100**		**14.250.280.320**	**100**		**6.221.262.371**	**100**		**3.562.570.080**	**100**		**-**	**69,11**	**2.462.224.713**	**69,11**	**69,11**	**169,11**	**8.683.487.084**	**169,11**	**60,94**	
2	9	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	13.380.280.320	28	Bulan	5.775.262.371	14	Bulan	3.345.070.080				11,00	2.311.474.713	78,57	69,10	39,00	8.086.737.084	69,64	60,44	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52	Dokumen	870.000.000	27	Dokumen	446.000.000	13	Dokumen	217.500.000				9,00	150.750.000	69,23	69,31	36,00	596.750.000	69,23	68,59	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**357.809.884**	**100**		**146.894.350**	**100**		**49.492.471**	**100**		**-**	**47,39**	**23.452.800**	**47,39**	**47,39**	**147,39**	**170.347.150**	**147,39**	**47,61**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	9	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	Paket	101.494.000	8	Paket	34.962.600	4	Paket	25.373.500				2,00	8.360.000	50,00	32,95	10,00	43.322.600	62,50	42,68	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4	Paket	16.875.884	2	Paket	11.061.750	1	Paket	4.218.971				1,00	2.392.800	100,00	56,72	3,00	13.454.550	75,00	79,73	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	Bulan	36.000.000			-	12	Bulan	9.000.000				6,00	8.340.000	50,00	92,67	6,00	8.340.000	12,50	23,17	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	43.600.000	14	Laporan	60.910.000	7	Laporan	10.900.000				3,00	4.360.000	42,86	40,00	17,00	65.270.000	47,22	149,70	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**515.448.968**	**100**		**169.073.427**	**100**		**128.862.242**	**100**		**-**	**47,63**	**61.381.742**	**47,63**	**47,63**	**147,63**	**230.455.169**	**147,63**	**44,71**	
2	9	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Laporan	170.168.968	2	Laporan	42.673.427	1	Laporan	42.542.242				1,00	14.521.742	100,00	34,13	3,00	57.195.169	75,00	33,61	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Laporan	345.280.000	2	Laporan	126.400.000	1	Laporan	86.320.000				1,00	46.860.000	100,00	54,29	3,00	173.260.000	75,00	50,18	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik**	**100**		**325.160.000**	**100**		**141.782.705**	**100**		**81.290.000**	**100**		**-**	**55,41**	**45.044.873**	**55,41**	**55,41**	**155,41**	**186.827.578**	**155,41**	**57,46**	
2	9	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	325.160.000	2	Unit	141.782.705	1	Unit	81.290.000				1,00	45.044.873	100,00	55,41	3,00	186.827.578	75,00	57,46	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan**									**320.202.000**			**-**	**14,27**	**27.140.000**							
2	**9**	**3**	**2,01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**1. Persentase peningkatan volume distribusi pangan (beras) pada Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) 2. Nilai capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan Produksi Pangan Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**144.708.000**	**100**		**59.334.500**	**100**		**36.177.000**	**100**		**-**	**27,23**	**9.851.000**	**27,23**	**27,23**	**127,23**	**69.185.500**	**127,23**	**47,81**	
2	9	3	2,01	1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	52	Laporan	52.000.000	25	Laporan	21.111.900	12	Laporan	13.000.000				6,00	5.847.000	50,00	44,98	31,00	26.958.900	59,62	51,84	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2,01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	52	Dokumen	54.284.000	24	Dokumen	23.524.600	12	Dokumen	13.571.000				1,00	660.000	8,33	4,86	25,00	24.184.600	48,08	44,55	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**3**	**2,02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)**	**100**		**808.100.000**	**100**		**79.707.800**	**100**		**209.025.000**	**100**		**-**	**4,18**	**8.736.000**	**4,18**	**4,18**	**104,18**	**88.443.800**	**104,18**	**10,94**	
2	9	3	2,02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		48	Bulan	28.000.000	24	Bulan	3.387.900	12	Bulan	7.000.000				6,00	1.995.000	50,00	28,50	30,00	5.382.900	62,50	19,22	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2,02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	132	Ton	700.000.000	63	Ton	39.853.900	31	Ton	175.000.000				1,00	8.414.000	3,23	4,81	64,00	48.267.900	48,48	6,90	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**3**	2,04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Meningkatnya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**100**		**300.000.000**			**64.675.700**	**100**		**75.000.000**	**100**		**-**	**11,40**	**8.553.000**	**11,40**	**11,40**	**11,40**	**73.228.700**	**11,40**	**24,41**	
2	9	3	2,04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4	Dokumen	40.000.000	2	Dokumen	9.340.000	1	Dokumen	10.000.000				1,00	2.640.000	100,00	26,40	3,00	11.980.000	75,00	29,95	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2,04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	224	Laporan	220.000.000	76	Laporan	43.827.800	38	Laporan	55.000.000				1,00	4.072.000	2,63	7,40	77,00	47.899.800	34,38	21,77	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2,04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinas dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4	Laporan	40.000.000	2	Laporan	11.507.900	1	Laporan	10.000.000				1,00	1.841.000	100,00	18,41	3,00	13.348.900	75,00	33,37	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Daerah Kerawanan Pangan**							**1**		**13.924.000**			**-**	**36,90**	**5.536.000**							
2	**9**	**4**	**2,01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Persentase Keterisian Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSFA)**	**100**		**40.000.000**	**100**		**11.758.000**	**100**		**6.160.000**	**100**		**-**	**12,13**	**747.000**	**12,13**	**12,13**	**112,13**	**12.505.000**	**112,13**	**31,26**	
2	9	4	2,01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	4	Dokumen	40.000.000	2	Dokumen	11.758.000	12	Dokumen	6.160.000				2,00	747.000	16,67	12,13	4,00	12.505.000	100,00	31,26	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**4**	**2,02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Keterisian data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)**	**100**		**40.000.000**	**100**		**15.222.900**	**100**		**7.764.000**	**100**		**-**	**61,68**	**4.789.000**	**61,68**	**61,68**	**161,68**	**20.011.900**	**161,68**	**50,03**	
2	9	4	2,02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	40.000.000	1	Laporan	15.222.900	12	Laporan	7.764.000				6,00	4.789.000	50,00	61,68	7,00	20.011.900	175,00	50,03	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji**									**27.500.000**			**-**	**74,21**	**20.407.000**							
2	**9**	**5**	**2,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Usaha Penggilingan Padi/Gabah yang teregistrasi**	**100**		**160.000.000**	**100**		**52.088.800**	**100**		**27.500.000**	**100**		**-**	**74,21**	**20.407.000**	**74,21**	**74,21**	**174,21**	**72.495.800**	**174,21**	**45,31**	
2	9	5	2,01	3	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	16	Dokumen	72.000.000	4	Dokumen	17.234.200	12	Dokumen	9.000.000				4,00	3.517.000	33,33	39,08	8,00	20.751.200	50,00	28,82	Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	9	5	2,01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8	Dokumen	88.000.000	2	Dokumen	34.854.600	12	Dokumen	18.500.000				6,00	16.890.000	50,00	91,30	8,00	51.744.600	100,00	58,80	Dinas Ketahanan Pangan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)						45,07		
																			Predikat Kinerja						SR		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																											
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**7.693.410.452**			**8.180.993.574**									
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terpenuhinyai Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**3.522.058.052**			**3.426.999.624**	**92,18**	**3.227.589.638**							
2	**11**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup**	**100**		**14.130.032.208**	**100**	**Dokumen**	**6.095.942.973**	**100**	**Dokumen**	**3.522.058.052**	**100**		**3.426.999.624**	**92,18**	**3.227.589.638**	**92,18**	**94,18**	**192,18**	**9.323.532.611**	**192,18**	**65,98**	
2	11	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	14.088.232.208	28	Bulan	6.085.492.973	14	Bulan	3.522.058.052	14	Bulan	3.426.999.624	14,00	3.227.589.638	100,00	94,18	42,00	9.313.082.611	75,00	66,11	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Presentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup									**100.000.000**			**125.000.000**	**92,18**	**37.960.850**				**37.960.850**			
2	**11**	**3**	**2,01**		**Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU)** **Presentase Peningkatan Indeks Kualitas Lahan (IKL)**	**100**		**400.000.000**			**-**	**100**		**100.000.000**			**125.000.000**	**92,18**	37.960.850		**30,37**	**92,18**	**37.960.850**	**92,18**	**9,49**	
2	11	3	2,01	7	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		16	Dokumen	400.000.000				4	Dokumen	100.000.000	4	Dokumen	**125.000.000**	4,00	37.960.850	100,00	30,37	4,00	37.960.850	25,00	9,49	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**										**4.071.352.400**			**4.628.993.950**	**78,93**	**3.331.825.821**				**12.221.939.001**			
2	**11**	**9**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100**		**25.884.648.400**	**100**		**8.890.113.180**	**100**		**4.071.352.400**	**100**		**4.628.993.950**	**78,93**	**3.331.825.821**	**78,93**	**71,98**	**178,93**	**12.221.939.001**	**178,93**	**47,22**	
2	**11**	**9**	2,01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga		4	Lembaga	17.008.595.200	2	Lembaga	6.060.682.619	1	Laporan	2.862.538.000	1	Laporan	3.661.100.000	1,00	2.608.632.078	100,00	71,25	3,00	8.669.314.697	75,00	50,97	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**9**	2,01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		16	Laporan	7.476.053.200	6	Laporan	1.845.919.361	4	Laporan	958.814.400	4	Laporan	842.893.950	4,00	686.908.459	100,00	81,49	10,00	2.532.827.820	62,50	33,88	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**9**	2,01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		100	Orang	1.400.000.000	80	Orang	983.511.200	25	Orang	250.000.000	25	Orang	125.000.000	15,00	36.285.284	60,00	29,03	95,00	1.019.796.484	95,00	72,84	Dinas Lingkungan Hidup
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)						87,76		
																			Predikat Kinerja						T		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																											
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										**6.306.934.890**			**5.849.452.790**									
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									**4.050.458.020**			**4.050.458.020**	**91,13**	**3.691.281.768**				**10.471.914.655**			
2	**12**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**terlaksananya penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**		**18.186.032.080**	**100**		**6.774.944.757**	**100**		**4.050.458.020**	**100**		**4.050.458.020**	**91,13**	**3.691.281.768**	**91,13**	**91,13**	**191,13**	**10.466.226.525**	**191,13**	**57,55**	
2	12	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	16.201.832.080	24	Bulan	6.752.719.757	14	Bulan	4.050.458.020	14	Bulan	4.050.458.020	14,00	3.691.281.768	100,00	91,13	38,00	10.444.001.525	67,86	64,46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Pelaksanaan Pencatatan Sipil									**2.256.476.870**			**1.798.994.770**	**81,03**	**1.552.295.007**				**5.861.627.843**			
2	**12**	**3**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**100**		**9.285.587.480**	**100**		**4.309.332.836**	**100**		**2.256.476.870**	**100**		**1.798.994.770**	**81,03**	**1.552.295.007**	**81,03**	**86,29**	**181,03**	**5.861.627.843**	**181,03**	**63,13**	
2	**12**	**3**	2,03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		46	Paket	9.285.587.480	24	Paket	4.309.332.836	12	Paket	2.256.476.870	12	Paket	1.798.994.770	11,00	1.552.295.007	91,67	86,29	35,00	5.861.627.843	76,09	63,13	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)						86,08		
																			Predikat Kinerja						T		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN																											
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										7.968.094.109			7.454.563.475										
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu									3.289.522.897			3.146.389.363	89,80	2.921.019.664				8.033.820.157				
2	13	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji PHL	100		13.989.473.224			5.109.357.245	100		3.289.522.897	100		3.146.389.363	89,80	2.921.019.664	89,80	92,84	89,80	8.030.376.909	89,80	57,40		
2	13	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	12.971.098.440	28	Bulan	5.091.182.245	14	Bulan	3.289.522.897	14	Bulan	3.146.389.363	14,00	2.921.019.664	100,00	92,84	42,00	8.012.201.909	75,00	61,77		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatkan dan memaksimalkan peran perempuan dalam keluarga dan pembangunan daerah Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat									4.678.571.212			4.308.174.112	89,68	4.088.984.495				12.646.461.947				
2	13	5	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100		7.227.503.361	100		8.557.477.452	100		4.678.571.212	100		4.308.174.112	89,68	4.088.984.495	89,68	94,91	189,68	12.646.461.947	189,68	174,98		
2	13	5	2,01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60	Lembaga	215.506.250	48	Lembaga	8.522.977.452	12	Lembaga	4.678.571.212	12	Lembaga	4.308.174.112	12,00	4.088.984.495	100,00	94,91	60,00	12.611.961.947	100,00	5.852,25		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				89,74							
															Predikat Kinerja				T							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										9.766.655.248			9.106.407.203										
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									3.274.850.276			4.024.445.231	94,46	3.218.223.597				9.206.232.141				
2	14	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan ASN	100		11.515.791.600	100		5.610.864.544	100		3.274.850.276	100		4.024.445.231	94,46	3.218.223.597	94,46	79,97	194,46	8.829.088.141	194,46	76,67		
2	14	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	11.499.191.600	28	Bulan	5.606.714.544	14	Bulan	3.274.850.276	14	Bulan	4.024.445.231	14,00	3.218.223.597	100,00	79,97	42,00	8.824.938.141	75,00	76,74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)									991.804.972			758.286.972	63,29	556.764.444			63,29				
2	14	2	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan	100		19.828.941.376	100		4.953.977.549	100		991.804.972	100		758.286.972	63,29	556.764.444	63,29	73,42	163,29	5.510.741.993	163,29	27,79		
2	14	2	2,01	5	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pengelolaan sarana prasarana perkantoran yang berkualitas	48	Bulan	2.109.583.888				12	Bulan	527.395.972	12	Bulan	428.359.972	12,00	348.302.444	100,00	81,31	12,00	348.302.444	25,00	16,51		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2,01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Peningkatan ketersediaan Data Kependudukan	60	Kecamatan	641.936.000	-		77.708.300	15	Kecamatan	210.484.000	15	Kecamatan	165.932.000	15,00	119.068.400	100,00	71,76	15,00	196.776.700	25,00	30,65		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2,01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal	Peningkatan Pemberdayaan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan Bahagia (Keluarga Berkualitas)	60	Kecamatan	1.423.176.000	14	Kecamatan	288.782.932	15	Kecamatan	180.794.000	15	Kecamatan	114.864.000	15,00	47.711.800	100,00	41,54	29,00	336.494.732	48,33	23,64		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2,01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan		60	Kecamatan	292.524.000	21	Kecamatan	154.029.800	15	Kecamatan	73.131.000	15	Kecamatan	49.131.000	15,00	41.681.800	100,00	84,84	36,00	195.711.600	60,00	66,90		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kecamatan yang Mengikuti Pembinaan Keluarga Berencana									4.310.675.000			4.323.675.000	70,80	3.087.315.000			70,80				
2	14	3	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader yang mengikuti pengerakan IMP dan Jumlah Organisasi yang mengikuti IMP dan Banggakencana	100		19.127.678.200	100			100		3.057.119.550	100		3.070.119.550	89,16	2.731.650.000	89,16	88,98	189,16	2.731.650.000	189,16	14,28		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
					Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan/pendampingan masa perkembanga anak dan remaja serta penguatan karakter dalam rangka pencegahan stunting	100	Kelompok	12.228.478.200				25	Kelompok	3.057.119.550	25	Kelompok	3.070.119.550	50,00	2.731.650.000	200,00	88,98	50,00	2.731.650.000	50,00	22,34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2,03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alkon,Jumlah orang yang mengikuti MKJP,Jumlah Unit Sarana penunjang pelayanan KB dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan KB**	**100**		**10.885.792.000**	**100**		**1.954.945.000**	**100**		**1.169.555.450**	**100**		**1.169.555.450**	**23,23**	**271.665.000**	**23,23**	**23,23**	**123,23**	**2.226.610.000**	**123,23**	**20,45**	
2	14	3	2,03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	112	Laporan	5.547.928.000	62	Laporan	1.954.945.000	30	Laporan	1.169.555.450	10	Laporan	1.169.555.450	10,00	271.665.000	100,00	23,23	72,00	2.226.610.000	64,29	40,13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2,04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Banggakencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)**	**100**		**1.834.000.000**	**100**		**650.750.000**	**100**		**84.000.000**	**100**		**84.000.000**	**100,00**	**84.000.000**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**734.750.000**	**200,00**	**40,06**	
2	14	3	2,04	4	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan hasil pembinaan terpadu Kampung KB	15	Kecamatan	336.000.000				151	Kampung	84.000.000	151	Kampung	84.000.000	302,00	84.000.000	200,00	100,00	302,00	84.000.000	2.013,33	25,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)									**1.189.325.000**			-	**27,23**	**322.650.004**			**27,23**				
2	**14**	**4**	**2,02**		**Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kecamatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan kelurga dan kesejahteraan keluarga dalam pelaksanaan program Banggakencana**	**100**		**4.757.300.000**	**100**		-	**100**		**1.189.325.000**	**100**		**1.176.325.000**	**27,23**	**322.650.004**	**27,23**	**27,43**	**127,23**	**322.650.004**	**127,23**	**6,78**	
2	14	4	2,02	6	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan/pendampingan masa perkembanga anak dan remaja serta penguatan karakter dalam rangka pencegahan stunting	60	Kecamatan	4.757.300.000				15	Kecamatan	1.189.325.000	15	Kecamatan	1.176.325.000	15,00	322.650.004	100,00	27,43	15,00	322.650.004	25,00	6,78	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
					PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan**												**408.135.750**	49,98	**211.826.315**							
					KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya Pembinaan terhadap Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**454.317.000**							**100**		**227.158.500**	**66,98**	**152.160.500**	**66,98**	**66,98**	**66,98**	**152.160.500**	**66,98**	**33,49**	
					SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang	10	Organisasi Wanita	454.317.000							5	Organisasi Wanita	227.158.500	5,00	152.160.500	100,00	66,98	5,00	152.160.500	50,00	33,49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya kapaasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**35.007.000**							**100**		**180.977.250**	**32,97**	**59.665.815**	**32,97**	**32,97**	**32,97**	**59.665.815**	**32,97**	**170,44**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
	SUB. KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN/KOTA	jumlah organisasi perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kabupaten/kota	66	OPD	35.007.000							33	OPD	17.503.500	33,00	9.640.500	100,00	55,08	33,00	9.640.500	50,00	27,54	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	SUB. KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	2	Dokumen	326.947.500							1	Dokumen	163.473.750	1,00	50.025.315	100,00	30,60	1,00	50.025.315	50,00	15,30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan**												**129.888.400**	**72,82**	**95.621.300**			**72,82**				
	KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**100**		**33.176.800**							**100**		**16.588.400**	**68,49**	**11.361.300**	**68,49**	**68,49**	**68,49**	**11.361.300**	**68,49**	**34,24**	
	SUB. KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	dokumen	33.176.800							1	dokumen	16.588.400	1,00	11.361.300	100,00	68,49	1,00	11.361.300	50,00	34,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak**	**100**		**88.560.000**							**100**		**44.280.000**	**77,82**	**34.460.000**	**77,82**	**77,82**	**77,82**	**34.460.000**	**77,82**	**38,91**	
	SUB. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	36	Layanan	88.560.000							18	Layanan	44.280.000	18,00	34.460.000	100,00	77,82	18,00	34.460.000	50,00	38,91	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi korban kekerasan**	**100**		**138.040.000**							**100**		**69.020.000**	**72,15**	**49.800.000**	**72,15**	**72,15**	**72,15**	**49.800.000**	**72,15**	**36,08**	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	140	orang	138.040.000							70	orang	69.020.000	70,00	49.800.000	100,00	72,15	70,00	49.800.000	50,00	36,08	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kabupaten Tulang Bawang**												**17.320.000**	**67,87**	**11.755.000**			**67,87**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
					KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**34.640.000**							**100**		**17.320.000**	**67,87**	**11.755.000**	**67,87**	**67,87**	**67,87**	**11.755.000**	**67,87**	**33,93**	
					SUB. KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah desa DRPPA Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Desa DRPPA	34.640.000							2	Desa DRPPA	17.320.000	2,00	11.755.000	100,00	67,87	2,00	11.755.000	50,00	33,93	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak**											**85.137.550**	**49,62**	**65.529.720**							
					KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya Pengetahuan ASN dan Masyarakat Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak**	**100**		**21.145.100**							**100**		**10.572.550**	**13,24**	**1.400.000**	**13,24**	**13,24**	**13,24**	**1.400.000**	**13,24**	**6,62**	
					SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah dokumen advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan keekrasan terhadap anak	10	Kegiatan	21.145.100							5	Kegiatan	10.572.550	1,00	1.400.000	20,00	13,24	1,00	1.400.000	10,00	6,62	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak**	**100**		**149.130.000**							**100**		**74.565.000**	**86,01**	**64.129.720**	**86,01**	**86,01**	**86,01**	**64.129.720**	**86,01**	**43,00**	
					Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan terhadap anak korban kekerasan	24	Layanan	149.130.000							12	Layanan	74.565.000	12,00	64.129.720	100,00	86,01	12,00	64.129.720	50,00	43,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**62,01**							
															Predikat Kinerja			**R**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										
DINAS PERHUBUNGAN																										
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**										**9.836.816.515**			**8.949.447.524**									
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan)									**4.735.568.315**			**4.377.140.624**	**75,90**	**3.911.551.297**				**12.044.368.684**			
2	**15**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan pada Dinas Perhubungan**	**100**		**15.452.414.372**	**100**		**7.420.583.657**	**100**		**4.384.420.715**	**100**		**4.023.515.724**	**83,99**	**3.641.622.551**	**83,99**	**90,51**	**183,99**	**11.062.206.208**	**183,99**	**71,59**	
2	15	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	12.759.309.972	28	Bulan	6.029.833.657	31	Orang	3.605.395.715	31	Orang	3.244.490.724	118,00	2.882.722.551	380,65	88,85	146,00	8.912.556.208	260,71	69,85	Dinas Perhubungan
2	15	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan pelaksana tugas ASN	48	Dokumen	2.525.900.000	24	Dokumen	1.390.750.000	12	Laporan	779.025.000	12	Laporan	779.025.000	12,00	758.900.000	100,00	97,42	36,00	2.149.650.000	75,00	85,10	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaraannya administrasi umum dinas perhubungan**	**100**		**1.149.573.600**	**100**		**171.726.028**	**100**		**58.702.700**	**100**		**50.674.700**	**56,62**	**30.672.400**	**56,62**	**60,53**	**156,62**	**202.398.428**	**156,62**	**17,61**	
2	15	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	6.566.400	1	Paket	608.000	1	Paket	1.763.200	1	Paket	1.763.200	1,00	608.000	100,00	34,48	2,00	1.216.000	50,00	18,52	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	15	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	143.978.000	14	Paket	22.415.800	9	Paket	13.921.000	9	Paket	13.921.000	4,00	7.219.000	44,44	51,86	18,00	29.634.800	64,29	20,58	Dinas Perhubungan
2	15	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	9.225.200	4	Paket	996.300	1	Paket	1.080.500	1	Paket	4.580.500	2,00	559.500	200,00	12,21	6,00	1.555.800	16,67	16,86	Dinas Perhubungan
2	15	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	40	Paket	211.712.000	10	Paket	42.991.800	1	Paket	20.150.000	3	Paket	20.150.000	3,00	12.145.900	100,00	60,28	13,00	55.137.700	32,50	26,04	Dinas Perhubungan
2	15	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perhubungan	72	Laporan	467.892.000	9	Laporan	31.214.128	3	Laporan	21.788.000	6	Laporan	10.260.000	6,00	10.140.000	100,00	98,83	15,00	41.354.128	20,83	8,84	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah**	**100**		**728.638.400**	**100**		**236.263.534**	**100**		**144.450.800**	**100**		**135.450.800**	**75,73**	**107.433.845**	**75,73**	**79,32**	**175,73**	**343.697.379**	**175,73**	**47,17**	
2	15	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	188.283.200	22	Laporan	83.853.534	12	Laporan	47.070.800	12	Laporan	47.070.800	12,00	41.253.845	100,00	87,64	34,00	125.107.379	70,83	66,45	Dinas Perhubungan
2	15	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	540.355.200	19	Laporan	152.410.000	12	Laporan	97.380.000	12	Laporan	88.380.000	12,00	66.180.000	100,00	74,88	31,00	218.590.000	64,58	40,45	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak aset BMD**	**100**		**1.661.840.400**	**100**		**302.842.568**	**100**		**138.074.100**	**100**		**167.499.400**	**87,26**	**131.822.501**	**87,26**	**78,70**	**187,26**	**434.665.069**	**187,26**	**26,16**	
2	15	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemelharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		56	Unit	516.872.400	14	Unit	54.636.000	14	Unit	129.218.100	14	Unit	160.679.400	32,00	127.032.501	228,57	79,06	46,00	181.668.501	82,14	35,15	
2	15	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	55.968.000	1	Unit	12.000.000	1	Unit	8.856.000	12	Unit	6.820.000	8,00	4.790.000	66,67	70,23	9,00	16.790.000	225,00	30,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan									**5.080.748.200**			**4.551.806.900**	**93,46**	**4.345.961.181**							
2	**15**	**2**	**2,02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Terselengaranya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota**	**100**		**302.580.000**	**100**		**9.590.034.262**	**100**		**4.854.248.200**	**100**		**4.330.606.900**	**87,20**	**4.128.299.181**	**87,20**	**95,33**	**187,20**	**13.718.333.443**	**187,20**	**4.533,79**	
2	15	2	2,02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40	Unit	302.580.000	10	Unit	9.590.034.262	12	Unit	4.854.248.200	1100	Unit	4.330.606.900	4.400,00	4.128.299.181	400,00	95,33	4.410,00	13.718.333.443	11.025,00	4.533,79	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2,05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terselenggaranya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100**		**1.001.008.000**	**100**		**159.916.323**	**100**		**152.500.000**	**100**		**152.500.000**	**98,66**	**150.462.000**	**98,66**	**98,66**	**198,66**	**310.378.323**	**198,66**	**31,01**	
2	15	2	2,05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10.000	Unit	374.424.000	100	Unit	114.878.000	5000	Unit	137.500.000	3.500	Unit	137.500.000	2.570,00	135.500.000	73,43	98,55	2.670,00	250.378.000	26,70	66,87	Dinas Perhubungan
2	15	2	2,05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	48	Unit	626.584.000	15	Unit	45.038.323	1	Unit	15.000.000	9	Unit	15.000.000	9,00	14.962.000	100,00	99,75	24,00	60.000.323	50,00	9,58	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2,06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan**	**100**		**2.340.144.000**	**100**		**386.101.700**	**100**		**74.000.000**	**100**		**68.700.000**	**94,53**	**67.200.000**	**94,53**	**97,82**	**194,53**	**453.301.700**	**194,53**	**19,37**	
2	15	2	2,06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	56	Laporan	2.340.144.000	27	Laporan	386.101.700	13	Laporan	74.000.000	12	Laporan	68.700.000	12,00	67.200.000	100,00	97,82	39,00	453.301.700	69,64	19,37	Dinas Perhubungan
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	Persentase pengelolaan pelayaran									**20.500.000**			**20.500.000**	**70,96**	**14.547.600**			**70,96**				
2	**15**	**3**	**2,07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebarangan dalam daerah kab/kota**	**100**		**643.200.000**	**100**		**30.945.300**	**100**		**20.500.000**	**100**		**20.500.000**	**70,96**	**14.547.600**	**70,96**	**70,96**	**170,96**	**45.492.900**	**170,96**	**7,07**	
2	15	3	2,07	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	48	Laporan	643.200.000	16	Laporan	30.945.300	8	Laporan	20.500.000	12	Laporan	20.500.000	12,00	14.547.600	100,00	70,96	28,00	45.492.900	58,33	7,07	Dinas Perhubungan
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)								
																			Predikat Kinerja								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																												
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										**10.426.245.242**			**10.450.082.596**										
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah									**4.860.932.442**			**4.921.887.296**	**81,36**	**4.576.116.980**			**807**	**12.391.843.719**			
2	**16**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningatnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**		**112.000.000**	**100**		**18.375.300**	**100**		**10.167.600**	**100**		**10.167.600**	**61,41**	**6.243.900**	**61,41**	**61,41**	**161,41**	**24.619.200**	**161,41**	**21,98**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	16	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44	Laporan	112.000.000	16	Laporan	18.375.300	11	Laporan	10.167.600	11	Laporan	10.167.600	11,00	6.243.900	100,00	61,41	27,00	24.619.200	61,36	21,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya penatausahaan keuangan**	**100**		**15.075.914.372**	**100**		**6.888.672.166**	**100**		**4.199.394.792**	**100**		**4.189.752.146**	**94,92**	**3.983.536.894**	**94,92**	**95,08**	**194,92**	**10.872.209.060**	**194,92**	**72,12**	
2	16	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	14.257.814.372	138	Bulan	6.125.396.766	30	Orang	3.441.728.992	30	Orang	3.465.566.346	116,00	3.308.782.094	386,67	95,48	254,00	9.434.178.860	453,57	66,17	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	56	Bulan	698.100.000	26	Bulan	733.700.000	12	Dokumen	743.425.000	12	Dokumen	709.945.000	12,00	661.225.000	100,00	93,14	38,00	1.394.925.000	67,86	199,82	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	60.000.000	2	Laporan	15.983.600	1	Laporan	6.790.000	1	Laporan	6.790.000	1,00	6.079.000	100,00	89,53	3,00	22.062.600	75,00	36,77	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64	Laporan	60.000.000	33	Laporan	13.591.800	16	Laporan	7.450.800	16	Laporan	7.450.800	16,00	7.450.800	100,00	100,00	49,00	21.042.600	76,56	35,07	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah**	**100**		**686.520.000**	**100**		**195.970.000**	**100**		**135.960.000**	**100**		**135.960.000**	**84,79**	**115.280.924**	**84,79**	**84,79**	**184,79**	**311.250.924**	**184,79**	**45,34**	
2	16	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32	Dokumen	686.520.000	14	Dokumen	195.970.000	7	Dokumen	135.960.000	7	Dokumen	135.960.000	6,00	115.280.924	85,71	84,79	20,00	311.250.924	62,50	45,34	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melakukan tugas jabatannya**	**100**		**829.744.800**				**100**		**52.386.000**	**100**		**52.386.000**	**76,25**	**39.945.000**	**76,25**	**76,25**	**76,25**	**39.945.000**	**76,25**	**4,81**	
2	16	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	283.744.800	1		17.000.000	2	Orang	52.386.000	2	Orang	52.386.000	2,00	39.945.000	100,00	76,25	3,00	56.945.000	75,00	20,07	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**3.715.108.200**	**100**		**712.709.273**	**100**		**463.024.050**	**100**		**533.621.550**	**89,42**	**431.110.262**	**89,42**	**80,79**	**189,42**	**1.143.819.535**	**189,42**	**30,79**	
2	16	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	Paket	532.800.000	23	Paket	191.643.966	12	Paket	114.000.000	12	Paket	114.000.000	12,00	85.776.312	100,00	75,24	35,00	277.420.278	72,92	52,07	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	3.059.708.200	2	Paket	521.065.307	1	Dokumen	349.024.050	1	Dokumen	419.621.550	1,00	345.333.950	100,00	82,30	3,00	866.399.257	75,00	28,32	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Tulang Bawang									**2.054.078.800**			**2.006.410.300**	**66,60**	**1.356.712.180**			**66,60**				
2	**16**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Perentase Peningkatan jumlah pengunjung penggunaan domain http://ppid.tulangbawangkab.go.id/**	**100**		**29.367.856.000**	**100**		**7.607.362.910**	**100**		**2.054.078.800**	**100**		**2.006.410.300**	**66,60**	**1.356.712.180**	**66,60**	**67,62**	**166,60**	**8.964.075.090**	**166,60**	**30,52**	
2	16	2	2,01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4	Dokumen	200.000.000	2	Dokumen	45.700.000	1	Dokumen	13.685.000	1	Dokumen	13.685.000	1,00	8.435.000	100,00	61,64	3,00	54.135.000	75,00	27,07	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2,01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	80	Orang	200.000.000	22	Orang	29.396.200	20	Orang	10.104.100	20	Orang	10.104.100	-	10.004.100	-	99,01	22,00	39.400.300	27,50	19,70	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2,01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	6	Laporan	3.831.733.400				3	Laporan	1.915.866.700	3	Laporan	1.818.198.200	3,00	1.197.665.510	100,00	65,87	3,00	1.197.665.510	50,00	31,26	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2,01	22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	2	Dokumen	139.538.000				1	Dokumen	69.769.000	1	Dokumen	69.769.000	2,00	53.941.000	200,00	77,31	2,00	53.941.000	100,00	38,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2,01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	10	Konten	89.308.000				5	Konten	44.654.000	5	Konten	94.654.000	5,00	86.666.570	100,00	91,56	5,00	86.666.570	50,00	97,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan Aplikasi Informatika Kabupaten Tulang Bawang									**3.487.262.000**			**3.497.813.000**	**94,24**	**3.287.009.200**			**94,24**				
2	**16**	**3**	**2,02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang menerapkan e-government**	**100**		**11.355.135.740**	**100**		**1.766.905.034**	**100**		**3.487.262.000**	**100**		**3.497.813.000**	**94,24**	**3.287.009.200**	**94,24**	**93,97**	**194,24**	**5.053.914.234**	**194,24**	**44,51**	
2	16	3	2,02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10	Aplikasi	3.624.524.000				5	Aplikasi	3.212.262.000	5	Aplikasi	3.222.813.000	1,00	3.017.212.600	20,00	93,62	1,00	3.017.212.600	10,00	83,24	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2,02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	20	Perangkat Daerah	550.000.000				10	Perangkat Daerah	275.000.000	10	Perangkat Daerah	275.000.000	2,00	269.796.600	20,00	98,11	2,00	269.796.600	10,00	49,05	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																						
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral dilingkup Kabupaten Tulang Bawang									**10.444.000**			**10.444.000**	**57,94**	**6.051.000**				**47.214.700**			
2	**20**	**2**	**2,01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat keterisian data pada portaldata Tulang Bawang**	**100**		**200.000.000**	**100**		**41.163.700**	**100**		**10.444.000**	**100**		**10.444.000**	**57,94**	**6.051.000**	**57,94**	**57,94**	**157,94**	**47.214.700**	**157,94**	**23,61**	
2	20	2	2,01	9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80	Persen	20.888.000				80	Persen	10.444.000	80	Persen	10.444.000	80,00	6.051.000	100,00	57,94	80,00	6.051.000	100,00	28,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																						
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi									**13.528.000**			**13.528.000**	**98,20**	**13.284.000**				**43.665.400**			

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	21	2	2,01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan pengamanan informasi**	**100**		**140.000.000**	**100**		**30.381.400**	**100**		**13.528.000**	**100**		**13.528.000**	**98,20**	**13.284.000**	**98,20**	**98,20**	**198,20**	**43.665.400**	**198,20**	**31,19**	
2	21	2	2,01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	Laporan	140.000.000	2	Laporan	30.381.400	1	Laporan	13.528.000	1	Laporan	13.528.000	1,00	13.284.000	100,00	98,20	3,00	43.665.400	75,00	31,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**79,67**							
															Predikat Kinerja				**T**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN																											
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**										**4.479.030.477**			**5.559.298.454**									
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah									**3.899.030.477**			**4.849.227.904**	**94,12**	**4.389.061.539**							
2	**17**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi dan UKM**	**100**		**256.320.000**	**100**		**19.075.000**	**100**		**60.084.000**	**100**		**55.413.000**	**94,97**	**55.413.000**	**94,97**	**100,00**	**194,97**	**74.488.000**	**194,97**	**29,06**	
2	17	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Laporan	248.320.000	13	Laporan	19.075.000	1	Laporan	60.084.000	1	Laporan	55.413.000	1,80	55.413.000	180,00	100,00	14,80	74.488.000	30,83	30,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM**	**100**		**13.594.950.484**	**100**		**6.002.865.755**	**100**		**3.551.551.777**	**100**		**4.531.691.904**	**104,01**	**4.067.679.764**	**104,01**	**89,76**	**204,01**	**10.070.545.519**	**204,01**	**74,08**	
2	17	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	11.306.970.484	28	Bulan	5.220.840.755	14	Bulan	3.017.996.777	14	Bulan	3.736.196.904	14,00	3.324.224.764	100,00	88,97	42,00	8.545.065.519	75,00	75,57	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	2.287.980.000	19	Dokumen	782.025.000	12	Dokumen	533.555.000	12	Dokumen	795.495.000	12,00	743.455.000	100,00	93,46	31,00	1.525.480.000	64,58	66,67	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	Dokumen	25.243.095				4	Dokumen	20.857.000				-	8.137.000			-	8.137.000	-	32,23	
2	**17**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM**	**100**		**8.000.000**	**100**		**15.000.000**	**100**		**10.000.000**	**100**		**15.730.000**	**110,31**	**15.730.000**	**110,31**	**100,00**	**210,31**	**30.730.000**	**210,31**	**384,13**	
2	17	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Laporan	8.000.000	12	Laporan	15.000.000	6	Laporan	10.000.000	6	Laporan	15.730.000	6,00	15.730.000	100,00	100,00	18,00	30.730.000	37,50	384,13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Dinas Koperasi dan UKM**	**100**		**1.808.030.000**	**100**		**464.737.280**	**100**		**78.874.700**	**100**		-	**50,63**	**39.937.950**	**50,63**	**50,63**	**150,63**	**504.675.230**	**150,63**	**27,91**	
2	17	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	159.870.000	24	Paket	60.732.380	12	Paket	25.000.000				12,00	12.657.750	100,00	50,63	36,00	73.390.130	75,00	45,91	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48	Paket	149.960.000	24	Paket	40.392.200	12	Paket	33.874.700				12,00	18.352.000	100,00	54,18	36,00	58.744.200	75,00	39,17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	206.200.000	24	Paket	50.796.700	12	Paket	20.000.000				12,00	8.928.200	100,00	44,64	36	59.724.900	75,00	28,96	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM**	**100**		**141.600.000**	**100**		**98.254.563**	**100**		**65.350.000**	**100**		**96.215.600**	**92,00**	**60.123.425**	**92,00**	**62,49**	**192,00**	**158.377.988**	**192,00**	**111,85**	
2	17	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	141.600.000	13	Laporan	98.254.563	1	Laporan	65.350.000	1	Laporan	96.215.600	1,00	60.123.425	100,00	62,49	14,00	158.377.988	29,17	111,85	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pelayanan Umum Kantor	4		39.280.000							1	Laporan	39.280.000	1,00	13.560.000	100,00	34,52	1,00	13.560.000	25,00	34,52	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Aset BMD pada Dinas Koperasi dan UKM**	**100**		**1.459.680.000**	**100**		**406.264.656**	**100**		**133.170.000**	**100**		**150.177.400**	**112,77**	**150.177.400**	**112,77**	**100,00**	**212,77**	**556.442.056**	**212,77**	**38,12**	
2	17	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit	26.000.000	14	Unit	12.400.000	7	Unit	7.100.000	7	Unit	7.100.000	5,00	7.100.000	71,43	100,00	19,00	19.500.000	67,86	75,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	1.321.040.000	14	Unit	262.767.000	7	Unit	126.070.000	7	Unit	143.077.400	7,00	143.077.400	100,00	100,00	21,00	405.844.400	75,00	30,72	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									**55.000.000**			**207.900.000**	**122,30**	**189.300.000**							
2	**17**	**6**	**2,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten**	**100**		**208.000.000**	**100**		**103.517.200**	**100**		**55.000.000**	**100**		**207.900.000**	**122,30**	**189.300.000**	**122,30**	**91,05**	**222,30**	**292.817.200**	**222,30**	**140,78**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	17	6	2,01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Unit Usaha	208.000.000	25	Unit Usaha	103.517.200	25	Unit Usaha	55.000.000	25	Unit Usaha	207.900.000	25,00	189.300.000	100,00	91,05	50,00	292.817.200	50,00	140,78	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)									**25.000.000**			**42.500.000**	**120,59**	**42.500.000**							
2	**17**	**7**	**2,01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**100**		**2.436.996.000**	**100**		**20.002.800**	**100**		**25.000.000**			**42.500.000**	**120,59**	**42.500.000**		**100,00**	**220,59**	**62.502.800**	**220,59**	**2,56**	
2	17	7	2,01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	800	Unit Usaha	200.000.000	24	Unit Usaha	12.004.100	10	Unit Usaha	25.000.000	10	Unit Usaha	42.500.000	10,00	42.500.000	100,00	100,00	34,00	54.504.100	4,25	27,25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**Persentase Usaha Kecil yang berkembang**												**27.000.000**	**100,00**	**27.000.000**							
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaku usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil**	**15**	**896.506.000**								**100**		**27.000.000**	**100,00**	**27.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,0**	**27.000.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
					Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi	15	Kecamatan	75.000.000							15	Kecamatan	27.000.000	15,00	27.000.000	100,00	100,00	15,00	27.000.000	100,00	36,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																						
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																						
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase rata – rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP									**500.000.000**			**432.670.550**	**57,22**	**255.438.013**							
3	**31**	**2**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase rata - rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIK**	**100**		**2.076.000.000**	**100**		**1.000.343.702**	**100**		**500.000.000**	**100**		**432.670.550**	**57,22**	**255.438.013**	**57,22**	**59,04**	**157,22**	**1.255.781.715**	**157,22**	**60,49**	
3	31	2	2,01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4	Dokumen	1.560.000.000	1	Dokumen	450.343.702	1	Dokumen	500.000.000	3	Dokumen	432.670.550	3,00	255.438.013	100,00	59,04	4,00	705.781.715	100,00	45,24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**78,85**			
																			Predikat Kinerja				**T**			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																											
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**										**5.673.202.926**			**5.810.673.489**								
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	meningkatnya ASN dalam penyusunan pelaporan perencanaan									**5.141.248.826**			**5.371.253.389**	**91,76**	**5.035.412.109**				**14.482.678.957**			
2	**18**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pegawai DPMPTSP**	**100**		**18.330.827.760**	**100**		**8.226.336.600**	**100**		**4.528.688.626**	**100**		**4.666.159.189**	**97,68**	**4.459.475.670**	**97,68**	**95,57**	**197,68**	**12.685.812.270**	**197,68**	**69,20**	
2	18	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	15.510.209.360	21	Bulan	7.235.767.900	68	Pegawai	4.023.468.426	68	Pegawai	4.160.938.989	272,00	3.967.817.967	400,00	95,36	293,00	11.203.585.867	523,21	72,23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4	Dokumen	2.576.918.400	1	Dokumen	944.818.700	53	Pegawai	459.320.200	53	Pegawai	459.320.200	212,00	448.007.703	400,00	97,54	213,00	1.392.826.403	5.325,00	54,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	16	Dokumen	243.700.000	5	Dokumen	45.750.000	4	Laporan	45.900.000	1	Laporan	45.900.000	1,00	43.650.000	100,00	95,10	6,00	89.400.000	37,50	36,68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Kegiatan Administrasi umum yang efisien**	**100**		**1.177.111.000**	**100**		**129.133.704**	**100**		**56.177.700**	**100**		**148.711.700**	**95,86**	**123.753.600**	**95,86**	**83,22**	**195,86**	**252.887.304**	**195,86**	**21,48**	
2	18	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	174.366.400	-	Paket	10.712.800	6	Kali	6.967.100	6	Kali	6.967.100	3,00	3.897.900	50,00	55,95	3,00	14.610.700	25,00	8,38	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	314.423.200	1	Paket	32.588.000	53	Unit	36.928.600	13	Unit	129.462.600	13,00	112.134.300	100,00	86,62	14,00	144.722.300	175,00	46,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan	222.585.000	1	Laporan	20.062.304	5	Kali	8.360.000	5	Kali	8.360.000	5,00	7.721.400	100,00	92,36	6,00	27.783.704	6,00	12,48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum yang efisien**	**100**		**1.146.788.500**	**100**		**747.095.311**	**100**		**408.999.700**	**100**		**408.999.700**	**75,09**	**307.123.115**	**75,09**	**75,09**	**175,09**	**1.054.218.426**	**175,09**	**91,93**	
2	18	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	Laporan	1.146.788.500	5	Laporan	747.095.311	1	Laporan	408.999.700	1	Laporan	408.999.700	2,00	307.123.115	200,00	75,09	7,00	1.054.218.426	87,50	91,93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	**18**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan**	**100**		**674.603.400**	**100**		**335.582.733**	**100**		**147.382.800**	**100**		**147.382.800**	**98,42**	**145.059.724**	**98,42**	**98,42**	**198,42**	**480.642.457**	**198,42**	**71,25**	
2	18	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	Unit	654.059.400	7	Unit	335.582.733	6	Unit	147.382.800	6	Unit	147.382.800	3,00	145.059.724	50,00	98,42	10,00	480.642.457	41,67	73,49	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Peningkat tujuan investasi di Provinsi Lampung									**331.897.600**			**239.363.600**	**49,23**	**117.841.900**			**49,23**				
2	**18**	**3**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Peningkatan Investor Jumlah**	**100**		**2.042.572.000**	**100**		**720.361.790**	**100**		**331.897.600**	**100**		**239.363.600**	**49,23**	**117.841.900**	**49,23**	**49,23**	**149,23**	**838.203.690**	**149,23**	**41,04**	
2	18	3	2,01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	12	Dokumen	2.042.572.000	3	Dokumen	720.361.790	2	Kali	331.897.600	2	Kali	239.363.600	2,00	117.841.900	100,00	49,23	5,00	838.203.690	41,67	41,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan									**150.069.300**			**150.069.300**	**93,32**	**140.042.000**			**93,32**				
2	**18**	**4**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha**	**100**		**1.711.590.000**	**100**		**350.654.100**	**100**		**150.069.300**	**100**		**150.069.300**	**93,32**	**140.042.000**	**93,32**	**93,32**	**193,32**	**490.696.100**	**193,32**	**28,67**	
2	18	4	2,01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.400	Pelaku Usaha	1.379.590.000	252	Pelaku Usaha	343.122.400	263	Jenis Layanan	144.557.100	263	Jenis Layanan	144.557.100	802,00	135.953.000	304,94	94,05	1.054,00	479.075.400	75,29	34,73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2,01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	140	Orang	232.000.000	4	Orang	6.031.700	1	Buku Investasi	5.512.200	1	Buku Investasi	5.512.200	2,00	4.089.000	200,00	74,18	6,00	10.120.700	4,29	4,36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal									**44.586.200**			**44.586.200**	**16,36**	**7.296.000**			**16,36**				
2	**18**	**5**	**2,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Koordinasi & Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100**		**1.812.940.000**	**100**		**211.339.500**	**100**		**44.586.200**	**100**		**44.586.200**	**16,36**	**7.296.000**	**16,36**	**16,36**	**116,36**	**218.635.500**	**116,36**	**12,06**	
2	18	5	2,01	6	Pengawasan Penanaman Modal		15	Kegiatan Usaha	41.344.000			-	14	Kegiatan Usaha	10.336.000	14	Kegiatan Usaha	10.336.000	4,00	7.296.000	28,57	70,59	4,00	7.296.000	26,67	17,65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal secara elektronik									**5.401.000**			**5.401.000**	**72,18**	**3.898.300**			**72,18**				
2	**18**	**6**	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan**	**100**		**200.000.000**	**100**		**7.574.400**	**100**		**5.401.000**	**100**		**5.401.000**	**72,18**	**3.898.300**	**72,18**	**72,18**	**172,18**	**11.472.700**	**172,18**	**5,74**	
2	18	6	2,01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	60	Kecamatan	200.000.000	3	Kecamatan	7.574.400	5	Kecamatan	5.401.000	5	Kecamatan	5.401.000	4,00	3.898.300	80,00	72,18	7,00	11.472.700	11,67	5,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**64,57**							
															Predikat Kinerja				**R**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																											
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										**4.073.766.921**			**8.073.181.850**									
2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**tersusunnya dokumen perencanaan**			**19.569.816.295**						**3.864.449.521**			**5.369.911.970**	**63,01**	**2.575.809.517**							
2	**19**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatnya penata usahaan keuangan**	**100**		**15.536.242.435**	**197**		**5.213.332.580**	**100**		**3.060.330.697**	**100**		**4.216.182.896**	**47,13**	**1.665.618.567**	**47,13**	**39,51**	**244,56**	**6.878.951.147**	**244,56**	**44,28**	
2	19	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Orang Per Bulan	15.058.942.435	84	Orang	5.213.332.580	14	Bulan	3.060.330.697	14	Bulan	4.216.182.896	14,00	1.665.618.567	100,00	39,51	98,00	6.878.951.147	175,00	45,68	Dinas Kepemudaan dan OLahraga
2	**19**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pelayanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**2.023.921.600**	**100**		**33.000.535**	**100**		**804.118.824**	**100**		**1.153.729.074**	**78,89**	**910.190.950**	**78,89**	**78,89**	**178,89**	**943.191.485**	**178,89**	**46,60**	
2	19	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	1.157.375.000	3	Laporan	14.725.000	1	Laporan	804.118.824	1	Laporan	1.153.729.074	1,00	910.190.950	100,00	78,89	4,00	924.915.950	6,67	79,91	Dinas Kepemudaan dan OLahraga

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**			**11.350.994.800**									**47.000.000**	**78,33**	**36.815.000**			**78,33**				
2	**19**	**2**	**2,01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**100**		**4.934.758.800**	**-**		**609.892.515**	**100**		**50.000.000**	**100**		**47.000.000**	**78,33**	**36.815.000**	**78,33**	**78,33**	**78,33**	**646.707.515**	**78,33**	**13,11**	
2	19	2	2,01	12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		20	Orang	200.000.000				5	Orang	50.000.000	5	Orang	47.000.000	5,00	36.815.000	100,00	78,33	5,00	36.815.000	25,00	18,41	
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**			**5.674.916.052**						**209.317.400**			**1.570.238.000**	**74,57**	**176.452.400**							
2	**19**	**3**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**100**		**560.000.000**	**-**		**-**	**100**		**25.000.000**	**100**		**18.850.000**	**53,56**	**10.096.000**	**53,56**	**53,56**	**53,56**	**10.096.000**	**53,56**	**1,80**	
2	19	3	2,01	5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota		48	Bulan	100.000.000				12	Bulan	25.000.000	3	Bulan	18.850.000	3,00	10.096.000	100,00	53,56	3,00	10.096.000	6,25	10,10	
2	**19**	**3**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Terselenggaranyakejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/ kota**	**100**		**1.000.000.000**			**-**	**100**		**1.222.917.700**	**100**		**1.369.770.600**	**63,01**	**863.126.000**	**63,01**	**63,01**	**63,01**	**863.126.000**	**63,01**	**86,31**	
2	19	3	**2,03**	7	Pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1.000.000.000			-	1	Dokumen	1.222.917.700	1	Dokumen	1.369.770.600	1,00	863.126.000	100,00	63,01	1,00	863.126.000	25,00	86,31	Dinas Kepemudaan dan OLahraga
2	**19**	**3**	**2,04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Meningkatnya pembinaaan dan pengembangan olahraga**	**100**		**1.184.500.000**	**100**		**2.787.961.600**	**100**		**112.300.000**	**100**		**112.300.000**	**93,72**	**105.250.000**	**93,72**	**93,72**	**193,72**	**2.893.211.600**	**193,72**	**244,26**	
2	19	3	2,04	6	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		60	Kecamatan	449.200.000				15	Kecamatan	112.300.000	15	Kecamatan	112.300.000	15,00	105.250.000	100,00	93,72	15,00	105.250.000	25,00	23,43	
2	**19**	**3**	**2,05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Meningkatnya pembinaan dan Pengembangan rekreasi**	**100**		**2.930.416.052**	**100**		**904.913.076**	**100**		**72.017.400**	**100**		**69.317.400**	**87,99**	**61.106.400**	**87,99**	**88,15**	**187,99**	**966.019.476**	**187,99**	**32,97**	
2	19	3	2,05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	48	Laporan	384.500.000	24	Laporan	263.701.876	2	Laporan	22.017.400	4	Laporan	19.317.400	4,00	17.106.400	100,00	88,55	28,00	280.808.276	58,33	73,03	Dinas Kepemudaan dan OLahraga
2	19	3	2,05	9	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan								5	Laporan	50.000.000	5	Laporan	50.000.000	5,00	44.000.000	100,00	88,00	5,00	44.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya												**95.000.000**	**4,80**	**4.560.000**			**4,80**		**#DIV/0!**		
3	**26**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**100**		**808.638.684**	**100**		**156.024.600**	**100**		**95.000.000**	**100**		**95.000.000**	**4,80**	**4.560.000**	**4,80**	**4,80**	**104,80**	**160.584.600**	**104,80**	**19,86**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/kota	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariiwsata kab/kota	48	bulan	80.000.000	24	bulan	19.675.800	1	Laporan	95.000.000	1	Laporan	95.000.000	1,00	4.560.000	100,00	4,80	25,00	24.235.800	52,08	30,29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya												**991.031.880**	**54,97**	**638.946.313**							
3	**26**	**2**	**2,01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**100**		**728.638.684**	**100**		**136.348.800**	**100**		**182.159.671**	**100**		**991.031.880**	**54,97**	**638.946.313**	**54,97**	**64,47**	**154,97**	**775.295.113**	**154,97**	**106,40**	
3	26	5	2,01	4	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		12	Laporan	728.638.684	3	Laporan	136.348.800	3	Laporan	182.159.671	3	Laporan	991.031.880	3,00	638.946.313	100,00	64,47	6,00	775.295.113	50,00	106,40	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**55,14**								
															Predikat Kinerja				**R**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																												
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																							
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**										**3.707.456.835**			**3.420.938.834**									
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**2.807.027.155**			**2.724.783.304**	**88,84**								
2	**23**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**11.605.380.976**	**100**		**4.627.506.896**	**100**		**2.807.027.155**	**100**		**2.724.783.304**	**88,84**	**2.473.871.723**	**88,84**	**90,79**	**188,84**	**7.101.378.619**	**188,84**	**61,19**	
2	23	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56	Bulan	10.757.260.976	28	Bulan	4.616.756.896	14	Bulan	2.807.027.155	14	Bulan	2.724.783.304	14,00	2.473.871.723	100,00	90,79	42,00	7.090.628.619	75,00	65,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Peningkatan Perpustakaan yang di Bina									**900.429.680**			**696.155.530**	**47,51**				**47,51**			
2	**23**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten**	**100**		**4.042.826.720**	**100**		**1.268.710.859**	**100**		**799.383.080**	**100**		**650.340.730**	**78,43**	**597.063.749**	**78,43**	**91,81**	**178,43**	**1.865.774.608**	**178,43**	**46,15**	
2	23	2	2,01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		60	Kecamatan	2.541.563.520	26	Kecamatan	1.025.290.872	15	Kecamatan	614.063.680	15	Kecamatan	533.915.180	60,00	492.278.297	400,00	92,20	86,00	1.517.569.169	143,33	59,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2,01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	120	Perpustakaan	280.000.000	54	Perpustakaan	63.261.766	30	Perpustakaan	94.311.600	30	Perpustakaan	74.882.750	120,00	63.324.252	400,00	84,56	174,00	126.586.018	145,00	45,21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2,01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten melalui peningkatan koleksi	8	Layanan	520.031.200	4	Layanan	115.364.921	2	Layanan	81.007.800	2	Layanan	41.542.800	8,00	41.461.200	400,00	99,80	12,00	156.826.121	150,00	30,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**2**	**2,02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat sekolah Kabupaten Tulang Bawang secara tepat sasaran**	**100**		**184.000.000**	**100**		**47.829.784**	**100**		**101.046.600**	**100**		**45.814.800**	**16,60**	**15.870.000**	**16,60**	**34,64**	**116,60**	**63.699.784**	**116,60**	**34,62**	
2	23	2	2,02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar membaca Tingkat Kabupaten	24	Orang	184.000.000	6	Orang	47.829.784	6	Orang	54.078.800	6	Orang	45.814.800	12,00	15.870.000	200,00	34,64	18,00	63.699.784	75,00	34,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	2	2,02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		186	Perpustakaan	140.903.400	124	Perpustakaan	99.762.816	62	Perpustakaan	46.967.800	62	Perpustakaan	39.960.900	124,00	4.525.100	200,00	11,32	248,00	104.287.916	133,33	74,01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**68,17**								
															Predikat Kinerja				**S**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
DINAS PERIKANAN																												
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																							
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**5.079.527.784**			**4.818.482.857**									
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah									**3.669.132.839**			**3.584.868.912**	**91,32**	**3.331.762.246**							
3	**25**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**100**		**17.085.153.336**	**100**		**6.363.153.698**	**100**		**3.669.132.839**	**100**		**3.584.868.912**	**91,32**	**3.331.762.246**	**91,32**	**92,94**	**191,32**	**9.694.915.944**	**191,32**	**56,74**	
3	25	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	14.259.609.336	146	Orang/Bulan	6.327.253.698	33	Orang/Bulan	3.669.132.839	33	Orang/Bulan	3.584.868.912	132,00	3.331.762.246	400,00	92,94	278,00	9.659.015.944	496,43	67,74	Dinas Perikanan
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Tercapainya Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam 1 Daerah									**95.361.000**			**57.346.500**	**27,62**	**22.017.364**			**27,62**				
3	**25**	**3**	**2,02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100**		**240.000.000**	**100**		**45.961.000**	**100**		**95.361.000**	**100**		**57.346.500**	**27,62**	**22.017.364**	**27,62**	**38,39**	**127,62**	**67.978.364**	**127,62**	**28,32**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
3	25	3	2,02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		140	Kelompok	240.000.000	82	Kelompok	45.961.000	35	Kelompok	95.361.000	35	Kelompok	57.346.500	35,00	22.017.364	100,00	38,39	117,00	67.978.364	83,57	28,32	Dinas Perikanan	
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Tercapainya Pengelolaan Perikanan Budidaya Dalam 1 Daerah									**1.315.033.945**			**1.176.267.445**	**39,51**	**849.928.468**								
3	**25**	**4**	**2,02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Produksi perikanan budidaya**	**100**		**2.320.000.000**	**100**		**2.187.576.416**	**100**		**1.315.033.945**	**100**		**1.176.267.445**	**39,51**	**849.928.468**	**39,51**	**72,26**	**139,51**	**3.037.504.884**	**139,51**	**130,93**		
3	25	4	2,02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		48	Kelompok	1.280.000.000	16	Kelompok	127.216.300	12	Kelompok	165.722.000	12	Kelompok	137.591.700	12,00	95.817.300	100,00	69,64	28,00	223.033.600	58,33	17,42	Dinas Perikanan	
3	25	4	2,02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	48	Kelompok	1.040.000.000	50	Kelompok	2.060.360.116	14	Kelompok	1.149.311.945	14	Kelompok	1.038.675.745	56,00	754.111.168	400,00	72,60	106,00	2.814.471.284	220,83	270,62	Dinas Perikanan	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**52,82**								
															Predikat Kinerja				**R**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																												
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										**7.365.752.320**			-										
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang mengikuti kegiatan pengembangan kesenian budaya									**2.326.809.729**			-	**41,75**	**1.152.551.279**								
2	**22**	**2**	**2,01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksananya kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten kota**	**100**		**4.800.000**	**100**		**1.260.158.477**	**100**		**50.000.000**			-	**33,20**	**16.600.000**	**33,20**	**33,20**	**133,20**	**1.276.758.477**	**133,20**	**26.599,13**		
2	22	2	2,01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4	Objek	4.800.000	2	Objek	1.260.158.477	1	Objek	50.000.000			-		16.600.000	-	33,20	2,00	1.276.758.477	50,00	26.599,13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	**22**	**2**	2,02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten tuba	**100**		**8.000.000**			-			**18.600.000**					-	-			-	-	-	-		
2	22	2	2,02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	200	Sertifikat	8.000.000	-		-	1	Lembaga	18.600.000					-	-			-	-	-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	**22**	**2**	**2,03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**pembinaan sumber daya manusia atau pelaku kesenian**	**100**		**2.648.000.000**	**100**		**799.286.000**	**100**		**2.258.209.729**			-	**50,30**	**1.135.951.279**	**50,30**	**50,30**	**150,30**	**1.935.237.279**	**150,30**	**73,08**		
2	22	2	2,03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	400	Orang	2.648.000.000	98	Orang	799.286.000	30	orang	730.000.000					285.000.000	-	39,04	98,00	1.084.286.000	24,50	40,95	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	2	2,03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		2	Unit	4.584.629.187	2	Unit	1.249.073.514	1	unit	1.528.209.729				1,00	850.951.279	100,00	55,68	3,00	2.100.024.793	150,00	45,81	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																								
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Dinas Pariwisata Kab. Tulang Bawang									**4.076.782.920**			-	**67,76**	**2.762.262.382**								
3	**26**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai Perangkat Daerah**	**100**		**18.476.117.524**	**100**		**6.780.099.956**	**100**		**4.076.782.920**			-	**67,76**	**2.762.262.382**	**67,76**	**67,76**	**167,76**	**9.542.362.338**	**167,76**	**51,65**		
3	26	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	14.968.457.524	150	Orang/Bulan	6.780.099.956	14	Bulan	4.076.782.920				4,00	2.762.262.382	28,57	67,76	154,00	9.542.362.338	275,00	63,75	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase peningkatan SDM kepariwisataan									**937.159.671**			-	**60,45**	**745.838.527**			**60,45**					
3	**26**	**5**	**2,01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan Pariwisata**	**100**		**2.380.638.684**	**100**		**1.350.348.500**	**100**		**907.159.671**			-	**80,89**	**733.838.527**	**80,89**	**80,89**	**180,89**	**2.084.187.027**	**180,89**	**87,55**		
3	26	5	2,01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	400	Orang	4.000.000	60	Orang	524.263.200	20	Orang	375.000.000					312.900.000	-	83,44	60,00	837.163.200	15,00	20.929,08	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	5	2,01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	400	Orang	4.000.000			-	30	orang	250.000.000					250.000.000	-	100,00	-	250.000.000	-	6.250,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	5	2,01	4	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan		12	Laporan	728.638.684	3	Laporan	136.348.800	3	Laporan	182.159.671				1,00	94.170.400	33,33	51,70	4,00	230.519.200	33,33	31,64	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	5	2,01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi		8	Laporan	400.000.000	2	Laporan	98.956.500	2	Laporan	100.000.000				-	76.768.127	-	76,77	2,00	175.724.627	25,00	43,93	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
3	26	5	2,02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**		**100**		**888.000.000**	**100**		**250.060.100**	**100**		**30.000.000**			-	**40,00**	**12.000.000**	**40,00**	**40,00**	**140,00**	**262.060.100**	**140,00**	**29,51**		
3	26	5	2,02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		4	Dokumen	888.000.000	12	Dokumen	250.060.100	10	orang	30.000.000				-	12.000.000	-	40,00	12,00	262.060.100	300,00	29,51	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**56,65**									
															Predikat Kinerja				**R**									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																													
DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																													
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																									
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**14.066.535.145**			**17.491.921.664**											
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya akuntabilias kinerja Dinas Pertanian									**11.556.094.345**			**12.338.065.664**	**86,51**									
3	**27**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN, Tersusunnya Laporan Keuangan**	**100**		**60.911.800.034**	**100**		**21.163.184.117**	**100**		**11.556.094.345**	**100**		**12.338.065.664**	**86,51**	**10.154.218.488**	**86,51**	**82,30**	**186,51**	**31.317.402.605**	**186,51**	**51,41**		
3	27	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	60.771.269.234	28	Bulan	21.128.051.417	107	Orang	11.556.094.345	176	Orang	12.338.065.664	497,00	10.154.218.488	282,39	82,30	525,00	31.282.269.905	937,50	51,48	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Pengolahan Penyuluhan Peranian									**2.101.940.800**			**2.343.620.800**	**69,84**									
3	**27**	**7**	**2,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase peningkatan pengetahuanpenyuluh dan petugas teknis**	**100**		**7.098.758.967**	**100**		**4.701.162.413**	**100**		**2.101.940.800**	**100**		**2.343.620.800**	**69,84**	**1.514.443.956**	**69,84**	**64,62**	**169,84**	**6.215.606.369**	**169,84**	**87,56**		
3	27	7	2,01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah sekolah lapang kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi	12	Unit	1.856.400.000	3	Unit	2.956.817.413	1	Unit	2.101.940.800	1	Unit	2.101.940.800	12,00	1.514.443.956	1.200,00	72,05	15,00	4.471.261.369	125,00	240,86	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Persentase terbayarnya bantuan operasional penyuluh pertanian	24	Unit	483.360.000				12	Unit	241.680.000	12	Unit	241.680.000	9,00	241.680.000	75,00	100,00	9,00	241.680.000	37,50	50,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	**Persentase peningkatan skor Pola**												**36.119.000**	**36,04**	**13.017.000**								
					Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan		**100**		**72.238.000**							**100**		**36.119.000**	**36,04**	**13.017.000**	**36,04**	**36,04**	**36,04**	**13.017.000**	**36,04**	**18,02**		
					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persentase skor pola pangan harapan	2	Laporan	5.608.000							1	Laporan	2.804.000	1,00	622.000	100,00	22,18	1,00	622.000	50,00	11,09	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Pemantauan harga dan pasokan pangan		2	Laporan	3.050.000							1	Laporan	1.525.000	1,00	175.000	100,00	11,48	1,00	175.000	50,00	5,74	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kabupaten/Kota		2	Laporan	2.520.000							1	Laporan	1.260.000	1,00	430.000	100,00	34,13	1,00	430.000	50,00	17,06	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/Kota		2	Laporan	11.314.000							1	Laporan	5.657.000	1,00	5.895.000	100,00	104,21	1,00	5.895.000	50,00	52,10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	Jumlah penyusunan Neraca Bahan	2	Laporan	2.566.000							1	Laporan	1.283.000	1,00	430.000	100,00	33,52	1,00	430.000	50,00	16,76	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Pemeliharaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Makanan (NBM)	2	Laporan	8.748.000							1	Laporan	4.374.000	1,00	1.157.000	100,00	26,45	1,00	1.157.000	50,00	13,23	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		2	Laporan	19.216.000							1	Laporan	9.608.000	1,00	2.154.000	100,00	22,42	1,00	2.154.000	50,00	11,21	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun		2	Laporan	2.494.000							1	Laporan	1.247.000	1,00	257.000	100,00	20,61	1,00	257.000	50,00	10,30	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Pemantauan harga dan pasokan pangan	2	Laporan	11.556.000							1	Laporan	5.778.000	1,00	1.666.000	100,00	28,83	1,00	1.666.000	50,00	14,42	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Koordinasi dan siknronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita/tahun		2	Laporan	5.166.000							1	Laporan	2.583.000	1,00	231.000	100,00	8,94	1,00	231.000	50,00	4,47	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian	
					Program penanganan kerawanan pangan	**Persentase peta kerentanan dan**												**7.371.200**	**20,22**	**1.490.800**								
					Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan	**Persentase peta kerentanan dan**	**100**		**14.742.400**							**100**		**7.371.200**	**20,22**	**1.490.800**	**20,22**	**20,22**	**20,22**	**1.490.800**	**20,22**	**10,11**		

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2				3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
				Penyusunan pemuktahiran dan anlisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	kerawanan pangan (FSVA)	2	Laporan	5.676.800							1	Laporan	2.838.400	1,00	450.000	100,00	15,85	1,00	450.000	50,00	7,93	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian
				Penanganan kerwanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota		2	Laporan	4.532.800							1	Laporan	2.266.400	1,00	520.400	100,00	22,96	1,00	520.400	50,00	11,48	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian
				Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah	2	Laporan	4.532.800							1	Laporan	2.266.400	1,00	520.400	100,00	22,96	1,00	520.400	50,00	11,48	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase pengawasan dan**												**3.668.000**	**15,89**	**583.000**							
				Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rekomendasi keamanan pangan**	**100**		**7.336.000**							**100**		**3.668.000**	**15,89**	**583.000**	**15,89**	**15,89**	**15,89**	**583.000**	**15,89**	**7,95**	
				Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	segar asal tumbuhan dan sarana dan	2	Laporan	4.116.000							1	Laporan	2.058.000	1,00	258.000	100,00	12,54	1,00	258.000	50,00	6,27	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian
				Penyediaan sarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan	2	Laporan	3.220.000							1	Laporan	1.610.000	1,00	325.000	100,00	20,19	1,00	325.000	50,00	10,09	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pertanian
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**45,70**								
														Predikat Kinerja				**SR**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										
DINAS PERDAGANGAN																										
3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																						
3	**30**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										**3.330.215.140**			-								
3	**30**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan dokumen perencanaan OPD									**3.149.815.940**			-	**75,52**								
3	**30**	**1**	**2,02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi yang Baik**	**100**		**13.965.846.212**	**100**		**6.707.338.038**	**100**		**2.844.615.740**	**100**		-	**97,20**	**2.764.877.601**	**97,20**	**97,20**	**197,20**	**9.472.215.639**	**197,20**	**67,82**	
3	30	1	2,02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	11.252.346.212	28	Bulan	5.020.638.038	12	Bulan	2.197.190.740				11,00	2.137.092.601	91,67	97,26	39,00	7.157.730.639	69,64	63,61	Dinas Perdagangan
3	30	1	2,02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52	Dokumen	2.593.500.000	24	Dokumen	1.668.700.000	12	Dokumen	614.225.000				9,00	602.025.000	75,00	98,01	33,00	2.270.725.000	63,46	87,55	Dinas Perdagangan
3	30	1	2,02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	32	Dokumen	120.000.000	7	Dokumen	18.000.000	12	Dokumen	33.200.000				6,00	25.760.000	50,00	77,59	13,00	43.760.000	40,63	36,47	Dinas Perdagangan
3	**30**	**1**	**2,06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Penunjang Kinerja Perkatoran**	**100**		**618.304.000**	**100**		**165.554.350**	**100**		**49.800.000**	**100**		-	**71,61**	**35.660.000**	**71,61**	**71,61**	**171,61**	**201.214.350**	**171,61**	**32,54**	
3	30	1	2,06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	128	Paket	109.604.000	42	Paket	38.897.350	22	Paket	20.060.000				22,00	20.060.000	100,00	100,00	64,00	58.957.350	50,00	53,79	Dinas Perdagangan
3	30	1	2,06	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200	Paket	48.700.000	89	Paket	14.678.000	10	Paket	8.500.000				10,00	8.500.000	100,00	100,00	99,00	23.178.000	49,50	47,59	Dinas Perdagangan
3	30	1	2,06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	228.000.000	34	Laporan	67.000.000	13	Laporan	17.000.000				-	7.100.000	-	41,76	34,00	74.100.000	28,33	32,50	Dinas Perdagangan
3	**30**	**1**	**2,08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**100**		**2.393.884.000**	**100**		**339.046.982**	**100**		**109.142.050**	**100**		-	**44,01**	**48.029.544**	**44,01**	**44,01**	**144,01**	**387.076.526**	**144,01**	**16,17**	
3	30	1	2,08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	Laporan	331.976.000	8	Laporan	76.207.982	12	Laporan	28.001.600				9,00	24.179.544	75,00	86,35	17,00	100.387.526	106,25	30,24	Dinas Perdagangan
3	30	1	2,08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	599.800.000	22	Laporan	143.440.000	12	Laporan	66.140.450				9,00	23.850.000	75,00	36,06	31,00	167.290.000	64,58	27,89	Dinas Perdagangan
3	**30**	**1**	**2,09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Dana Pemeliharaan Inventaris Kantor**	**100**		**1.000.520.000**	**100**		**392.491.250**	**100**		**146.258.150**	**100**		-	**89,29**	**130.590.072**	**89,29**	**89,29**	**189,29**	**523.081.322**	**189,29**	**52,28**	
3	30	1	2,09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	Unit	772.600.000	10	Unit	336.860.000	12	Unit	131.258.150				6,00	130.590.072	50,00	99,49	16,00	467.450.072	80,00	60,50	Dinas Perdagangan
3	**30**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan									**52.273.000**			-	**4,47**				**4,47**				
3	**30**	**3**	**2,02**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Peningkatan Pengelolaan Pasar**	**100**		**520.000.000**	**100**		**164.906.052**	**100**		**52.273.000**	**100**		-	**4,47**	**2.339.000**	**4,47**	**4,47**	**104,47**	**167.245.052**	**104,47**	**32,16**	
3	30	3	2,02	2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	44	Dokumen	280.000.000	18	Dokumen	123.886.052	2	Dokumen	52.273.000				1,00	2.339.000	50,00	4,47	19,00	126.225.052	43,18	45,08	Dinas Perdagangan
3	**30**	**4**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Nilai Koefisien Variasi harga barang									**87.376.200**			-	**100,00**				**100,00**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
3	**30**	**4**	**2,02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pasar Murah**	**100**		**2.000.000.000**	**100**		**492.314.000**	**100**		**87.376.200**	**100**		**-**	**100,00**	**87.376.200**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**579.690.200**	**200,00**	**28,98**	
3	30	4	2,02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48	Laporan	400.000.000	20	Laporan	76.492.000	12	Laporan	25.800.000				9,00	25.800.000	75,00	100,00	29,00	102.292.000	60,42	25,57	Dinas Perdagangan
3	30	4	2,02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	24	Laporan	1.600.000.000	12	Laporan	415.822.000	1	Laporan	61.576.200				1,00	61.576.200	100,00	100,00	13,00	477.398.200	54,17	29,84	Dinas Perdagangan
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen									**40.750.000**			**-**	**99,98**				**99,98**				
3	**30**	**6**	**2,01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Terciptanya Pengawasan yang Melekat Terhadap Pelaku Pasar dan Pelaku Usaha**	**100**		**600.000.000**	**100**		**112.060.300**	**100**		**40.750.000**	**100**		**-**	**99,98**	**40.740.686**	**99,98**	**99,98**	**199,98**	**152.800.986**	**199,98**	**25,47**	
3	30	6	2,01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	280	Unit	360.000.000	130	Unit	65.266.300	12	Unit	28.400.000				6,00	28.392.686	50,00	99,97	136,00	93.658.986	48,57	26,02	Dinas Perdagangan
3	30	6	2,01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	280	Orang	240.000.000	104	Orang	46.794.000	12	Orang	12.350.000				9,00	12.348.000	75,00	99,98	113,00	59.142.000	40,36	24,64	Dinas Perdagangan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**69,99**								
																		Predikat Kinerja	**5**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
SEKRETARIAT DAERAH																												
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**67.971.383.837**			**72.866.468.456**										
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	realisasi pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah									**58.362.732.237**			**63.814.036.256**	**91,69**	**57.819.166.930**				**164.464.340.239**			
4	**1**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**		**3.271.868.000**	**100**		**1.526.092.116**	**100**		**1.263.988.700**	**100**		**1.104.953.200**	**92,96**	**1.027.209.960**	**92,96**	**92,96**	**192,96**	**2.553.302.076**	**192,96**	**78,04**	
4	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	1.800.000.000	20	Dokumen	758.820.080	10	Dokumen	311.090.000	10	Dokumen	272.230.500	10,00	271.145.060	100,00	99,60	30,00	1.029.965.140	75,00	57,22	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	1.471.868.000	2	Laporan	767.272.036	1	Laporan	952.898.700	1	Laporan	832.722.700	1,00	756.064.900	100,00	90,79	3,00	1.523.336.936	75,00	103,50	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**120.361.516.372**	**100**		**53.828.980.317**	**100**		**33.395.064.896**	**100**		**33.475.249.224**	**85,92**	**28.762.340.051**	**85,92**	**85,92**	**185,92**	**82.591.320.368**	**185,92**	**68,62**	
4	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	100.185.016.372	28	Bulan	45.071.714.603	124	Orang/Bulan	29.189.649.296	124	Orang/bulan	29.249.798.124	496,00	24.609.914.816	400,00	84,14	524,00	69.681.629.419	935,71	69,55	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	16.376.500.000	28	Dokumen	7.048.075.000	14	Dokumen	3.584.975.000	12	Dokumen	3.608.975.000	12,00	3.542.600.000	100,00	98,16	40,00	10.590.675.000	83,33	64,67	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	1.800.000.000	24	Dokumen	825.058.054	12	Dokumen	291.220.000	1	Dokumen	289.290.000	1,00	288.202.930	100,00	99,62	25,00	1.113.260.984	52,08	61,85	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48	Laporan	2.000.000.000	24	Laporan	884.132.660	12	Laporan	329.220.600	5	Dokumen	327.186.100	5,00	321.622.305	100,00	98,30	29,00	1.205.754.965	60,42	60,29	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**113.729.776.400**	**100**		**30.563.976.457**	**100**		**14.987.744.724**	**100**		**20.089.318.932**	**95,97**	**19.280.136.900**	**95,97**	**95,97**	**195,97**	**49.844.113.357**	**195,97**	**43,83**	
4	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	440	Paket	51.697.904.400	165	Paket	6.510.772.819	92	Paket	5.488.017.500	110	Paket	6.794.279.000	110,00	6.082.995.884	100,00	89,53	275,00	12.593.768.703	62,50	24,36	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	84	Paket	11.922.056.000	42	Paket	4.412.953.290	20	Paket	1.545.782.000	21	Paket	2.552.250.000	21,00	2.537.787.141	100,00	99,43	63,00	6.950.740.431	75,00	58,30	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	44	Paket	23.147.016.000	21	Paket	9.292.856.068	10	Paket	4.394.995.224	11	Paket	5.116.139.932	11,00	5.066.888.875	100,00	99,04	32,00	14.359.744.943	72,73	62,04	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	44	Laporan	26.962.800.000	23	Laporan	10.347.394.280	10	Laporan	3.558.950.000	11	Laporan	5.626.650.000	11,00	5.592.465.000	100,00	99,39	34,00	15.939.859.280	77,27	59,12	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100**		**25.644.802.188**	**100**		**11.325.389.604**	**100**		**4.863.889.717**	**100**		**4.972.139.000**	**95,58**	**4.752.608.206**	**95,58**	**95,58**	**195,58**	**16.077.997.810**	**195,58**	**62,69**	
4	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	Laporan	8.369.794.988	8	Laporan	4.465.873.228	4	Laporan	1.462.029.717	4	Laporan	1.428.542.000	4,00	1.350.066.389	100,00	94,51	12,00	5.815.939.617	75,00	69,49	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	17.275.007.200	24	Laporan	6.859.516.376	12	Laporan	3.401.860.000	12	Laporan	3.543.597.000	12,00	3.402.541.817	100,00	96,02	36,00	10.262.058.193	75,00	59,40	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2,11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**100**		**300.000.000**	**100**		**782.124.342**	**100**		**300.000.000**	**100**		**600.000.000**	**96,85**	**581.095.606**	**96,85**	**96,85**	**196,85**	**1.363.219.948**	**196,85**	**454,41**	
4	1	1	2,11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2	Orang	300.000.000	4	Orang	782.124.342	2	Orang	300.000.000	1	1	600.000.000	1,00	581.095.606	100,00	96,85	5,00	1.363.219.948	250,00	454,41	
4	**1**	**1**	**2,13**		**Penataan Organisasi**	**Terlaksananya Penataan Organisasi di Lingkup Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**3.004.632.000**	**100**		**803.388.864**	**100**		**590.579.000**			**434.493.900**	**76,28**	**331.425.325**		**76,28**	**176,28**	**1.134.814.189**	**176,28**	**37,77**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
4	1	1	2,13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	136	Dokumen	1.000.000.000	41	Dokumen	259.882.626	20	Dokumen	140.000.000	34	Dokumen	80.754.800	34,00	49.167.829	100,00	60,89	75,00	309.050.455	55,15	30,91	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	Laporan	1.000.000.000	4	Laporan	278.942.200	2	Laporan	140.000.000	3	Laporan	84.491.800	3,00	46.304.300	100,00	54,80	7,00	325.246.500	58,33	32,52	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8	Dokumen	1.004.632.000	2	Dokumen	264.564.038	1	Dokumen	310.579.000	2	Dokumen	269.247.300	2,00	235.953.196	100,00	87,63	4,00	500.517.234	50,00	49,82	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2,14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi pimpinan**	**100**		**14.318.968.800**	**100**		**7.815.221.609**	**100**		**2.961.465.200**	**100**		**3.137.882.000**	**98,29**	**3.084.350.882**	**98,29**	**98,29**	**198,29**	**10.899.572.491**	**198,29**	**76,12**	
4	1	1	2,14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	48	Laporan	8.430.177.200	24	Laporan	4.403.998.626	12	Laporan	1.068.763.000	1	Laporan	1.263.168.000	1,00	1.262.757.980	100,00	99,97	25,00	5.666.756.606	52,08	67,22	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	48	Laporan	4.675.220.800	24	Laporan	2.918.306.483	12	Laporan	1.831.054.000	1	Laporan	1.815.991.000	1,00	1.762.891.902	100,00	97,08	25,00	4.681.198.385	52,08	100,13	Sekretariat Daerah
4	1	1	2,14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	48	Laporan	1.213.570.800	24	Laporan	492.916.500	12	Laporan	61.648.200	1	Laporan	58.723.000	1,00	58.701.000	100,00	99,96	25,00	551.617.500	52,08	45,45	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan									**7.106.589.000**			**5.636.351.200**	**84,99**	**4.138.208.139**			**84,99**	**21.290.255.123**			
4	**1**	**2**	**2,01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Tersedianya DokumenAdministrasi tata Pemerintahan daerah**	**100**		**10.115.784.000**	**100**		**2.516.953.489**	**100**		**1.035.174.000**	**100**		**649.778.500**	**77,62**	**504.345.385**	**77,62**	**77,62**	**177,62**	**3.021.298.874**	**177,62**	**29,87**	
4	1	2	2,01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12	Dokumen	1.427.264.000	7	Dokumen	469.203.124	4	Dokumen	385.324.000	3	Dokumen	202.457.000	3,00	176.245.799	100,00	87,05	10,00	645.448.923	83,33	45,22	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	Dokumen	1.532.000.000	7	Dokumen	240.428.706	4	Dokumen	307.226.000	3	Dokumen	265.678.000	3,00	236.903.500	100,00	89,17	10,00	477.332.206	83,33	31,16	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	Dokumen	7.156.520.000	7	Dokumen	1.807.321.659	4	Dokumen	342.624.000	3	Dokumen	181.643.500	3,00	91.196.086	100,00	50,21	10,00	1.898.517.745	83,33	26,53	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**	**2,02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat**	**100**		**43.350.726.400**	**100**		**13.555.074.035**	**100**		**5.533.915.000**	**100**		**4.682.194.800**	**71,46**	**3.346.059.854**	**71,46**	**71,46**	**171,46**	**16.901.133.889**	**171,46**	**38,99**	
4	1	2	2,02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	Dokumen	6.220.988.800	4	Dokumen	6.712.176.935	2	Dokumen	1.694.082.600	3	Laporan	1.553.005.800	3,00	1.601.604.954	100,00	103,13	7,00	8.313.781.889	87,50	133,64	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial	48	Dokumen	35.636.340.000	24	Dokumen	6.481.573.100	12	Dokumen	3.476.655.000	4	Laporan	2.876.252.600	4,00	1.714.409.700	100,00	59,61	28,00	8.195.982.800	58,33	23,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	48	Dokumen	1.493.397.600	24	Dokumen	361.324.000	12	Dokumen	363.177.400	3	Laporan	252.936.400	3,00	30.045.200	100,00	11,88	27,00	391.369.200	56,25	26,21	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**	**2,03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksaanya fasilitasi dan koordinasi Hukum**	**100**		**2.102.707.200**	**100**		**773.024.900**	**100**		**350.000.000**	**100**		**182.203.900**	**90,98**	**165.776.400**	**90,98**	**90,98**	**190,98**	**938.801.300**	**190,98**	**44,65**	
4	1	2	2,03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2.400	Dokumen	514.656.000	1.152	Dokumen	199.748.100	592	Dokumen	95.493.600	600	Dokumen	52.386.000	600,00	52.277.000	100,00	99,79	1.752	252.025.100	73,00	48,97	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8	Kasus	1.085.343.200	4	Kasus	394.937.100	2	Kasus	163.667.900	2	Kasus	85.941.900	2,00	69.701.900	100,00	81,10	6,00	464.639.000	75,00	42,81	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4	Dokumen	502.708.000	2	Dokumen	178.339.700	1	Dokumen	90.838.500	600	Dokumen	43.876.000	600,00	43.797.500	100,00	99,82	602,00	222.137.200	15.050,00	44,19	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**	**2,04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**pelaksanaan Fasilitasi Kerja sama di Kab Tulang Bawang**	**100**		**1.600.000.000**	**100**		**306.994.560**	**100**		**187.500.000**	**100**		**122.174.000**	**99,88**	**122.026.500**	**99,88**	**99,88**	**199,88**	**429.021.060**	**199,88**	**26,81**	
4	1	2	2,04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40	Dokumen	1.200.000.000	15	Dokumen	246.391.260	9	Dokumen	167.500.000	10	Dokumen	108.254.000	10,00	108.186.500	100,00	99,94	25,00	354.577.760	62,50	29,55	Sekretariat Daerah
4	1	2	2,04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4	Laporan	400.000.000	2	Laporan	60.603.300	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	13.920.000	1,00	13.840.000	100,00	99,43	3,00	74.443.300	75,00	18,61	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Keselarasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang Ditindaklanjuti									**2.502.062.600**			**3.416.081.000**	**85,56**				**85,56**				
4	**1**	**3**	**2,01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**pelaksanaan kebijakan perekonomian**	**100**		**5.537.222.000**	**100**		**3.713.973.786**	**100**		**1.262.153.400**	**100**		**1.621.611.000**	**91,55**	**1.484.645.500**	**91,55**	**91,55**	**191,55**	**5.198.619.286**	**191,55**	**93,88**	
4	1	3	2,01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8	Dokumen	240.000.000	6	Dokumen	487.446.300	2	Dokumen	1.107.170.800	2	Dokumen	1.301.463.200	2,00	1.171.334.750	100,00	90,00	8,00	1.658.781.050	100,00	691,16	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	4.417.222.000	16	Laporan	1.147.142.800	1	Laporan	45.946.000	1	Laporan	25.983.700	1,00	25.423.700	100,00	97,84	17,00	1.172.566.500	425,00	26,55	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	16	Dokumen	880.000.000	19	Dokumen	2.079.384.686	4	Dokumen	109.036.600	4	Dokumen	294.164.100	4,00	287.887.050	100,00	97,87	23,00	2.367.271.736	143,75	269,01	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**	**2,02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Tewujudnya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan serta Laporan Mengenai Program Pembangunan dan Pengawasan interial Program Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang**	**100**		**1.400.000.000**	**100**		**624.794.988**	**100**		**300.000.000**	**100**		**201.543.500**	**95,46**	**192.393.500**	**95,46**	**95,46**	**195,46**	**817.188.488**	**195,46**	**58,37**	
4	1	3	2,02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	10	Dokumen	500.000.000	3	Dokumen	206.879.800	2	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	69.262.000	1,00	65.492.000	100,00	94,56	4,00	272.371.800	40,00	54,47	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10	Laporan	500.000.000	4	Laporan	231.877.388	2	Laporan	100.000.000	1	Laporan	66.791.600	1,00	61.531.600	100,00	92,12	5,00	293.408.988	50,00	58,68	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	Laporan	400.000.000	8	Laporan	186.037.800	4	Laporan	100.000.000	1	Laporan	65.489.900	1,00	65.369.900	100,00	99,82	9,00	251.407.700	56,25	62,85	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**	**2,03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terlaksanya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**		**2.591.759.624**	**100**		**1.233.730.143**	**100**		**755.159.200**	**100**		**1.474.770.600**	**57,17**	**843.153.526**	**57,17**	**57,17**	**157,17**	**2.076.883.669**	**157,17**	**80,13**	
4	1	3	2,03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360	Dokumen	554.515.624	170	Dokumen	500.213.264	90	Dokumen	302.652.700	90	Dokumen	655.043.800	90,00	385.569.800	100,00	58,86	260,00	885.783.064	72,22	159,74	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.040	Dokumen	1.175.232.000	344	Dokumen	414.612.568	36	Dokumen	244.539.500	510	Dokumen	391.124.200	510,00	138.319.200	100,00	35,36	854,00	552.931.768	41,86	47,05	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	496	Orang	862.012.000	145	Orang	318.904.311	50	Orang	207.967.000	124	Orang	428.602.600	124,00	319.264.526	100,00	74,49	269,00	638.168.837	54,23	74,03	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**	**2,04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya MONEV Pertanian kehutanan kelautan perikanan , energi dan air, dan pertambangan dan lingkungan hgidup tahun 2022**	**100**		**1.372.232.000**	**100**		**497.730.800**	**100**		**184.750.000**	**100**		**118.155.900**	**98,04**	**115.839.900**	**98,04**	**98,04**	**198,04**	**613.570.700**	**198,04**	**44,71**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
4	1	3	2,04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	16	Dokumen	454.000.000	5	Dokumen	159.773.900	4	Dokumen	60.740.000	1	Dokumen	38.206.100	1,00	37.173.100	100,00	97,30	6,00	196.947.000	37,50	43,38	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	16	Dokumen	464.000.000	5	Dokumen	163.448.900	4	Dokumen	61.990.000	1	Dokumen	39.652.800	1,00	39.180.800	100,00	98,81	6,00	202.629.700	37,50	43,67	Sekretariat Daerah
4	1	3	2,04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	16	Dokumen	454.232.000	5	Dokumen	174.508.000	4	Dokumen	62.020.000	1	Dokumen	40.297.000	1,00	39.486.000	100,00	97,99	6,00	213.994.000	37,50	47,11	Sekretariat Daerah
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				87,41							
															Predikat Kinerja				T							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
SEKRETARIAT DPRD																											
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
4	2				SEKRETARIAT DPRD										66.455.775.271			64.766.394.267									
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah									39.706.417.021			39.343.500.503	72,35								
4	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100		2.402.974.400	100		581.154.300	100		598.829.200	100		459.899.400	80,33	434.682.612	80,33	94,52	180,33	1.015.836.912	180,33	42,27	
4	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	985.592.000	1	Dokumen	228.391.000	1	Dokumen	231.898.000	1	Dokumen	180.905.200	1,00	175.101.712	100,00	96,79	1,00	175.101.712	25,00	17,77	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	705.408.000	4	Laporan	201.662.900	4	Laporan	204.864.000	4	Laporan	145.241.000	4,00	136.446.800	100,00	93,95	4,00	136.446.800	25,00	19,34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	711.974.400	4	Laporan	151.100.400	4	Laporan	162.067.200	4	Laporan	133.753.200	4,00	123.134.100	100,00	92,06	4,00	123.134.100	25,00	17,29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran, Tercapainya Pemenuhan Gaji ASN dan Tunjangan ASN	100		119.124.011.868	100		28.395.091.612	100		30.249.984.241	100		30.640.790.323	97,02	29.444.330.059	97,02	96,10	197,02	57.839.421.671	197,02	48,55	
4	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	111.665.831.868	536	Orang	26.832.031.612	134	Orang	28.372.439.241	134	Orang	28.691.590.323	536,00	27.654.755.059	400,00	96,39	536,00	27.654.755.059	957,14	24,77	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	7.458.180.000	12	Bulan	1.563.060.000	6	Dokumen	1.877.545.000	3	Dokumen	1.949.200.000	3,00	1.789.575.000	100,00	91,81	3,00	1.789.575.000	6,25	23,99	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi kegiatan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100		1.828.360.000	100		274.866.600	100		355.630.600	100		287.211.400	57,76	196.017.100	57,76	68,25	157,76	470.883.700	157,76	25,75	
4	2	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120	Orang	1.828.360.000	23	Orang	274.866.600	10	Orang	355.630.600	30	Orang	287.211.400	30,00	196.017.100	100,00	68,25	30,00	196.017.100	25,00	10,72	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		15.762.960.000	100		2.577.148.400	100		3.659.905.380	100		4.342.794.180	111,14	4.325.284.272	111,14	99,60	211,14	6.902.432.672	211,14	43,79	
4	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	540.000.000	2	Dokumen	131.456.400	1	Dokumen	179.420.000	1	Dokumen	94.960.000	1,00	79.260.800	100,00	83,47	1,00	79.260.800	25,00	14,68	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	1.692.480.000	10	Laporan	667.000.000	12	Laporan	822.700.000	12	Laporan	1.878.390.000	14,00	1.878.390.000	116,67	100,00	14,00	1.878.390.000	29,17	110,98	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200	Laporan	10.122.480.000	2.600	Laporan	1.720.000.000	650	Laporan	2.361.234.180	650	Laporan	2.369.444.180	600,00	2.367.633.472	92,31	99,92	600,00	2.367.633.472	50,00	23,39	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD pendukung kinerja Sekretariat DPRD	100		10.055.000.000	100		1.229.009.800	100		1.989.678.200	100		1.365.134.100	35,49	561.759.068	35,49	41,15	135,49	1.790.768.868	135,49	17,81	
4	2	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56	Unit	10.055.000.000	13	Unit	1.229.009.800	14	unit	1.989.678.200	14	unit	1.365.134.100	14,00	561.759.068	100,00	41,15	14,00	561.759.068	25,00	5,59	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		1.517.046.000	100		384.747.922	100		414.806.500	100		381.666.000	87,59	352.199.793	87,59	92,28	187,59	736.947.715	187,59	48,58	
4	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	725.046.000	11	Laporan	192.402.922	11	Laporan	218.339.000	11	Laporan	218.339.000	10,00	191.483.793	90,91	87,70	10,00	191.483.793	20,83	26,41	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	792.000.000	2	Laporan	192.345.000	1	Laporan	196.467.500	1	Laporan	163.327.000	1,00	160.716.000	100,00	98,40	1,00	160.716.000	25,00	20,29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100		4.857.271.600	100		402.831.788	100		572.787.700	100		470.504.200	41,37	219.431.924	41,37	46,64	141,37	622.263.712	141,37	12,81	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
4	2	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	900.400.800	1	Unit	249.352.788	4	Unit	396.130.000	4	Unit	308.268.400	4,00	219.431.924	100,00	71,18	4,00	219.431.924	100,00	24,37	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2,15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang terhadap pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100**		**5.195.900.800**	**100**		**1.116.719.300**	**100**		**1.644.175.200**	**100**		**1.324.526.800**	**68,06**	**920.622.940**	**68,06**	**69,51**	**168,06**	**2.037.342.240**	**168,06**	**39,21**	
4	2	1	2,15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	160	Orang Per Bulan	401.368.800	640	Orang Per Bulan	133.833.500	160	Paket	192.342.200	40	Orang	156.461.200	40,00	149.048.000	100,00	95,26	40,00	149.048.000	25,00	37,13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	Paket	3.814.532.000	1	Paket	963.073.000	1	Paket	1.209.533.000	40	Paket	947.714.600	40,00	626.700.420	100,00	66,13	40,00	626.700.420	1.000,00	16,43	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2,15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	292	Orang	980.000.000	35	Orang	19.812.800	35	Orang	242.300.000	40	Orang	220.351.000	40,00	144.874.520	100,00	65,75	40,00	144.874.520	13,70	14,78	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									**26.749.358.250**			**25.422.893.764**	**71,10**				**71,10**				
4	**2**	**2**	**2,01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Perda tepat waktu**	**100**		**7.443.716.000**	**100**		**2.566.828.712**	**100**		**3.893.690.300**	**100**		**3.561.497.100**	**72,04**	**2.696.041.338**	**72,04**	**75,70**	**172,04**	**5.262.870.050**	**172,04**	**70,70**	
4	2	2	2,01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	24	Dokumen	2.700.434.800	6	Dokumen	2.105.750.512	8	Dokumen	2.364.354.800	8	Dokumen	2.195.285.800	8,00	1.802.296.838	100,00	82,10	8,00	1.802.296.838	33,33	66,74	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4	Dokumen	2.446.797.200	1	Dokumen	42.456.200	2	Dokumen	470.334.500	2	Dokumen	594.227.500	2,00	288.403.300	100,00	48,53	2,00	288.403.300	50,00	11,79	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	Dokumen	2.296.484.000	2	Dokumen	418.622.000	4	Dokumen	1.059.001.000	4	Dokumen	771.983.800	4,00	605.341.200	100,00	78,41	4,00	605.341.200	50,00	26,36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2,02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi**	**100**		**9.218.794.400**	**100**		**1.762.062.188**	**100**		**3.424.548.500**	**100**		**2.846.823.500**	**59,04**	**1.921.389.630**	**59,04**	**67,49**	**159,04**	**3.683.451.818**	**159,04**	**39,96**	
4	2	2	2,02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	Dokumen	1.182.589.200	1	Dokumen	223.107.300	5	Dokumen	420.665.300	5	Dokumen	391.799.300	5,00	322.668.000	100,00	82,36	5,00	322.668.000	125,00	27,28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	Dokumen	1.182.589.200	1	Dokumen	152.614.100	5	Dokumen	418.272.300	5	Dokumen	389.406.300	5,00	152.366.700	100,00	39,13	5,00	152.366.700	125,00	12,88	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	Dokumen	2.102.348.000	1	Dokumen	380.464.400	5	Dokumen	588.605.000	5	Dokumen	558.721.000	5,00	511.835.000	100,00	91,61	5,00	511.835.000	125,00	24,35	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen	1.745.416.000	1	Dokumen	420.016.288	5	Dokumen	412.625.000	5	Dokumen	382.349.000	5,00	360.385.610	100,00	94,26	5,00	360.385.610	125,00	20,65	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per	8	Dokumen	1.654.228.000	2	Dokumen	288.201.600	5	Dokumen	1.165.630.100	5	Dokumen	744.903.100	5,00	381.381.020	100,00	51,20	5,00	381.381.020	62,50	23,05	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	8	Dokumen	1.351.624.000	2	Dokumen	297.658.500	5	Dokumen	418.750.800	5	Dokumen	379.644.800	3,00	192.753.300	60,00	50,77	3,00	192.753.300	37,50	14,26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2,03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi**	**100**		**23.631.608.000**	**100**		**6.906.180.078**	**100**		**6.465.373.800**	**100**		**6.992.024.800**	**96,61**	**6.350.500.645**	**96,61**	**90,82**	**196,61**	**13.256.680.723**	**196,61**	**56,10**	
4	2	2	2,03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16	Laporan	5.077.222.000	4	Laporan	1.658.062.290	12	Laporan	1.409.216.200	12	Laporan	1.590.343.900	12,00	1.367.806.804	100,00	86,01	12,00	1.367.806.804	75,00	26,94	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16	Laporan	5.574.681.200	4	Laporan	1.798.161.170	12	Laporan	1.691.317.500	12	Laporan	1.961.853.800	12,00	1.957.775.208	100,00	99,79	12,00	1.957.775.208	75,00	35,12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16	Laporan	4.667.024.800	4	Laporan	1.519.585.170	12	Laporan	1.289.160.700	12	Laporan	1.489.160.700	12,00	1.444.858.360	100,00	97,03	12,00	1.444.858.360	75,00	30,96	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16	Laporan	5.570.803.200	4	Laporan	1.480.235.236	12	Laporan	1.611.317.500	12	Laporan	1.781.317.500	12,00	1.433.156.873	100,00	80,45	12,00	1.433.156.873	75,00	25,73	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	Dokumen	2.741.876.800	1	Dokumen	450.136.212	12	Laporan	464.361.900	12	Laporan	169.348.900	10,00	146.903.400	83,33	86,75	10,00	146.903.400	250,00	5,36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2,04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase peningkatan kapasitas anggota DPRD**	**100**		**8.588.000.000**	**100**		**3.596.244.914**	**100**		**4.130.783.800**	**100**		**3.805.404.900**	**71,60**	**2.921.654.774**	**71,60**	**76,78**	**171,60**	**6.517.899.688**	**171,60**	**75,90**	
4	2	2	2,04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12	Dokumen	4.800.000.000	3	Dokumen	2.421.435.914	3	Dokumen	2.601.633.000	3	Dokumen	2.815.974.000	3,00	2.030.916.174	100,00	72,12	3,00	2.030.916.174	25,00	42,31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi	200	Dokumen	1.336.582.400	150	Dokumen	690.872.200	50	Dokumen	852.315.600	50	Dokumen	373.248.900	50,00	293.072.000	100,00	78,52	50,00	293.072.000	25,00	21,93	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	48	Orang	704.000.000	24	Orang	105.000.000	10	Orang	126.000.000	10	Orang	126.000.000	10,00	126.000.000	100,00	100,00	10,00	126.000.000	20,83	17,90	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	48	Orang	1.040.000.000	35	Orang	182.000.000	10	Orang	352.000.000	10	Orang	352.000.000	10,00	336.000.000	100,00	95,45	10,00	336.000.000	20,83	32,31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	200	Dokumen	707.417.600	42	Dokumen	196.936.800	40	Dokumen	198.835.200	40	Dokumen	138.182.000	40,00	135.666.600	100,00	98,18	40,00	135.666.600	20,00	19,18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2,05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase aspirasi masyarakat yang dijaring melalui Reses yang diakomodir dalam APBD**	**100**		**9.600.000.000**	**100**		**1.480.077.200**	**100**		**2.229.952.000**	**100**		**1.509.952.000**	**68,83**	**1.332.087.800**	**68,83**	**88,22**	**168,83**	**2.812.165.000**	**168,83**	**29,29**	
4	2	2	2,05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	28	Dokumen	9.600.000.000	7	Dokumen	1.480.077.200	7	Dokumen	2.229.952.000	7	Dokumen	1.509.952.000	7,00	1.332.087.800	100,00	88,22	7,00	1.332.087.800	25,00	13,88	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2,06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase pelanggaran kode etik DPRD yang ditindaklanjuti**	**100**		**1.936.228.800**	**100**		**566.846.900**	**100**		**500.607.200**	**100**		**500.607.200**	**94,08**	**470.992.785**	**94,08**	**94,08**	**194,08**	**1.037.839.685**	**194,08**	**53,60**	
4	2	2	2,06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12	Laporan	1.936.228.800	3	Laporan	566.846.900	3	Laporan	500.607.200	3	Laporan	500.607.200	3,00	470.992.785	100,00	94,08	3,00	470.992.785	25,00	24,33	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2,07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase kerjasama informasi dan media massa dalam publikasi kegiatan DPRD**	**100**		**12.260.000.000**	**100**		**28.482.600**	**100**		**34.180.000**	**100**		**5.666.200**	**8,60**	**2.939.100**	**8,60**	**51,87**	**108,60**	**31.421.700**	**108,60**	**0,26**	
4	2	2	2,07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	64	Dokumen	12.260.000.000	15	Dokumen	28.482.600	16	Dokuemn	34.180.000	16	Dokuemn	5.666.200	7,00	2.939.100	43,75	51,87	7,00	2.939.100	10,94	0,02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2,08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi**	**100**		**19.668.110.800**	**100**		**5.971.651.372**	**100**		**6.070.222.650**	**100**		**6.200.918.064**	**97,95**	**5.982.112.700**	**97,95**	**96,47**	**197,95**	**11.953.764.072**	**197,95**	**60,78**	
4	2	2	2,08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	32	Dokumen	12.568.647.600	11	Dokumen	3.928.278.924	8	Dokumen	3.518.111.050	8	Dokumen	3.942.800.300	8,00	3.934.579.644	100,00	99,79	8,00	3.934.579.644	25,00	31,30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	240	Laporan	780.000.000	41	Laporan	163.383.000	12	Laporan	226.160.000	12	Laporan	184.932.000	12,00	161.546.500	100,00	87,35	12,00	161.546.500	5,00	20,71	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
4	2	2	2,08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	Dokumen	5.642.366.400	15	Dokumen	1.668.387.648	15	Dokumen	2.104.071.600	15	Dokumen	1.954.012.764	13,00	1.801.967.256	86,67	92,22	13,00	1.801.967.256	21,67	31,94	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2,08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48	Dokumen	677.096.800	12	Dokumen	211.601.800	12	Dokumen	221.880.000	12	Dokumen	119.173.000	12,00	84.019.300	100,00	70,50	12,00	84.019.300	25,00	12,41	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				71,72								
															Predikat Kinerja				S								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH																											
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
5	1				PERENCANAAN										11.638.951.354			11.485.743.641										
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah yang Mencapai Target									7.457.881.354			7.882.595.641	85,17	6.883.022.745								
5	1	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100		1.075.098.414			235.322.300	100		110.000.000	100		104.235.000	95,57	104.235.000	95,57	100,00	95,57	339.557.300	95,57	31,58	
5	1	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Renstra, IKU, Renja, Perubahan Renja, PK, Perubahan PK, Cascading, RKT, Rencana Aksi)	36	Dokumen	423.693.165	12	Dokumen	116.878.300	6	Dokumen	50.000.000	9	Dokumen	48.100.000	9,00	48.100.000	100,00	100,00	21,00	164.978.300	58,33	38,94	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	Laporan	313.882.539	2	Dokumen	50.011.100	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	21.135.000	1,00	21.135.000	100,00	100,00	3,00	71.146.100	75,00	22,67	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	Laporan	227.522.710	10	Dokumen	56.042.900	5	Laporan	35.000.000	5	Laporan	35.000.000	5,00	35.000.000	100,00	100,00	15,00	91.042.900	75,00	40,01	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100		21.768.197.712	100		9.487.108.741	100		5.683.921.354	100		6.328.303.941	93,27	5.488.224.729	93,27	86,73	193,27	14.975.333.470	193,27	68,79	
5	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	164	Bulan	20.031.157.712	174	Bulan	8.826.164.375	40	orang	5.377.081.354	68	orang	6.187.963.941	188,00	5.387.954.729	276,47	87,07	362,00	14.214.119.104	220,73	70,96	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	Laporan	1.377.040.000	8	Laporan	536.836.866	12	laporan	241.440.000	12	laporan	74.940.000	12,00	37.025.000	100,00	49,41	20,00	573.861.866	41,67	41,67	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	80.000.000	2	Laporan	34.206.400	1	laporan	20.000.000	1	laporan	20.000.000	1,00	18.100.000	100,00	90,50	3,00	52.306.400	75,00	65,38	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Laporan	120.000.000	36	Laporan	59.424.700	12	Laporan	45.400.000	12	Laporan	45.400.000	12,00	45.145.000	100,00	99,44	48,00	104.569.700	66,67	87,14	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keakuratan data Barang Milik aderah (BMD) Bappeda	100		80.000.000	-		38.869.100	100		20.000.000	100		20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100,00	100,00	58.869.100	100,00	73,59	
5	1	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	80.000.000	2	Laporan	38.869.100	1	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	1,00	20.000.000	100,00	100,00	3,00	58.869.100	75,00	73,59	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	100		1.056.444.000	100		101.161.400	100		85.400.000	100		81.600.000	73,97	61.955.100	73,97	75,93	173,97	163.116.500	173,97	15,44	
5	1	1	2,05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4	Dokumen	280.000.000	2	Dokumen	96.129.100	1	Dokumen	73.800.000	1	Dokumen	70.000.000	1,00	54.103.800	100,00	77,29	3,00	150.232.900	75,00	53,65	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4	Dokumen	60.042.000	1	Dokumen	3.512.300	1	Dokumen	11.600.000	1	Dokumen	11.600.000	1,00	7.851.300	100,00	67,68	2,00	11.363.600	50,00	18,93	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		2.481.340.400	100		1.004.485.650	100		421.848.216	100		304.918.796	83,07	291.153.300	83,07	95,49	183,07	1.295.638.950	183,07	52,22	
5	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40	Paket	54.054.400	20	Paket	26.135.100	10	paket	9.423.000	10	paket	9.423.000	10,00	9.380.700	100,00	99,55	30,00	35.515.800	75,00	65,70	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket	294.074.800	4	Paket	136.464.600	2	paket	81.262.216	2	paket	172.093.796	2,00	160.628.500	100,00	93,34	6,00	297.093.100	75,00	101,03	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	Paket	270.592.000	24	Paket	100.498.800	12	paket	77.561.000	12	paket	38.247.000	12,00	36.341.000	100,00	95,02	36,00	136.839.800	75,00	50,57	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	Laporan	74.619.200	7	Laporan	22.522.000	12	Laporan	18.600.000	12	Laporan	6.600.000	12,00	6.270.000	100,00	95,00	19,00	28.792.000	39,58	38,59	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80	Laporan	1.388.000.000	27	Laporan	344.041.650	20	Laporan	235.002.000	20	Laporan	78.555.000	20,00	78.533.100	100,00	99,97	47,00	422.574.750	58,75	30,44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		3.517.828.352	100		1.533.023.118	100		992.701.784	100		915.667.904	87,17	832.489.216	87,17	90,92	187,17	2.365.512.334	187,17	67,24	
5	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	Laporan	768.350.352	24	Laporan	209.550.393	12	Laporan	196.689.784	12	Laporan	103.855.904	9,00	79.278.228	75,00	76,33	33,00	288.828.621	68,75	37,59	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang menerima pembayaran gaji Tenaga Kontrak	48	Orang	2.749.478.000	26	Orang	1.323.472.725	13	Laporan	796.012.000	13	Laporan	811.812.000	10,00	753.210.988	76,92	92,78	36,00	2.076.683.713	75,00	75,53	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah (BMD) dalam kondisi baik	100		299.480.000	100		142.837.280	100		144.010.000	100		127.870.000	63,12	84.965.400	63,12	66,45	163,12	227.802.680	163,12	76,07	
5	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	32	Unit	178.680.000	9	Unit	91.411.280	8	Unit	91.240.000	8	Unit	97.240.000	8,00	63.935.400	100,00	65,75	17,00	155.346.680	53,13	86,94	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
5	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	42.800.000	2	Unit	26.336.000	1	Unit	27.820.000	1	Unit	8.560.000	1,00	6.950.000	100,00	81,19	3,00	33.286.000	75,00	77,77	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	96	Unit	78.000.000	12	Unit	25.090.000	6	Unit	24.950.000	6	Unit	22.070.000	4,00	14.080.000	66,67	63,80	16,00	39.170.000	16,67	50,22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase tingkat kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan									**2.913.670.000**			**2.588.684.800**	**68,69**				**68,69**				
5	**1**	**2**	**2,01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati**	**100**		**3.415.204.400**	**100**		**2.158.832.073**	**100**		**1.899.776.000**	**100**		**1.801.876.000**	**90,68**	**1.704.142.900**	**90,68**	**94,58**	**190,68**	**3.862.974.973**	**190,68**	**113,11**	
5	1	2	2,01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RKPD	8	Dokumen	63.072.000	4	Dokumen	49.436.500	2	dokumen	73.427.000	2	dokumen	73.427.000	2,00	73.427.000	100,00	100,00	6,00	122.863.500	75,00	194,80	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	2	2,01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja (ASB)	4	Dokumen	1.909.492.400	3	Dokumen	1.482.015.200	1	dokumen	1.053.499.000	1	dokumen	1.049.699.000	1,00	988.317.000	100,00	94,15	4,00	2.470.332.200	100,00	129,37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	2	2,01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah	8	Dokumen	150.176.800	3	Dokumen	36.524.000	1	berita acara	15.754.000	1	berita acara	6.254.000	1,00	5.260.000	100,00	84,11	4,00	41.784.000	50,00	27,82	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara musrenbang kabupaten	8	Berita Acara	948.263.200	4	Berita Acara	277.261.725	1	berita acara	271.014.000	1	berita acara	209.914.000	1,00	209.789.000	100,00	99,94	5,00	487.050.725	62,50	51,36	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	2	2,01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan kampung/kelurahan yang terverifikasi oleh kecamatan	8	Berita Acara	74.721.600	4	Berita Acara	54.327.000	15	usulan	21.852.000	15	usulan	21.852.000	15,00	21.306.000	100,00	97,50	19,00	75.633.000	237,50	101,22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	2	2,01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan (RKPD dan Perubahan RKPD)	8	Dokumen	269.478.400	5	Dokumen	259.267.648	2	dokumen	464.230.000	2	dokumen	440.730.000	2,00	406.043.900	100,00	92,13	7,00	665.311.548	87,50	246,89	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**1**	**2**	**2,02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	**100**		**1.044.652.000**	**100**		**20.771.000**	**100**		**330.807.400**	**100**		**258.417.400**	**62,62**	**193.440.500**	**62,62**	**74,86**	**162,62**	**214.211.500**	**162,62**	**20,51**	
5	1	2	2,02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	4	Dokumen	718.652.000	1	Dokumen	12.305.000	4	Dokumen	192.771.900	4	Dokumen	182.771.900	4,00	149.130.000	100,00	81,59	5,00	161.435.000	125,00	22,46	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	2	2,02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	4	Buku	326.000.000	1	Buku	8.466.000	9	Buku	138.035.500	9	Buku	75.645.500	9,00	44.310.500	100,00	58,58	10,00	52.776.500	250,00	16,19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**1**	**2**	**2,03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase capaian kinerja dan anggaran Pemerintah Daerah**	**100**		**3.833.210.800**	**100**		**1.943.773.200**	**100**		**669.192.600**	**100**		**520.497.400**	**54,83**	**346.566.000**	**54,83**	**66,58**	**154,83**	**2.290.339.200**	**154,83**	**59,75**	
5	1	2	2,03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Laporan DAK TW I, II, III, IV)	16	Laporan	193.210.800	8	Laporan	120.457.200	4	laporan	251.391.800	4	laporan	230.391.800	4,00	224.274.400	100,00	97,34	12,00	344.731.600	75,00	178,42	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	2	2,03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah (Evaluasi Pelaksanaan RKPD TW I, II, III dan IV)	26	Laporan	3.640.000.000	18	Laporan	1.823.316.000	9	laporan	417.800.800	9	laporan	290.105.600	9,00	122.291.600	100,00	42,15	27,00	1.945.607.600	103,85	53,45	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**1**	**2**	**2,04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang mengisi SIPD tepat waktu, tepat proses dan tepat proses**	**100**		**44.795.600**			**28.480.300**	**100**		**13.894.000**	**100**		**7.894.000**	**66,61**	**7.626.000**	**66,61**	**96,61**	**66,61**	**36.106.300**	**66,61**	**80,60**	
5	1	2	2,04	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4	Dokumen	44.795.600	2	Dokumen	28.480.300	1	Dokumen	13.894.000	1	Dokumen	7.894.000	1,00	7.626.000	100,00	96,61	3,00	36.106.300	75,00	80,60	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase tingkat pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah									**1.267.400.000**			**1.014.463.200**	**79,62**				**79,62**				
5	**1**	**3**	**2,01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase konsistensi program/kegiatan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**		**1.880.000.000**	**100**		**600.057.500**	**100**		**280.800.000**	**100**		**192.220.000**	**80,39**	**191.149.000**	**80,39**	**99,44**	**180,39**	**791.206.500**	**180,39**	**42,09**	
5	1	3	2,01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	199.643.200	1	Dokumen	83.651.300	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	30.320.000	1,00	30.320.000	100,00	100,00	2,00	113.971.300	50,00	57,09	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	3	2,01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	199.994.400	1	Dokumen	88.304.100	1	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	46.560.000	1,00	46.560.000	100,00	100,00	2,00	134.864.100	50,00	67,43	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
5	1	3	2,01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	200.362.400	1	Laporan	97.128.200	1	Laporan	55.000.000	1	Laporan	42.620.000	1,00	41.860.000	100,00	98,22	2,00	138.988.200	50,00	69,37	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	3	2,01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	400.000.000	2	Laporan	232.084.000	1	Laporan	105.800.000	1	Laporan	72.720.000	1,00	72.409.000	100,00	99,57	3,00	304.493.000	75,00	76,12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**1**	**3**	**2,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase konsistensi program/kegiatan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100**		**3.003.806.400**	**100**		**681.422.400**	**100**		**455.800.000**	**100**		**374.587.200**	**79,38**	**322.216.200**	**79,38**	**86,02**	**179,38**	**1.003.638.600**	**179,38**	**33,41**	
5	1	3	2,02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	Laporan	721.068.000	1	Laporan	57.649.500	1	Laporan	252.740.000	1	Laporan	235.540.000	1,00	214.039.000	100,00	90,87	2,00	271.688.500	50,00	37,68	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	3	2,02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	500.000.000	2	Dokumen	450.944.900	1	Dokumen	203.060.000	1	Dokumen	139.047.200	1,00	108.177.200	100,00	77,80	3,00	559.122.100	75,00	111,82	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**1**	**3**	**2,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase konsistensi program/kegiatan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**		**2.748.166.788**	**100**		**835.184.717**	**100**		**530.800.000**	**100**		**447.656.000**	**79,08**	**377.463.204**	**79,08**	**84,32**	**179,08**	**1.212.647.921**	**179,08**	**44,13**	
5	1	3	2,03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	462.068.652	2	Dokumen	142.321.800	1	Dokumen	90.000.000	1	Dokumen	71.500.000	1,00	71.200.700	100,00	99,58	3,00	213.522.500	75,00	46,21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	3	2,03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	456.658.266	2	Laporan	102.332.600	1	Laporan	50.400.000	1	Laporan	32.120.000	1,00	31.888.700	100,00	99,28	3,00	134.221.300	75,00	29,39	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	3	2,03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	421.486.327	2	Dokumen	250.178.817	1	Dokumen	95.400.000	1	Dokumen	67.436.000	1,00	67.166.500	100,00	99,60	3,00	317.345.317	75,00	75,29	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	1	3	2,03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	467.953.543	2	Laporan	117.750.100	1	Laporan	295.000.000	1	Laporan	276.600.000	1,00	207.207.304	100,00	74,91	3,00	324.957.404	75,00	69,44	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan ke PD/ Stakeholder lainnya**												**426.232.000**	**71,47**	**340.936.100**							
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100**		**176.224.000**	**100**						**100**		**88.112.000**	**56,94**	**50.174.650**	**56,94**	**56,94**	**156,94**	**50.174.650**	**156,94**	**28,47**	
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2	Dokumen	176.224.000							1	Dokumen	88.112.000	1,00	50.174.650	100,00	56,94	1,00	50.174.650	50,00	28,47	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	**5**	**2**	**2,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**100**		**1.308.000.000**	**100**		**236.194.500**	**100**		**185.600.000**	**100**		**338.120.000**	**85,99**	**290.761.450**	**85,99**	**85,99**	**185,99**	**526.955.950**	**185,99**	**40,29**	
5	5	2	2,04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4	Dokumen	708.000.000	2	Dokumen	179.226.000	1	Dokumen	45.600.000	1	Dokumen	319.912.000	1,00	275.553.450	100,00	86,13	3,00	454.779.450	75,00	64,23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	5	2	2,04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4	Laporan	600.000.000	2	Laporan	56.968.500	1	Laporan	140.000.000	1	Laporan	18.208.000	1,00	15.208.000	100,00	83,52	3,00	72.176.500	75,00	12,03	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**76,24**							
															Predikat Kinerja				**T**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**2**				**KEUANGAN**										**254.071.523.502**			**249.580.574.068**									
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksannanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**126.270.639.335**			**41.019.601.082**			**20.859.127.263**			**23.269.106.787**	**80,76**	**14.139.535.721**							
5	**2**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase indikator program yang tercapai**	**100**		**1.147.808.000**	**100**		**513.449.200**	**100**		**472.927.600**	**100**		**507.489.600**	**101,68**	**495.708.600**	**101,68**	**97,68**	**201,68**	**1.009.157.800**	**201,68**	**87,92**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
5	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	Dokumen	401.965.000	12	Dokumen	175.246.000	6	Dokumen	243.141.000	6	Dokumen	285.737.000	6,00	282.112.000	100,00	98,73	18,00	457.358.000	60,00	113,78	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	30	Dokumen	362.515.000	12	Dokumen	159.247.000	6	Dokumen	109.303.000	6	Dokumen	109.701.000	6,00	105.313.000	100,00	96,00	18,00	264.560.000	60,00	72,98	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	Bulan	383.328.000	23	Bulan	178.956.200	12	Bulan	120.483.600	12	Bulan	112.051.600	12,00	108.283.600	100,00	96,64	35,00	287.239.800	58,33	74,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi anggaran**	**100**		**107.821.936.835**	**100**		**34.492.250.695**	**100**		**16.030.427.554**	**100**		**18.637.606.878**	**61,41**	**10.198.780.274**	**61,41**	**54,72**	**161,41**	**44.691.030.969**	**161,41**	**41,45**	
5	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjagan PNS BPKAD yang dibayarkan	60	Bulan	104.891.059.835	28	Bulan	33.235.799.295	14	Bulan	15.204.250.154	14	Bulan	17.956.758.478	14,00	9.552.609.874	100,00	53,20	42,00	42.788.409.169	70,00	40,79	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan	2.151.014.000	24	Bulan	912.325.000	12	Bulan	623.324.800	12	Bulan	452.818.800	12,00	443.025.800	100,00	97,84	36,00	1.355.350.800	60,00	63,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun pada SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	Bulan	360.039.000	21	Bulan	174.745.600	12	Bulan	98.658.800	12	Bulan	105.751.800	12,00	102.696.800	100,00	97,11	33,00	277.442.400	55,00	77,06	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporam Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran/SKPD	60	Bulan	419.824.000	24	Bulan	169.380.800	12	Bulan	104.193.800	12	Bulan	122.277.800	12,00	100.447.800	100,00	82,15	36,00	269.828.600	60,00	64,27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase keakuratan data Barang Milik aderah (BMD) BPKAD**	**100**		**376.295.000**	**100**		**176.635.500**	**100**		**156.823.000**	**100**		**104.177.000**	**68,67**	**100.377.000**	**68,67**	**96,35**	**168,67**	**277.012.500**	**168,67**	**73,62**	
5	2	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	umlah Dokumen Laporan Persediaan Barang serta Laporan Inventaris Barag Milik BPKAD	60	Bulan	376.295.000	24	Bulan	176.635.500	12	Bulan	156.823.000	12	Bulan	104.177.000	3,00	100.377.000	25,00	96,35	27,00	277.012.500	45,00	73,62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**8.395.779.500**	**100**		**2.361.929.356**	**100**		**1.979.720.109**	**100**		**1.290.090.309**	**59,00**	**1.065.441.450**	**59,00**	**82,59**	**159,00**	**3.427.370.806**	**159,00**	**40,82**	
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik dan alat listrik	60	Bulan	165.675.000	24	Bulan	153.575.000	12	Bulan	116.039.000	12	Bulan	116.039.000	12,00	114.949.350	100,00	99,06	36,00	268.524.350	60,00	162,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	60	Bulan	2.887.834.500	24	Bulan	725.339.956	12	Bulan	965.307.109	12	Bulan	357.327.309	12,00	236.928.000	100,00	66,31	36,00	962.267.956	60,00	33,32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	60	Bulan	149.160.000	24	Bulan	181.865.800	12	Bulan	114.580.000	12	Bulan	114.580.000	12,00	114.505.000	100,00	99,93	36,00	296.370.800	60,00	198,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yg disediakan	60	Bulan	349.405.000	24	Bulan	229.643.000	12	Bulan	159.762.000	12	Bulan	159.762.000	12,00	129.967.500	100,00	81,35	36,00	359.610.500	60,00	102,92	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60	Bulan	410.605.000	24	Bulan	270.530.600	12	Bulan	196.792.000	12	Bulan	196.792.000	12,00	191.651.600	100,00	97,39	36,00	462.182.200	60,00	112,56	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yg disediakan	60	Bulan	3.853.250.000	18	Bulan	531.335.000	12	Bulan	150.000.000	12	Bulan	150.000.000	9,00	150.000.000	75,00	100,00	27,00	681.335.000	45,00	17,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Bulan	216.000.000	24	Bulan	118.800.000	12	Bulan	114.880.000	12	Bulan	114.880.000	12,00	86.400.000	100,00	75,21	36,00	205.200.000	60,00	95,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Kegiatan	363.850.000	5	Kegiatan	150.840.000	3	Kegiatan	162.360.000	3	Kegiatan	80.710.000	3,00	41.040.000	100,00	50,85	8,00	191.880.000	53,33	52,74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**3.877.965.000**	**100**		**1.585.119.331**	**100**		**1.154.421.000**	**100**		**1.564.935.000**	**116,48**	**1.437.181.294**	**116,48**	**91,84**	**216,48**	**3.022.300.625**	**216,48**	**77,94**	
5	2	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Bulan	408.065.000	27	Bulan	183.571.000	12	Bulan	261.181.000	12	Bulan	157.135.000	12,00	142.906.000	100,00	90,94	39,00	326.477.000	65,00	80,01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telpon/internet dan listrik dalam	60	Bulan	2.650.000.000	27	Bulan	987.173.331	12	Bulan	530.000.000	12	Bulan	530.000.000	12,00	497.835.294	100,00	93,93	39,00	1.485.008.625	65,00	56,04	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	819.900.000	26	Bulan	414.375.000	12	Bulan	363.240.000	12	Bulan	877.800.000	12,00	796.440.000	100,00	90,73	38,00	1.210.815.000	63,33	147,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik**	**100**		**1.865.000.000**	**100**		**1.108.242.000**	**100**		**1.064.808.000**	**100**		**1.164.808.000**	**77,32**	**842.047.103**	**77,32**	**72,29**	**177,32**	**1.950.289.103**	**177,32**	**104,57**	
5	2	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yg dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60	Bulan	1.169.600.000	24	Bulan	581.120.000	12	Bulan	730.900.000	12	Bulan	730.900.000	12,00	409.292.603	100,00	56,00	36,00	990.412.603	60,00	84,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yg dipelihara	60	Bulan	182.880.000	21	Bulan	249.860.000	12	Bulan	128.900.000	12	Bulan	128.900.000	12,00	128.843.000	100,00	99,96	33,00	378.703.000	55,00	207,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yg dipelihara Atau di rehabilitasi	60	Bulan	512.520.000	21	Bulan	277.262.000	12	Bulan	205.008.000	12	Bulan	305.008.000	12,00	303.911.500	100,00	99,64	33,00	581.173.500	55,00	113,40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah**			**1.199.512.478.875**			**155.891.788.926**			**231.694.121.239**			**225.081.761.281**	**65,74**	**76.911.511.050**							
5	**2**	**2**	**2,01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Realisasi terhadap target pendapatan Dan Belanja yang telah ditetapkan**	**100**		**4.949.500.000**	**100**		**1.811.354.800**	**100**		**1.479.006.000**	**100**		**1.340.313.000**	**61,92**	**896.853.000**	**61,92**	**66,91**	**161,92**	**2.708.207.800**	**161,92**	**54,72**	
5	2	2	2,01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	20	Dokumen	368.500.000	8	Dokumen	133.970.100	4	Dokumen	188.380.000	4	Dokumen	184.580.000	4,00	126.730.000	100,00	68,66	12,00	260.700.100	60,00	70,75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	20	Dokumen	349.860.000	8	Dokumen	107.715.000	4	Dokumen	185.052.000	4	Dokumen	181.292.000	4,00	123.442.000	100,00	68,09	12,00	231.157.000	60,00	66,07	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifasi	30	Dokumen	168.500.000	12	Dokumen	54.185.000	6	Dokumen	35.040.000	6	Dokumen	21.340.000	6,00	21.340.000	100,00	100,00	18,00	75.525.000	60,00	44,82	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifasi	20	Dokumen	143.500.000	6	Dokumen	52.285.000	4	Dokumen	43.940.000	4	Dokumen	30.240.000	4,00	29.790.000	100,00	98,51	10,00	82.075.000	50,00	57,20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
5	2	2	2,01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifasi	30	Dokumen	168.500.000	12	Dokumen	62.884.700	6	Dokumen	77.373.000	6	Dokumen	52.373.000	4,00	45.523.000	66,67	86,92	16,00	108.407.700	53,33	64,34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang diverifasi	30	Dokumen	143.500.000	12	Dokumen	51.385.000	6	Dokumen	35.750.000	6	Dokumen	47.050.000	4,00	22.050.000	66,67	46,87	16,00	73.435.000	53,33	51,17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	30	Dokumen	1.102.890.000	11	Dokumen	398.620.000	6	Dokumen	367.368.000	6	Dokumen	321.524.000	5,00	304.274.000	83,33	94,63	16,00	702.894.000	53,33	63,73	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	30	Dokumen	827.890.000	13	Dokumen	364.865.200	6	Dokumen	348.823.000	6	Dokumen	310.634.000	6,00	262.184.000	100,00	84,40	19,00	627.049.200	63,33	75,74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Keuangan Daerah	30	Dokumen	375.000.000	12	Dokumen	125.151.000	6	Dokumen	197.280.000	6	Dokumen	191.280.000	1,00	50.130.000	16,67	26,21	13,00	175.281.000	43,33	46,74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2,02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase PD yang melaksanakan penyerapan realisasi belanja PD sesuai dengan ketersediaan dana**	**100**		**7.209.817.500**	**100**		**2.061.986.072**	**100**		**1.613.871.600**	**100**		**1.372.591.900**	**75,03**	**1.164.708.200**	**75,03**	**84,85**	**175,03**	**3.226.694.272**	**175,03**	**44,75**	
5	2	2	2,02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	Bulan	729.569.500	12	Bulan	308.637.156	12	Bulan	245.913.900	12	Bulan	174.985.500	12,00	174.985.500	100,00	100,00	24,00	483.622.656	40,00	66,29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60	Bulan	795.000.000	24	Bulan	482.140.000	12	Bulan	341.594.000	12	Bulan	272.594.000	12,00	255.494.000	100,00	93,73	36,00	737.634.000	60,00	92,78	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	60	Bulan	1.180.062.500	24	Bulan	523.163.174	12	Bulan	203.789.300	12	Bulan	200.921.300	12,00	200.921.300	100,00	100,00	36,00	724.084.474	60,00	61,36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4	Dokumen	2.562.429.500				1	Dokumen	512.485.900	1	Dokumen	349.780.900	1,00	183.667.200	100,00	52,51	1,00	183.667.200	25,00	7,17	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60	Bulan	1.248.413.000	24	Bulan	555.145.942	12	Bulan	212.724.700	12	Bulan	242.855.700	12,00	218.185.700	100,00	89,84	36,00	773.331.642	60,00	61,95	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Bulan	694.343.000	22	Bulan	192.899.800	12	Bulan	97.363.800	12	Bulan	131.454.500	12,00	131.454.500	100,00	100,00	34,00	324.354.300	56,67	46,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2,03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase laporan keuangan PD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**	**100**		**3.216.800.000**	**100**		**1.702.789.200**	**100**		**1.095.533.400**	**100**		**1.013.633.400**	**93,24**	**1.013.632.300**	**93,24**	**100,00**	**193,24**	**2.716.421.500**	**193,24**	**84,44**	
5	2	2	2,03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	60	Bulan	352.400.000	20	Bulan	172.605.000	12	Bulan	113.505.000	12	Bulan	98.505.000	12,00	98.505.000	100,00	100,00	32,00	271.110.000	53,33	76,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	60	Bulan	847.279.600	20	Bulan	422.610.800	12	Bulan	270.930.900	12	Bulan	243.370.900	12,00	243.370.900	100,00	100,00	32,00	665.981.700	53,33	78,60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	60	Bulan	808.400.000	20	Bulan	417.662.000	12	Bulan	270.782.000	12	Bulan	229.442.000	9,00	229.442.000	75,00	100,00	29,00	647.104.000	48,33	80,05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian TPTGR Masalah Kerugian Daerah	60	Bulan	231.292.000	20	Bulan	163.714.400	12	Bulan	105.891.400	12	Bulan	105.891.400	12,00	105.891.400	100,00	100,00	32,00	269.605.800	53,33	116,57	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	60	Bulan	312.112.000	20	Bulan	190.850.000	12	Bulan	112.822.000	12	Bulan	132.822.000	12,00	132.821.000	100,00	100,00	32,00	323.671.000	53,33	103,70	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
5	2	2	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	60	Bulan	389.808.400	23	Bulan	189.629.000	12	Bulan	112.383.100	12	Bulan	112.383.100	12,00	112.383.000	100,00	100,00	35,00	302.012.000	58,33	77,48	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina	60	Bulan	275.508.000	20	Bulan	145.718.000	12	Bulan	109.219.000	12	Bulan	91.219.000	12,00	91.219.000	100,00	100,00	32,00	236.937.000	53,33	86,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2,04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**persentase kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100**		**1.184.136.361.375**	**100**		**150.315.658.854**	**100**		**227.505.710.239**	**100**		**221.355.222.981**	**32,77**	**73.836.317.550**	**32,77**	**33,36**	**132,77**	**224.151.976.404**	**132,77**	**18,93**	
5	2	2	2,04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30	Laporan	1.119.282.960.125	12	Laporan	146.132.913.176	6	Laporan	212.871.773.645	6	Laporan	209.632.156.259	6,00	70.588.100.122	100,00	33,67	18,00	216.721.013.298	60,00	19,36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat yang Mendesak	15	Laporan	40.325.000.000	6	Laporan	1.564.219.760	3	Laporan	6.215.100.000	3	Laporan	3.215.100.000	3,00	340.078.613	100,00	10,58	9,00	1.904.298.373	60,00	4,72	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2,04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	15	Laporan	24.528.401.250	6	Laporan	2.618.525.918	3	Laporan	8.418.836.594	3	Laporan	8.507.966.722	3,00	2.908.138.815	100,00	34,18	9,00	5.526.664.733	60,00	22,53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah**			**5.211.256.000**			**2.138.055.900**			**1.518.275.000**			**1.229.706.000**	**83,56**	**1.225.286.000**							
5	**2**	**3**	**2,01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase aset tanah pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang bersertifikat**	**100**		**5.211.256.000**	**100**		**2.138.055.900**	**100**		**1.518.275.000**	**100**		**1.229.706.000**	**83,56**	**1.225.286.000**	**83,56**	**99,64**	**183,56**	**3.363.341.900**	**183,56**	**64,54**	
5	2	3	2,01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	60	Bulan	1.243.956.000	24	Bulan	629.657.000	3	Bulan	326.130.000	3	Bulan	326.130.000	3,00	322.710.000	100,00	98,95	27,00	952.367.000	45,00	76,56	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2,01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah Rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60	Bulan	375.000.000	25	Bulan	243.500.000	12	Bulan	153.780.000	12	Bulan	103.780.000	9,00	103.780.000	75,00	100,00	34,00	347.280.000	56,67	92,61	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah	60	Bulan	655.728.000				12		163.932.000	12	Bulan	153.603.000	9,00	152.603.000	75,00	99,35	9,00	152.603.000	15,00	23,27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2,01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	60	Bulan	732.000.000	26	Bulan	359.423.000	12	Bulan	141.903.000	12	Bulan	184.943.000	9,00	184.943.000	75,00	100,00	35,00	544.366.000	58,33	74,37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2,01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	20	Dokumen	380.000.000	8	Dokumen	306.518.500	4	Dokumen	178.430.000	4	Dokumen	118.680.000	4,00	118.680.000	100,00	100,00	12,00	425.198.500	60,00	111,89	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2,01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	16	Dokumen	623.428.000				4	Dokumen	155.857.000	4	Dokumen	105.857.000	4,00	105.857.000	100,00	100,00	4,00	105.857.000	25,00	16,98	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2,01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60	Bulan	599.640.000	17	Bulan	337.538.400	12	Bulan	100.468.000	12	Bulan	100.468.000	9,00	100.468.000	75,00	100,00	26,00	438.006.400	43,33	73,04	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2,01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah Laporan Barang Milik Daerah	60	Bulan	601.504.000	18	Bulan	261.419.000	12	Bulan	297.775.000	12	Bulan	136.245.000	9,00	136.245.000	75,00	100,00	27,00	397.664.000	45,00	66,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**76,69**							
															Predikat Kinerja				**T**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
BADAN PENDAPATAN DAERAH																											
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																							
5	**2**				**KEUANGAN**										**15.004.418.924**			**11.795.291.332**									
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah									**13.299.257.924**			**10.670.247.232**	**74,60**								
5	**2**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**		**763.138.000**	**100**		**64.181.700**	**100**		**38.499.900**	**100**		**30.647.500**	**20,30**	**7.815.000**	**20,30**	**25,50**	**120,30**	**71.996.700**	**120,30**	**9,43**	
5	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	Laporan	763.138.000	16	Laporan	64.181.700	10	Laporan	38.499.900		Laporan	30.647.500	3,00	7.815.000		25,50	19,00	71.996.700	47,50	9,43	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**28.394.000.176**	**100**		**14.263.962.383**	**100**		**10.736.381.024**	**100**		**9.113.586.132**	**71,55**	**7.356.150.277**	**71,55**	**80,72**	**171,55**	**21.620.112.660**	**171,55**	**76,14**	
5	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	26.883.400.176	206	Orang	13.591.362.383	48	Orang	10.384.731.024	48	Orang	8.761.936.132	192,00	6.977.450.277	400,00	79,63	398,00	20.568.812.660	710,71	76,51	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	1.510.600.000	24	Dokumen	672.600.000	12	Dokumen	351.650.000	12	Dokumen	351.650.000	12,00	378.700.000	100,00	107,69	36,00	1.051.300.000	75,00	69,59	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksnanya Pemayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**6.942.773.616**	**100**		**851.447.758**	**100**		**1.337.477.000**	**100**		**481.400.900**	**37,54**	**270.961.344**	**37,54**	**56,29**	**137,54**	**1.122.409.102**	**137,54**	**16,17**	
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	Paket	174.664.000	20	Paket	39.809.876	11	Paket	17.474.000	11	Paket	7.496.500	9,00	7.496.500	81,82	100,00	29,00	47.306.376	60,42	27,08	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	4.587.361.616	16	Paket	179.100.030	8	Paket	897.320.000	8	Paket	139.543.500	10,00	80.544.300	125,00	57,72	26,00	259.644.330	54,17	5,66	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48	Paket	164.500.000	20	Paket	32.739.500	10	Paket	17.200.000	10	Paket	7.596.900	13,00	11.181.450	130,00	147,18	33,00	43.920.950	68,75	26,70	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	330.000.000	15	Paket	106.000.000	8	Paket	54.400.000	8	Paket	46.200.000	10,00	45.900.000	125,00	99,35	25,00	151.900.000	52,08	46,03	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	393.676.000	18	Paket	116.997.410	9	Paket	42.564.000	9	Paket	51.661.000	12,00	24.000.000	133,33	46,46	30,00	140.997.410	62,50	35,82	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	892.572.000	20	Laporan	278.415.942	10	Laporan	308.519.000	10	Laporan	228.903.000	10,00	101.839.094	100,00	44,49	30,00	380.255.036	62,50	42,60	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**5.125.330.800**	**100**		**1.170.793.176**	**100**		**667.970.000**	**100**		**655.422.700**	**41,44**	**275.304.579**	**41,44**	**42,00**	**141,44**	**1.446.097.755**	**141,44**	**28,21**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	792.490.800	22	Laporan	336.843.176	12	Laporan	289.380.000	11	Laporan	171.722.700	11,00	157.904.579	100,00	91,95	33,00	494.747.755	68,75	62,43	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	1.583.000.000	22	Laporan	607.650.000	12	Laporan	223.750.000	11	Laporan	360.750.000	2,00	27.500.000	18,18	7,62	24,00	635.150.000	50,00	40,12	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	2.749.840.000	20	Laporan	226.300.000	9	Laporan	154.840.000	9	Laporan	122.950.000	10,00	89.900.000	111,11	73,12	30,00	316.200.000	62,50	11,50	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100**		**3.760.637.000**	**100**		**703.938.460**	**100**		**518.930.000**	**100**		**389.190.000**	**52,98**	**236.281.401**	**52,98**	**60,71**	**152,98**	**940.219.861**	**152,98**	**25,00**	
5	2	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92	Unit	1.396.837.000	32	Unit	589.832.360	24	Unit	323.620.000	19	Unit	349.120.000	34,00	201.010.080	178,95	57,58	66,00	790.842.440	71,74	56,62	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2,09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	304	Unit	1.481.360.000	65	Unit	114.106.100	76	Unit	120.310.000	63	Unit	40.070.000	10,00	35.271.321	15,87	88,02	75,00	149.377.421	24,67	10,08	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah									**1.705.161.000**			**1.125.044.100**	**57,74**								
5	**2**	**4**	**2,01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1. Terealisasinya Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah**	**100**		**12.213.970.800**	**100**		**2.168.556.115**	**100**		**1.705.161.000**	**100**		**1.125.044.100**	**57,74**	**781.405.574**	**57,74**	**69,46**	**157,74**	**2.949.961.689**	**157,74**	**24,15**	
5	2	4	2,01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	48	Dokumen	1.192.256.000	20	Dokumen	234.528.150			-	10	Dokumen	126.590.000	9,00	59.325.000	90,00	46,86	29,00	293.853.150	60,42	24,65	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	48	Laporan	876.996.000	8	Laporan	47.925.000	12	Bulan	150.000.000			-	3,00	2.625.000			11,00	50.550.000	22,92	5,76	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	48	Laporan	1.469.612.000	19	Laporan	136.473.200	12	Bulan	164.921.000	10	Laporan	62.599.300	11,00	52.624.400	110,00	84,07	30,00	189.097.600	62,50	12,87	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	48	Laporan	2.125.888.800	20	Laporan	592.417.800	12	Bulan	375.240.000	10	Laporan	217.400.700	10,00	147.526.800	100,00	67,86	30,00	739.944.600	62,50	34,81	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	48	Dokumen	728.584.000	18	Dokumen	119.114.600	12	Bulan	81.632.000	9	Dokumen	80.519.400	12,00	48.747.600	133,33	60,54	30,00	167.862.200	62,50	23,04	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48	Dokumen	858.000.000	20	Dokumen	149.519.250	12	Bulan	126.484.500	10	Dokumen	79.196.500	13,00	63.089.600	130,00	79,66	33,00	212.608.850	68,75	24,78	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	48	Dokumen	1.534.310.000	18	Dokumen	218.089.700	12	Bulan	298.368.000	9	Dokumen	179.480.900	11,00	100.086.800	122,22	55,76	29,00	318.176.500	60,42	20,74	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	48	Dokumen	1.457.576.000	20	Dokumen	288.458.174	12	Bulan	208.515.500	10	Dokumen	175.847.300	11,00	135.357.774	110,00	76,97	31,00	423.815.948	64,58	29,08	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48	Laporan	1.970.748.000	20	Laporan	382.030.241	12	Bulan	300.000.000	10	Laporan	203.410.000	12,00	172.022.600	120,00	84,57	32,00	554.052.841	66,67	28,11	Badan Pendapatan Daerah
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**66,17**							
															Predikat Kinerja				**5**							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																											
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																						
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**										**7.742.370.816**			**7.183.774.500**									
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran									**5.636.427.516**			**5.717.022.380**	**102,99**	**5.117.202.325**				**14.669.027.455**			
5	**3**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**17.829.091.288**	**100**		**8.332.853.308**	**100**		**5.268.183.612**	**100**		**5.218.840.796**	**89,35**	**4.696.027.549**	**89,35**	**89,98**	**189,35**	**13.028.880.857**	**189,35**	**73,08**	
5	3	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	15.665.911.288	166	Orang	7.531.032.308	40	Orang	4.820.478.612	40	Orang	4.734.505.796	160,00	4.265.392.549	400,00	90,09	326,00	11.796.424.857	582,14	75,30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33	Orang	2.163.180.000	144	Orang	801.821.000	33	Orang	447.705.000	30	PNS-TK	484.335.000	30,00	430.635.000	100,00	88,91	174,00	1.232.456.000	527,27	56,97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum P. Daerah**	**100**		**2.108.546.000**	**100**		**710.245.795**	**100**		**129.848.404**	**100**		**197.865.404**	**117,31**	**168.578.900**	**117,31**	**85,20**	**217,31**	**878.824.695**	**217,31**	**41,68**	
5	3	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	640	Paket	33.830.400	273	Paket	12.001.000	160	Unit	3.944.000	160	Unit	3.944.000	320,00	3.944.000	200,00	100,00	593,00	15.945.000	92,66	47,13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	638.780.000	116	Paket	84.507.800	1160	Unit	98.190.304	116	Unit	135.494.204	116,00	124.468.100	100,00	91,86	232,00	208.975.900	580,00	32,71	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	169.632.000	65	Paket	62.159.600	15	Item	21.981.700	15	Item	29.793.800	30,00	23.776.800	200,00	79,80	95,00	85.936.400	158,33	50,66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	150.681.600	8		3.600.000	12	Kali	3.600.000	12	Kali	25.790.000	24,00	16.390.000	200,00	63,55	32,00	19.990.000	66,67	13,27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda**	**100**		**532.042.400**	**100**		**178.391.747**	**100**		**116.224.700**	**100**		**113.700.680**	**90,36**	**104.445.279**	**90,36**	**91,86**	**190,36**	**282.837.026**	**190,36**	**53,16**	
5	3	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Unit	473.338.400	7	Unit	174.286.747	3	Item	112.174.600	12	Item	86.073.180	12,00	76.865.279	100,00	89,30	19,00	251.152.026	158,33	53,06	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96	Unit	58.704.000	39	Unit	4.105.000	24	Unit	4.050.100	24	Unit	27.627.500	24,00	27.580.000	100,00	99,83	63,00	31.685.000	65,63	53,97	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
5	**3**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda**	**100**		**1.048.787.200**	**100**		**330.334.280**	**100**		**122.170.800**	**100**		**186.615.500**	**114,93**	**148.150.597**	**114,93**	**79,39**	**214,93**	**478.484.877**	**214,93**	**45,62**	
5	3	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	794.044.800	21	Unit	287.636.280	9	Unit	117.829.800	9	Unit	182.274.500	9,00	144.330.597	100,00	79,18	30,00	431.966.877	83,33	54,40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	118.560.000	2	Unit	9.140.000	1	Unit	4.060.000	1	Unit	4.060.000	1,00	3.820.000	100,00	94,09	3,00	12.960.000	75,00	10,93	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian									**804.450.800**			**529.810.500**	**72,28**	**486.102.968**				**1.628.811.949**			
5	**3**	**2**	**2,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**100**		**3.927.672.000**	**100**		**747.592.292**	**100**		**540.887.000**	**100**		**336.085.400**	**69,73**	**329.713.060**	**69,73**	**98,10**	**169,73**	**1.077.305.352**	**169,73**	**27,43**	
5	3	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.000	Dokumen	1.026.864.000	227	Dokumen	463.401.778	12	Dokumen	349.572.400	12	PNS	256.859.400	12,00	216.304.100	100,00	84,21	239,00	679.705.878	23,90	66,19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2,01	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	320	Dokumen	825.456.000	146	Dokumen	86.337.400	80	Dokumen	59.787.600	80	PNS	40.988.100	80,00	38.194.160	100,00	93,18	226,00	124.531.560	70,63	15,09	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2,01	11	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pelayanan data dan informasi kepegawaian	1	Database	624.948.000	2	Database	63.637.000	1	Database	42.119.000	1	Database	38.237.900	4,00	31.702.800	400,00	82,91	6,00	95.339.800	600,00	15,26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2,01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	24	Kali	706.160.000				12	Kali	89.408.000	12	Kali	80.840.000	12,00	43.512.000	100,00	53,82	12,00	43.512.000	50,00	6,16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**	**100**		**1.358.778.800**	**100**		**162.311.456**	**100**		**114.359.100**	**100**		**93.552.600**	**64,40**	**66.082.008**	**64,40**	**70,64**	**164,40**	**228.393.464**	**164,40**	**16,81**	
5	3	2	2,02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	300.000.000	116	Orang	43.389.500	250	PNS	26.260.500	250	PNS	21.250.500	25,00	14.510.000	10,00	68,28	141,00	57.899.500	3.525,00	19,30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2,02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Dokumen	1.058.778.800	1.594	Orang	118.921.956	2625	PNS	88.098.600	2625	PNS	72.302.100	639,00	51.572.008	24,34	71,33	2.233,00	170.493.964	55.825	16,10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2,04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100**		**1.474.812.000**	**100**		**232.805.233**	**100**		**149.204.700**	**100**		**100.172.500**	**82,71**	**90.307.900**	**82,71**	**90,15**	**182,71**	**323.113.133**	**182,71**	**21,91**	
5	3	2	2,04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1.100	Orang	481.832.000	453	Orang	129.829.100	275	PNS	77.427.500	275	PNS	45.693.500	200,00	39.642.800	72,73	86,76	653,00	169.471.900	59,36	35,17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2,04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1.200	Orang	992.980.000	187	Orang	102.976.133	300	PNS	71.777.200	300	PNS	54.479.000	15,00	50.665.100	5,00	93,00	202,00	153.641.233	16,83	15,47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																						
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM yang ditingkatkan									**1.301.492.500**			**936.941.620**	**63,50**	**702.705.229**				**1.878.069.829**			
5	**4**	**2**	**2,01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**100**		**6.366.596.000**	**100**		**1.175.364.600**	**100**		**1.301.492.500**	**100**		**936.941.620**	**63,50**	**702.705.229**	**63,50**	**75,00**	**163,50**	**1.878.069.829**	**163,50**	**29,50**	
5	4	2	2,01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.600	Orang	3.140.000.000	475	Orang	836.294.200	400	PNS	576.622.000	400	PNS	538.574.120	400,00	354.211.367	100,00	65,77	875,00	1.190.505.567	54,69	37,91	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2,01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.400	Orang	3.226.596.000	319	Orang	339.070.400	350	PNS	724.870.500	1	Dokumen	398.367.500	1,00	348.493.862	100,00	87,48	320,00	687.564.262	22,86	21,31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**79,59**								
															Predikat Kinerja			**T**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																						
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**3.012.785.951**			-									
5	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Kabupaten tulang Bawang									**2.230.483.551**			-	**97,71**								
5	**5**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanaanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**9.200.664.608**	**100**		**5.368.452.547**	**100**		**2.230.483.551**	**100**		-	**97,71**	**2.179.312.660**	**97,71**	**97,71**	**197,71**	**7.547.765.207**	**197,71**	**82,03**	
5	5	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	8.960.664.608	28	Bulan	5.364.452.547	25	Orang	2.230.483.551				75,00	2.179.312.660	300,00	97,71	103,00	7.543.765.207	183,93	84,19	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Hasil Kajian/ Riset Penelitian yang di Diseminasikan ke PD/ Stakeholder lainnya									**782.302.400**			-	**26,76**	**165.722.968**			**26,76**				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
5	**5**	**2**	**2,01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100**		**6.915.998.400**	**100**		**851.161.600**	**100**		**396.702.400**	**100**		**-**	**33,56**	**133.151.968**	**33,56**	**33,56**	**133,56**	**984.313.568**	**133,56**	**14,23**	
5	5	2	2,01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi		4	Dokumen	544.000.000	2	Dokumen	149.467.200	6	Dokumen	42.212.000				6,00	38.000.000	100,00	90,02	8,00	187.467.200	200,00	34,46	
5	5	2	2,01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		4	Dokumen	2.239.504.400	2	Dokumen	420.440.200	1	Dokumen	130.466.200				1,00	74.006.968	100,00	56,73	3,00	494.447.168	75,00	22,08	
5	5	2	2,01	3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan		4	Dokumen	2.172.494.000	2	Dokumen	253.507.800	1	Dokumen	47.444.200				1,00	15.000.000	100,00	31,62	3,00	268.507.800	75,00	12,36	
5	5	2	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	Laporan	280.000.000	2	Laporan	17.557.900	1	Laporan	26.580.000				1,00	6.145.000	100,00	23,12	3,00	23.702.900	75,00	8,47	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**	**2,03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Terlaksanaanya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**100**		**2.700.000.000**	**100**		**509.636.500**	**100**		**20.000.000**	**100**		**-**	**32,69**	**6.537.000**	**32,69**	**32,69**	**132,69**	**516.173.500**	**132,69**	**19,12**	
5	5	2	2,03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4	Kajian	660.000.000	1	Kajian	141.687.600	1	Kajian	10.000.000				1,00	2.190.000	100,00	21,90	2,00	143.877.600	50,00	21,80	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2,03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	Kajian	200.000.000	1	Kajian	140.283.800	1	Kajian	10.000.000				1,00	4.347.000	100,00	43,47	2,00	144.630.800	200,00	72,32	
5	**5**	**2**	**2,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**100**		**2.508.000.000**	**100**		**236.194.500**	**100**		**185.600.000**	**100**		**-**	**14,03**	**26.034.000**	**14,03**	**14,03**	**114,03**	**262.228.500**	**114,03**	**10,46**	
5	5	2	2,04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		4	Dokumen	708.000.000	2	Dokumen	179.226.000	1	Dokumen	45.600.000				-	26.034.000	-	57,09	2,00	205.260.000	50,00	28,99	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**62,23**									
															Predikat Kinerja			**R**									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
INSPEKTORAT																												
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																									
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**										**16.672.683.834**			**15.784.343.417**											
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya kualitas pelayanan di lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang									**15.594.207.534**			**15.079.117.117**	**92,97**	**13.933.637.993**								
6	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**		**42.896.011.868**	**100**		**22.815.131.615**	**100**		**14.837.742.034**	**100**		**14.411.374.617**	**90,25**	**13.280.897.803**	**90,25**	**92,16**	**190,25**	**36.096.029.418**	**190,25**	**84,15**	
6	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	41.578.671.868	28	Bulan	22.209.931.615	71	Orang	14.520.317.034	71	Orang	14.093.949.617	271,00	12.967.222.803	381,69	92,01	299,00	35.177.154.418	533,93	84,60	Inspektorat
6	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	1.317.340.000	22	Dokumen	605.200.000	9	Dokumen	317.425.000	9	Dokumen	317.425.000	9,00	313.675.000	100,00	98,82	31,00	918.875.000	64,58	69,75	Inspektorat
6	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Pengawasan Daerah**	**100**		**1.124.500.000**	**100**		**260.056.000**	**12**		**117.032.000**	**100**		**96.816.000**	**99,24**	**96.705.000**	**99,24**	**99,89**	**199,24**	**356.761.000**	**199,24**	**31,73**	
6	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	272	Orang	1.124.500.000	135	Orang	260.056.000	71	Orang	117.032.000	71	Orang	96.816.000	68,00	96.705.000	95,77	99,89	203,00	356.761.000	74,63	31,73	Inspektorat
6	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**		**1.329.952.200**	**100**		**1.180.747.300**	**100**		**317.309.300**	**100**		**281.843.300**	**90,42**	**280.820.000**	**90,42**	**99,64**	**190,42**	**1.461.567.300**	**190,42**	**109,90**	
6	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	337.760.000	24	Paket	387.022.800	12	Paket	131.409.500	12	Paket	131.409.500	12,00	131.358.500	100,00	99,96	36,00	518.381.300	75,00	153,48	Inspektorat
6	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	301.537.000	24	Paket	324.912.200	12	Paket	58.343.800	12	Paket	58.343.800	12,00	58.343.800	100,00	100,00	36,00	383.256.000	75,00	127,10	Inspektorat
6	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	480	Laporan	260.659.200	240	Laporan	87.374.000	12	Laporan	20.057.000	12	Laporan	20.057.000	11,00	19.740.000	91,67	98,42	251,00	107.114.000	52,29	41,09	Inspektorat
6	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan	429.996.000	86	Laporan	381.438.300	12	Laporan	107.499.000	12	Laporan	72.033.000	12,00	71.377.700	100,00	99,09	98,00	452.816.000	61,25	105,31	Inspektorat
6	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**1.776.030.800**	**100**		**672.915.378**	**100**		**242.751.000**	**100**		**209.710.000**	**85,33**	**196.154.230**	**85,33**	**93,54**	**185,33**	**869.069.608**	**185,33**	**48,93**	
6	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	1.235.096.000	24	Laporan	394.124.000	12	Laporan	81.691.000	12	Laporan	48.650.000	9,00	48.650.000	75,00	100,00	33,00	442.774.000	68,75	35,85	Inspektorat
6	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	540.934.800	24	Laporan	278.791.378	12	Laporan	161.060.000	12	Laporan	161.060.000	10,00	147.504.230	83,33	91,58	34,00	426.295.608	70,83	78,81	Inspektorat
6	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik**	**100**		**1.210.999.400**	**100**		**123.017.930**	**100**		**79.373.200**	**100**		**79.373.200**	**99,61**	**79.060.960**	**99,61**	**99,61**	**199,61**	**202.078.890**	**199,61**	**16,69**	
6	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	Unit	1.090.999.400	8	Unit	123.017.930	9	Unit	79.373.200	9	Unit	79.373.200	6,00	79.060.960	66,67	99,61	14,00	202.078.890	43,75	18,52	Inspektorat
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Penyelesaian Hasil Temuan dan Pelaporan Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti									**941.598.800**			**612.188.800**	**70,31**	**592.642.400**			**70,31**				
6	**1**	**2**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penurunan Jumlah Temuan Kerugian Negara Pemborosan bersifat Finansial**	**100**		**7.330.542.000**	**100**		**2.491.707.500**	**100**		**850.258.800**	**100**		**553.498.800**	**78,56**	**539.468.800**	**78,56**	**97,47**	**178,56**	**3.031.176.300**	**178,56**	**41,35**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
6	1	2	2,01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120	Laporan	631.420.000	59	Laporan	308.671.000	12	Lap	240.238.800	12	Laporan	139.178.800	12,00	125.408.800	100,00	90,11	71,00	434.079.800	59,17	68,75	Inspektorat
6	1	2	2,01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	304	Laporan	4.132.000.000	152	Laporan	1.530.535.000	48	Lap	435.000.000	48	Laporan	276.900.000	48,00	276.700.000	100,00	99,93	200,00	1.807.235.000	65,79	43,74	Inspektorat
6	1	2	2,01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal		4	Kesepakatan	92.650.000				1	Kesepakatan	92.650.000	1	Kesepakatan	80.650.000	1,00	80.650.000	100,00	100,00	1,00	80.650.000	25,00	87,05	Inspektorat
6	1	2	2,01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144	Dokumen	1.533.432.000	72	Dokumen	337.351.500	12	Dokumen	82.370.000	12	Dokumen	56.770.000	12,00	56.710.000	100,00	99,89	84,00	394.061.500	58,33	25,70	Inspektorat
6	**1**	**2**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengaduan Kasus yang ditindaklanjuti**	**100**		**1.392.000.000**	**100**		**399.334.000**	**100**		**91.340.000**	**100**		**58.690.000**	**62,06**	**53.173.600**	**62,06**	**90,60**	**162,06**	**452.507.600**	**162,06**	**32,51**	
6	1	2	2,02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	144	Laporan	1.392.000.000	70	Laporan	399.334.000	12	Laporan	91.340.000	12	Laporan	58.690.000	12,00	53.173.600	100,00	90,60	82,00	452.507.600	56,94	32,51	Inspektorat
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase pendampingan dan asistensi terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan									**136.877.500**			**93.037.500**	**82,68**	**84.787.400**			**82,68**				
6	**1**	**3**	**2,02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan**	**100**		**1.509.520.000**	**100**		**524.060.800**	**100**		**136.877.500**	**100**		**93.037.500**	**82,68**	**84.787.400**	**82,68**	**91,13**	**182,68**	**608.848.200**	**182,68**	**40,33**	
6	1	3	2,02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	144	OPD	148.000.000	15	OPD	5.604.000	35	Perangkat Daerah	20.700.000	35	Perangkat Daerah	9.170.000	-	920.000	-	10,03	15,00	6.524.000	10,42	4,41	Inspektorat
6	1	3	2,02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	80	Kegiatan	1.361.520.000	40	Kegiatan	518.456.800	4	Kegiatan	116.177.500	4	Kegiatan	83.867.500	4,00	83.867.400	100,00	100,00	44,00	602.324.200	55,00	44,24	Inspektorat
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**81,99**								
															Predikat Kinerja				**T**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN MENGGALA																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																							
7	**1**				**KECAMATAN**										**5.602.498.551**			**5.188.627.237**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya administrasi yang rapih**			**18.663.442.814**			**5.986.027.573**			**3.979.898.551**			**3.566.027.237**	**77,68**	**3.048.063.319**							
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**16.387.965.824**	**100**		**5.705.766.709**	**100**		**3.625.402.607**	**100**		**3.261.531.293**	**81,50**	**2.865.664.153**	**81,50**	**87,86**	**181,50**	**8.571.430.862**	**181,50**	**52,30**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang Per Bulan	14.271.779.567	28	Bulan	5.082.056.709	14	Bulan	3.301.252.607	14	Bulan	2.937.381.293	13,00	2.579.374.153	92,86	87,81	41,00	7.661.430.862	68,33	53,68	Kecamatan Menggala
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	2.116.186.257	2	Dokumen	623.710.000	1	Dokumen	324.150.000	1	Dokumen	324.150.000	1,00	286.290.000	100,00	88,32	3,00	910.000.000	75,00	43,00	Kecamatan Menggala
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**1.380.628.348**	**100**		**131.936.896**	**100**		**170.825.200**	**100**		**164.625.200**	**69,59**	**116.746.500**	**69,59**	**70,92**	**169,59**	**248.683.396**	**169,59**	**18,01**	
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	409.320.503	2	Paket	55.187.396	1	Paket	88.254.500	1	Paket	88.054.500	1,00	60.935.600	100,00	69,20	3,00	116.122.996	75,00	28,37	Kecamatan Menggala
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	92.919.866	2	Paket	14.545.100	1	Paket	9.659.100	1	Paket	9.659.100	1,00	5.655.300	100,00	58,55	3,00	20.200.400	75,00	21,74	Kecamatan Menggala
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**477.850.269**	**100**		**109.307.468**	**100**		**80.116.544**	**100**		**80.116.544**	**81,95**	**65.652.666**	**81,95**	**81,95**	**181,95**	**174.960.134**	**181,95**	**36,61**	
7	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	20.510.161	2	Laporan	7.099.000	1	Laporan	4.738.000	1	Laporan	4.738.000	1,00	2.790.000	100,00	58,89	3,00	9.889.000	75,00	48,22	Kecamatan Menggala
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	48.019.965	2	Laporan	16.632.592	1	Laporan	15.386.344	1	Laporan	15.386.344	1,00	13.888.566	100,00	90,27	3,00	30.521.158	75,00	63,56	Kecamatan Menggala
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	409.320.143	3	Laporan	85.575.876	1	Laporan	59.992.200	1	Laporan	59.992.200	1,00	48.974.100	100,00	81,63	4,00	134.549.976	100,00	32,87	Kecamatan Menggala
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**			**6.390.191.325**			**2.361.620.500**			**1.622.600.000**			**1.622.600.000**	**89,07**	**1.445.253.821**			**89,07**				
7	**1**	**3**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Lembaga kemasyarakatan yang dibina**	**100**		**6.390.191.325**	**100**		**2.361.620.500**	**100**		**1.622.600.000**	**100**		**1.622.600.000**	**89,07**	**1.445.253.821**	**89,07**	**89,07**	**189,07**	**3.806.874.321**	**189,07**	**59,57**	
7	1	3	2,02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48	Kelompok	6.390.191.325	24	Kelompok	2.361.620.500	12	Kelompok	1.622.600.000	12	Kelompok	1.622.600.000	12,00	1.445.253.821	100,00	89,07	36,00	3.806.874.321	75,00	59,57	Kecamatan Menggala
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**83,37**								
															Predikat Kinerja				**T**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN BANJAR AGUNG																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																							
7	**1**				**KECAMATAN**										**2.958.867.577**			**2.704.904.202**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah									**2.958.867.577**			**2.704.904.202**	**75,74**	**2.324.019.069**				**6.881.592.051**			
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**		**8.834.160.856**	**192**	**Paket**	**4.137.343.317**	**100**		**2.479.867.577**	**100**		**2.275.446.417**	**82,48**	**2.003.364.302**	**82,48**	**88,04**	**274,07**	**6.140.707.619**	**274,07**	**69,51**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	8.292.240.856	28	Bulan	3.892.413.317	14	Bulan	2.352.887.577	14	Bulan	2.150.066.417	12,00	1.881.684.302	85,71	87,52	40,00	5.774.097.619	83,33	69,63	Kecamatan Banjar Agung
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	541.920.000	24	Dokumen	244.930.000	12	Dokumen	126.980.000	12	Dokumen	125.380.000	12,00	121.680.000	100,00	97,05	36,00	366.610.000	75,00	67,65	Kecamatan Banjar Agung
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**		**114.000.000**			**30.000.000**	**100**		**32.000.000**			**32.000.000**	**100,00**	**32.000.000**		**100,00**	**100,00**	**62.000.000**	**100,00**	**54,39**	
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	114.000.000	1	Paket	30.000.000	1	Paket	32.000.000	1	Paket	32.000.000	1,00	32.000.000	100,00	100,00	2,00	62.000.000	50,00	54,39	Kecamatan Banjar Agung
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaanya kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**100**		**1.341.640.000**	**196**	**Paket**	**208.586.400**	**100**		**196.208.515**	**100**		**148.117.115**	**64,60**	**124.847.000**	**64,60**	**84,29**	**260,25**	**333.433.400**	**260,25**	**24,85**	
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	847.612.000	2	Paket	50.156.400	1	Paket	60.363.015	1	Paket	31.621.615	5,00	13.898.400	500,00	43,95	7,00	64.054.800	175,00	7,56	Kecamatan Banjar Agung
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	42.828.000	2	Paket	6.458.400	1	Paket	10.917.500	1	Paket	10.917.500	5,00	5.370.600	500,00	49,19	7,00	11.829.000	175,00	27,62	Kecamatan Banjar Agung
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240	Laporan	360.000.000	34	Laporan	118.821.600	60	Laporan	86.228.000	60	Laporan	86.228.000	5,00	86.228.000	8,33	100,00	39,00	205.049.600	16,25	56,96	Kecamatan Banjar Agung
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	55.200.000	12	Laporan	24.150.000	12	Laporan	38.700.000	12	Laporan	19.350.000	12,00	19.350.000	100,00	100,00	24,00	43.500.000	50,00	78,80	Kecamatan Banjar Agung
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**361.116.000**	**200**	**Paket**	**117.924.065**	**100**		**171.020.000**	**100**		**171.020.000**	**65,11**	**111.349.932**	**65,11**	**65,11**	**265,11**	**229.273.997**	**265,11**	**63,49**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	58.080.000	24	Laporan	57.924.065	12	Laporan	112.520.000	12	Laporan	112.520.000	12,00	52.849.932	100,00	46,97	36,00	110.773.997	75,00	190,73	Kecamatan Banjar Agung
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	Laporan	253.536.000	9	Laporan	43.500.000	12	Laporan	58.500.000	12	Laporan	58.500.000	9,00	58.500.000	75,00	100,00	18,00	102.000.000	37,50	40,23	
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah**	**100**		**200.012.000**	**200**	**Paket**	**63.719.200**	**100**		**79.771.485**	**100**		**78.320.670**	**66,54**	**52.457.835**	**66,54**	**66,98**	**266,54**	**116.177.035**	**266,54**	**58,09**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	102.812.000	6	Unit	39.419.200	4	Unit	25.771.485	4	Unit	25.862.835	12,00	25.862.835	300,00	100,00	18,00	65.282.035	600,00	63,50	Kecamatan Banjar Agung
7	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		4	Unit	97.200.000	1	Unit	24.300.000	1	Unit	27.000.000	1	Unit	26.595.000	1,00	26.595.000	100,00	100,00	2,00	50.895.000	50,00	52,36	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**75,74**								
															Predikat Kinerja			**5**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
KECAMATAN GEDUNG AJI																											
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																						
7	**1**				**KECAMATAN**										**2.020.791.986**			**2.020.791.986**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**2.020.791.986**			**2.020.791.986**	**83,01**	**1.562.262.308**							
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**6.207.136.000**	**100**	**Kegiatan**	**2.898.297.918**	**100**		**1.756.801.986**	**100**		**1.756.801.986**	**76,76**	**1.348.474.808**	**76,76**	**76,76**	**176,76**	**4.246.772.726**	**176,76**	**68,42**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	5.363.416.000	28	Bulan	2.527.217.918	14	Bulan	1.564.271.986	14	Bulan	1.564.271.986	15,00	1.155.944.808	107,14	73,90	43,00	3.683.162.726	71,67	68,67	Kecamatan Gedung Aji
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	843.720.000	24	Dokumen	371.080.000	12	Dokumen	192.530.000	12	Dokumen	192.530.000	12,00	192.530.000	100,00	100,00	36,00	563.610.000	300,00	66,80	Kecamatan Gedung Aji
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**		**88.000.000**			**22.000.000**	**100**		**22.000.000**	**100**		**22.000.000**	**100,00**	**22.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**44.000.000**	**100,00**	**50,00**	
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	88.000.000	1	Paket	22.000.000	1	Paket	22.000.000	1	Paket	22.000.000	1,00	22.000.000	100,00	100,00	2,00	44.000.000	50,00	50,00	Kecamatan Gedung Aji
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**		**412.062.400**	**100**	**Paket**	**194.148.100**	**100**		**134.819.100**	**100**		**134.819.100**	**77,70**	**104.747.900**	**77,70**	**77,70**	**177,70**	**298.896.000**	**177,70**	**72,54**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	13.880.000	12	Paket	8.437.000	6	Paket	5.394.000	6	Paket	5.394.000	7,00	4.424.000	116,67	82,02	19,00	12.861.000	316,67	92,66	Kecamatan Gedung Aji
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	8.640.000	16	Paket	9.215.000	8	Paket	5.853.300	8	Paket	5.853.300	7,00	5.750.600	87,50	98,25	23,00	14.965.600	287,50	173,21	Kecamatan Gedung Aji
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17	Paket	49.924.000	27	Paket	33.995.900	15	Paket	15.574.000	15	Paket	15.574.000	11,00	16.879.800	73,33	108,38	38,00	50.875.700	223,53	101,91	Kecamatan Gedung Aji
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10630	Paket	17.268.000	7.020	Paket	22.813.000	3150	Paket	11.515.800	3150	Paket	11.515.800	3.404,00	11.211.500	108,06	97,36	10.424,00	34.024.500	98,06	197,04	Kecamatan Gedung Aji
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1975	Laporan	241.350.400	2	Laporan	90.437.200	1	Laporan	57.332.000	1	Laporan	57.332.000	1,00	57.482.000	100,00	100,26	3,00	147.919.200	0,15	61,29	Kecamatan Gedung Aji
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	57.000.000	4	Laporan	23.250.000	2	Laporan	39.150.000	2	Laporan	39.150.000	2,00	9.000.000	100,00	22,99	6,00	32.250.000	75,00	56,58	Kecamatan Gedung Aji
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**348.065.600**	**100**	**Kegiatan**	**76.067.120**	**100**		**59.005.900**	**100**		**59.005.900**	**89,44**	**52.772.100**	**89,44**	**89,44**	**189,44**	**128.839.220**	**189,44**	**37,02**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	9.485.600	5	Laporan	9.984.620	2	Laporan	9.498.400	2	Laporan	9.498.400	3,00	9.264.600	150,00	97,54	8,00	19.249.220	400,00	202,93	Kecamatan Gedung Aji
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	338.580.000	6	Laporan	66.082.500	3	Laporan	49.507.500	3	Laporan	49.507.500	3,00	43.507.500	100,00	87,88	9,00	109.590.000	75,00	32,37	Kecamatan Gedung Aji

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
7	1	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**214.480.000**	**100**	**Paket**	**56.020.000**	**100**		**48.165.000**	**100**		**48.165.000**	**71,15**	**34.267.500**	**71,15**	**71,15**	**171,15**	**90.287.500**	**171,15**	**42,10**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	181.480.000	2	Unit	47.220.000	1	Unit	48.165.000	1	Unit	48.165.000	4,00	34.267.500	400,00	71,15	6,00	81.487.500	150,00	44,90	Kecamatan Gedung Aji
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**83,01**						
																		Predikat Kinerja		**T**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										
KECAMATAN RAWAJITU SELATAN																										
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																						
7	1				**KECAMATAN**										**1.826.291.891**			**1.781.413.104**									
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah Tercapainya Administrasi Keuangan**									**1.826.291.891**			**1.781.413.104**	**81,61**	**1.633.532.593**				**4.264.563.405**			
7	1	1	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**		**5.229.275.320**	**100**	**Paket**	**2.316.306.492**	**100**		**1.495.281.891**	**100**		**1.481.203.104**	**96,25**	**1.435.188.780**	**96,25**	**96,89**	**196,25**	**3.751.495.272**	**196,25**	**71,74**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bulan	4.881.195.320	28	Bulan	2.169.226.492	14	Bulan	1.416.101.891	14	Bulan	1.421.223.104	13,00	1.375.208.780	92,86	96,76	41,00	3.544.435.272	85,42	72,61	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44	Dokumen	348.080.000	22	Dokumen	147.080.000	12	Dokumen	79.180.000	12	Dokumen	59.980.000	12,00	59.980.000	100,00	100,00	34,00	207.060.000	77,27	59,49	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**		**64.000.000**			**18.000.000**	**100**		**24.800.000**			**24.800.000**	**64,52**	**16.000.000**		**64,52**	**64,52**	**34.000.000**	**64,52**	**53,13**	
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	64.000.000	1	Paket	18.000.000	1	Paket	24.800.000	1	Paket	24.800.000	9,00	16.000.000	900,00	64,52	10,00	34.000.000	250,00	53,13	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**100**		**976.368.000**	**100**	**Paket**	**234.867.270**	**100**		**227.592.000**	**100**		**196.792.000**	**49,82**	**104.792.800**	**49,82**	**53,25**	**149,82**	**339.660.070**	**149,82**	**34,79**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	Paket	46.230.400	24	Paket	10.280.270	12	Paket	6.084.000	12	Paket	6.084.000	12,00	5.467.000	100,00	89,86	36,00	15.747.270	75,00	34,06	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	453.468.000	24	Paket	34.681.300	12	Paket	58.715.300	12	Paket	67.990.500	12,00	12.953.100	100,00	19,05	36,00	47.634.400	75,00	10,50	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48	Paket	32.976.000	20	Paket	2.823.400	10	Paket	5.776.600	10	Paket	5.495.400	10,00	1.713.500	100,00	31,18	30,00	4.536.900	62,50	13,76	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44	Paket	91.293.600	20	Paket	23.817.900	10	Paket	18.940.100	10	Paket	18.942.100	10,00	5.759.200	100,00	30,40	30,00	29.577.100	68,18	32,40	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	Laporan	288.000.000	8	Laporan	146.314.400	4	Laporan	102.376.000	4	Laporan	94.980.000	9,00	75.600.000	225,00	79,60	17,00	221.914.400	106,25	77,05	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	42.800.000	14	Laporan	13.800.000	7	Laporan	35.700.000	7	Laporan	3.300.000	9,00	3.300.000	128,57	100,00	23,00	17.100.000	47,92	39,95	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**151.920.000**	**100**	**Paket**	**35.994.000**	**100**		**36.480.000**	**100**		**36.480.000**	**100,00**	**36.480.000**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**72.474.000**	**200,00**	**47,71**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	44	Laporan	22.080.000	22	Laporan	11.040.000	11	Laporan	5.520.000	11	Laporan	5.520.000	10,00	5.520.000	90,91	100,00	32,00	16.560.000	72,73	75,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	Laporan	129.840.000	2	Laporan	24.954.000	1	Laporan	30.960.000	1	Laporan	30.960.000	9,00	30.960.000	900,00	100,00	11,00	55.914.000	137,50	43,06	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**		**221.992.000**	**100**	**Paket**	**25.863.050**	**100**		**42.138.000**	**100**		**42.138.000**	**97,47**	**41.071.013**	**97,47**	**97,47**	**197,47**	**66.934.063**	**197,47**	**30,15**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarakan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	121.032.000	2	Unit	17.707.000	1	Unit	20.948.000	1	Unit	20.948.000	9,00	20.611.013	900,00	98,39	11,00	38.318.013	137,50	31,66	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	100.960.000	2	Unit	8.156.050	1	Unit	21.190.000	1	Unit	21.190.000	9,00	20.460.000	900,00	96,55	11,00	28.616.050	275,00	28,34	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		**81,61**						
																		Predikat Kinerja		**T**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										
KECAMATAN GEDUNG MENENG																										
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																						
7	1				**KECAMATAN**										**2.140.749.872**			**1.989.595.016**									
7	1	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**2.140.749.872**			**1.989.595.016**	**76,12**	**1.785.336.230**							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**1.553.809.854**	**100**	**Kegiatan**	**3.043.427.533**	**100**		**1.804.222.872**	**100**		**1.703.068.016**	**88,70**	**1.576.377.480**	**88,70**	**92,56**	**188,70**	**4.619.805.013**	**188,70**	**297,32**		
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang Per Bulan	1.462.954.854	28	Bulan	2.884.447.533	14	Bulan	1.730.367.872	14	Bulan	1.629.213.016	14,00	1.502.522.480	100,00	92,22	42,00	4.386.970.013	300,00	299,87	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	90.855.000	4	Dokumen	158.980.000	2	Dokumen	73.855.000	2	Dokumen	73.855.000	12,00	73.855.000	600,00	100,00	16,00	232.835.000	133,33	256,27	Kecamatan Gedung Meneng	
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**		**55.225.000**			**35.050.000**	**100**		**59.125.000**	**100**		**59.125.000**	**57,51**	**34.000.000**	**57,51**	**57,51**	**57,51**	**69.050.000**	**57,51**	**125,03**		
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	34	Stel	33.100.000	34	Stel	35.050.000	34	Stel	37.000.000	34	Stel	37.000.000	37,00	17.000.000	108,82	45,95	71,00	52.050.000	208,82	157,25	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	22.125.000			-	1	Orang	22.125.000	1	Orang	22.125.000	-	17.000.000	-	76,84	-	17.000.000	-	76,84	Kecamatan Gedung Meneng	
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**		**177.461.500**	**100**	**Kegiatan**	**154.294.600**	**100**	**Kegiatan**	**150.474.400**	**100**		**114.024.400**	**62,62**	**83.648.750**	**62,62**	**73,36**	**162,62**	**237.943.350**	**162,62**	**134,08**		
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	7.861.000	7	Paket	7.861.000	4	Paket	8.278.700	4	Paket	8.278.700	-	3.777.100	-	45,62	7,00	11.638.100	175,00	148,05	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	31.718.000	6	Paket	17.315.700	3	Paket	20.084.000	3	Paket	19.584.000	20,15	9.456.000	671,60	48,28	26,15	26.771.700	217,90	84,41	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	14.136.000	6	Paket	15.254.000	3	Paket	18.484.700	3	Paket	18.484.700	5,94	6.286.650	198,13	34,01	11,94	21.540.650	99,53	152,38	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	18.324.500	2	Paket	18.293.900	1	Paket	6.527.000	1	Paket	6.527.000	1,00	6.527.000	100,00	100,00	3,00	24.820.900	75,00	135,45	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	Laporan	75.422.000	2	Laporan	93.770.000	1	Laporan	42.400.000	1	Laporan	42.400.000	2,00	38.852.000	200,00	91,63	4,00	132.622.000	200,00	175,84	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	26.250.000	1	Laporan	1.800.000	1	Laporan	54.700.000	1	Laporan	18.750.000	3,00	18.750.000	300,00	100,00	4,00	20.550.000	33,33	78,29	Kecamatan Gedung Meneng	
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**46.300.500**	**100**	**Kegiatan**	**60.099.760**	**100**	**Kegiatan**	**52.219.200**	**100**		**52.219.200**	**78,40**	**40.940.000**	**78,40**	**78,40**	**178,40**	**101.039.760**	**178,40**	**218,23**		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	14.965.500	2	Laporan	19.599.760	1	Laporan	11.719.200	1	Laporan	11.719.200	30,00	10.440.000	3.000,00	89,08	32,00	30.039.760	266,67	200,73	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	31.335.000	2	Laporan	40.500.000	1	Laporan	40.500.000	1	Laporan	40.500.000	18,00	30.500.000	1.800,00	75,31	20,00	71.000.000	166,67	226,58	Kecamatan Gedung Meneng	
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**69.290.000**	**100**	**Unit**	**39.050.000**	**100**	**Unit**	**53.940.000**	**100**		**53.940.000**	**93,38**	**50.370.000**	**93,38**	**93,38**	**193,38**	**89.420.000**	**193,38**	**129,05**		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	54.170.000	5	Unit	30.800.000	1	Unit	39.370.000	1	Unit	39.370.000	2,00	39.370.000	200,00	100,00	7,00	70.170.000	100,00	129,54	Kecamatan Gedung Meneng	
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	11.550.000	1	Unit	8.250.000	1	Unit	11.000.000	1	Unit	11.000.000	2,00	11.000.000	200,00	100,00	3,00	19.250.000	150,00	166,67	Kecamatan Gedung Meneng	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**76,12**									
															Predikat Kinerja			**T**									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN PENAWARTAMA																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
7	**1**				**KECAMATAN**										**2.106.194.071**			**2.006.806.521**										
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah**									**2.106.194.071**			**2.006.806.521**	**80,53**	**1.896.015.632**				**5.292.256.095**				
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Gaji yang tertib di lingkup Kec. Penawar Tama**	**100**		**5.075.286.240**	**100**		**3.135.751.629**	**100**		**1.792.064.071**	**90**		**1.742.676.521**	**94,29**	**1.677.754.632**	**104,77**	**96,27**	**194,29**	**4.813.506.261**	**194,29**	**94,84**		
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	4.852.701.240	28	Bulan	3.000.341.629	14	Bulan	1.717.869.071	14	Bulan	1.668.481.521	13,00	1.616.359.632	92,86	96,88	41,00	4.616.701.261	73,21	95,14	Kecamatan Penawar Tama	
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45	Dokumen	222.585.000	24	Dokumen	135.410.000	12	Dokumen	74.195.000	12	Dokumen	74.195.000	12,00	61.395.000	100,00	82,75	36,00	196.805.000	80,00	88,42	Kecamatan Penawar Tama	
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dilingkup Kec.Penawar Tama**	**100**		**580.101.600**	**100**		**226.696.900**	**100**		**200.456.800**	**100**		**150.456.800**	**74,41**	**129.692.400**	**74,41**	**86,20**	**174,41**	**356.389.300**	**174,41**	**61,44**		
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	Paket	29.316.300	7	Paket	5.964.200	4	Paket	7.702.400	4	Paket	7.702.400	4,00	1.561.400	100,00	20,27	11,00	7.525.600	31,43	25,67	Kecamatan Penawar Tama	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	40.500.300	7	Paket	14.841.700	3	Paket	2.684.400	3	Paket	2.684.400	3,00	694.600	100,00	25,88	10,00	15.536.300	33,33	38,36	Kecamatan Penawar Tama	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	305.760.000	16	Laporan	99.841.000	8	Laporan	101.920.000	8	Laporan	101.920.000	7,00	89.386.400	87,50	87,70	23,00	189.227.400	38,33	61,89	Kecamatan Penawar Tama	
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	189.450.000	23	Laporan	106.050.000	12	Laporan	88.150.000	12	Laporan	38.150.000	8,00	38.050.000	66,67	99,74	31,00	144.100.000	77,50	76,06	Kecamatan Penawar Tama	
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran**	**100**		**188.100.000**				**100**		**50.932.300**	**100**		**50.932.300**	**65,09**	**33.150.300**	**65,09**	**65,09**	**65,09**	**33.150.300**	**65,09**	**17,62**		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan & Air	52	Laporan	39.690.000			-	13	Laporan	13.230.000	13	Laporan	13.230.000	4,00	6.000.000	30,77	45,35	4,00	6.000.000	7,69	15,12	Kecamatan Penawar Tama	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%			
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51	Laporan	148.410.000	2	Laporan	2.112.200	13	Laporan	37.702.300	13	Laporan	37.702.300	7,00	27.150.300	53,85	72,01	9,00	29.262.500	17,65	19,72	Kecamatan Penawar Tama
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**terlaksananya admnistrasi barang milik daerah yang tertib di lingkup Kec. Penawar Tama**	**100**		**114.413.400**	**100**		**33.791.934**	**100**		**62.740.900**	**100**		**62.740.900**	**88,33**	**55.418.300**	**88,33**	**88,33**	**188,33**	**89.210.234**	**188,33**	**77,97**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	70.583.400	2	Unit	33.791.934	1	Unit	33.670.000	1	Unit	33.670.000	1,00	29.575.600	100,00	87,84	3,00	63.367.534	75,00	89,78	Kecamatan Penawar Tama
7	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	43.830.000	-		-	1	Unit	29.070.900	1	Unit	29.070.900	1,00	25.842.700	100,00	88,90	1,00	25.842.700	20,00	58,96	Kecamatan Penawar Tama
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				80,53								
															Predikat Kinerja				T								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN RAWAJITU TIMUR																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
7	**1**				**KECAMATAN**										**1.679.778.974**			**1.551.143.461**										
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah** **Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah** **Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**1.679.778.974**			**1.551.143.461**	**78,25**	**1.395.776.102**				**3.928.856.811**			
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**		**6.201.695.060**	**100**		**2.276.970.692**	**100**		**1.374.098.974**	**100**		**1.297.463.461**	**90,00**	**1.218.812.514**	**90,00**	**93,94**	**190,00**	**3.495.783.206**	**190,00**	**56,37**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	5.839.325.460	28	Bulan	2.129.290.692	14	Bulan	1.279.568.974	12	Bulan	1.217.933.461	12,00	1.140.932.514	100,00	93,68	40,00	3.270.223.206	66,67	56,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	362.369.600	12	Dokumen	147.680.000	6	Dokumen	94.530.000	12	Dokumen	79.530.000	12,00	77.880.000	100,00	97,93	24,00	225.560.000	50,00	62,25	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**768.328.800**	**100**		**182.478.192**	**100**		**211.176.050**	**100**		**179.795.850**	**55,84**	**112.627.450**	**55,84**	**62,64**	**155,84**	**295.105.642**	**155,84**	**38,41**	
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	346.790.000	12	Paket	133.938.192	6	Paket	76.770.300	12	Paket	70.183.500	12,00	35.369.600	100,00	50,40	24,00	169.307.792	50,00	48,82	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	64	Paket	33.910.400	-		-	12	Paket	8.652.250	12	Paket	8.458.550	6,00	5.536.250	50,00	65,45	6,00	5.536.250	9,38	16,33	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	Paket	29.930.400	-		-	20	Paket	17.597.000	12	Paket	17.597.300	12,00	9.921.600	100,00	56,38	12,00	9.921.600	30,00	33,15	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Paket	270.000.000	5	Paket	42.540.000	3	Paket	67.432.000	12	Paket	67.432.000	12,00	59.400.000	100,00	88,09	17,00	101.940.000	35,42	37,76	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Paket	42.400.000	5	Paket	6.000.000	2	Paket	29.400.000	12	Paket	4.800.000	6,00	2.400.000	50,00	50,00	11,00	8.400.000	22,92	19,81	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**177.112.000**	**100**		**42.896.281**	**100**		**40.410.000**	**100**		**40.410.000**	**79,06**	**31.949.988**	**79,06**	**79,06**	**179,06**	**74.846.269**	**179,06**	**42,26**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	51.040.000	8	Laporan	18.146.281	4	Laporan	7.200.000	12	Laporan	7.200.000	12,00	7.199.988	100,00	100,00	20,00	25.346.269	41,67	49,66	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	126.072.000	5	Laporan	24.750.000	3	Laporan	33.210.000	12	Laporan	33.210.000	12,00	24.750.000	100,00	74,53	17,00	49.500.000	35,42	39,26	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**146.593.600**	**100**		**13.735.544**	**100**		**37.093.950**			**33.474.150**	**88,10**	**32.386.150**		**96,75**	**188,10**	**46.121.694**	**188,10**	**31,46**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	70.433.600	6	Unit	13.735.544	3	Unit	17.933.950	12	Unit	17.986.150	12,00	17.986.150	100,00	100,00	18,00	31.721.694	37,50	45,04	Kecamatan Rawa Jitu Timur
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48	Unit	76.160.000			-	3	Unit	19.160.000	12	Unit	15.488.000	12,00	14.400.000	100,00	92,98	12,00	14.400.000	25,00	18,91	Kecamatan Rawa Jitu Timur
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				78,25								
															Predikat Kinerja				T								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN BANJAR MARGO																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
7	**1**				**KECAMATAN**										**2.302.842.332**			**2.237.153.903**										
7	**1**	**1**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya Gaji dan Honorarium ASN Berikut Tunjangan**					**Kegiatan**				**2.302.842.332**			**2.237.153.903**	**50,95**	**1.959.377.913**							
7		**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhi Gaji dan Honorarium Aparatur Sipil Negara Berikut Tunjangan**	**100**		**1.835.275.173**	**100**		**3.687.475.951**	**100**		**2.056.722.782**	**100**		**1.991.034.353**	**92,60**	**1.888.554.913**	**92,60**	**94,85**	**192,60**	**5.576.030.864**	**192,60**	**303,83**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112	Bulan	1.710.505.173	28	Bulan	3.477.845.951	14	Bulan	1.951.992.782	14	Bulan	1.886.304.353	14,00	1.783.824.913	100,00	94,57	42,00	5.261.670.864	37,50	307,61	Kecamatan Banjar Margo
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88	Dokumen	124.770.000	22	Dokumen	209.630.000	11	Dokumen	104.730.000	12	Dokumen	104.730.000	12,00	104.730.000	100,00	100,00	34,00	314.360.000	38,64	251,95	Kecamatan Banjar Margo
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**		**183.520.000**	**100**		**160.837.720**	**100**		**161.450.850**	**100**		**161.450.850**	**34,38**	**55.511.000**	**34,38**	**34,38**	**134,38**	**216.348.720**	**134,38**	**117,89**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	6.500.000	12	Paket	8.707.220	6	Paket	7.910.400	6	Paket	7.910.400	6,00	3.296.000	100,00	41,67	18,00	12.003.220	257,14	184,66	Kecamatan Banjar Margo
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	Paket	9.800.000	10	Paket	17.889.300	14	Paket	12.130.450	14	Paket	12.130.450	14,00	5.047.000	100,00	41,61	24,00	22.936.300	171,43	234,04	Kecamatan Banjar Margo
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	Paket	30.500.000	44	Paket	51.109.600	27	Paket	29.462.000	27	Paket	29.462.000	8,00	12.430.000	29,63	42,19	52,00	63.539.600	185,71	208,33	Kecamatan Banjar Margo
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	15.000.000	8	Paket	20.453.200	5	Paket	19.956.000	5	Paket	19.956.000	4,00	9.756.000	80,00	48,89	12,00	30.209.200	171,43	201,39	Kecamatan Banjar Margo
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	Laporan	100.000.000	6	Laporan	54.508.400	4	Laporan	73.992.000	7	Laporan	73.992.000	1,00	24.982.000	14,29	33,76	7,00	79.490.400	38,89	79,49	Kecamatan Banjar Margo
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa Internet, listrik dan Sewa Perlengkapan Kantor dalam menunjang kerja**	**100**		**58.000.000**	**100**		**72.971.688**	**100**		**59.209.500**	**100**		**59.209.500**	**25,86**	**15.312.000**	**25,86**	**25,86**	**125,86**	**88.283.688**	**125,86**	**152,21**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	15.500.000	23	Laporan	26.471.688	12	Laporan	15.312.000	12	Laporan	15.312.000	12,00	15.312.000	100,00	100,00	35,00	41.783.688	291,67	269,57	Kecamatan Banjar Margo
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**50,95**								
															Predikat Kinerja			**R**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
KECAMATAN PENAWAR AJI																											
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																						
7	**1**				**KECAMATAN**										**1.763.304.922**			**1.618.787.484**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**terlaksananya administrasi keuangan penunjang pelayanan administrasi perkantoran**									**1.763.304.922**			**1.618.787.484**	**86,86**	**1.423.252.319**				**4.221.802.451**			
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di Kantor Kecamatan Penawar Aji**	**100**		**4.475.832.948**	**100**		**2.475.032.960**	**100**		**1.503.896.922**	**100**		**1.354.129.484**	**84,53**	**1.232.409.319**	**84,53**	**91,01**	**184,53**	**3.707.442.279**	**184,53**	**82,83**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bulan	4.039.152.948	28	Bulan	2.276.362.960	14	Bulan	1.392.366.922	14	Bulan	1.248.599.484	15,00	1.133.629.319	107,14	90,79	43,00	3.409.992.279	119,44	84,42	Kecamatan Penawar Aji
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	436.680.000	24	Dokumen	198.670.000	12	Dokumen	111.530.000	12	Dokumen	105.530.000	12,00	98.780.000	100,00	93,60	36,00	297.450.000	75,00	68,12	Kecamatan Penawar Aji
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**	**100**		**85.800.000**			**14.000.000**	**100**		**15.000.000**	**100**		**14.250.000**	**100,00**	**14.250.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**28.250.000**	**100,00**	**32,93**	
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	85.800.000	1	Paket	14.000.000	15	Paket	15.000.000	15	Paket	14.250.000	15,00	14.250.000	100,00	100,00	16,00	28.250.000	1.600,00	32,93	Kecamatan Penawar Aji
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kecamatan Penawar Aji**	**100**		**853.743.600**	**100**		**228.293.300**	**100**		**166.196.450**	**100**		**172.196.450**	**60,65**	**102.411.200**	**60,65**	**59,47**	**160,65**	**330.704.500**	**160,65**	**38,74**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	21.276.400	2	Paket	10.589.500	4	Paket	5.145.000	4	Paket	5.145.000	2,75	3.585.800	68,75	69,69	4,75	14.175.300	118,75	66,62	Kecamatan Penawar Aji
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	337.464.000	4	Paket	99.677.200	4	Paket	54.688.100	4	Paket	67.579.600	1,75	20.955.000	43,75	31,01	5,75	120.632.200	35,94	35,75	Kecamatan Penawar Aji
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	46.076.000	2	Paket	11.263.000	4	Paket	8.552.250	4	Paket	8.552.250	2,50	6.410.300	62,50	74,95	4,50	17.673.300	112,50	38,36	Kecamatan Penawar Aji
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	83.639.200	5	Paket	28.703.600	4	Paket	15.941.100	4	Paket	16.009.600	2,50	5.660.100	62,50	35,35	7,50	34.363.700	46,88	41,09	Kecamatan Penawar Aji
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	301.688.000	24	Laporan	69.660.000	12	Laporan	81.420.000	12	Laporan	74.460.000	11,00	65.800.000	91,67	88,37	35,00	135.460.000	72,92	44,90	Kecamatan Penawar Aji
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Penawar Aji**	**100**		**212.992.000**	**100**		**36.332.000**	**100**		**36.996.400**	**100**		**36.996.400**	**89,38**	**33.067.000**	**89,38**	**89,38**	**189,38**	**69.399.000**	**189,38**	**32,58**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	58.152.000	6	Laporan	14.457.000	3	Laporan	9.296.400	12	Laporan	9.296.400	12,00	9.192.000	100,00	98,88	18,00	23.649.000	150,00	40,67	Kecamatan Penawar Aji
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	154.840.000	6	Laporan	21.875.000	3	Laporan	27.700.000	12	Laporan	27.700.000	12,00	23.875.000	100,00	86,19	18,00	45.750.000	150,00	29,55	Kecamatan Penawar Aji
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Kecamatan Penawar Aji**	**100**		**196.936.400**	**100**		**44.891.872**	**100**		**41.215.150**	**100**		**41.215.150**	**99,76**	**41.114.800**	**99,76**	**99,76**	**199,76**	**86.006.672**	**199,76**	**43,67**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	112.316.400	4	Unit	36.131.872	3	Unit	22.990.150	4	Unit	22.990.150	4,00	22.889.800	100,00	99,56	8,00	59.021.672	66,67	52,55	Kecamatan Penawar Aji
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	84.620.000	1	Unit	8.760.000	2	Unit	18.225.000	6	Unit	18.225.000	6,00	18.225.000	100,00	100,00	7,00	26.985.000	87,50	31,89	Kecamatan Penawar Aji
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				**86,86**								
															Predikat Kinerja				**T**								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
KECAMATAN MENGGALA TIMUR																											
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																						
7	**1**				**KECAMATAN**										**2.006.695.591**			**2.006.695.591**									

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**2.006.695.591**			**2.006.695.591**	**84,27**	**1.849.896.002**							
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam Pelaksanaan Tugasnya**	**100**		**6.868.978.440**	**100**		**2.996.652.453**	**100**		**1.730.477.591**	**100**		**1.730.477.591**	**94,05**	**1.627.507.188**	**94,05**	**94,05**	**194,05**	**4.624.159.641**	**194,05**	**67,32**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	6.138.858.440	28	Bulan	2.714.912.453	14	Bulan	1.558.997.591	14	Bulan	1.558.997.591	12,00	1.477.827.188	85,71	94,79	40,00	4.192.739.641	71,43	68,30	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bulan	730.120.000	24	Bulan	281.740.000	8	Bulan	171.480.000	8	Bulan	171.480.000	12,00	149.680.000	150,00	87,29	36,00	431.420.000	75,00	59,09	Kecamatan Menggala Timur
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**	**100**		**116.000.000**			**33.000.000**	**100**		**16.600.000**	**100**		**16.600.000**	**99,40**	**16.500.000**	**99,40**	**99,40**	**99,40**	**49.500.000**	**99,40**	**42,67**	
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	116.000.000	1	Paket	33.000.000	1	Paket	16.600.000	1	Paket	16.600.000	1,00	16.500.000	100,00	99,40	2,00	49.500.000	50,00	42,67	Kecamatan Menggala Timur
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kecamatan Menggala Timur**	**100**		**622.859.200**	**100**		**222.494.200**	**100**		**178.076.800**	**100**		**178.076.800**	**80,69**	**143.694.741**	**80,69**	**80,69**	**180,69**	**366.188.941**	**180,69**	**58,79**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	20.620.000	8	Paket	10.334.400	12	Paket	6.179.400	12	Paket	6.179.400	12,00	5.598.433	100,00	90,60	20,00	15.932.833	166,67	77,27	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	89.123.200	5	Paket	29.316.700	12	Paket	26.770.900	12	Paket	26.770.900	12,00	23.775.600	100,00	88,81	17,00	53.092.300	106,25	59,57	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	51.440.000	4	Paket	16.524.700	12	Paket	14.663.000	12	Paket	14.663.000	12,00	6.839.400	100,00	46,64	16,00	23.364.100	200,00	45,42	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	123.276.000	20	Paket	46.925.600	10	Paket	25.463.500	10	Paket	25.463.500	11,00	27.535.308	110,00	108,14	31,00	74.460.908	64,58	60,40	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Dokumen	240.000.000	12	Dokumen	40.000.000	12	Dokumen	80.000.000	12	Dokumen	80.000.000	12,00	67.496.000	100,00	84,37	24,00	107.496.000	50,00	44,79	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	84.000.000	12	Laporan	79.392.800	12	Laporan	25.000.000	12	Laporan	25.000.000	9,00	12.450.000	75,00	49,80	21,00	91.842.800	43,75	109,34	Kecamatan Menggala Timur
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**96.172.800**	**200**	**Laporan**	**35.556.844**	**100**	**Laporan**	**30.643.200**	**100**		**30.643.200**	**62,91**	**19.277.573**	**62,91**	**62,91**	**262,91**	**54.834.417**	**262,91**	**57,02**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	12.172.800	19	Laporan	7.056.844	12	Laporan	6.643.200	12	Laporan	6.643.200	12,00	3.427.573	100,00	51,60	31,00	10.484.417	64,58	86,13	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Laporan	84.000.000	8	Laporan	28.500.000	4	Laporan	24.000.000	4	Laporan	24.000.000	12,00	15.850.000	300,00	66,04	20,00	44.350.000	125,00	52,80	Kecamatan Menggala Timur
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terawatnya Barang Milik Daerah yang adan di Kecamatan Menggala Timur**	**100**		**250.032.000**	**100**		**43.891.200**	**100**		**50.898.000**	**100**		**50.898.000**	**84,32**	**42.916.500**	**84,32**	**84,32**	**184,32**	**86.807.700**	**184,32**	**34,72**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	94.512.000	2	Unit	20.436.200	1	Unit	23.628.000	1	Unit	23.628.000	6,00	20.641.500	600,00	87,36	8,00	41.077.700	266,67	43,46	Kecamatan Menggala Timur
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	155.520.000	1		23.455.000	1	Unit	27.270.000	1	Unit	27.270.000	6,00	22.275.000	600,00	81,68	7,00	45.730.000	233,33	29,40	Kecamatan Menggala Timur
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**84,27**									
															Predikat Kinerja			**T**									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN RAWAPITU																												
7					UNSUR KEWILAYAHAN																							
7	**1**				**KECAMATAN**										**1.937.204.779**			**1.849.619.292**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**1.937.204.779**			**1.849.619.292**	**72,59**	**1.706.024.326**							
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**6.993.827.398**	**100**		**2.649.245.441**	**100**		**1.568.766.779**	**100**		**1.527.331.292**	**91,51**	**1.424.738.526**	**91,51**	**93,28**	**191,51**	**4.073.983.967**	**191,51**	**58,25**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	6.704.572.498	28	Bulan	2.537.315.441	14	Bulan	1.517.186.779	14	Bulan	1.481.751.292	48,00	1.379.158.526	342,86	93,08	76,00	3.916.473.967	135,71	58,41	Kecamatan Rawa Pitu
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dokumen	289.254.900	2	Dokumen	111.930.000	1	Dokumen	51.580.000	1	Dokumen	45580000	12,00	45.580.000	1.200,00	100,00	14,00	157.510.000	350,00	54,45	Kecamatan Rawa Pitu
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**		**124.458.750**			**105.100.109**	**100**		**27.300.000**	**100**		**27.300.000**	**51,28**	**14.000.000**	**51,28**	**51,28**	**51,28**	**119.100.109**	**51,28**	**95,69**	
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9	Paket	124.458.750	1	Paket	22.500.000	2	Paket	27.300.000	2	Paket	27.300.000	1,00	14.000.000	50,00	51,28	2,00	36.500.000	22,22	29,33	Kecamatan Rawa Pitu
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**838.113.733**	**100**		**238.947.200**	**100**		**212.603.400**	**100**		**181.143.400**	**77,71**	**158.308.400**	**77,71**	**87,39**	**177,71**	**397.255.600**	**177,71**	**47,40**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	20.121.895	2	Paket	10.509.100	1	Paket	7.617.600	1	Paket	7.617.600	1,00	7.617.600	100,00	100,00	3,00	18.126.700	75,00	90,08	Kecamatan Rawa Pitu
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	119.711.447	2	Paket	39.457.700	1	Paket	46.194.800	1	Paket	46.194.800	4,00	39.828.800	400,00	86,22	6,00	79.286.500	150,00	66,23	Kecamatan Rawa Pitu
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	53.680.229	2	Paket	19.368.600	1	Paket	20.279.000	1	Paket	20.279.000	4,00	17.083.500	400,00	84,24	6,00	36.452.100	150,00	67,91	Kecamatan Rawa Pitu
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	106.315.430	2	Paket	36.362.600	1	Paket	20.120.000	1	Paket	20.120.000	4,00	16.602.500	400,00	82,52	6,00	52.965.100	150,00	49,82	Kecamatan Rawa Pitu
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	385.104.732	4	Laporan	92.689.200	4	Laporan	73.992.000	4	Laporan	78.232.000	4,00	77.176.000	100,00	98,65	8,00	169.865.200	16,67	44,11	Kecamatan Rawa Pitu

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%				
7	1	1	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**332.545.270**	**100**		**60.576.000**	**100**		**60.367.200**	**100**		**49.117.200**	**45,97**	**44.250.000**	**45,97**	**90,09**	**145,97**	**104.826.000**	**145,97**	**31,52**		
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	297.016.020	2	Laporan	60.576.000	1	Laporan	55.500.000	1	Laporan	44.250.000	9,00	44.250.000	900,00	100,00	11,00	104.826.000	22,92	35,29	Kecamatan Rawa Pitu	
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**		**319.178.188**	**200**	**Paket**	**107.052.500**	**100**	**Paket**	**68.167.400**	**100**		**64.727.400**	**96,49**	**64.727.400**	**96,49**	**100,00**	**296,49**	**171.779.900**	**296,49**	**53,82**		
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	194.379.038	3	Unit	71.662.500	1	Unit	39.717.400	1	Unit	38.666.400	5,00	38.666.400	500,00	100,00	8,00	110.328.900	100,00	56,76	Kecamatan Rawa Pitu	
7	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	9.148.250	1	Unit	2.150.000	1	Unit	2.150.000	1	Unit	2.150.000	3,00	2.150.000	300,00	100,00	4,00	4.300.000	133,33	47,00	Kecamatan Rawa Pitu	
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	115.650.900	4	Unit	33.240.000	1	Unit	24.150.000	1	Unit	23.911.000	4,00	23.911.000	400,00	100,00	8,00	57.151.000	133,33	49,42	Kecamatan Rawa Pitu	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**72,59**									
															Predikat Kinerja			**S**									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN BANJAR BARU																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																							
7	**1**				**KECAMATAN**										**1.875.299.016**			**1.845.762.451**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah**									**1.875.299.016**			**1.845.762.451**	**93,21**	**1.690.964.557**				**4.629.418.934**				
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan tamsil**	**100**		**6.121.831.090**	**100**		**2.727.386.585**	**100**		**1.584.594.016**	**100**		**1.608.207.451**	**91,00**	**1.447.269.818**	**91,00**	**89,99**	**191,00**	**4.174.656.403**	**191,00**	**68,19**		
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	5.586.923.028	28	Bulan	2.523.031.585	14	Bulan	1.477.214.016	14	Bulan	1.497.827.451	12,00	1.340.639.818	85,71	89,51	40,00	3.863.671.403	71,43	69,16	Kecamatan Banjar Baru	
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	Dokumen	534.908.062	3	Dokumen	204.355.000	2	Dokumen	107.380.000	2	Dokumen	110.380.000	5,00	106.630.000	250,00	96,60	8,00	310.985.000	100,00	58,14	Kecamatan Banjar Baru	
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas**	**100**		**96.202.000**				**100**		**20.000.000**	**100**		**12.000.000**	**100,00**	**12.000.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12.000.000**	**100,00**	**12,47**		
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	96.202.000	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	12.000.000	3,00	12.000.000	300,00	100,00	4,00	32.000.000	100,00	33,26	Kecamatan Banjar Baru	
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum**	**100**		**804.515.341**	**100**		**113.870.700**	**100**		**182.490.100**	**100**		**137.340.100**	**99,50**	**149.044.698**	**99,50**	**108,52**	**199,50**	**262.915.398**	**199,50**	**32,68**		
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	324.398.557	2	Paket	20.323.100	2	Paket	67.987.000	2	Paket	67.987.000	59,00	48.603.498	2.950,00	71,49	61,00	68.926.598	1.016,67	21,25	Kecamatan Banjar Baru	
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	19.860.750	3	Paket	29.724.200	2	Paket	15.113.600	2	Paket	15.113.600	20,00	15.777.200	1.000,00	104,39	23,00	45.501.400	287,50	229,10	Kecamatan Banjar Baru	
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	209.455.600	3	Laporan	52.363.900	3	Laporan	48.664.000	3	Laporan	48.664.000	1.500,00	84.664.000	50.000,00	173,98	1.503,00	137.027.900	12.525,00	65,42	Kecamatan Banjar Baru	
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**174.646.265**	**100**		**43.729.892**	**100**		**40.600.000**	**100**		**40.600.000**	**78,76**	**31.975.341**	**78,76**	**78,76**	**178,76**	**75.705.233**	**178,76**	**43,35**		
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	49.652.640	2	Laporan	22.229.892	1	Laporan	15.600.000	1	Laporan	15.600.000	6,00	12.225.341	600,00	78,37	8,00	34.455.233	66,67	69,39	Kecamatan Banjar Baru	
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	124.993.625	2	Laporan	21.500.000	1	Laporan	25.000.000	1	Laporan	25.000.000	3,00	19.750.000	300,00	79,00	5,00	41.250.000	125,00	33,00	Kecamatan Banjar Baru	
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**176.758.224**	**100**		**53.467.200**	**100**		**47.614.900**	**100**		**47.614.900**	**96,79**	**50.674.700**	**96,79**	**106,43**	**196,79**	**104.141.900**	**196,79**	**58,92**		
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	63.294.184	1	Unit	27.142.200	1	Unit	21.289.900	1	Unit	21.289.900	12,00	24.349.700	1.200,00	114,37	13,00	51.491.900	433,33	81,35	Kecamatan Banjar Baru	
7	1	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	113.464.040	1	Unit	26.325.000	1	Unit	26.325.000	1	Unit	26.325.000	1,00	26.325.000	100,00	100,00	2,00	52.650.000	100,00	46,40	Kecamatan Banjar Baru	
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)			**93,21**									
															Predikat Kinerja			**ST**									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN DENTE TELADAS																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																							
7	**1**				**KECAMATAN**										**1.765.789.957**			**1.750.789.957**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**1.765.789.957**			**1.750.789.957**	**77,52**	**1.382.689.637**								

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Anggaran Administrasi Keuangan**	**100**		**4.414.915.128**	**100**		**2.154.831.495**	**100**		**1.493.621.157**	**100**		**1.493.621.157**	**70,30**	**1.252.259.306**	**70,30**	**83,84**	**170,30**	**3.407.090.801**	**170,30**	**77,17**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56		3.842.995.128	28	Bulan	1.926.351.495	14	Bulan	1.361.239.557	14	Bulan	1.361.239.557	14,00	1.125.179.306	100,00	82,66	42,00	3.051.530.801	75,00	79,41	Kecamatan Dente Teladas
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		571.920.000	6	Dokumen	228.480.000	3	Dokumen	132.381.600	3	Dokumen	132.381.600	3,00	127.080.000	100,00	96,00	9,00	355.560.000	75,00	62,17	Kecamatan Dente Teladas
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**143.953.600**	**100**		**132.356.031**	**100**		**180.168.800**	**100**		**180.168.800**	**40,95**	**73.781.731**	**40,95**	**40,95**	**140,95**	**206.137.762**	**140,95**	**143,20**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	56	Bulan	48.000.000	2	Paket	10.270.200	1	Paket	20.000.000	1	Paket	20.000.000	1,00	7.000.000	100,00	35,00	3,00	17.270.200	5,36	35,98	Kecamatan Dente Teladas
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80	Paket	95.953.600	8	Paket	24.845.778	4	Paket	40.000.000	4	Paket	40.000.000	4,00	11.800.578	100,00	29,50	12,00	36.646.356	15,00	38,19	Kecamatan Dente Teladas
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	Paket	80.000.000	8	Paket	15.578.553	4	Paket	30.000.000	4	Paket	30.000.000	4,00	11.448.953	100,00	38,16	12,00	27.027.506	16,67	33,78	Kecamatan Dente Teladas
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	43.800.000	4	Paket	11.075.500	2	Paket	20.000.000	2	Paket	20.000.000	2,00	7.315.000	100,00	36,58	6,00	18.390.500	30,00	41,99	Kecamatan Dente Teladas
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	Laporan	181.012.800	4	Laporan	60.286.000	1	Laporan	30.168.800	1	Laporan	30.168.800	2,00	30.117.200	200,00	99,83	6,00	90.403.200	75,00	49,94	Kecamatan Dente Teladas
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	46.000.000	2	Laporan	10.300.000	1	Laporan	40.000.000	1	Laporan	40.000.000	1,00	6.100.000	100,00	15,25	3,00	16.400.000	37,50	35,65	Kecamatan Dente Teladas
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**148.800.000**	**100**		**54.000.000**	**100**		**27.000.000**	**100**		**27.000.000**	**100,00**	**27.000.000**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**81.000.000**	**200,00**	**54,44**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56	Bulan	40.800.000	-		-	12	Bulan	27.000.000	12	Bulan	27.000.000	4,00	27.000.000	33,33	100,00	4,00	27.000.000	7,14	66,18	Kecamatan Dente Teladas
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**		**206.856.000**	**100**		**57.842.900**	**100**		**30.000.000**	**100**		**30.000.000**	**98,83**	**29.648.600**	**98,83**	**98,83**	**198,83**	**87.491.500**	**198,83**	**42,30**	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	206.856.000	6	Unit	43.002.900	2	Unit	30.000.000	2	Unit	30.000.000	3,00	29.648.600	150,00	98,83	9,00	72.651.500	56,25	35,12	Kecamatan Dente Teladas
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)						**77,52**		
																			Predikat Kinerja						**T**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																												
KECAMATAN MERAKSA AJI																												
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																							
7	**1**				**KECAMATAN**										**1.646.633.971**			**1.646.633.971**									
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									**1.646.633.971**			**1.646.633.971**	**78,25**	**1.505.763.846**							
7	**1**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**1.306.368.545**	**100**		**2.392.593.962**	**100**		**1.364.215.971**	**100**		**1.364.215.971**	**95,09**	**1.297.182.252**	**95,09**	**95,09**	**195,09**	**3.689.776.214**	**195,09**	**282,45**	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56		1.174.918.545	28	Bulan	2.176.413.962	12	Bulan	1.249.785.971	12	Bulan	1.249.785.971	14,00	1.188.752.252	116,67	95,12	42,00	3.365.166.214	75,00	286,42	Kecamatan Meraksa Aji
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		131.450.000	2	Dokumen	216.180.000	1	Dokumen	114.430.000	1	Dokumen	114.430.000	1,00	108.430.000	100,00	94,76	3,00	324.610.000	75,00	246,95	Kecamatan Meraksa Aji
7	**1**	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**		**27.000.000**			**15.000.000**	**100**		**18.000.000**	**100**		**18.000.000**	**83,33**	**15.000.000**	**83,33**	**83,33**	**83,33**	**30.000.000**	**83,33**	**111,11**	
7	1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	27.000.000	1	Paket	15.000.000	1	Paket	18.000.000	1	Paket	18.000.000	1,00	15.000.000	100,00	83,33	2,00	30.000.000	100,00	111,11	Kecamatan Meraksa Aji
7	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**193.548.000**	**180**		**218.742.260**	**100**		**196.498.000**	**100**		**196.498.000**	**72,17**	**141.806.000**	**72,17**	**72,17**	**252,49**	**360.548.260**	**252,49**	**186,28**	
7	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.007.000	2	Paket	6.630.400	1	Paket	5.454.000	1	Paket	5.454.000	1,00	5.454.000	100,00	100,00	3,00	12.084.400	75,00	401,88	Kecamatan Meraksa Aji
7	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	Paket	9.934.000	3	Paket	19.771.600	1	Paket	9.081.000	1	Paket	9.081.000	2,00	9.081.000	200,00	100,00	5,00	28.852.600	62,50	290,44	Kecamatan Meraksa Aji
7	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	26.178.000	4	Paket	49.290.260	2	Paket	30.532.000	2	Paket	30.532.000	2,00	30.532.000	100,00	100,00	6,00	79.822.260	50,00	304,92	Kecamatan Meraksa Aji
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	10.334.000	4	Paket	14.742.800	2	Paket	9.089.000	2	Paket	9.089.000	2,00	9.089.000	100,00	100,00	6,00	23.831.800	50,00	230,62	Kecamatan Meraksa Aji
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	82.000.000	23	Laporan	94.419.200	5	Laporan	82.860.000	5	Laporan	82.860.000	5,00	87.650.000	100,00	105,78	28,00	182.069.200	58,33	222,04	Kecamatan Meraksa Aji
7	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**19.780.000**	**183**		**14.175.000**			**19.110.000**	**100**		**19.110.000**	**56,83**	**10.860.000**	**56,83**	**56,83**	**240,05**	**25.035.000**	**240,05**	**126,57**	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3.320.000	4	Laporan	14.175.000	2	Laporan	10.860.000	2	Laporan	10.860.000	2,00	10.860.000	100,00	100,00	6,00	25.035.000	50,00	754,07	Kecamatan Meraksa Aji
7	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**54.870.000**	**170**		**50.832.900**	**100**		**48.810.000**	**100**		**48.810.000**	**83,83**	**40.915.594**	**83,83**	**83,83**	**254,31**	**91.748.494**	**254,31**	**167,21**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
7	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	Unit	35.670.000	6	Unit	50.832.900	1	Unit	31.770.000	1	Unit	31.770.000	1,00	31.465.594	100,00	99,04	7,00	82.298.494	43,75	230,72	Kecamatan Meraksa Aji
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	16.200.000	-		-	2	Unit	14.850.000	2	Unit	14.850.000	2,00	9.450.000	100,00	63,64	2,00	9.450.000	50,00	58,33	Kecamatan Meraksa Aji
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				78,25							
															Predikat Kinerja				T							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
KECAMATAN GEDUNG AJI BARU																											
7					UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	1				KECAMATAN										1.848.968.871			1.810.513.680									
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.848.968.871			1.810.513.680	68,81	1.697.038.452							
7	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN serta Gaji dan Tunjangan ASN	100		1.203.867.101	100		2.811.618.787	100		1.601.103.871	100		1.562.648.680	95,18	1.512.278.152	95,18	96,78	195,18	4.323.896.939	195,18	359,17	
7	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	1.030.412.101	28	Bulan	2.574.808.787	12	Bulan	1.487.698.871	12	Bulan	1.449.243.680	12,00	1.398.873.152	100,00	96,52	40,00	3.973.681.939	71,43	385,64	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43	Dokumen	173.455.000	22	Dokumen	236.810.000	12	Dokumen	113.405.000	12	Dokumen	113.405.000	12,00	113.405.000	100,00	100,00	34,00	350.215.000	79,07	201,91	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Anggaran Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Kecamatan Gedung Aji Baruu	100		128.424.100	100		111.551.500	100		147.211.100	100		147.211.100	60,36	88.852.400	60,36	60,36	160,36	200.403.900	160,36	156,05	
7	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	31.542.100	2	Paket	26.887.300	1	Paket	64.813.200	2	Paket	64.813.200	6,00	30.056.400	300,00	46,37	8,00	56.943.700	160,00	180,53	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	7.544.400	2	Paket	10.120.100	1	Paket	21.001.900	2	Paket	21.001.900	6,00	18.500.000	300,00	88,09	8,00	28.620.100	160,00	379,36	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan	60.337.600	2	Laporan	66.571.200	1	Laporan	43.996.000	12	Laporan	43.996.000	9,00	36.996.000	75,00	84,09	11,00	103.567.200	220,00	171,65	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	21.000.000	3	Laporan	6.000.000	2	Laporan	17.400.000	12	Laporan	17.400.000	2,00	3.300.000	16,67	18,97	5,00	9.300.000	62,50	44,29	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersedianya Jasa Penunjang Perkantoran Kec. Gedung Aji Baru	100		91.820.900	100		96.021.900	100		29.964.000	100		29.964.000	91,67	27.468.000	91,67	91,67	191,67	123.489.900	191,67	134,49	
7	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Laporan	4.200.000	2	Laporan	8.400.000	1	Laporan	6.696.000	12	Laporan	6.696.000	12,00	4.200.000	100,00	62,72	14,00	12.600.000	233,33	300,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Laporan	87.620.900	23	Laporan	87.621.900	12	Laporan	23.268.000	12	Laporan	23.268.000	12,00	23.268.000	100,00	100,00	35,00	110.889.900	72,92	126,56	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erlaksananya Pemeiharaan Barang Milik Daerah di Kec. Gedung Aji Baru	100		33.670.000	100		48.206.130	100		70.689.900	100		70.689.900	96,82	68.439.900	96,82	96,82	196,82	116.646.030	196,82	346,44	
7	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	33.670.000	2	Unit	48.206.130	1	Unit	37.920.000	4	Unit	37.920.000	3,00	35.670.000	75,00	94,07	5,00	83.876.130	500,00	249,11	Kecamatan Gedung Aji Baru
7	1	1	2,09	9	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	Unit	33.670.000				1	Unit	32.769.900	1	Unit	32.769.900	1,00	32.769.900	100,00	100,00	1,00	32.769.900	100,00	97,33	Kecamatan Gedung Aji Baru
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)				68,81							
															Predikat Kinerja				S							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																											
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH																											
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																						
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										11.876.852.096			7.569.649.202									
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pencapaian penunjang urusan pemerintah									8.570.691.948			3.643.488.244	70,58	3.292.817.226							
8	1	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase realisasii anggaran	100		12.614.186.204	100		5.731.322.240	100		8.373.954.360	100		3.446.751.324	51,88	3.151.712.299	51,88	91,44	151,88	8.883.034.539	151,88	70,42	
8	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Bulan	11.580.686.204	28	Bulan	5.213.322.240	14	Bulan	8.103.229.360	14	Bulan	3.176.026.324	14,00	2.884.737.299	100,00	90,83	42,00	8.098.059.539	75,00	69,93	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
8	1	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	1.033.500.000	24	Dokumen	518.000.000	12	Dokumen	270.725.000	12	Dokumen	270.725.000	12,00	266.975.000	100,00	98,61	36,00	784.975.000	75,00	75,95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**		**1.211.908.000**	**100**		**246.679.200**	**100**		**88.915.746**	**100**		**88.315.746**	**59,81**	**53.031.100**	**59,81**	**60,05**	**159,81**	**299.710.300**	**159,81**	**24,73**	
8	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Paket	132.076.000	15	Paket	23.783.300	8	Paket	30.541.000	8	Paket	30.541.000	8,00	26.209.000	100,00	85,82	23,00	49.992.300	47,92	37,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16	Paket	9.327.200	5	Paket	9.573.400	2	Paket	8.357.250	2	Paket	8.357.250	2,00	1.895.700	100,00	22,68	7,00	11.469.100	43,75	122,96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	Paket	209.944.800	18	Paket	38.450.000	11	Paket	18.767.496	11	Paket	18.767.496	10,00	9.344.600	90,91	49,79	28,00	47.794.600	58,33	22,77	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	115.200.000	9	Laporan	22.140.000	1	Laporan	12.600.000	1	Laporan	12.000.000	1,00	12.000.000	100,00	100,00	10,00	34.140.000	20,83	29,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**		**472.128.000**	**100**		**172.812.900**	**100**		**75.191.592**	**100**		**75.790.924**	**75,64**	**57.079.200**	**75,64**	**75,31**	**175,64**	**229.892.100**	**175,64**	**48,69**	
8	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	79.248.000	23	Laporan	41.172.900	12	Laporan	20.111.592	12	Laporan	20.710.924	12,00	19.999.200	100,00	96,56	35,00	61.172.100	72,92	77,19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	392.880.000	21	Laporan	131.640.000	12	Laporan	55.080.000	12	Laporan	55.080.000	12,00	37.080.000	100,00	67,32	33,00	168.720.000	68,75	42,94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik**	**100**		**267.200.000**	**100**		**117.092.100**	**100**		**32.630.250**	**100**		**32.630.250**	**94,99**	**30.994.627**	**94,99**	**94,99**	**194,99**	**148.086.727**	**194,99**	**55,42**	
8	1	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	Unit	267.200.000	6	Unit	117.092.100	3	Unit	32.630.250	4	Unit	32.630.250	4,00	30.994.627	100,00	94,99	10,00	148.086.727	83,33	55,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat									**540.429.000**			**540.429.000**	**99,21**								
8	**1**	**2**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat**	**100**		**3.745.000.000**	**100**		**1.233.243.300**	**100**		**540.429.000**	**100**		**540.429.000**	**99,21**	**536.180.035**	**99,21**	**99,21**	**199,21**	**1.769.423.335**	**199,21**	**47,25**	
8	1	2	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		210	Orang	1.822.500.000	140	Orang	598.320.000	1	Orang	9.682.000	1	Orang	9.682.000	1,00	7.762.000	100,00	80,17	141,00	606.082.000	67,14	33,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	2	2,01	8	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	280	Orang	1.822.500.000	140	Orang	598.320.000	70	Orang	530.747.000	70	Orang	530.747.000	70,00	528.418.035	100,00	99,56	210,00	1.126.738.035	75,00	61,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada									**488.520.558**			**488.520.558**	**100,00**								
8	**1**	**3**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada**	**100**		**1.743.426.744**	**100**		**56.724.549.421**	**100**		**488.520.558**	**100**		**488.520.558**	**100,00**	**488.520.558**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**57.213.069.979**	**200,00**	**3.281,64**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
8	1	3	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	28	Orang	1.743.426.744	136	Orang	56.724.549.421	16	Orang	488.520.558	16	Orang	488.520.558	16,00	488.520.558	100,00	100,00	152,00	57.213.069.979	542,86	3.281,64	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan									**962.037.000**			**1.062.037.000**	**90,15**								
8	**1**	**4**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan**	**100**		**2.921.800.000**	**100**		**817.828.000**	**100**		**962.037.000**	**100**		**1.062.037.000**	**90,15**	**876.837.000**	**90,15**	**82,56**	**190,15**	**1.694.665.000**	**190,15**	**58,00**	
8	1	4	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	240	Orang	2.921.800.000	60	Orang	817.828.000	20	Orang	962.037.000	20	Orang	1.062.037.000	20,00	876.837.000	100,00	82,56	80,00	1.694.665.000	33,33	58,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya									**244.439.500**			**244.439.500**	**94,45**	**230.876.500**							
8	**1**	**5**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya**	**100**		**1.993.960.000**	**100**		**967.960.000**	**100**		**244.439.500**	**100**		**244.439.500**	**94,45**	**230.876.500**	**94,45**	**94,45**	**194,45**	**1.198.836.500**	**194,45**	**60,12**	
8	1	5	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800	Orang	328.000.000	190	Orang	151.900.000	50	Orang	16.754.500	30	Orang	16.754.500	30,00	12.254.500	100,00	73,14	220,00	164.154.500	27,50	50,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	5	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	24	Laporan	1.665.960.000	12	Laporan	816.060.000	6	Laporan	227.685.000	6	Laporan	227.685.000	6,00	218.622.000	100,00	96,02	18,00	1.034.682.000	75,00	62,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial									**1.070.734.090**			**1.590.734.900**	**131,34**				**131,34**				
8	**1**	**6**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial**	**100**		**4.400.360.000**	**100**		**3.411.821.600**	**100**		**1.070.734.090**	**100**		**1.590.734.900**	**131,34**	**1.584.124.900**	**131,34**	**99,58**	**231,34**	**4.995.946.500**	**231,34**	**113,53**	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD Kabupaten pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPD)			Realiasi Capaian Kinerja RKPD s.d. Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten s.d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					3	4	5			6			7			7			8		9 = 8 / 7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 x 100%		
8	1	6	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	160	Orang	230.000.000	120	Orang	99.084.800	40	Orang	20.700.000	40	Orang	20.700.000	40,00	18.740.000	100,00	90,53	160,00	117.824.800	100,00	51,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8	1	6	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48	Laporan	4.170.360.000	17	Laporan	3.312.736.800	4	Laporan	1.050.034.090	1	Laporan	1.570.034.900	1,00	1.565.384.900	100,00	99,70	18,00	4.878.121.700	37,50	116,97	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																97,62										
Predikat Kinerja																ST										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tulang Bawang hingga Triwulan IV Tahun 2025 (Tabel 2.112), secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya kesungguhan dan komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Adapun sejumlah faktor yang menjadi pendorong dalam capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Perencanaan yang Terintegrasi**

   Proses perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan program, hingga pelaksanaan dan evaluasi, berjalan secara terkoordinasi serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
2. **Koordinasi yang Efektif Antar-Perangkat Daerah**

   Terjalinnya koordinasi yang baik antar unit kerja di BAPPEDA maupun antar perangkat daerah lainnya dalam pengawalan target kinerja dan realisasi anggaran, turut memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan sasaran yang telah direncanakan.
3. **Dukungan Program yang Memadai**

   Adanya dukungan program yang bersumber dari APBN, Pemerintah Provinsi Lampung, serta sumber pendanaan lainnya seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Dukungan tersebut tidak hanya memperkuat kapasitas pendanaan daerah, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

   Salah satu bentuk kontribusi nyata dari program CSR/TJSL di Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada pelaksanaan

berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dunia usaha sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 113 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang Telah Dilaksanakan

No	Kegiatan CSR	Tahun	Pemberi
1	Pembangunan Tugu Udang di Wisata Cakat Raya	2023	Bank Mandiri
2	Pembuatan Kontainer Box Sampah 2 Unit	2024	Bank Lampung
3	Pembuatan Kontainer BOX Sampah 3 Unit dan Tongsampah 3 in 1 sebanyak 15 Buah	2025	Bank Mandiri
4	Pembuatan Kontainer Box Sampah 1 Unit	2025	Bank Lampung
5	Hibah 1 (satu) unit Truck Sampah dan Kontainer Sampah	2025	PT. Sweet Indo Lampung
6	Hibah 1 (satu) unit Motor Sampah Roda 3	2026	PT. Central Pertiwi Bahari

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program CSR/TJSL ke depan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan berbagai upaya kolaborasi dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme CSR, antara lain:

1. Menyampaikan usulan proposal kerja sama pembangunan kepada beberapa perusahaan, khususnya sektor keuangan (perbankan) dan perusahaan besar di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Mengadakan pertemuan antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha di Kabupaten Tulang Bawang melalui kegiatan *Coffee Morning* sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2025.
3. Merencanakan pembentukan Forum CSR Kabupaten Tulang Bawang sebagai wadah komunikasi dan koordinasi

antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan melalui CSR/TJSL.

4. Mendukung inisiatif DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) atau CSR sebagai dasar penguatan regulasi pelaksanaan CSR di daerah.

4. Komitmen Tinggi Pemerintah Daerah

Komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mendorong peningkatan kinerja dan pencapaian target pembangunan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas.

5. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Perangkat Daerah

Penerapan sistem penilaian kinerja secara berkala mendorong setiap perangkat daerah untuk terus meningkatkan capaian kinerja, baik dalam aspek fisik maupun keuangan, sesuai target yang telah ditetapkan.

Dengan sinergi dari berbagai faktor tersebut, diharapkan kinerja pembangunan Kabupaten Tulang Bawang ke depan dapat terus meningkat secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek didalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Tulang Bawang dapat terwujud. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan untuk menentukan program yang tepat untuk mengatasi masalah pembangunan yang dihadapi. Identikasi permasalahan diperoleh dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga didasarkan pada kriteria tertentu sehingga menghasilkan fakta yang aktual tentang permasalahan pembangunan daerah. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pilar utama pembangunan. Setiap pilar memiliki tantangan yang saling terkait dan memerlukan penanganan secara terpadu serta lintas sektor agar prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

A. Pilar Infrastruktur dan Lingkungan

Pilar Infrastruktur dan Lingkungan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan berperan strategis dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan mobilitas dan konektivitas antarwilayah, serta menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Namun demikian, kondisi infrastruktur dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tulang Bawang masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek kualitas, kapasitas, pemerataan layanan, maupun keberlanjutan pengelolaannya. Tantangan tersebut menyebabkan peran

infrastruktur dan lingkungan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan utama pada pilar ini antara lain:

1. Kualitas dan kemantapan jaringan jalan belum merata
2. Aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah belum optimal.
3. Jaringan irigasi kewenangan kabupaten masih belum memadai untuk mendukung produktivitas pertanian.
4. Layanan air minum dan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini ditandai dengan masih adanya permasalahan utama sanitasi daerah, seperti belum tersedianya IPLT, belum optimalnya pengelolaan lumpur tinja terjadwal, rendahnya pelayanan persampahan, serta masih tingginya area genangan.
5. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

B. Pilar Ekonomi

Perekonomian daerah menunjukkan perkembangan yang belum merata dan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing serta kemandirian ekonomi. Pemanfaatan potensi unggulan daerah belum optimal, sementara pertumbuhan usaha dan investasi masih relatif terbatas. Permasalahan yang dihadapi meliputi:

1. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata lokal belum optimal.
2. Komoditas unggulan daerah belum diolah secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah.
3. Pertumbuhan usaha mikro dan kecil masih terbatas, terutama pada akses permodalan dan kapasitas usaha.
4. Pertumbuhan investasi daerah belum optimal
5. Sistem distribusi pangan belum efisien dan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih terbatas.

C. Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kondisi saat ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan layanan dasar yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pada pilar ini antara lain:

1. Kualitas dan pemerataan layanan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar.
2. Akses layanan kesehatan dasar belum merata.
3. Penanggulangan kemiskinan belum optimal.
4. Perlindungan perempuan dan anak masih terbatas.
5. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan belum merata.
6. Pengembangan potensi generasi muda dan pembinaan atlet unggulan masih terbatas.

D. Pilar Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam perencanaan, koordinasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Permasalahan utama pada pilar ini meliputi:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.
3. Potensi pendapatan daerah belum digali secara optimal.
4. Belum Optimalya pengelolaan arsip serta keamanan informasi pemerintahan

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menggambarkan kondisi faktual yang dihadapi oleh masyarakat dan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Setiap urusan memiliki permasalahan spesifik yang perlu ditangani melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah dan terintegrasi.

a. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK di Kabupaten Tulang Bawang belum optimal, ditunjukkan oleh tingkat partisipasi yang lebih rendah dan fluktuatif dibanding jenjang SD/MI;
b) Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK di Kabupaten Tulang Bawang belum optimal, ditunjukkan oleh tingkat partisipasi yang stagnan di sekitar 80 persen pada jenjang SMP dan masih rendah pada jenjang SMA meskipun meningkat hingga 64,12 persen pada tahun 2025;
c) Masih terdapat angka putus sekolah, yaitu pada jenjang SD/MI/Paket A sebesar 0,20 persen dan jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 0,69 persen pada tahun 2025;
d) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2025 masih relatif rendah, yaitu 7,90 tahun atau setara jenjang SMP/sederajat, sementara harapan lama sekolah baru mencapai 12,39 tahun atau setara SMA/sederajat;
e) Pemetaan dan pendistribusian tenaga pendidik belum optimal, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas layanan pendidikan antarwilayah;

f) Penyediaan dan rekrutmen tenaga pendidik, khususnya melalui skema PPPK Guru, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah, yang berdampak pada keterbatasan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan;
g) Pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan metode pembelajaran inovatif belum optimal, sehingga kualitas pembelajaran serta kesiapan peserta didik dalam menghadapi era digital masih perlu ditingkatkan; dan
h) Koordinasi antara perangkat daerah terkait dan satuan pendidikan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan belum maksimal, yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan daerah.

2) Kesehatan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Angka kematian bayi masih relatif tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 0,52 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 menjadi 5,21 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan neonatal.
b) Masih terdapat kasus kematian ibu, yaitu sebanyak 2 kasus pada tahun 2025, yang mencerminkan perlunya peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan maternal yang aman dan berkesinambungan.
c) Prevalensi stunting pada balita masih tergolong tinggi, mencapai 5,40 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan gizi seimbang, pola asuh yang tepat, serta akses terhadap layanan kesehatan dasar.
d) Pemenuhan tenaga dokter dan tenaga medis belum optimal, tercermin dari rasio dokter per 1.000 penduduk yang masih

berada di bawah standar, sehingga berdampak pada keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan.

e) Pendampingan dan edukasi gizi kepada keluarga dengan balita stunting belum berjalan optimal, khususnya terkait pemahaman dan praktik pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.
f) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum merata, karena masih terdapat masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta, sehingga membatasi akses terhadap layanan kesehatan dasar.
g) Ketersediaan dan pemerataan sarana serta prasarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi, yang berdampak pada belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah.
h) Koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, serta kesehatan ibu dan anak masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan menyeluruh.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Kualitas jalan kabupaten masih relatif rendah, ditunjukkan oleh persentase jalan dalam kondisi mantap yang menurun menjadi 22,25 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan.
b) Aksesibilitas jaringan jalan belum merata, tercermin dari rasio panjang jalan per 1.000 jiwa yang menurun dari 2,42 pada tahun 2021 menjadi 1,805 pada tahun 2025, sehingga distribusi jaringan jalan antarwilayah belum seimbang.
c) Ketersediaan tenaga operasional irigasi masih terbatas, di mana jumlah tenaga yang ada belum sebanding dengan

panjang dan kompleksitas jaringan irigasi, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas layanan irigasi bagi sektor pertanian.

d) Kepatuhan terhadap perizinan bangunan masih rendah, ditunjukkan oleh rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih rendah, yaitu sebesar 0,1917 pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya kendala dalam proses perizinan.
e) Pelayanan air minum belum sepenuhnya merata dan berkelanjutan, tercermin dari capaian layanan yang masih berada di bawah target, sehingga memerlukan upaya penguatan dalam pemerataan dan keberlanjutan pelayanan dasar.
f) Perencanaan tata ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang belum berjalan optimal, yang mengakibatkan masih tingginya potensi konflik pemanfaatan ruang serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan.
g) Keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan pembiayaan dalam pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, masih menjadi kendala utama sehingga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur belum dapat ditingkatkan secara optimal.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor B/299/IV.4/HK/TB/2024 tanggal 28 Juni 2024, dengan total luas kawasan kumuh mencapai 104,48 hektare.
b) Keberadaan rumah tidak layak huni masih menjadi permasalahan, yang berdampak pada belum terpenuhinya

kebutuhan sebagian masyarakat akan hunian yang aman, sehat, dan layak.

c) Penyediaan sarana dan prasarana umum di kawasan permukiman belum optimal, termasuk akses jalan lingkungan, sistem drainase, sanitasi, serta ketersediaan fasilitas publik lainnya.
d) Tingginya backlog perumahan mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan perumahan masyarakat dan kemampuan penyediaan hunian yang ada saat ini.
e) Koordinasi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman kumuh belum berjalan optimal, sehingga percepatan pengentasan kawasan kumuh serta penyediaan hunian layak masih berlangsung secara lambat.
f) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan pembiayaan dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman masih menjadi kendala, yang berdampak pada belum optimalnya implementasi program perumahan dan permukiman.
g) Belum optimalnya penerapan sistem pemantauan dan evaluasi kawasan permukiman berdampak pada keterbatasan dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan menetapkan prioritas intervensi secara akurat.

5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Penyediaan sumber daya manusia Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terlatih belum optimal, sehingga tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi gangguan ketertiban umum maupun situasi kebencanaan masih relatif rendah.

b) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) masih ditemukan di Kabupaten Tulang Bawang, meskipun pada tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penegakan Perda masih perlu terus diperkuat, disertai dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah dapat semakin meningkat.
c) Kelompok relawan bencana yang aktif di tingkat masyarakat belum terbentuk secara memadai, sehingga penanganan bencana berbasis komunitas belum berjalan optimal.
d) Koordinasi antarinstansi dalam penanganan keamanan, ketertiban umum, dan kebencanaan belum berjalan optimal, sehingga efektivitas pengawasan serta penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masih terbatas.
e) Ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan penanggulangan bencana serta kebakaran masih terbatas, yang berdampak pada belum maksimalnya kemampuan operasional dalam menghadapi kondisi darurat.

6) Sosial

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terutama didominasi oleh permasalahan kemiskinan, kerentanan kelompok lanjut usia, serta kelompok penyandang disabilitas.
b) Peningkatan kapasitas terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial belum menjangkau seluruh elemen yang ada, sehingga peran serta masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial masih terbatas.
c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan sosial belum sepenuhnya tercapai. Pada tahun 2025, capaian

indikator rehabilitasi sosial dasar bagi tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, belum mencapai target pemenuhan yang ditetapkan sebesar 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan kondisi yang belum optimal serta mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) Koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan, sehingga efektivitas pelaksanaan program sosial belum berjalan secara maksimal.
e) Kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan sosial masih terbatas, khususnya dalam aspek identifikasi permasalahan, pendampingan sasaran, serta pemantauan dan evaluasi program kesejahteraan sosial.
f) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial masih terbatas, sehingga distribusi bantuan dan pelayanan sosial belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang secara merata.

b. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,19 persen. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan upaya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja daerah.
b) Pemenuhan hak pekerja/buruh dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, sehingga perlindungan sosial bagi tenaga kerja belum dapat dirasakan secara merata.
c) Partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih

besarnya jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, yang sebagian besar didominasi oleh kegiatan mengurus rumah tangga serta aktivitas lainnya di luar pasar kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja yang tersedia belum sepenuhnya termanfaatkan dalam kegiatan produktif, sehingga perlu upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja serta perluasan kesempatan kerja.

d) Upaya penempatan tenaga kerja terdaftar belum berjalan optimal, sehingga distribusi tenaga kerja terhadap peluang kerja yang tersedia belum berlangsung secara efektif dan efisien.
e) Koordinasi dengan dunia usaha serta lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi masih terbatas, sehingga keterkaitan *(link and match)* antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan dunia industri belum terwujud secara optimal.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum memenuhi kuota minimal 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
b) Ketersediaan data terpilah berdasarkan gender dan anak pada perangkat daerah belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis data yang akurat dan komprehensif.
c) Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di tingkat desa dan kelurahan belum merata, yang mengakibatkan masih terbatasnya akses sebagian kelompok perempuan terhadap peluang ekonomi, peningkatan kapasitas, dan partisipasi sosial.

d) Layanan perlindungan anak, termasuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta pemenuhan hak-hak anak, belum berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
e) Kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih terbatas, sehingga implementasi kebijakan dan program belum mencapai hasil yang optimal.

3) Pangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pangan di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 tercatat sebesar 90,50. Meskipun angka ini sudah tergolong tinggi, namun belum mencapai skor ideal (100), sehingga upaya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar lebih beragam dan bergizi seimbang.
b) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 tercatat sebesar 73,46 dan berada pada kategori tahan. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah ambang ideal, yang mencerminkan bahwa pemanfaatan pangan, khususnya dari aspek gizi, sanitasi, serta pola konsumsi rumah tangga, belum berjalan secara optimal.
c) Tingkat diversifikasi pangan serta konsumsi pangan sumber protein hewani dan nabati masih relatif rendah, sehingga berdampak pada kualitas asupan gizi masyarakat.
d) Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan desa belum merata, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap kondisi kerawanan pangan.

e) Sistem distribusi dan pengelolaan cadangan pangan daerah belum sepenuhnya efisien, yang menyebabkan ketersediaan pangan pokok belum selalu terjamin secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

4) Pertanahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut:

a) Masih terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang belum difasilitasi proses sertifikasinya, sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum serta kendala dalam pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.
b) Penataan administrasi pertanahan dan penguasaan tanah masyarakat belum berjalan optimal, termasuk ketersediaan peta bidang dan kelengkapan dokumen kepemilikan, yang berpotensi memicu terjadinya sengketa pertanahan.
c) Koordinasi antara perangkat daerah yang membidangi pertanahan dengan instansi vertikal terkait belum sepenuhnya efektif, sehingga proses sertifikasi dan legalisasi tanah masih berjalan lambat.
d) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pertanahan, termasuk penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan, berdampak pada rendahnya efisiensi dan akurasi data pertanahan.
e) Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban di bidang pertanahan belum optimal, sehingga pemanfaatan tanah belum berjalan secara maksimal dan masih berpotensi menimbulkan konflik.

5) Lingkungan Hidup

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2025 tercatat sebesar 70,71 yang masuk dalam kategori Baik. Namun, angka ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas lingkungan, mengingat skor tersebut masih mendekati ambang batas kategori 'Sedang'. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan pada indikator kualitas air dan tutupan lahan agar tidak mengalami degradasi di masa mendatang
b) Kualitas air permukaan belum mencapai kondisi ideal dengan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 73,32 persen, sehingga berisiko menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan mengganggu keberlanjutan ekosistem perairan di Kabupaten Tulang Bawang
c) Menurunnya kualitas udara secara signifikan pada tahun 2025 yang ditunjukkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 76,40, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya yang berada di atas angka 90, sehingga berpotensi meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap gangguan kesehatan pernapasan.
d) Penanganan timbulan sampah, khususnya di wilayah perkotaan, masih menghadapi berbagai kendala, baik pada aspek pengelolaan sampah rumah tangga, sampah pasar, maupun sampah fasilitas publik lainnya;
e) Pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta ekosistem alami belum berjalan secara optimal, sehingga kemampuan lingkungan dalam menyerap polusi serta mendukung keanekaragaman hayati masih terbatas;
f) Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah, termasuk dalam penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan lingkungan hidup;
g) Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana pengawasan lingkungan hidup mengakibatkan pelaksanaan monitoring, penegakan hukum, serta program konservasi belum dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tulang Bawang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi penduduk wajib KTP belum sepenuhnya tercapai, dengan capaian penerbitan KTP-el pada tahun 2025 sebesar 96 persen, sehingga masih terdapat penduduk yang belum tertib administrasi kependudukan;
b) Pelaporan peristiwa penting kependudukan, meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, dari masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan secara optimal, yang berdampak pada rendahnya penerbitan akta serta belum optimalnya validitas dan pemutakhiran data kependudukan;
c) Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah berdasarkan perjanjian kerja sama (MoU) belum dilakukan secara menyeluruh dan efektif, sehingga integrasi data untuk mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik masih terbatas;
d) Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0–17 tahun belum menjangkau seluruh sasaran, sehingga masih terdapat anak yang belum memiliki identitas kependudukan yang sah dan tercatat secara administrasi.
e) Keterbatasan sumber daya manusia serta dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan data kependudukan, termasuk pada layanan berbasis daring dan layanan cepat, masih menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
f) Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan masih rendah.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan secara optimal;
b) Capaian Desa Mandiri masih terbatas, sehingga sebagian besar desa masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat dan kabupaten;
c) Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa masih terdapat banyak desa yang belum berkembang secara optimal;
d) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal belum sepenuhnya efektif, termasuk dalam hal partisipasi warga pada kegiatan ekonomi produktif serta pengelolaan potensi desa;
e) Kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan masyarakat dalam perencanaan serta pengelolaan program pembangunan desa masih memerlukan peningkatan;
f) Integrasi program pemberdayaan masyarakat dengan sektor lainnya, seperti pertanian, UMKM, pendidikan, dan kesehatan, masih terbatas sehingga dampak pembangunan desa belum dirasakan secara maksimal.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diuraikan sebagai berikut:

a) Angka *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,20, yang menunjukkan masih diperlukan upaya pengendalian kelahiran yang lebih efektif.
b) *Unmet need* program Keluarga Berencana (KB) masih relatif tinggi, yaitu sebesar 11,90 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan masih terdapat pasangan usia subur yang ingin menunda atau membatasi kelahiran namun belum

menggunakan metode kontrasepsi, sehingga kebutuhan pelayanan KB belum sepenuhnya terpenuhi.

c) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program KB dan perencanaan keluarga masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.
d) Keterbatasan akses dan distribusi alat kontrasepsi serta layanan KB di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil, masih menjadi hambatan dalam pencapaian target program.
e) Koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk dan pelaksanaan program KB belum optimal, sehingga integrasi dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masih terbatas.

9) Perhubungan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perhubungan, diuraikan sebagai berikut:

a) Penyediaan perlengkapan jalan, termasuk rambu lalu lintas, APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dan PJU (Penerangan Jalan Umum), masih belum optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan serta mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
b) Infrastruktur transportasi publik, seperti terminal, halte, dan jaringan angkutan umum, belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah, sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi.
c) Sistem pengelolaan transportasi, khususnya integrasi antara angkutan umum dan transportasi logistik, masih terbatas. Kondisi ini mengurangi efisiensi mobilitas barang dan orang.
d) Tingkat pelayanan transportasi umum kepada masyarakat belum maksimal, baik dari sisi frekuensi perjalanan, keterjangkauan tarif, maupun kenyamanan layanan, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.

10) Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Optimalisasi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan *website* Kabupaten Tulang Bawang masih diperlukan. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan data belum sepenuhnya lengkap dan belum ter*update* secara berkala.
b) Penyampaian informasi mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat belum berjalan optimal, sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik masih terbatas.
c) Layanan publik berbasis online dan terintegrasi masih rendah, sehingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan pemerintahan belum maksimal.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diuraikan sebagai berikut:

a) Upaya optimalisasi kualitas koperasi, baik dari sisi kelembagaan maupun pelayanan, masih relatif rendah sehingga belum mampu meningkatkan daya saing koperasi secara signifikan.
b) Pengawasan terhadap kepatuhan koperasi dalam menjalankan ketentuan dan peraturan perundang-undangan belum optimal, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan tata kelola.
c) Pertumbuhan usaha mikro masih relatif rendah, sehingga diperlukan dukungan yang lebih kuat dalam pengembangan usaha mikro agar mampu meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
d) Jumlah pelaku usaha mikro yang menjalin pola kemitraan dengan dunia usaha dan industri masih terbatas, sehingga

peluang peningkatan kapasitas dan akses pasar belum maksimal.

12) Penanaman Modal

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Realisasi investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga memerlukan penguatan koordinasi dan fasilitasi.
b) Pertumbuhan investasi masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan minat dan memperkuat daya tarik investor dalam menanamkan modal di Kabupaten Tulang Bawang.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pembinaan dan pengembangan pemuda belum berjalan optimal, baik dalam peningkatan kapasitas, kreativitas, maupun partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah.
b) Fasilitas serta sarana dan prasarana olahraga masih terbatas, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun pemerataan pemanfaatannya di seluruh wilayah.
c) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan budaya hidup sehat, aktif, dan bugar.
d) Pembinaan atlet dan pengembangan prestasi olahraga masih menghadapi keterbatasan, sehingga capaian prestasi olahraga daerah belum maksimal.

14) Statistik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Statistik dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ketersediaan data dan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih rendah, sehingga belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
b) Penerapan kebijakan Satu Data Indonesia melalui aplikasi Satu Data Kabupaten Tulang Bawang belum optimal, baik dari aspek kelengkapan data, kualitas metadata, maupun koordinasi antar-perangkat daerah sebagai produsen data.

15) Persandian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Persandian dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sertifikasi keamanan informasi sesuai standar nasional belum terlaksana, sehingga sistem keamanan informasi pemerintah daerah belum sepenuhnya terjamin.
b) Pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada perangkat daerah belum optimal, sehingga proses administrasi pemerintahan belum sepenuhnya berbasis elektronik yang aman.
c) Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah masih rendah, ditandai dengan belum optimalnya sistem proteksi, monitoring, dan mitigasi terhadap ancaman siber.
d) Integrasi sistem persandian dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terwujud, sehingga keamanan data dan komunikasi belum menyeluruh.
e) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) persandian yang kompeten di bidang keamanan siber, baik dari sisi jumlah maupun keahlian teknis.
f) Keterbatasan infrastruktur teknologi persandian, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi

yang mendukung penyelenggaraan keamanan secara menyeluruh.

16) Kebudayaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kebudayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengelolaan cagar budaya belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, baik dari aspek pelindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan.
b) Upaya pelindungan dan pengembangan cagar budaya masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih optimal dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatannya.
c) Pendataan, dokumentasi, dan digitalisasi objek pemajuan kebudayaan belum optimal, sehingga banyak aset budaya yang belum tercatat dengan baik.
d) Sarana dan prasarana pelestarian serta pengembangan kebudayaan masih terbatas, seperti museum, galeri, sanggar, maupun ruang ekspresi budaya.
e) Keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal masih minim, sehingga berpotensi menurunkan keberlanjutan pewarisan nilai budaya.
f) Integrasi kebudayaan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum maksimal, padahal seharusnya dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

17) Perpustakaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Rasio pengunjung perpustakaan tahun 2025 hanya 2,49 orang per 1.000 penduduk, menunjukkan pemanfaatan layanan perpustakaan masih belum optimal.
b) Capaian Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat masih relatif rendah dibandingkan target nasional, sehingga menunjukkan budaya baca masyarakat belum optimal.

c) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan layanan perpustakaan digital. Akses terhadap bahan bacaan belum menjangkau masyarakat luas, khususnya generasi muda.
d) Keterbatasan koleksi bahan bacaan. Koleksi yang tersedia, baik cetak maupun digital, belum sepenuhnya relevan, menarik, dan mutakhir untuk mendukung kebutuhan belajar, penelitian, maupun rekreasi literasi masyarakat.
e) Kurangnya kegiatan literasi dan promosi perpustakaan. Kegiatan literasi belum dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga peran perpustakaan sebagai pusat literasi, edukasi, dan rekreasi belum optimal.
f) Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan. Fasilitas ruang baca, sarana ramah anak dan penyandang disabilitas, serta jaringan internet yang memadai masih belum tersedia secara optimal.

18) Kearsipan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Belum optimalnya alih media arsip ke bentuk digital, sehingga masih banyak arsip yang berisiko rusak maupun hilang.
b) Rendahnya penerapan standar baku pengelolaan arsip, baik pada tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, maupun penyusutan arsip.
c) Pelayanan kearsipan belum berjalan optimal, khususnya dalam mendukung perangkat daerah dan masyarakat, termasuk layanan temu balik arsip yang cepat, tepat, dan akurat.
d) Keterbatasan sumber daya manusia kearsipan yang kompeten, baik dari sisi jumlah maupun kualitas tenaga arsiparis.

e) Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai, seperti ketersediaan depo arsip, ruang penyimpanan arsip, serta sistem informasi kearsipan berbasis digital.
f) Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya tertib arsip, sehingga sering terjadi keterlambatan penyerahan arsip statis maupun arsip vital.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

a) Produktivitas beberapa komoditas perikanan budidaya, seperti gabus, toman, dan udang vaname, masih rendah akibat keterbatasan teknologi, akses permodalan, serta tingginya risiko serangan penyakit.
b) Skala usaha budidaya perikanan umumnya masih kecil dan belum terkelola secara kolektif, dengan keterbatasan manajemen, infrastruktur, serta pola usaha yang cenderung tersebar dan individual.
c) Ketersediaan air pada musim kemarau terbatas, sementara prioritas penggunaan irigasi lebih banyak diarahkan untuk sektor pertanian, sehingga berdampak pada keberlangsungan usaha budidaya ikan.
d) Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas benih ikan masih rendah, ditambah tingginya harga pakan pabrikan yang menekan margin keuntungan pembudidaya.
e) Pengelolaan pasca panen dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan masih minim, sehingga produk perikanan belum memiliki nilai tambah dan daya saing yang optimal.
f) Tingkat konsumsi ikan masyarakat tahun 2025 sebesar 30,07 kg/kapita masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.
g) Pengelolaan kawasan pesisir dan pertambakan secara berkelanjutan belum optimal, termasuk upaya revitalisasi

kawasan eks Dipasena yang masih menghadapi berbagai kendala.

2) Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pariwisata, diuraikan sebagai berikut:

a) Pengembangan pemasaran, destinasi, dan penataan kawasan pariwisata belum optimal, sehingga daya tarik dan tingkat kunjungan wisata masih rendah.
b) Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara (Wisnus) maupun Wisatawan Mancanegara (Wisman) hanya sekitar 1 (satu) hari, sehingga diperlukan strategi peningkatan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas agar wisatawan lebih lama tinggal.
c) Kelembagaan ekonomi kreatif belum terbentuk dan rencana induk pembangunan ekonomi kreatif belum tersusun, ditambah minimnya data, fasilitasi, serta sarana prasarana pendukung.
d) Infrastruktur pendukung pariwisata, seperti jalan, transportasi, akomodasi, sanitasi, dan akses telekomunikasi, masih terbatas sehingga menghambat kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan.
e) Keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat *(community-based tourism)* belum optimal, sehingga manfaat ekonomi pariwisata belum dirasakan secara luas.
f) Kualitas dan kompetensi SDM pariwisata masih rendah, khususnya dalam aspek pelayanan, *hospitality,* dan pemasaran digital pariwisata.

3) Pertanian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanian, diuraikan sebagai berikut:

a) Luas lahan pertanian terus mengalami penurunan setiap tahun akibat alih fungsi lahan sawah menjadi lahan terbangun atau non-pertanian, serta belum optimalnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
b) Produktivitas komoditas pangan utama cenderung stagnan dan belum menunjukkan peningkatan signifikan karena keterbatasan teknologi budidaya, irigasi, serta sarana produksi pertanian.
c) Pengembangan komoditas unggulan dan potensial bernilai ekonomi tinggi masih terbatas, sehingga belum mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan hilirisasi hasil pertanian.
d) Sektor pertanian masih rentan terhadap perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit tanaman, sementara sistem mitigasi dan adaptasi pertanian berkelanjutan belum memadai.
e) Regenerasi petani masih rendah, ditandai dengan semakin sedikitnya generasi muda yang berminat bekerja di sektor pertanian.

4) Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perdagangan, diuraikan sebagai berikut:

a) Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pasar yang representatif masih terbatas, baik pasar rakyat maupun pasar modern, termasuk aspek sanitasi, keamanan, dan kenyamanan.
b) Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari ekosistem perdagangan daerah belum optimal, sehingga masih menimbulkan kesemrawutan dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara maksimal.
c) Pendapatan retribusi pasar belum optimal akibat keterbatasan sistem digitalisasi retribusi, lemahnya

kepatuhan pembayaran, serta rendahnya kapasitas pengelolaan pasar.

d) Kinerja PDRB sektor perdagangan menunjukkan tren penurunan, di mana pertumbuhan tahun 2025 tercatat sebesar 5,00%, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 8,04%, sehingga diperlukan strategi pemulihan dan penguatan daya beli masyarakat.
e) Rantai distribusi perdagangan lokal belum terintegrasi dengan sektor produksi unggulan (pertanian, perikanan, dan peternakan), sehingga nilai tambah ekonomi daerah belum maksimal.
f) Pemanfaatan teknologi digital *(e-commerce, marketplace)* dalam mendukung pemasaran produk lokal, khususnya produk UMKM dan IKM, masih rendah.

5) Perindustrian

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Perindustrian, diuraikan sebagai berikut:

a) Daya saing dan kemandirian Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih rendah, ditandai dengan keterbatasan akses teknologi, inovasi produk, permodalan, serta jaringan pemasaran.
b) Kontribusi dan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan yang tercatat sebesar 5,42% pada tahun 2025 masih perlu ditingkatkan melalui penguatan hilirisasi dan diversifikasi produk.
c) Pengembangan kawasan industri dan sentra IKM yang berorientasi pada komoditas unggulan daerah belum optimal, sehingga belum mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi lokal.
d) Kualitas SDM pelaku industri masih rendah, terutama dalam penerapan standar mutu, sertifikasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital (*e-commerce* dan *digital marketing*).

e) Sinergi kemitraan antara IKM dengan industri besar, BUMN, BUMD, dan swasta masih terbatas, sehingga rantai pasok (supply chain) industri daerah belum berjalan optimal.
f) Penerapan prinsip industri hijau dan ramah lingkungan belum optimal, padahal hal tersebut menjadi tuntutan pasar global sekaligus bagian dari kebijakan pembangunan berkelanjutan.

6) Transmigrasi

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Transmigrasi, diuraikan sebagai berikut:

a) Pengelolaan dan pembinaan kawasan transmigrasi belum optimal, baik dari aspek infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, maupun aksesibilitas.
b) Kesempatan kerja dan usaha di kawasan transmigrasi masih terbatas, sehingga penduduk transmigrasi cenderung bergantung pada sektor primer dengan produktivitas rendah.
c) Pemanfaatan potensi sumber daya lokal di kawasan transmigrasi belum maksimal untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
d) Investasi dan keterlibatan swasta dalam pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru masih rendah.
e) Pembangunan kawasan transmigrasi belum terintegrasi dengan perencanaan wilayah kabupaten secara menyeluruh, termasuk sinkronisasi dengan RTRW dan RPJMD.
f) Kualitas SDM transmigran masih rendah, baik dari segi pendidikan, keterampilan, maupun akses terhadap pelatihan kerja.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah, diuraikan sebagai berikut:

a) Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpadu belum optimal, terutama dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program lintas perangkat daerah.
b) Tingkat kematangan organisasi, tata kelola pemerintahan, serta kapasitas manajerial aparatur masih rendah.
c) Pencapaian peringkat nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah belum optimal.
d) Kualitas pelayanan administrasi umum, fasilitasi kebijakan, serta dukungan teknis kepada kepala daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis masih terbatas.
e) Sistem monitoring dan evaluasi pembangunan serta pelaporan kinerja belum optimal, ditandai dengan keterbatasan akurasi, ketepatan waktu, dan pemanfaatan data berbasis evidensi.

2) Sekretariat DPRD

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sekretariat DPRD, diuraikan sebagai berikut:

a) Kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan belum optimal.
b) Dukungan fasilitasi administrasi, kehumasan, serta penyediaan data dan informasi bagi anggota DPRD masih terbatas.
c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi persidangan, risalah rapat, dan dokumentasi produk hukum DPRD belum maksimal.
d) Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan kepada pimpinan dan anggota DPRD belum optimal.

e) Sarana prasarana penunjang kinerja DPRD masih terbatas, baik untuk mendukung fungsi representasi, komunikasi publik, maupun pelayanan aspirasi masyarakat.

e. Unsur Penunjang Pemerintahan

1) Perencanaan

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan diuraikan sebagai berikut:

a) Dinamika regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang terus berkembang memerlukan penyesuaian cepat dalam sistem dan dokumen perencanaan daerah.
b) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) perencana masih rendah, baik dari aspek kompetensi teknis, kemampuan analitis, maupun penguasaan aplikasi perencanaan berbasis digital.
c) Ketersediaan, kualitas, dan integrasi data dukung perencanaan yang akurat, mutakhir, dan terpadu lintas sektor masih terbatas.
d) Kolaborasi dan sinkronisasi antara perangkat daerah, lembaga vertikal, swasta, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah belum optimal.
e) Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), big data, serta aplikasi pendukung lainnya dalam penyusunan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan belum maksimal.
f) Implementasi perencanaan pembangunan berbasis bukti *(evidence-based planning)* dan berbasis hasil *(result-based planning)* masih lemah, sehingga kualitas dokumen perencanaan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.
g) Integrasi perencanaan dan penganggaran belum optimal, termasuk keterkaitan antara dokumen RPJPD, RPJMD,

Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta pengendalian pembangunan.

2) Keuangan

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

a) Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD masih rendah, sehingga ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tetap tinggi.
b) Penyerapan anggaran belanja belum optimal, baik dari sisi kualitas maupun ketepatan waktu, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian program pembangunan.
c) Manajemen pengelolaan kas daerah belum optimal, khususnya dalam menjaga likuiditas dan efisiensi penggunaan anggaran.
d) Penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian keuangan daerah masih memiliki kelemahan yang berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan.
e) Kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah belum optimal, baik dari aspek kuantitas, kompetensi teknis, maupun pemahaman terhadap regulasi terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3) Kepegawaian

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Kepegawaian, diuraikan sebagai berikut:

a) Profesionalitas dan kompetensi ASN masih rendah, baik dari aspek teknis, manajerial, maupun sosial kultural.
b) Sistem manajemen talenta *(talent management)* dan pengembangan karier ASN belum optimal.
c) Distribusi ASN antar perangkat daerah maupun antar wilayah/kecamatan belum seimbang.

d) Regenerasi pegawai masih terbatas akibat moratorium dan rendahnya rekrutmen CPNS/PPPK pada beberapa tahun sebelumnya.
e) Penerapan sistem merit dan manajemen kinerja berbasis e-*government* dalam pengelolaan ASN belum optimal.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Pendidikan dan Pelatihan, diuraikan sebagai berikut:

a) Kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN daerah masih terbatas.
b) Pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital dalam penyelenggaraan diklat/pelatihan berbasis *e-learning* dan blended learning belum optimal.
c) Proporsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi jabatan masih rendah.
d) Kolaborasi dengan lembaga diklat nasional/provinsi maupun mitra strategis (universitas, lembaga sertifikasi profesi, BUMN/swasta) belum maksimal.
e) Kurikulum diklat belum optimal dalam merespons dinamika regulasi, transformasi digital, dan kebutuhan pembangunan daerah.
f) Tindak lanjut hasil diklat dalam bentuk implementasi nyata di unit kerja masih rendah, sehingga dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja organisasi belum signifikan.

5) Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan, diuraikan sebagai berikut:

a) Belum semua hasil riset dan inovasi daerah dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan.

b) Riset dan inovasi daerah belum optimal dalam mendorong peningkatan daya saing, antara lain karena masih rendahnya publikasi ilmiah serta terbatasnya jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan.
c) Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2025 baru mencapai 63,54, sehingga masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat

Permasalahan yang masih dihadapai dalam pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, diuraikan sebagai berikut:

a) Profesionalitas dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih perlu ditingkatkan.
b) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah belum optimal.
c) Capaian Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 baru mencapai 65,40, sehingga masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

g. Unsur Kewilayahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kecamatan adalah sebagai berikut:

a) Kualitas pelayanan publik di kecamatan belum optimal, antara lain akibat keterbatasan informasi yang dimiliki oleh aparatur pemberi layanan maupun masyarakat penerima layanan, serta masih diperlukan perubahan mindset aparatur dalam memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.
b) Koordinasi dengan instansi vertikal maupun pemerintah kampung/kelurahan belum optimal, terutama dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, ketertiban administrasi kependudukan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan), serta berbagai perizinan di tingkat kecamatan dan desa.

c) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan belum optimal, sehingga capaian kinerja belum sepenuhnya terukur, konsisten, dan berorientasi pada hasil *(outcome).*
d) Responsivitas aparatur kecamatan dalam memahami dan menyesuaikan diri terhadap dinamika regulasi yang cepat masih rendah.
e) Ketersediaan *standar operating procedure* (SOP) dan standar pelayanan kegiatan pada unit organisasi belum lengkap, sehingga penyempurnaan layanan publik belum maksimal.

h. Urusan Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, diuraikan sebagai berikut:

a) Tingkat partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula, masih rendah akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan politik yang berkelanjutan dan terarah.
b) Pembinaan dan penyuluhan mengenai bahaya narkoba bagi pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat rentan belum optimal.
c) Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas politik dan ketahanan nasional di daerah belum maksimal.
d) Masih terdapat potensi kerawanan konflik sosial, intoleransi, dan radikalisme yang memerlukan deteksi dini serta respon cepat dari pemerintah daerah.
e) Koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembinaan ideologi Pancasila masih lemah.
f) Fasilitasi penguatan kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mendukung proses demokratisasi dan pembangunan daerah.





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 menggambarkan kondisi perekonomian daerah pada tahun sebelumnya, perkiraan perkembangan pada tahun berjalan, serta prospek perekonomian daerah pada tahun rencana. Kerangka ini disusun sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi dan proyeksi perekonomian makro Kabupaten Tulang Bawang yang dipengaruhi oleh dinamika perekonomian regional, nasional, dan global. Analisis mencakup perkembangan indikator utama ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah, pendapatan per kapita, inflasi, serta indikator ekonomi lainnya yang relevan. Indikator pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan digunakan secara nasional sebagai ukuran kinerja pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan nilai tambah ekonomi yang akan berdampak optimal apabila diiringi dengan pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PDRB juga digunakan untuk menganalisis struktur perekonomian daerah berdasarkan lapangan usaha. Struktur PDRB menunjukkan peranan masing-masing sektor ekonomi serta mengidentifikasi sektor-sektor basis yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Analisis perkembangan kontribusi dan laju pertumbuhan sektor-sektor ekonomi menjadi dasar dalam penentuan kebijakan pengembangan sektor unggulan, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta penguatan daya saing ekonomi daerah, termasuk melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan infrastruktur pendukung perekonomian.

Sejalan dengan kerangka ekonomi daerah, kerangka keuangan daerah menggambarkan kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mendukung pembangunan daerah Tahun 2027. Kerangka keuangan daerah memuat analisis sumber-sumber pendapatan daerah, potensi pendapatan dari sektor unggulan, serta proyeksi kemampuan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dianalisis berdasarkan komponen Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai dasar penguatan kemandirian fiskal daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah melalui pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah ini menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 yang terintegrasi, realistis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2027 dengan mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Kebijakan ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RPJMD Provinsi Lampung, serta RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 guna menjamin keterpaduan dan konsistensi pembangunan ekonomi antarlevel pemerintahan.

Arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan ini menjadi dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan ekonomi agar pelaksanaannya berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

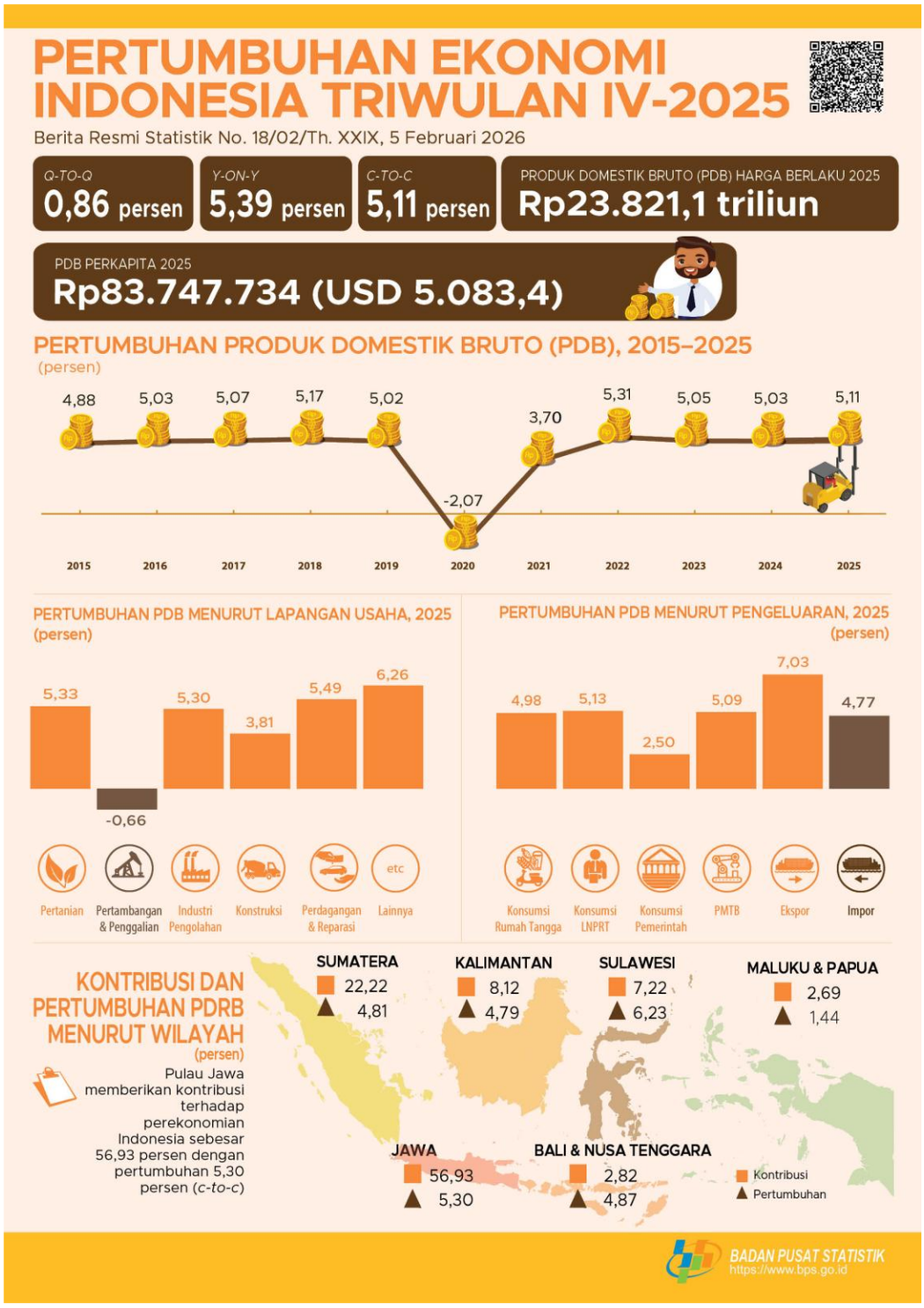
Dalam kerangka pembangunan daerah, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 difokuskan pada penguatan struktur dan kinerja perekonomian melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi, pengembangan potensi dan keunggulan lokal, penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, serta pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Selanjutnya, arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar pengembangan kebijakan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2027 secara terintegrasi dan lintas sektor dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian nasional Indonesia pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi. Perkembangan ini mencerminkan terjaganya aktivitas ekonomi nasional serta berlanjutnya proses pemulihan dan penguatan struktur ekonomi. Untuk memberikan gambaran mengenai arah dan sumber pertumbuhan ekonomi tersebut, berikut disajikan infografis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2025.

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja perekonomian Indonesia pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan penguatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,39 persen *(year-on-year),* lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan III 2025

yang sebesar 5,04 persen *(year-on-year)*. Dengan capaian tersebut, secara keseluruhan ekonomi Indonesia sepanjang Tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen *(year-on-year)*, meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 yang sebesar 5,03 persen. Capaian ini menegaskan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlanjut.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2026 berpotensi meningkat dalam kisaran 4,9-5,7 persen *(year-on-year)*. Prospek ini didukung oleh penguatan permintaan domestik serta berbagai bauran kebijakan yang ditempuh untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2025 terutama ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,11 persen *(year-on-year),* didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 6,12 persen *(year-on-year),* didorong oleh peningkatan investasi pada barang modal bangunan serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi Pemerintah juga tumbuh sebesar 4,55 persen *(year-on-year)* seiring dengan akselerasi realisasi belanja pemerintah, sementara konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 5,90 persen *(year-on-year)* yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan. Di sisi eksternal, ekspor tetap mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,25 persen *(year-on-year)*, sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang masih relatif kuat serta meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan kinerja positif pada Triwulan IV Tahun 2025, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi. Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi sebagai kontributor utama perekonomian nasional tetap tumbuh positif, seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan terjaganya permintaan eksternal.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif merata antarwilayah. Pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diikuti oleh Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, serta wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kondisi ini mencerminkan terus berlanjutnya proses pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk memberikan gambaran mengenai kinerja dan perkembangan indikator makroekonomi nasional hingga Tahun 2025, berikut disajikan gambar Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional yang dirangkum berdasarkan capaian historis berbagai indikator utama.

Gambar 3. 2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Komponen	2021	2022	2023	2024	2025			
					I	II	III	IV
Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)	3,70	5,31	5,05	5,03	4,87	5,12	5,04	
Konsumsi Rumah Tangga (Persen, yoy)	2,01	4,94	4,82	4,94	4,95	4,97	4,89	
Konsumsi Pemerintah (Persen, yoy)	4,25	-4,42	3,02	6,61	-1,37	-0,33	5,49	
PMTB (Persen, yoy)	3,80	3,87	3,76	4,61	2,12	6,99	5,04	
PMTB Bangunan (Persen, yoy)	2,32	0,91	4,04	5,51	1,35	4,89	3,02	
PMTB Nonbangunan (Persen, yoy)	8,42	12,53	3,03	2,23	4,32	12,93	10,34	
Ekspor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	17,99	16,23	1,34	6,51	6,44	10,95	9,91	
Impor Barang dan Jasa (Persen, yoy)	24,86	15,00	-1,60	7,95	4,00	11,48	1,18	
Inflasi IHK (Persen, yoy)	1,87	5,51	2,61	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92
Inflasi Inti (Persen, yoy)	1,56	3,36	1,80	2,26	2,48	2,37	2,19	2,38
Inflasi *Volatile Food* (Persen, yoy)	3,20	5,61	6,73	0,12	0,37	0,57	6,44	6,21
Inflasi *Administered Prices* (Persen, yoy)	1,79	13,34	1,72	0,56	-3,16	1,34	1,10	1,93
Neraca Pembayaran Indonesia								
Defisit Transaksi Berjalan (Persen PDB)	0,30	1,00	-0,15	-0,62	-0,05	-0,76	1,09	
Transaksi Modal dan Finansial (miliar Dolar AS)	12,57	-8,68	9,87	17,91	-0,39	-3,52	-8,07	
Overall Balance (miliar Dolar AS)	13,46	4,00	6,30	7,21	-0,79	-6,74	-6,38	
Cadangan Devisa (miliar Dolar AS)	144,91	137,23	146,38	155,72	157,09	152,57	148,74	156,47
Nilai Tukar (rata-rata; Rp per Dolar AS)	14.296	14.873	15.247	15.841	16.352	16.514	16.364	16.667
IHSG (rata-rata; Indeks)	6.222,27	6.964,56	6.853,65	7.299,58	6.767,74	6.853,86	7.621,56	8.385,36
***Yield* SUN 10 Tahun (rata-rata; Persen)**	6,34	7,02	6,62	6,84	7,00	6,90	6,54	6,20
Perbankan								
Kredit Total (Persen, yoy)	5,24	11,35	10,38	10,39	9,16	7,77	7,70	9,69
CAR (akhir periode, persen)	25,67	25,63	27,66	26,65	25,38	25,81	26,15	26,05*
NPL (akhir periode, persen)	3,00	2,44	2,19	2,08	2,17	2,22	2,24	2,05
APBN**								
Penerimaan Perpajakan (triliun Rupiah)	1.547,8	2.034,6	2.154,2	2.231,8				2.217,9
Keseimbangan Primer (triliun Rupiah)	-431,6	-74,1	102,6	-20,7				-180,7
Defisit APBN (Persen PDB)	-4,57	-2,35	-1,61	-2,30				-2,92

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Bank Indonesia (2026)
*Keterangan: *Posisi November 2025, **Keseluruhan tahun 2025, realisasi sementara*

Kinerja perekonomian Indonesia hingga Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif terjaga dengan dukungan fundamental makroekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada kisaran di atas 5 persen dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dihadapkan pada dinamika global dan penyesuaian kebijakan di berbagai sektor.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga secara konsisten mencatatkan pertumbuhan positif dan menjadi penopang utama aktivitas ekonomi nasional. Kinerja konsumsi yang stabil mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga, sejalan dengan inflasi yang terkendali dan dukungan kebijakan pemerintah. Investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, terutama didorong oleh peningkatan investasi bangunan serta mesin dan perlengkapan.

Pada sektor eksternal, kinerja ekspor barang dan jasa tetap tumbuh positif meskipun menghadapi perlambatan perdagangan global. Di sisi lain, impor juga meningkat seiring dengan kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi domestik. Dinamika ekspor dan impor tersebut tercermin pada perkembangan neraca pembayaran Indonesia, yang tetap berada pada kondisi yang dapat dikelola dengan dukungan cadangan devisa yang memadai.

Stabilitas harga tetap terjaga, tercermin dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada dalam kisaran sasaran. Inflasi inti menunjukkan pergerakan yang terkendali, sementara inflasi volatile food dan administered prices mengalami fluktuasi seiring dengan faktor musiman dan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi dan iklim usaha nasional.

Dari sisi moneter dan keuangan, nilai tukar rupiah bergerak stabil dengan volatilitas yang terkendali, sejalan dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan kondisi pasar keuangan global. Kinerja sektor perbankan juga tetap kuat, ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang positif, rasio kecukupan modal (CAR) yang terjaga tinggi, serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap rendah.

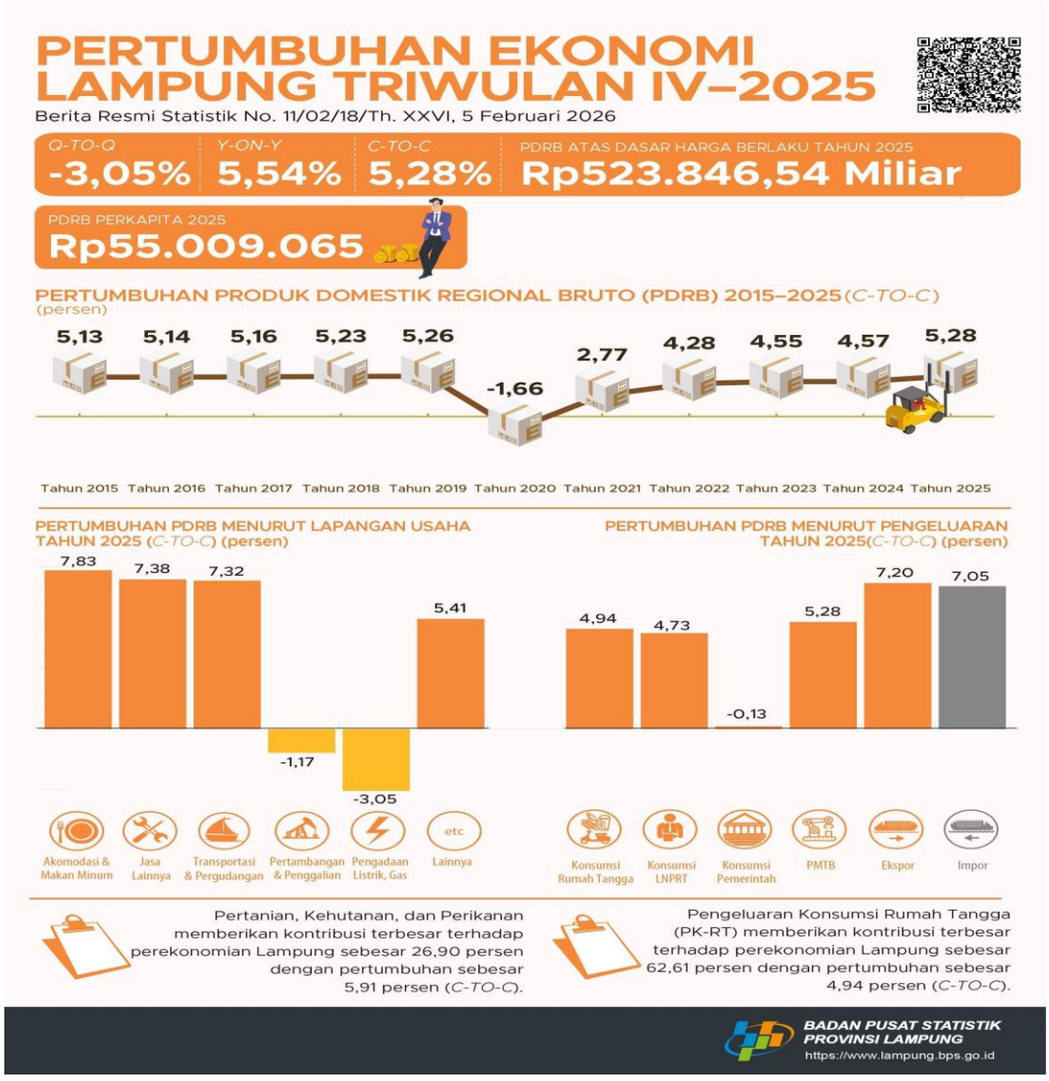
Sementara itu, dari sisi fiskal, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan pengelolaan yang tetap terjaga. Penerimaan perpajakan dan keseimbangan primer mencerminkan upaya konsolidasi fiskal yang berkelanjutan, meskipun defisit APBN masih berada dalam batas yang terkendali sesuai dengan kebijakan fiskal nasional.

Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja perekonomian nasional hingga Tahun 2025 yang relatif stabil dan resilien, dengan dukungan permintaan domestik, stabilitas harga, sektor keuangan yang sehat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi.

2) Kondisi Perekonomian Provinsi Lampung

Perekonomian Provinsi Lampung pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang khas seiring dengan karakter struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer. Di tengah pemulihan ekonomi nasional yang berlanjut, kinerja ekonomi Lampung tetap mencatatkan pertumbuhan tahunan yang solid, meskipun secara triwulanan mengalami penyesuaian musiman. Kondisi ini mencerminkan peran penting faktor musiman, khususnya pada sektor pertanian, terhadap fluktuasi ekonomi daerah. Gambaran umum capaian pertumbuhan, struktur ekonomi, serta sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan IV-2025 disajikan pada infografis berikut.

Gambar 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2026

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Lampung, perekonomian Lampung pada Tahun 2025 menunjukkan performa yang solid, tumbuh sebesar 5,28 persen *(c-to-c)* dibandingkan tahun sebelumnya, serta secara Triwulan IV-2025 tumbuh 5,54 persen secara tahunan *(y-on-y)* meskipun mengalami kontraksi -3,05 persen secara *q-to-q* yang bersifat musiman dan relatif lebih rendah dibandingkan kontraksi triwulan IV tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2025 tercatat sebesar Rp523,846,54 miliar, dengan PDRB per kapita mencapai sekitar Rp55,01 juta, mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat wilayah Lampung.

Struktur pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025 tetap didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB, disusul oleh sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan. Pertumbuhan lapangan usaha lainnya seperti Jasa Keuangan dan Asuransi juga meningkat signifikan, meskipun beberapa sektor seperti pengadaan listrik dan gas mengalami kontraksi.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Lampung tahun 2025 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, dengan porsi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Komponen konsumsi ini tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai wilayah selama tahun tersebut, yang turut memperkuat permintaan domestik.

Selain itu, ekspor juga menjadi motor utama pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung, dengan kontribusi pertumbuhan yang signifikan terhadap total pertumbuhan ekonomi daerah sepanjang 2025. Peningkatan ekspor mencerminkan peran penting perdagangan luar negeri terhadap ekonomi Lampung dan menunjukkan bahwa komoditas unggulan daerah dapat bersaing di pasar internasional.

Capaian tersebut menempatkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat di

wilayah Sumatera, serta menunjukkan peran penting permintaan domestik dan kinerja ekspor dalam mendorong perkembangan perekonomian regional secara berkelanjutan.

3) Kondisi Perekonomian Kabupaten Tulang Bawang

Perekonomian Kabupaten Tulang Bawang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup positif, baik dari sisi peningkatan nilai tambah ekonomi, struktur pembentukan PDRB, maupun kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari PDRB per kapita. Dinamika ini merupakan hasil dari proses pembangunan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, didukung oleh aktivitas konsumsi, investasi, serta peran sektor-sektor ekonomi utama.

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, kondisi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu perkembangan nilai PDRB, struktur PDRB menurut pengeluaran, dan laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, serta dilengkapi dengan analisis PDRB per kapita sebagai indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tabel 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang (Milyar Rupiah) Tahun 2025

Komponen Pengeluaran	**2025***				
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Triwulan IV**	**Tahunan**
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4.844,89	5.159,76	5.014,92	5.109,25	20.128,81
Konsumsi Akhir Pemerintah	263,11	305,04	312,51	450,97	1.331,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.637,78	2.800,74	2.865,62	3.025,88	11.330,02
Lainnya	-113,18	273,28	480,22	-191,55	448,76
Produk Domestik Regional Bruto	**7.632,59**	**8.538,81**	**8.673,26**	**8.394,55**	**33.239,21**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026

**)Angka Sangat Sementara*

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 menunjukkan

dinamika antartriwulan. Pada Triwulan I, PDRB tercatat sebesar Rp7.632,59 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp8.538,81 miliar pada Triwulan II dan kembali naik menjadi Rp8.673,26 miliar pada Triwulan III. Pada Triwulan IV, nilai PDRB sedikit menurun menjadi Rp8.394,55 miliar. Secara kumulatif, nilai PDRB tahun 2025 mencapai Rp33.239,21 miliar.

Dari sisi komponen pengeluaran, konsumsi akhir rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB dengan kontribusi tahunan sekitar 60,56 persen. Kontributor terbesar berikutnya adalah pembentukan modal tetap bruto sebesar 34,09 persen, diikuti oleh konsumsi akhir pemerintah sebesar 4,01 persen, sementara komponen lainnya memberikan kontribusi relatif kecil yaitu sekitar 1,35 persen. Struktur ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih didominasi oleh pengeluaran rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Tabel 3. 2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang (Persen) Tahun 2025

Komponen Pengeluaran	**2025***				
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Triwulan IV**	**Tahunan**
Konsumsi Akhir Rumah Tangga	63,48	60,43	57,82	60,86	60,56
Konsumsi Akhir Pemerintah	3,45	3,57	3,60	5,37	4,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,56	32,80	33,04	36,05	34,09
Lainnya	-1,48	3,20	5,54	-2,28	1,35
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026

**)Angka Sangat Sementara*

Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Tulang Bawang masih didominasi oleh konsumsi akhir rumah tangga. Pada Triwulan I 2025, komponen ini memberikan kontribusi sebesar 63,48 persen, kemudian menurun menjadi 60,43 persen pada Triwulan II dan 57,82 persen pada Triwulan III, sebelum kembali meningkat menjadi 60,86 persen pada Triwulan IV.

Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam struktur pengeluaran, khususnya meningkatnya peran komponen lain pada beberapa periode.

Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berada pada kisaran 32,80-36,05 persen, yang mencerminkan cukup kuatnya aktivitas investasi dan pembangunan fisik di daerah. Sementara itu, konsumsi akhir pemerintah relatif lebih kecil namun menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 3,45 persen pada Triwulan I menjadi 5,37 persen pada Triwulan IV. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah juga turut berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulang Bawang (Persen)

Lapangan Usaha	**2025***				
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Triwulan IV**	**Tahunan**
Sektor Primer	4,16	4,76	7,45	4,71	5,31
Sektor Sekunder	2,78	5,43	3,56	7,73	4,84
Sektor Tersier	6,28	4,85	4,39	5,11	5,15
Produk Domestik Regional Bruto	**4,36**	**5,01**	**5,14**	**5,85**	**5,10**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2026

**)Angka Sangat Sementara*

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi (y-on-y), perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Pada Triwulan I, ekonomi tumbuh sebesar 4,36 persen, kemudian meningkat menjadi 5,01 persen pada Triwulan II dan 5,14 persen pada Triwulan III. Pada Triwulan IV, pertumbuhan kembali meningkat menjadi 5,85 persen, sehingga secara tahunan tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen.

Secara sektoral, sektor primer tumbuh sebesar 4,16 persen pada Triwulan I, meningkat menjadi 4,76 persen pada Triwulan II, kemudian mencapai 7,45 persen pada Triwulan III, dan 4,71 persen pada Triwulan IV, dengan pertumbuhan tahunan 5,31 persen. Sektor sekunder menunjukkan variasi pertumbuhan dari 2,78 persen pada Triwulan I, meningkat menjadi 5,43 persen pada Triwulan II, 3,56

persen pada Triwulan III, dan mencapai 7,73 persen pada Triwulan IV, dengan pertumbuhan tahunan 4,84 persen. Sementara itu, sektor tersier tumbuh relatif stabil yaitu 6,28 persen pada Triwulan I, 4,85 persen pada Triwulan II, 4,39 persen pada Triwulan III, dan 5,11 persen pada Triwulan IV, dengan pertumbuhan tahunan 5,15 persen.

Secara umum, ketiga kelompok sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2025, yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang cukup terjaga.

Tabel 3. 4 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang (juta rupiah) Tahun 2021-2025

Tahun	PDRB Per kapita ADHB		PDRB Per kapita ADHK	
	Prov. Lampung	Kab. Tulang Bawang	Prov. Lampung	Kab. Tulang Bawang
2021	40,807	55,623	27,150	40,781
2022	44,982	59,077	27,974	42,471
2023	48,188	63,390	28,907	44,139
2024	51,387	67,726	29,891	45,882
2025*	55,009	72,989	31,127	47,745

Sumber: BPS RI, 2026 (diolah) & BPS Provinsi Lampung, 2026 (diolah)

**) Angka Sangat Sementara*

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan tren yang terus meningkat dan secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Lampung. Pada tahun 2021, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar Rp55,62 juta. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp59,08 juta pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi Rp63,39 juta pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 PDRB per kapita ADHB mencapai Rp67,73 juta dan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp72,99 juta. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas ekonomi daerah serta peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat.

Hal yang sama juga terlihat pada perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil. Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHK Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebesar Rp40,78 juta, kemudian meningkat menjadi Rp42,47 juta pada tahun 2022 dan Rp44,14 juta pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilainya kembali meningkat menjadi Rp45,88 juta dan pada tahun 2025 mencapai Rp47,75 juta. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil di Kabupaten Tulang Bawang berlangsung secara relatif stabil.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Lampung, PDRB per kapita Kabupaten Tulang Bawang secara konsisten berada pada tingkat yang lebih tinggi, baik berdasarkan ADHB maupun ADHK. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah serta tingkat produktivitas perekonomian Kabupaten Tulang Bawang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah, penguatan kelembagaan ekonomi, pengembangan diversifikasi produk, serta peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran. Selain itu, pengembangan perekonomian daerah juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah guna membuka peluang investasi yang lebih luas.

Peningkatan nilai PDRB dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang yang Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah, Investasi Inklusif, dan Industri Berbasis Potensi Lokal”** diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat pemerataan

pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran; 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal; dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut di atas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penganggarannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib megalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional yang sangat signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, Maka dalam rangka peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi. Dampak utama dari pemberlakuan

UU Nomor 1 Tahun 2022 di daerah khususnya sektor pajak adalah adanya tarif PBJT sektor hiburan yang menetapkan tarif minimal 40 persen yang sangat memberatkan wajib pajak dan pengusaha bahkan menjadi atensi nasional, maka sesuai arahan pusat dan pembahasan bersama Kabupaten Tulang Bawang sudah membuat Peraturan Bupati tentang Insentif Fiskal unutk Pajak Daerah, melakukan langkah-langkah melalui kemudahan pelayanan pajak daerah kepada publik secara digital, memudahkan pelaporan langsung oleh wajib pajak melalui android dan *web service,* pembayaran digital non tunai serta penerapan *tapping box* sesuai Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 38 Tahun 2022. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang sudah membahas mekanisme pengelolaan open PKB dan BBNKB secara bertahap. Terdapat kewajiban dari Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi terhadap pengelolaan opsen yang dituangkan dalam PKS karena Pemerintah Daerah mendapatkan benefit split payment langsung dari opsen pembayaran PKB dan BBNKB. Sehingga, langkah ini menjadi dasar kinerja antara Provinsi Lampung selaku pemungut pajak langsung PKB dan BBNKB. Dampak langsungnya Pemerintah Daerah mendapatkan benefit langsung dari setoran pembayaran PKB dan BBNKB.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara lain: Pendataan dan validasi kendaraan bermotor melalui integrasi data antara Kepolisian, Samsat, dan Dinas Pendapatan Daerah, Penerapan sanksi administratif dan denda progresif terhadap keterlambatan pembayaran PKB, Kampanye media sosial dan digital untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membayar PKB dan BBNKB tepat Waktu, dan Pemutihan denda pajak secara berkala untuk mendorong wajib pajak yang menunggak agar membayar.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang terus melakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
2. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
3. Melaksanakan *review* terhadap sistem dan peraturan perundangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.
4. Pemantapan kelembagaan, sistem dan Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
5. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, kabupaten/kota, serta mitra kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data *existing* dan asumsi serta agenda pembangunan, didapat realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024-2028 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024-2028

KODE REKENING			U R A I A N	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2026	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2027	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2028
1			2	3	4	5	6	7
4			**PENDAPATAN**	**1.256.371.738.133**	**1.241.933.908.069**	**1.238.101.634.613**	**1.249.607.726.219**	**1.361.244.050.166**
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**121.097.336.437**	**158.614.782.997**	**200.352.642.913**	**208.079.029.005**	**183.056.794.510**
4	1	1	PAJAK DAERAH	39.368.685.546	67.420.535.516	105.108.206.151	110.937.448.706	89.472.343.363
4	1	2	RETRIBUSI DAERAH	71.185.034.201	7.772.662.265	6.886.146.368	7.768.167.977	8.332.237.106
4	1	3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3.715.411.736	1.958.054.601	3.715.411.736	2.910.866.045	2.057.181.115
4	1	4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	6.828.204.955	81.463.530.614	84.642.878.658	86.462.546.277	83.195.032.927
4	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.135.274.401.696**	**1.083.319.125.072**	**1.037.748.991.700**	**1.041.528.697.214**	**1.178.187.255.656**
4	2	1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.044.480.834.473	1.034.847.544.739	928.016.550.000	945.633.011.850	1.097.466.131.762
4	2	2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	90.793.567.223	48.471.580.333	109.732.441.700	95.895.685.364	80.721.123.894
4	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	3	1	PENDAPATAN HIBAH	-	-	-	-	-
4	3	2	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tulang Bawang

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas pkok dan fungsi OPD.

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Jika akumulasi dari belanja daerah melebihi total pendapatan daerah maka yang terjadi adalah defisit anggaran. Kaidah mendasar yang menjadi perhatian dalam Kebijakan Belanja Daerah adalah bahwa Pengeluaran yang dilakukan harus memperhatikan prinsip efisiensi dengan mengedepankan pengeluaran yang prioritas dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2027 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun Anggaran 2027 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun Anggaran 2027 disusun dengan mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, prioritas pembangunan, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah sepatutnya proses penganggaran daerah dijalankan berdasarkan norma dan prinsip anggaran yang baik, yaitu:

1. Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, memperkuat stabilitas serta aktivitas perekonomian daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan;
2. Kebijakan belanja daerah wajib dilandasi oleh asas efisiensi, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga seluruh pengeluaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
3. Proyeksi belanja daerah tahun 2027 difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan prioritas, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur sebagai pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan, terdapat sejumlah kegiatan yang bersifat wajib dan menjadi prioritas di bidang pendidikan. Kegiatan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan sesuai standar untuk mendukung proses belajar mengajar yang optimal; peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan melalui pelatihan, pengembangan

profesional berkelanjutan, dan pemenuhan standar kualifikasi, serta pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa yang menyasar peserta didik dari keluarga tidak mampu guna menjamin keberlanjutan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Kegiatan yang bersifat wajib dan prioritas di bidang kesehatan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Fokus kegiatan meliputi peningkatan layanan Puskesmas dan rumah sakit daerah, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan baru dan pengadaan alat kesehatan yang memadai. Selain itu, penguatan program promotif dan preventif terus didorong melalui pelaksanaan imunisasi, pemberdayaan posyandu, serta kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kegiatan prioritas lainnya mencakup pengadaan dan distribusi obat-obatan, serta pelaksanaan program perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu. Untuk mendukung efektivitas pelayanan kesehatan dan distribusi logistik kesehatan, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan juga menjadi perhatian. Di samping itu, pengembangan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi layak dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mencegah penyakit berbasis lingkungan.

Pada dasarnya alokasi belanja tahunan daerah tercermin pada APBD yang merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat, mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas; Disiplin; Keadilan; dan Efisiensi dan Efektivitas. Realisasi dan Proyeksi belanja tahun 2024-2028 sebagai berikut

Tabel 3. 6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024-2028

KODE REKENING			U R A I A N	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2026	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2027	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2028
1			2	3	4	5	6	7
5			**BELANJA DAERAH**	**1.261.006.658.289**	**1.205.962.508.967**	**1.291.412.592.025**	**1.237.698.939.708**	**1.351.146.528.308**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**924.772.295.770**	**895.813.802.670**	**997.285.153.295**	**955.363.243.560**	**913.687.617.654**
5	1	1	BELANJA PEGAWAI	506.326.356.390	526.214.754.357	610.668.866.204	569.794.683.204	537.256.544.290
5	1	2	BELANJA BARANG DAN JASA	344.429.099.515	339.247.987.555	348.479.338.016	349.654.013.126	354.824.767.162
5	1	3	BELANJA BUNGA	-	-	3.284.990.972,00	2.562.397.127	1.921.023.842,00
5	1	4	BELANJA SUBSIDI	850.000.000	932.358.000	1.000.000.000	500.000.000	1.000.000.000
5	1	5	BELANJA HIBAH	71.121.239.865	28.307.102.758	31.051.358.103	30.551.358.103	16.970.782.360
5	1	6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.045.600.000	1.111.600.000	2.800.600.000	2.300.792.000	1.714.500.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**130.825.484.743**	**106.537.952.547**	**99.622.302.345**	**77.034.624.306**	**213.143.622.962**
5	2	2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	15.877.256.445	25.898.675.935	36.141.969.434	9.088.656.333	24.775.759.028
5	2	3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	35.855.029.181	18.445.884.402	17.045.848.357	17.706.358.713	51.880.990.301
5	2	4	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	73.658.276.707	57.054.964.830	38.747.908.794	42.553.033.500	130.343.755.950
5	2	5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	5.434.922.410	5.138.427.380	7.686.575.760	7.686.575.760	6.143.117.683
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**761.785.200**	**324.978.613**	**2.400.000.000**	**3.200.000.000**	**2.500.000.000**

KODE REKENING			U R A I A N	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2026	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2027	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2028
1			2	3	4	5	6	7
5	3	1	BELANJA TIDAK TERDUGA	761.785.200	324.978.613	2.400.000.000	3.200.000.000	2.500.000.000
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**204.647.092.576**	**203.285.775.137**	**192.105.136.385**	**202.101.071.842**	**221.815.287.691**
5	4	1	BELANJA BAGI HASIL	2.601.773.418	2.894.238.815	10.889.482.043	13.229.076.602	9.405.414.665
5	4	2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	202.045.319.158	200.391.536.322	181.215.654.342	188.871.995.240	212.409.873.027
Surplus / Defisit:				**(4.634.920.156)**	**35.971.399.101**	**(53.310.957.412)**	**11.908.786.511**	**10.097.521.858**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tulang Bawang

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. APBD apabila terjadi surplus, maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Pos penerimaan pembiayaan dibuat dan disusun perencanaannya dalam upaya untuk mengantisipasi adanya kelebihan rencana belanja dibandingkan rencana penerimaan daerah yang mungkin dapat diperoleh. Dengan kata lain jika APBD mengalami defisit anggaran atau surplus anggaran, maka penutupan defisit ataupun surplus tersebut dilakukan melalui pembiayaan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang dapat dilakukan di luar SILPA dan pinjaman daerah adalah bersumber dari penerbitan obligasi, transfer dari dana cadangan, serta hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pos-pos pengeluaran pembiayaan antara lain transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Optimalisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pembiayaan dilakukan berdasarkan perhitungan yang cermat berlandaskan efisiensi, efektifitas dan produktifitas anggaran, karena pos anggaran pembiayaan ini akan menyebabkan beban anggaran dimasa yang akan datang, disamping itu pemanfaatannya haruslah benar-benar menghasilkan manfaat bagi kinerja anggaran dan pembangunan daerah. Sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pada anggaran pembiayaan ditetapkan melalui peraturan daerah sesuai dengan mekanisme dan prosedur perundangan yang berlaku.

Hasil analisis terhadap penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2028, selanjutnya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024–2028

KODE REKENING			U R A I A N	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2024	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2025	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2026	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2027	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2028
1			2	3	4	5	6	7
6	**1**		**Penerimaan pembiayaan**					
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	20.332.672.470	15.697.752.313	27.369.527.928	6.351.923.442,0	2.112.374.673
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	43.000.000.000	-	-
Jumlah penerimaan pembiayaan				**20.332.672.470**	**15.697.752.313**	**70.369.527.928**	**6.351.923.442,0**	**2.112.374.673**
6	**2**		**Pengeluaran pembiayaan**					
6	2	2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6	2	3	Pembayaran pokok utang	-	-	15.529.393.516	16.760.709.953	10.709.896.531
			Jumlah pengeluaran pembiayaan	**-**	**1.000.000.000,0**	**17.029.393.516**	**18.260.709.953**	**12.209.896.531**
Jumlah Pembiayaan Netto				**20.332.672.470**	**14.697.752.313**	**53.340.134.412**	**(11.908.786.511)**	**(10.097.521.858)**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)				**15.697.752.313**	**50.669.151.414**	**29.177.000**	**0**	**0**

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tulang Bawang

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, capaian target pembangunan daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung guna menjaga keterpaduan arah pembangunan, efektivitas pelaksanaan program, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara terukur, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun secara selaras dengan arah pembangunan nasional, Provinsi Lampung, serta RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, sebelum merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dilakukan penelaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung sebagai dasar sinkronisasi pembangunan daerah.

4.1.1 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Arah pembangunan nasional tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan agar terwujud kesinambungan dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pembangunan nasional diarahkan melalui beberapa agenda transformasi pembangunan yang meliputi:

1. Transformasi Sosial

   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

   Hilirasi sumber daya alam, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

   Kelembagaan yang efektif dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan regulasi dan integritas.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Penguatan hukum, stabilitas keamanan, serta ketahanan nasional.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Penguatan ketahanan sosial budaya dan lingkungan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional tahunan. RKP Tahun 2027 mengusung tema: **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**,

yang diarahkan untuk memperkuat transformasi menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih fundamental, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui pendekatan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang merupakan konsolidasi program lintas sektor dan menjadi penggerak utama pencapaian sasaran pembangunan nasional. PKPN terdiri dari delapan klaster prioritas, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Untuk mendukung pencapaian PKPN tersebut, kebijakan pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan Trisula Pembangunan, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Penurunan kemiskinan

Ketiga pendekatan tersebut menjadi instrumen operasional dalam memastikan pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2027, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan nasional juga dilaksanakan melalui 8 Prioritas Nasional (PN 1-8) yang menjadi kerangka utama dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah, yaitu:

PN 1 : Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM

PN 2 : Kedaulatan pangan, energi, dan air serta kemandirian bangsa

PN 3 : Penguatan infrastruktur dan konektivitas serta penciptaan lapangan kerja

PN 4 : Penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan

PN 5 : Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam

PN 6 : Pembangunan dari desa dan penguatan ekonomi rakyat

PN 7 : Reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi

PN 8 : Penguatan ketahanan sosial, budaya, lingkungan, dan toleransi

Seluruh arah kebijakan tersebut dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mendukung transformasi pembangunan nasional dari pola pertumbuhan yang bersifat *artificial economic growth* menuju *fundamental economic growth*, melalui penguatan investasi, peningkatan produktivitas, serta efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan.

Seluruh arah kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran makro pembangunan Tahun 2027 yang menjadi indikator utama kinerja pembangunan nasional. Sasaran makro tersebut mencerminkan target kondisi makro ekonomi dan sosial yang ingin dicapai serta menjadi acuan dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan RKP Tahun 2027.

Tabel 4. 1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

No	Sasaran dan Indikator	Sasaran 2027
Sasaran Pembangunan Nasional		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,5
2	GNI Per Capita (US$)	5.800-5.840
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84
5	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 6,5
	b. Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0
6	Rasio Gini	0,362-0,367

No	Sasaran dan Indikator	Sasaran 2027
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30 - 4,87
8	Indeks Modal Manusia	0,575
Indikator Pembangunan		
9	Indeks Kesejahteraan Petani	0,8038
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40,81
Indikator Ekonomi Makro		
11	Inflasi (%,YoY): Akhir Periode	2,5 ± 1,0
12	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	16.800-17.500
13	Cadangan Devisa (Miliar US$)	158,50-162,07
14	Cadangan Devisa (dalam Bulan Impor)	5,4-5,6
15	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,20)-(0,38)[a]
16	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,5
17	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,70-4,80
18	Devisa Pariwisata (Miliar US$)	25,5-28,6
19	Pendapatan Negara (% PDB)	11,82-12,40
20	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,02-10,50
21	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,45-(0,14)[a]
22	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(1,80)-(2,40)[a]
23	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5-7,5
24	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.322,0-2.451,0
25	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	1.110,6-1.180,4

Sumber :Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2026 (diolah)
Keterangan :(a) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif

Sasaran dan indikator pembangunan nasional Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam tabel di atas disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Indikator tersebut merupakan hasil perumusan teknokratik yang bersumber dari proses penyusunan Rancangan RKP Tahun 2027 oleh Kementerian PPN/Bappenas, termasuk melalui mekanisme konsultasi publik. Oleh karena itu, indikator tersebut bersifat indikatif dan masih dimungkinkan untuk disempurnakan

sesuai dengan tahapan finalisasi perencanaan hingga penetapan RKP Tahun 2027 secara nasional.

Secara substantif, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2027 diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan; percepatan penurunan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem; pengurangan ketimpangan pendapatan; serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu menyelaraskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, prioritas, serta program pembangunan daerah dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan RKP Tahun 2027. Penyelarasan ini dilakukan agar target pembangunan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan dan permasalahan pembangunan di daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Nasional (PN), agenda transformasi pembangunan, serta target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penyelarasan program pembangunan daerah diarahkan pada dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur wilayah, serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Adapun keselarasan program pembangunan daerah dengan program prioritas nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Keselarasan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) dan Program Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
	01.01	PP	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	01.02	PP	Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	01.03	PP	Penguatan Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	01.04	PP	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	01.05	PP	Pengarusutamaan, Pemajuan dan Penegakkan HAM	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru				
	02.01	PP	Pembangunan Postur Pertahanan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	02.02	PP	Pembangunan dan Industri Pertahanan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
				Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	02.03	PP	Komponen Cadangan dan Pendukung	-	-
	02.04	PP	Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	02.05	PP	Keamanan Siber, Sandi dan Sinyal	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	02.06	PP	Keamanan Laut dan Hidro-Oseanologi	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
	02.07	PP	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
	02.08	PP	Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	-	-
	02.09	PP	Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	-	-
	02.10	PP	Swasembada Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
				Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan Penataan Ruang
	02.11	PP	Swasembada Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	02.12	PP	Swasembada Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan Penataan Ruang
	02.13	PP	Ekonomi Syariah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	02.14	PP	Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	02.15	PP	Ekosistem Ekonomi Sirkular	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
	02.16	PP	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies dan Genetik	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.17	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.18	PP	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	02.19	PP	Pembangunan Renda Karbon	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
	02.20	PP	Pekerjaan Hijau/ Green Jobs	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	02.21	PP	Pengelolaan Hutan Lestari	-	
				-	
	02.22	PP	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				
	03.01	PP	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimedia	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
	03.02	PP	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Digital dan Transisi Energi Listrik	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	03.03	PP	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	03.04	PP	Pendalaman Sektor Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	03.05	PP	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	03.06	PP	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas				
	04.01	PP	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	04.02	PP	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	04.03	PP	Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	04.04	PP	Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	04.05	PP	Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	04.06	PP	Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science,* Technology, Engineering, Art and Mathematic (STEAM)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
	04.07	PP	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	04.08	PP	Peningkatan Kontribusi IPTEK dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	04.09	PP	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	04.10	PP	Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	04.11	PP	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
	04.12	PP	Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Perkebunan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
	04.13	PP	Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					RSUD Menggala
	04.14	PP	Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	04.15	PP	Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	04.16	PP	Peningkatan Ketangguhan Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
	04.17	PP	Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	04.18	PP	Peningkatan Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
	04.19	PP	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dari Kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
				Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
	04.20	PP	Peningkatan Kesetaraan dan Kepenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Usia Lanjut	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	04.21	PP	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	04.22	PP	Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				
	05.01	PP	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi serta Berorientasi Ekspor	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Perkebunan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*
	05.02	PP	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
	05.03	PP	Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	05.04	PP	Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	05.05	PP	Peningkatan Perdagangan, Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	05.06	PP	Optimalisasi Investasi Strategis Negara	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan				
	06.01	PP	Sistem Pendapatan Sosial Ekonomi Terintegrasi	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	06.02	PP	Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	06.03	PP	Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	06.04	PP	Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	06.05	PP	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	-	-
	06.06	PP	Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Pengembangan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang
				Program Kawasan Permukiman	Dinas PU dan Penataan Ruang
	06.07	PP	Peningkatan Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
7	Memperkuat Reformasi Publik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan				
	07.01	PP	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	07.02	PP	Reformasi Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
	07.03	PP	Penguatan Kelembagaan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	07.04	PP	Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocate General*	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	07.05	PP	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
	07.06	PP	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	07.07	PP	Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	07.08	PP	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	-	
	07.09	PP	Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	-	
	07.10	PP	Pemerintah Digital	-	
	07.11	PP	Peningkatan Produktivitas BUMN	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.12	PP	Optimalisasi Pendapatan Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
	07.13	PP	Optimalisasi Belanja Negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.14	PP	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	07.15	PP	Pengendalian Inflasi	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	07.16	PP	Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur				
	08.01	PP	Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	08.02	PP	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

No	Prioritas Nasional (Asta Cita) / Program Prioritas Nasional			Program Pembangunan Daerah Pendukung Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional	Perangkat Daerah
(1)	*(2)*			*(3)*	*(4)*
	08.03	PP	Pembangunan Berketahanan Iklim	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
				Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan Penataan Ruang
	08.04	PP	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan keselarasan program pembangunan daerah terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) dan Program Prioritas Nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya memastikan keterpaduan pada tataran program, tetapi juga mengarahkan kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian outcome Prioritas Asta Cita.

Outcome Prioritas Asta Cita merupakan gambaran hasil pembangunan yang ingin dicapai secara nasional, sehingga diperlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah melalui program, kegiatan prioritas, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, serta sesuai dengan kewenangan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan pemetaan dukungan daerah terhadap outcome Prioritas Asta Cita dengan mengaitkan antara arah kebijakan nasional, bidang urusan pemerintahan, serta intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Melalui pemetaan ini, diharapkan keterkaitan antara program pembangunan daerah dengan hasil yang ingin dicapai dalam Prioritas Nasional menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada output

kegiatan, tetapi juga pada pencapaian outcome pembangunan secara nasional.

Adapun dukungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap Outcome Prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Dukungan Daerah terhadap Outcome Prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota Tahun 2027

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota
					2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota
					2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Transmigrasi
					3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran	Pelatihan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Transmigrasi
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
					2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya
4	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Akses Internet
					2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Daerah Kabupaten/Kota	pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
					2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)
					2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
					2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
6	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
					2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
					2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
					2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
9	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
					1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
					1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
10	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
					2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
					3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
					3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
					1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
					1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
					2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
					2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
13	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Kabupaten/Kota	Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
14	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
					1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
					1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
15	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
					3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
					3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Pertanian	Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
16	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
					1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
					2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
18	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
					1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
					1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bencana kabupaten/kota
					1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
					1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
					1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
19	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Dalam Kabupaten/Kota	
					3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
20	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
					2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
					2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENDIDIKAN	Bidang Pendidikan		Sekolah Dasar	untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
					1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
					1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
22	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
23	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Kepentingan	
					2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM
24	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal
					2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
					3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Kabupaten/Kota	(SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
25	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
					2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
26	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
					8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
					Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
					8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
27	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Rest orasi Sungai
					1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
					1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
					1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
					1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan
					1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
					1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
28	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang	PROGRAM PENINGKATAN	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja	Fasilitasi Pembangunan Kawasan

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	KERJA SAMA DESA	Sama antar Desa	Perdesaan
					2.13.03.3.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
					2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
29	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
					2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ASTA CITA	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
					2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
					2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat implementasi dan memastikan ketercapaian outcome tersebut secara lebih konkret, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan penguatan sinkronisasi perencanaan melalui pemetaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ke dalam urusan serta program dan sub kegiatan perangkat daerah.

Pemetaan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dapat didukung secara optimal oleh pemerintah daerah, baik melalui penguatan kapasitas, penyediaan layanan, maupun intervensi program yang relevan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memperjelas keterkaitan antara agenda pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga perencanaan yang disusun menjadi lebih terarah, terukur, dan implementatif.

Adapun dukungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terhadap Proyek Strategis Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Dukungan Daerah terhadap Proyek Strategis Nasional

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
1	PENGENTASAN KEMISKINAN	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
				Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		SEKOLAH RAKYAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
				Izin PPLH	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
		PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
				Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
2	KETAHANAN PANGAN	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
		PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
		MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
				Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
		PANGAN AKUATIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
				Tangkap	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Pengawasan Ekstraksi Garam	
		KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
3	KESEHATAN UNTUK SEMUA	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
		PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Pengembangan Rumah Sakit	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
		MAKAN BERGIZI GRATIS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan
				Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
4	PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
				Layanan di Bidang Pendidikan	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
		DIGITALISASI PEMBELAJARAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
5	PERTUMBUHAN EKONOMI	PENGENDALIAN INFLASI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	PRO SN	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
		KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
				Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH	-	-	-

Berdasarkan pemetaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, dapat dilihat bahwa program dan sub kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Tulang Bawang telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan agenda strategis nasional secara lebih konkret dan terintegrasi.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat keterpaduan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengarahkan dukungan pembangunan daerah melalui pendekatan tematik pembangunan nasional. Pendekatan ini dilakukan dengan mengelompokkan program dan kegiatan perangkat daerah ke dalam tema-tema prioritas pembangunan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam urusan pemerintahan, program, sub kegiatan, serta perangkat daerah penanggung jawab.

Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih fokus, sinergis, dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun daerah.

Tabel 4. 5 Dukungan Daerah terhadap Tematik Pembangunan Nasional

NO	TEMATIK PEMBANGUNAN	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
1	EKONOMI SYARIAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
		SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
2	MASYARAKAT ADAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

NO	TEMATIK PEMBANGUNAN	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
3	PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	-	-	-
4	PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	PENGARUSTAMAAN GENDER	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	TEMATIK PEMBANGUNAN	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
			Perluasan Kesempatan Kerja	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	
6	PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NO	TEMATIK PEMBANGUNAN	URUSAN	PROGRAM-SUB KEGIATAN	PD PENANGGUNG-JAWAB
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	
		PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	

Berdasarkan dukungan pembangunan daerah terhadap tematik pembangunan nasional tersebut, terlihat bahwa program dan kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Tulang Bawang telah disusun secara terarah dan selaras dengan fokus pembangunan nasional.

Selanjutnya, untuk memastikan keterkaitan tersebut dapat diimplementasikan secara lebih konkret dan terukur, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengintegrasikan dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Integrasi tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat sinkronisasi antara agenda pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, tetapi juga mendukung sasaran pembangunan nasional secara lebih substantif dan terukur.

Dukungan program perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) Transformasi Pembangunan Nasional, meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan dan infrastruktur, serta kesinambungan pembangunan.

Melalui pengintegrasian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) ke dalam dokumen perencanaan daerah, diharapkan tercipta keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun dukungan program pembangunan daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Dukungan Program pada Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Nomenklatur Program	PD Penanggung Jawab
PN 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
PN 2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Lumbung Pangan Lainnya	Program Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
	Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Program Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
	Peningkatan Penyediaan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Sekretariat Daerah
	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Sekretariat Daerah
	Penguatan Implemantasi Transisi Energi Berkeadilan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Sekretariat Daerah
	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Nomenklatur Program	PD Penanggung Jawab
	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati serta Akses dan Pembagian Keuantungan Sumber Daya Genetik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Perubahan Prilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
PN 3	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Sekretariat Daerah
	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengembagan Koperasi Sektor Produksi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
PN 4	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Nomenklatur Program	PD Penanggung Jawab
	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggulan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. Pelatihan, in-service training), perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Pemberian Makanan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makanan Bergizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Eliminasi Penyakit Kusta dan & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Nomenklatur Program	PD Penanggung Jawab
	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembagan Kesenian Tradisional	
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
PN 5	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
PN 6	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Pada RPJMN	Nomenklatur Program	PD Penanggung Jawab
	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan
PN 7	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
PN 8	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Ketahana Iklim Pesisir dan Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

Selain dukungan terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga mengintegrasikan program perangkat daerah yang mendukung tematik pembangunan nasional sebagai bagian dari penguatan sinkronisasi antara arah pembangunan pusat dan daerah. Pendekatan tematik ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa isu-isu strategis nasional dapat direspons secara terintegrasi melalui perencanaan pembangunan daerah.

Tematik pembangunan dimaksud meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penguatan daya saing UMKM dan industri kreatif, transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, serta penguatan ketahanan iklim dan lingkungan sebagaimana diarahkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Pengintegrasian program perangkat daerah terhadap tematik pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi unggulan daerah, kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, terarah, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung.

Dukungan terhadap tematik pembangunan nasional tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Adapun Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029 di Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Program Pendukung Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Pemberdayaan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Menggala
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Pengembangan Perumahan	
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	
2	Penurunan Stunting	**Intervensi Spesifik**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Menggala
		Intervensi Sensitif	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
		Program Penyelenggaraan Jalan	
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	Pengendalian Inflasi	**Ketersediaan Pasokan (K1)**	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Perkebunan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Keterjangkauan Harga (K2)	
		Program Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
		Kelancaran Distribusi (K3)	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Komunikasi Efektif (K4)	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	**Pendidikan**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Kesehatan	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Pekerjaan Umum	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Perumahan Rakyat	
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Trantibumlinmas	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Pol PP

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	
5	Penguatan Daya Saing UMKM dan Industri Kreatif	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	Transformasi Digital	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Penguatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
8	Penguatan Ketahanan Energi	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Penguatan Ketahanan Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik Pembangunan	Program Perangkat Daerah	PD Penanggungjawab
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Penguatan Ketahanan Iklim dan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.1.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 memiliki visi **"Lampung Sejahtera, Maju, Merata, dan Berkelanjutan**" yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung difokuskan pada transformasi ekonomi, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pemerataan pembangunan kewilayahan,

penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai tujuan visi RPJPD Provinsi Lampung tersebut, maka disusun 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Transformasi sosial.
2. Transformasi ekonomi.
3. Transformasi tata kelola.
4. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi.
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
7. Sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Kesinambungan pembangunan.

Setelah arah pembangunan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, maka untuk memastikan ketercapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan.

Adapun visi pembangunan yang diusung oleh Provinsi Lampung, yaitu: **"Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas"** yang ditransmisikan melalui 3 (tiga) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif;
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pelaksanaan Tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yaitu:

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes/Koperasi
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal

Setelah visi, misi, serta program prioritas pembangunan dirumuskan dalam RPJMD, maka selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dan operasional dalam RKPD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan di daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 memiliki tema pembangunan yaitu **Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri berbasis Potensi Daerah".** Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan Trisula Pembangunan yang menekankan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan penurunan kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan produktivitas daerah, memperkuat daya saing ekonomi, serta memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kapasitas ekonomi pemerintah dan nonpemerintah, serta optimalisasi belanja pada sektor-sektor prioritas pembangunan. Upaya ini didukung melalui peningkatan investasi yang terarah, penguatan daya saing daerah melalui inovasi, serta perbaikan tata kelola perizinan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga didorong melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan Lampung seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah. Pengembangan kawasan industri dan agroindustri berbasis potensi daerah juga menjadi strategi penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Di samping itu, penguatan konektivitas infrastruktur dan sistem logistik, digitalisasi layanan publik termasuk sistem perpajakan daerah, serta pengembangan ekonomi hijau berbasis sumber daya lokal menjadi bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar yang memadai. Selain itu, peningkatan kualitas SDM juga didorong melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta dukungan terhadap program wajib belajar.

Di bidang kesehatan, peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, peningkatan gizi masyarakat, serta peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini juga didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta fasilitasi sertifikasi profesi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.

3. Penurunan Kemiskinan

Penurunan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja serta perluasan akses terhadap kesempatan kerja yang

lebih luas dan berkualitas. Upaya ini diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi produktif, khususnya pada sektor-sektor ekonomi desa dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui pengolahan hasil produksi serta stabilitas harga di pasar menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha. Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan program perlindungan sosial yang adaptif, serta pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi desa juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mengoperasionalkan pendekatan Trisula Pembangunan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunan Provinsi Lampung dilaksanakan melalui beberapa pendekatan utama.

1. **Penguatan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

   Arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada penguatan program prioritas pembangunan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas tersebut difokuskan pada penguatan sektor-sektor strategis daerah yang memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan produktivitas, investasi, dan pengembangan industri berbasis potensi daerah.

2. **Fokus Pembangunan pada Program Prioritas Berdampak Tinggi**

   Fokus pembangunan daerah memuat indikator kinerja utama (IKU), direktif Gubernur, serta penanganan berbagai isu strategis pembangunan daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada program-program yang memiliki dampak tinggi (high impact) terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan investasi daerah, serta percepatan pengembangan industri berbasis potensi daerah.

Pelaksanaan fokus pembangunan tersebut juga didukung oleh penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.

3. Intervensi Pembangunan Berbasis Wilayah

Strategi pembangunan daerah juga dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan karakteristik, potensi, serta keunggulan masing-masing wilayah di Provinsi Lampung. Intervensi pembangunan wilayah diarahkan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pengembangan kawasan strategis seperti kawasan industri, kawasan pertanian unggulan, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata.

Pendekatan kewilayahan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pendekatan Trisula Pembangunan serta arah kebijakan dan strategi pembangunan Provinsi Lampung tersebut menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan pada penguatan produktivitas, peningkatan investasi, serta pengembangan industri berbasis potensi daerah. Melalui sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan percepatan penurunan kemiskinan, pembangunan daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2027. Penetapan target indikator makro pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun

sebelumnya, dinamika perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan, serta sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan kondisi serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Dalam penyusunan arah pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan terwujudnya keterpaduan dan sinergi pembangunan antarwilayah. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui integrasi program perangkat daerah yang selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung.

Integrasi program ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program percepatan pembangunan di tingkat daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Lampung. Adapun program prioritas Kabupaten Tulang Bawang yang mendukung ketercapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 8 Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang yang Mendukung Ketercapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes/Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
2	Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Perkebunan
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
		Program Stabilitasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3	Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Visi dan Misi Gubernur akan dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Program Unggulan yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Program Unggulan tersebut adalah:

1. Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG);
2. Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi;
3. Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional;
4. Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan;
5. Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal;
6. Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan;
7. Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan di Desa

Berbagai program unggulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut selanjutnya didukung oleh program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui perangkat daerah terkait. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung sehingga tercipta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Dalam rangka memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendukung pengembangan Desa Wisata Berbudaya Lampung sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya daerah, pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat, serta peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Pengembangan Desa Wisata Berbudaya Lampung mencakup Desa Wisata Budaya Lingai, Kibang, Lebuh Dalem, dan Kelurahan Menggala Tengah sebagai lokasi sasaran berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/320/V.20/HK/2026.

Dukungan terhadap pengembangan desa wisata dilaksanakan melalui program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis), promosi wisata daerah, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Pengembangan desa wisata juga didukung melalui kolaborasi dengan

Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kampung/kelurahan, komunitas budaya, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan potensi wisata budaya, meningkatkan daya tarik wisata, memperkuat identitas budaya daerah, membuka peluang usaha masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Selain pengembangan desa wisata, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendukung pelaksanaan Program Desaku Maju sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kemandirian desa, serta memperkuat peran desa sebagai penggerak pembangunan wilayah. Pelaksanaan Program Desaku Maju diarahkan pada 2 (dua) desa percontohan di Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Desa Hargo Rejo Kecamatan Rawajitu Selatan dan Desa Sumber Makmur Kecamatan Banjar Margo.

Dukungan terhadap Program Desaku Maju dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengembangan potensi ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar desa, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola desa. Kolaborasi lintas sektor dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan dukungan terhadap pengembangan Desa Wisata Berbudaya Lampung dan Program Desaku Maju dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sinergi program serta sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, program prioritas Kabupaten Tulang Bawang dalam mendukung pencapaian Program Unggulan Provinsi Lampung dilaksanakan melalui perangkat daerah sesuai tugas dan

kewenangannya. Rincian program prioritas dan perangkat daerah penanggung jawab disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 9 Program Prioritas Kabupaten Tulang Bawang yang Mendukung Ketercapaian Program Unggulan Daerah Provinsi Lampung

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Dukungan Terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	Peningkatan Produksi bahan pangan dan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Kampanye gizi produk peternakan dan Fasilitasi UMKM Pendukung Makan Bergizi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, produksi budidaya	Dinas Perikanan
		Pembinaan dan pengawasan Bumdes, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa, Memberikan pelatihan dan Pendidikan untuk pelaku usaha lokal/ UMKM dalam meningkatkan produksi yang berkualitas sesuai standar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Menentukan target penerima manfaat (misalnya, siswa dari keluarga kurang mampu), Memastikan makanan bergizi gratis didistribusikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Kab/kota untuk memperlancar distribusi makan bergizi gratis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Memastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang diberikan, memastikan gizi makanan yang diberikan sesuai standar, pelayanan kesehtan gizi masyarakat, pelayanan kesehtan ibu dan anak	Dinas Kesehatan
2	Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa Dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes dan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Pehubungan
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikas dan Informatika
6	Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kopetensi pendidik dan tenaga pendidik, penanganan ATS, penguatan Literasi dan numerasi, Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Unggulan Provinsi Lampung	Program Pendukung	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7	Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan Kemantapan Jalan di Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berbagai program prioritas Kabupaten Tulang Bawang tersebut diharapkan dapat mendukung ketercapaian program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung sekaligus memperkuat sinergi dan keterpaduan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Melalui pelaksanaan program-program tersebut, diharapkan arah pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sasaran makro pembangunan daerah sebagai gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang ingin dicapai pada tahun perencanaan. Penetapan sasaran tersebut juga mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain dinamika dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Penetapan target indikator makro pembangunan dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan kondisi sekaligus memastikan adanya sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara terpadu. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, target indikator makro pembangunan yang

menjadi arah pembangunan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 ditetapkan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 10 Sasaran Indikator Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027

No	Indikator Makro	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,3 – 6,1
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,66	8,20 – 9,00
3	Rasio Gini	0,292	0,273-0,287
4	Indeks Modal Manusia	0,52*	0,56 – 0,57
5	Tingkat Pengangguran (%)	4,21	3,56 - 4,14
6	PDRB Per Kapita (Juta Rp/Kapita)	55,01	59,0 - 65,3

Sumber: Rankhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027
*Keterangan: *) Capaian Tahun 2023*

Sasaran indikator makro RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10 mengacu pada Rancangan Akhir (Rankhir) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027. Sasaran tersebut menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi dan sosial yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2027 serta menjadi acuan dalam penyelarasan arah pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Secara umum, Secara umum, sasaran pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan PDRB per kapita sebagai cerminan meningkatnya nilai tambah ekonomi dan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, perbaikan distribusi pendapatan yang ditunjukkan melalui penurunan rasio gini, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM). Pencapaian sasaran tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung perlu menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan sasaran indikator makro pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, sehingga target dan prioritas pembangunan daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2027, Kabupaten Tulang Bawang menyelaraskan arah pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik wilayah, potensi unggulan daerah, serta permasalahan pembangunan yang dihadapi guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Lampung dan target pembangunan nasional secara terpadu.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang

Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahap awal pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045.

RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 disusun untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu: **“Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Sosial yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah serta Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Berkualitas dan Akuntabel;
4. Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Stabilitas Keamanan dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, maka tujuan dan sasaran umum pembangunan Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan :
   Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
   Sasaran :
   a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
   b. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
   c. Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah
   d. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga

2) Tujuan :
   Meningkatkan Derajat Sosial Masyarakat.
   Sasaran :
   a. Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan

3) Tujuan :
   Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur.
   Sasaran :
   a. Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
   b. Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Konektivitas Layanan Transportasi

4) Tujuan :

Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Daerah Sasaran:

a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif
b. Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan
c. Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan
d. Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah

5) Tujuan :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik *(Good Governance)*

Sasaran :

a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital

6) Tujuan :

Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah Serta Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran :

a. Meningkatnya Pelestarian Budaya, Kemanan dan Ketertiban Masyarakat

7) Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran :

a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah Dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, yang merupakan Tahap III pembangunan daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur serta penataan ruang berkelanjutan. Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD sehingga diperlukan keterkaitan yang jelas antara dokumen perencanaan tahunan dan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, untuk menunjukkan konsistensi hubungan antar komponen perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun matriks keterhubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 11 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045					
Misi		**Tujuan**		**Sasaran**	
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Sosial yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing	1.1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
				1.1.3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah
				1.1.4	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga
		1.2	Meningkatkan Derajat Sosial Masyarakat	1.2.1	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan
2	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah serta	2.1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	2.1.1	Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur

Visi : Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045					
Misi		**Tujuan**		**Sasaran**	
	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal			2.1.2	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Konektivitas Layanan Transportasi
		2.2	Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Daerah	2.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif
				2.2.2	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan
				2.2.3	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan
				2.2.4	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Berkualitas dan Akuntabel	3.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)	3.1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital
4	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Stabilitas Keamanan dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	4.1	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah Serta Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	4.1.1	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Kemanan dan Ketertiban Masyarakat
		4.2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	4.2.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah Dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk mencapai tujuan dan sasaran selama periode pembangunan maka dibutuhkan arah dan kebijakan sebagai pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada setiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Tabel 4. 12 Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Sosial yang Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing	Memperluas cakupan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas	Mendorong pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan di wilayah terpencil dan padat penduduk
			Peningkatan sistem rujukan dan integrasi layanan kesehatan primer dan lanjutan Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan Kesehatan
			Peningkatan fungsi Rumah Sakit tipe C dan B
		Meningkatkan fasilitas, sarana, dan tenaga kesehatan	Penyediaan alat kesehatan yang memadai dan sesuai standar pelayanan minimal Peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan melalui insentif dan pelatihan Penguatan kapasitas Puskesmas dan rumah sakit sebagai pusat layanan strategis
		Menguatkan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat	Peningkatan kampanye hidup bersih dan sehat (PHBS), imunisasi, dan skrining dini penyakit
			Pengembangan program kesehatan berbasis masyarakat, seperti Posyandu dan kader Kesehatan
			Integrasi pendekatan multisektor dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			Pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat
		Meningkatkan akses layanan ibu dan anak serta gizi	Mendukung pelaksanaan program makanan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting
			Peningkatan cakupan layanan ANC, INC, PNC, dan imunisasi dasar lengkap Penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif untuk pencegahan stunting dan wasting
			Penyediaan dukungan psikososial dan gizi pada keluarga berisiko tinggi
		Meningkatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas	Pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di daerah tertinggal Perluasan akses dan pemerataan pendidikan melalui percepatan program wajib belajar 13 tahun, mencakup 1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah Fasilitasi pembentukan Sekolah Rakyat sebagai upaya perluasan akses pendidikan yang inklusif dan berbasis masyarakat
		Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan relevansi kurikulum	Peningkatan pelatihan berkelanjutan berbasis teknologi dan pembelajaran diferensiatif
		Menyediakan sarana pendidikan yang layak dan modern	Penguatan manajemen kinerja guru dan kepala sekolah Peyesuaian kurikulum lokal sesuai kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah Penyediaan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang memadai

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Mendorong peningkatan budaya baca dan literasi digital	Peningkatan akses dan mutu pendidikan vokasi serta sekolah kejuruan Digitalisasi sarana pembelajaran untuk mendukung transformasi Pendidikan Penguatan peran perpustakaan kampung/sekolah melalui penyediaan bahan bacaan yang layak dan bermanfaat
			Pelatihan dan pendampingan literasi digital untuk mendukung transformasi digital di lingkungan pendidikan dan masyarakat
		Meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengembangan program ketahanan sosial dan ekonomi keluarga	Bekerja sama dengan media lokal untuk meningkatkan budaya membaca di masyarakat Penguatan program Bina Keluarga (Balita, Remaja, Lansia) dan Pusat Informasi Keluarga
			Peningkatan akses keluarga terhadap layanan sosial, pendidikan, dan Kesehatan
			Pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis usaha mikro dan keterampilan rumah tangga
		Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelayanan publik	Pelaksanaan analisis gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah
			Peningkatan kapasitas ASN dalam pengarusutamaan gender Penguatan peran perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan
		Menyediakan layanan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang menyeluruh	Penguatan kelembagaan layanan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
			Program intervensi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak
			Mendorong implementasi Kabupaten Layak Anak sebagai komitmen perlindungan hak anak secara berkelanjutan

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Menumbuhkan semangat kewirausahaan dan keterampilan pemuda	Pelatihan kewirausahaan, startup, dan digital marketing bagi pemuda
			Mendorong lahirnya wirausaha muda melalui pembinaan usaha rintisan dan pengembangan ekonomi kreatif
			Kemitraan dengan swasta dan dunia industri untuk akses pasar dan modal usaha
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Peningkatan forum kepemudaan, karang taruna, dan organisasi kemasyarakatan pemuda
			Fasilitasi peran pemuda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang sosial, lingkungan, dan ekonomi lokal
		Meningkatkan sarana dan program pembinaan olahraga berprestasi	Menumbuhkan semangat berprestasi pemuda melalui bantuan pendidikan dan penghargaan Pembangunan dan perawatan sarana olahraga di tingkat kecamatan dan sekolah
			Pembinaan atlet usia dini melalui kompetisi dan pelatihan berjenjang
			Optimalisasi fungsi KONI sebagai lembaga pembina talenta olahraga daerah
		Mengintegrasikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Penguatan sistem pendataan terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan pemutakhiran rutin Integrasi bantuan sosial dengan pelatihan keterampilan dan akses ke pasar kerja
			Pendampingan usaha ekonomi produktif berbasis kelompok rentan dan miskin
		Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi kelompok	Penyediaan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan sosial yang responsif terhadap kebutuhan difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		rentan	Peningkatan kualitas SDM layanan serta penyediaan infrastruktur yang ramah difabel dan lansia Advokasi dan pelibatan kelompok rentan dalam perencanaan program
		Mendorong penciptaan lapangan kerja produktif melalui pelatihan kerja dan akses permodalan	Peningkatan kualitas dan akses pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
			Mendorong pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan keterampilan kerja di daerah Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri (DUDI) dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
2	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah serta Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Masyarakat dan Potensi Lokal	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik
			Pemeliharaan rutin dan berkala infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan layanan public Penguatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar
		Mengembangkan kawasan prioritas yang mendukung pertumbuhan wilayah	Penetapan dan pengembangan kawasan strategis yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi lokal
			Pengembangan infrastruktur dan layanan dasar di kawasan prioritas
			Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rawa Pitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian dan perikanan Penyediaan lahan produktif dan utilitas pendukung

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri dan ekonomi khusus
			Sinkronisasi pembangunan kawasan dengan rencana investasi dan program tematik nasional/daerah
		Mendorong sinergi antarsektor dalam penyediaan infrastruktur	Penguatan koordinasi lintas OPD dan antarpemerintah dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur Integrasi program sektoral agar saling mendukung dalam pengembangan infrastruktur wilayah
			Peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur
		Penguatan kualitas penataan ruang dan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan dan sesuai rencana tata ruang wilayah	Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana tata ruang yang sesuai dengan dinamika pembangunan daerah Pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan berdasarkan RTRW Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pertanahan
			Fasilitasi legalisasi dan sertifikasi tanah masyarakat untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah
		Meningkatkan efisiensi dan keterpaduan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran dalam rangka memperlancar konektivitas wilayah	Penguatan infrastruktur keselamatan lalu lintas melalui penambahan dan perbaikan fasilitas pendukung seperti rambu, marka, dan penerangan jalan Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung transportasi jalan dan pelayaran secara terpadu
			Pengembangan dan rehabilitasi dermaga untuk meningkatkan layanan transportasi perairan antarwilayah
		Mendorong industrialisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan	Pengembangan kawasan industri budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis potensi lokal

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur hilirisasi di sentra produksi sektor unggulan
		Memperluas akses pasar dan teknologi bagi pelaku sektor unggulan	Fasilitasi digitalisasi pemasaran dan jejaring distribusi hasil produk unggulan daerah Dukungan akses terhadap teknologi tepat guna untuk peningkatan nilai tambah produk lokal
		Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi melalui pendampingan dan pelatihan	Penyelenggaraan pelatihan teknis dan manajerial bagi petani, peternak, dan nelayan
			Pendampingan usaha secara berkelanjutan bagi pelaku sektor unggulan melalui penyuluh atau tenaga pendamping
		Meningkatkan daya tarik investasi melalui kemudahan perizinan dan insentif	Percepatan proses perizinan dan penyediaan fasilitas insentif untuk mendorong kemudahan berinvestasi
		Meningkatkan promosi potensi investasi daerah	Penguatan layanan terpadu satu pintu yang responsif dan transparan Promosi investasi melalui forum bisnis, pameran, dan media digital
			Penyusunan profil investasi daerah yang terintegrasi dengan sektor unggulan
		Menyiapkan infrastruktur pendukung kawasan industri dan sentra produksi	Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus
		Meningkatkan produktivitas ekonomi lokal berbasis sumber daya kampung	Penyediaan lahan produktif dan utilitas pendukung untuk pengembangan sentra produksi Pendataan dan pemetaan potensi ekonomi kampung secara partisipatif
			Penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDes, koperasi, dan kelompok usaha bersama (KUBE)

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengembangkan kelembagaan ekonomi perdesaan secara berkelanjutan melalui penguatan koperasi dan badan usaha milik desa	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi, BUMDes, dan Bumakam
			Fasilitasi pembentukan dan penguatan koperasi berbasis potensi lokal perdesaan
			Pengembangan jejaring kemitraan antara koperasi, BUMDes, pelaku usaha lokal, dan pihak swasta Penyediaan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan
			Sinkronisasi program daerah dengan Program Nasional Koperasi Modern dan Koperasi Merah Putih
		Meningkatkan daya saing dan kemandirian pelaku UMKM	Penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha
			Fasilitasi kemudahan perizinan dan legalitas usaha bagi UMKM Pengembangan akses pemasaran produk UMKM, termasuk digital marketing dan platform e-commerce Peningkatan akses UMKM terhadap teknologi produksi dan inovasi produk
		Memperluas akses permodalan dan pelatihan usaha	Fasilitasi akses ke lembaga keuangan formal dan nonformal Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi pelaku ekonomi perdesaan Peningkatan adopsi teknologi pertanian modern dan mekanisasi alat mesin pertanian (alsintan)
		Meningkatkan produksi pangan melalui modernisasi pertanian	Fasilitasi penyediaan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian
			Penyediaan dan distribusi sarana produksi pertanian (saprotan) yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, sekolah lapang, dan pendampingan teknis

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			Fasilitasi kelembagaan petani dan korporatisasi pertanian berbasis kawasan
		Memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan daerah	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penyimpanan pangan seperti gudang, cold storage, dan lumbung pangan desa
			Optimalisasi peran BUMDes, koperasi, dan pelaku distribusi lokal dalam rantai pasok pangan Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian distribusi dan stabilisasi harga pangan
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Berkualitas dan Akuntabel	Mendorong diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan	Peningkatan edukasi dan kampanye konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA)
		Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah	Pengembangan produk pangan alternatif berbasis potensi lokal (pangan non beras)
			Penguatan sistem pengawasan keamanan pangan segar dan olahan Peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan dalam standar mutu, pengolahan, dan distribusi pangan yang aman Penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu dan berorientasi hasil
			Peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran DPRD dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pembangunan daerah Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan prinsip transparansi,

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD)
			Peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan sebagai simpul pelayanan publik dan pembinaan wilayah
			Optimalisasi peran dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai apendorong pertumbuhan ekonomi dan penyumbang pendapatan daerah
		Mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital dan terpadu	Pengembangan sistem layanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi (SPBE)
			Peningkatan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi dalam pelayanan publik
			Fasilitasi kemudahan akses layanan melalui kanal digital yang responsif dan inklusif
		Meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN	Peningkatan kompetensi, etika, dan disiplin ASN melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
			Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk seleksi, mutasi, dan promosi
			Pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, inovasi, dan kinerja Pencegahan korupsi dan benturan kepentingan melalui penguatan nilai-nilai integritas ASN
4	Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya, Stabilitas Keamanan dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal	Penguatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong perbaikan tata Kelola

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah
			Peningkatan pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan kebijakan korektif
		Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah sebagai identitas lokal	Penguatan koordinasi pengawasan dengan BPK, KPK, Ombudsman, dan lembaga pengawas lainnya Penguatan kelembagaan dan komunitas pelaku seni budaya daerah Revitalisasi nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan, festival, dan kegiatan pelestarian budaya
			Pendokumentasian dan pelindungan warisan budaya takbenda dan benda
		Meningkatkan peran seni dan budaya dalam mendukung pembangunan daerah	Integrasi nilai budaya dalam pembangunan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif
			Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya Pengembangan ruang publik sebagai sarana ekspresi dan edukasi budaya
		Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban melalui sinergi antarlembaga	Penguatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, TNI/Polri, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
			Optimalisasi peran Satpol PP, Linmas, dan aparat kewilayahan dalam penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Memperkuat wawasan kebangsaan, nilai toleransi, dan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat	Pengembangan sistem deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial secara terpadu Fasilitasi forum-forum dialog kebangsaan, antarumat beragama, dan antargenerasi sebagai sarana memperkuat toleransi dan solidaritas sosial

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam membina kerukunan dan mencegah konflik sosial.
		Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Peningkatan edukasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 melalui pendidikan formal dan nonformal Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan Peningkatan kapasitas sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala dan berbasis data
			Penerapan instrumen pengendalian lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan izin lingkungan secara ketat dan konsisten
			Rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat pencemaran dan kegiatan eksploitasi yang tidak ramah lingkungan
		Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Peningkatan kapasitas infrastruktur dan sarana pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk tempat pemrosesan akhir (TPA) yang ramah lingkungan
			Pengembangan sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah yang mengedepankan prinsip 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* dalam kerangka ekonomi sirkular
			Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha melalui edukasi dan kampanye pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
			Rehabilitasi ekosistem yang rusak akibat pencemaran dan kegiatan eksploitasi yang tidak ramah lingkungan
		Memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Integrasi kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		melalui kebijakan lintas sektor	Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan angin puting beliung Sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai dengan karakteristik wilayah Penguatan koordinasi antarperangkat daerah, TNI/Polri, dan lembaga kemanusiaan dalam tanggap darurat bencana
		Meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana berbasis data dan risiko	Pelaksanaan simulasi, edukasi, dan pelatihan kebencanaan secara berkala kepada masyarakat dan pemangku kepentingan Penyusunan rencana kontinjensi dan standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana berdasarkan klasifikasi risiko wilayah Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana
			Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana logistik bencana yang cepat, tanggap, dan tepat sasaran

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya memastikan implementasinya melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bentuk kewajiban pelayanan dasar kepada masyarakat.

Penerapan SPM merupakan instrumen penting dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara, khususnya pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,

serta sosial. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada pencapaian target pembangunan secara umum, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya indikator-indikator pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka itu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyusun rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat target, program, serta langkah-langkah strategis dalam pemenuhan pelayanan dasar secara bertahap dan berkelanjutan.

Adapun rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 13 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tulang Bawang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
	SPM BIDANG PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 persen	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
		Nasional			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan
	SPM BIDANG KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Wargan Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
		Kesehatan			Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodefici*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan	100 persen	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
	ency Virus)	kesehatan			
	SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Perumahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Perumahan
	SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	SPM BIDANG SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 persen	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Perangkat Daerah	Program
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100 persen	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana

Rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana disajikan pada Tabel 4.13 perlu didukung oleh pelaksanaan sub kegiatan yang sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaian yang telah ditetapkan. Dukungan sub kegiatan tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan target SPM dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Adapun rencana dukungan sub kegiatan terhadap pencapaian SPM Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 14 Rencana Dukungan Sub Kegiatan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tulang Bawang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan
A. SPM Bidang Pendidikan		
1	Angka Partisipasi Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan
2	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
B. SPM Bidang Kesehatan		
1	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
2	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
3	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
4	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
5	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
6	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
7	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
8	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
9	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
10	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
11	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan
12	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
D. SPM Bidang Perumahaan Rakyat		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
F. SPM Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		Penyediaan Alat Bantu

Berdasarkan rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta dukungan sub kegiatan yang telah ditetapkan, pelaksanaan pelayanan dasar di Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya dijabarkan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dukungan sub kegiatan tersebut menjadi instrumen pelaksanaan dalam rangka mencapai target SPM yang telah ditetapkan pada setiap bidang pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan dasar secara merata dan berkualitas.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi ruang lingkup SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Selanjutnya, jenis layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tulang Bawang pada masing-masing bidang diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

   Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang meliputi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Setiap Warga Negara Indonesia berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tabel 4. 15 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pendidikan

Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan	Mutu	Penerima Layanan
Pendidikan	Pendidikan Dasar dan Menengah	Standar jumlah dan kualitas barang/jasa	Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun berhak mendapatkan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai standar nasional Pendidikan
		Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	

2. Bidang Kesehatan

   Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

   a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   d. Pelayanan kesehatan balita;
   e. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
   f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
   g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

i. Pelayanan kesehatan diabetes melitus;

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tumbuh manusia (HIV).

Tabel 4. 16 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Kesehatan

Pelayanan Dasar	Jenis Layanan	Mutu		Penerima Layanan
Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		Ibu hamil yang ada di kabupaten Tulang Bawang
		1.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urine	
		2.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
		3.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	
		4.	Tablet tambah darah	
		5.	Kartu ibu/rekam medis ibu	
		6.	Dokter/dokter spesialis kebidanan	
		7.	Bidan	
		8.	Perawat	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		Ibu bersalin yang ada di Kabupaten Tulang Bawang
		1.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
		2.	Formulir Partograf	
		3.	Kartu ibu (rekam medis)	
		4.	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	
		5.	Bidan	
		6.	Perawat	
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		Bayi baru lahir usia 0-28 hari
		1.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
		2.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	
		3.	Vaksin Hepatitis B0	
		4.	Salep/tetes mata antibiotik	
		5.	Vitamin K1 injeksi	
		6.	Formulir bayi baru lahir	
		7.	Dokter/dokter spesialis Anak	
		8.	Bidan	

Pelayanan Dasar	Jenis Layanan	Mutu		Penerima Layanan
		9.	Perawat	
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		Balita usia 12-59 bulan
		1.	Peralatan Anafilaktik	
		2.	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	
		3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	
		4.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	
		5.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	
		6.	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	
		7.	Vitamin A Biru	
		8.	Vitamin A Merah	
		9.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai	
		10.	Dokter	
		11.	Bidan Perawat	
		12.	Ahli Gizi	
		13.	Guru PAUD	
		14.	Kader Kesehatan	
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pen-didikan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		Anak Usia Pendidikan Dasar
		1.	Kuesioner skrining kesehatan	
		2.	Buku pemantauan kesehatan	
		3.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	
		4.	Buku raport kesehatanku Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	
		5.	Dokter/Dokter Gigi	
		6.	Bidan	
		7.	Perawat	
		8.	Ahli Gizi	
		9.	Tenaga Kesmas	
		10.	Guru	
		11.	Kader Kesehatan	
	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		orang usia 15–59 tahun

Pelayanan Dasar	Jenis Layanan	Mutu		Penerima Layanan
	pada Usia Produktif	1.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	
		2.	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA	
		3.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	
		4.	Dokter	
		5.	Perawat	
		6.	Bidan	
		7.	Ahli Gizi	
		8.	Tenaga Kesmas	
		9.	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM meliputi :		warga negara berusia 60 tahun atau lebih
		1.	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	
		2.	Buku Kesehatan Lansia	
		3.	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	
		4.	Dokter	
		5.	Bidan	
		6.	Perawat	
		7.	Ahli Gizi	
		8.	Tenaga Kesmas	
		9.	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		penderita hipertensi usia >= 15 tahun
		1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	
		2.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	
		3.	Tensimeter	
		4.	Dokter	
		5.	Bidan Perawat	
		6.	Tenaga Kesmas	
	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		penderita diabetes

Pelayanan Dasar	Jenis Layanan	Mutu		Penerima Layanan
	Diabetes Melitus	1.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	mellitus usia >= 15 tahun
		2.	Glucometer, strip test gula darah, kapas alkohol, lancet	
		3.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	
		4.	Dokter	
		5.	Bidan	
		6.	Perawat	
		7.	Ahli Gizi	
		8.	Tenaga Kesmas	
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		Penderita ODGJ berat
		1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	
		2.	Kit berisi 2 alat fiksasi	
		3.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	
		4.	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	
		5.	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuber-kulosis	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		orang terduga TBC
		1.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	
		2.	Catridge tes cepat molekuler	
		3.	Formulir pencatatan dan pelaporan	
		4.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	
		5.	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	
		6.	Reagen Zn TB	
		7.	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	
		8.	Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	
		9.	Penata Rontgen	

Pelayanan Dasar	Jenis Layanan	Mutu		Penerima Layanan
		10.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunya	
		11.	Tenaga kesehatan Masyarakat	
		12.	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	
		13.	Perawat	
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemah-kan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah Mutu Barang/Jasa / SDM meliputi :		orang dengan risiko terinfeksi HIV
		1.	Tes cepat HIV (RDT) pertama	
		2.	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	
		3.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	
		4.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril,	
			Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	
		5.	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	
		6.	Perawat	
		7.	Bidan	
		8.	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	
		9.	Tenaga Kesmas	
		10.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang meliputi pemenuhan kebutuhan air minum antar kampung.

Tabel 4. 17 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dasar	**Jenis Pelayanan**	**Mutu**	**Penerima Layanan**
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan air minum antar kampung	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Setiap Warga Negara yang berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang kekurangan air minum dan akan dilayani oleh penyelenggaraan SPAM setempat melalui sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu pemberian bantuan bedah rumah bagi masyarakat. Selain itu, perumusan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memperhatikan :

a. Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
b. Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di Kabupaten Tulang Bawang;
c. Pengentasan permukiman kumuh;
d. Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penanganan permukiman kumuh.

Tabel 4. 18 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan	Mutu	Penerima Layanan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pemberian bantuan bedah rumah bagi masyarakat	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Masyarakat tidak mampu dan rumah dan tidak layak huni
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

   Jenis pelayanan dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kabupaten Tulang Bawang adalah pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kewenangan Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan adalah penanganan konflik sosial, antara lain :

   a. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   b. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
   c. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
   d. Penegakan Peraturan Daerah.

Tabel 4. 19 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar	Jenis Layanan	Mutu	Penerima Layanan
TRANTIBUMLINMAS	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lingkup kewenangan Kabupaten Tulang Bawang	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
		Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	

6. Bidang Sosial

Jenis pelayanan dasar SPM Sosial pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas:

a. Pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas, anak yatim piatu, lanjut usia dan santunan kematian;
b. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang sosial yang diperhatikan antara lain :

a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b. Pelayanan pemeberian bantuan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak yatim piatu dan santunan kematian;
c. Program Keluarga Harapan (PKH);
d. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
e. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN);

f. Cakupan rumah tangga miskin dengan program-program sosial yang berbeda;

g. Basis data terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan.

Tabel 4. 20 Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu SPM Sosial

Pelayanan Dasar	Jenis Layanan	Mutu	Penerima Layanan
Sosial	Pemeberian bantuan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak yatim piatu dan santunan kematian	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Penyandang disabilitas, lansia, anak yatim piatu dan santunan kematian
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Standar Jumlah dan Kualitas personel/sumber daya manusia	Korban bencana Kabupaten Tulang Bawang
		Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, maka pada Tahun 2027 dirumuskan prioritas pembangunan tahunan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah secara bertahap dan terukur.

Selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing urusan pemerintahan wajib, peningkatan kualitas pelayanan dasar juga memerlukan integrasi lintas sektor, khususnya dalam rangka peningkatan kinerja sanitasi daerah yang mencakup pengelolaan air limbah domestik, persampahan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan kinerja sanitasi di Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan melalui keterpaduan program dan kegiatan lintas perangkat daerah yang mendukung pencapaian target sanitasi daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun dukungan program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 21 Dukungan Program dan Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Kinerja Sanitasi di Kabupaten Tulang Bawang

No	Program/Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas PUPR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Dinas Lingkungan Hidup
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas PUPR
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas PUPR

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027

Prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 dirumuskan sebagai penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Lampung, hasil evaluasi pembangunan daerah, isu strategis, serta kapasitas fiskal daerah.

Perumusan prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan melalui penetapan target indikator makro, tema pembangunan, dan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Berdasarkan kerangka perencanaan tersebut, selanjutnya disajikan skenario indikator ekonomi makro Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 sebagai gambaran kondisi pembangunan daerah yang diharapkan.

Tabel 4. 22 Skenario Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027

Indikator Ekonomi	Capaian Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD 2027 (Oleh Provinsi)	Target RKPD 2027
Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	5,1	6,00	5,50 - 6,00	5,50 – 6,00*
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,19	2,90 - 3,10	2,90 - 3,10	2,90 – 3,10*
Tingkat Kemiskinan (%)	7,54	7,00 - 8,00	6,80 - 7,50	7,00 – 8,00*
Rasio Gini (%)	0,248	0,249	0,238 - 0,245	0,238 – 0,245*
Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2)	N/A	132.605,57	-	132.605,57
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	72,99	73,22	-	73,00-73,30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	73,11	73,16	73,8-74,02	73,15-74,02*

**) Target hasil kesepakatan pada Forum Rakortek Pembangunan Tahun 2026 antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang*

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan untuk menjamin kesinambungan serta sinergi pelaksanaan pembangunan, ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027, yaitu:

"**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang yang Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah, Investasi Inklusif, dan Industri Berbasis Potensi Lokal".**

Tema pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

   Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan inklusif. Upaya ini mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan karakter dan kapasitas generasi muda sebagai modal utama pembangunan daerah.

2. **Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial**

   Prioritas ini difokuskan pada percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Kebijakan diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat rentan, serta peningkatan ketepatan sasaran program melalui integrasi data dan sinergi lintas sektor.

3. **Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal**

Prioritas ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan ekonomi diarahkan pada optimalisasi potensi unggulan daerah dan ekonomi lokal, peningkatan nilai tambah produk, pengembangan UMKM dan koperasi, perluasan akses pembiayaan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

4. **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan**

Prioritas ini diarahkan pada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan penunjang pembangunan yang merata antarwilayah. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, serta dukungan terhadap pelayanan publik dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat, pembangunan sanitasi menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur sanitasi, baik pada subsektor air limbah domestik maupun persampahan, guna mewujudkan layanan sanitasi yang aman, layak, dan berkelanjutan. Penguatan infrastruktur sanitasi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Tulang Bawang, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/ SDGs),* khususnya Tujuan 6 mengenai akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat.

5. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas**

   Prioritas ini difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Upaya dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. **Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya**

   Prioritas ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis dalam keberagaman. Kebijakan diarahkan pada penguatan nilai sosial budaya, toleransi, dan gotong royong, peningkatan ketahanan sosial masyarakat, serta pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban guna mendukung iklim pembangunan yang kondusif.

7. **Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana**

   Prioritas ini diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta peningkatan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana. Upaya dilakukan melalui perlindungan dan pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penguatan sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tema dan prioritas pembangunan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

dalam APBD Tahun 2027 perlu didasarkan pada kerangka asumsi makro ekonomi yang mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi nasional maupun daerah.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga konsistensi antara arah pembangunan daerah dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun 2027 didasarkan pada kerangka asumsi makro ekonomi daerah. Penggunaan asumsi makro ekonomi tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi merupakan prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Asumsi makro ekonomi tersebut disusun dengan mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro nasional dan daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor-sektor unggulan daerah, serta berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja perekonomian. Adapun asumsi dasar yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

   Perekonomian nasional pada Tahun 2027 diasumsikan tetap tumbuh stabil sesuai dengan target pembangunan nasional, yaitu sekitar 6,3-7,5 persen. Kondisi tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi, serta penguatan sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan industri pengolahan.

2. Pendapatan Daerah dan Optimalisasi Sumber Pendapatan

   Perencanaan pendapatan daerah disusun berdasarkan proyeksi yang realistis dan terukur sesuai dengan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah, baik melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pemanfaatan

sumber-sumber pendapatan lainnya, dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

3. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Pengalokasian anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta percepatan penurunan kemiskinan. Selain itu, kualitas belanja terus ditingkatkan melalui penguatan prinsip belanja yang produktif, efisien, dan tepat sasaran.

4. Pembiayaan dan Dukungan Investasi

Dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, pembiayaan pembangunan tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga didorong melalui peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri pengolahan, dan infrastruktur.

5. Stabilitas Ekonomi Daerah

Stabilitas ekonomi daerah merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Stabilitas ekonomi daerah serta efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal tersebut juga perlu didukung oleh keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan, prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun dengan mengacu dan memperhatikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional.

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan searah dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas.

Keterkaitan tersebut juga menjadi dasar dalam memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program pembangunan lintas sektor dan lintas kewenangan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dengan prioritas Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 23 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2027

NO	PRIORITAS	TEMA RKP 2027	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
1	NASIONAL	"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, dan Industri"	1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			3	Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			4	Membangun dari desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

NO	PRIORITAS	TEMA RKP 2027	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
			6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
			7	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur
			8	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
2	PROVINSI LAMPUNG	"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri berbasis Potensi Daerah"	1	Penguatan Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Inovatif
			2	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
			3	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS	TEMA RKP 2027	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
			4	Penurunan Prevalensi Stunting dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
			5	Pembangunan Rendah Karbon dan Peningkatan Ketahanan Bencana
			6	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas
			7	Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya dan Harmonisasi Masyarakat
3	KABUPATEN TULANG BAWANG	"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang yang Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah, Investasi Inklusif, dan Industri Berbasis Potensi Lokal"	1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
			2	Percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial;
			3	Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha berbasis potensi unggulan daerah dan ekonomi lokal;
			4	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan;

NO	PRIORITAS	TEMA RKP 2027	PRIORITAS PEMBANGUNAN	
			5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas;
			6	Penguatan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis, dan berbudaya;
			7	Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan mitigasi penanggulangan bencana.

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan hasil penelaahan terhadap aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses, rapat kerja, serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pokok-Pokok Pikiran DPRD menjadi salah satu bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027, DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui 40 anggota DPRD. Berdasarkan rancangan kamus usulan Pokir Tahun 2027, usulan yang disampaikan mencakup berbagai urusan, antara lain Kelautan dan Perikanan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pendidikan, Perdagangan, Perhubungan, dan Pertanian.

Dari keseluruhan usulan yang dihimpun, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan, menjadi usulan yang paling dominan. Tingginya usulan pada sektor jalan menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan konektivitas antarwilayah, aksesibilitas masyarakat, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi masih menjadi prioritas utama yang diharapkan masyarakat untuk segera ditangani.

Seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD selanjutnya akan dibahas melalui mekanisme desk Pokir dan dilakukan verifikasi teknis oleh perangkat daerah terkait untuk memastikan kesesuaian dengan kewenangan daerah, prioritas pembangunan, indikator kinerja, serta

kemampuan keuangan daerah. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengintegrasian usulan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027, Pokok-Pokok Pikiran DPRD juga diselaraskan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 untuk mewujudkan keterpaduan antara aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dan hasil perencanaan partisipatif. Selanjutnya, usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dipetakan sesuai urusan pemerintahan dan perangkat daerah pengampu sebagai dasar pengintegrasiannya ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah.

Dengan demikian, proses integrasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke dalam RKPD Tahun 2027 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, terukur, dan akuntabel guna mewujudkan keterpaduan antara pendekatan teknokratis, partisipatif, serta politik anggaran dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga mampu mendukung pencapaian visi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, yaitu "Tulang Bawang Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah disusun untuk mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2027. Penyusunan rencana tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan, kedudukan Tahun 2027 sebagai tahun rencana dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029.

Penetapan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan pembangunan daerah, permasalahan mendasar yang dihadapi, serta faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan pembangunan. Pemahaman terhadap akar permasalahan tersebut menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses penentuan prioritas *(priority setting)* dikembangkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan keterbatasan dan ketersediaan sumber daya daerah, baik dari sisi pendanaan, kapasitas kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Penentuan prioritas menjadi penting untuk menjaga fokus pembangunan pada sasaran utama, memastikan penggunaan sumber daya daerah secara efektif dan efisien, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan, serta menjamin keterkaitan antara kebijakan pembangunan dengan tujuan sosial dan ekonomi daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumentasi kondisi pembangunan dan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya menjadi bagian penting dalam memastikan konsistensi dan efektivitas perumusan program prioritas.

Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Integrasi tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur capaian kinerjanya secara akuntabel serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, pencapaian tujuan bersama *(common goals)* pembangunan daerah juga didukung oleh sinergi antarprogram, termasuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, berbagai program pendukung diarahkan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), antara lain melalui pendekatan integratif yang menghubungkan program prioritas daerah dengan program lintas sektor dan lintas perangkat daerah, termasuk penguatan pembangunan desa.

Rencana kerja dan pendanaan daerah juga disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta sumber-sumber pendanaan lainnya, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara realistis, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Dengan pendekatan tersebut, rencana program dan kegiatan prioritas diharapkan mampu mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 secara efektif.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TULANG BAWANG
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						**340.208.358.294,00**							**386.554.436.860,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**339.401.196.282,00**							**385.654.436.860,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**339.401.196.282,00**							**385.654.436.860,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**266.584.578.182,00**							**315.557.885.160,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***266.584.578.182,00***							***315.557.885.160,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	266.584.578.182,00						100 %	315.557.885.160,00	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						266.584.578.182,00					Seluruh PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu		315.557.885.160,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						266.584.578.182,00					Seluruh PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu		315.557.885.160,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 Orang/bulan		100.00 Orang/bulan	100.00 Orang/bulan	266.584.578.182,00						100.00 Orang/bulan	315.557.885.160,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						266.584.578.182,00							315.557.885.160,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 Orang/bulan		100.00 Orang/bulan	1989 Orang/bulan	266.584.578.182,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daera h-Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daera h-Tambahan Penghasilan Guru DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daera h-Tunjangan Khusus Guru	4.Memperk uat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Peningkata n Kualitas Sumber Daya Manusia		100.00 Orang/bulan	315.557.885.160,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**69.096.551.700,00**							**69.096.551.700,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***69.096.551.700,00***							***69.096.551.700,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK	81.05 Angka		77.10 Angka	78.05 Angka	69.096.551.700,00						79.15 Angka	69.096.551.700,00	
			999.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	107.01 Angka		104.89 Angka	105.42 Angka	69.096.551.700,00						105.95 Angka	69.096.551.700,00	
			999.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	94.21 Angka		89.47 Angka	90.62 Angka	69.096.551.700,00						91.80 Angka	69.096.551.700,00	
			999.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100.38 Angka		100.12 Angka	100.18 Angka	69.096.551.700,00						100.25 Angka	69.096.551.700,00	
			999.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86.35 Angka		83.75 Angka	84.40 Angka	69.096.551.700,00						85.05 Angka	69.096.551.700,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00						1 Dokumen	47.194.500,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00						1 Dokumen	318.872.300,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	150 Unit	20.000.000,00						150 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00						220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00						14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00						220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00						220 Peserta Didik	258.490.300,00	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00						1 Dokumen	47.194.500,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00						1 Dokumen	318.872.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	150 Unit	20.000.000,00						150 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00						220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00						14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00						220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00						220 Peserta Didik	258.490.300,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00						1 Dokumen	47.194.500,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00						1 Dokumen	318.872.300,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	150 Unit	20.000.000,00						150 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00						220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00						14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00						220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00						220 Peserta Didik	258.490.300,00	
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00						1 Dokumen	47.194.500,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00						1 Dokumen	318.872.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	150 Unit	20.000.000,00						150 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00						220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00						14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00						220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00						220 Peserta Didik	258.490.300,00	
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00						1 Dokumen	47.194.500,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00						1 Dokumen	318.872.300,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	150 Unit	20.000.000,00						150 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00						220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00						14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00						220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00						220 Peserta Didik	258.490.300,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00						1 Dokumen	47.194.500,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00						1 Dokumen	318.872.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	150 Unit	20.000.000,00						150 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00						220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00						14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00						220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00						220 Peserta Didik	258.490.300,00	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						40.908.383.200,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		40.908.383.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00						1 Dokumen	47.194.500,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00						1 Dokumen	318.872.300,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	150 Unit	20.000.000,00						150 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00						220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00						14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00						220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00						220 Peserta Didik	258.490.300,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit		150 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		150 Unit	20.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						258.490.300,00							258.490.300,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	220 Peserta Didik		220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	258.490.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		220 Peserta Didik	258.490.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						16.117.700,00							16.117.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		14 Satuan Pendidikan	16.117.700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						40.243.412.500,00							40.243.412.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		220 Satuan Pendidikan	40.243.412.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						47.194.500,00							47.194.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.194.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	47.194.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						318.872.300,00							318.872.300,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	318.872.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	318.872.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						4.295.900,00							4.295.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Satuan Pendidikan		220 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		220 Satuan Pendidikan	4.295.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00						2 Dokumen	315.668.800,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00						27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00						83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00						119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00						115 Peserta Didik	208.082.900,00	
		: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00						2 Dokumen	315.668.800,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00						27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00						83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00						119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00						115 Peserta Didik	208.082.900,00	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00						2 Dokumen	315.668.800,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00						27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00						83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00						119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00						115 Peserta Didik	208.082.900,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00						2 Dokumen	315.668.800,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00						27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00						83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00						119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00						115 Peserta Didik	208.082.900,00	
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00						2 Dokumen	315.668.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00						27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00						83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00						119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00						115 Peserta Didik	208.082.900,00	
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00						2 Dokumen	315.668.800,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00						27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00						83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00						119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00						115 Peserta Didik	208.082.900,00	
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						21.601.669.000,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		21.601.669.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00						2 Dokumen	315.668.800,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00						27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00						83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00						119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00						115 Peserta Didik	208.082.900,00	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						208.082.900,00							208.082.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	115 Peserta Didik		115 Peserta Didik	115 Peserta Didik	208.082.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		115 Peserta Didik	208.082.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						21.232.800,00							21.232.800,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		83.00 Satuan Pendidikan	21.232.800,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						21.039.247.500,00							21.039.247.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	119 Satuan Pendidikan		119 Satuan Pendidikan	119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		119 Satuan Pendidikan	21.039.247.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						315.668.800,00							315.668.800,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	315.668.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Dokumen	315.668.800,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						17.437.000,00							17.437.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	27 Satuan Pendidikan		27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		27 Satuan Pendidikan	17.437.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						5.967.009.900,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		5.967.009.900,00	
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP						5.967.009.900,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		5.967.009.900,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	269 Satuan Pendidikan		269 Satuan Pendidikan	269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00						269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	22 Satuan Pendidikan		22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	51.674.900,00						22 Satuan Pendidikan	51.674.900,00	
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar						5.967.009.900,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		5.967.009.900,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	269 Satuan Pendidikan		269 Satuan Pendidikan	269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00						269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	22 Satuan Pendidikan		22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	51.674.900,00						22 Satuan Pendidikan	51.674.900,00	
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun						5.967.009.900,00					Seluruh Sekolah, Siswa dan Masyarakat		5.967.009.900,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	269 Satuan Pendidikan		269 Satuan Pendidikan	269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00						269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	22 Satuan Pendidikan		22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	51.674.900,00						22 Satuan Pendidikan	51.674.900,00	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						5.915.335.000,00							5.915.335.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	269 Satuan Pendidikan		269 Satuan Pendidikan	269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		269 Satuan Pendidikan	5.915.335.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						51.674.900,00							51.674.900,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	22 Satuan Pendidikan		22 Satuan Pendidikan	269 Satuan Pendidikan	51.674.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		22 Satuan Pendidikan	51.674.900,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						619.489.600,00					Satuan Pendidikan dan Masyarakat		619.489.600,00	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen						619.489.600,00					Satuan Pendidikan dan Masyarakat		619.489.600,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	48.689.600,00						18 Satuan Pendidikan	48.689.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	570.800.000,00						18 Satuan Pendidikan	570.800.000,00	
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP						619.489.600,00					Satuan Pendidikan dan Masyarakat		619.489.600,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	48.689.600,00						18 Satuan Pendidikan	48.689.600,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	570.800.000,00						18 Satuan Pendidikan	570.800.000,00	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						48.689.600,00							48.689.600,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	48.689.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		18 Satuan Pendidikan	48.689.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						570.800.000,00							570.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	18 Satuan Pendidikan		18 Satuan Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	570.800.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		18 Satuan Pendidikan	570.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**3.720.066.400,00**							**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan						***3.720.066.400,00***							***1.000.000.000,00***	
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	94.64 Persentase		90.23 Persentase	91.66 Persentase	3.720.066.400,00						92.87 Persentase	1.000.000.000,00	
			999.Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	12.50 Rasio		13.50 Rasio	13.30 Rasio	3.720.066.400,00						13.10 Rasio	1.000.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.720.066.400,00					Satuan Pendidikan dan Guru		1.000.000.000,00	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.720.066.400,00					Satuan Pendidikan dan Guru		1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	717.659.800,00						3 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.002.406.600,00						12 Laporan	0,00	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.720.066.400,00					Satuan Pendidikan dan Guru		1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	717.659.800,00						3 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.002.406.600,00						12 Laporan	0,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						717.659.800,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	717.659.800,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		3 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.002.406.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan		12 Laporan	10 Laporan	3.002.406.600,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**807.162.012,00**							**900.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**807.162.012,00**							**900.000.000,00**	
4.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**807.162.012,00**							**900.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						***807.162.012,00***							***900.000.000,00***	
			999. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	55 %		35 %	40 %	807.162.012,00						45 %	900.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						69.362.012,00					Cagar Budaya dan Lembaga Adat, Masyarakat		100.000.000,00	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						69.362.012,00					Cagar Budaya dan Lembaga Adat, Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	69.362.012,00						1 Objek	100.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						69.362.012,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	69.362.012,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Objek	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						737.800.000,00					Cagar Budaya dan Lembaga Adat, Masyarakat		800.000.000,00	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						737.800.000,00					Cagar Budaya dan Lembaga Adat, Masyarakat		800.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	-	737.800.000,00						-	800.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						737.800.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-		-	100 Orang	737.800.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	800.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Kesehatan						**85.381.097.238,00**							**92.126.649.656,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**85.381.097.238,00**							**92.126.649.656,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**85.381.097.238,00**							**92.126.649.656,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.933.244.375,00**							**51.545.815.300,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***52.933.244.375,00***							***51.545.815.300,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	52.933.244.375,00						100 %	51.545.815.300,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.494.000,00					Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang		83.920.800,00	
		Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan Evalausi Kinerja Peraangkat Daerah						42.494.000,00					Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang		83.920.800,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	42.494.000,00						6 Laporan	83.920.800,00	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.494.000,00							83.920.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	42.494.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		6 Laporan	83.920.800,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						52.159.200.375,00					Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang		50.730.344.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan						52.159.200.375,00					Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang		50.730.344.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.218.600.000,00						1 Dokumen	1.947.029.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	710 Orang/bulan		588 Orang/bulan	617 Orang/bulan	50.940.600.375,00						648 Orang/bulan	48.783.315.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						50.940.600.375,00							48.783.315.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	710 Orang/bulan		588 Orang/bulan	617 Orang/bulan	50.940.600.375,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		648 Orang/bulan	48.783.315.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.218.600.000,00							1.947.029.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.218.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.947.029.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						731.550.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		731.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah						731.550.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		731.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	731.550.000,00						20 Paket	731.550.000,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						731.550.000,00							731.550.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	731.550.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		20 Paket	731.550.000,00	Dinas Kesehatan
6.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***27.504.772.813,00***							***34.963.973.071,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	27.504.772.813,00						90.20 %	34.963.973.071,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						9.313.825.765,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		16.176.003.487,00	
		Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan dasar						9.313.825.765,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		16.176.003.487,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	23.000.000,00						20 Paket	188.170.676,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	20 Unit		20 Unit	20 Unit	2.679.142.765,00						20 Unit	6.009.507.407,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	5.921.773.000,00						40 Paket	9.278.014.925,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	689.910.000,00						10 Unit	700.310.479,00	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.679.142.765,00							6.009.507.407,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	20 Unit		20 Unit	20 Unit	2.679.142.765,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		20 Unit	6.009.507.407,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						689.910.000,00							700.310.479,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	689.910.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		10 Unit	700.310.479,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						5.921.773.000,00							9.278.014.925,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	5.921.773.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		40 Paket	9.278.014.925,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						23.000.000,00							188.170.676,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	23.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		20 Paket	188.170.676,00	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		52.587.067.021,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67549 Orang		67549 Orang	67549 Orang	17.745.000,00						67549 Orang	47.526.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39323 Orang		39323 Orang	39323 Orang	25.169.500,00						39323 Orang	54.917.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7403 Orang		7114 Orang	7185 Orang	21.385.000,00						7257 Orang	51.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	707.718.000,00						1 Dokumen	704.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.062.750,00						1 Dokumen	102.591.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.103.000,00						1 Dokumen	49.873.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	126.098.000,00						1 Dokumen	123.784.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.550.000,00						1 Dokumen	50.318.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	476.610.194,00						1 Dokumen	1.046.897.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 Unit		20 Unit	20 Unit	161.435.000,00						20 Unit	55.609.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7874 Orang		7566 Orang	7642 Orang	1.208.547.500,00						7719 Orang	51.346.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8183 Orang		8103 Orang	8184 Orang	56.931.000,00						8266 Orang	836.716.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9520 Orang		9520 Orang	9520 Orang	22.625.000,00						9520 Orang	52.384.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5915 Orang		6004 Orang	6004 Orang	16.850.000,00						6004 Orang	36.681.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	774 Orang		774 Orang	774 Orang	41.525.000,00						774 Orang	41.335.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3754 Orang		3980 Orang	4378 Orang	16.525.000,00						4160 Orang	56.266.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91391 Orang		87825 Orang	88703 Orang	16.525.000,00						89590 Orang	56.266.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33809 Orang		32490 Orang	32815 Orang	29.698.000,00						33143 Orang	59.424.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	312567 Orang		300371 Orang	303371 Orang	35.127.500,00						306408 Orang	64.829.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						56.931.000,00							836.716.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8183 Orang		8103 Orang	8184 Orang	56.931.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		8266 Orang	836.716.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.208.547.500,00							51.346.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7874 Orang		7566 Orang	7642 Orang	1.208.547.500,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		7719 Orang	51.346.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						21.385.000,00							51.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7403 Orang		7114 Orang	7185 Orang	21.385.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		7257 Orang	51.150.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						25.169.500,00							54.917.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39323 Orang		39323 Orang	39323 Orang	25.169.500,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		39323 Orang	54.917.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						17.745.000,00							47.526.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67549 Orang		67549 Orang	67549 Orang	17.745.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		67549 Orang	47.526.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						35.127.500,00							64.829.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	312567 Orang		300371 Orang	303371 Orang	35.127.500,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		306408 Orang	64.829.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						29.698.000,00							59.424.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33809 Orang		32490 Orang	32815 Orang	29.698.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		33143 Orang	59.424.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						16.525.000,00							56.266.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91391 Orang		87825 Orang	88703 Orang	16.525.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		89590 Orang	56.266.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						16.525.000,00							56.266.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3754 Orang		3980 Orang	4378 Orang	16.525.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4160 Orang	56.266.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						41.525.000,00							41.335.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	774 Orang		774 Orang	774 Orang	41.525.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		774 Orang	41.335.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						16.850.000,00							36.681.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5915 Orang		6004 Orang	6004 Orang	16.850.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		6004 Orang	36.681.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						22.625.000,00							52.384.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9520 Orang		9520 Orang	9520 Orang	22.625.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		9520 Orang	52.384.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						53.062.750,00							102.591.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.062.750,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	102.591.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						20.103.000,00							49.873.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.103.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	49.873.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						126.098.000,00							123.784.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	126.098.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	123.784.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						20.550.000,00							50.318.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.550.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	50.318.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						476.610.194,00							1.046.897.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	476.610.194,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.046.897.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						14.894.724.309,00							14.843.282.584,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.894.724.309,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	14.843.282.584,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						161.435.000,00							55.609.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 Unit		20 Unit	20 Unit	161.435.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		20 Unit	55.609.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						707.718.000,00							704.560.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	707.718.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	704.560.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						209.825.295,00					Dinas Kesehatan dan puskesmas		400.058.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						209.825.295,00					Dinas Kesehatan dan puskesmas		400.058.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	209.825.295,00						1 Dokumen	400.058.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						209.825.295,00							400.058.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	209.825.295,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	400.058.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		52.587.067.021,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.692.000,00						-	58.423.000,00	
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						28.692.000,00							58.423.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	28.692.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	58.423.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**4.338.063.000,00**							**4.391.116.663,00**	
		Meningkanya mutu dan distribusi tenaga kesehatan						***4.338.063.000,00***							***4.391.116.663,00***	
			999.Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	92.00 %		78.00 %	82.00 %	4.338.063.000,00						86.00 %	4.391.116.663,00	
			999.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	72.00 Persentase		45.00 Persentase	52.50 Persentase	4.338.063.000,00						60.00 Persentase	4.391.116.663,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						57.295.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		88.494.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						57.295.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		88.494.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.295.000,00						1 Dokumen	88.494.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						57.295.000,00							88.494.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.295.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	88.494.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.280.768.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		4.302.622.663,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.280.768.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		4.302.622.663,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	210 Orang		170 Orang	180 Orang	4.280.768.000,00						190 Orang	4.302.622.663,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4.280.768.000,00							4.302.622.663,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	210 Orang		170 Orang	180 Orang	4.280.768.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		190 Orang	4.302.622.663,00	Dinas Kesehatan
8.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**431.317.750,00**							**105.948.582,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman						***361.317.750,00***							***35.948.582,00***	
			999.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	100.00 Persentase		100.00 Persentase	100.00 Persentase	361.317.750,00						100.00 Persentase	35.948.582,00	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						361.317.750,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		35.948.582,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman						361.317.750,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		35.948.582,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	361.317.750,00						50 Unit	35.948.582,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						361.317.750,00							35.948.582,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	361.317.750,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		50 Unit	35.948.582,00	Dinas Kesehatan
			-	-		-	-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						70.000.000,00					SPPG Tulang Bawang		70.000.000,00	
		-						70.000.000,00					SPPG Tulang Bawang		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						70.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-	62 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	70.000.000,00	Dinas Kesehatan
9.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**157.174.300,00**							**1.063.530.040,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***157.174.300,00***							***1.063.530.040,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	70.00 Persentase		46.00 Persentase	52.00 Persentase	157.174.300,00						58.00 Persentase	1.063.530.040,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						97.490.800,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		551.907.700,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						97.490.800,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		551.907.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	97.490.800,00						1 Dokumen	551.907.700,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						97.490.800,00							551.907.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	97.490.800,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	551.907.700,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						59.683.500,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		511.622.340,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						59.683.500,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		511.622.340,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.683.500,00						1 Dokumen	511.622.340,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						59.683.500,00							511.622.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.683.500,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	511.622.340,00	Dinas Kesehatan
		Puskesmas Menggala						**1.902.136.000,00**							**1.817.188.551,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.902.136.000,00**							**1.817.188.551,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.902.136.000,00**							**1.817.188.551,00**	
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.902.136.000,00***							***1.817.188.551,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.902.136.000,00						90.20 %	1.817.188.551,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Menggala		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Menggala		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.094.000.000,00							940.711.551,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.094.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	940.711.551,00	Puskesmas Menggala
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						808.136.000,00							876.477.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	808.136.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	876.477.000,00	Puskesmas Menggala
		Puskesmas Tiuh Toho						**1.592.667.000,00**							**1.568.373.329,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.592.667.000,00**							**1.568.373.329,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.592.667.000,00**							**1.568.373.329,00**	
11.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.592.667.000,00***							***1.568.373.329,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.592.667.000,00						90.20 %	1.568.373.329,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tiuh Toho		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tiuh Toho		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						900.000.000,00							773.894.329,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	773.894.329,00	Puskesmas Tiuh Toho
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						692.667.000,00							794.479.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	692.667.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	794.479.000,00	Puskesmas Tiuh Toho
		Puskesmas Gedung Meneng						**2.115.832.000,00**							**1.757.786.849,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.115.832.000,00**							**1.757.786.849,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.115.832.000,00**							**1.757.786.849,00**	
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***2.115.832.000,00***							***1.757.786.849,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	2.115.832.000,00						90.20 %	1.757.786.849,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Gedung meneng		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Gedung meneng		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						861.500.000,00							740.788.849,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	861.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	740.788.849,00	Puskesmas Gedung Meneng
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.254.332.000,00							1.016.998.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.254.332.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.016.998.000,00	Puskesmas Gedung Meneng
		Puskesmas Pasiran Jaya						**1.744.953.000,00**							**1.852.835.792,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.744.953.000,00**							**1.852.835.792,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.744.953.000,00**							**1.852.835.792,00**	
13.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.744.953.000,00***							***1.852.835.792,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.744.953.000,00						90.20 %	1.852.835.792,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Pasira Jaya		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Pasira Jaya		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.035.219.000,00							890.166.792,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.219.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	890.166.792,00	Puskesmas Pasiran Jaya
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						709.734.000,00							962.669.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	709.734.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	962.669.000,00	Puskesmas Pasiran Jaya
		Puskesmas Tulang Bawang I						**3.028.021.838,00**							**3.008.467.104,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.028.021.838,00**							**3.008.467.104,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.028.021.838,00**							**3.008.467.104,00**	
14.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***3.028.021.838,00***							***3.008.467.104,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	3.028.021.838,00						90.20 %	3.008.467.104,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang I		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tulang Bawang I		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						2.324.769.838,00							1.999.029.104,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.324.769.838,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.999.029.104,00	Puskesmas Tulang Bawang I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						703.252.000,00							1.009.438.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	703.252.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.009.438.000,00	Puskesmas Tulang Bawang I
		Puskesmas Penawar Jaya						**2.788.133.314,00**							**2.636.445.340,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.788.133.314,00**							**2.636.445.340,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.788.133.314,00**							**2.636.445.340,00**	
15.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***2.788.133.314,00***							***2.636.445.340,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	2.788.133.314,00						90.20 %	2.636.445.340,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Penawar Jaya		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Penawar Jaya		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						2.052.000.314,00							1.764.479.340,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.052.000.314,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.764.479.340,00	Puskesmas Penawar Jaya
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						736.133.000,00							871.966.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	736.133.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	871.966.000,00	Puskesmas Penawar Jaya
		Puskesmas Paduan Rajawali						**2.150.553.000,00**							**2.263.383.752,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.150.553.000,00**							**2.263.383.752,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.150.553.000,00**							**2.263.383.752,00**	
16.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***2.150.553.000,00***							***2.263.383.752,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	2.150.553.000,00						90.20 %	2.263.383.752,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Paduan Rajawali		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Paduan Rajawali		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.450.000.000,00							1.246.829.752,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.246.829.752,00	Puskesmas Paduan Rajawali
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						700.553.000,00							1.016.554.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	700.553.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.016.554.000,00	Puskesmas Paduan Rajawali
		Puskesmas Sidoharjo						**1.586.291.000,00**							**1.627.666.940,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.586.291.000,00**							**1.627.666.940,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.586.291.000,00**							**1.627.666.940,00**	
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.586.291.000,00***							***1.627.666.940,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.586.291.000,00						90.20 %	1.627.666.940,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Sidoharjo		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Sidoharjo		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						709.120.000,00							609.759.940,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	709.120.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	609.759.940,00	Puskesmas Sidoharjo
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						877.171.000,00							1.017.907.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	877.171.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.017.907.000,00	Puskesmas Sidoharjo
		Puskesmas Gedung Rejo Sakti						**1.916.282.000,00**							**1.622.725.713,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.916.282.000,00**							**1.622.725.713,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.916.282.000,00**							**1.622.725.713,00**	
18.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.916.282.000,00***							***1.622.725.713,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.916.282.000,00						90.20 %	1.622.725.713,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Gedung Rejo Sakti		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Gedung Rejo Sakti		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						930.800.000,00							800.378.713,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	930.800.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	800.378.713,00	Puskesmas Gedung Rejo Sakti
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						985.482.000,00							822.347.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	985.482.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	822.347.000,00	Puskesmas Gedung Rejo Sakti
		Puskesmas Rawa Pitu						**2.288.846.720,00**							**2.294.428.034,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.288.846.720,00**							**2.294.428.034,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.288.846.720,00**							**2.294.428.034,00**	
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***2.288.846.720,00***							***2.294.428.034,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	2.288.846.720,00						90.20 %	2.294.428.034,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Rawa Pitu		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Rawa Pitu		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.559.846.720,00							1.341.285.034,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.559.846.720,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.341.285.034,00	Puskesmas Rawa Pitu
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						729.000.000,00							953.143.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	729.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	953.143.000,00	Puskesmas Rawa Pitu
		Puskesmas Gedung Aji						**1.438.942.000,00**							**1.260.246.075,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.438.942.000,00**							**1.260.246.075,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.438.942.000,00**							**1.260.246.075,00**	
20.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.438.942.000,00***							***1.260.246.075,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.438.942.000,00						90.20 %	1.260.246.075,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Gedung Aji		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Gedung Aji		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						570.000.000,00							490.133.075,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	570.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	490.133.075,00	Puskesmas Gedung Aji
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						868.942.000,00							770.113.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	868.942.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	770.113.000,00	Puskesmas Gedung Aji
		Puskesmas Makarti Tama`						**1.365.201.000,00**							**1.607.032.767,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.365.201.000,00**							**1.607.032.767,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.365.201.000,00**							**1.607.032.767,00**	
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.365.201.000,00***							***1.607.032.767,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.365.201.000,00						90.20 %	1.607.032.767,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Makartitama		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Makartitama		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						760.000.000,00							653.510.767,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	760.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	653.510.767,00	Puskesmas Makarti Tama`
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						605.201.000,00							953.522.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	605.201.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	953.522.000,00	Puskesmas Makarti Tama`
		Puskesmas Rawa Jitu						**1.377.610.784,00**							**1.232.376.882,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.377.610.784,00**							**1.232.376.882,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.377.610.784,00**							**1.232.376.882,00**	
22.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.377.610.784,00***							***1.232.376.882,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.377.610.784,00						90.20 %	1.232.376.882,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Rawa Jitu		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Rawa Jitu		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						656.548.784,00							565.998.882,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	656.548.784,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	565.998.882,00	Puskesmas Rawa Jitu
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						721.062.000,00							666.378.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	721.062.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	666.378.000,00	Puskesmas Rawa Jitu
		Puskesmas Rawa Jitu Timur						**1.655.190.000,00**							**1.380.410.458,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.655.190.000,00**							**1.380.410.458,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.655.190.000,00**							**1.380.410.458,00**	
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.655.190.000,00***							***1.380.410.458,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.655.190.000,00						90.20 %	1.380.410.458,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Rawa Jitu Timur		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Rawa Jitu Timur		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						559.920.000,00							481.465.458,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	559.920.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	481.465.458,00	Puskesmas Rawa Jitu Timur
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.095.270.000,00							898.945.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.095.270.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	898.945.000,00	Puskesmas Rawa Jitu Timur
		Puskesmas Way Dente						**1.973.462.503,00**							**1.426.764.893,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.973.462.503,00**							**1.426.764.893,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.973.462.503,00**							**1.426.764.893,00**	
24.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.973.462.503,00***							***1.426.764.893,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.973.462.503,00						90.20 %	1.426.764.893,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Way Dente		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Way Dente		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						763.121.503,00							656.194.893,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	763.121.503,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	656.194.893,00	Puskesmas Way Dente
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.210.341.000,00							770.570.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.210.341.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	770.570.000,00	Puskesmas Way Dente
		Puskesmas Banjar Baru						**1.515.659.285,00**							**1.416.364.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.515.659.285,00**							**1.416.364.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.515.659.285,00**							**1.416.364.000,00**	
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.515.659.285,00***							***1.416.364.000,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.515.659.285,00						90.20 %	1.416.364.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Banjar Baru		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Banjar Baru		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						732.248.285,00							629.647.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	732.248.285,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	629.647.000,00	Puskesmas Banjar Baru
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						783.411.000,00							786.717.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	783.411.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	786.717.000,00	Puskesmas Banjar Baru
		Puskesmas Lebuh Dalem						**1.814.627.000,00**							**1.628.256.527,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.814.627.000,00**							**1.628.256.527,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.814.627.000,00**							**1.628.256.527,00**	
26.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.814.627.000,00***							***1.628.256.527,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.814.627.000,00						90.20 %	1.628.256.527,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Lebuh Dalem		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Lebuh Dalem		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						992.000.000,00							853.003.527,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	992.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	853.003.527,00	Puskesmas Lebuh Dalem
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						822.627.000,00							775.253.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	822.627.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	775.253.000,00	Puskesmas Lebuh Dalem
		Puskesmas Gedung Karya Jitu						**2.105.903.000,00**							**1.914.476.883,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.105.903.000,00**							**1.914.476.883,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.105.903.000,00**							**1.914.476.883,00**	
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***2.105.903.000,00***							***1.914.476.883,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	2.105.903.000,00						90.20 %	1.914.476.883,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Gedung Karya Jitu		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Gedung Karya Jitu		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.006.000.000,00							865.041.883,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.006.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	865.041.883,00	Puskesmas Gedung Karya Jitu
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.099.903.000,00							1.049.435.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.099.903.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	1.049.435.000,00	Puskesmas Gedung Karya Jitu
		Puskesmas Bogatama						**1.292.310.000,00**							**970.738.751,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.292.310.000,00**							**970.738.751,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.292.310.000,00**							**970.738.751,00**	
28.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.292.310.000,00***							***970.738.751,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	1.292.310.000,00						90.20 %	970.738.751,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Bogatama		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Bogatama		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						445.000.000,00							382.647.751,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	445.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	382.647.751,00	Puskesmas Bogatama
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						847.310.000,00							588.091.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	847.310.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	588.091.000,00	Puskesmas Bogatama
		Puskesmas Sungai Nibung						**905.046.000,00**							**856.920.797,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**905.046.000,00**							**856.920.797,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**905.046.000,00**							**856.920.797,00**	
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**64.078.965.257,00**							**69.163.128.508,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***905.046.000,00***							***856.920.797,00***	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	92.40 %		87.80 %	89.00 %	905.046.000,00						90.20 %	856.920.797,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Sungai Nibung		52.587.067.021,00	
		Terpenuhinya layanan kesehatan rujukan						54.555.314.197,00					Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Sungai Nibung		52.587.067.021,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.678.742.753,00						1 Dokumen	31.856.659.021,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.773.649.000,00						1 Dokumen	17.129.513.000,00	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						381.924.000,00							328.409.797,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	381.924.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Dente Teladas || Desa Sungai Burung || 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	328.409.797,00	Puskesmas Sungai Nibung
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						523.122.000,00							528.511.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	523.122.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Dente Teladas || Desa Sungai Burung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	528.511.000,00	Puskesmas Sungai Nibung
		RSUD Menggala						**92.281.574.071,00**							**89.371.570.841,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**92.281.574.071,00**							**89.371.570.841,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**92.281.574.071,00**							**89.371.570.841,00**	
30.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**30.761.793.118,00**							**27.851.789.888,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***30.761.793.118,00***							***27.851.789.888,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	30.761.793.118,00						100 %	27.851.789.888,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						26.861.793.118,00					Pegawai RSUD Menggala		23.951.789.888,00	
		Persentase pelayanan keuangan dan administrasi ASN yang terlaksana tepat waktu						26.861.793.118,00					Pegawai RSUD Menggala		23.951.789.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.641.935.000,00						4 Dokumen	2.641.935.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	354 Orang/bulan		334 Orang/bulan	339 Orang/bulan	24.219.858.118,00						344 Orang/bulan	21.309.854.888,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						24.219.858.118,00							21.309.854.888,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	354 Orang/bulan		334 Orang/bulan	339 Orang/bulan	24.219.858.118,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		344 Orang/bulan	21.309.854.888,00	RSUD Menggala
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.641.935.000,00							2.641.935.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.641.935.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	2.641.935.000,00	RSUD Menggala
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.900.000.000,00					pegawai dan pengguna jasa pelayanan RSUD Menggala		3.900.000.000,00	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang operasional kantor						3.900.000.000,00					pegawai dan pengguna jasa pelayanan RSUD Menggala		3.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00						12 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000.000,00						12 Laporan	2.400.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	1.500.000.000,00	RSUD Menggala
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.400.000.000,00							2.400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	2.400.000.000,00	RSUD Menggala

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**61.519.780.953,00**							**61.519.780.953,00**	
		Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan perorangan di RSUD						***61.519.780.953,00***							***61.519.780.953,00***	
			999.BOR (Bed Occupancy Rate)	65.00 %		47.00 %	53.00 %	61.519.780.953,00						58.00 %	61.519.780.953,00	
			999.LOS (Length of Stay)	3.00 Hari		2.35 Hari	2.50 Hari	61.519.780.953,00						2.70 Hari	61.519.780.953,00	
			999.Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	55.00 %		46.00 %	48.00 %	61.519.780.953,00						50.00 %	61.519.780.953,00	
			999.TOI (Turnover Interval)	2.00 Hari		4.00 Hari	3.20 Hari	61.519.780.953,00						2.80 Hari	61.519.780.953,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.519.780.953,00					pegawai dan pengguna jasa pelayanan RSUD Menggala		2.519.780.953,00	
		Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Rumah Sakit						2.519.780.953,00					pegawai dan pengguna jasa pelayanan RSUD Menggala		2.519.780.953,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit		3 Unit	3 Unit	2.519.780.953,00						4 Unit	2.519.780.953,00	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.519.780.953,00							2.519.780.953,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit		3 Unit	4 Unit	2.519.780.953,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Unit	2.519.780.953,00	RSUD Menggala
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						59.000.000.000,00					pegawai dan pengguna jasa pelayanan RSUD Menggala		59.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD						59.000.000.000,00					pegawai dan pengguna jasa pelayanan RSUD Menggala		59.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	59.000.000.000,00						9 Dokumen	59.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						59.000.000.000,00							59.000.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	59.000.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		9 Dokumen	59.000.000.000,00	RSUD Menggala
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**101.453.043.207,00**							**104.061.300.073,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**101.453.043.207,00**							**104.061.300.073,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**98.764.043.207,00**							**101.372.300.073,00**	
32.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.485.684.949,00**							**14.093.941.815,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***11.485.684.949,00***							***14.093.941.815,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	11.485.684.949,00						100 %	14.093.941.815,00	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.485.684.949,00					Dinas PUPR		14.093.941.815,00	
		Persentase realisasi anggaran						11.485.684.949,00					Dinas PUPR		14.093.941.815,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	11.485.684.949,00						110 Orang/bulan	14.093.941.815,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.485.684.949,00							14.093.941.815,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	102 Orang/bulan	11.485.684.949,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		110 Orang/bulan	14.093.941.815,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**3.300.000.000,00**							**3.300.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***3.300.000.000,00***							***3.300.000.000,00***	
			999.Persentase jaringan irigasi yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	86.47 %		74.38 %	77.02 %	3.300.000.000,00						80.15 %	3.300.000.000,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.300.000.000,00					Masyarakat		3.300.000.000,00	
		Persentase panjang irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik						3.300.000.000,00					Masyarakat		3.300.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM		4 KM	4 KM	3.300.000.000,00						4 KM	3.300.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						3.300.000.000,00							3.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM		4 KM	2 KM	3.300.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		4 KM	3.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***500.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			999.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	5.15 %		2.94 %	3.39 %	500.000.000,00						3.89 %	500.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00					Masyarakat		500.000.000,00	
		Rumah Tangga berakses air minum layak						500.000.000,00					Masyarakat		500.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik		1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	500.000.000,00						1 Liter/Detik	500.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik		1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	500.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Liter/Detik	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
35.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**695.000.000,00**							**695.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***695.000.000,00***							***695.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.35 Persentase		1.29 Persentase	1.31 Persentase	695.000.000,00						1.32 Persentase	695.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						695.000.000,00					Masyarakat		695.000.000,00	
		Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak						695.000.000,00					Masyarakat		695.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	445.000.000,00						-	445.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		-	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						445.000.000,00							445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	10 M³/Hari	445.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		-	445.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**10.499.684.258,00**							**10.499.684.258,00**	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung						***10.499.684.258,00***							***10.499.684.258,00***	
			1. Persentase kualitas bangunan gedung kabupaten dan lingkungannya yang sesuai standar	69.56 %		61.80 %	63.65 %	10.499.684.258,00						65.56 %	10.499.684.258,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						10.499.684.258,00					Masyarakat		10.499.684.258,00	
		Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan						10.499.684.258,00					Masyarakat		10.499.684.258,00	
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	5 Bangunan Gedung Cagar Budaya		5 Bangunan Gedung Cagar Budaya	5 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.499.684.258,00						5 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.499.684.258,00	
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						10.499.684.258,00							10.499.684.258,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	5 Bangunan Gedung Cagar Budaya		5 Bangunan Gedung Cagar Budaya	5 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.499.684.258,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		5 Bangunan Gedung Cagar Budaya	10.499.684.258,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**5.705.000.000,00**							**5.705.000.000,00**	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata						***5.705.000.000,00***							***5.705.000.000,00***	
			1.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	66.45 Persentase		59.04 Persentase	60.81 Persentase	5.705.000.000,00						62.64 Persentase	5.705.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						5.705.000.000,00					Masyarakat		5.705.000.000,00	
		Presentase Penataan Bangunan dan lingkungannya kondisi baik						5.705.000.000,00					Masyarakat		5.705.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	3 Kawasan		3 Kawasan	3 Kawasan	5.705.000.000,00						3 Kawasan	5.705.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						5.705.000.000,00							5.705.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	3 Kawasan		3 Kawasan	2 Kawasan	5.705.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		3 Kawasan	5.705.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
38.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**65.038.674.000,00**							**65.038.674.000,00**	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman						***65.038.674.000,00***							***65.038.674.000,00***	
			999.Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/ditingkatkan	34.69 KM		24.87 KM	27.33 KM	65.038.674.000,00						29.78 KM	65.038.674.000,00	
			999.Panjang jembatan yang dibangun/direhabilitasi	66.13 Meter		47.63 Meter	52.48 Meter	65.038.674.000,00						56.79 Meter	65.038.674.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						65.038.674.000,00					Masyarakat		65.038.674.000,00	
		Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan						65.038.674.000,00					Masyarakat		65.038.674.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	25 KM		25 KM	25 KM	3.068.642.800,00						25 KM	3.068.642.800,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	10 KM		10 KM	10 KM	2.714.064.127,00						10 KM	2.714.064.127,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	18 KM		10 KM	12 KM	25.169.721.173,00						14 KM	25.169.721.173,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	45 KM		25 KM	30 KM	20.267.000.000,00						35 KM	20.267.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM		1 KM	1 KM	9.771.674.000,00						1 KM	9.771.674.000,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	24 Meter		24 Meter	24 Meter	4.047.571.900,00						24 Meter	4.047.571.900,00	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						3.068.642.800,00							3.068.642.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	25 KM		25 KM	10 KM	3.068.642.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		25 KM	3.068.642.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						20.267.000.000,00							20.267.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	45 KM		25 KM	15 KM	20.267.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		35 KM	20.267.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						2.714.064.127,00							2.714.064.127,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	10 KM		10 KM	4 KM	2.714.064.127,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		10 KM	2.714.064.127,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						25.169.721.173,00							25.169.721.173,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	18 KM		10 KM	2,5 KM	25.169.721.173,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		14 KM	25.169.721.173,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						4.047.571.900,00							4.047.571.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	24 Meter		24 Meter	24 Meter	4.047.571.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		24 Meter	4.047.571.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						9.771.674.000,00							9.771.674.000,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM		1 KM	1 KM	9.771.674.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 KM	9.771.674.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**750.000.000,00**							**750.000.000,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***750.000.000,00***							***750.000.000,00***	
			1.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	38.29 Persentase		31.50 Persentase	33.08 Persentase	750.000.000,00						34.73 Persentase	750.000.000,00	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						750.000.000,00					Masyarakat		750.000.000,00	
		Presentase Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						750.000.000,00					Masyarakat		750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	750.000.000,00						2 Lembaga	750.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	2 Lembaga		2 Lembaga	1 Lembaga	750.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		2 Lembaga	750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
40.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**790.000.000,00**							**790.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***790.000.000,00***							***790.000.000,00***	
			2.Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaraan Pemanfaatan Ruang di Daerah	100 %		100 %	100 %	790.000.000,00						100 %	790.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						790.000.000,00					Masyarakat		790.000.000,00	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						790.000.000,00					Masyarakat		790.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	790.000.000,00						1 Laporan	790.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						790.000.000,00							790.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	790.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Laporan	790.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.689.000.000,00**							**2.689.000.000,00**	
41.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**120.000.000,00**							**120.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***120.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			999.Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten yang Ditangani	14.19 %		11.68 %	12.26 %	120.000.000,00						12.87 %	120.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						120.000.000,00					Masyarakat		120.000.000,00	
		Persentase penyediaan RTLH bagi masyarakat						120.000.000,00					Masyarakat		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**1.150.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman, serta penanganan kawasan kumuh						***1.150.000.000,00***							***1.150.000.000,00***	
			1. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	75.55 %		62.16 %	65.27 %	1.150.000.000,00						68.53 %	1.150.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1.150.000.000,00					Masyarakat		1.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase penanganan RTLH diluar kawasan kumuh						1.150.000.000,00					Masyarakat		1.150.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	51 Unit Rumah		43 Unit Rumah	45 Unit Rumah	1.150.000.000,00						47 Unit Rumah	1.150.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.150.000.000,00							1.150.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	51 Unit Rumah		43 Unit Rumah	43 Unit Rumah	1.150.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		47 Unit Rumah	1.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**1.295.000.000,00**							**1.295.000.000,00**	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***1.295.000.000,00***							***1.295.000.000,00***	
			1. Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	27.24 %		22.41 %	23.53 %	1.295.000.000,00						24.71 %	1.295.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						1.295.000.000,00					Masyarakat		1.295.000.000,00	
		Presentase Penyelenggaraan PSU Perumahan						1.295.000.000,00					Masyarakat		1.295.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1.295.000.000,00						1 Lokasi	1.295.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						1.295.000.000,00							1.295.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1.295.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Lokasi	1.295.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**124.000.000,00**							**124.000.000,00**	
		Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah						***124.000.000,00***							***124.000.000,00***	
			1. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	70 %		50 %	55 %	124.000.000,00						60 %	124.000.000,00	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil						124.000.000,00					Masyarakat		124.000.000,00	
		Jumlah Sertifikasi dan Registrasi bagiOrang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta PerencanaanPrasarana, Saranadan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil						124.000.000,00					Masyarakat		124.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.000.000,00						1 Laporan	124.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil						124.000.000,00							124.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Laporan	124.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Satuan Polisi Pamong Praja						**12.056.534.138,00**							**11.993.287.094,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.056.534.138,00**							**11.993.287.094,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**12.056.534.138,00**							**11.993.287.094,00**	
45.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.841.530.638,00**							**11.794.335.694,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***11.841.530.638,00***							***11.794.335.694,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	11.841.530.638,00						100 %	11.794.335.694,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja		8.620.600,00	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu						10.000.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja		8.620.600,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	8.620.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							8.620.600,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Laporan	8.620.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.418.543.679,00					Satuan Polisi Pamong Praja		11.376.835.075,00	
		Persentase realisasi anggaran						11.418.543.679,00					Satuan Polisi Pamong Praja		11.376.835.075,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.463.727.840,00						2 Dokumen	6.477.051.280,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan		53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4.954.815.839,00						53 Orang/bulan	4.899.783.795,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.954.815.839,00							4.899.783.795,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan		53 Orang/bulan	51 Orang/bulan	4.954.815.839,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		53 Orang/bulan	4.899.783.795,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.463.727.840,00							6.477.051.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.463.727.840,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Dokumen	6.477.051.280,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						114.285.600,00					Satuan Polisi Pamong Praja		106.453.220,00	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran						114.285.600,00					Satuan Polisi Pamong Praja		106.453.220,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.984.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	85.894.000,00						1 Laporan	85.894.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.407.600,00						1 Paket	20.559.220,00	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.407.600,00							20.559.220,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.407.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	20.559.220,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						9.984.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.984.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						85.894.000,00							85.894.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	85.894.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	85.894.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123.201.359,00					Satuan Polisi Pamong Praja		126.926.799,00	
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						123.201.359,00					Satuan Polisi Pamong Praja		126.926.799,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.879.759,00						1 Laporan	77.879.699,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.321.600,00						1 Laporan	49.047.100,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						77.879.759,00							77.879.699,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.879.759,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	77.879.699,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.321.600,00							49.047.100,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.321.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	49.047.100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.500.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja		175.500.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik						175.500.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja		175.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	175.500.000,00						7 Unit	175.500.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						175.500.000,00							175.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	175.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		7 Unit	175.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
46.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**215.003.500,00**							**198.951.400,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS						***27.905.000,00***							***27.905.000,00***	
			1.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	73.33 Persentase		46.67 Persentase	53.33 Persentase	27.905.000,00						60.00 Persentase	27.905.000,00	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						27.905.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		27.905.000,00	
		Peningkatan kapasitas SDM PPNS						27.905.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		27.905.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.905.000,00						1 Laporan	27.905.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						27.905.000,00							27.905.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.905.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		1 Laporan	27.905.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						***24.000.000,00***							***24.000.000,00***	
			1.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		100 %	100 %	24.000.000,00						100 %	24.000.000,00	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						48.000.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		48.000.000,00	
		Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						48.000.000,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		48.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00						4 Laporan	24.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						24.000.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		4 Laporan	24.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						24.000.000,00							24.000.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	24.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		4 Laporan	24.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum						***139.098.500,00***							***123.046.400,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	74.698.500,00						100 Persentase	64.766.400,00	
		Peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						139.098.500,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		123.046.400,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	60.700.000,00						12 laporan	60.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	13.998.500,00						10 Unit	4.066.400,00	
		Peningkatan perlindungan terhadap masyarakat						139.098.500,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		123.046.400,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	60.700.000,00						12 laporan	60.700.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	13.998.500,00						10 Unit	4.066.400,00	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						60.700.000,00							60.700.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	60.700.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		12 laporan	60.700.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						13.998.500,00							4.066.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit		10 Unit	3 Unit	13.998.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		10 Unit	4.066.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat						***139.098.500,00***							***123.046.400,00***	
			1.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	70.00 Persentase		50.00 Persentase	55.00 Persentase	64.400.000,00						60.00 Persentase	58.280.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						139.098.500,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		123.046.400,00	
		Peningkatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						139.098.500,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		123.046.400,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	5 Orang		5 Orang	5 Orang	30.520.000,00						5 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.880.000,00						1 Dokumen	43.880.000,00	
		Peningkatan perlindungan terhadap masyarakat						139.098.500,00					Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas serta Masyarakat		123.046.400,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	5 Orang		5 Orang	5 Orang	30.520.000,00						5 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.880.000,00						1 Dokumen	43.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						33.880.000,00							43.880.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.880.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		1 Dokumen	43.880.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						30.520.000,00							14.400.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	5 Orang		5 Orang	5 Orang	30.520.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		5 Orang	14.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**4.555.210.215,00**							**4.415.653.025,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.555.210.215,00**							**4.415.653.025,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.555.210.215,00**							**4.415.653.025,00**	
47.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.520.263.215,00**							**4.313.153.025,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***4.520.263.215,00***							***4.288.153.025,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.520.263.215,00						100 %	4.288.153.025,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.374.941.765,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		4.124.153.025,00	
		Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah						4.374.941.765,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		4.124.153.025,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	680.520.000,00						12 Dokumen	680.520.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.694.421.765,00						34 Orang/bulan	3.443.633.025,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.694.421.765,00							3.443.633.025,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3.694.421.765,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		34 Orang/bulan	3.443.633.025,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						680.520.000,00							680.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	680.520.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		12 Dokumen	680.520.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.315.600,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		39.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						34.315.600,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		39.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.378.600,00						4 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.530.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.643.200,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.763.800,00						3 Paket	10.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.763.800,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	9.763.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		3 Paket	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.643.200,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.643.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		1 Paket	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.378.600,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	3.378.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Laporan	4.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.530.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.530.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Laporan	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.822.600,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		25.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah						4.822.600,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	4.822.600,00						4 Unit	25.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.822.600,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	2 Unit	4.822.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Unit	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46.053.250,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		50.000.000,00	
		Meningkatnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						46.053.250,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.390.000,00						12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.663.250,00						12 Laporan	15.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33.390.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.390.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		12 Laporan	35.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.663.250,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	12.663.250,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		12 Laporan	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.130.000,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		75.000.000,00	
		Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah						60.130.000,00					ASN BPBD Kabupaten Tulang Bawang		75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	60.130.000,00						5 Unit	75.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.130.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	60.130.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		5 Unit	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
48.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**34.947.000,00**							**102.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						***13.203.500,00***							***40.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	37.50 Persentase		12.50 Persentase	18.75 Persentase	13.203.500,00						25.00 Persentase	40.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						5.662.500,00					Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		15.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						5.662.500,00					Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		15.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang		0 Orang	0 Orang	5.662.500,00						0 Orang	15.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						5.662.500,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0 Orang		0 Orang	150 Orang	5.662.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		0 Orang	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						7.541.000,00					Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		25.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						7.541.000,00					Masyarakat di Daerah Rawan Bencana		25.000.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan		5 Kawasan	5 Kawasan	7.541.000,00						5 Kawasan	25.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						7.541.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 Kawasan		5 Kawasan	2 Kawasan	7.541.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		5 Kawasan	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana						***10.881.500,00***							***32.500.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pasca Bencana	90 Persentase		70 Persentase	75 Persentase	10.881.500,00						80 Persentase	32.500.000,00	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						10.881.500,00					Masyarakat Korban Bencana		32.500.000,00	
		Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana						10.881.500,00					Masyarakat Korban Bencana		32.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.354.500,00						1 Laporan	17.500.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.527.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						7.354.500,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.354.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		1 Laporan	17.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota						3.527.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.527.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		1 Dokumen	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat					***10.862.000,00***							***30.000.000,00***		
			1.Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		100 %	100 %	10.862.000,00						100 %	30.000.000,00	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						10.862.000,00					Masyarakat Korban Bencana		30.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						10.862.000,00					Masyarakat Korban Bencana		30.000.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0 Orang		30 Orang	30 Orang	3.621.000,00						0 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.241.000,00						5 Dokumen	20.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						7.241.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.241.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		5 Dokumen	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota						3.621.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0 Orang		30 Orang	20 Orang	3.621.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		0 Orang	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						**5.596.746.236,00**							**5.111.784.797,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.596.746.236,00**							**5.111.784.797,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.596.746.236,00**							**5.111.784.797,00**	
49.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.581.746.236,00**							**5.090.784.797,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***3.454.164.836,00***							***2.963.203.397,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.454.164.836,00						100 %	2.963.203.397,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.454.164.836,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		2.963.203.397,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						3.454.164.836,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		2.963.203.397,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.454.164.836,00						24 Orang/bulan	2.963.203.397,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.454.164.836,00							2.963.203.397,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.454.164.836,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		24 Orang/bulan	2.963.203.397,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Cakupan Layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	-		-	undefined undefined	148.370.000,00						-	148.370.000,00	
			Cakupan Layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	-		-	12 Bulan	21.840.000,00						-	21.840.000,00	
			presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	-		-	12 Bulan	1.957.371.400,00						-	1.957.371.400,00	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						21.840.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		21.840.000,00	
		-						21.840.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		21.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.570.000,00						-	7.570.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	11.270.000,00						-	11.270.000,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.270.000,00							11.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	11.270.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	11.270.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.570.000,00							7.570.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	7.570.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	7.570.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	3.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.957.371.400,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		1.957.371.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						1.957.371.400,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		1.957.371.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	51.161.400,00						-	51.161.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.906.210.000,00						-	1.906.210.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.161.400,00							51.161.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	51.161.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	51.161.400,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.906.210.000,00							1.906.210.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.906.210.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	1.906.210.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.370.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		148.370.000,00	
		-						148.370.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		148.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	148.370.000,00						-	148.370.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						148.370.000,00							148.370.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	6 Unit	148.370.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	148.370.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
50.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**15.000.000,00**							**21.000.000,00**	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran						***12.000.000,00***							***18.000.000,00***	
			999.Cakupan Layanan dan Evakuasi Korban Kebakaran	95 %		75 %	80 %	12.000.000,00						85 %	18.000.000,00	
			999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	60 Persentase		40 Persentase	45 Persentase	12.000.000,00						50 Persentase	18.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						12.000.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		18.000.000,00	
		Tersedianyan Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran						12.000.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	-	9.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	3.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						9.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-		-	50 Unit	9.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						3.000.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		3.000.000,00	
		Terlaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya						3.000.000,00					KABUPATEN TULANG BAWANG		3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-		-	185 Orang	3.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	3.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Dinas Sosial						**12.553.584.479,00**							**12.222.689.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.553.584.479,00**							**12.222.689.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**12.553.584.479,00**							**12.222.689.000,00**	
51.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.348.722.779,00**							**5.057.689.000,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***4.348.722.779,00***							***5.057.689.000,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.348.722.779,00						100 %	5.057.689.000,00	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.085.076.129,00					ASN/P3K Perangkat Daerah		4.760.000.000,00	
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						4.085.076.129,00					ASN/P3K Perangkat Daerah		4.760.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	296.470.000,00						25 Dokumen	310.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.788.606.129,00						35 Orang/bulan	4.450.000.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.788.606.129,00							4.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.788.606.129,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		35 Orang/bulan	4.450.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						296.470.000,00							310.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen		25 Dokumen	46 Dokumen	296.470.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		25 Dokumen	310.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.572.050,00					Administrasi Umum Dinas Sosial		47.150.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.572.050,00					Administrasi Umum Dinas Sosial		47.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		50 Laporan	55 Laporan	22.066.000,00						60 Laporan	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.389.250,00						1 Paket	2.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.853.400,00						1 Paket	9.350.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.997.000,00						1 Paket	3.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.266.400,00						1 Paket	6.500.000,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						40.572.050,00					Administrasi Umum Dinas Sosial		47.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		50 Laporan	55 Laporan	22.066.000,00						60 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.389.250,00						1 Paket	2.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.853.400,00						1 Paket	9.350.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.997.000,00						1 Paket	3.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.266.400,00						1 Paket	6.500.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						40.572.050,00					Administrasi Umum Dinas Sosial		47.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		50 Laporan	55 Laporan	22.066.000,00						60 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.389.250,00						1 Paket	2.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.853.400,00						1 Paket	9.350.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.997.000,00						1 Paket	3.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.266.400,00						1 Paket	6.500.000,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						40.572.050,00					Administrasi Umum Dinas Sosial		47.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		50 Laporan	55 Laporan	22.066.000,00						60 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.389.250,00						1 Paket	2.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.853.400,00						1 Paket	9.350.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.997.000,00						1 Paket	3.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.266.400,00						1 Paket	6.500.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						40.572.050,00					Administrasi Umum Dinas Sosial		47.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		50 Laporan	55 Laporan	22.066.000,00						60 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.389.250,00						1 Paket	2.750.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.853.400,00						1 Paket	9.350.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.997.000,00						1 Paket	3.550.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.266.400,00						1 Paket	6.500.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.997.000,00							3.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.997.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	3.550.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.266.400,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.266.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	6.500.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.389.250,00							2.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.389.250,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	2.750.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.853.400,00							9.350.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.853.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	9.350.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.066.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		50 Laporan	24 Laporan	22.066.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		60 Laporan	25.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.495.000,00					Kendaraan dinas		164.895.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						163.495.000,00					Kendaraan dinas		164.895.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	39.895.000,00						24 Laporan	39.895.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.895.000,00							39.895.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	39.895.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		24 Laporan	39.895.000,00	Dinas Sosial

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.644.000,00					Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor		40.644.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						40.644.000,00					Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor		40.644.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.794.000,00						6 Unit	25.794.000,00	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor dan Mesin Lainnya						40.644.000,00					Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor		40.644.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.794.000,00						6 Unit	25.794.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.794.000,00							25.794.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.794.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		6 Unit	25.794.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.935.600,00					ASN Dinas Sosial		45.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan OPD						18.935.600,00					ASN Dinas Sosial		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	18.935.600,00						-	45.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						18.935.600,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	18.935.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	45.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						163.495.000,00					Kendaraan dinas		164.895.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	123.600.000,00						-	125.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						123.600.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	123.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	125.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						40.644.000,00					Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor		40.644.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	14.850.000,00						-	14.850.000,00	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor dan Mesin Lainnya						40.644.000,00					Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor		40.644.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	14.850.000,00						-	14.850.000,00	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.850.000,00							14.850.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	14.850.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	14.850.000,00	Dinas Sosial
52.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**595.950.000,00**							**625.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial						***595.950.000,00***							***625.000.000,00***	
			999.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	60 %		40 %	45 %	595.950.000,00						50 %	625.000.000,00	
			999. Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	66.85 %		55.00 %	57.75 %	595.950.000,00						60.64 %	625.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						595.950.000,00					TKSK dan PSM		625.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan TKSK dan PSM						595.950.000,00					TKSK dan PSM		625.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	166 Orang		166 Orang	166 Orang	595.950.000,00						166 Orang	625.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						595.950.000,00							625.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	166 Orang		166 Orang	166 Orang	595.950.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penguangan Kesenjangan Sosial		166 Orang	625.000.000,00	Dinas Sosial
53.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**7.389.272.300,00**							**6.285.000.000,00**	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						***7.389.272.300,00***							***6.285.000.000,00***	
			999.Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 %		40 %	45 %	7.389.272.300,00						50 %	6.285.000.000,00	
			999.Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	45 %		25 %	30 %	7.389.272.300,00						35 %	6.285.000.000,00	
			999.Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	85 %		65 %	70 %	7.389.272.300,00						75 %	6.285.000.000,00	
			999.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	45 %		25 %	30 %	7.389.272.300,00						35 %	6.285.000.000,00	
			999. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65 %		45 %	50 %	7.389.272.300,00						55 %	6.285.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						7.389.272.300,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		6.285.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bantuan sosial Bagi Lansia Disabilitas, Beras anak Yatim serta Tersalurnya Alat Bantu Disabiitas						7.389.272.300,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		6.285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12750 Orang		11500 Orang	11750 Orang	15.996.000,00						12000 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		175 Orang	225 Orang	71.901.000,00						250 Orang	85.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1550 Orang		1450 Orang	1500 Orang	5.868.545.300,00						1525 Orang	4.650.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						71.901.000,00							85.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		175 Orang	50 Orang	71.901.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial		250 Orang	85.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						5.868.545.300,00							4.650.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1550 Orang		1450 Orang	100 Orang	5.868.545.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial		1525 Orang	4.650.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						15.996.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12750 Orang		11500 Orang	14000 Orang	15.996.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Sosial		12000 Orang	0,00	Dinas Sosial
		Terlaksananya Pemberian Bantuan sosial Bagi Lansia Disabilitas, Beras anak Yatim serta Tersalurnya Alat Bantu Disabiitas						7.389.272.300,00					PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		6.285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	1.432.830.000,00						-	1.550.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						1.432.830.000,00							1.550.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	2181 Orang	1.432.830.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penguranagan Kesenjangan Sosial		-	1.550.000.000,00	Dinas Sosial
54.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**25.952.000,00**							**35.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						***25.952.000,00***							***35.000.000,00***	
			999.Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100.00 %		75.00 %	82.00 %	25.952.000,00						88.00 %	35.000.000,00	
			999.Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	12.00 %		6.00 %	7.50 %	25.952.000,00						9.00 %	35.000.000,00	
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	50.00 %		32.00 %	36.00 %	25.952.000,00						40.00 %	35.000.000,00	
			999. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	85.00 %		66.00 %	70.00 %	25.952.000,00						75.00 %	35.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						25.952.000,00					Masyarakat Kurang Mampu/keluarga miskin		35.000.000,00	
		Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)						25.952.000,00					Masyarakat Kurang Mampu/keluarga miskin		35.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		150 Orang	150 Orang	25.952.000,00						170 Orang	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)						25.952.000,00					Masyarakat Kurang Mampu/keluarga miskin		35.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		150 Orang	150 Orang	25.952.000,00						170 Orang	35.000.000,00	
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)						25.952.000,00					Masyarakat Kurang Mampu/keluarga miskin		35.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		150 Orang	150 Orang	25.952.000,00						170 Orang	35.000.000,00	
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)						25.952.000,00					Masyarakat Kurang Mampu/keluarga miskin		35.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		150 Orang	150 Orang	25.952.000,00						170 Orang	35.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						25.952.000,00							35.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		150 Orang	12500 Orang	25.952.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penguran gan Kesenjangan Sosial		170 Orang	35.000.000,00	Dinas Sosial
55.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**48.012.700,00**							**65.000.000,00**	
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	-		-	65 persen	48.012.700,00						-	65.000.000,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						48.012.700,00					Korban Bencana		65.000.000,00	
		-						48.012.700,00					Korban Bencana		65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	48.012.700,00						-	65.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						48.012.700,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	19 Orang	48.012.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		-	65.000.000,00	Dinas Sosial
56.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**145.674.700,00**							**155.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan						***145.674.700,00***							***155.000.000,00***	
			999. Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	145.674.700,00						100 %	155.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						145.674.700,00					Taman Makam Pahlawan (TMP)		155.000.000,00	
		Terlaksananya tata kelola Taman Makam Pahlawan						145.674.700,00					Taman Makam Pahlawan (TMP)		155.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100 Makam		100 Makam	100 Makam	145.674.700,00						100 Makam	155.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						145.674.700,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	100 Makam		100 Makam	17 Makam	145.674.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		100 Makam	155.000.000,00	Dinas Sosial
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						**4.658.191.253,00**							**4.556.786.828,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.650.691.253,00**							**4.471.786.828,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.650.691.253,00**							**4.471.786.828,00**	
57.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.022.985.789,00**							**4.091.786.828,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***3.685.501.221,00***							***3.447.786.828,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.685.501.221,00						100 %	3.447.786.828,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.685.501.221,00					ASN dan PPPTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.447.786.828,00	
		Jumlah dokumen yang tersedia						3.685.501.221,00					ASN dan PPPTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		3.447.786.828,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	3.685.501.221,00						100 Orang/bulan	3.447.786.828,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.685.501.221,00							3.447.786.828,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.685.501.221,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang/bulan	3.447.786.828,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	-		-	100 persen	337.484.568,00						-	644.000.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.733.300,00					ASN dan PPPTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		65.000.000,00	
		-						10.733.300,00					ASN dan PPPTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	10.733.300,00						-	65.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.733.300,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	10.733.300,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	65.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.690.084,00					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang		195.000.000,00	
		-						46.690.084,00					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang		195.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	12.806.000,00						-	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	33.884.084,00						-	150.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.884.084,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	33.884.084,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.806.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	15 Laporan	12.806.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	45.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						234.961.184,00					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang		289.000.000,00	
		-						234.961.184,00					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang		289.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	34.021.184,00						-	39.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	200.940.000,00						-	250.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.021.184,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	34.021.184,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	39.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.940.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	200.940.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.100.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang		95.000.000,00	
		-						45.100.000,00					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang		95.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	45.100.000,00						-	95.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.100.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	45.100.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	95.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
58.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**372.523.064,00**							**90.000.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja						***372.523.064,00***							***90.000.000,00***	
			1.Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	50.00 %		31.00 %	35.00 %	372.523.064,00						40.00 %	90.000.000,00	
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						319.627.464,00					Angkatan kerja		55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina						319.627.464,00					Angkatan kerja		55.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	319.627.464,00						5 Lembaga	55.000.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						319.627.464,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga		5 Lembaga	12 Lembaga	319.627.464,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		5 Lembaga	55.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						52.895.600,00					Angkatan kerja		35.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan kerja						52.895.600,00					Angkatan kerja		35.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	52.895.600,00						-	35.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						52.895.600,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	30 Orang	52.895.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
59.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**10.182.400,00**							**45.000.000,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***10.182.400,00***							***45.000.000,00***	
			970.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	70.00 Persentase		58.00 Persentase	61.00 Persentase	10.182.400,00						64.00 Persentase	45.000.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						10.182.400,00					Angkatan kerja		45.000.000,00	
		Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)						10.182.400,00					Angkatan kerja		45.000.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.182.400,00						100 Orang	45.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						10.182.400,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.182.400,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Orang	45.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
60.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**245.000.000,00**							**245.000.000,00**	
		Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan antara pengusaha dan pekerja						***245.000.000,00***							***245.000.000,00***	
			999. Persentase Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Berhasil Diselesaikan Secara Mediasi/Bipartit	100 %		100 %	100 %	245.000.000,00						100 %	245.000.000,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						245.000.000,00					tenaga kerja sawit		245.000.000,00	
		Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial yang berhasil diselesaikan secara mediasi/bipartit						245.000.000,00					tenaga kerja sawit		245.000.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1501 Orang		1501 Orang	1501 Orang	245.000.000,00						1501 Orang	245.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						245.000.000,00							245.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1501 Orang		1501 Orang	1100 Orang	245.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1501 Orang	245.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.500.000,00**							**85.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**7.500.000,00**							**85.000.000,00**	
61.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**7.500.000,00**							**85.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi						***7.500.000,00***							***85.000.000,00***	
			1093.Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	45.93 Persentase		25.74 Persentase	30.83 Persentase	7.500.000,00						35.67 Persentase	85.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						7.500.000,00					Masyarakat di wilayah sekitar KTM RAwa Pitu		85.000.000,00	
		Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina						7.500.000,00					Masyarakat di wilayah sekitar KTM RAwa Pitu		85.000.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga		30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	7.500.000,00						30 Kepala Keluarga	85.000.000,00	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						7.500.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga		30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	7.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		30 Kepala Keluarga	85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Dinas Lingkungan Hidup						**7.341.759.219,00**							**7.429.050.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.341.759.219,00**							**7.429.050.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**7.341.759.219,00**							**7.429.050.000,00**	
62.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.546.418.819,00**							**4.562.650.000,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***4.546.418.819,00***							***4.560.650.000,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.546.418.819,00						100 %	4.560.650.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		12.000.000,00	
		Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu						8.500.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		12 Laporan	Laporan	8.500.000,00						Laporan	12.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.500.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		Laporan	12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.300.708.094,00					ASN/P3K Perangkat Daerah		4.287.900.000,00	
		Persentase realisasi anggaran						4.300.708.094,00					ASN/P3K Perangkat Daerah		4.287.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	265.975.000,00						1 Dokumen	237.900.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.034.733.094,00						30 Orang/bulan	4.050.000.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.034.733.094,00							4.050.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.034.733.094,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		30 Orang/bulan	4.050.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						265.975.000,00							237.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	265.975.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		1 Dokumen	237.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						54.746.150,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		60.550.000,00	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran						54.746.150,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		60.550.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.080.000,00						12 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.021.000,00						12 Laporan	33.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.705.000,00						4 Paket	7.050.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.721.900,00						1 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.500.000,00						4 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	1.718.250,00						1 Paket	2.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.721.900,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.721.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		1 Paket	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.500.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	7.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Paket	9.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.718.250,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		2 Paket	1 Paket	1.718.250,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		1 Paket	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.705.000,00							7.050.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	4.705.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Paket	7.050.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.080.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.080.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		12 Laporan	7.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						33.021.000,00							33.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.021.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		12 Laporan	33.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142.844.575,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		158.200.000,00	
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						142.844.575,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		158.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	73.384.575,00						4 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	62.760.000,00						4 Laporan	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.700.000,00						4 Laporan	8.200.000,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						73.384.575,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	73.384.575,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Laporan	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.700.000,00							8.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	6.700.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Laporan	8.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.760.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	62.760.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		4 Laporan	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.620.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		44.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik						39.620.000,00					Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang		44.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	12.500.000,00						0 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	27.120.000,00						10 Unit	24.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.120.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	12 Unit	27.120.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		10 Unit	24.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.500.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	12.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		0 Unit	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
63.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**138.608.900,00**							**145.000.000,00**	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						***138.608.900,00***							***145.000.000,00***	
			999.Prosentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	64.50 %		63.85 %	64.05 %	138.608.900,00						64.25 %	145.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						138.608.900,00					Kualitas Air, Udara dan Lahan		145.000.000,00	
		Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan						138.608.900,00					Kualitas Air, Udara dan Lahan		145.000.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 Lokasi		4 Lokasi	5 Lokasi	125.000.000,00						5 Lokasi	126.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.996.800,00						1 Dokumen	12.500.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.612.100,00						2 Dokumen	6.500.000,00	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						7.996.800,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.996.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		1 Dokumen	12.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						125.000.000,00							126.000.000,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 Lokasi		4 Lokasi	5 Lokasi	125.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Panca Mulia || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Astra Ksetra || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Agung || Desa Banjar Agung || 1 || Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Margo || Desa Agung Dalem || 1	Pajak Air Tanah	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		5 Lokasi	126.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						5.612.100,00							6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.612.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		2 Dokumen	6.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
64.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**388.900.000,00**							**420.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***388.900.000,00***							***420.000.000,00***	
			999.Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %		100 %	100 %	388.900.000,00						100 %	420.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						388.900.000,00					Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Tulang Bawang		420.000.000,00	
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						388.900.000,00					Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Tulang Bawang		420.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Ha		20 Ha	20 Ha	388.900.000,00						20 Ha	420.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						388.900.000,00							420.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Ha		20 Ha	10 Ha	388.900.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		20 Ha	420.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
65.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**24.481.500,00**							**21.400.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						***24.481.500,00***							***21.400.000,00***	
			999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	95 %		75 %	80 %	24.481.500,00						85 %	21.400.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						24.481.500,00					Pelaku Usaha / kegiatan Kab. Tulang Bawang		21.400.000,00	
		Cakupan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengeloalaan Lingkungan Hidup (PPLH)						24.481.500,00					Pelaku Usaha / kegiatan Kab. Tulang Bawang		21.400.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	15.450.000,00						20 Badan Usaha	17.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	9.031.500,00						10 Dokumen	4.400.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						9.031.500,00							4.400.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	9.031.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		10 Dokumen	4.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						15.450.000,00								17.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha		20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	15.450.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		20 Badan Usaha	17.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
66.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**7.000.000,00**							**10.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						***7.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			999. Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	76.00 %		35.00 %	45.00 %	7.000.000,00						55.00 %	10.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.000.000,00					Masyarakat Kab. Tulang Bawang		10.000.000,00	
		Cakupan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)						7.000.000,00					Masyarakat Kab. Tulang Bawang		10.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas		2 Entitas	3 Entitas	7.000.000,00						3 Entitas	10.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						7.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas		2 Entitas	2 Entitas	7.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		3 Entitas	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
67.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**2.236.350.000,00**							**2.270.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola persampahan						***2.236.350.000,00***							***2.270.000.000,00***	
			999. Persentase jumlah sampah yang tertangani	30.50 %		19.81 %	23.60 %	2.236.350.000,00						26.71 %	2.270.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						2.236.350.000,00					Masyarakat Kab. Tulang Bawang		2.270.000.000,00	
		Persentase Penangan Sampah						2.236.350.000,00					Masyarakat Kab. Tulang Bawang		2.270.000.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7900 Ton		7500 Ton	7600 Ton	210.800.000,00						7700 Ton	220.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	7900 Ton		7500 Ton	7600 Ton	2.025.550.000,00						7700 Ton	2.050.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						2.025.550.000,00							2.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	7900 Ton		7500 Ton	8030 Ton	2.025.550.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Agung || Desa Tunggal Warga || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		7700 Ton	2.050.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						210.800.000,00							220.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7900 Ton		7500 Ton	8030 Ton	210.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Panca Mulia || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		7700 Ton	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**5.780.962.887,00**							**6.131.208.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.780.962.887,00**							**6.131.208.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.780.962.887,00**							**6.131.208.000,00**	
68.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.726.507.187,00**							**6.069.515.000,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***5.726.507.187,00***							***6.069.515.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	5.726.507.187,00						100 %	6.069.515.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.319.000,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		21.250.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						19.319.000,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		21.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.319.000,00						1 Dokumen	21.250.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.319.000,00							21.250.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.319.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	21.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.301.337.052,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		4.366.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas penatausahaan keuangan						4.301.337.052,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		4.366.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.301.337.052,00						12 Orang/bulan	4.366.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.301.337.052,00							4.366.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.301.337.052,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang/bulan	4.366.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						84.525.000,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		85.000.000,00	
		meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian						84.525.000,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		85.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	84.525.000,00						1 Unit	85.000.000,00	
	2.12.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						84.525.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	84.525.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Unit	85.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						708.378.335,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		902.425.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						708.378.335,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		902.425.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.240.000,00						1 Paket	4.664.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	700.702.000,00						1 Paket	893.982.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.436.335,00						1 Paket	3.779.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.240.000,00							4.664.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	4.664.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						700.702.000,00							893.982.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	700.702.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	893.982.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.436.335,00							3.779.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.436.335,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	3.779.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						476.337.800,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		552.951.000,00	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						476.337.800,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		552.951.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.244.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	377.093.800,00						1 Laporan	452.951.000,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.244.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.244.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						377.093.800,00							452.951.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	377.093.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	452.951.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						136.610.000,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		141.889.000,00	
		Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah						136.610.000,00					ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tulang Bawang		141.889.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	78.560.000,00						4 Unit	81.889.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		5 Unit	5 Unit	58.050.000,00						6 Unit	60.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						78.560.000,00							81.889.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	78.560.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Unit	81.889.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.050.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		5 Unit	10 Unit	58.050.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		6 Unit	60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
69.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**24.700.800,00**							**28.982.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***24.700.800,00***							***28.982.000,00***	
			999.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	100 %		100 %	100 %	24.700.800,00						100 %	28.982.000,00	
			999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	72.63 %		68.81 %	69.21 %	24.700.800,00						70.74 %	28.982.000,00	
		Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk						24.700.800,00					Masyarakat Tulang Bawang		28.982.000,00	
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	3 Orang		3 Orang	3 Orang	13.620.300,00						3 Orang	14.982.000,00	
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk						13.620.300,00							14.982.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	3 Orang		3 Orang	442320 Orang	13.620.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Orang	14.982.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						24.700.800,00					Masyarakat Tulang Bawang		28.982.000,00	
		Penerbitan dokumen pendaftaran penduduk						24.700.800,00					Masyarakat Tulang Bawang		28.982.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	-	11.080.500,00						-	14.000.000,00	
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						11.080.500,00							14.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	1 Laporan	11.080.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	14.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**13.653.200,00**							**15.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***13.653.200,00***							***15.000.000,00***	
			999.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	13.653.200,00						100 Persentase	15.000.000,00	
			999.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	13.653.200,00						100 Persentase	15.000.000,00	
			999.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	13.653.200,00						100 Persentase	15.000.000,00	
			999.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	13.653.200,00						100 Persentase	15.000.000,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						13.653.200,00					Masyarakat Tulang Bawang		15.000.000,00	
		Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil						13.653.200,00					Masyarakat Tulang Bawang		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	-	13.653.200,00						-	15.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						13.653.200,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	1 Laporan	13.653.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
71.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**16.101.700,00**							**17.711.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***5.892.400,00***							***6.481.000,00***	
			999. Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %		100 %	100 %	5.892.400,00						100 %	6.481.000,00	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						5.892.400,00					Masyarakat Tulang Bawang		6.481.000,00	
		penyediaan data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan						5.892.400,00					Masyarakat Tulang Bawang		6.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.892.400,00						1 Laporan	6.481.000,00	
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						5.892.400,00							6.481.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.892.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	6.481.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	-		-	100 Persen	10.209.300,00						-	11.230.000,00	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10.209.300,00					Masyarakat Tulang Bawang		11.230.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						10.209.300,00					Masyarakat Tulang Bawang		11.230.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	-	10.209.300,00						-	11.230.000,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10.209.300,00							11.230.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		-	1 Laporan	10.209.300,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	11.230.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung						**8.155.138.927,00**							**7.543.497.243,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.155.138.927,00**							**7.543.497.243,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**8.155.138.927,00**							**7.543.497.243,00**	
72.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.770.138.927,00**							**4.047.497.243,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***4.770.138.927,00***							***4.047.497.243,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.770.138.927,00						100 %	4.047.497.243,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.302.618.420,00					Pegawai DPMK		3.556.600.711,00	
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN						4.302.618.420,00					Pegawai DPMK		3.556.600.711,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.302.618.420,00						29 Orang/bulan	3.556.600.711,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.302.618.420,00							3.556.600.711,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.302.618.420,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		29 Orang/bulan	3.556.600.711,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						467.520.507,00					DPMK		490.896.532,00	
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjan Urusan Perangkat Daerah						467.520.507,00					DPMK		490.896.532,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan		3 Laporan	5 Laporan	467.520.507,00						7 Laporan	490.896.532,00	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						467.520.507,00							490.896.532,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	467.520.507,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		7 Laporan	490.896.532,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
73.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**450.000.000,00**							**472.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penataan desa						***450.000.000,00***							***472.500.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Penataan Kampung	100.00 %		20.00 %	35.00 %	450.000.000,00						50.00 %	472.500.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						450.000.000,00					Tim Penggerak PKK, TNI / KODIM 0426 TULANG BAWANG dan DPMK		472.500.000,00	
		Persentase fasilitasi penataan desa						450.000.000,00					Tim Penggerak PKK, TNI / KODIM 0426 TULANG BAWANG dan DPMK		472.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	100 Unit		20 Unit	35 Unit	450.000.000,00						50 Unit	472.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						450.000.000,00							472.500.000,00	
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	100 Unit		20 Unit	1 Unit	450.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		50 Unit	472.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
74.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**2.175.000.000,00**							**2.225.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***2.175.000.000,00***							***2.225.500.000,00***	
			999.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Persentase		55 Persentase	60 Persentase	2.175.000.000,00						65 Persentase	2.225.500.000,00	
			999.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	90.00 Persentase		70.00 Persentase	75.00 Persentase	2.175.000.000,00						80.00 Persentase	2.225.500.000,00	
		Cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung/kelurahan yang baik						2.175.000.000,00					Masyarakat		2.225.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.470.000.000,00						12 Dokumen	1.543.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	40.000.000,00						15 Dokumen	42.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						1.470.000.000,00							1.543.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.470.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		12 Dokumen	1.543.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						40.000.000,00							42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	15 Dokumen		15 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		15 Dokumen	42.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						2.175.000.000,00					Masyarakat		2.225.500.000,00	
		Cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung/kelurahan yang baik						2.175.000.000,00					Masyarakat		2.225.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	-	665.000.000,00						-	640.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						665.000.000,00							640.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-		-	32 Laporan	665.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	640.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
75.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**760.000.000,00**							**798.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						***760.000.000,00***							***798.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	50 Persentase		30 Persentase	35 Persentase	760.000.000,00						40 Persentase	798.000.000,00	
			999.Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	70 %		45 %	55 %	760.000.000,00						60 %	798.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						760.000.000,00					Tim Penggerak PKK, TNI / KODIM 0426 TULANG BAWANG dan DPMK		798.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						760.000.000,00					Tim Penggerak PKK, TNI / KODIM 0426 TULANG BAWANG dan DPMK		798.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	760.000.000,00						-	798.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						760.000.000,00							798.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-		-	3 Dokumen	760.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	798.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**9.278.091.114,00**							**10.637.438.314,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.278.091.114,00**							**10.637.438.314,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**699.300.500,00**							**734.265.525,00**	
76.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**171.426.500,00**							**179.997.825,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***171.426.500,00***							***179.997.825,00***	
			1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	75 %		63 %	66 %	171.426.500,00						69 %	179.997.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	62.00 %		54.00 %	52,15 %	171.426.500,00						58.00 %	179.997.825,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						14.423.600,00					Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang		15.144.780,00	
		-						14.423.600,00					Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang		15.144.780,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	14.423.600,00						-	15.144.780,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						14.423.600,00							15.144.780,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	28 Lembaga	14.423.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	15.144.780,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						157.002.900,00					Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang		164.853.045,00	
		Jumlah Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang yang dibina						157.002.900,00					Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang		164.853.045,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	157.002.900,00						-	164.853.045,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						157.002.900,00							164.853.045,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	3 Lembaga	157.002.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	164.853.045,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
77.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**294.593.000,00**							**309.322.650,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***294.593.000,00***							***309.322.650,00***	
			2.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	294.593.000,00						100 %	309.322.650,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						102.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		107.100.000,00	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan						102.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		107.100.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	102.000.000,00						-	107.100.000,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						102.000.000,00							107.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	3 Kegiatan	102.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	107.100.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						86.163.000,00					Perempuan Korban Kekerasan		90.471.150,00	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif						86.163.000,00					Perempuan Korban Kekerasan		90.471.150,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	86.163.000,00						-	90.471.150,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						86.163.000,00							90.471.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	12 Orang	86.163.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	90.471.150,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						106.430.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		111.751.500,00	
		umlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek						106.430.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		111.751.500,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	69.360.000,00						-	72.828.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	37.070.000,00						-	38.923.500,00	
	2.08.03.2.03.0012	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota						69.360.000,00							72.828.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Laporan	69.360.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	72.828.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						37.070.000,00							38.923.500,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lembaga	37.070.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	38.923.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
78.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**17.263.000,00**							**18.126.150,00**	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						***17.263.000,00***							***18.126.150,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999. Persentase keluarga yang mengakses layanan pembelajaran di PUSPAGA	17 %		9 %	11 %	17.263.000,00						13 %	18.126.150,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						17.263.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		18.126.150,00	
		Persentase keluarga yang mengakses layanan pembelajaran di PUSPAGA						17.263.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		18.126.150,00	
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.263.000,00						1 Dokumen	18.126.150,00	
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						17.263.000,00							18.126.150,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.263.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	18.126.150,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
79.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**65.541.000,00**							**68.818.050,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***65.541.000,00***							***68.818.050,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	72.00 Indeks		62.50 Indeks	64.50 Indeks	65.541.000,00						67.00 Indeks	68.818.050,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						65.541.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		68.818.050,00	
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)						65.541.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		68.818.050,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	65.541.000,00						-	68.818.050,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						65.541.000,00							68.818.050,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Lembaga	65.541.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	68.818.050,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
80.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**150.477.000,00**							**158.000.850,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						***150.477.000,00***							***158.000.850,00***	
			999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	80.00 Indeks		69.00 Indeks	72.00 Indeks	150.477.000,00						75.00 Indeks	158.000.850,00	
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	70.00 %		42.00 %	48.00 %	150.477.000,00						55.00 %	158.000.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.477.000,00					Anak Korban Kekerasan		158.000.850,00	
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif						150.477.000,00					Anak Korban Kekerasan		158.000.850,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	150.477.000,00						-	158.000.850,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						150.477.000,00							158.000.850,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	18 Orang	150.477.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	158.000.850,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**8.578.790.614,00**							**9.903.172.789,00**	
81.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.567.963.739,00**							**6.741.804.570,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***5.136.400.839,00***							***6.288.663.525,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	5.136.400.839,00						100 %	6.288.663.525,00	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.136.400.839,00					ASN Dinas PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		6.288.663.525,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase realisasi anggaran						5.136.400.839,00					ASN Dinas PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		6.288.663.525,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	5.136.400.839,00						44 Orang/bulan	6.288.663.525,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.136.400.839,00							6.288.663.525,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	42 Orang/bulan	5.136.400.839,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		44 Orang/bulan	6.288.663.525,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 persen	354.397.900,00						-	372.117.795,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 persen	77.165.000,00						-	81.023.250,00	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.047.600,00					DINAS PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		12.649.980,00	
		-						12.047.600,00					DINAS PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		12.649.980,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	12.047.600,00						-	12.649.980,00	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.047.600,00							12.649.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	12.047.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	12.649.980,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						342.350.300,00					DINAS PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		359.467.815,00	
		-						342.350.300,00					DINAS PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		359.467.815,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	60.400.300,00						-	63.420.315,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	281.950.000,00						-	296.047.500,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.400.300,00							63.420.315,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	60.400.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	63.420.315,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						281.950.000,00							296.047.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	281.950.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	296.047.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.165.000,00					DINAS PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		81.023.250,00	
		-						77.165.000,00					DINAS PPKBPPPA Kabupaten Tulang Bawang		81.023.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	77.165.000,00						-	81.023.250,00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						77.165.000,00							81.023.250,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	9 Unit	77.165.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	81.023.250,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
82.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**216.411.875,00**							**227.232.469,00**	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						***216.411.875,00***							***227.232.469,00***	
			999.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	12.00 Angka		16.00 Angka	15.00 Angka	216.411.875,00						14.00 Angka	227.232.469,00	
			999.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2.10 Angka		2.02 Angka	2.05 Angka	216.411.875,00						2.07 Angka	227.232.469,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						216.411.875,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		227.232.469,00	
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)						216.411.875,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		227.232.469,00	
			Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	-	52.500.000,00						-	55.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	-	100.279.875,00						-	105.293.869,00	
			Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	-	63.632.000,00						-	66.813.600,00	
	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas						52.500.000,00							55.125.000,00	
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	151 Kampung KB	52.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	55.125.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.2.01.0052	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).						63.632.000,00							66.813.600,00	
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	15 Dokumen	63.632.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	66.813.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.						100.279.875,00							105.293.869,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	1 Laporan / Dokumen	100.279.875,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	105.293.869,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
83.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**2.794.415.000,00**							**2.934.135.750,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***2.794.415.000,00***							***2.934.135.750,00***	
			999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	72.00 Persentase		66.50 Persentase	68.00 Persentase	2.794.415.000,00						69.50 Persentase	2.934.135.750,00	
			999.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.50 %		9.80 %	9.00 %	2.794.415.000,00						8.50 %	2.934.135.750,00	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						2.308.800.000,00					Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB		2.424.240.000,00	
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)						2.308.800.000,00					Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB		2.424.240.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	2.308.800.000,00						15 Laporan	2.424.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						2.308.800.000,00							2.424.240.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	2.308.800.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		15 Laporan	2.424.240.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						485.615.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		509.895.750,00	
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)						485.615.000,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		509.895.750,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	485.615.000,00						-	509.895.750,00	
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						485.615.000,00							509.895.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	33 Laporan	485.615.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	509.895.750,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Dinas Perhubungan						**9.863.817.098,00**							**9.812.683.067,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.863.817.098,00**							**9.812.683.067,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**9.863.817.098,00**							**9.812.683.067,00**	
84.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.983.743.378,00**							**4.813.200.847,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***4.983.743.378,00***							***4.786.200.847,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.983.743.378,00						100 %	4.786.200.847,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					Pegawai		25.000.000,00	
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan terdokumentasi						20.000.000,00					Pegawai		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		12 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.533.098.198,00					Pegawai		4.387.200.847,00	
		Dokumen administrasi keuangan yang tertata dan terdokumentasi						4.533.098.198,00					Pegawai		4.387.200.847,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	793.325.000,00						12 Dokumen	793.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		32 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.739.773.198,00						36 Orang/bulan	3.593.875.847,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.739.773.198,00							3.593.875.847,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		32 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.739.773.198,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		36 Orang/bulan	3.593.875.847,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						793.325.000,00							793.325.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	793.325.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		12 Dokumen	793.325.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.765.200,00					Pegawai		12.000.000,00	
		Dokumen administrasi kepegawaian yang lengkap dan mutakhir						8.765.200,00					Pegawai		12.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	8.765.200,00						1 Orang	12.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						8.765.200,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	8.765.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Orang	12.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						86.268.600,00					Pegawai		94.000.000,00	
		Dokumen administrasi umum dan surat-menyurat yang terdokumentasi						86.268.600,00					Pegawai		94.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	30.888.000,00						6 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.749.700,00						1 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	21.200.100,00						4 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.430.800,00						1 Paket	2.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.749.700,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.749.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Paket	2.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.200.100,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	9 Paket	21.200.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		4 Paket	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.430.800,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.430.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Paket	2.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.888.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		5 Laporan	22 Laporan	30.888.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		6 Laporan	35.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190.230.680,00					Pegawai		145.000.000,00	
		Layanan jasa penunjang perangkat daerah yang tersedia sesuai kebutuhan						190.230.680,00					Pegawai		145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.070.680,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.160.000,00						12 Laporan	95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						89.070.680,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.070.680,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						101.160.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.160.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		12 Laporan	95.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal						145.380.700,00					Pegawai		150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	141.520.700,00						15 Unit	140.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						141.520.700,00							140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	141.520.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		15 Unit	140.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145.380.700,00					Pegawai		150.000.000,00	
		Barang milik daerah dalam kondisi baik dan berfungsi optimal						145.380.700,00					Pegawai		150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	3.860.000,00						-	10.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.860.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	6 Unit	3.860.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		-	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
85.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**4.849.482.220,00**							**4.959.482.220,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***4.849.482.220,00***							***4.959.482.220,00***	
			999.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	65.32 Persentase		61.76 Persentase	62.67 Persentase	4.849.482.220,00						63.21 Persentase	4.959.482.220,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						5.500.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		Dokumen rencana induk jaringan jalan yang tersusun						5.500.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						5.500.000,00							10.000.000,00	
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						4.424.446.220,00					Masyarakat		4.639.482.220,00	
		Perlengkapan jalan terpasang di lokasi prioritas jalan kabupaten/kota						4.424.446.220,00					Masyarakat		4.639.482.220,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1250 Unit		1033 Unit	1100 Unit	4.424.446.220,00						1150 Unit	4.639.482.220,00	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						4.424.446.220,00							4.639.482.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1250 Unit		1033 Unit	1100 Unit	4.424.446.220,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1150 Unit	4.639.482.220,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						100.000.000,00					Masyarakat		150.000.000,00	
		Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						100.000.000,00					Masyarakat		150.000.000,00	
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Agung || Desa Banjar Agung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						95.000.000,00					Masyarakat		80.000.000,00	
		Kendaraan bermotor yang telah diuji dan laik jalan						95.000.000,00					Masyarakat		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	25.000.000,00						8 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2300 Unit		2300 Unit	2300 Unit	70.000.000,00						2300 Unit	60.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						70.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2300 Unit		2300 Unit	2300 Unit	70.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		2300 Unit	60.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						25.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	25.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Opsen PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		8 Unit	20.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						224.536.000,00					Masyarakat		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pelaksanaan pengaturan di lapangan						224.536.000,00					Masyarakat		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.536.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						224.536.000,00							80.000.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.536.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		12 Laporan	80.000.000,00	Dinas Perhubungan
86.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**30.591.500,00**							**40.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan trasportasi perairan						***10.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			999. Persentase angkutan sungai yang telah dilakukan penertiban dan pembinaan operasional	80.00 %		60.00 %	65.00 %	10.000.000,00						70.00 %	15.000.000,00	
			Persentase angkutan sungai yang telah dilakukan penertiban dan pembinaan operasional	-		-	65 Persen	20.591.500,00						-	25.000.000,00	
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota						20.591.500,00					Masyarakat		25.000.000,00	
		-						20.591.500,00					Masyarakat		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.591.500,00						-	25.000.000,00	
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.591.500,00								25.000.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	20.591.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		-	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						10.000.000,00					Masyarakat		15.000.000,00	
		Jumlah Pelabuhan Sungai yang Beroperasi						10.000.000,00					Masyarakat		15.000.000,00	
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau						10.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		-	15.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**7.137.896.094,00**							**6.780.739.467,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.137.896.094,00**							**6.780.739.467,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6.956.401.694,00**							**6.599.245.067,00**	
87.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.780.842.194,00**							**4.423.685.567,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***4.780.842.194,00***							***4.423.685.567,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.780.842.194,00						100 %	4.423.685.567,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					OPD		5.000.000,00	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tepat waktu						5.000.000,00					OPD		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	5.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.127.243.794,00					OPD		3.770.087.167,00	
		Persentase Realisasi Anggaran						4.127.243.794,00					OPD		3.770.087.167,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	191.425.000,00						12 Dokumen	191.425.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	4.000.000,00						16 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.931.818.794,00						30 Orang/bulan	3.574.662.167,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.931.818.794,00							3.574.662.167,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.931.818.794,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		30 Orang/bulan	3.574.662.167,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						191.425.000,00							191.425.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	191.425.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	191.425.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	4.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		16 Laporan	4.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						572.908.400,00					OPD		572.908.400,00	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran						572.908.400,00					OPD		572.908.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.630.800,00						1 Laporan	8.630.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	114.000.000,00						12 Paket	114.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	450.277.600,00						12 Paket	450.277.600,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						114.000.000,00							114.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	114.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	114.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						450.277.600,00							450.277.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	450.277.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	450.277.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.630.800,00							8.630.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.630.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	8.630.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75.690.000,00					OPD dan Pemda		75.690.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di fasilitasi						75.690.000,00					OPD dan Pemda		75.690.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	75.690.000,00						8 Unit	75.690.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						75.690.000,00							75.690.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	4 Unit	75.690.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Unit	75.690.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
88.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.684.407.300,00**							**1.684.407.300,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***1.684.407.300,00***							***1.684.407.300,00***	
			999.Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	90.00 %		70.00 %	75.00 %	1.684.407.300,00						80.00 %	1.684.407.300,00	
		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.684.407.300,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		1.684.407.300,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.313.582.900,00						3 Laporan	1.313.582.900,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						1.313.582.900,00							1.313.582.900,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.313.582.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Laporan	1.313.582.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.684.407.300,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		1.684.407.300,00	
		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.684.407.300,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		1.684.407.300,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	106.581.200,00						-	106.581.200,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	231.576.000,00						-	231.576.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	1.960.000,00						-	1.960.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	30.707.200,00						-	30.707.200,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						30.707.200,00							30.707.200,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	80 %	30.707.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	30.707.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						106.581.200,00							106.581.200,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	2000 Orang	106.581.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	106.581.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						1.960.000,00							1.960.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	1 Rekomendasi	1.960.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	1.960.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						231.576.000,00							231.576.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	365 Konten	231.576.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	231.576.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
89.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**491.152.200,00**							**491.152.200,00**	
		Meningkatnya kualitas pegelolaan apikasi informatika						***491.152.200,00***							***491.152.200,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif	100.00 %		75.00 %	85.00 %	491.152.200,00						90.00 %	491.152.200,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						491.152.200,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		491.152.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif						491.152.200,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		491.152.200,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.466.400,00						1 Dokumen	5.466.400,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						5.466.400,00							5.466.400,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.466.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	5.466.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Website Aktif						491.152.200,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		491.152.200,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	26.733.100,00						-	26.733.100,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	171.652.700,00						-	171.652.700,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	260.000.000,00						-	260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	27.300.000,00						-	27.300.000,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						260.000.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	1 Titik	260.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	260.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						26.733.100,00							26.733.100,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	26.733.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	26.733.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						171.652.700,00							171.652.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	3 Layanan	171.652.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	171.652.700,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						27.300.000,00							27.300.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	1 Titik	27.300.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	27.300.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**72.708.400,00**							**72.708.400,00**	
90.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**72.708.400,00**							**72.708.400,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***72.708.400,00***							***72.708.400,00***	
			999.Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	100 %		100 %	100 %	72.708.400,00						100 %	72.708.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan						72.708.400,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		72.708.400,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.192.000,00						1 Laporan	9.192.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	80 %		80 %	80 %	6.948.400,00						80 %	6.948.400,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						6.948.400,00							6.948.400,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	80 %		80 %	80 %	6.948.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		80 %	6.948.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						9.192.000,00							9.192.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.192.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	9.192.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						72.708.400,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		72.708.400,00	
		Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar serta cakupan ketersediaan data dasar pembangunan						72.708.400,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		72.708.400,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	56.568.000,00						-	56.568.000,00	
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						56.568.000,00							56.568.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	65 %	56.568.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	56.568.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**108.786.000,00**							**108.786.000,00**	
91.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**108.786.000,00**							**108.786.000,00**	
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah						***108.786.000,00***							***108.786.000,00***	
			999. Tingkat keamanan informasi pemerintah	85.00 %		60.00 %	70.00 %	108.786.000,00						75.00 %	108.786.000,00	
		Persentase Data dan Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah yang di amankan sesuai dengan prinsip manajemen keamanan informasi						108.786.000,00					Pemerintah Daerah		108.786.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.665.900,00						1 Laporan	20.665.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						20.665.900,00							20.665.900,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.665.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	20.665.900,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						108.786.000,00					Pemerintah Daerah		108.786.000,00	
		Persentase Data dan Sistem Informasi milik Pemerintah Daerah yang di amankan sesuai dengan prinsip manajemen keamanan informasi						108.786.000,00					Pemerintah Daerah		108.786.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	711.000,00						-	711.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	87.409.100,00						-	87.409.100,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						711.000,00							711.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	711.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	711.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						87.409.100,00							87.409.100,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	12 Laporan	87.409.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	87.409.100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan						**9.031.109.676,00**							**8.997.777.776,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.478.075.876,00**							**8.330.777.776,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**8.478.075.876,00**							**8.330.777.776,00**	
92.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.366.075.676,00**							**8.208.777.776,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***8.366.075.676,00***							***8.196.777.776,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	8.366.075.676,00						100 %	8.196.777.776,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.086.800,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		12.000.000,00	
		Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD						44.086.800,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	44.086.800,00						100 Laporan	12.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						44.086.800,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	44.086.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	12.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.757.062.776,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		7.617.427.776,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						7.757.062.776,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		7.617.427.776,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	1.516.635.000,00						100 Dokumen	1.377.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	6.240.427.776,00						100 Orang/bulan	6.240.427.776,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						7.757.062.776,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		7.617.427.776,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	1.516.635.000,00						100 Dokumen	1.377.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	6.240.427.776,00						100 Orang/bulan	6.240.427.776,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.240.427.776,00							6.240.427.776,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.240.427.776,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang/bulan	6.240.427.776,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.516.635.000,00							1.377.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	12 Dokumen	1.516.635.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	1.377.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						21.858.800,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		12.000.000,00	
		Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						21.858.800,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	21.858.800,00						100 Laporan	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						21.858.800,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan		100 Laporan	2 Laporan	21.858.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	12.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						292.500.100,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		157.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						292.500.100,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		157.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	119.624.000,00						100 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	43.367.800,00						100 Paket	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	77.654.900,00						100 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	51.853.400,00						100 Paket	35.000.000,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan						292.500.100,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		157.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	119.624.000,00						100 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	43.367.800,00						100 Paket	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	77.654.900,00						100 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	51.853.400,00						100 Paket	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						292.500.100,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		157.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	119.624.000,00						100 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	43.367.800,00						100 Paket	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	77.654.900,00						100 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	51.853.400,00						100 Paket	35.000.000,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						292.500.100,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		157.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	119.624.000,00						100 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	43.367.800,00						100 Paket	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	77.654.900,00						100 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	51.853.400,00						100 Paket	35.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						77.654.900,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	6 Paket	77.654.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	45.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						51.853.400,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	6 Paket	51.853.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	35.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						43.367.800,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	6 Paket	43.367.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	22.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						119.624.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	119.624.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	55.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92.956.000,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		135.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						92.956.000,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		135.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	92.956.000,00						100 Laporan	135.350.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						92.956.000,00					Masyarakat dan Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		135.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	92.956.000,00						100 Laporan	135.350.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						92.956.000,00							135.350.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	92.956.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	135.350.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.611.200,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		275.000.000,00	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						157.611.200,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		275.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	100 Unit	157.611.200,00						100 Unit	275.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						157.611.200,00					Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupetan Tulang Bawang		275.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	100 Unit	157.611.200,00						100 Unit	275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						157.611.200,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	8 Unit	157.611.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Unit	275.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
93.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**90.000.000,00**							**96.000.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas koperasi						***45.000.000,00***							***48.000.000,00***	
			999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	15.42 Persentase		14.34 Persentase	14.67 Persentase	45.000.000,00						14.99 Persentase	48.000.000,00	
		-						90.000.000,00					Koperasi aktif yang ada di Kabupaten Tulang Bawang		96.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	45.000.000,00						100 Unit Usaha	48.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						45.000.000,00							48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 Unit Usaha		100 Unit Usaha	213 Unit Usaha	45.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Unit Usaha	48.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00					Koperasi aktif yang ada di Kabupaten Tulang Bawang		96.000.000,00	
		-						90.000.000,00					Koperasi aktif yang ada di Kabupaten Tulang Bawang		96.000.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	45.000.000,00						-	48.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00							48.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	151 Unit Usaha	45.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	48.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
94.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**22.000.200,00**							**26.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***22.000.200,00***							***26.000.000,00***	
			999.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	18.00 Persentase		10.00 Persentase	12.00 Persentase	22.000.200,00						14.00 Persentase	26.000.000,00	
			999.Pertumbuhan Wirausaha	11 Persentase		7 Persentase	8 Persentase	22.000.200,00						9 Persentase	26.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						22.000.200,00					Pelaku Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Tulang Bawang		26.000.000,00	
		Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan						22.000.200,00					Pelaku Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Tulang Bawang		26.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	5.000.000,00						-	6.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	7.000.200,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	10.000.000,00						-	12.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						7.000.200,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	154 Orang	7.000.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	8.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	6.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	154 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	12.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**553.033.800,00**							**667.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**163.920.200,00**							**312.000.000,00**	
95.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**20.000.000,00**							**45.000.000,00**	
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	-		-	20,00 Persen	20.000.000,00						-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						20.000.000,00					Barang-barang kebutuhan pokok di tingkat pasar kabupaten Tulang Bawang		45.000.000,00	
		-						20.000.000,00					Barang-barang kebutuhan pokok di tingkat pasar kabupaten Tulang Bawang		45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	20.000.000,00						-	45.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						20.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	45.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
96.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**97.153.100,00**							**175.000.000,00**	
			Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-		-	89,00 Persen	97.153.100,00						-	175.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						97.153.100,00					Barang-barang kebutuhan pokok di tingkat pasar kabupaten Tulang Bawang		175.000.000,00	
		-						97.153.100,00					Barang-barang kebutuhan pokok di tingkat pasar kabupaten Tulang Bawang		175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	56.920.400,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	40.232.700,00						-	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						40.232.700,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	12 Laporan	40.232.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	110.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						56.920.400,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	8 Laporan	56.920.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	65.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
97.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**46.767.100,00**							**92.000.000,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						***46.767.100,00***							***92.000.000,00***	
			999. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95.00 %		80.00 %	85.00 %	46.767.100,00						90.00 %	92.000.000,00	
			999.Persentase penanganan pengaduan konsumen	100 %		100 %	100 %	46.767.100,00						100 %	92.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						46.767.100,00					Pelaku usaha dibidang metrologi legal		92.000.000,00	
		Jumlah Dokumen pelaksanaan metrologi legal, Berupa Tera, Tera Ulang						46.767.100,00					Pelaku usaha dibidang metrologi legal		92.000.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit		100 Unit	100 Unit	25.356.400,00						100 Unit	47.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang		100 Orang	100 Orang	21.410.700,00						100 Orang	45.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						25.356.400,00							47.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit		100 Unit	70 Unit	25.356.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Unit	47.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						21.410.700,00							45.000.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang		100 Orang	70 Orang	21.410.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Orang	45.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**389.113.600,00**							**355.000.000,00**	
98.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**389.113.600,00**							**355.000.000,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri						***389.113.600,00***							***355.000.000,00***	
			999. Proporsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Level Kabupaten	58 %		50 %	52 %	389.113.600,00						54 %	355.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						389.113.600,00					IKM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang		355.000.000,00	
		-						389.113.600,00					IKM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang		355.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	-	389.113.600,00						-	355.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						389.113.600,00							355.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-		-	1 Dokumen	389.113.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	355.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**6.478.628.951,00**							**5.850.197.644,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.478.628.951,00**							**5.850.197.644,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6.478.628.951,00**							**5.850.197.644,00**	
99.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.032.491.851,00**							**5.179.243.544,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***6.032.491.851,00***							***5.179.243.544,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	6.032.491.851,00						100 %	5.179.243.544,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.470.546.741,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		4.617.298.434,00	
		Persentase realisasi anggaran						5.470.546.741,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		4.617.298.434,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	397.550.090,00						12 Dokumen	397.550.090,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.500.000,00						12 Dokumen	34.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.038.496.651,00						12 Orang/bulan	4.185.248.344,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.038.496.651,00							4.185.248.344,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	68 Orang/bulan	5.038.496.651,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang/bulan	4.185.248.344,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						397.550.090,00							397.550.090,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	397.550.090,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	397.550.090,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						34.500.000,00							34.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	34.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.562.500,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		55.562.500,00	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran						55.562.500,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		55.562.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.922.000,00						1 Laporan	3.922.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	12.160.000,00						5 Laporan	12.160.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.967.100,00						6 Paket	6.967.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	32.513.400,00						2 Paket	32.513.400,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.967.100,00							6.967.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.967.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		6 Paket	6.967.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.513.400,00							32.513.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	32.513.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Paket	32.513.400,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.922.000,00							3.922.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.922.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	3.922.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.160.000,00							12.160.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	12.160.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		5 Laporan	12.160.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.999.810,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		358.999.810,00	
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						358.999.810,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		358.999.810,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	358.999.810,00						12 Laporan	358.999.810,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						358.999.810,00							358.999.810,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	358.999.810,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	358.999.810,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						147.382.800,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		147.382.800,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik						147.382.800,00					Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah		147.382.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	147.382.800,00						5 Unit	147.382.800,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						147.382.800,00							147.382.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	147.382.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		5 Unit	147.382.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
100.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**252.080.600,00**							**476.897.600,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						***252.080.600,00***							***476.897.600,00***	
			999. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	10.45 %		6.34 %	7.37 %	252.080.600,00						8.25 %	476.897.600,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						252.080.600,00					Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		476.897.600,00	
		Persentase peningkatan jumlah investasi						252.080.600,00					Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		476.897.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	252.080.600,00						2 Dokumen	476.897.600,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						252.080.600,00							476.897.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	252.080.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		2 Dokumen	476.897.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
101.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**144.069.300,00**							**144.069.300,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						***144.069.300,00***							***144.069.300,00***	
			999. Persentase perizinan berusaha dan non berusaha yang selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %		100 %	100 %	144.069.300,00						100 %	144.069.300,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						144.069.300,00					Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		144.069.300,00	
		Persentase penerbitan izin dan non perizinan yang terbit tepat waktu						144.069.300,00					Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		144.069.300,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	5.512.200,00						2 Pelaku Usaha	5.512.200,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha		3200 Pelaku Usaha	3400 Pelaku Usaha	138.557.100,00						3600 Pelaku Usaha	138.557.100,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						138.557.100,00							138.557.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha		3200 Pelaku Usaha	3400 Pelaku Usaha	138.557.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		3600 Pelaku Usaha	138.557.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						5.512.200,00							5.512.200,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	5.512.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		2 Pelaku Usaha	5.512.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
102.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**44.586.200,00**							**44.586.200,00**	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						***44.586.200,00***							***44.586.200,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	44.586.200,00						100 Persentase	44.586.200,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						44.586.200,00					Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		44.586.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						44.586.200,00					Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		44.586.200,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90 Kegiatan Usaha		82 Kegiatan Usaha	84 Kegiatan Usaha	10.336.000,00						86 Kegiatan Usaha	10.336.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	34.250.200,00						100 Pelaku Usaha	34.250.200,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						34.250.200,00							34.250.200,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	34.250.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Pelaku Usaha	34.250.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						10.336.000,00							10.336.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90 Kegiatan Usaha		82 Kegiatan Usaha	84 Kegiatan Usaha	10.336.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		86 Kegiatan Usaha	10.336.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
103.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**5.401.000,00**							**5.401.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						***5.401.000,00***							***5.401.000,00***	
			999. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %		100 %	100 %	5.401.000,00						100 %	5.401.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.401.000,00					Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		5.401.000,00	
		Kategori Mutu Pelayanan						5.401.000,00					Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		5.401.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.401.000,00						1 Dokumen	5.401.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						5.401.000,00							5.401.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.401.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1 Dokumen	5.401.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						**9.197.614.566,00**							**11.576.910.915,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.610.614.566,00**							**10.726.910.915,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**8.610.614.566,00**							**10.726.910.915,00**	
104.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.013.964.866,00**							**7.512.850.156,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***5.552.463.807,00***							***7.512.850.156,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	5.552.463.807,00						100 %	7.512.850.156,00	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.552.463.807,00					PEGAWAI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		7.512.850.156,00	
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN						5.552.463.807,00					PEGAWAI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		7.512.850.156,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	5.552.463.807,00						100 Orang/bulan	7.512.850.156,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.552.463.807,00							7.512.850.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	21 Orang/bulan	5.552.463.807,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Orang/bulan	7.512.850.156,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			PERSENTASE CAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERIMTAH	-		-	100 PERSEN	1.461.501.059,00						-	0,00	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.461.501.059,00					-		0,00	
		-						1.461.501.059,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.461.501.059,00						-	0,00	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.461.501.059,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	1.461.501.059,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	0,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
105.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**12.000.000,00**							**1.559.201.059,00**	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						***12.000.000,00***							***1.559.201.059,00***	
			999.Rasio wirausaha pemuda	0.067 Rasio		0.020 Rasio	0.032 Rasio	12.000.000,00						0.043 Rasio	1.559.201.059,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						12.000.000,00					PEMUDA KAB TULANG BAWANG		1.559.201.059,00	
		Jumlah yang menerima penghargaan pemuda						12.000.000,00					PEMUDA KAB TULANG BAWANG		1.559.201.059,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	12.000.000,00						-	1.559.201.059,00	
	2.19.02.2.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						12.000.000,00							1.559.201.059,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	30 Orang	12.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	1.559.201.059,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
106.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.584.649.700,00**							**1.654.859.700,00**	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga						***1.584.649.700,00***							***1.654.859.700,00***	
			999.Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	56.76 %		37.50 %	45.45 %	1.584.649.700,00						50.00 %	1.654.859.700,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00					MASYARAKAT TULANG BAWANG		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga tingkat kabupaten yang tersedia						5.000.000,00					MASYARAKAT TULANG BAWANG		25.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	5.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1.452.790.600,00					CABOR OPD KAB. TULANG BAWANG		1.452.790.600,00	
		Jumlah penerima penghargaan olahraga						1.452.790.600,00					CABOR OPD KAB. TULANG BAWANG		1.452.790.600,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	1.452.790.600,00						-	1.452.790.600,00	
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						1.452.790.600,00							1.452.790.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	15 Orang	1.452.790.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	1.452.790.600,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						84.790.000,00					CABOR OPD KAB. TULANG BAWANG		115.000.000,00	
		Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten /kota						84.790.000,00					CABOR OPD KAB. TULANG BAWANG		115.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	84.790.000,00						-	115.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						84.790.000,00							115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Kerja Sama	84.790.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	115.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						42.069.100,00					ANTAR OPD SEKABUPATEN RULANG BAWANG		62.069.100,00	
		Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi						42.069.100,00					ANTAR OPD SEKABUPATEN RULANG BAWANG		62.069.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	-	30.469.100,00						-	40.469.100,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	11.600.000,00						-	21.600.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						30.469.100,00							40.469.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-		-	1 Dokumen	30.469.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	40.469.100,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat						11.600.000,00							21.600.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	350 Orang	11.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	21.600.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**587.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**587.000.000,00**							**850.000.000,00**	
107.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**105.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***105.000.000,00***							***150.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	50.76 %		46.48 %	47.39 %	105.000.000,00						48.60 %	150.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						105.000.000,00					MASYARAKAT TULANG BAWANG		150.000.000,00	
		Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota						105.000.000,00					MASYARAKAT TULANG BAWANG		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.76 Laporan		46.48 Laporan	47.39 Laporan	105.000.000,00						48.60 Laporan	150.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						105.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.76 Laporan		46.48 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		48.60 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
108.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**482.000.000,00**							**700.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						***482.000.000,00***							***700.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	10.34 Persentase		6.22 Persentase	7.95 Persentase	482.000.000,00						8.37 Persentase	700.000.000,00	
		jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif						482.000.000,00					PELAJAR MAHASISWA DAN GENERASI MUDA KAB, TULANG BAWANG		700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	1250 Orang		1050 Orang	1100 Orang	200.000.000,00						1150 Orang	250.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	1250 Orang		1050 Orang	1000 Orang	200.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1150 Orang	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						70.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan		2 Laporan	15 Laporan	70.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						482.000.000,00					PELAJAR MAHASISWA DAN GENERASI MUDA KAB, TULANG BAWANG		700.000.000,00	
		jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif						482.000.000,00					PELAJAR MAHASISWA DAN GENERASI MUDA KAB, TULANG BAWANG		700.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	-	212.000.000,00						-	350.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						212.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-		-	1003 Orang	212.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	350.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**4.038.449.451,00**							**3.608.818.275,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.038.449.451,00**							**3.608.818.275,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.017.776.551,00**							**3.578.818.275,00**	
109.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.476.682.551,00**							**3.282.087.747,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***3.476.682.551,00***							***3.282.087.747,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.476.682.551,00						100 %	3.282.087.747,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.271.017.171,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.976.439.767,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3.271.017.171,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.976.439.767,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	191.420.000,00						5 Dokumen	192.860.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	3.079.597.171,00						100 Orang/bulan	2.783.579.767,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.079.597.171,00							2.783.579.767,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.079.597.171,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang/bulan	2.783.579.767,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						191.420.000,00							192.860.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	191.420.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		5 Dokumen	192.860.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						47.959.700,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		125.782.300,00	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran						47.959.700,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		125.782.300,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.176.000,00						2 Laporan	12.960.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.936.000,00						1 Laporan	54.342.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket		19 Paket	19 Paket	4.423.200,00						19 Paket	8.444.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.433.000,00						4 Paket	9.403.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.347.700,00						6 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		22 Paket	22 Paket	8.643.800,00						22 Paket	15.631.500,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.347.700,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.347.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		6 Paket	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.643.800,00							15.631.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		22 Paket	22 Paket	8.643.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		22 Paket	15.631.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.423.200,00							8.444.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket		19 Paket	19 Paket	4.423.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		19 Paket	8.444.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.433.000,00							9.403.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.433.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Paket	9.403.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.176.000,00							12.960.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.176.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Laporan	12.960.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.936.000,00							54.342.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.936.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	54.342.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37.900.680,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		45.780.680,00	
		Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						37.900.680,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		45.780.680,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	33.520.680,00						2 Laporan	34.520.680,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.380.000,00						4 Laporan	11.260.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33.520.680,00							34.520.680,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	33.520.680,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Laporan	34.520.680,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.380.000,00							11.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.380.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Laporan	11.260.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119.805.000,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		134.085.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik						119.805.000,00					Pegawai Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		134.085.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	119.805.000,00						11 Unit	134.085.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						119.805.000,00							134.085.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	119.805.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		11 Unit	134.085.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
110.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**541.094.000,00**							**296.730.528,00**	
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***541.094.000,00***							***296.730.528,00***	
			999.Persentase perpustakaan sekolah/masyarakat yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	58.64 %		32.57 %	37.81 %	541.094.000,00						43.96 %	296.730.528,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						312.179.300,00					Pelajar dan Masyarakat		204.351.228,00	
		Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola di Tingkat Daerah Kabupaten						312.179.300,00					Pelajar dan Masyarakat		204.351.228,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	25.300.000,00						2 Layanan	43.642.800,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		62 Perpustakaan	62 Perpustakaan	31.100.300,00						62 Perpustakaan	72.062.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	255.779.000,00						1 Perpustakaan	88.645.678,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						31.100.300,00							72.062.750,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		62 Perpustakaan	62 Perpustakaan	31.100.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		62 Perpustakaan	72.062.750,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						255.779.000,00							88.645.678,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	255.779.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Perpustakaan	88.645.678,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						25.300.000,00							43.642.800,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	25.300.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Layanan	43.642.800,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						228.914.700,00					Pelajar dan Masyarakat		92.379.300,00	
		Jumlah Even Perlombaan Budaya Baca dan Literasi Yang Diselenggarakan						228.914.700,00					Pelajar dan Masyarakat		92.379.300,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	62 Perpustakaan		62 Perpustakaan	62 Perpustakaan	20.648.700,00						62 Perpustakaan	43.260.900,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang		6 Orang	6 Orang	208.266.000,00						6 Orang	49.118.400,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						20.648.700,00							43.260.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	62 Perpustakaan		62 Perpustakaan	62 Perpustakaan	20.648.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		62 Perpustakaan	43.260.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						208.266.000,00							49.118.400,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang		6 Orang	6 Orang	208.266.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		6 Orang	49.118.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**20.672.900,00**							**30.000.000,00**	
111.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**20.672.900,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***20.672.900,00***							***30.000.000,00***	
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	95 Persentase		75 Persentase	80 Persentase	20.672.900,00						85 Persentase	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						20.672.900,00					OPD Kabupaten Tulang Bawang		30.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten						20.672.900,00					OPD Kabupaten Tulang Bawang		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	20.672.900,00						15 Laporan	30.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						20.672.900,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan		15 Laporan	20 Laporan	20.672.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		15 Laporan	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Perikanan						**4.855.586.170,00**							**5.062.612.276,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.855.586.170,00**							**5.062.612.276,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.855.586.170,00**							**5.062.612.276,00**	
112.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.694.543.370,00**							**4.885.465.196,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***4.694.543.370,00***							***4.885.465.196,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.694.543.370,00						100 %	4.885.465.196,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.289.400,00					Dinas Perikanan		17.918.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan						16.289.400,00					Dinas Perikanan		17.918.340,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	16.289.400,00						6 Dokumen	17.918.340,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.289.400,00							17.918.340,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	16.289.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		6 Dokumen	17.918.340,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.882.733.725,00					Dinas Perikanan		3.992.474.586,00	
		Meningkatnya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.882.733.725,00					Dinas Perikanan		3.992.474.586,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.882.733.725,00						33 Orang/bulan	3.992.474.586,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.882.733.725,00							3.992.474.586,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.882.733.725,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		33 Orang/bulan	3.992.474.586,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.978.200,00					Dinas Perikanan		49.476.020,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						44.978.200,00					Dinas Perikanan		49.476.020,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.200.000,00						1 Paket	12.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	33.778.200,00						3 Paket	37.156.020,00	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.778.200,00							37.156.020,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	33.778.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		3 Paket	37.156.020,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.200.000,00							12.320.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.200.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1 Paket	12.320.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						645.832.045,00					Dinas Perikanan		710.415.250,00	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						645.832.045,00					Dinas Perikanan		710.415.250,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	37.069.045,00						24 Laporan	40.775.950,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	578.700.000,00						12 Laporan	636.570.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.063.000,00						2 Laporan	33.069.300,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.069.045,00							40.775.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	37.069.045,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		24 Laporan	40.775.950,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.063.000,00							33.069.300,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.063.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		2 Laporan	33.069.300,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						578.700.000,00							636.570.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	578.700.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		12 Laporan	636.570.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104.710.000,00					Dinas Perikanan		115.181.000,00	
		Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah						104.710.000,00					Dinas Perikanan		115.181.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	92.210.000,00						11 Unit	101.431.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.500.000,00						1 Unit	13.750.000,00	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						92.210.000,00							101.431.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	92.210.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		11 Unit	101.431.000,00	Dinas Perikanan
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.500.000,00							13.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1 Unit	13.750.000,00	Dinas Perikanan
113.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**31.595.700,00**							**34.755.270,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***31.595.700,00***							***34.755.270,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	35095.07 Ton		33066.02 Ton	33562.01 Ton	31.595.700,00						34065.44 Ton	34.755.270,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						31.595.700,00					Nelayan Kecil Kab. Tulang Bawang		34.755.270,00	
		Tercapainya peningkatan kapasitas nelayan, kelembagaan nelayan, serta sarana dan prasarana usaha nelayan						31.595.700,00					Nelayan Kecil Kab. Tulang Bawang		34.755.270,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang		36 Orang	37 Orang	31.595.700,00						38 Orang	34.755.270,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						31.595.700,00							34.755.270,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang		36 Orang	37 Orang	31.595.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		38 Orang	34.755.270,00	Dinas Perikanan
114.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**112.240.400,00**							**123.464.440,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***112.240.400,00***							***123.464.440,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32174.43 Ton		31538.91 Ton	31696.60 Ton	112.240.400,00						31855.09 Ton	123.464.440,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						92.011.900,00					Pelaku Usaha Perikanan Kab. Tulang Bawang		101.213.090,00	
		Tercapainya pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil melalui pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pendidikan dan pelatihan						92.011.900,00					Pelaku Usaha Perikanan Kab. Tulang Bawang		101.213.090,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	17 Kelompok		13 Kelompok	14 Kelompok	92.011.900,00						15 Kelompok	101.213.090,00	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						92.011.900,00							101.213.090,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	17 Kelompok		13 Kelompok	14 Kelompok	92.011.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		15 Kelompok	101.213.090,00	Dinas Perikanan
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						20.228.500,00					Pelaku Usaha Perikanan Kab. Tulang Bawang		22.251.350,00	
		Tercapainya pembinaan pembudidaya ikan di darat						20.228.500,00					Pelaku Usaha Perikanan Kab. Tulang Bawang		22.251.350,00	
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.228.500,00						2 Unit	22.251.350,00	
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						20.228.500,00							22.251.350,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Unit		2 Unit	4 Unit	20.228.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		2 Unit	22.251.350,00	Dinas Perikanan
115.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**17.206.700,00**							**18.927.370,00**	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat						***17.206.700,00***							***18.927.370,00***	
			1.Angka Konsumsi Ikan	44.19 Kg/KAP/TH		42.74 Kg/KAP/TH	43.10 Kg/KAP/TH	17.206.700,00						43.46 Kg/KAP/TH	18.927.370,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						17.206.700,00					Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		18.927.370,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan						17.206.700,00					Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan		18.927.370,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	14 Unit Usaha		14 Unit Usaha	14 Unit Usaha	17.206.700,00						14 Unit Usaha	18.927.370,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						17.206.700,00							18.927.370,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	14 Unit Usaha		14 Unit Usaha	15 Unit Usaha	17.206.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		14 Unit Usaha	18.927.370,00	Dinas Perikanan
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						**4.125.140.449,00**							**4.578.448.572,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.125.140.449,00**							**4.578.448.572,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4.125.140.449,00**							**4.578.448.572,00**	
116.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.591.140.449,00**							**4.014.448.572,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***3.348.657.449,00***							***3.801.965.572,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.348.657.449,00						100 %	3.801.965.572,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.348.657.449,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		3.801.965.572,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		persentase tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN						3.348.657.449,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		3.801.965.572,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	3.130.907.449,00						100 Orang/bulan	3.584.215.572,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.130.907.449,00							3.584.215.572,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.130.907.449,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Orang/bulan	3.584.215.572,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	242.483.000,00						-	212.483.000,00	
		persentase tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN						3.348.657.449,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		3.801.965.572,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	217.750.000,00						-	217.750.000,00	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						217.750.000,00							217.750.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	26 Dokumen	217.750.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	217.750.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						80.877.103,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		46.686.686,00	
		-						80.877.103,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		46.686.686,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.000.503,00						-	888.886,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	63.876.600,00						-	35.797.800,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						63.876.600,00							35.797.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	63.876.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	35.797.800,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.503,00							888.886,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.000.503,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	888.886,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	10.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.824.697,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		92.015.114,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						87.824.697,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		92.015.114,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	28.964.697,00						-	42.335.114,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	58.860.000,00						-	49.680.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.964.697,00							42.335.114,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	28.964.697,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	42.335.114,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						58.860.000,00							49.680.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	58.860.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	49.680.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.781.200,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		73.781.200,00	
		-						73.781.200,00					Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tulang Bawang		73.781.200,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	73.781.200,00						-	73.781.200,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						73.781.200,00							73.781.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	73.781.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	73.781.200,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
117.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**463.000.000,00**							**463.000.000,00**	
			Persentase Capaian Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana yang Seusai Kebutuhan	-		-	100 Persen	463.000.000,00						-	463.000.000,00	
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						463.000.000,00					Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kab. Tulang Bawang		463.000.000,00	
		-						463.000.000,00					Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kab. Tulang Bawang		463.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-		-	-	463.000.000,00						-	463.000.000,00	
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						463.000.000,00							463.000.000,00	
		Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-		-	1 Laporan	463.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	463.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
118.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**48.000.000,00**							**78.000.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						***48.000.000,00***							***78.000.000,00***	
			999.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	75.00 Persentase		35.00 Persentase	45.00 Persentase	48.000.000,00						55.00 Persentase	78.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	95.00 %		74.00 %	80.00 %	48.000.000,00						86.00 %	78.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						42.600.000,00					Pencegahan dan Pemberantasan PHM (Penyakit Hewan Menular) dan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)		42.600.000,00	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Serta Vaksinasi						42.600.000,00					Pencegahan dan Pemberantasan PHM (Penyakit Hewan Menular) dan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)		42.600.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	95.00 Laporan		74.00 Laporan	80.00 Laporan	42.600.000,00						86.00 Laporan	42.600.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						42.600.000,00							42.600.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	95.00 Laporan		74.00 Laporan	1 Laporan	42.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		86.00 Laporan	42.600.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						5.400.000,00					Pencegahan dan Pemberantasan PHM (Penyakit Hewan Menular) dan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)		35.400.000,00	
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						5.400.000,00					Pencegahan dan Pemberantasan PHM (Penyakit Hewan Menular) dan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)		35.400.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	75.00 Laporan		35.00 Laporan	45.00 Laporan	5.400.000,00						55.00 Laporan	35.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						5.400.000,00							35.400.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	75.00 Laporan		35.00 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		55.00 Laporan	35.400.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
119.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**23.000.000,00**							**23.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha peternakan						***23.000.000,00***							***23.000.000,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	64.73 %		28.47 %	37.66 %	23.000.000,00						47.28 %	23.000.000,00	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						23.000.000,00					Kelompok Tani, Kelompok Ternak di Kab. Tulang Bawang		23.000.000,00	
		terlaksananya perizinan usaha pertanian						23.000.000,00					Kelompok Tani, Kelompok Ternak di Kab. Tulang Bawang		23.000.000,00	
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	-		-	-	23.000.000,00						-	23.000.000,00	
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan						23.000.000,00							23.000.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	-		-	1 Laporan	23.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	23.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan						**8.776.120.989,00**							**17.746.618.519,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.698.947.189,00**							**16.669.444.719,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**7.698.947.189,00**							**16.669.444.719,00**	
120.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.518.447.189,00**							**16.490.244.719,00**	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 %	6.796.189.039,00						-	15.879.082.569,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	7.518.447.189,00						-	16.490.244.719,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.850.000,00					Petani		40.850.000,00	
		-						40.850.000,00					Petani		40.850.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	40.850.000,00						-	40.850.000,00	
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.850.000,00							40.850.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	40.850.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	40.850.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.796.189.039,00					Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan Kab. Tulang Bawang		15.879.082.569,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.796.189.039,00					Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan Kab. Tulang Bawang		15.879.082.569,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	682.825.000,00						-	682.825.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	45.943.600,00						-	45.943.600,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	6.067.420.439,00						100 Orang/bulan	15.150.313.969,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.067.420.439,00							15.150.313.969,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	107 Orang/bulan	6.067.420.439,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Orang/bulan	15.150.313.969,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						682.825.000,00							682.825.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	45 Dokumen	682.825.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	682.825.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						45.943.600,00							45.943.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	45.943.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	45.943.600,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						138.848.150,00					Petani		138.848.150,00	
		-						138.848.150,00					Petani		138.848.150,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	16.400.000,00						-	16.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	44.458.000,00						-	44.458.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.990.150,00						-	77.990.150,00	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						77.990.150,00							77.990.150,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	77.990.150,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	77.990.150,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						16.400.000,00							16.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	16.400.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	16.400.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						44.458.000,00							44.458.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	44.458.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	44.458.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						399.120.000,00					Petani		399.120.000,00	
		-						399.120.000,00					Petani		399.120.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	95.160.000,00						-	95.160.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	303.960.000,00						-	303.960.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						95.160.000,00							95.160.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	95.160.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	95.160.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						303.960.000,00							303.960.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	303.960.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	303.960.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.440.000,00					Petani		32.344.000,00	
		-						143.440.000,00					Petani		32.344.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	123.440.000,00						-	12.344.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						123.440.000,00							12.344.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	123.440.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	12.344.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
121.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**172.700.000,00**							**171.400.000,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***165.100.000,00***							***166.400.000,00***	
			1.Skor Pola Pangan Harapan	95.00 Nilai		91.40 Nilai	92.30 Nilai	157.500.000,00						93.20 Nilai	157.500.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						12.600.000,00					1. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan 2. 2 Pasar Tradisional 3. Kabupaten Tulang Bawang		12.600.000,00	
		-						12.600.000,00					1. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan 2. 2 Pasar Tradisional 3. Kabupaten Tulang Bawang		12.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						157.500.000,00					1. Kabupaten Tulang Bawang 2. Pengelola Lumbung Pangan 3. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		157.500.000,00	
		Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemantauan stok pangan pokok, serta koordinasi dan sinkronisasi dengan						157.500.000,00					1. Kabupaten Tulang Bawang 2. Pengelola Lumbung Pangan 3. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		157.500.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.5 Ton		9.5 Ton	9.5 Ton	157.500.000,00						9.5 Ton	157.500.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						157.500.000,00							157.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.5 Ton		9.5 Ton	9.5 (Beras 5.5 (GKG) Ton	157.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		9.5 Ton	157.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						2.600.000,00					1. 270 Ibu Rumah Tangga se 15 Kecamatan 2. Kabupaten Tulang Bawang 3. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah/UMKM dan Ibu-ibu PKK serta Masyarakat Tulang Bawang		1.300.000,00	
		-						2.600.000,00					1. 270 Ibu Rumah Tangga se 15 Kecamatan 2. Kabupaten Tulang Bawang 3. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah/UMKM dan Ibu-ibu PKK serta Masyarakat Tulang Bawang		1.300.000,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00						1 Dokumen	1.300.000,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						2.600.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penguranganan Kesenjangan Sosial		1 Dokumen	1.300.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						12.600.000,00					1. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan 2. 2 Pasar Tradisional 3. Kabupaten Tulang Bawang		12.600.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	-	2.600.000,00						-	2.600.000,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						2.600.000,00							2.600.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-		-	10 Keluarga	2.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	2.600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
122.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**2.600.000,00**							**2.600.000,00**	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***2.600.000,00***							***2.600.000,00***	
			1.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.20 %		3.40 %	3.10 %	1.692.000,00						2.80 %	1.692.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						1.692.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		1.692.000,00	
		Peta yang menggambarkan kondisi kerentanan dan ketahanan pangan di wilayah						1.692.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		1.692.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.692.000,00						1 Dokumen	1.692.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						1.692.000,00							1.692.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.692.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1 Dokumen	1.692.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						908.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		908.000,00	
		-						908.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		908.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-		-	-	908.000,00						-	908.000,00	
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						908.000,00							908.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	908.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	908.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
123.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**5.200.000,00**							**5.200.000,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						***2.600.000,00***							***2.600.000,00***	
			1.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	85.35 Persentase		80.90 Persentase	82.00 Persentase	2.600.000,00						83.10 Persentase	2.600.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						5.200.000,00					1. Masyarakat dan Pelaku Usaha 2. Pasar Tradisional dan Retail		5.200.000,00	
		Untuk memastikan produk pangan segar yang beredar aman untuk dikonsumsi						5.200.000,00					1. Masyarakat dan Pelaku Usaha 2. Pasar Tradisional dan Retail		5.200.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00						1 Dokumen	2.600.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.600.000,00						5 Dokumen	2.600.000,00	
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						2.600.000,00							2.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		1 Dokumen	2.600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						2.600.000,00							2.600.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		5 Dokumen	2.600.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.077.173.800,00**							**1.077.173.800,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.077.173.800,00**							**1.077.173.800,00**	
124.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**635.785.000,00**							**635.785.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***70.785.000,00***							***70.785.000,00***	
			1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	4.50 Persentase		2.50 Persentase	3.00 Persentase	70.785.000,00						3.50 Persentase	70.785.000,00	
			2.Peningkatan Produksi Hortikultura	2.75 Persentase		2.34 Persentase	2.67 Persentase	70.785.000,00						2.70 Persentase	70.785.000,00	
			Peningkatan Produksi Hortikultura	-		-	2.67 Persen	565.000.000,00						-	565.000.000,00	
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-		-	3.00 Persen	565.000.000,00						-	565.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						70.785.000,00					Petani		70.785.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						70.785.000,00					Petani		70.785.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	-	70.785.000,00						-	70.785.000,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						70.785.000,00							70.785.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-		-	1 Laporan	70.785.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	70.785.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						565.000.000,00					-		565.000.000,00	
		-						565.000.000,00					-		565.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	508.898.000,00						-	508.898.000,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-		-	-	46.102.000,00						-	46.102.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						508.898.000,00							508.898.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-		-	1 Dokumen	508.898.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	508.898.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						46.102.000,00							46.102.000,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-		-	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	46.102.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	46.102.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
125.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**429.888.800,00**							**429.888.800,00**	
			Cakupan Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	-		-	75 Persen	429.888.800,00						-	429.888.800,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						429.888.800,00					Petani		429.888.800,00	
		-						429.888.800,00					Petani		429.888.800,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	-	408.500.000,00						-	408.500.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	-	21.388.800,00						-	21.388.800,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						21.388.800,00							21.388.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-		-	12 Laporan	21.388.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	21.388.800,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						408.500.000,00							408.500.000,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	7 Dokumen	408.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	DBH Sawit	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	408.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
126.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**11.500.000,00**							**11.500.000,00**	
		Meningkatya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian						***11.500.000,00***							***11.500.000,00***	
			2.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	90.00 Persentase		60.00 Persentase	68.00 Persentase	11.500.000,00						75.00 Persentase	11.500.000,00	
			999.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	26.73 Persentase		22.59 Persentase	23.42 Persentase	11.500.000,00						24.05 Persentase	11.500.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						11.500.000,00					Petani		11.500.000,00	
		Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi						11.500.000,00					Petani		11.500.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	11.500.000,00						-	11.500.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						11.500.000,00							11.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	15 Unit	11.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		-	11.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
		Sekretariat Daerah						**56.982.704.765,00**							**75.780.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**56.982.704.765,00**							**75.780.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**56.982.704.765,00**							**75.780.000.000,00**	
127.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**53.987.823.565,00**							**71.650.000.000,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***50.283.447.665,00***							***61.250.000.000,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	50.283.447.665,00						100 %	61.250.000.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						828.498.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		1.300.000.000,00	
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu						828.498.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		1.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	215.328.700,00						10 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	613.170.200,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						215.328.700,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	215.328.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		10 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						613.170.200,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	613.170.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						29.506.566.104,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		34.650.000.000,00	
		Persentase Realisasi Anggaran						29.506.566.104,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		34.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.841.600.000,00						12 Dokumen	4.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	249.200.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	271.452.100,00						5 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan		124 Orang/bulan	124 Orang/bulan	25.144.314.004,00						124 Orang/bulan	30.000.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25.144.314.004,00							30.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan		124 Orang/bulan	124 Orang/bulan	25.144.314.004,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		124 Orang/bulan	30.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3.841.600.000,00							4.000.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.841.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						249.200.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	249.200.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						271.452.100,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	12 Laporan	271.452.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		5 Laporan	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.713.061.100,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		22.500.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran						12.713.061.100,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		22.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	3.084.650.000,00						11 Laporan	4.500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	2.614.360.600,00						11 Paket	4.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110 Paket		110 Paket	110 Paket	5.104.950.500,00						110 Paket	12.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	1.909.100.000,00						21 Paket	2.000.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.104.950.500,00							12.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110 Paket		110 Paket	110 Paket	5.104.950.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		110 Paket	12.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.909.100.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket		21 Paket	21 Paket	1.909.100.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		21 Paket	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.614.360.600,00							4.000.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	2.614.360.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		11 Paket	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.084.650.000,00							4.500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	3.084.650.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		11 Laporan	4.500.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.735.321.561,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		8.500.000.000,00	
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						6.735.321.561,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		8.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.360.741.561,00						4 Laporan	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.374.580.000,00						12 Laporan	6.500.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.360.741.561,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.360.741.561,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Laporan	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.374.580.000,00							6.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.374.580.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	6.500.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						500.000.000,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		600.000.000,00	
		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						500.000.000,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000.000,00						1 Orang	600.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						500.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Orang	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi, protokoler, dan kehumasan pimpinan daerah						***3.269.882.000,00***							***3.600.000.000,00***	
			1. Persentase acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wakil Bupati/Sekda yang terlaksana tepat waktu, sesuai protokol, dan memenuhi standar SOP	100 %		100 %	100 %	3.269.882.000,00						100 %	3.600.000.000,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						3.269.882.000,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		3.600.000.000,00	
		Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.269.882.000,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		3.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.374.608.900,00						1 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.832.799.800,00						1 Laporan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	62.473.300,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						1.374.608.900,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.374.608.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	1.500.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.832.799.800,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.832.799.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						62.473.300,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	62.473.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah						***434.493.900,00***							***400.000.000,00***	
			999.Indeks Kematangan Organisasi	56.81 Indeks		41.67 Indeks	45.12 Indeks	434.493.900,00						48.75 Indeks	400.000.000,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						434.493.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		500.000.000,00	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Memenuhi Kepatuhan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dengan Tingkat Kepatuhan Sedang						434.493.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	68.634.800,00						34 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.127.300,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	108.731.800,00						3 Laporan	100.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						68.634.800,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	68.634.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		34 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						108.731.800,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	108.731.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						257.127.300,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.127.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
128.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.152.843.200,00**							**1.630.000.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi kerjasama antar daerah dan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat						***122.174.000,00***							***180.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Efektivitas Kerja Sama Daerah	88 Persentase		76 Persentase	79 Persentase	122.174.000,00						82 Persentase	180.000.000,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						122.174.000,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		180.000.000,00	
		Persentase Kerjasama Yang Aktif						122.174.000,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	108.254.000,00						10 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.920.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						108.254.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	108.254.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		10 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						13.920.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.920.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***848.465.300,00***							***1.150.000.000,00***	
			999. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	92.00 %		81.00 %	84.00 %	848.465.300,00						87.00 %	1.150.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						674.481.200,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu						674.481.200,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	140.151.500,00						3 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	285.561.700,00						3 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	248.768.000,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						285.561.700,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	285.561.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						248.768.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	248.768.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						140.151.500,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	140.151.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						173.984.100,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		150.000.000,00	
		Persentase Penanganan Permasalahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat						173.984.100,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	173.984.100,00						3 Dokumen	150.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						173.984.100,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	173.984.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan						***182.203.900,00***							***100.000.000,00***	
			999.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	92 Persentase		84 Persentase	86 Persentase	182.203.900,00						88 Persentase	100.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						182.203.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		300.000.000,00	
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Difasilitasi						182.203.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	85.941.900,00						2 Kasus	100.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	52.386.000,00						600 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	43.876.000,00						600 Dokumen	100.000.000,00	
		Persentase Raperda Yang Diundangkan Menjadi Peraturan Daerah						182.203.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		300.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	85.941.900,00						2 Kasus	100.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	52.386.000,00						600 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	43.876.000,00						600 Dokumen	100.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						52.386.000,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	52.386.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		600 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						85.941.900,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	85.941.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Kasus	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						43.876.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	600 Dokumen		600 Dokumen	1 Dokumen	43.876.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		600 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
129.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.842.038.000,00**							**2.500.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***695.851.500,00***							***1.350.000.000,00***	
			999. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	92 %		81 %	84 %	695.851.500,00						87 %	1.350.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						695.851.500,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		1.350.000.000,00	
		Persentase Penanganan Permasalahan Kebijakan Bidang Perekonomian						695.851.500,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		1.350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	52.961.500,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.663.700,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						81.663.700,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	81.663.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						52.961.500,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	52.961.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa						***1.146.186.500,00***							***1.100.000.000,00***	
			999.Tingkat Kematangan UKPBJ	5 Level		4 Level	4 Level	1.146.186.500,00						4 Level	1.100.000.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1.052.270.600,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		950.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik						1.052.270.600,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		950.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	510 Dokumen		510 Dokumen	510 Dokumen	289.711.200,00						510 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	439.874.400,00						90 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	124 Orang		124 Orang	124 Orang	322.685.000,00						124 Orang	150.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						439.874.400,00							300.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	439.874.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		90 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						289.711.200,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	510 Dokumen		510 Dokumen	510 Dokumen	289.711.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		510 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						322.685.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	124 Orang		124 Orang	124 Orang	322.685.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		124 Orang	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						93.915.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		200.000.000,00	
		Persentase penanganan permasalahan kebijakan Bidang SDA dan Infrastruktur						93.915.900,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.177.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.532.800,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.206.100,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						38.206.100,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.206.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						27.532.800,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.532.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						28.177.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.177.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Penanganan Permasalahan Kebijakan Bidang Perekonomian						695.851.500,00					ASN Kabupaten Tulang Bawang		1.350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-		-	-	561.226.300,00						-	1.200.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						561.226.300,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-		-	2 Dokumen	561.226.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	1.200.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						**65.611.325.042,00**							**70.200.078.007,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**65.611.325.042,00**							**70.200.078.007,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**65.611.325.042,00**							**70.200.078.007,00**	
130.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**39.077.642.098,00**							**41.028.182.243,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***39.077.642.098,00***							***41.028.182.243,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	39.077.642.098,00						100 %	41.028.182.243,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						376.578.200,00					OPD, Pemerintahan Tulang Bawang, Masyarakat		348.621.200,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						376.578.200,00					OPD, Pemerintahan Tulang Bawang, Masyarakat		348.621.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	158.584.000,00						24 Dokumen	69.627.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	118.241.000,00						24 Laporan	145.241.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.753.200,00						12 Laporan	133.753.200,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						158.584.000,00							69.627.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	158.584.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		24 Dokumen	69.627.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						118.241.000,00							145.241.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	118.241.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		24 Laporan	145.241.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						99.753.200,00							133.753.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	24 Laporan	99.753.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	133.753.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						30.903.321.398,00					Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD		30.620.086.363,00	
		Meningkatnya Penatausahaan Keuangan						30.903.321.398,00					Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD		30.620.086.363,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 Dokumen		144 Dokumen	144 Dokumen	1.866.800.000,00						144 Dokumen	1.866.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan		132 Orang/bulan	132 Orang/bulan	29.036.521.398,00						132 Orang/bulan	28.753.286.363,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						29.036.521.398,00							28.753.286.363,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132 Orang/bulan		132 Orang/bulan	132 Orang/bulan	29.036.521.398,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		132 Orang/bulan	28.753.286.363,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.866.800.000,00							1.866.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	144 Dokumen		144 Dokumen	12 Dokumen	1.866.800.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		144 Dokumen	1.866.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						216.481.400,00					Pegawai Sekretariat DPRD		226.981.400,00	
		Meningkatnya kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia						216.481.400,00					Pegawai Sekretariat DPRD		226.981.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	216.481.400,00						30 Orang	226.981.400,00	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						216.481.400,00							226.981.400,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	50 Orang	216.481.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		30 Orang	226.981.400,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.223.958.580,00					Anggota DPRD, Sekretariat DPRD		4.548.981.380,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						4.223.958.580,00					Anggota DPRD, Sekretariat DPRD		4.548.981.380,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	63.834.200,00						12 Dokumen	84.857.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.080.550.000,00						12 Laporan	2.080.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan		240 Laporan	240 Laporan	2.061.234.180,00						240 Laporan	2.361.234.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.557.600,00						2 Paket	14.557.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.782.600,00						1 Paket	7.782.600,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.782.600,00							7.782.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	7.782.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	7.782.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.557.600,00							14.557.600,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	12 Paket	10.557.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Paket	14.557.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						63.834.200,00							84.857.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	63.834.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	84.857.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.080.550.000,00							2.080.550.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.080.550.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	2.080.550.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.061.234.180,00							2.361.234.180,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Laporan		240 Laporan	240 Laporan	2.061.234.180,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		240 Laporan	2.361.234.180,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.378.362.320,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		3.126.547.800,00	
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						1.378.362.320,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		3.126.547.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	1.378.362.320,00						14 Unit	3.126.547.800,00	
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.378.362.320,00							3.126.547.800,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		14 Unit	4 Unit	1.378.362.320,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		14 Unit	3.126.547.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						374.339.000,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		374.339.000,00	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						374.339.000,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		374.339.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	218.339.000,00						12 Laporan	218.339.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	156.000.000,00						12 Laporan	156.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						218.339.000,00							218.339.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	218.339.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	218.339.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						156.000.000,00							156.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	156.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	156.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah						263.184.200,00					OPD, Pemerintahan Tulang Bawang, Masyarakat		390.184.200,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	100.948.400,00						24 Unit	227.948.400,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.948.400,00							227.948.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	20 Unit	100.948.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		24 Unit	227.948.400,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						1.283.966.800,00					Pimpinan dan Anggota DPRD		1.321.466.800,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD						1.283.966.800,00					Pimpinan dan Anggota DPRD		1.321.466.800,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan		40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	120.461.200,00						40 Orang/Bulan	156.461.200,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang		40 Orang	40 Orang	218.851.000,00						40 Orang	220.351.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	944.654.600,00						40 Paket	944.654.600,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						120.461.200,00							156.461.200,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40 Orang/Bulan		40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	120.461.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		40 Orang/Bulan	156.461.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						944.654.600,00							944.654.600,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	944.654.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		40 Paket	944.654.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						218.851.000,00							220.351.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang		40 Orang	40 Orang	218.851.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		40 Orang	220.351.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						57.450.200,00					Pimpinan dan Anggota DPRD		70.974.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi DPRD						57.450.200,00					Pimpinan dan Anggota DPRD		70.974.100,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	57.450.200,00						12 Paket	70.974.100,00	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						57.450.200,00							70.974.100,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	57.450.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	70.974.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						263.184.200,00					OPD, Pemerintahan Tulang Bawang, Masyarakat		390.184.200,00	
		Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah						263.184.200,00					OPD, Pemerintahan Tulang Bawang, Masyarakat		390.184.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	162.235.800,00						-	162.235.800,00	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						162.235.800,00							162.235.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	12 Unit	162.235.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	162.235.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
131.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**26.533.682.944,00**							**29.171.895.764,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan						***7.913.626.780,00***							***9.024.605.100,00***	
			999.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	7.001.159.380,00						100 Persentase	8.010.091.700,00	
		Meningkatnya fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran						1.796.728.300,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		2.035.829.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	416.490.450,00						12 Dokumen	510.345.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	467.770.450,00						12 Dokumen	510.970.450,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						416.490.450,00							510.345.450,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	416.490.450,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	510.345.450,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						467.770.450,00							510.970.450,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	467.770.450,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	510.970.450,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						4.536.554.850,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		5.244.754.850,00	
		Meningkatnya fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan						4.536.554.850,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		5.244.754.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.349.737.750,00						36 Laporan	1.612.737.750,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	971.585.950,00						36 Laporan	1.076.385.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	947.263.550,00						36 Laporan	1.080.263.550,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.052.561.600,00						36 Laporan	1.166.561.600,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	215.406.000,00						36 Dokumen	308.806.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						971.585.950,00							1.076.385.950,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	971.585.950,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		36 Laporan	1.076.385.950,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1.349.737.750,00							1.612.737.750,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.349.737.750,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		36 Laporan	1.612.737.750,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1.052.561.600,00							1.166.561.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.052.561.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		36 Laporan	1.166.561.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						947.263.550,00							1.080.263.550,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	947.263.550,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		36 Laporan	1.080.263.550,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						215.406.000,00							308.806.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	215.406.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		36 Dokumen	308.806.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						1.240.233.680,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		1.346.811.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui penyerapan aspirasi						1.240.233.680,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		1.346.811.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	1.240.233.680,00						120 Dokumen	1.346.811.000,00	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						1.240.233.680,00							1.346.811.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	1.240.233.680,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		120 Dokumen	1.346.811.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan						***20.416.784.464,00***							***22.183.119.964,00***	
			999. Persentase Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %		100 %	100 %	19.532.523.564,00						100 %	21.161.804.064,00	
			999.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 Persentase		95 Persentase	100 Persentase	19.532.523.564,00						100 Persentase	21.161.804.064,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1.976.565.700,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		2.353.065.700,00	
		Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah						1.976.565.700,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		2.353.065.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.231.518.200,00						8 Dokumen	1.477.018.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	320.830.500,00						8 Dokumen	387.230.500,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	424.217.000,00						8 Dokumen	488.817.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						1.231.518.200,00							1.477.018.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	12 Dokumen	1.231.518.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Dokumen	1.477.018.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						424.217.000,00							488.817.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	424.217.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Dokumen	488.817.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						320.830.500,00							387.230.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	320.830.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Dokumen	387.230.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.796.728.300,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		2.035.829.300,00	
		Meningkatnya fasilitasi DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran						1.796.728.300,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		2.035.829.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	217.594.800,00						12 Dokumen	232.894.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	214.153.800,00						12 Dokumen	232.999.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	216.110.800,00						12 Dokumen	241.510.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	264.608.000,00						12 Dokumen	307.108.000,00	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						217.594.800,00							232.894.800,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	217.594.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	232.894.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						214.153.800,00							232.999.800,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	214.153.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	232.999.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						216.110.800,00							241.510.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	216.110.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	241.510.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						264.608.000,00							307.108.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	264.608.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	307.108.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						14.127.129.400,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		14.914.043.900,00	
		Meningkatnya pengetahuan,wawasan dan tingkat profesionalisme pimpinan dan anggota DPRD						14.127.129.400,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		14.914.043.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	240 Dokumen		240 Dokumen	240 Dokumen	2.181.215.000,00						240 Dokumen	2.590.634.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	11.151.265.500,00						120 Dokumen	11.472.161.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	316.648.900,00						300 Dokumen	373.248.900,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang		12 Orang	12 Orang	126.000.000,00						12 Orang	126.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang		12 Orang	12 Orang	352.000.000,00						12 Orang	352.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						2.181.215.000,00							2.590.634.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	240 Dokumen		240 Dokumen	60 Dokumen	2.181.215.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		240 Dokumen	2.590.634.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						126.000.000,00							126.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang		12 Orang	10 Orang	126.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang	126.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						352.000.000,00							352.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang		12 Orang	10 Orang	352.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang	352.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						11.151.265.500,00							11.472.161.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120 Dokumen		120 Dokumen	60 Dokumen	11.151.265.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		120 Dokumen	11.472.161.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						316.648.900,00							373.248.900,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	300 Dokumen		300 Dokumen	60 Dokumen	316.648.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		300 Dokumen	373.248.900,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						5.000.000,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		0,00	
		Meningkatnya Jumlah Informasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dipublikasikan						5.000.000,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen		Dokumen	Dokumen	5.000.000,00						Dokumen	0,00	
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		Dokumen	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.511.361.064,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		2.880.181.064,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi tugas DPRD						2.511.361.064,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		2.880.181.064,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	1.115.283.764,00						48 Dokumen	1.255.083.764,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	69.364.000,00						60 Dokumen	101.384.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	1.223.781.300,00						48 Dokumen	1.338.781.300,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	102.932.000,00						48 Laporan	184.932.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.223.781.300,00							1.338.781.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	1.223.781.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		48 Dokumen	1.338.781.300,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						102.932.000,00							184.932.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	102.932.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		48 Laporan	184.932.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						1.115.283.764,00							1.255.083.764,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	1.115.283.764,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		48 Dokumen	1.255.083.764,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						69.364.000,00							101.384.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 Dokumen		60 Dokumen	36 Dokumen	69.364.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		60 Dokumen	101.384.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						340.109.950,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		397.209.950,00	
		Meningkatnya efektivitas Badan Kehormatan Dewan dalam penegakan pelanggaran kode etik DPRD						340.109.950,00					OPD, DPRD, Pemerintahan Tulang Bawang, dan Masyarakat		397.209.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	-	340.109.950,00						-	397.209.950,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						340.109.950,00							397.209.950,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-		-	12 Dokumen	340.109.950,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	397.209.950,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						**14.644.937.233,00**							**15.423.906.074,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.644.937.233,00**							**15.423.906.074,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**14.394.937.233,00**							**14.972.216.587,00**	
132.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.543.775.933,00**							**11.094.093.832,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***10.453.775.933,00***							***11.073.180.264,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	10.453.775.933,00						100 %	11.073.180.264,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						115.000.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		108.996.287,00	
		Persentase dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu						115.000.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		108.996.287,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00						8 Dokumen	50.297.130,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	22.100.414,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00						5 Laporan	36.598.743,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.297.130,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Dokumen	50.297.130,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							22.100.414,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	22.100.414,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00							36.598.743,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		5 Laporan	36.598.743,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.308.225.533,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		9.297.919.513,00	
		Persentase penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu						8.308.225.533,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		9.297.919.513,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	137.340.000,00						1 Dokumen	78.363.137,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.913.568,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00						18 Laporan	47.473.798,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		76 Orang/bulan	77 Orang/bulan	8.100.885.533,00						78 Orang/bulan	9.151.169.010,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.100.885.533,00							9.151.169.010,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		76 Orang/bulan	66 Orang/bulan	8.100.885.533,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		78 Orang/bulan	9.151.169.010,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						137.340.000,00							78.363.137,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	137.340.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	78.363.137,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							20.913.568,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	20.913.568,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						50.000.000,00							47.473.798,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		18 Laporan	47.473.798,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20.000.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		20.913.568,00	
		Persentase laporan BMD (pengadaan, pemeliharaan, pemusnahan) yang disampaikan tepat waktu						20.000.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		20.913.568,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.913.568,00	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						20.000.000,00							20.913.568,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	20.913.568,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						180.000.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		179.438.409,00	
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu						180.000.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		179.438.409,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	12.129.869,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00						1 Dokumen	73.197.486,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	90.000.000,00						3 Orang	94.111.054,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						70.000.000,00							73.197.486,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	73.197.486,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						20.000.000,00							12.129.869,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	12.129.869,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						90.000.000,00							94.111.054,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	90.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Orang	94.111.054,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						477.473.998,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		239.580.362,00	
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang ditindaklanjuti/ diselesaikan tepat waktu						477.473.998,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		239.580.362,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.835.000,00						12 Laporan	19.449.618,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	115.549.000,00						20 Laporan	111.311.417,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	54.613.200,00						12 Paket	48.708.744,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	6.790.000,00						10 Paket	9.853.427,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	285.686.798,00						2 Paket	50.257.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.790.000,00							9.853.427,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	6.790.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		10 Paket	9.853.427,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						285.686.798,00							50.257.156,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	285.686.798,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Paket	50.257.156,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						54.613.200,00							48.708.744,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	54.613.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	48.708.744,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						14.835.000,00							19.449.618,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.835.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	19.449.618,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						115.549.000,00							111.311.417,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	115.549.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		20 Laporan	111.311.417,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.299.791.402,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		1.090.383.479,00	
		Persentase laporan administrasi pelaksanaan jasa penunjang yang terdokumentasi lengkap						1.299.791.402,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		1.090.383.479,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	385.709.402,00						12 Laporan	196.497.531,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	914.082.000,00						1 Laporan	893.885.948,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						385.709.402,00							196.497.531,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	385.709.402,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	196.497.531,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						914.082.000,00							893.885.948,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	914.082.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	893.885.948,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan						143.285.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		156.862.214,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	91.140.000,00						8 Unit	101.681.766,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.325.000,00						24 Unit	26.089.675,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						91.140.000,00							101.681.766,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	91.140.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Unit	101.681.766,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						24.325.000,00							26.089.675,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.325.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		24 Unit	26.089.675,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.285.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		156.862.214,00	
		Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai rencana pemeliharaan tahunan						143.285.000,00					Bapperida Kabupaten Tulang Bawang		156.862.214,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	27.820.000,00						-	29.090.773,00	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						27.820.000,00							29.090.773,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	33 Unit	27.820.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	29.090.773,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
133.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**2.560.725.300,00**							**2.700.484.478,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						***2.560.725.300,00***							***2.700.484.478,00***	
			1.Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD	100 %		100 %	100 %	2.560.725.300,00						100 %	2.700.484.478,00	
			2.Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 %		100 %	100 %	2.560.725.300,00						100 %	2.700.484.478,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.653.266.300,00					Kabupaten Tulang Bawang		1.917.640.081,00	
		Persentase Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan pendanaan daerah						1.653.266.300,00					Kabupaten Tulang Bawang		1.917.640.081,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	27.906.700,00						1 Berita Acara	6.539.673,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	250.000.000,00						1 Berita Acara	247.422.143,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	198.400.400,00						2 Dokumen	217.532.472,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	57.673.600,00						2 Dokumen	76.781.026,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.093.979.400,00						1 Dokumen	1.346.514.603,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	15 Usulan		15 Usulan	15 Usulan	25.306.200,00						15 Usulan	22.850.164,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						57.673.600,00							76.781.026,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	57.673.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Dokumen	76.781.026,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						1.093.979.400,00							1.346.514.603,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.093.979.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	1.346.514.603,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						27.906.700,00							6.539.673,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	27.906.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Tengah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Berita Acara	6.539.673,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						250.000.000,00							247.422.143,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	250.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Berita Acara	247.422.143,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						25.306.200,00							22.850.164,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	15 Usulan		15 Usulan	15 Usulan	25.306.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		15 Usulan	22.850.164,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						198.400.400,00							217.532.472,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	198.400.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Dokumen	217.532.472,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						250.417.400,00					Kabupaten Tulang Bawang		312.665.572,00	
		Persentase data dan informasi pembangunan yang dianalisis dan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan						250.417.400,00					Kabupaten Tulang Bawang		312.665.572,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		1 Buku	1 Buku	105.645.500,00						1 Buku	144.340.737,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	144.771.900,00						1 Dokumen	168.324.835,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						144.771.900,00							168.324.835,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	144.771.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	168.324.835,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						105.645.500,00							144.340.737,00	
		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku		1 Buku	1 Buku	105.645.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Buku	144.340.737,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						637.497.400,00					Kabupaten Tulang Bawang		455.650.170,00	
		Persentase capaian pelaksanaan program/ kegiatan yang dievaluasi dan dilaporkan tepat waktu						637.497.400,00					Kabupaten Tulang Bawang		455.650.170,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	411.605.600,00						4 Laporan	239.357.558,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.891.800,00						1 Laporan	216.292.612,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						225.891.800,00							216.292.612,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	225.891.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	216.292.612,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						411.605.600,00							239.357.558,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	411.605.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Laporan	239.357.558,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						19.544.200,00					Kabupaten Tulang Bawang		14.528.655,00	
		Persentase data perencanaan pembangunan yang terinput dalam SIPD						19.544.200,00					Kabupaten Tulang Bawang		14.528.655,00	
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.544.200,00						1 Dokumen	14.528.655,00	
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						19.544.200,00							14.528.655,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.544.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	14.528.655,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
134.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.290.436.000,00**							**1.177.638.277,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						***479.656.000,00***							***475.056.128,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		100 %	100 %	479.656.000,00						100 %	475.056.128,00	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						479.656.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		475.056.128,00	
		Persentase kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh PD						479.656.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		475.056.128,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	77.460.000,00						1 Dokumen	74.766.004,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.176.000,00						1 Dokumen	77.468.296,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.460.000,00						1 Laporan	33.587.189,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	283.560.000,00						1 Laporan	289.234.639,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						77.460.000,00							74.766.004,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	77.460.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	74.766.004,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						42.460.000,00							33.587.189,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.460.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	33.587.189,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						76.176.000,00							77.468.296,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.176.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	77.468.296,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						283.560.000,00							289.234.639,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	283.560.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	289.234.639,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						***405.220.000,00***							***473.616.028,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		100 %	100 %	405.220.000,00						100 %	473.616.028,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						405.220.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		473.616.028,00	
		Persentase kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang ditindaklanjuti oleh PD						405.220.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		473.616.028,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.790.000,00						1 Dokumen	124.941.072,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	121.570.000,00						1 Dokumen	226.497.894,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.570.000,00						1 Laporan	42.998.295,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.290.000,00						1 Laporan	79.178.767,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						121.570.000,00							226.497.894,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	121.570.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	226.497.894,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						88.790.000,00							124.941.072,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.790.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	124.941.072,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						78.570.000,00							42.998.295,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.570.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	42.998.295,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						116.290.000,00							79.178.767,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.290.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	79.178.767,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						***405.560.000,00***							***228.966.121,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 %		100 %	100 %	405.560.000,00						100 %	228.966.121,00	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						405.560.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		228.966.121,00	
		Persentase kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti oleh PD						405.560.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		228.966.121,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	235.540.000,00						1 Dokumen	161.524.351,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.020.000,00						1 Laporan	67.441.770,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						235.540.000,00							161.524.351,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	235.540.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	161.524.351,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						170.020.000,00							67.441.770,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	170.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	67.441.770,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**250.000.000,00**							**451.689.487,00**	
135.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**200.000.000,00**							**204.828.800,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan						***50.000.000,00***							***51.207.200,00***	
			1.Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	80 %		48 %	56 %	50.000.000,00						64 %	51.207.200,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						50.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		51.207.200,00	
		Persentase dokumen hasil litbang/pengkaji an yang dimanfaatkan dalam proses perencanaan atau regulasi daerah						50.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		51.207.200,00	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	51.207.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						50.000.000,00							51.207.200,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	51.207.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						100.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		102.414.400,00	
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan						100.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		102.414.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	51.207.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	51.207.200,00	
	5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan						50.000.000,00							51.207.200,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	51.207.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika						50.000.000,00							51.207.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	51.207.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						50.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		51.207.200,00	
		Persentase usulan inovasi daerah yang difasilitasi pengembangannya						50.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		51.207.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	51.207.200,00	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						50.000.000,00							51.207.200,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	51.207.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
136.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**50.000.000,00**							**246.860.687,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan						***50.000.000,00***							***246.860.687,00***	
			1.Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	60 %		40 %	45 %	50.000.000,00						50 %	246.860.687,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						50.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		246.860.687,00	
		Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan						50.000.000,00					Kabupaten Tulang Bawang		246.860.687,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	50.000.000,00						1 Naskah	246.860.687,00	
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						50.000.000,00							246.860.687,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah		1 Naskah	1 Naskah	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Naskah	246.860.687,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						**231.691.562.640,00**							**334.434.461.765,30**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**231.691.562.640,00**							**334.434.461.765,30**	
	5.02	**KEUANGAN**						**231.691.562.640,00**							**334.434.461.765,30**	
137.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.442.520.626,00**							**23.231.464.789,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***17.296.270.626,00***							***23.006.464.789,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	17.296.270.626,00						100 %	23.006.464.789,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						299.382.600,00					Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		345.000.000,00	
		Persentase dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu						299.382.600,00					Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		345.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.506.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.800.000,00						2 Dokumen	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	137.076.600,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						101.506.000,00							120.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.506.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	120.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						60.800.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Dokumen	75.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						137.076.600,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	137.076.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.229.953.674,00					Meningkatnya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah		18.515.410.238,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu						13.229.953.674,00					Meningkatnya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah		18.515.410.238,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	536.664.800,00						1 Dokumen	590.331.280,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.731.800,00						1 Laporan	75.604.980,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	12.552.730.474,00						48 Orang/bulan	17.770.464.718,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.552.730.474,00							17.770.464.718,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	12.552.730.474,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		48 Orang/bulan	17.770.464.718,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						536.664.800,00							590.331.280,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	536.664.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Dokumen	590.331.280,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						68.731.800,00							75.604.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.731.800,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	75.604.980,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						61.289.200,00					Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		75.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang teradministrasi dengan baik						61.289.200,00					Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.289.200,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						61.289.200,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.289.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	75.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.054.061.952,00					Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		1.229.313.031,00	
		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah						1.054.061.952,00					Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		1.229.313.031,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	53.500.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.950.000,00						1 Laporan	240.950.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	89.300.000,00						1 Paket	98.230.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	73.000.000,00						1 Paket	80.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	84.366.000,00						1 Paket	92.802.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	467.463.742,00						1 Paket	552.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	95.482.210,00						1 Paket	105.030.431,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						84.366.000,00							92.802.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	84.366.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	92.802.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						467.463.742,00							552.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	467.463.742,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	552.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						95.482.210,00							105.030.431,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	95.482.210,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	105.030.431,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						89.300.000,00							98.230.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	89.300.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	98.230.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						73.000.000,00							80.300.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	73.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Paket	80.300.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						53.500.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	53.500.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	60.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						190.950.000,00							240.950.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.950.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	240.950.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.475.943.200,00					Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		1.623.537.520,00	
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						1.475.943.200,00					Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		1.623.537.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	530.000.000,00						1 Laporan	583.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	877.800.000,00						1 Laporan	965.580.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.143.200,00						1 Laporan	74.957.520,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						68.143.200,00							74.957.520,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.143.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	74.957.520,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						530.000.000,00							583.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	530.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	583.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						877.800.000,00							965.580.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	877.800.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	965.580.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.175.640.000,00					Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah		1.293.204.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik						1.175.640.000,00					Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah		1.293.204.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	305.090.000,00						2 Unit	335.599.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	691.900.000,00						4 Unit	761.090.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	178.650.000,00						23 Unit	196.515.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						691.900.000,00							761.090.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	691.900.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Unit	761.090.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						178.650.000,00							196.515.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	24 Unit	178.650.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		23 Unit	196.515.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						305.090.000,00							335.599.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	305.090.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Unit	335.599.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	146.250.000,00						-	150.000.000,00	
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu						13.229.953.674,00					Meningkatnya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah		18.515.410.238,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	71.826.600,00						-	79.009.260,00	
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						71.826.600,00							79.009.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	71.826.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	79.009.260,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						146.250.000,00					Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		150.000.000,00	
		-						146.250.000,00					Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	146.250.000,00						-	150.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						146.250.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	2 Paket	146.250.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		-	150.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
138.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**213.340.043.614,00**							**310.203.098.736,30**	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan						***785.000.000,00***							***1.076.496.740,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999. Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	100 %		100 %	100 %	785.000.000,00						100 %	1.076.496.740,00	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						785.000.000,00					Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		1.076.496.740,00	
		Persentase kesesuaian laporan keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)						785.000.000,00					Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		1.076.496.740,00	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	66.377.000,00						2 Lembaga	100.340.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.573.000,00						1 Dokumen	116.480.540,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	63.097.000,00						2 Dokumen	108.355.500,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.485.000,00						1 Dokumen	107.604.200,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	214.020.000,00						1 Laporan	267.707.990,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	215.092.000,00						1 Dokumen	252.386.200,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.356.000,00						1 Dokumen	123.621.410,00	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						63.097.000,00							108.355.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	63.097.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Dokumen	108.355.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						214.020.000,00							267.707.990,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	214.020.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	267.707.990,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						215.092.000,00							252.386.200,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	215.092.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	252.386.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						64.573.000,00							116.480.540,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.573.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	116.480.540,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						90.485.000,00							107.604.200,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.485.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	107.604.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						71.356.000,00							123.621.410,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.356.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	123.621.410,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						66.377.000,00							100.340.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	66.377.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Lembaga	100.340.900,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola anggaran						***209.077.039.887,00***							***304.096.941.457,30***	
			999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	27 Persentase		23 Persentase	24 Persentase	209.077.039.887,00						25 Persentase	304.096.941.457,30	
			999.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	58.00 Persentase		68.00 Persentase	65.00 Persentase	209.077.039.887,00						62.00 Persentase	304.096.941.457,30	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						852.595.700,00					Meningkatnya tata kelola anggaran		1.165.505.000,00	
		Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen anggaran						852.595.700,00					Meningkatnya tata kelola anggaran		1.165.505.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	86.346.500,00						1 Dokumen	94.981.150,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.262.500,00						1 Dokumen	93.788.750,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.774.600,00						1 Dokumen	162.008.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.673.000,00						1 Dokumen	70.040.300,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.724.000,00						1 Dokumen	321.996.400,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	193.185.100,00						1 Dokumen	341.697.400,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.050.000,00						1 Dokumen	24.255.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.240.000,00						1 Dokumen	33.264.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.340.000,00						1 Dokumen	23.474.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						86.346.500,00							94.981.150,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	86.346.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Tengah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	94.981.150,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						85.262.500,00							93.788.750,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.262.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	93.788.750,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						21.340.000,00							23.474.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.340.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	23.474.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						30.240.000,00							33.264.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.240.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	33.264.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						63.673.000,00							70.040.300,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.673.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	70.040.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						22.050.000,00							24.255.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.050.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	24.255.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						292.724.000,00							321.996.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.724.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	321.996.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						193.185.100,00							341.697.400,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	193.185.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	341.697.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						57.774.600,00							162.008.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.774.600,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	162.008.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						208.224.444.187,00					Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		302.931.436.457,30	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian dokumen keuangan						208.224.444.187,00					Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		302.931.436.457,30	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	191.770.816.485,00						1 Laporan	287.406.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.229.076.602,00						1 Laporan	11.978.430.247,30	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.224.551.100,00						1 Laporan	3.547.006.210,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						191.770.816.485,00							287.406.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	191.770.816.485,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	287.406.000.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						3.224.551.100,00							3.547.006.210,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.224.551.100,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	3.547.006.210,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						13.229.076.602,00							11.978.430.247,30	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.229.076.602,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	11.978.430.247,30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan						***3.478.003.727,00***							***5.029.660.539,00***	
			999.Persentase Penurunan SILPA	28.00 Persentase		18.00 Persentase	20.00 Persentase	3.478.003.727,00						22.00 Persentase	5.029.660.539,00	
			999.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96.00 Persentase		92.00 Persentase	93.00 Persentase	3.478.003.727,00						94.00 Persentase	5.029.660.539,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						3.478.003.727,00					Meningkatnya Tatakelola Perbendaharaan		5.029.660.539,00	
		Persentase SP2D yang terbit tepat waktu						3.478.003.727,00					Meningkatnya Tatakelola Perbendaharaan		5.029.660.539,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.695.816.027,00						1 Dokumen	3.797.889.119,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.620.900,00						1 Dokumen	187.573.430,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	188.003.900,00						1 Dokumen	272.926.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	162.467.700,00						1 Dokumen	241.912.770,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	164.640.700,00						1 Laporan	384.758.990,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	131.454.500,00						50 Orang	144.599.950,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						2.695.816.027,00							3.797.889.119,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.695.816.027,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	3.797.889.119,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						188.003.900,00							272.926.280,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	188.003.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	272.926.280,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						135.620.900,00							187.573.430,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.620.900,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	187.573.430,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						164.640.700,00							384.758.990,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	164.640.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	384.758.990,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						162.467.700,00							241.912.770,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	162.467.700,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	241.912.770,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						131.454.500,00							144.599.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	131.454.500,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		50 Orang	144.599.950,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
139.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**908.998.400,00**							**999.898.240,00**	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah						***908.998.400,00***							***999.898.240,00***	
			999.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	8.00 Persentase		6.00 Persentase	6.50 Persentase	908.998.400,00						7.00 Persentase	999.898.240,00	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD)	90 %		82 %	84 %	908.998.400,00						86 %	999.898.240,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						908.998.400,00					Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang		999.898.240,00	
		Persentase PD yang menyampaikan usulan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)						908.998.400,00					Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang		999.898.240,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.452.000,00						1 Dokumen	60.997.200,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.812.000,00						1 Laporan	282.493.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	59.000.000,00						1 Laporan	64.900.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	58.530.000,00						1 Laporan	64.383.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.353.000,00						1 Laporan	60.888.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	54.156.400,00						1 Laporan	59.572.040,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.565.000,00						1 Dokumen	47.921.500,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	326.130.000,00						2 Dokumen	358.743.000,00	
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						326.130.000,00							358.743.000,00	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	326.130.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Dokumen	358.743.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						43.565.000,00							47.921.500,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.565.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	47.921.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						59.000.000,00							64.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	59.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	64.900.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						58.530.000,00							64.383.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	58.530.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	64.383.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						55.353.000,00							60.888.300,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.353.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	60.888.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						55.452.000,00							60.997.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.452.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Dokumen	60.997.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						54.156.400,00							59.572.040,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	54.156.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	59.572.040,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						256.812.000,00							282.493.200,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.812.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Kelurahan Menggala Selatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Laporan	282.493.200,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Pendapatan Daerah						**12.336.020.851,00**							**14.645.950.361,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.336.020.851,00**							**14.645.950.361,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**12.336.020.851,00**							**14.645.950.361,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
140.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.704.963.651,00**							**13.378.583.418,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***11.697.963.651,00***							***13.378.583.418,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	11.697.963.651,00						100 %	13.378.583.418,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.900.000,00					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah		38.000.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Kegiatan Pemerintah Daerah						25.900.000,00					Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah		38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.900.000,00						10 Laporan	38.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.900.000,00							38.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.900.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		10 Laporan	38.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.628.029.359,00					Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah		11.237.624.668,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Kegiatan Pemerintah Daerah						10.628.029.359,00					Meningkatnya penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah		11.237.624.668,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	398.450.000,00						12 Dokumen	398.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	10.229.579.359,00						48 Orang/bulan	10.839.174.668,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.229.579.359,00							10.839.174.668,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	53 Orang/bulan	10.229.579.359,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		48 Orang/bulan	10.839.174.668,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						398.450.000,00							398.450.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	398.450.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	398.450.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						284.250.900,00					Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		1.024.156.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Kegiatan Pemerintah Daerah						284.250.900,00					Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		1.024.156.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	129.958.000,00						12 Laporan	285.656.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	22.270.000,00						12 Paket	54.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00						12 Paket	17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	118.022.900,00						12 Paket	650.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00						12 Paket	17.500.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	17.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						118.022.900,00							650.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	118.022.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	650.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.000.000,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	17.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.270.000,00							54.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	22.270.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	54.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						129.958.000,00							285.656.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	129.958.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	285.656.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						384.223.392,00					Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		595.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Kegiatan Pemerintah Daerah						384.223.392,00					Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		595.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	245.863.392,00						12 Laporan	247.380.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.960.000,00						12 Laporan	155.380.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.400.000,00						12 Laporan	193.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						245.863.392,00							247.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	245.863.392,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	247.380.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						33.400.000,00							193.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.400.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	193.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						104.960.000,00							155.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.960.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	155.380.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						382.560.000,00					Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah		483.042.750,00	
		Meningkatnya Cakupan Layanan Penunjang Urusan Kegiatan Pemerintah Daerah						382.560.000,00					Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah		483.042.750,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	76 Unit		76 Unit	76 Unit	40.000.000,00						76 Unit	125.410.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	342.560.000,00						24 Unit	357.632.750,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						342.560.000,00							357.632.750,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	342.560.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		24 Unit	357.632.750,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						40.000.000,00							125.410.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	76 Unit		76 Unit	76 Unit	40.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		76 Unit	125.410.000,00	Badan Pendapatan Daerah
141.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**631.057.200,00**							**1.267.366.943,00**	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan						***631.057.200,00***							***1.267.366.943,00***	
			999. Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	95.00 %		75.00 %	80.00 %	207.057.200,00						85.00 %	404.419.973,00	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.024.200,00						12 Dokumen	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	164.033.000,00						12 Laporan	274.419.973,00	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.024.200,00						12 Dokumen	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	164.033.000,00						12 Laporan	274.419.973,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.024.200,00						12 Dokumen	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	164.033.000,00						12 Laporan	274.419.973,00	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						43.024.200,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.024.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	130.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						164.033.000,00							274.419.973,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	164.033.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	274.419.973,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						***631.057.200,00***							***1.267.366.943,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100 %		100 %	100 %	266.953.700,00						100 %	478.255.963,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.090.000,00						12 Dokumen	68.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	166.953.700,00						12 Laporan	365.255.963,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit		12 Unit	12 Unit	35.910.000,00						12 Unit	45.000.000,00	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.090.000,00						12 Dokumen	68.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	166.953.700,00						12 Laporan	365.255.963,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit		12 Unit	12 Unit	35.910.000,00						12 Unit	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.090.000,00						12 Dokumen	68.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	166.953.700,00						12 Laporan	365.255.963,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit		12 Unit	12 Unit	35.910.000,00						12 Unit	45.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						64.090.000,00							68.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.090.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	68.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						35.910.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit		12 Unit	12 Unit	35.910.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Unit	45.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						166.953.700,00							365.255.963,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	166.953.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	365.255.963,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***631.057.200,00***							***1.267.366.943,00***	
			999. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	13.66 %		13.44 %	13.44 %	157.046.300,00						13.45 %	384.691.007,00	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.046.300,00						12 Dokumen	210.691.007,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.101.600,00						12 Dokumen	76.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.898.400,00						12 Laporan	98.000.000,00	
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.046.300,00						12 Dokumen	210.691.007,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.101.600,00						12 Dokumen	76.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.898.400,00						12 Laporan	98.000.000,00	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						631.057.200,00					Meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, dan Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan pajak daerah		1.267.366.943,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.046.300,00						12 Dokumen	210.691.007,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.101.600,00						12 Dokumen	76.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.898.400,00						12 Laporan	98.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						63.898.400,00							98.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.898.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	98.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						46.101.600,00							76.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.101.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	76.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						47.046.300,00							210.691.007,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.046.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	210.691.007,00	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**7.603.470.133,00**							**8.340.129.416,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.603.470.133,00**							**8.340.129.416,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6.991.969.133,00**							**7.038.636.916,00**	
142.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.675.238.233,00**							**6.240.966.116,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***6.642.671.233,00***							***6.205.966.116,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	6.642.671.233,00						100 %	6.205.966.116,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.050.359.433,00					Aparatur Sipil Negara		5.775.376.636,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.050.359.433,00					Aparatur Sipil Negara		5.775.376.636,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	352.385.000,00						100 Dokumen	522.665.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	5.697.974.433,00						100 Orang/bulan	5.252.711.636,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.697.974.433,00							5.252.711.636,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.697.974.433,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang/bulan	5.252.711.636,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						352.385.000,00							522.665.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	15 Dokumen	352.385.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	522.665.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						172.070.100,00					Saranan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah		192.193.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						172.070.100,00					Saranan penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah		192.193.980,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	32.000.000,00						100 Laporan	3.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	31.157.900,00						100 Paket	21.981.700,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	3.943.700,00						100 Paket	3.944.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	65.597.700,00						100 Paket	117.668.280,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	39.370.800,00						100 Paket	45.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.943.700,00							3.944.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	160 Paket	3.943.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	3.944.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.597.700,00							117.668.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	2965 Paket	65.597.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	117.668.280,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						39.370.800,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	236 Paket	39.370.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.157.900,00							21.981.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	15 Paket	31.157.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	21.981.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						32.000.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	3.600.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.299.200,00					Sarana penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		116.224.700,00	
		Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						141.299.200,00					Sarana penunjang Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		116.224.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	100.968.000,00						100 Laporan	112.174.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	40.331.200,00						100 Laporan	4.050.100,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.968.000,00							112.174.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	100.968.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	112.174.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.331.200,00							4.050.100,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	40.331.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	4.050.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						278.942.500,00					Sarana penunjang Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		122.170.800,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah						278.942.500,00					Sarana penunjang Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda		122.170.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	100 Unit	197.707.500,00						100 Unit	117.829.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	52.360.000,00						100 Unit	4.060.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	28.875.000,00						100 Unit	281.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						197.707.500,00							117.829.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	10 Unit	197.707.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Unit	117.829.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						52.360.000,00							4.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	1 Unit	52.360.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Unit	4.060.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						28.875.000,00							281.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	1 Unit	28.875.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Unit	281.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	32.567.000,00						-	35.000.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.567.000,00					Aparatur Sipil Negara		35.000.000,00	
		-						32.567.000,00					Aparatur Sipil Negara		35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	15.167.600,00						-	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	17.399.400,00						-	19.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.167.600,00							16.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	2 Dokumen	15.167.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	16.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						17.399.400,00							19.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	8 Dokumen	17.399.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	19.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
143.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**316.730.900,00**							**797.670.800,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						***71.137.000,00***							***149.204.700,00***	
			999. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	90 %		70 %	75 %	71.137.000,00						80 %	149.204.700,00	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						71.137.000,00					Aparatur Sipil Negara		149.204.700,00	
		Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						71.137.000,00					Aparatur Sipil Negara		149.204.700,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	37.107.400,00						100 Orang	71.777.200,00	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						37.107.400,00							71.777.200,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 Orang		100 Orang	300 Orang	37.107.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang	71.777.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN						***187.551.300,00***							***534.107.000,00***	
			999. Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	90 %		82 %	84 %	126.478.200,00						86 %	432.200.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian						187.551.300,00					Aparatur Sipil Negara		534.107.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						187.551.300,00					Aparatur Sipil Negara		534.107.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	93.038.200,00						100 Dokumen	349.572.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	93.038.200,00						100 Dokumen	349.572.400,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						93.038.200,00							349.572.400,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	250 Dokumen	93.038.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	349.572.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN						***58.042.600,00***							***114.359.100,00***	
			999. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	80 %		48 %	56 %	58.042.600,00						64 %	114.359.100,00	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						58.042.600,00					Aparatur Sipil Negara		114.359.100,00	
		Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN						58.042.600,00					Aparatur Sipil Negara		114.359.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	14.518.500,00						100 Dokumen	26.260.500,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	43.524.100,00						100 Dokumen	88.098.600,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						14.518.500,00							26.260.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	250 Dokumen	14.518.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	26.260.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						43.524.100,00							88.098.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen		100 Dokumen	2562 Dokumen	43.524.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	88.098.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN						***187.551.300,00***							***534.107.000,00***	
			999.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	85.00 Persentase		58.00 Persentase	66.00 Persentase	187.551.300,00						72.00 Persentase	534.107.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						187.551.300,00					Aparatur Sipil Negara		534.107.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian						187.551.300,00					Aparatur Sipil Negara		534.107.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						187.551.300,00					Aparatur Sipil Negara		534.107.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	23.077.800,00						100 Dokumen	42.119.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	93.038.200,00						100 Dokumen	349.572.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	37.995.300,00						100 Dokumen	59.787.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	23.077.800,00						100 Dokumen	42.119.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	93.038.200,00						100 Dokumen	349.572.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	37.995.300,00						100 Dokumen	59.787.600,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						93.038.200,00							349.572.400,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	250 Dokumen	93.038.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	349.572.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN						37.995.300,00							59.787.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	150 Dokumen	37.995.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	59.787.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						23.077.800,00							42.119.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Dokumen		100 Dokumen	3200 Dokumen	23.077.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	42.119.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian						187.551.300,00					Aparatur Sipil Negara		534.107.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						187.551.300,00					Aparatur Sipil Negara		534.107.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	33.440.000,00						-	82.628.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	-	33.440.000,00						-	82.628.000,00	
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						33.440.000,00							82.628.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	-		-	12 Laporan	33.440.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	82.628.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						71.137.000,00					Aparatur Sipil Negara		149.204.700,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	-	34.029.600,00						-	77.427.500,00	
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						34.029.600,00							77.427.500,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	-		-	275 Orang	34.029.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	77.427.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**611.501.000,00**							**1.301.492.500,00**	
144.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**611.501.000,00**							**1.301.492.500,00**	
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi						***611.501.000,00***							***1.301.492.500,00***	
			999.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	611.501.000,00						100 Persentase	1.301.492.500,00	
		Jumlah dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis						611.501.000,00					Aparatur Sipil Negara		1.301.492.500,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	379.080.400,00						100 Orang	576.622.000,00	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						379.080.400,00							576.622.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang		100 Orang	400 Orang	379.080.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang	576.622.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader manajerial dan fungsional						***611.501.000,00***							***1.301.492.500,00***	
			999.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	85.00 %		45.00 %	55.00 %	611.501.000,00						65.00 %	1.301.492.500,00	
		Jumlah dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis						611.501.000,00					Aparatur Sipil Negara		1.301.492.500,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	379.080.400,00						100 Orang	576.622.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						379.080.400,00							576.622.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang		100 Orang	400 Orang	379.080.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang	576.622.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						611.501.000,00					Aparatur Sipil Negara		1.301.492.500,00	
		Jumlah dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis						611.501.000,00					Aparatur Sipil Negara		1.301.492.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	-	232.420.600,00						-	724.870.500,00	
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						232.420.600,00							724.870.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	150 Dokumen	232.420.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	724.870.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat						**15.816.950.157,00**							**16.792.191.143,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.816.950.157,00**							**16.792.191.143,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**15.816.950.157,00**							**16.792.191.143,00**	
145.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.300.841.717,00**							**15.997.275.993,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***15.298.664.717,00***							***15.997.275.993,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	15.298.664.717,00						100 %	15.997.275.993,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.177.000,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		22.000.000,00	
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.177.000,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.177.000,00						2 Dokumen	22.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.177.000,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	2.177.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Dokumen	22.000.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.694.976.917,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		15.114.414.493,00	
		Dokumen Administrasi Keuangan						14.694.976.917,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		15.114.414.493,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	316.875.000,00						12 Dokumen	356.096.156,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan		71 Orang/bulan	73 Orang/bulan	14.378.101.917,00						75 Orang/bulan	14.758.318.337,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.378.101.917,00							14.758.318.337,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan		71 Orang/bulan	73 Orang/bulan	14.378.101.917,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		75 Orang/bulan	14.758.318.337,00	Inspektorat
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						316.875.000,00							356.096.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	316.875.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	356.096.156,00	Inspektorat
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.177.000,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		116.816.000,00	
		Kegiatan Peningkatan SDM Pengawasan						2.177.000,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		116.816.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	79 Orang		71 Orang	73 Orang	2.177.000,00						75 Orang	116.816.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.177.000,00							116.816.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	79 Orang		71 Orang	73 Orang	2.177.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		75 Orang	116.816.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						293.971.400,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		384.962.300,00	
		Kegiatan Pemenuhan Administrasi Perkantoran						293.971.400,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		384.962.300,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.476.000,00						12 Laporan	45.057.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.473.000,00						12 Laporan	103.152.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	58.863.200,00						12 Paket	73.343.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	129.159.200,00						12 Paket	163.409.500,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						129.159.200,00							163.409.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	129.159.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	163.409.500,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						58.863.200,00							73.343.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	58.863.200,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	73.343.800,00	Inspektorat
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.476.000,00							45.057.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.476.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	45.057.000,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.473.000,00							103.152.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.473.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	103.152.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.165.000,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		259.710.000,00	
		Jasa Pelayanan Perkantoran						230.165.000,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		259.710.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	179.275.000,00						12 Laporan	186.060.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.890.000,00						12 Laporan	73.650.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						50.890.000,00							73.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.890.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	73.650.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						179.275.000,00							186.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	179.275.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	186.060.000,00	Inspektorat
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.374.400,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		99.373.200,00	
		Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Rehabilitasi Kantor						77.374.400,00					Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang		99.373.200,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	77.374.400,00						8 Unit	99.373.200,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						77.374.400,00							99.373.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	77.374.400,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Menggala || Desa Tiuh Tohou || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Unit	99.373.200,00	Inspektorat
146.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**476.663.940,00**							**649.659.652,00**	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***473.663.940,00***							***649.659.652,00***	
			999.Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	97.00 %		86.00 %	90.00 %	473.663.940,00						93.00 %	649.659.652,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						425.173.800,00					Perangkat Daerah, Kacamatan, Kampung, Sekolah, Puskesmas dan BUMD di Kabupaten Tulang Bawang		578.969.652,00	
		Kegiatan Pengawasan Internal						425.173.800,00					Perangkat Daerah, Kacamatan, Kampung, Sekolah, Puskesmas dan BUMD di Kabupaten Tulang Bawang		578.969.652,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	56.770.000,00						12 Dokumen	57.770.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	4.050.000,00						1 Kesepakatan	86.650.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	270.900.000,00						48 Laporan	299.900.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.453.800,00						12 Laporan	107.978.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	18.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	8.470.852,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						87.453.800,00							107.978.800,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.453.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	107.978.800,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						270.900.000,00							299.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	270.900.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		48 Laporan	299.900.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						3.000.000,00							8.470.852,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	8.470.852,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						3.000.000,00							18.200.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	18.200.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						4.050.000,00							86.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	4.050.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Kesepakatan	86.650.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						56.770.000,00							57.770.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	56.770.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	57.770.000,00	Inspektorat
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						51.490.140,00					Perangkat Daerah, Kacamatan, Kampung, Sekolah, Puskesmas dan BUMD di Kabupaten Tulang Bawang		70.690.000,00	
		Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						51.490.140,00					Perangkat Daerah, Kacamatan, Kampung, Sekolah, Puskesmas dan BUMD di Kabupaten Tulang Bawang		70.690.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.490.140,00						12 Laporan	70.690.000,00	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						51.490.140,00							70.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.490.140,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	70.690.000,00	Inspektorat
147.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**39.444.500,00**							**145.255.498,00**	
		Meningkatnya kuaitas pendampingan dan asistensi						***39.444.500,00***							***145.255.498,00***	
			999.Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 Level		3 Level	3 Level	39.444.500,00						3 Level	145.255.498,00	
			999. Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4 Level		3 Level	3 Level	39.444.500,00						3 Level	145.255.498,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						39.444.500,00					Perangkat Daerah, Kacamatan, Kampung, Sekolah, Puskesmas dan BUMD di Kabupaten Tulang Bawang		145.255.498,00	
		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi						39.444.500,00					Perangkat Daerah, Kacamatan, Kampung, Sekolah, Puskesmas dan BUMD di Kabupaten Tulang Bawang		145.255.498,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	37.267.500,00						4 Kegiatan	117.818.290,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah		35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	2.177.000,00						35 perangkat daerah	27.437.208,00	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						2.177.000,00							27.437.208,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah		35 perangkat daerah	30 perangkat daerah	2.177.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		35 perangkat daerah	27.437.208,00	Inspektorat
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						37.267.500,00							117.818.290,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	37.267.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Kegiatan	117.818.290,00	Inspektorat
		Kecamatan Menggala						**7.937.790.315,00**							**5.588.439.679,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.937.790.315,00**							**5.588.439.679,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.937.790.315,00**							**5.588.439.679,00**	
148.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.315.190.315,00**							**3.929.946.144,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***6.265.630.315,00***							***3.880.386.144,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	6.265.630.315,00						100 %	3.880.386.144,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.052.069.371,00					Seluruh ASN Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		3.648.527.062,00	
		Pelaksanaan nya kegiatan adminitrasi keuangan perangkat daerah						6.052.069.371,00					Seluruh ASN Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		3.648.527.062,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	299.125.000,00						100 Dokumen	348.275.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	5.752.944.371,00						100 Orang/bulan	3.300.252.062,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.752.944.371,00							3.300.252.062,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5.752.944.371,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang/bulan	3.300.252.062,00	Kecamatan Menggala
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						299.125.000,00							348.275.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	299.125.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	348.275.000,00	Kecamatan Menggala

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						150.952.896,00					Seluruh ASN Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		150.465.834,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.952.896,00					Seluruh ASN Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		150.465.834,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	47.000.000,00						100 Laporan	51.830.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	12.000.000,00						100 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	9.553.800,00						100 Paket	9.553.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	82.399.096,00						100 Paket	77.082.034,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						82.399.096,00							77.082.034,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	4 Paket	82.399.096,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	77.082.034,00	Kecamatan Menggala
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.553.800,00							9.553.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	4 Paket	9.553.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	9.553.800,00	Kecamatan Menggala

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						47.000.000,00							51.830.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	47.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	51.830.000,00	Kecamatan Menggala
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Menggala
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.608.048,00					Pegawai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		81.393.248,00	
		Penyediaan jasa surat menyurat						62.608.048,00					Pegawai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		81.393.248,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	16.364.448,00						100 Laporan	16.364.448,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	41.513.600,00						100 Laporan	60.298.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	4.730.000,00						100 Laporan	4.730.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.730.000,00							4.730.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	4.730.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	4.730.000,00	Kecamatan Menggala
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.364.448,00							16.364.448,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	16.364.448,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	16.364.448,00	Kecamatan Menggala
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.513.600,00							60.298.800,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	41.513.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	60.298.800,00	Kecamatan Menggala
			Persentase pencapaian penunjang urusan pemerintah daerah	-		-	100 persen	49.560.000,00						-	49.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.560.000,00					Kendaraan Dinas sarana dan prasarana Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		49.560.000,00	
		-						49.560.000,00					Kendaraan Dinas sarana dan prasarana Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		49.560.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	49.560.000,00						-	49.560.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						49.560.000,00							49.560.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	49.560.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	49.560.000,00	Kecamatan Menggala
149.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.622.600.000,00**							**1.658.493.535,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan						***1.622.600.000,00***							***1.658.493.535,00***	
			999.Persentase kampung dan kelurahan yang aktif dalam kegiatan pembedayaan masyarakat	100 %		100 %	100 %	1.622.600.000,00						100 %	1.658.493.535,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.622.600.000,00					Pegawai 4 Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		1.658.493.535,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelurahan berbasis Kinerja						1.622.600.000,00					Pegawai 4 Kelurahan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang		1.658.493.535,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas		100 Pokmas / Ormas	100 Pokmas / Ormas	1.622.600.000,00						100 Pokmas / Ormas	1.658.493.535,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.622.600.000,00							1.658.493.535,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas		100 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.622.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Pokmas / Ormas	1.658.493.535,00	Kecamatan Menggala
		Kecamatan Banjar Agung						**2.823.712.588,00**							**2.654.407.911,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.823.712.588,00**							**2.654.407.911,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.823.712.588,00**							**2.654.407.911,00**	
150.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.823.712.588,00**							**2.654.407.911,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***2.823.712.588,00***							***2.654.407.911,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.823.712.588,00						100 %	2.654.407.911,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.499.217.726,00					Kecamatan Banjar Agung		2.329.913.049,00	
		Terwujudnya tata kelola administrasi keuangan yang akuntabel						2.499.217.726,00					Kecamatan Banjar Agung		2.329.913.049,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.480.000,00						12 Dokumen	109.480.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.389.737.726,00						23 Orang/bulan	2.220.433.049,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.389.737.726,00							2.220.433.049,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.389.737.726,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		23 Orang/bulan	2.220.433.049,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						109.480.000,00							109.480.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.480.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	109.480.000,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						153.912.862,00					Kecamatan Banjar Agung		153.912.862,00	
		Laporan administrasi umum perangkat daerah						153.912.862,00					Kecamatan Banjar Agung		153.912.862,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	46.984.600,00						60 Laporan	46.984.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.350.000,00						12 Laporan	19.350.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.165.800,00						1 Paket	10.165.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.412.462,00						1 Paket	77.412.462,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						77.412.462,00							77.412.462,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	77.412.462,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	77.412.462,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.165.800,00							10.165.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.165.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	10.165.800,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						46.984.600,00							46.984.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	3 Laporan	46.984.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		60 Laporan	46.984.600,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						19.350.000,00							19.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.350.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	19.350.000,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						133.650.000,00					Kecamatan Banjar Agung		133.650.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						133.650.000,00					Kecamatan Banjar Agung		133.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.400.000,00						12 Laporan	89.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.250.000,00						12 Laporan	44.250.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						89.400.000,00							89.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.400.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	89.400.000,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						44.250.000,00							44.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.250.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	44.250.000,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.932.000,00					Kecamatan Banjar Agung		36.932.000,00	
		Barang milik daerah dalam kondisi baik						36.932.000,00					Kecamatan Banjar Agung		36.932.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.000.000,00						1 Unit	14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	22.932.000,00						3 Unit	22.932.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22.932.000,00							22.932.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	22.932.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Unit	22.932.000,00	Kecamatan Banjar Agung
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.000.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Unit	14.000.000,00	Kecamatan Banjar Agung
		Kecamatan Gedung Aji						**1.777.426.793,00**							**1.829.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.777.426.793,00**							**1.829.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.777.426.793,00**							**1.829.000.000,00**	
151.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.777.426.793,00**							**1.829.000.000,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.763.018.593,00***							***1.771.000.000,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.763.018.593,00						100 %	1.771.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.666.236.793,00					Kecamatan Gedung Aji		1.670.000.000,00	
		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN						1.666.236.793,00					Kecamatan Gedung Aji		1.670.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	200.330.000,00						100 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	1.465.906.793,00						100 Orang/bulan	1.460.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.465.906.793,00							1.460.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.465.906.793,00							1.460.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.465.906.793,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang/bulan	1.460.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						200.330.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	11 Dokumen	200.330.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	210.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18.000.000,00					Kecamatan Gedung Aji		25.000.000,00	
		Belanja Pakaian Dinas						18.000.000,00					Kecamatan Gedung Aji		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	18.000.000,00						100 Paket	25.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						18.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket		100 Paket	40 Paket	18.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.930.000,00					Kecamatan Gedung Aji		69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						35.930.000,00					Kecamatan Gedung Aji		69.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	19.474.800,00						100 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	7.083.700,00						100 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.561.100,00						100 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	4.610.800,00						100 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.199.600,00						100 Paket	3.000.000,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.930.000,00					Kecamatan Gedung Aji		69.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	19.474.800,00						100 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	7.083.700,00						100 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.561.100,00						100 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	4.610.800,00						100 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.199.600,00						100 Paket	3.000.000,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.930.000,00					Kecamatan Gedung Aji		69.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	19.474.800,00						100 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	7.083.700,00						100 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.561.100,00						100 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	4.610.800,00						100 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.199.600,00						100 Paket	3.000.000,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.930.000,00					Kecamatan Gedung Aji		69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	19.474.800,00						100 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	7.083.700,00						100 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.561.100,00						100 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	4.610.800,00						100 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.199.600,00						100 Paket	3.000.000,00	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						35.930.000,00					Kecamatan Gedung Aji		69.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	19.474.800,00						100 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	7.083.700,00						100 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.561.100,00						100 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	4.610.800,00						100 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.199.600,00						100 Paket	3.000.000,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.930.000,00					Kecamatan Gedung Aji		69.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	19.474.800,00						100 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	7.083.700,00						100 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.561.100,00						100 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	4.610.800,00						100 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	2.199.600,00						100 Paket	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.610.800,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	5 Paket	4.610.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.199.600,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	5 Paket	2.199.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	3.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.083.700,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	2 Paket	7.083.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	8.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.561.100,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	2.561.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	3.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.474.800,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	19.474.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.873.400,00					Kecamatan Gedung Aji		20.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.873.400,00					Kecamatan Gedung Aji		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	9.498.400,00						100 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	9.375.000,00						100 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.498.400,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	9.498.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.375.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	9.375.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	14.408.200,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14.408.200,00					Kecamatan Gedung Aji		20.000.000,00	
		-						14.408.200,00					Kecamatan Gedung Aji		20.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	7.405.200,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	7.003.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.405.200,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	1 Unit	7.405.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	10.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.003.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	7.003.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	10.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.978.400,00					Kecamatan Gedung Aji		25.000.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.978.400,00					Kecamatan Gedung Aji		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	23.978.400,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.978.400,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	23.978.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	25.000.000,00	Kecamatan Gedung Aji
		Kecamatan Rawa Jitu Selatan						**2.097.029.506,00**							**1.783.183.447,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.097.029.506,00**							**1.783.183.447,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.097.029.506,00**							**1.783.183.447,00**	
152.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.097.029.506,00**							**1.783.183.447,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***2.097.029.506,00***							***1.783.183.447,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.097.029.506,00						100 %	1.783.183.447,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.908.619.506,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		1.572.905.447,00	
		Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.908.619.506,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		1.572.905.447,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	76.780.000,00						12 Dokumen	76.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan		13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.831.839.506,00						13 Orang/bulan	1.496.125.447,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.831.839.506,00							1.496.125.447,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan		13 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.831.839.506,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		13 Orang/bulan	1.496.125.447,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						76.780.000,00							76.780.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	76.780.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	76.780.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						144.353.800,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		166.221.800,00	
		Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						144.353.800,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		166.221.800,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.600.000,00						12 Laporan	76.424.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00						12 Laporan	7.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.483.000,00						12 Paket	4.478.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.084.000,00						12 Paket	6.084.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	41.376.000,00						12 Paket	68.516.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.410.800,00						12 Paket	2.919.200,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.084.000,00							6.084.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.084.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	6.084.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.376.000,00							68.516.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	41.376.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	68.516.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.410.800,00							2.919.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.410.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	2.919.200,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.483.000,00							4.478.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.483.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	4.478.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						75.600.000,00							76.424.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	76.424.600,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.400.000,00							7.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	7.800.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.270.000,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		12.270.000,00	
		Tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.270.000,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		12.270.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.520.000,00						12 Laporan	5.520.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00						12 Laporan	6.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.520.000,00							5.520.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.520.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	5.520.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.750.000,00							6.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	6.750.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	6.750.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
		Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.786.200,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		31.786.200,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	16.786.200,00						3 Unit	16.786.200,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.786.200,00							16.786.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	1 Unit	16.786.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Unit	16.786.200,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.786.200,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		31.786.200,00	
		Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.786.200,00					Kecamatan Rawa Jitu Selatan		31.786.200,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	15.000.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Selatan
		Kecamatan Gedung Meneng						**1.942.520.586,00**							**2.450.357.910,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.942.520.586,00**							**2.450.357.910,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.942.520.586,00**							**2.450.357.910,00**	
153.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.942.520.586,00**							**2.450.357.910,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.942.520.586,00***							***2.450.357.910,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.942.520.586,00						100 %	2.450.357.910,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.750.993.586,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		2.234.563.510,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.750.993.586,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		2.234.563.510,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.855.000,00						12 Dokumen	73.855.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.677.138.586,00						14 Orang/bulan	2.160.708.510,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.677.138.586,00							2.160.708.510,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.677.138.586,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		14 Orang/bulan	2.160.708.510,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						73.855.000,00							73.855.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.855.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	73.855.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						112.861.480,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		113.774.400,00	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran						112.861.480,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		113.774.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	28.750.000,00						14 Laporan	42.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133 Laporan		133 Laporan	133 Laporan	16.844.400,00						133 Laporan	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	8.842.400,00						7 Paket	6.527.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	5.399.500,00						8 Paket	8.278.700,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	45.580.580,00						20 Paket	20.084.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	7.444.600,00						6 Paket	18.484.700,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.399.500,00							8.278.700,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	5.399.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Paket	8.278.700,00	Kecamatan Gedung Meneng

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.580.580,00							20.084.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	3 Paket	45.580.580,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		20 Paket	20.084.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.444.600,00							18.484.700,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	7.444.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		6 Paket	18.484.700,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.842.400,00							6.527.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	8.842.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		7 Paket	6.527.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						28.750.000,00							42.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan		14 Laporan	2 Laporan	28.750.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		14 Laporan	42.400.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						16.844.400,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133 Laporan		133 Laporan	12 Laporan	16.844.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		133 Laporan	18.000.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.225.520,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		52.500.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.225.520,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		52.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.525.520,00						2 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	17.700.000,00						4 Laporan	40.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.525.520,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	11.525.520,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.700.000,00							40.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	17.700.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Laporan	40.500.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
		Terlaksananya prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabiliasi						49.440.000,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		49.520.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	12.420.000,00						2 Unit	12.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.420.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	12.420.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Unit	12.500.000,00	Kecamatan Gedung Meneng

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49.440.000,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		49.520.000,00	
		Terlaksananya prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabiliasi						49.440.000,00					ASN Kecamatan Gedung Meneng		49.520.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.020.000,00						-	37.020.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.020.000,00							37.020.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	37.020.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	37.020.000,00	Kecamatan Gedung Meneng
		Kecamatan Penawar Tama						**2.062.834.763,00**							**2.176.022.094,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.062.834.763,00**							**2.176.022.094,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.062.834.763,00**							**2.176.022.094,00**	
154.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.062.834.763,00**							**2.176.022.094,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***2.062.834.763,00***							***2.176.022.094,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.062.834.763,00						100 %	2.176.022.094,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.869.864.763,00					Kecamatan Penawar Tama		1.931.867.894,00	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.869.864.763,00					Kecamatan Penawar Tama		1.931.867.894,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	50.355.000,00						100 Dokumen	73.655.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	1.819.509.763,00						100 Orang/bulan	1.858.212.894,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.869.864.763,00					Kecamatan Penawar Tama		1.931.867.894,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	50.355.000,00						100 Dokumen	73.655.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	1.819.509.763,00						100 Orang/bulan	1.858.212.894,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.819.509.763,00							1.858.212.894,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.819.509.763,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang/bulan	1.858.212.894,00	Kecamatan Penawar Tama
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						50.355.000,00							73.655.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	12 Dokumen	50.355.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Dokumen	73.655.000,00	Kecamatan Penawar Tama
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.125.000,00					Kecamatan Penawar Tama		22.125.000,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						22.125.000,00					Kecamatan Penawar Tama		22.125.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	22.125.000,00						100 Orang	22.125.000,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						22.125.000,00					Kecamatan Penawar Tama		22.125.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	22.125.000,00						100 Orang	22.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						22.125.000,00							22.125.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		100 Orang	1 Orang	22.125.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Orang	22.125.000,00	Kecamatan Penawar Tama
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						119.575.000,00					Kecamatan Penawar Tama		161.009.200,00	
		Fasilitas Kunjungan Tamu						119.575.000,00					Kecamatan Penawar Tama		161.009.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	58.660.200,00						100 Laporan	98.103.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	3.980.400,00						100 Paket	5.971.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	56.934.400,00						100 Paket	56.934.400,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						119.575.000,00					Kecamatan Penawar Tama		161.009.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	58.660.200,00						100 Laporan	98.103.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	3.980.400,00						100 Paket	5.971.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	56.934.400,00						100 Paket	56.934.400,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						119.575.000,00					Kecamatan Penawar Tama		161.009.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	58.660.200,00						100 Laporan	98.103.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	3.980.400,00						100 Paket	5.971.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	56.934.400,00						100 Paket	56.934.400,00	
		Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						119.575.000,00					Kecamatan Penawar Tama		161.009.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	58.660.200,00						100 Laporan	98.103.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	3.980.400,00						100 Paket	5.971.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	56.934.400,00						100 Paket	56.934.400,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						56.934.400,00							56.934.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	12 Paket	56.934.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	56.934.400,00	Kecamatan Penawar Tama
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.980.400,00							5.971.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	12 Paket	3.980.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Paket	5.971.600,00	Kecamatan Penawar Tama
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						58.660.200,00							98.103.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	58.660.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	98.103.200,00	Kecamatan Penawar Tama
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.750.000,00					Kecamatan Penawar Tama		19.500.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.750.000,00					Kecamatan Penawar Tama		19.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	9.750.000,00						100 Laporan	19.500.000,00	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.750.000,00					Kecamatan Penawar Tama		19.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	9.750.000,00						100 Laporan	19.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.750.000,00							19.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	9.750.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		100 Laporan	19.500.000,00	Kecamatan Penawar Tama
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.520.000,00					Kecamatan Penawar Tama		41.520.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						41.520.000,00					Kecamatan Penawar Tama		41.520.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	41.520.000,00						-	41.520.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.520.000,00							41.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	41.520.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	41.520.000,00	Kecamatan Penawar Tama
		Kecamatan Rawa Jitu Timur						**1.907.557.307,00**							**1.550.251.595,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.907.557.307,00**							**1.550.251.595,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.907.557.307,00**							**1.550.251.595,00**	
155.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.907.557.307,00**							**1.550.251.595,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.907.557.307,00***							***1.550.251.595,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.907.557.307,00						100 %	1.550.251.595,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.727.947.307,00					Pegawai ASN dan NON ASN		1.372.921.595,00	
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.727.947.307,00					Pegawai ASN dan NON ASN		1.372.921.595,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.600.000,00						12 Dokumen	77.880.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		12 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.652.347.307,00						14 Orang/bulan	1.295.041.595,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.652.347.307,00							1.295.041.595,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		12 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.652.347.307,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		14 Orang/bulan	1.295.041.595,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						75.600.000,00							77.880.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	77.880.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17.000.000,00					Pegawai ASN dan NON ASN		17.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						17.000.000,00					Pegawai ASN dan NON ASN		17.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.000.000,00						1 Paket	17.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	17.000.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						107.483.200,00					Pegawai dan Masyarakat		104.759.900,00	
		Tercapainya Administrasi Umum						107.483.200,00					Pegawai dan Masyarakat		104.759.900,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.260.000,00						4 Laporan	37.308.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00						12 Laporan	2.250.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.499.700,00						1 Paket	11.496.300,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.034.500,00						1 Paket	3.034.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	48.403.600,00						1 Paket	45.630.700,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.035.400,00						1 Paket	5.039.800,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.034.500,00							3.034.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.034.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	3.034.500,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						48.403.600,00							45.630.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	48.403.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	45.630.700,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.035.400,00							5.039.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.035.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	5.039.800,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.499.700,00							11.496.300,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.499.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	11.496.300,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						37.260.000,00							37.308.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.260.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Laporan	37.308.600,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.250.000,00							2.250.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	2.250.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.325.000,00					Pegawai dan Masyarakat		20.325.000,00	
		Tersedianya Panunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.325.000,00					Pegawai dan Masyarakat		20.325.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00						12 Laporan	7.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.125.000,00						12 Laporan	13.125.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.200.000,00							7.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	7.200.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.125.000,00							13.125.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.125.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	13.125.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34.801.800,00					Pegawai dan Masyarakat		35.245.100,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						34.801.800,00					Pegawai dan Masyarakat		35.245.100,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.630.000,00						2 Unit	18.830.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	16.171.800,00						3 Unit	16.415.100,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.171.800,00							16.415.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	1 Unit	16.171.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Unit	16.415.100,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.630.000,00							18.830.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	4 Unit	18.630.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Unit	18.830.000,00	Kecamatan Rawa Jitu Timur
		Kecamatan Banjar Margo						**2.338.215.400,00**							**2.207.070.631,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.338.215.400,00**							**2.207.070.631,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.338.215.400,00**							**2.207.070.631,00**	
156.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.338.215.400,00**							**2.207.070.631,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***2.326.215.400,00***							***2.195.070.631,00***	
			1.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.326.215.400,00						100 %	2.195.070.631,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.187.190.400,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		2.056.045.631,00	
		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.187.190.400,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		2.056.045.631,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	104.730.000,00						12 Dokumen	104.730.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.082.460.400,00						18 Orang/bulan	1.951.315.631,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.082.460.400,00							1.951.315.631,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.082.460.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		18 Orang/bulan	1.951.315.631,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						104.730.000,00							104.730.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	104.730.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	104.730.000,00	Kecamatan Banjar Margo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.000.000,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		29.000.000,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						29.000.000,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		29.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket		28 Paket	28 Paket	29.000.000,00						28 Paket	29.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						29.000.000,00							29.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket		28 Paket	29 Paket	29.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		28 Paket	29.000.000,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.688.400,00					Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		64.688.400,00	
		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah						64.688.400,00					Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		64.688.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	42.769.400,00						6 Laporan	42.800.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231 Laporan		231 Laporan	231 Laporan	9.600.000,00						231 Laporan	9.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	3.325.200,00						25 Paket	3.325.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	3.673.000,00						5 Paket	3.641.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.812.000,00						12 Paket	1.812.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.508.800,00						2 Paket	3.508.800,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.812.000,00							1.812.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	5 Paket	1.812.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Paket	1.812.000,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.508.800,00							3.508.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	6 Paket	3.508.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Paket	3.508.800,00	Kecamatan Banjar Margo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.325.200,00							3.325.200,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	15 Paket	3.325.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		25 Paket	3.325.200,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.673.000,00							3.641.600,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	3.673.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		5 Paket	3.641.600,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						42.769.400,00							42.800.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	3 Laporan	42.769.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		6 Laporan	42.800.800,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.600.000,00							9.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231 Laporan		231 Laporan	6 Laporan	9.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		231 Laporan	9.600.000,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.312.000,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		39.312.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						39.312.000,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		39.312.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.312.000,00						12 Laporan	15.312.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00						12 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00						4 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.312.000,00							15.312.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.312.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	15.312.000,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		12 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Banjar Margo
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.024.600,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		18.024.600,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.024.600,00					ASN Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang		18.024.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.024.600,00						1 Unit	18.024.600,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18.024.600,00							18.024.600,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18.024.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Unit	18.024.600,00	Kecamatan Banjar Margo
		Kecamatan Penawar Aji						**1.737.155.998,00**							**1.778.409.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.737.155.998,00**							**1.778.409.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.737.155.998,00**							**1.778.409.400,00**	
157.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.737.155.998,00**							**1.778.409.400,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.737.155.998,00***							***1.778.409.400,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.737.155.998,00						100 %	1.778.409.400,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.558.357.998,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang		1.565.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN serta Kebutuhan Administrasi Pelaksana Tugas ASN						1.558.357.998,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang		1.565.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	96.390.000,00						12 Dokumen	115.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan		10 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.461.967.998,00						12 Orang/bulan	1.450.250.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.461.967.998,00							1.450.250.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan		10 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.461.967.998,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang/bulan	1.450.250.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						96.390.000,00							115.300.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	96.390.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	115.300.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						37.125.000,00					Pegawai Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang		42.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						37.125.000,00					Pegawai Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang		42.625.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket		0 Paket	15 Paket	15.000.000,00						16 Paket	17.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	22.125.000,00						2 Orang	25.125.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						15.000.000,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket		0 Paket	15 Paket	15.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		16 Paket	17.500.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						22.125.000,00							25.125.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	22.125.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		2 Orang	25.125.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						88.379.650,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Kelompok Penyedia Belanja Barang dan Jasa Kab. Tulang Bawang		107.032.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						88.379.650,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Kelompok Penyedia Belanja Barang dan Jasa Kab. Tulang Bawang		107.032.700,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.174.800,00						12 Laporan	30.188.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.020.000,00						12 Laporan	12.240.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	7.407.800,00						8 Paket	6.528.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	5.115.400,00						8 Paket	6.325.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.002.300,00						12 Paket	45.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	6.659.350,00						8 Paket	6.250.300,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.115.400,00							6.325.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	3 Paket	5.115.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Paket	6.325.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.002.300,00							45.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.002.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Paket	45.500.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.659.350,00							6.250.300,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	3 Paket	6.659.350,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Paket	6.250.300,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.407.800,00							6.528.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	12 Paket	7.407.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		8 Paket	6.528.800,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.174.800,00							30.188.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.174.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	30.188.600,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.020.000,00							12.240.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.020.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	12.240.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.075.300,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Kelompok Penyedia Belanja Barang dan Jasa Kab. Tulang Bawang		29.089.000,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.075.300,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Kelompok Penyedia Belanja Barang dan Jasa Kab. Tulang Bawang		29.089.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.450.300,00						12 Laporan	11.464.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.625.000,00						12 Laporan	17.625.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.450.300,00							11.464.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.450.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	11.464.000,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.625.000,00							17.625.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	13.625.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	17.625.000,00	Kecamatan Penawar Aji
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.218.050,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Kelompok Penyedia Belanja Barang dan Jasa Kab. Tulang Bawang		34.112.700,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	22.554.050,00						4 Unit	25.562.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22.554.050,00							25.562.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	2 Unit	22.554.050,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Unit	25.562.700,00	Kecamatan Penawar Aji
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.218.050,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Kelompok Penyedia Belanja Barang dan Jasa Kab. Tulang Bawang		34.112.700,00	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29.218.050,00					Pegawai Kantor Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dan Kelompok Penyedia Belanja Barang dan Jasa Kab. Tulang Bawang		34.112.700,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.664.000,00						-	8.550.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.664.000,00							8.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.664.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	8.550.000,00	Kecamatan Penawar Aji
		Kecamatan Menggala Timur						**1.954.297.492,00**							**1.992.500.178,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.954.297.492,00**							**1.992.500.178,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01	**KECAMATAN**						**1.954.297.492,00**							**1.992.500.178,00**	
158.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.954.297.492,00**							**1.992.500.178,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.954.297.492,00***							***1.992.500.178,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.954.297.492,00						100 %	1.992.500.178,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.806.829.492,00					ASN Kecamatan		1.845.032.178,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.806.829.492,00					ASN Kecamatan		1.845.032.178,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	140.930.000,00						100 Dokumen	140.930.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	1.665.899.492,00						100 Orang/bulan	1.704.102.178,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.665.899.492,00							1.704.102.178,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.665.899.492,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Orang/bulan	1.704.102.178,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						140.930.000,00							140.930.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	140.930.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Dokumen	140.930.000,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.813.000,00					Peralatan dan Perlengkapan Kantor		117.803.100,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.813.000,00					Peralatan dan Perlengkapan Kantor		117.803.100,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	23.715.000,00						100 Laporan	19.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	7.114.800,00						100 Laporan	15.925.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	8.844.800,00						100 Paket	8.844.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	1.103.700,00						100 Paket	1.139.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	47.827.100,00						100 Paket	67.144.900,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	7.207.600,00						100 Paket	5.548.600,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.103.700,00							1.139.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	1.103.700,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Paket	1.139.000,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47.827.100,00							67.144.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	47.827.100,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Paket	67.144.900,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.207.600,00							5.548.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	7.207.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Paket	5.548.600,00	Kecamatan Menggala Timur

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.844.800,00							8.844.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	8.844.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Paket	8.844.800,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						23.715.000,00							19.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	23.715.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Laporan	19.200.000,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.114.800,00							15.925.800,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	7.114.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Laporan	15.925.800,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.635.000,00					Peralatan dan Perlengkapan Kantor		16.635.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.635.000,00					Peralatan dan Perlengkapan Kantor		16.635.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	4.035.000,00						100 Laporan	4.035.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	12.600.000,00						100 Laporan	12.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.035.000,00							4.035.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	4.035.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Laporan	4.035.000,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.600.000,00							12.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	12.600.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Laporan	12.600.000,00	Kecamatan Menggala Timur
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.020.000,00					Barang Milik Daerah		13.029.900,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.020.000,00					Barang Milik Daerah		13.029.900,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	100 Unit	35.020.000,00						100 Unit	13.029.900,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35.020.000,00							13.029.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	3 Unit	35.020.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Dunia Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Ekonomi Lokal		100 Unit	13.029.900,00	Kecamatan Menggala Timur
		Kecamatan Rawa Pitu						**2.057.193.002,00**							**1.803.060.520,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.057.193.002,00**							**1.803.060.520,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.057.193.002,00**							**1.803.060.520,00**	
159.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.057.193.002,00**							**1.803.060.520,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***2.057.193.002,00***							***1.803.060.520,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.057.193.002,00						100 %	1.803.060.520,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.829.905.002,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		1.575.772.520,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.829.905.002,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		1.575.772.520,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.580.000,00						12 Dokumen	45.580.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.784.325.002,00						12 Orang/bulan	1.530.192.520,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.784.325.002,00							1.530.192.520,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.784.325.002,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang/bulan	1.530.192.520,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						45.580.000,00							45.580.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.580.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	45.580.000,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.150.000,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		25.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.150.000,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		25.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.150.000,00						1 Paket	25.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						16.150.000,00							25.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	16.150.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	25.500.000,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						119.459.600,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		114.509.700,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						119.459.600,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		114.509.700,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.674.000,00						12 Laporan	47.425.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.350.000,00						12 Laporan	7.350.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.596.000,00						1 Paket	8.730.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.202.900,00						1 Paket	5.207.100,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.166.500,00						1 Paket	32.463.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.470.200,00						1 Paket	13.333.200,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.202.900,00							5.207.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.202.900,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	5.207.100,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.166.500,00							32.463.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	35.166.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	32.463.400,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.470.200,00							13.333.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.470.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	13.333.200,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.596.000,00							8.730.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.596.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	8.730.800,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.674.000,00							47.425.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50.674.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	47.425.200,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.350.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.350.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	7.350.000,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.733.000,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		31.733.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.733.000,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		31.733.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.608.000,00						12 Laporan	12.608.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.125.000,00						12 Laporan	19.125.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.608.000,00							12.608.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.608.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	12.608.000,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.125.000,00							19.125.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	19.125.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	19.125.000,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.945.400,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		55.545.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.945.400,00					ASN Kecamatan Rawa Pitu Kab. Tulang Bawang		55.545.300,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.795.400,00						2 Unit	38.395.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.150.000,00						2 Unit	2.150.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00						2 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.795.400,00							38.395.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	42.795.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Unit	38.395.300,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.150.000,00							2.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	3 Unit	2.150.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Unit	2.150.000,00	Kecamatan Rawa Pitu
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Rawa Pitu
		Kecamatan Banjar Baru						**2.047.830.326,00**							**1.847.380.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.047.830.326,00**							**1.847.380.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.047.830.326,00**							**1.847.380.000,00**	
160.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.047.830.326,00**							**1.847.380.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***2.047.830.326,00***							***1.847.380.000,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.047.830.326,00						100 %	1.847.380.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.905.125.326,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		1.665.380.000,00	
		Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN						1.905.125.326,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		1.665.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	110.380.000,00						12 Dokumen	110.380.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.794.745.326,00						12 Orang/bulan	1.555.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.794.745.326,00							1.555.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.794.745.326,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Kahuripan Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang/bulan	1.555.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						110.380.000,00							110.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	110.380.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Kahuripan Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	110.380.000,00	Kecamatan Banjar Baru
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17.000.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		20.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						17.000.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		20.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						17.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	17 Paket	17.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Kahuripan Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						89.305.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		116.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						89.305.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		116.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	27.000.000,00						60 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.305.000,00						1 Paket	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Kahuripan Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	70.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.305.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.305.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	6.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Kahuripan Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						27.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		60 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.400.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		21.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.400.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00						12 Laporan	21.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.400.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.400.000,00	Provinsi Lampung || Kab. Tulang Bawang || Kecamatan Banjar Baru || Desa Kahuripan Jaya || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	21.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16.000.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan						16.000.000,00					Pegawai Kecamatan Banjar Baru		25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	16.000.000,00						3 Unit	25.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						16.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	16.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Banjar Baru
		Kecamatan Dente Teladas						**1.806.407.127,00**							**1.524.073.244,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.806.407.127,00**							**1.524.073.244,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.806.407.127,00**							**1.524.073.244,00**	
161.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.806.407.127,00**							**1.524.073.244,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.775.573.127,00***							***1.493.239.244,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.775.573.127,00						100 %	1.493.239.244,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.670.576.727,00					Pegawai ASN DAN NON ASN		1.383.242.844,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.670.576.727,00					Pegawai ASN DAN NON ASN		1.383.242.844,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.720.000,00						12 Dokumen	123.720.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		16 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.546.856.727,00						17 Orang/bulan	1.259.522.844,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.546.856.727,00							1.259.522.844,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		16 Orang/bulan	9 Orang/bulan	1.546.856.727,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Penanggulangan Bencana		17 Orang/bulan	1.259.522.844,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						123.720.000,00							123.720.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	123.720.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		12 Dokumen	123.720.000,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						72.503.800,00					PEGAWAI DAN MASYARAKAT		72.503.800,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						72.503.800,00					PEGAWAI DAN MASYARAKAT		72.503.800,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	30.834.000,00						14 Laporan	30.834.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	10.824.200,00						7 Paket	10.824.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	10.845.600,00						8 Paket	10.845.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	20.000.000,00						20 Paket	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.845.600,00							10.845.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	10.845.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		8 Paket	10.845.600,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		20 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.824.200,00							10.824.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	10.824.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		7 Paket	10.824.200,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.834.000,00							30.834.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	30.834.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		14 Laporan	30.834.000,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.000.000,00					PEGAWAI DAN MASYARAKAT		27.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.000.000,00					PEGAWAI DAN MASYARAKAT		27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00						2 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		2 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		4 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Dente Teladas
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.326.600,00					PEGAWAI DAN MASYARAKAT		41.326.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.492.600,00						2 Unit	10.492.600,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.492.600,00							10.492.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	10.492.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		2 Unit	10.492.600,00	Kecamatan Dente Teladas
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.326.600,00					PEGAWAI DAN MASYARAKAT		41.326.600,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.326.600,00					PEGAWAI DAN MASYARAKAT		41.326.600,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	30.834.000,00						-	30.834.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.834.000,00							30.834.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	1 Unit	30.834.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas, Merata, dan Berkelanjutan		-	30.834.000,00	Kecamatan Dente Teladas
		Kecamatan Meraksa Aji						**1.686.084.892,00**							**1.600.450.268,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.686.084.892,00**							**1.600.450.268,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.686.084.892,00**							**1.600.450.268,00**	
162.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.686.084.892,00**							**1.600.450.268,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.686.084.892,00***							***1.600.450.268,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.686.084.892,00						100 %	1.600.450.268,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.542.666.892,00					Kecamatan Meraksa Aji		1.457.032.268,00	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan perangkat daerah						1.542.666.892,00					Kecamatan Meraksa Aji		1.457.032.268,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	108.430.000,00						12 Dokumen	110.430.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.434.236.892,00						12 Orang/bulan	1.346.602.268,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.434.236.892,00							1.346.602.268,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.434.236.892,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang/bulan	1.346.602.268,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						108.430.000,00							110.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	108.430.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	110.430.000,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						98.484.000,00					Kecamatan Meraksa Aji		98.484.000,00	
		Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah						98.484.000,00					Kecamatan Meraksa Aji		98.484.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.808.600,00						12 Laporan	28.808.600,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.130.000,00						1 Paket	13.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.198.400,00						1 Paket	2.198.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.350.200,00						1 Paket	2.350.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.996.800,00						1 Paket	1.996.800,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.350.200,00							2.350.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.350.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	2.350.200,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.996.800,00							1.996.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.996.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	1.996.800,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.130.000,00							13.130.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.130.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	13.130.000,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.198.400,00							2.198.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.198.400,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	2.198.400,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						28.808.600,00							28.808.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	28.808.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	28.808.600,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						13.500.000,00					Kecamatan Meraksa Aji		13.500.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						13.500.000,00					Kecamatan Meraksa Aji		13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00						12 Laporan	13.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.500.000,00							13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	13.500.000,00	Kecamatan Meraksa Aji
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.434.000,00					Kecamatan Meraksa Aji		31.434.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah yang mendukung urusan pemerintahan						31.434.000,00					Kecamatan Meraksa Aji		31.434.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	31.434.000,00						3 Unit	31.434.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						31.434.000,00							31.434.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	31.434.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Unit	31.434.000,00	Kecamatan Meraksa Aji
		Kecamatan Gedung Aji Baru						**1.843.948.605,00**							**2.000.113.805,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.843.948.605,00**							**2.000.113.805,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.843.948.605,00**							**2.000.113.805,00**	
163.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.843.948.605,00**							**2.000.113.805,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***1.843.948.605,00***							***2.000.113.805,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.843.948.605,00						100 %	2.000.113.805,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.653.803.605,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		1.695.224.105,00	
		Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Keuangan Kecamatan Gedung Aji Baru						1.653.803.605,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		1.695.224.105,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.725.000,00						12 Dokumen	151.145.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.544.078.605,00						12 Orang/bulan	1.544.078.605,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.544.078.605,00							1.544.078.605,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.544.078.605,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Orang/bulan	1.544.078.605,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						109.725.000,00							151.145.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	109.725.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	151.145.500,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.256.400,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		150.492.210,00	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Gedung Aji Baru						77.256.400,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		150.492.210,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	24.761.200,00						4 Laporan	42.895.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.826.200,00						1 Paket	23.102.090,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	42.669.000,00						4 Paket	84.494.520,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42.669.000,00							84.494.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	42.669.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Paket	84.494.520,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.826.200,00							23.102.090,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	9.826.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Paket	23.102.090,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						24.761.200,00							42.895.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	24.761.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Laporan	42.895.600,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						77.206.600,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		76.638.600,00	
		Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kecamatan Gedung Aji Baru						77.206.600,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		76.638.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.935.600,00						12 Laporan	7.365.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.271.000,00						12 Laporan	69.273.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.935.600,00							7.365.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.935.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	7.365.600,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						69.271.000,00							69.273.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	69.271.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	69.273.000,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
		Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kecamatan Gedung Aji Baru						35.682.000,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		77.758.890,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.432.000,00						1 Unit	36.046.890,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.432.000,00							36.046.890,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	8.432.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		1 Unit	36.046.890,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.682.000,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		77.758.890,00	
		Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kecamatan Gedung Aji Baru						35.682.000,00					Kecamatan Gedung Aji Baru		77.758.890,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	27.250.000,00						-	41.712.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.250.000,00							41.712.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	27.250.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		-	41.712.000,00	Kecamatan Gedung Aji Baru
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah						**7.629.642.021,00**							**8.037.797.284,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**7.629.642.021,00**							**8.037.797.284,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**7.629.642.021,00**							**8.037.797.284,00**	
164.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.862.306.763,00**							**3.893.728.500,00**	
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah						***3.862.306.763,00***							***3.893.728.500,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.862.306.763,00						100 %	3.893.728.500,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.758.096.763,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3.779.922.500,00	
		Meningkatnya penatausahaan keuangan						3.758.096.763,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		3.779.922.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.475.000,00						12 Dokumen	279.922.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		24 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.503.621.763,00						26 Orang/bulan	3.500.000.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.503.621.763,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		24 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.503.621.763,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		26 Orang/bulan	3.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						254.475.000,00							279.922.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.475.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Dokumen	279.922.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						21.079.400,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		20.712.340,00	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi						21.079.400,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		20.712.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.000.000,00						2 Paket	2.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.390.800,00						3 Paket	14.454.880,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.688.600,00						3 Paket	4.057.460,00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.390.800,00							14.454.880,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.390.800,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Paket	14.454.880,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.688.600,00							4.057.460,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	3.688.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		3 Paket	4.057.460,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		2 Paket	2.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.322.000,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		71.854.200,00	
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						65.322.000,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		71.854.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.312.000,00						12 Laporan	23.443.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.010.000,00						12 Laporan	48.411.000,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.312.000,00							23.443.200,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.312.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	23.443.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						44.010.000,00							48.411.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.010.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		12 Laporan	48.411.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.808.600,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		21.239.460,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik						17.808.600,00					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		21.239.460,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	17.808.600,00						4 Unit	21.239.460,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17.808.600,00							21.239.460,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	17.808.600,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas		4 Unit	21.239.460,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
165.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**497.415.200,00**							**547.156.720,00**	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						***497.415.200,00***							***547.156.720,00***	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80.00 Persentase		40.00 Persentase	50.00 Persentase	497.415.200,00						60.00 Persentase	547.156.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						497.415.200,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		547.156.720,00	
		Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan						497.415.200,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		547.156.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.001.000,00						1 Laporan	2.201.100,00	
			Jumlah Paskibraka	70 Orang		70 Orang	70 Orang	495.414.200,00						70 Orang	544.955.620,00	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						2.001.000,00							2.201.100,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.001.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		1 Laporan	2.201.100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						495.414.200,00							544.955.620,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	70 Orang		70 Orang	70 Orang	495.414.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		70 Orang	544.955.620,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
166.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**488.520.558,00**							**537.372.614,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik						***488.520.558,00***							***537.372.614,00***	
			999. Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	75 %		35 %	45 %	488.520.558,00						55 %	537.372.614,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						488.520.558,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		537.372.614,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase partai politik yang menerima bantuan hibah						488.520.558,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		537.372.614,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16 Orang		16 Orang	16 Orang	488.520.558,00						16 Orang	537.372.614,00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						488.520.558,00							537.372.614,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16 Orang		16 Orang	8 Orang	488.520.558,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		16 Orang	537.372.614,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
167.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**959.693.500,00**							**1.055.662.850,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						***959.693.500,00***							***1.055.662.850,00***	
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	75.00 Persentase		47.00 Persentase	54.00 Persentase	959.693.500,00						61.00 Persentase	1.055.662.850,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						959.693.500,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		1.055.662.850,00	
		Meningkatnya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan						959.693.500,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		1.055.662.850,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	959.693.500,00						-	1.055.662.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						959.693.500,00							1.055.662.850,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	1 Laporan	959.693.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		-	1.055.662.850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
168.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**187.494.800,00**							**206.244.280,00**	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat						***187.494.800,00***							***206.244.280,00***	
			999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	90 Persentase		70 Persentase	75 Persentase	187.494.800,00						80 Persentase	206.244.280,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						187.494.800,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		206.244.280,00	
		Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya						187.494.800,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		206.244.280,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	180.717.500,00						6 Laporan	198.789.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	6.777.300,00						50 Orang	7.455.030,00	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						6.777.300,00							7.455.030,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang		50 Orang	100 Orang	6.777.300,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		50 Orang	7.455.030,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						180.717.500,00							198.789.250,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	180.717.500,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		6 Laporan	198.789.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
169.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**1.634.211.200,00**							**1.797.632.320,00**	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						***1.634.211.200,00***							***1.797.632.320,00***	
			999. Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 %		100 %	100 %	1.634.211.200,00						100 %	1.797.632.320,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.634.211.200,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		1.797.632.320,00	
		Meningkatnya perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial						1.634.211.200,00					Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang		1.797.632.320,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.618.061.200,00						12 Laporan	1.779.867.320,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang		40 Orang	40 Orang	16.150.000,00						40 Orang	17.765.000,00	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						16.150.000,00							17.765.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang		40 Orang	40 Orang	16.150.000,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		40 Orang	17.765.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.618.061.200,00							1.779.867.320,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.618.061.200,00	Kab. Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Kehidupan Masyarakat yang Kondusif, Harmonis, dan Berbudaya		12 Laporan	1.779.867.320,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
	J U M L A H							**1.237.698.939.708,00**							**1.426.752.282.411,30**	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terukur dalam pencapaian kinerja tahunan pemerintahan daerah. Indikator tersebut ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhir tahun perencanaan.

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai secara spesifik tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator kinerja menjadi landasan penting dalam seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah, serta dalam menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara teknis, indikator kinerja daerah dirumuskan dengan mengacu pada indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Indikator tersebut mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan digunakan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai parameter pengendali dalam pelaksanaan RKPD sekaligus sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Penetapan IKU dan IKK juga dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah dengan target kinerja perangkat daerah, serta untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dalam konteks ini, indikator kinerja berperan penting dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui indikator kinerja yang terukur, relevan, dan konsisten, diharapkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipantau secara objektif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi

dasar dalam pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Kabupaten Tulang Bawang dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan daerah tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tingkat Kemiskinan
5	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga
6	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
7	Meningkatnya Pemerataan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
8	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Konektivitas Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
10	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Rasio Kewirausahaan Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
11	Meningkatnya Keberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Nilai Indeks Desa
12	Meningkatnya Ketersediaan dan Kecukupan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
13	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif, Akuntabel dan Berbasis Digital	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP
		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)
14	Meningkatnya Pelestarian Budaya, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan/ Dikembangkan
		Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang Ditangani
15	Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Ketangguhan Wilayah Dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Indeks Risiko Bencana (IRB)

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target Capaian 2027
1	*2*	*3*	*4*
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	70,66
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,17
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,77
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,443
5	Persentase Pemuda Aktif dalam Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	persen	29,45
6	Tingkat Kemiskinan	persen	7,00 – 8,00
7	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	persen	48,13
8	Rasio Konektivitas Kabupaten	angka	0,52
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,50 – 6,00
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	persen	35,45
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	2,90 – 3,10
12	Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	0,583
13	Nilai Indeks Desa	angka	0,7755
14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	nilai	89,23
15	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	angka	70,00
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	71,46
17	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP	indeks	94,27

No	Indikator	Satuan	Target Capaian 2027
1	*2*	*3*	*4*
18	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	indeks	0,70
19	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	indeks	4,83
20	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan/ Dikembangkan	persen	46,15
21	Persentase Potensi Konflik IPOLEKSOSBUD yang Ditangani	persen	100,00
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	66,12
23	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	80,61

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai dampak serta capaian pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Indikator ini menjadi dasar dalam menilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan disusun untuk mencerminkan kondisi, kapasitas, serta keberlanjutan pembangunan daerah secara komprehensif.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui empat aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan.

a. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek ini menggambarkan karakteristik dasar wilayah dan penduduk yang memengaruhi arah dan dinamika pembangunan daerah. Penyusunan indikator kinerja pada aspek ini bertujuan untuk memahami kondisi fisik wilayah, struktur dan dinamika kependudukan, serta potensi dan kerentanan wilayah yang berdampak terhadap perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan capaian pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan pemerataan hasil pembangunan. Capaian indikator pada aspek ini tercermin melalui indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta indikator seni, budaya, dan olahraga. Pengukuran dilakukan melalui indikator makro yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan manusia, ketertiban dan ketenteraman, pemerataan pendapatan, serta kesempatan kerja di Kabupaten Tulang Bawang.

c. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran kinerja pada aspek ini meliputi pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan

pembangunan infrastruktur, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengukuran dilakukan dengan memperhatikan dinamika aktivitas ekonomi daerah, termasuk pergerakan volume komoditas keluar dan masuk Kabupaten Tulang Bawang, serta penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari identitas dan keunggulan daerah.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja daerah disusun dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Relevan dan selaras dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggunakan indikator yang merepresentasikan capaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada isu-isu utama pembangunan daerah dan kearifan lokal sebagai keunggulan wilayah.

Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	89,23	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**	%	7,90	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3	Konsumsi Listrik Per Kapita**	kWh/kapita	0,65	PLN (Persero); Dinas Perhubungan; Dinas Lingkungan Hidup
4	Kapasitas Air Baku**	m3/detik	1,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum**	%	91,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Angka	66,12	Dinas Lingkungan Hidup
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	%	10,00	Dinas Lingkungan Hidup
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**	ton/hari	96,21	Dinas Lingkungan Hidup
9	Indeks Risiko Bencana**	angka	125,34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			Dinas Lingkungan Hidup
	Kumulatif	%	15,00	
	Tahunan	%	5,56	
11	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,23	BPS; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
13	Kepadatan Penduduk	orang/km2	148,79	BPS; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi**	%	5,50 – 6,00	BPS
2	Tingkat Kemiskinan**	%	7,00 – 8,00	BPS; Dinas Sosial
3	PDRB per Kapita	juta rupiah	73,00-73,30	BPS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	2,90 – 3,10	BPS; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	%	12,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	Indeks Gini	angka	0,238 – 0,245	BPS
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	73,15-74,02	BPS
8	Usia Harapan Hidup**	tahun	70,66	Dinas Kesehatan
9	Indeks Keluarga Sehat	angka	0,202	Dinas Kesehatan
10	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita**	%	4,27	Dinas Kesehatan
11	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Case Detection Rate/CDR)**	%	90,00	Dinas Kesehatan
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**	%	98,95	Dinas Kesehatan
13	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	78,94	Dinas Kesehatan
14	Rata-Rata Lama Sekolah**	tahun	7,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi**	%	4,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi**	%	29,78	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	63,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**	%	83,38	BPJS Ketenagakerjaan; Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi
20	Persentase Pekerja Informal	%	64,00	Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi
21	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja**	%	16,75	Dinas Sosial; Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi
22	Persentase Penurunan Konflik Sosial**	%	9,60	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama**	angka	64,18	Kementerian Agama
24	Indeks Pembangunan Kebudayaan**	angka	58,12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Indeks Perlindungan Anak**	indeks	64,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	indeks	0,443	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
27	Indeks Pembangunan Pemuda**	indeks	55,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
28	Indeks Zakat Nasional (IZN)	indeks	0,26	BAZNAS

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
29	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	indeks	59,53	Dinas Sosial
30	Indeks Lansia Berdaya	indeks	60,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; Dinas Sosial
31	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	indeks	67,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
32	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	17,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
33	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	%	96,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
34	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	88,00	
35	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	83,00	
36	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	88,00	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Angka Ketergantungan	%	49,01	BPS
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan**	%	25,56	BPS; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum**	%	1,41	BPS; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)**	ribu orang	0,011	BPS; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif**	%	0,66	BPS
6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level Kabupaten**	%	53,80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
7	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Level Kabupaten**	%	52,00	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
8	Rasio Kewirausahaan**	%	0,583	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
9	Return on Aset (ROA) BUMD**	%	1,21	Bag. Perekonomian dan SDA
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)*	%	72,73	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	%	52,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Indeks Inovasi Daerah**	indeks	59,83	Bapperida
13	Indeks Ekonomi Hijau Daerah**	indeks	31,85	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
14	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	indeks	2,46	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten**	%	1,70	BPS; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**	%	35,45	BPS; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Ekspor Barang dan Jasa**	%	-1,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
18	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	indeks	3,290	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**	%	41,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Persentase Desa Mandiri**	%	30,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB**	%	0,244	Badan Pendapatan Daerah
22	Inklusi Keuangan**	%	44,75	Bag. Perekonomian dan SDA
23	Efektivitas Kerjasama Daerah	%	76,80	Bag. Hukum dan Kerjasama
24	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	indeks	0,39	Dinas Lingkungan Hidup
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Hukum**	indeks	90,03	Bag. Hukum dan Kerjasama
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	55,38	Bag. Organisasi
3	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks PemDi)	indeks	0,70	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks Pelayanan Publik**	indeks	4,83	Bag. Organisasi
5	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	Satuan Pol PP
6	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	indeks	70,00	Bag. Organisasi; Inspektorat; Baperida

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*
7	Angka Kriminalitas (Crime Rate)**	%	13,90	POLRES Tulang Bawang; Satuan Pol PP
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya**	%	83,25	BPS; Satuan Pol PP
9	Indeks Demokrasi Indonesia**	angka	62,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
10	Indeks Integritas Nasional (Hasil Suvey Penilaian Integritas oleh KPK)**	angka	76,10	KPK; Inspektorat
11	Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,56	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Bapperida

*Keterangan : **Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD 2025-2045*



BAB VII
PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

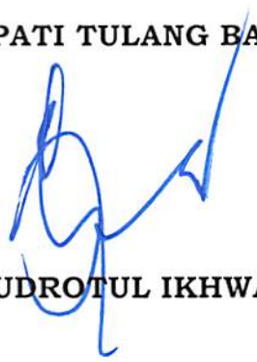
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan. RKPD ini merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2029, yang disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027.

Dengan mengusung tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang yang Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah, Investasi Inklusif, dan Industri Berbasis Potensi Lokal",** RKPD Tahun 2027 memuat strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan yang dirancang untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Substansi RKPD ini diharapkan mampu menjawab berbagai isu dan tantangan strategis pembangunan daerah secara responsif dan adaptif.

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Oleh karena itu, RKPD ini wajib dijadikan acuan oleh seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan guna memastikan ketercapaian sasaran dan target pembangunan pada setiap urusan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 sangat bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, serta masyarakat. Dukungan aktif dari seluruh elemen tersebut, disertai dengan semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab bersama, menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

BUPATI TULANG BAWANG,



QUDROTUL IKHWAN BY